BUKU

1

GUBERNUR ACEH

# PERATURAN GUBERNUR ACEH
# NOMOR 17 TAHUN 2023

## TENTANG
## RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH

# RKPA

## TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI ACEH
TAHUN 2023

# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan..../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN : ..../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 memuat :
   a. Rancangan kerangka ekonomi Aceh;
   b. Prioritas program Aceh;
   c. Rencana kerja; dan
   d. Pendanaan dan prakiraan maju termasuk didalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Aceh Tahun 2024.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
   a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) Tahun 2024;
   b. pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
   c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Juni 2023
8 Dzulhijjah 1444

PJ. GUBERNUR ACEH,

HACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Juni 2023
8 Dzulhijjah 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 17

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ---------- i
**DAFARA TABEL** ---------- v
**DAFTAR GAMBAR** ---------- xi

**BAB I PENDAHULUAN** ---------- I - 1
1.1. Latar Belakang ---------- I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---------- I - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ---------- I - 7
1.4. Maksud dan Tujuan ---------- I - 9
1.5. Sistematika Dokumen RKPA ---------- I - 9

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH** ---------- II - 1

2.1. Gambaran Umum Aceh ---------- II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- II - 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ---------- II - 1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ---------- II - 1
2.1.1.1.2. Topografi ---------- II - 2
2.1.1.1.3. Geologi ---------- II - 3
2.1.1.1.4. Hidrologi ---------- II - 4
2.1.1.1.5. Klimatologi ---------- II - 9

2.1.1.2. Demografi ---------- II - 10
2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk ---------- II - 10
2.1.1.2.2. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk ---------- II - 16

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah ---------- II - 18
2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana ---------- II - 20
2.1.1.5. Sosiologi ---------- II - 24

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- II - 24
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ---------- II - 24
2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB ---------- II – 24
2.1.2.1.2. Laju Inflasi ---------- II - 27
2.1.2.1.3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi Aceh ---------- II - 28
2.1.2.1.4. Pendapatan Perkapita ---------- II - 33
2.1.2.1.5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) ---------- II - 34
2.1.2.1.6. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional) ---------- II - 36
2.1.2.1.7. Kemiskinan ---------- II - 37
2.1.2.1.8. Pengangguran ---------- II - 43

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ---------- II - 44
2.1.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ---------- II - 44
2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah ---------- II - 46

2.1.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI) ---------- II - 47
2.1.2.2.4. Angka Kematian Bayi (AKB)---------- II - 48
2.1.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup ---------- II - 49
2.1.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)------- II - 50

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya---------- II - 51

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum---------- II - 55
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh ---------- II - 55
2.1.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama--- II - 55
2.1.3.1.1.1.Syariat Islam ---------- II - 55
2.1.3.1.1.2.Pelaksanaan Ibadah ---------- II - 58
2.1.3.1.2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat ---------- II - 59
2.1.3.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan ---------- II - 59
2.1.3.1.4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah---------- II - 61
2.1.3.1.5. Perdamaian ---------- II - 63
2.1.3.1.6. Indeks Demokrasi Indonesia (kesbangpol) II - 64

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib ---------- II - 65
2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar---------- II - 65
2.1.3.2.1.1. Pendidikan ---------- II - 65
2.1.3.2.1.2. Kesehatan ---------- II - 71
2.1.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ---------- II - 75
2.1.3.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman ---------- II - 99
2.1.3.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ---------- II - 101
2.1.3.2.1.6 Sosial ---------- II - 104

2.1.3.2.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar ---------- II - 107
2.1.3.2.2.1. Ketenagakerjaan---------- II - 107
2.1.3.2.2.2. Pangan ---------- II - 115
2.1.3.2.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak---------- II - 116
2.1.3.2.2.4. Pertanahan ---------- II - 121
2.1.3.2.2.5. Lingkungan Hidup ---------- II - 126
2.1.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ---------- II - 128
2.1.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ---------- II - 133
2.1.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana---------- II - 136
2.1.3.2.2.9. Perhubungan ---------- II - 137
2.1.3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika ---------- II - 143
2.1.3.2.2.11. Persandian ---------- II - 144
2.1.3.2.2.12. Statistik ---------- II - 145
2.1.3.2.2.13. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II - 146
2.1.3.2.2.14. Penanaman Modal ---------- II - 148
2.1.3.2.2.15. Kepemudaan dan Olah Raga ---------- II - 150
2.1.3.2.2.16. Kebudayaan ---------- II - 154
2.1.3.2.2.17. Perpustakan ---------- II - 155

2.1.3.2.2.18. Kearsipan ---------- II - 159
2.1.3.2.2.19. Gedung dan Pembangunan Terbengkalai ---------- II - 162

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan ---------- II - 164
2.1.3.3.1. Pariwisata ---------- II - 164
2.1.3.3.2. Pertanian ---------- II - 167
2.1.3.3.3. Perkebunan ---------- II - 169
2.1.3.3.4. Peternakan ---------- II - 174
2.1.3.3.5. Kehutanan ---------- II - 179
2.1.3.3.6. Energi dan Sumber Daya Mineral ---------- II - 189
2.1.3.3.7. Perdagangan ---------- II - 201
2.1.3.3.8. Perindustrian ---------- II - 203
2.1.3.3.7. Kelautan dan Perikanan ---------- II - 202
2.1.3.3.10. Transmigrasi ---------- II - 208

2.1.3.4. Penunjang Urusan ---------- II - 209
2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan ---------- II - 209
2.1.3.4.2. Keuangan ---------- II - 211
2.1.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ---------- II - 212
2.1.3.4.4. Penelitian Pengembangan ---------- II - 215
2.1.3.4.5. Pengawasan ---------- II - 215
2.1.3.4.6. Sekretariat DPRD ---------- II - 216

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ---------- II - 216
2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) ---------- II - 216
2.1.4.2. Fokus Kemampuan Daerah ---------- II - 214
2.1.4.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ---------- II - 215
2.1.4.2.2. Nilai Tukar Petani ---------- II - 215
2.1.4.2.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan ---------- II - 221
2.1.4.2.4. Keterbukaan Ekonomi ---------- II - 221
2.1.4.2.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank ---------- II -222

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ---------- II - 223
2.1.4.3.1. Indeks Aksebilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh ---------- II - 224
2.1.4.3.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Bersih ---------- II - 225
2.1.4.3.3. Rasio Ketersediaan Daya listrik ---------- II - 228
2.1.4.3.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ---------- II - 228

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA dan Realisasi RPJMA ---------- II - 229
2.2.1. Realisasi Pendanaan ---------- II - 229
2.2.1.1. Realisasi Pendapatan ---------- II - 230
2.2.1.2. Realisasi Belanja ---------- II - 230
2.2.1.3. Realsisasi Pembiayaan ---------- II - 237

2.2.1.4. Trend APBA ---------- II - 238

2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan/Kegiatan -- II - 239
2.2.2.1. Metode Evaluasi ---------- II - 239
2.2.2.2. Hasil Evaluasi ---------- II - 240
2.2.2.2.1. Capaian Anggaran ---------- II - 240
2.2.2.2.2. Capaian Kinerja ---------- II - 258

2.2.3. Capaian Indikator Makro Terhadap RKPA Tahun 2022 ---------- II - 258
2.2.3.1. Capaian Tahun 2021 ---------- II - 258
2.2.3.2. Capaian Tahun 2022 ---------- II - 265

2.2.4. Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Terhadap RKPA Tahun 2022 ---------- II - 268
2.2.4.1. Capaian Tahun 2021 ---------- II - 268
2.2.4.2. Capaian Tahun 2022 ---------- II - 271

2.2.3. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan---- II - 285
2.2.3.1. Realisasi Pendanaan ---------- II - 285
2.2.3.2. Realisasi Pendapatan ---------- II - 286
2.2.3.3. Realisasi Belanja ---------- II - 290
2.2.3.4. Realisasi Pembiayaan ---------- II - 292
2.2.3.5. Trend APBA ---------- II - 289
2.2.3.6. Metode Evaluasi ---------- II - 294
2.2.3.7. Capaian Anggaran ---------- II - 295
2.2.3.8. Capaian Kinerja ---------- II - 322

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 ---------- II - 323
2.3.1. Bidang Urusan Pendidikan ---------- II - 323
2.3.2. Bidang Urusan Kesehatan ---------- II - 327
2.3.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum ---------- II - 332
2.3.3.1. Sub Urusan Air Minum ---------- II - 333
2.3.3.2. Sub Urusan Limbah ---------- II - 335
2.3.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat ---------- II - 338
2.3.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ---------- II - 342
2.3.6. Bidang Urusan Sosial ---------- II - 346

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs ---------- II - 357
2.4.1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun ---------- II - 358
2.4.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan ---------- II - 363
2.4.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia -------- II - 364
2.4.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inkslusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua ---------- II - 365

2.4.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan ---------- II - 367
2.4.6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua --------- II - 371
2.4.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua ---------- II - 371
2.4.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua ---------- II - 375
2.4.9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi ---------- II - 376
2.4.10. Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar Negara ----- II - 377
2.4.11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman,Tangguh dan Berkelanjutan ---------- II - 378
2.4.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan ---------- II - 380
2.4.13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya ---------- II - 381
2.4.14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan ---------- II - 381
2.4.15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati -- II - 383
2.4.16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh ---------- II - 384
2.4.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan ---------- II - 385

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ---------- II - 386
2.5.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- II - 386
2.5.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- II - 387
2.5.3. Aspek Pelayanan Umum ---------- II - 389
2.5.4. Aspek Daya Saing Daerah ---------- II - 400

2.6. Isu Strategis ---------- II - 407
2.6.1. Peningkatan Kualitas Demokrasi ---------- II - 407
2.6.2. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam --------- II - 407
2.6.3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia ---------- II - 408
2.6.4. Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Masih Minim ---------- II - 408
2.6.5. Pengembangan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masih Terhambat ---------- II - 409
2.6.6. Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan ------ II - 410
2.6.7. Mitigasi dan Penanganan Bencana ---------- II - 410
2.6.8. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem ---------- II - 411

2.6.9. Optimalisasi Kemandirian Pangan ---------- II - 411
2.6.10. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis------- II - 411
2.6.11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur ---------- II - 412

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH** ---------- III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Aceh ---------- III - 1
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ---------- III - 1
3.1.2. Inflasi ---------- III - 3
3.1.3. Gini Ratio ---------- III - 7
3.1.4. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim ---------- III - 9
3.1.5. Pengangguran ---------- III - 13

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh ---------- III - 17
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh ---------- III - 17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh ---------- III - 19
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh ---------- III - 22

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH** ---------- IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ---------- IV - 1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ---------- IV - 1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh ---------- IV - 2

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 ---------- IV - 22
4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2024 ------ IV - 22
4.2.2. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran ---------- IV - 28
4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2024 ---------- IV - 30
4.2.4. Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 ---------- IV - 48
4.2.5. Keselaran Prioritas Aceh (PA) terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 ---------- IV - 109

4.3. Pemenuhan SPM ---------- IV - 165

4.4. Inovasi ---------- IV - 177
4.4.1. Inovasi dengan Tahapan Penerapan ---------- IV - 177
4.4.2. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh ---------- IV - 179
4.4.3. Capaian Pemerintah Aceh dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 ---------- IV - 179

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA** ------- V - 1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota ---------- V - 1
5.1.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 ---------- V - 1
5.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ---------- V - 1
5.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi ---------- V - 3
5.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) --------- V - 5
5.1.1.4. Persentase Penduduk Miskin ---------- V - 7
5.1.2. Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Aceh ---------- V - 9
5.2. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota ---------- V - 14

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH**---------- VI - 1
6.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun 2024 ---------- VII - 1
6.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun 2024---------- VII -19

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH** ---------- VII - 1

**BAB VIII PENUTUP** ---------- VIII - 1

**LAMPIRAN I - HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPA TAHUN 2021 DAN REALISASI RPJMA 2017-2022**

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan Tahun 2017 II - 5

Tabel 2.2. Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016---------- II - 6

Tabel 2.3. Potensi Danau Aceh ---------- II - 7

Tabel 2.4. Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh ---------- II - 8

Tabel 2.5. Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Tahun 2015-2021 ---------- II - 9

Tabel 2.6. Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021---------- II - 10

Tabel 2.7. Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 ---------- II - 11

Tabel 2.8. Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022---------- II - 12

Tabel 2.9. Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019-2022 ---------- II - 14

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 ---------- II - 15

Tabel 2.11. Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2021 ---------- II - 21

Tabel 2.12. Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan UsahaTahun 2018-2022---------- II - 26

Tabel 2.13. Perkembangan Inflasi Umum Aceh,Tahun 2018 - 2022 (Persen) II - 30

Tabel 2.14. Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017- 2021 ---------- II - 35

Tabel 2.15. Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2017-2021 (Persen) ---------- II - 40

Tabel 2.16. Perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2017-2021 (Persen)an; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran ---------- II - 43

Tabel 2.17. Perkembangan Distribusi TPT di kabupaten/kota di Aceh Tahun 2017-2022---------- II - 44

Tabel 2.18. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 45

Tabel 2.19. Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2018 – 2022---------- II - 46

Tabel 2.20. Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 46

Tabel 2.21. Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 50

Tabel 2.22. Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2022 ---------- II - 53

Tabel 2.23. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 56

Tabel 2.24. Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 57
Tabel 2.25. Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2023---------- II - 58
Tabel 2.26. Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2018 – 2022 II - 59
Tabel 2.27. Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 61
Tabel 2.28. Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2022---------- II - 63
Tabel 2.29. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 – 2021 ---------- II - 64
Tabel 2.30. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2022 -------- II - 65
Tabel 2.31. Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2018 – 2022 ---- II - 67
Tabel 2.32. Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2022 ---------- II - 70
Tabel 2.33. Angka Kematian Neonatus Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 71
Tabel 2.34. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2022----- II - 72
Tabel 2.35. Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk di Aceh Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 72
Tabel 2.36. Prevalensi Gizi Buruk di Aceh Tahun 2019 – 2022 ---------- II - 72
Tabel 2.37. Bed Occupancy Rate (BOR) Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 74
Tabel 2.38. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2022----- II - 75
Tabel 2.39. Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk di Aceh Tahun 2018 – 2022 II - 75
Tabel 2.40. Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2018 – 2022---------- II - 77
Tabel 2.41. Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2016-2022 ------ II - 78
Tabel 2.42. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2018-2022 ---------- II - 79
Tabel 2.43. Prediksi Kondisi Mantap Ruas Jalan MYC---------- II - 82
Tabel 2.44. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2022---------- II - 84
Tabel 2.45. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2022 ---------- II - 85
Tabel 2.46. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033---------- II - 87
Tabel 2.47. Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2020---------- II - 88
Tabel 2.48. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya ---------- II - 90
Tabel 2.49. Jenis Irigasi dan Luasannya ---------- II - 90
Tabel 2.50. Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota---------- II - 91

Tabel 2.51. Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan -- II - 92
Tabel 2.52. Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan ---------- II - 92
Tabel 2.53. Capaian Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2018-2022---------- II - 93
Tabel 2.54. Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2018-2022 ---------- II - 97
Tabel 2.55. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 s.d 2022---------- II - 100
Tabel 2.56. Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021---------- II - 100
Tabel 2.57. Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM danYayasan/Perkumpulan yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2017 – 2022-------- II - 102
Tabel 2.58. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh 2013-2021---------- II - 104
Tabel 2.59. Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2022---------- II - 105
Tabel 2.60. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 107
Tabel 2.61. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020—Agustus 2022---------- II - 108
Tabel 2.62. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2018-2022---------- II - 109
Tabel 2.63. Izin Lokasi Lintas lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi---------- II - 124
Tabel 2.64. Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 128
Tabel 2.65. Kepemilikan KTP-Elektronik di Aceh Tahun 2022 ---------- II - 129
Tabel 2.66. Kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun di Aceh Tahun 2022 ---------- II - 130
Tabel 2.67. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Aceh Tahun 2022---------- II - 132
Tabel 2.68. Status Desa Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2022---------- II - 134
Tabel 2.69. Alokasi Dana Desa Tahun 2018 – 2022---------- II - 135
Tabel 2.70. Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2022---------- II - 136
Tabel 2.71. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2022 -- II - 140
Tabel 2.72. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021 ---------- II - 140
Tabel 2.73. Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2021---------- II - 141
Tabel 2.74. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2022---------- II - 142
Tabel 2.75. Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2022---------- II - 143

Tabel 2.76. Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2018 – 2023 ---------- II - 146
Tabel 2.77. Kinerja Pembangunan Kewirausahaan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022---------- II - 147
Tabel 2.78. Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018-2022---------- II - 148
Tabel 2.79. Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 150
Tabel 2.80. Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 152
Tabel 2.81. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2018 – 2022 -- II - 155
Tabel 2.82. Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh Tahun 2022---------- II - 158
Tabel 2.83. Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022---------- II - 158
Tabel 2.84. Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 – 2022 -------- II - 159
Tabel 2.85. Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 160
Tabel 2.86. Jumlah Fungsional Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022---------- II - 162
Tabel 2.87. Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional)---------- II - 163
Tabel 2.88. Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota ---------- II - 164
Tabel 2.89. Perkembangan Produksi perkebunan Aceh, 2016 - 2020 (Ton)---- II - 173
Tabel 2.90. Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2016 – 2021---------- II - 176
Tabel 2.91. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020 ---------- II - 178
Tabel 2.92. Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya ---------- II - 179
Tabel 2.93. Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya ---------- II - 181
Tabel 2.94. Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2013 s.d. 2022. ---------- II - 182
Tabel 2.95. Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2022 ---------- II - 183
Tabel 2.96. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2022---------- II - 184
Tabel 2.97. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2016-2022 (dalam Miliar Rupiah)---------- II - 185
Tabel 2.98. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2016-2022---------- II - 186
Tabel 2.99. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2021---------- II - 187

Tabel 2.100. Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh ---------- II - 188
Tabel 2.101. Capaian Izin Perhutanan Sosia Aceh Tahun 2017 - 2022.---------- II - 189
Tabel 2.102. Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2020 ---------- II - 191
Tabel 2.103. Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting ---------- II - 191
Tabel 2.104. Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)---------- II - 192
Tabel 2.105. Rencana Pembangunan Pembangkit ---------- II - 193
Tabel 2.106. Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2020 ---------- II - 196
Tabel 2.107. Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2018-2022---------- II - 202
Tabel 2.108. Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh Tahun 2017-2021---- II - 204
Tabel 2.109 Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020---------- II - 208
Tabel 2.110 Predikat WTP Kabupaten Kota 2022 ---------- II - 211
Tabel 2.111. Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2018 – 2022---------- II - 212
Tabel 2.112 Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2018 – 2022-------- II - 212
Tabel 2.113. Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2022 pada 21 Jenjang Pendidikan ---------- II - 213
Tabel 2.114. Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020 ---------- II - 214
Tabel 2.115. Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016 - 2020---------- II - 214
Tabel 2.116. Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2021 pada 21 Jenjang Pendidikan ---------- II - 215
Tabel 2.117. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019 ---------- II - 224
Tabel 2.118. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2022 ---------- II - 225
Tabel 2.119 Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2015-2019 ---------- II - 228
Tabel 2.120 Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2022 ---------- II - 229
Tabel 2.121. Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2022 ---------- II - 230
Tabel 2.122. Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2022 ---------- II - 235
Tabel 2.123. Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2022---------- II - 238
Tabel 2.124. Kriteria Kinerja ---------- II - 240
Tabel 2.125. Tingkat Capaian Realisasi RPJMA (2018 s.d. 2022) ---------- II - 241
Tabel 2.126. Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2022 Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah ---------- II - 242
Tabel 2.127. Tingkat Capaian Realisasi RPJMA 2018-2022 ---------- II - 250

Tabel 2.128. Capaian Indikator Tahun 2021 Terhadap Proyeksi RKPA 2022 -- II - 264
Tabel 2.129. Capaian Indikator Tahun 2022 Terhadap Target RKPA 2022 ----- II - 267
Tabel 2.130. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2021 Terhadap Proyeksi RKPA Tahun 2022---------- II - 269
Tabel 2.131. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/KotaTahun 2022 Terhadap Target RKPA Tahun 2022---------- II - 272
Tabel 2.132. Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2022 ---------- II - 276
Tabel 2.133. Capaian Indikator Tahun 2021 Terhadap Target RKPA 2021 ----- II - 282
Tabel 2.134. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2021 Terhadap Target RKPA Tahun 2021---------- II - 283
Tabel 2.135. Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2021 ---------- II - 286
Tabel 2.136. Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2021 ---------- II - 287
Tabel 2.137. Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2021---------- II - 291
Tabel 2.138. Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2021---------- II - 292
Tabel 2.139. Kriteria Kinerja ---------- II - 294
Tabel 2.140. Tingkat Capaian Realisasi RPJMA (2018 s.d. 2022) ---------- II - 295
Tabel 2.141 Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2021 Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah ---------- II - 297
Tabel 2.142. Tingkat Capaian Realisasi RPJMA 2018-2022 ---------- II - 306
Tabel 2.143. Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2021 ---------- II - 322
Tabel 2.144. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2024---------- II - 324
Tabel 2.145. Pencapaian Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2022---------- II - 324
Tabel 2.146. Pencapaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022---------- II - 325
Tabel 2.147. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021 ---------- II - 328
Tabel 2.148. Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Tahun 2022 ---------- II - 328
Tabel 2.149. Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2022---------- II - 329
Tabel 2.150. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Aceh Tahun 2021 ---------- II - 333
Tabel 2.151 Jenis Pelayanan Menurut Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 ---- II - 333
Tabel 2.152. Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Air Minum Provinsi Aceh Tahun 2021 ---------- II – 334

Tabel 2.153 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota ---------- II - 335
Tabel2.154. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Sub Urusan Air Limbah Tahun 2021 ---------- II - 336
Tabel 2.155. Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Penanganan Air Limbah Tahun 2021 ---------- II - 336
Tabel 2.156. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2021 ---------- II - 338
Tabel 2.157. Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat-------- II - 339
Tabel 2.158. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Aceh Tahun 2021 ---------- II - 340
Tabel 2.159. Rumah Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh dari Tahun 2008 s.d 2021 2017 s.d 2022---------- II - 342
Tabel 2.160. Target dan Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh Tahun 2024 ---------- II - 343
Tabel 2.161. Target dan Indikator Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022 ---------- II - 343
Tabel 2.162 Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022---------- II - 344
Tabel 2.163. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial---------- II - 346
Tabel 2.164. Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Sosial Sub Bidang Pemberdayaan Sosial ---------- II - 349
Tabel 2.165. Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidanag Sosial Sub Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan ---------- II - 350
Tabel 2.166. Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidanag Sosial Sub Bidang Rehabilitasi Sosial ---------- II - 351
Tabel 2.167. Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidanag Sosial Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ---------- II - 352
Tabel 2.168. Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidanag Sosial Sub Bidang Penanganan Bencana---------- II - 353
Tabel 2.169. Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidanag Sosial Sub Bidang Taman Makan Pahlawan ---------- II - 354
Tabel 2.170. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial---------- II - 355
Tabel 2.171. Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidanag Sosial Sub Bidang Trans Sosial ---------- II - 356
Tabel 2.172. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan)---------- II - 361
Tabel 2.173. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 5 Kesetaraan Gender) ---------- II - 369

Tabel 2.174. Predikat WTP Kabupaten Kota 2020 ---------- II - 384
Tabel 2.175 Permasalahan Pembangunan Aceh yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ---------- II - 402

Tabel 3.1. Inflasi Berdasarkan Kelompok Periode April 2023 (yoy) ---------- III - 5
Tabel 3.2. Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2024 ---------- III - 16
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2021-2025 ---------- III - 18
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2021-2025 - III - 20
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2021-2025 ---------- III - 23
Tabel 3.6. Proyeksi/Target Belanja Aceh Per SKPA Tahun 2024 ---------- III - 24

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024 ---------- IV - 6
Tabel 4.2. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Aceh dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 ---------- IV - 15
Tabel 4.3. Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024 ---------- IV - 22
Tabel 4.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2024 ---------- IV - 36
Tabel 4.5. Target Indikator Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024 ------ IV - 49
Tabel 4.6. Keterkaitan Prioritas Aceh (PA) dengan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2024 ---------- IV - 58
Tabel 4.7. Keterkaitan Prioritas Aceh (PA) dengan Pokok Pokok Pikiran DPRA ---------- IV - 62
Tabel 4.8. Keterkaitan Prioritas Aceh (PA) dengan Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 ---------- IV - 64
Tabel 4.9. Program Prioritas Pendukung PA 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif---------- IV - 70
Tabel 4.10. Program Prioritas Pendukung PA 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing---------- IV - 79
Tabel 4.11. Program Prioritas Pendukung PA 3 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan ---------- IV - 83
Tabel 4.12. Program Prioritas Pendukung PA 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh---------- IV - 89
Tabel 4.13. Program Prioritas Pendukung PA 5: Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh Sumut Tahun 2024 ---------- IV - 94
Tabel 4.14. Keterkaitan Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 ---------- IV - 97

Tabel 4.15. Keselarasan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 ---------- IV - 110
Tabel 4.16. Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 1 RKP Tahun 2024---------- IV - 111
Tabel 4.17. Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 2 RKP Tahun 2024---------- IV - 126
Tabel 4.18. Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 3 RKP Tahun 2024---------- IV - 131
Tabel 4.19. Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 4 RKP Tahun 2024---------- IV - 147
Tabel 4.20. Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 5 RKP Tahun 2024---------- IV - 153
Tabel 4.21. Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 6 RKP Tahun 2024---------- IV - 160
Tabel 4.22. Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ------- IV - 166
Tabel 4.23. Target dan Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024-------- IV - 168
Tabel 4.24. Target dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ---------- IV - 168
Tabel 4. 25. Target dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024---------- IV - 169
Tabel 4.26. Target dan Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024---------- IV - 168
Tabel 4.27. Target dan Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2024 ---------- IV - 172

Tabel 5.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2021------ V - 4
Tabel 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten 2022 ------- V - 6
Tabel 5.3. Tingkat Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2022---------- V - 8
Tabel 5.4. Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten/ Kota se-Aceh Tahun 2024 ---------- V - 12
Tabel 5.5. Wilayah Pengembangan di Provinsi Aceh ---------- V - 16
Tabel 5.6. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Wilayah Pengembangan Aceh Tahun 2024---------- V - 25

Tabel 6.1. Hasil Desk Kewilayahan Aceh pada RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2023---------- VI - 3
Tabel 6.2. Hasil Pembahasan Desk Aceh pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023---------- VI - 9
Tabel 6.3. Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 ---------- VI - 20

Tabel 7.1. Target Indikator Makro Pembangunan Aceh Tahun 2024 --------- VII - 2
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2024 ---- VII - 2
Tabel 7.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2024 --- VII - 6

Tabel 8.1. Target Indikator Makro Pembangunan Aceh Tahun 2023 --------- VIII - 1
Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2023 ---- VIII - 2
Tabel 8.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2023 --- VIII - 5

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan ---------- I - 2
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh ---------- II - 2
Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016 ---------- II - 4
Gambar 2.3. Gambar Rata-rata Curah Hujan Tertinggi ---------- II - 9
Gambar 2.4. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2022 (jiwa) ---------- II - 17
Gambar 2.5. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh ---------- II - 21
Gambar 2.6. Lapisan Tanah Pasir di Gua Eek Lunttie Aceh Besar sejak 7500 Tahun Lalu ---------- II - 24
Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2016-2021 dengan Migas dan Tanpa Migas (persen) ---------- II - 26
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016-2022 (Persen) ---------- II - 27
Gambar 2.9. Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021 - II - 29
Gambar 2.10. Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2022 ---------- II - 34
Gambar 2.11. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2018-2023 ---- II - 37
Gambar 2.12. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000 – 2022 ---------- II - 38
Gambar 2.13. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September) ---------- II - 41
Gambar 2.14. Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2022 ---- II - 42
Gambar 2.15. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 48
Gambar 2.16. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018–2022 ---------- II - 49
Gambar 2.17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2022 ---------- II - 50
Gambar 2.18. Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017 ---------- II - 56
Gambar 2.19. Penerbitan Sertifikal Halal 2018 – 2022 ---------- II - 63
Gambar 2.20. Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2022 ---------- II - 69
Gambar 2.21. Penanganan Jalan Lintas Strategis Menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak (multy years contract/MYC) Tahun 2020-2022 ---------- II - 80
Gambar 2.22. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2018 -2022 ---------- II - 84
Gambar 2.23. Pembagian Wilayah Sungai Aceh ---------- II - 98

Gambar 2.24. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 106
Gambar 2.25. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2022 ---------- II - 111
Gambar 2.26. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022 ---------- II - 112
Gambar 2.27. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020—Agustus 2022 ---------- II - 113
Gambar 2.28. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020—Agustus 2022 ---------- II - 114
Gambar 2.29. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2022 ---- II - 115
Gambar 2.30. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019 ---------- II - 116
Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2017 – 2021 ------ II - 117
Gambar 2.32. Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2017 – 2021 ----- II - 117
Gambar 2.33. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR RI, DPD, DPR Aceh, dan DPRK) ---------- II - 118
Gambar 2.34. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen ---------- II - 119
Gambar 2.35. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di AcehYang terlapor pada UPTD PPA Tahun 2017 – 2022------ II - 120
Gambar 2.36. Jumlah Kasus dan Penyebab Perceraian yang Diselesaikan di Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2018 – 2021 ---------- II - 121
Gambar 2.37. Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021 ---------- II - 123
Gambar 2.38. Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 ---------- II - 124
Gambar 2.39. Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh ---------- II - 126
Gambar 2.40. Status Desa di Aceh Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 133
Gambar 2.41. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2014-2022 ---------- II - 137
Gambar 2.42. Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2014-2022 ---------- II - 138
Gambar 2.43. Prasarana Transportasi Aceh ---------- II - 139
Gambar 2.44. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2014-2022 ---------- II - 141
Gambar 2.45. Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018 – 2022---------- II - 156
Gambar 2.46. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2021 ---------- II - 157
Gambar 2.47. Jumlah Pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 161

Gambar 2.48. Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi ------ II - 166
Gambar 2.49. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2022 ---------- II - 167
Gambar 2.50. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Aceh -- II - 168
Gambar 2.51. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen) Tahun 2018 – 2022 ---------- II - 169
Gambar 2.52. PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2021---------- II - 170
Gambar 2.53. Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2022 ---------- II - 170
Gambar 2.54. Tabel Capaian Produksi Gabah Aceh---------- II - 171
Gambar 2.55. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020 ---------- II - 172
Gambar 2.56. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Aceh 2016-2020 (ha) ---------- II - 173
Gambar 2.57. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2021 ---------- II - 174
Gambar 2.58. Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2016 – 2021---------- II - 175
Gambar 2.59. Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia, Daging Unggas dan Produksi Telur (kg) di Aceh. Tahun 2016- 2020 - II - 177
Gambar 2.60. Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017---------- II - 180
Gambar 2.61. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh---------- II - 190
Gambar 2.62. Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2020 ---------- II - 196
Gambar 2.63. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2021 ---------- II - 197
Gambar 2.64. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017-2021 (persen) ---------- II - 199
Gambar 2.65. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017 – 2021 (persen) ---------- II - 200
Gambar 2.66. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018-2022---------- II - 201
Gambar 2.67. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2018-2022---------- II - 203
Gambar 2.68. Perkembangan Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2016-2020 (Triliun) ---------- II - 205
Gambar 2.69. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Aceh Tahun 2016-2020---------- II - 206

Gambar 2.70. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim ---------- II - 207
Gambar 2.71. Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Aceh Berdasarkan Aspek & Pilar ---------- II - 217
Gambar 2.72. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2022 --- II - 218
Gambar 2.73. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020 -- II - 219
Gambar 2.74. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020---------- II - 220
Gambar 2.75. NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020 ---------- II - 220
Gambar 2.76. Persentase Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang (Non Makanan), Tahun 2022------ II - 221
Gambar 2.77. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2018-2022 --------- II - 222
Gambar 2.78. Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh, Tahun 2019-2022 ---------- II - 223
Gambar 2.79. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2016-2021 ---------- II - 228
Gambar 2.80. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah) ---------- II - 233
Gambar 2.81. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2022 ---------- II - 233
Gambar 2.82. Struktur Belanja Aceh Tahun 2022 ---------- II - 237
Gambar 2.83. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2017-2022 (Dalam Triliun Rupiah) ---------- II - 239
Gambar 2.84. Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2022---------- II - 244
Gambar 2.85. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah) ---------- II - 260
Gambar 2.86. Rata-Rata Ketercapaian Target Makro Kabupaten/Kota dalam RKPA Selama Tahun 2018-2022 (dalam persentase) ---------- II - 273
Gambar 2.87. Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Aceh terhadap Kondisi Akhir RPJMA 2017-2022 ---------- II - 274
Gambar 2.88. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah) ---------- II - 278
Gambar 2.89. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2022 ---------- II - 278
Gambar 2.90. Rata-Rata Ketercapaian Target Makro Kabupaten/Kota dalam RKPA Selama Tahun 2018-2021 (dalam persentase) ---------- II - 285
Gambar 2.91. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah) ---------- II - 289
Gambar 2.92. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2021 ---------- II - 286
Gambar 2.93. Struktur Belanja Aceh Tahun 2021 ---------- II - 292

Gambar 2.94. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)---------- II - 293
Gambar 2.95. Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2021 (%) ---------- II - 305
Gambar 2.96. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun 2018 – 2021 (Persentase) ---------- II - 359
Gambar 2.98. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Aceh Tahun 2018 - 2021 ---------- II - 357
Gambar 2.99. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. ---------- II - 360
Gambar 2.100. Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa Tahun 2018 – 2022- II - 362
Gambar 2.101. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat----- II - 366
Gambar2.102. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah/Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR (proxy) Tahun 2018 – 2021 ---------- II - 367
Gambar 2.103. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif/ Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Proxy) Tahun 2018 – 2021 ---------- II - 368
Gambar 2.104. Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy) ---------- II - 370
Gambar 2.105. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air ---------- II - 370
Gambar 2.106. Rasio elektrifikasi ---------- II - 373
Gambar 2.107. PDRB per kapita ---------- II - 373
Gambar 2.108. Kondisi Mantap Jalan Provinsi/ Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) (proxy) ---------- II - 374
Gambar 2.109. Koefisien Gini ---------- II - 375
Gambar 2.110. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau/Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk ---------- II - 376
Gambar 2.111. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ---------- II - 379
Gambar 2.112. Proporsi individu yang menggunakan internet/Proporsi rumah tangga dengan akses internet (proxy)---------- II - 382

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan I Tahun 2023---------- III - 1
Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I Tahun 2023------- III - 2

Gambar 3.3. Struktur dan Sumber Pertumbuhan PDRB Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2023(yoy) ---------- III - 2
Gambar 3.4. Struktur PDRB Aceh dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2023 (yoy)---------- III - 3
Gambar 3.5. Perkembangan Inflasi Aceh Periode Januari 2022 s.d Mei 2023 (yoy) ---------- III - 4
Gambar 3.6. Komoditas Yang Memberikan Andil Inflasi/Deflasi pada Mei 2023 (yoy) ---------- III - 6
Gambar 3.7. Inflasi Provinsi se Sumatera pada Mei 2023 (yoy) ---------- III - 7
Gambar 3.8. Perkembangan Gini Ratio Aceh Maret 2019 – September 2022 (Indeks)---------- III - 8
Gambar 3.9. Gini Ratio Provinsi di Indonesia September 2022 (Indeks) --- III - 9
Gambar 3.10. Perkembangan Kemiskinan Aceh Maret 2019 s.d September 2022---------- III - 10
Gambar 3.11. Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Pedesaan---------- III - 11
Gambar 3.12. Kemiskinan Ektrim Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2021-2022 (Persen) ---------- III - 12
Gambar 3.13. Perkembangan TPT Aceh dan Nasional Tahun 2019 s.d 2023 ---------- III - 13
Gambar 3.14. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Februari 2023 ---------- III – 14
Gambar 3.15. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2020 – Februari 2023 ---------- III - 15

Gambar 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024---------- IV - 1
Gambar 4.2. Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024 ---------- IV - 2
Gambar 4.3. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ---------- IV - 23
Gambar 4.4. Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRA---------- IV - 29
Gambar 4.5. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2024 ---------- IV – 50
Gambar 4.6. Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 ---------- IV - 51
Gambar 4.7. Skor Inovasi SKPA > 100 ---------- IV - 179
Gambar 4.8. Capaian Provinsi Aceh Dalam Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2022---------- IV - 180
Gambar 4.9 Posisi Capaian IID Provinsi Aceh Tahun 2022 ---------- IV - 180
Gambar 4.10. Rekapitulasi Pelaporan IID Pemerintah Aceh Tahun 2022 ---- IV - 181

Gambar 4.11. Rekapitulasi Pelaporan IID Inovasi Pemerintah Aceh Tahun 2022---------- IV - 181
Gambar 4.12. Peforma Pemerintah Aceh dalam IID tahun 2022---------- IV - 182
Gambar. 5.1. IPM Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022---------- V - 3

PEMERINTAH ACEH

# BAB I
# PENDAHULUAN

**Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

RKPA Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024 bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah tahun 2024. Untuk mewujudkan RKPA tahun 2024 sebagai sebuah dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, maka dalam proses penyusunannya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPA tahun 2022/2023 dengan permasalahan dan isu strategis;
2. Keterkaitan antara sasaran dan Prioritas Aceh (PA) dalam RKPA tahun 2024 dengan sasaran dan Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2024;
3. Konsistensi antara Prioritas Aceh (PA) dengan permasalahan, isu strategis, program prioritas, serta pagu anggaran;
4. Arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2024 yang terdapat dalam RPA Tahun 2023–2026 menjadi rujukan dalam perumusan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2024;
5. Tersedianya dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada Prioritas Nasional (PN) dalam RKPA tahun 2024;

Untuk mendukung koordinasi dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan, penyusunan RKPA tahun 2024 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) *top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) *bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) *teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) *politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) *partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Disamping itu, RKPA tahun 2024 juga disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *money follow program* dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik bermakna bahwa perencanaan RKPA tahun 2024 mengacu kepada tema yang telah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan RPA tahun 2023-2026 dan RKP tahun 2024. Sementara itu, holistik merupakan penentukan program/kegiatan/sub kegiatan/proyek secara komprehensif mulai dari hulu ke hilir dalam rangka mendukung tema yang telah dirumuskan. Integratif dilakukan melalui pengintegrasian berbagai program/kegiatan/sub kegiatan/proyek dan sumber pendanaan dan spatial merupakan penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan/proyek dalam satu kesatuan wilayah serta keterkaitan antar wilayah.

**Gambar 1.1**
**Pendekatan Perencanaan Pembangunan**

Seiring dengan keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemic COVID-19 dan dampak pertumbuhan ekonomi global, maka capaian indikator makro pembangunan Aceh tahun 2022 juga menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2022 tercatat sebesar 4,21 persen meningkat 1,42 poin dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,79 persen. Hal ini juga diikuti oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin dari 72,18 tahun 2021 menjadi 72,80 tahun 2022. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan sebesar 0,13 poin dari 6,30 persen tahun 2021 menjadi 6,17 persen tahun 2022. Kemiskinan tahun 2022 menurun sebesar 0,78 poin dari 15,53 persen tahun 2021 menjadi 14,75 persen tahun 2022. Gini ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,032 poin dari 0,323 tahun 2021 menjadi 0,291 tahun 2022. Walaupun capaian indikator makro pembangunan Aceh tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif namun sebagian besar capaian masih berada dibawah rata rata nasional, hanya gini ratio yang menunjukkan hasil lebih baik dari capaian nasional yakni

0,291 sementara capaian nasional tercatat sebesar 0,381. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka fokus utama pembangunan dalam RKPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) Percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim; (2) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM (3) Pengendalian Inflasi; (4) Penurunan Stunting; (5) Peningkatan nilai tambah/hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, (6) Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024; (7) Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024 pada RPA Tahun 2023-2026, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, kebijakan pembangunan 2023 serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian, maka tema RKPA Tahun 2024 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Serentak dan PON 2024". Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RKPA tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
   a. Desk rancangan awal Rencana Kerja (Renja) SKPA tahun 2024 tanggal 06 s.d 08 Februari 2023;
   b. Penginputan POKIR DPRA kedalam aplikasi SIPD RI tanggal 22 s.d 28 Februari 2023;
   c. Verifikasi POKIR DPRA oleh mitra Bappeda tanggal 01 s.d 07 Maret 2023;
   d. Verifikasi POKIR DPRA oleh SKPA terkait tanggal 08 Maret s.d 06 April 2023;
   e. Verifikasi POKIR DPRA oleh TAPA tanggal 29 Mei s.d 06 Juni 2023.
2. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 tanggal 21 Maret s.d 10 April 2023;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 yang meliputi :
   a. Pembukaan Musrenbang RKPA Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 11 April 2023;
   b. Pembahasan DOKA dilaksanakan tanggal 12 s.d 18 April 2023;
   c. Pembahasan Rancangan Renja SKPA/RKPA tanggal 08 s.d 11 Mei 2023;

5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 tanggal 12 Mei s.d 20 Juni 2023;
6. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI dilaksanakan tanggal 22 Juni 2023;
7. Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil fasilitasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah tanggal 22 Juni s.d 26 Juni 2023;
8. Penetapan RKPD Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2023.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPA tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan baik yang berskala nasional maupun lokal antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .....Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013–2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
30. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6).

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPA tahun 2024 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

a. Hubungan dengan RKP tahun 2024
   RKPA tahun 2024 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP Tahun 2024 yang meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas pembangunan dan target indikator kinerja urusan.
b. Hubungan dengan RPA Tahun 2023-2026
   RKPA tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026 yang meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, target indikator kinerja tahun 2024;
c. Hubungan dengan Renja SKPA tahun 2024
   RKPA tahun 2024 menjadi pedoman bagi SKPA dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPA Tahun 2024. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran,

program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2024.

d. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBA tahun 2024

RKPA tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2024. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBA tahun 2024 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPA tahun 2024.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

RKPA tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Aceh tahun 2024, dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2024;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA tahun 2024;
3. Menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPA tahun 2024;
4. Menjadi pedoman penyelarasan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024;
5. Sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2024; dan
6. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh tahun 2024.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPA

Sistematika RKPA tahun 2024 disusun terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPA.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH**

Memuat kondisi umum Aceh dari berbagai aspek yakni aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPA sampai tahun 2023 dan realisasi RPA Tahun 2023-2026 dan permasalahan daerah dan isu strategis yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH**

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan kondisi eksisting dan proyeksi kerangka ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB Sektor, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), inflasi dan kemiskinan baik yang bersumber dari RKP tahun 2024 dan RPA Tahun 2023-2026. Disamping itu, juga menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah yang menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah.

Memuat arah kebijakan keuangan daerah yang menjelaskan realisasi dan proyeksi/target pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2021-2025.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH**

Memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, indiktor kinerja pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, indiktor kinerja dalam RKP tahun 2024 dan RPA Tahun 2023-2026.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Memuat arahan kebijakan pembangunan dan target makro yang diberikan untuk setiap kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Aceh.

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Aceh yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPA Tahun 2023-2026.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) yang akan dicapai tahun 2024.

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN**

PEMERINTAH ACEH

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

**Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

## 2.1. Gambaran Umum Aceh

Gambaran umum kondisi Aceh diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

#### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01° 58′ 37,2″- 06° 04′ 33,6″ Lintang Utara dan 94° 57′ 57,6″- 98° 17′ 13,2″ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara
Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840.82 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798.02 km² atau 7.478.801.59 ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249.86 km² atau 1.424.986.18 ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047.88 km² atau 8.904.787.77 ha. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 Kecamatan, 817 Mukim dan 6.497 Gampong sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/1710/2020 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong di Aceh.

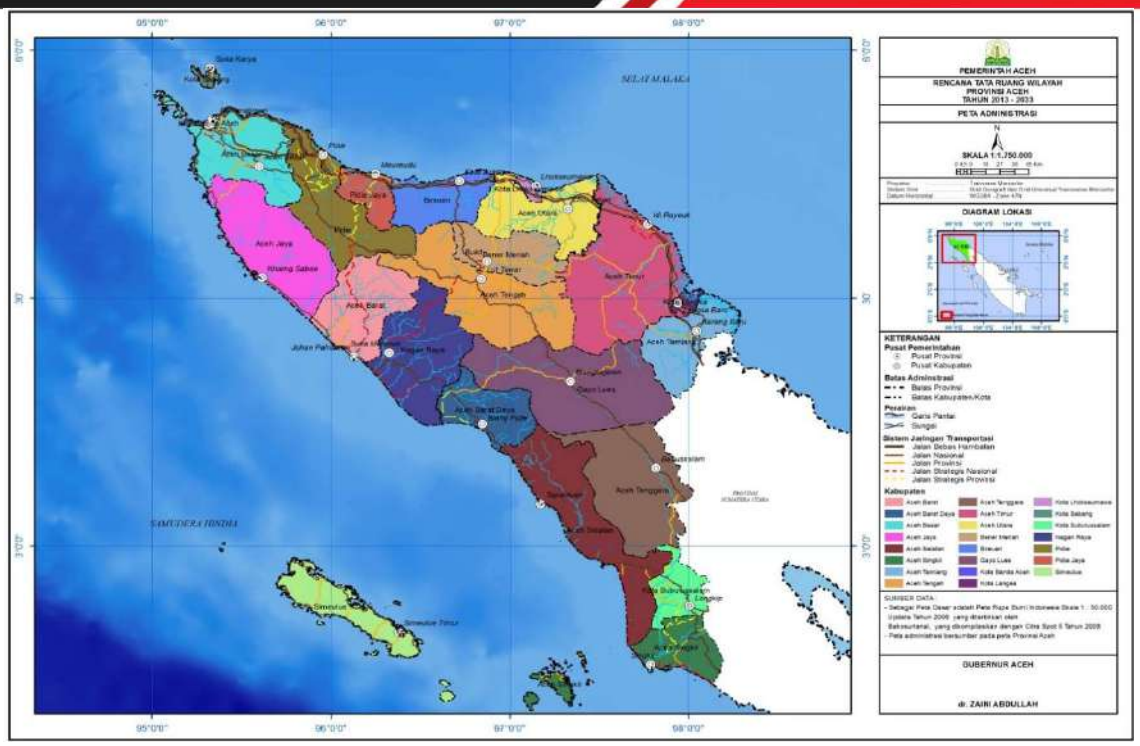


*Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033*

**Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh**

#### 2.1.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan

Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Selatan.

#### 2.1.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;
b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
c. Batu gamping atau dolomit (*ilimestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products* – lava, lahar, *tuff, bereccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment* (*gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai potemsi air tanah tinggi.

#### 2.1.1.1.4. Hidrologi

**A. Air Permukaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

1. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 3 (tiga) WS Strategis Nasional dan 1 (satu) WS Lintas Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 4 (empat) WS Lintas Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 1 (satu) WS Kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Pusat mengelola 4 (empat) WS yang meliputi yaitu Wilayah Sungai Aceh - Meureudu, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Woyla - Bateue, dan Wilayah Sungai Alas - Singkil. Pemerintah Aceh mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Pase - Peusangan, Wilayah Sungai Tamiang - Langsa, Wilayah Sungai Teunom - Lambeuso, dan Wilayah Sungai Baru - Kluet. Sedangkan Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Wilayah Sungai Simeulue. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.

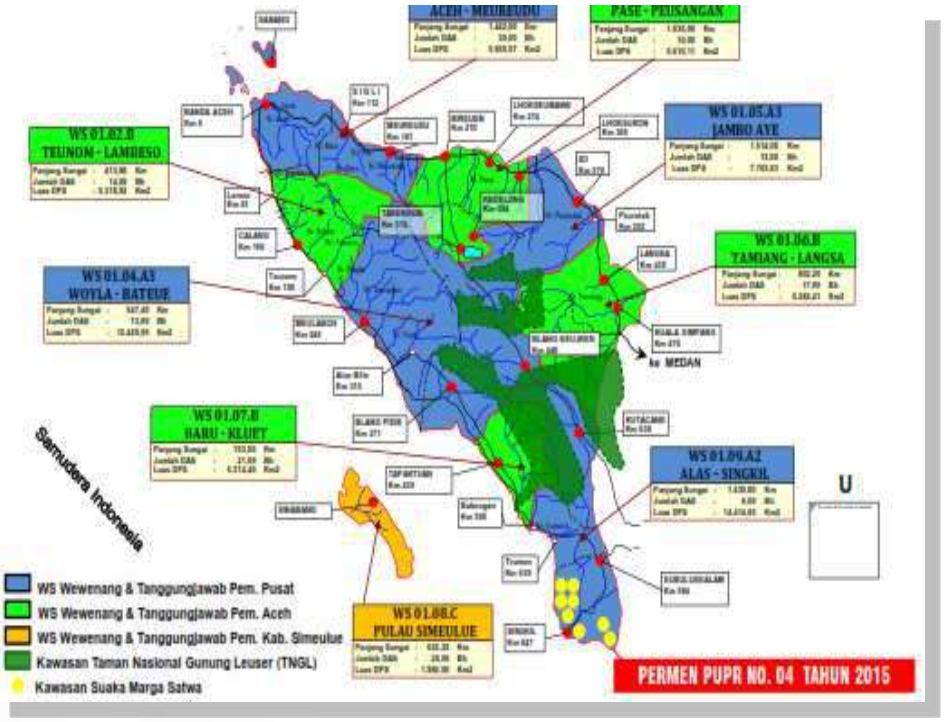


**Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016**

Berdasarkan gambar diatas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing – masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1.**

**Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017**

| No. | Kewenangan | Letak Geografis | Kode WS | Wilayah Sungai | Luas WS ($Km^2$) | Jumlah DAS (Buah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Pemerintah Pusat | Strategis Nasional | WS 01.01.A3 | Aceh – Meureudue | 5.558,36 | 30 |
| | | | WS 01.05.A3 | Jambo Aye | 6.781,05 | 13 |
| | | | WS 01.04.A3 | Woyla – Bateue | 12.406,89 | 13 |
| | | Lintas Provinsi | WS 01.09.A2 | Alas – Singkil | 13.400,31 | 8 |
| II | Pemerintah Aceh | Lintas Kabupaten/Kota | WS 01.03.B | Pase – Peusangan | 5.601,34 | 10 |
| | | | WS 01.06.B | Tamiang – Langsa | 6.287,07 | 17 |
| | | | WS 01.02.B | Teunom – Lambesoi | 5.257,73 | 14 |
| | | | WS 01.07.B | Baru – Kluet | 5.311,44 | 21 |
| III | Pemerintah Kabupaten | Dalam Kabupaten/Kota | WS 01.08.C | Pulau Simeulue | 1.828,65 | 26 |

*Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2021*

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, danpenyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat

bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**

**Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016**

| No. | Nama Wilayah Sungai | Jlh DAS | Panjang (Km) | Ketersediaan Air | | Kebutuhan Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $m^3$/dt | milyar. $m^3$/thn | $m^3$/dt | milyar. $m^3$/thn |
| ***KEWENANGAN PUSAT*** | | | | | | | |
| 1. | WS Aceh - Meureudue | 30 | 447,79 | 197,55 | 6,23 | 117,13 | 3,69 |
| 2. | WS Jambo Aye | 13 | 660,16 | 200,41 | 6,32 | 91,01 | 2,87 |
| 3. | WS Woyla - Batee | 13 | 547,40 | 638,64 | 20,14 | 109,40 | 3,45 |
| 4. | WS Alas - Singkil | 8 | 639,80 | 890,73 | 28,09 | 109,72 | 3,46 |
| ***KEWENANGAN PROVINSI*** | | | | | | | |
| 5. | WS Pase-Peusangan | 10 | 536 | 205,48 | 6,48 | 89,42 | 2,82 |
| 6. | WS Teunom–Lambesoi | 14 | 502,20 | 604,71 | 19,07 | 89,1 | 2,81 |
| 7. | WS Tamiang-Langsa | 17 | 261,30 | 354,20 | 11,17 | 129,38 | 4,08 |
| 8. | WS Baru-Kluet | 21 | 128,95 | 248,29 | 7,83 | 102,11 | 3,22 |
| ***KEWENANGAN KAB/KOTA*** | | | | | | | |
| 9. | WS Simeulue | 26 | 102,22 | 98,93 | 3,12 | 10,78 | 0,34 |
| **TOTAL** | | **152** | **3.825,82** | **3.438,93** | **108,45** | **847,92** | **26,74** |

*Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017"data termuthakhir".*

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km2 , Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km2, dan wilayah pantai barat Aceh,

yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km2 .

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air.

2. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Data potensi dari danau – danau tersebut disajikan dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**

**Potensi Danau Aceh**

| No | Nama Danau | Lokasi | Luas (Ha) | Volume ($m^3$) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danau Aneuk Laot | Sabang | 45,49 | 3.000.000 |
| 2. | Danau Laut Tawar | Aceh Tengah | 5.654,00 | 175.000.000 |
| 3. | Danau Laut Penang Suasa | Aceh Jaya | 47,73 | 7.064.040 |
| 4. | Danau Laut Bangkau | Aceh Selatan | 70,76 | 2.400.000 |
| 5. | Danau Peastep | Aceh Singkil | 10,86 | 2.000.000 |
| 6. | Danau Paris | Aceh Singkil | 57,75 | 877.650 |
| 7. | Danau Bungara | Aceh Singkil | 77,78 | 1.446.375 |
| 8. | Danau Pinang | Aceh Singkil | 34,49 | 516.750 |
| 9. | Danau Lincier | Aceh Singkil | 64,53 | 9.034.200 |
| 10. | Danau Opupu | Simeulue | 138,10 | 19.334.000 |
| | **Total** | | **6.201,49** | **220.673.015** |

*Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017*

Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal..

**B. Air Tanah**

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah perlu dijaga melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, dengan kegiatan utama pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Sesuai dengan Atlas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasikan 14 (empat belas) CAT seperti disajikan padaTabel 2.4.

**Tabel 2.4.**
**Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh**

| NO | CAT | Kabupaten/Kota | Luas (HA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meulaboh | Aceh Barat | 166,559.89 |
| | | Aceh Barat Daya | 47,993.09 |
| | | Aceh Jaya | 27,601.39 |
| | | Aceh Selatan | 1,558.40 |
| | | Nagan Raya | 205,378.09 |
| 2 | Subulussalam | Aceh Selatan | 110,517.86 |
| | | Aceh Tenggara | 2,561.56 |
| | | Kota Subulussalam | 85,521.37 |
| | | Aceh Singkil | 136,164.79 |
| 3 | Kota Fajar | Aceh Selatan | 26,949.94 |
| 4 | Kuta Cane | Aceh Tenggara | 24,805.14 |
| 5 | Siongal-ongal | Aceh Tenggara | 2,029.26 |
| | | Gayo Lues | 16,097.90 |
| 6 | Langsa | Aceh Tamiang | 66,986.10 |
| | | Aceh Timur | 43,647.23 |
| | | Kota Langsa | 20,118.51 |
| 7 | Lhokseumawe | Aceh Timur | 114,357.26 |
| | | Aceh Utara | 171,618.32 |
| | | Bireuen | 1,384.88 |
| | | Kota Lhokseumawe | 15,343.51 |
| 8 | Peudada | Aceh Utara | 39,749.81 |
| | | Bener Meriah | 28,975.66 |
| | | Bireuen | 50,794.24 |
| 9 | Lampahan | Aceh Tengah | 16,348.21 |
| | | Bener Meriah | 33,123.36 |
| 10 | Telege | Aceh Tengah | 26,288.19 |
| | | Nagan Raya | 2,537.26 |
| 11 | Kemiki | Bireuen | 3,315.90 |
| | | Pidie | 21,068.42 |
| | | Pidie Jaya | 3,465.41 |
| 12 | Jeunib | Bireuen | 18,145.03 |
| | | Pidie Jaya | 12,527.09 |
| 13 | Sigli | Pidie | 48,731.81 |
| | | Pidie Jaya | 6,559.72 |
| 14 | Banda Aceh | Pidie | 13,990.81 |
| | | Kota Banda Aceh | 5,616.66 |
| | | Aceh Besar | 125,249.69 |
| **JUMLAH** | | | **1,743,681.75** |

*Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033*

#### 2.1.1.1.5. Klimatologi

Aceh yang beriklim tropis memiliki dua musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada April sampai September. Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada November sampai Februari. Kondisi rata-rata suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5.**
**Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban**
**Tahun 2015-2021**

| Kondisi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Suhu Udara (C ) | 27,4 | 27,1 | 27,49 | 28,4 | 26,0 |
| Curah Hujan (mm) | 209,1 | 199,9 | 254,8 | 239,9 | 249,7 |
| Kelembaban (%) | 79,7 | 78,7 | 82,53 | 66,5 | 88 |

*Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021*

Suhu udara selama periode tahun 2016 hingga 2021 berfluktuatif pada periode tiga tahun terakhir. Curah hujan mengalami peningkatan pada periode tahun 2016 sampai 2019 dan menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. sedangkan kelembaban relatif stabil. Rata-rata suhu udara tahunan di Aceh berkisar antara 26-27 $^{0}$C. Pada tahun 2021, rata-rata suhu udara di Aceh sebesar 27,15 $^{0}$C. Dalam periode yang sama, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 254,8 mm, meningkat jauh dari rata-rata curah hujan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 115,3 mm. Sementara itu kondisi rata-rata kelembaban udara tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam rentang waktu 2016 sampai 2020 meskipun pada tahun 2019 menurun hingga 66,5 persen.

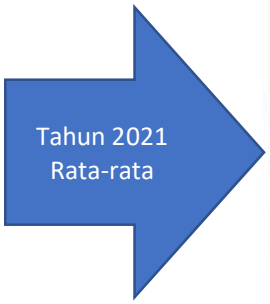


| Kabupaten/Kota *Regency/Municipality* | Stasiun BMKG *BMKG Station* | Jumlah Curah Hujan *Number of Precipitation (mm)* | Jumlah Hari Hujan (hari) *Number of Rainy Days (day)* | Durasi Penyinaran Matahari *Duration of Sunshine (%)* |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (15) | (16) | (17) |
| Aceh Besar | Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda | 3 872,90 | 157,00 | 47,64 |
| Aceh Besar | Stasiun Klimatologi Aceh Besar | 2 293,40 | 212,00 | 65,00 |
| Aceh Utara | Stasiun Meteorologi Malikussaleh | 1 772,30 | 117,00 | 59,41 |
| Nagan Raya | Stasiun Meteorologi Tjut Nyak Dien Meulaboh | 3 667,60 | 181,00 | 59,46 |
| Sabang | Stasiun Meteorologi Cut Bau Maimun Saleh | 2 310,50 | 142,00 | 58,10 |

**Gambar 2.3. Gambar Rata-rata Curah Hujan Tertinggi**

### 2.1.1.2. Demografi

#### 2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2022 sebanyak 5.379.937 jiwa, angka ini meningkat dari jumlah penduduk Aceh tahun 2021 5.347.889 jiwa. Pada tahun 2022, daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara 609.705 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang 42.867 jiwa, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.6. berikut ini.

**Tabel 2.6.**

**Jumlah Penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Selatan | 234,169 | 3.841,60 | 60.96 |
| 2 | Aceh Tenggara | 227,921 | 4.231,43 | 53.86 |
| 3 | Aceh Timur | 434,929 | 6.286,01 | 69.19 |
| 4 | Aceh Tengah | 219,744 | 4.318,39 | 50.89 |
| 5 | Aceh Barat | 198,858 | 2.927,95 | 67.92 |
| 6 | Aceh Besar | 422,241 | 2.969,00 | 142.22 |
| 7 | Pidie | 436,796 | 3.086,95 | 141.50 |
| 8 | Aceh Utara | 609,705 | 3.236,86 | 188.36 |
| 9 | Simeulue | 94,560 | 2.051,48 | 46.09 |
| 10 | Aceh Singkil | 129,674 | 2.185,00 | 59.35 |
| 11 | Bireuen | 445,503 | 1.901,20 | 234.33 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 153,515 | 1.490,60 | 102.99 |
| 13 | Gayo Lues | 101,955 | 5.719,58 | 17.83 |
| 14 | Aceh Jaya | 96,049 | 3.812,99 | 25.19 |
| 15 | Nagan Raya | 172,827 | 3.363,72 | 51.38 |
| 16 | Aceh Tamiang | 301,800 | 1.956,72 | 154.24 |
| 17 | Bener Meriah | 168,469 | 1.454,09 | 115.86 |
| 18 | Pidie Jaya | 160,272 | 1.073,60 | 149.28 |
| 19 | Banda Aceh | 254,024 | 61,36 | 4.139.90 |
| 20 | Sabang | 42,867 | 153,00 | 280.18 |
| 21 | Lhokseumawe | 191,688 | 181,06 | 1.058.70 |
| 22 | Langsa | 186,075 | 262,41 | 709.10 |
| 23 | Subulussalam | 96,296 | 1.391,00 | 69.23 |
| **Provinsi Aceh** | | **5,379,937** | **57.956,00** | **92.83** |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, Tahun 2023 (Diolah)*

Ditinjau dari tingkat kepadatan, kepadatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Tahun 2022, kepadatan penduduk tertinggi terjadi di ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat administrasi pemerintahan, yaitu Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk sebesar 254.024 jiwa dan rasio kepadatan penduduk sebesar 4.139,90 Jiwa/Km². Hal ini dikarenakan ibukota provinsi merupakan daerah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian sehingga banyak penduduk yang datang dari luar untuk menetap di Kota Banda Aceh. Kabupaten/Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi selanjutnya adalah Kota Lhokseumawe, yaitu sebesar 1.058.70 Jiwa/Km² dan Kota Langsa sebesar 709.10 Jiwa/Km². Sedangkan Kabupaten Gayo Lues merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 17,83 Jiwa/Km² dengan jumlah penduduk sebesar 101.955 jiwa.

## A. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2018-2022 tersebar di 18 (delapan belas) kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunnjukkan dalam Tabel 2.7.

**Tabel 2.7.**

**Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2022**

| No. | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Aceh Selatan | 234.761 | 236.359 | 237.326 | 236.487 | 234,169 |
| 2 | Aceh Tenggara | 225.139 | 226.162 | 227.174 | 227.456 | 227,921 |
| 3 | Aceh Timur | 429.006 | 423.638 | 426.398 | 429.094 | 434,929 |
| 4 | Aceh Tengah | 213.056 | 214.828 | 216.072 | 219.098 | 219,744 |
| 5 | Aceh Barat | 194.712 | 195.955 | 196.834 | 198.411 | 198,858 |
| 6 | Aceh Besar | 390.037 | 393.903 | 403.711 | 416.532 | 422,241 |
| 7 | Pidie | 440.231 | 442.45 | 444.149 | 435.797 | 436,796 |
| 8 | Aceh Utara | 583.350 | 586.851 | 590.536 | 600.163 | 609,705 |
| 9 | Simeulue | 92.977 | 93.724 | 94.146 | 94.368 | 94,560 |
| 10 | Aceh Singkil | 126.768 | 126.996 | 127.711 | 129.333 | 129,674 |
| 11 | Bireuen | 438.615 | 440.35 | 444.149 | 444.383 | 445,503 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 151.474 | 152.248 | 152.949 | 153.213 | 153,515 |
| 13 | Gayo Lues | 99.937 | 101.045 | 101.54 | 101.754 | 101,955 |
| 14 | Aceh Jaya | 90.624 | 92.109 | 92.781 | 94.761 | 96,049 |
| 15 | Nagan Raya | 170.207 | 171.55 | 172.257 | 172.484 | 172,827 |
| 16 | Aceh Tamiang | 294.350 | 297.429 | 299.487 | 300.831 | 301,800 |
| 17 | Bener Meriah | 159.636 | 160.634 | 161.627 | 166.448 | 168,469 |

| No. | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 18 | Pidie Jaya | 160.115 | 161.43 | 162.174 | 159.941 | 160,272 |
| 19 | Banda Aceh | 244.689 | 245.779 | 248.892 | 253.198 | 254,024 |
| 20 | Sabang | 42.015 | 42.191 | 42.457 | 42.696 | 42,867 |
| 21 | Lhokseumawe | 193.395 | 189.505 | 190.479 | 191.034 | 191,688 |
| 22 | Langsa | 186.432 | 187.388 | 188.244 | 185.836 | 186,075 |
| 23 | Subulussalam | 85.731 | 87.285 | 91.423 | 94.571 | 96,296 |
| **Provinsi Aceh** | | **5.247.257** | **5.269.809** | **5.311.320** | **5.347.889** | **5.379.937** |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, Tahun 2023 (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren meningkat. Untuk Kabupaten/Kota, adanya peningkatan dan penurunan jumlah penduduk pada tahun 2021. Penurunan penduduk terjadi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Langsa. Penurunan jumlah penduduk tersebut diakibatkan oleh verifikasi data penduduk serta pembersihan data anomali yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tersebut.

## B. Pertumbuhan Penduduk

### a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum angka pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan angka pertumbuhan penduduk Aceh pada tahun 2022.

**Tabel 2.8.**
**Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022**

| Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa) | Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa) | Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | Aceh Selatan | 236,487 | 234,169 | -0.99 |

| Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa) | Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa) | Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 | Aceh Tenggara | 227,456 | 227,921 | 0.20 |
| 11.03 | Aceh Timur | 429,094 | 434,929 | 1.34 |
| 11.04 | Aceh Tengah | 219,098 | 219,744 | 0.29 |
| 11.05 | Aceh Barat | 198,411 | 198,858 | 0.22 |
| 11.06 | Aceh Besar | 416,532 | 422,241 | 1.35 |
| 11.07 | Pidie | 435,797 | 436,796 | 0.23 |
| 11.08 | Aceh Utara | 600,163 | 609,705 | 1.57 |
| 11.09 | Simeulue | 94,368 | 94,560 | 0.20 |
| 11.10 | Aceh Singkil | 129,333 | 129,674 | 0.26 |
| 11.11 | Bireuen | 444,383 | 445,503 | 0.25 |
| 11.12 | Aceh Barat Daya | 153,213 | 153,515 | 0.20 |
| 11.13 | Gayo Lues | 101,754 | 101,955 | 0.20 |
| 11.14 | Aceh Jaya | 94,761 | 96,049 | 1.34 |
| 11.15 | Nagan Raya | 172,484 | 172,827 | 0.20 |
| 11.16 | Aceh Tamiang | 300,831 | 301,800 | 0.32 |
| 11.17 | Bener Meriah | 166,448 | 168,469 | 1.20 |
| 11.18 | Pidie Jaya | 159,941 | 160,272 | 0.21 |
| 11.71 | Banda Aceh | 253,198 | 254,024 | 0.33 |
| 11.72 | Sabang | 42,696 | 42,867 | 0.40 |
| 11.73 | Lhokseumawe | 191,034 | 191,688 | 0.34 |
| 11.74 | Langsa | 185,836 | 186,075 | 0.13 |
| 11.75 | Subulussalam | 94,571 | 96,296 | 1.79 |
| **11** | **Provinsi Aceh** | **5,347,889** | **5,379,937** | **0.60** |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, Tahun 2023 (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 2.8. angka pertumbuhan penduduk di Aceh pada tahun 2022 adalah sebesar 0,60%. Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 1,79%, kemudian Kabupaten Aceh Utara 1,573% dan Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar 1,35%. Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan terendah adalah Kota Langsa yaitu sebesar 0,13%.

**b) Perkembangan Pertumbuhan Penduduk**

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.9. berikut ini.

**Tabel 2.9.**

**Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019 – 2022**

| Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Angka Pertumbuhan Penduduk (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11.01 | Aceh Selatan | 0,67 | 0,41 | -0,35 | -0.99 |
| 11.02 | Aceh Tenggara | 0,45 | 0,45 | 0,12 | 0.20 |
| 11.03 | Aceh Timur | -1,26 | 0,65 | 0,63 | 1.34 |
| 11.04 | Aceh Tengah | 0,82 | 0,58 | 0,58 | 0.29 |
| 11.05 | Aceh Barat | 0,63 | 0,45 | 0,8 | 0.22 |
| 11.06 | Aceh Besar | 0,98 | 2,43 | 3,13 | 1.35 |
| 11.07 | Pidie | 0,50 | 0,38 | -1,9 | 0.23 |
| 11.08 | Aceh Utara | 0,59 | 0,62 | 1,62 | 1.57 |
| 11.09 | Simeulue | 0,79 | 0,45 | 0,24 | 0.20 |
| 11.10 | Aceh Singkil | 0,17 | 0,56 | 1,26 | 0.26 |
| 11.11 | Bireuen | 0,39 | 0,59 | 0,32 | 0.25 |
| 11.12 | Aceh Barat Daya | 0,50 | 0,46 | 0,17 | 0.20 |
| 11.13 | Gayo Lues | 1,09 | 0,49 | 0,21 | 0.20 |
| 11.14 | Aceh Jaya | 1,61 | 0,72 | 2,11 | 1.34 |
| 11.15 | Nagan Raya | 0,78 | 0,41 | 0,13 | 0.20 |
| 11.16 | Aceh Tamiang | 1,03 | 0,69 | 0,45 | 0.32 |
| 11.17 | Bener Meriah | 0,62 | 0,61 | 2,94 | 1.20 |
| 11.18 | Pidie Jaya | 0,81 | 0,46 | -1,39 | 0.21 |
| 11.71 | Banda Aceh | 0,44 | 1,25 | 1,72 | 0.33 |
| 11.72 | Sabang | 0,41 | 0,63 | 0,56 | 0.40 |
| 11.73 | Lhokseumawe | -2,05 | 0,51 | 0,29 | 0.34 |
| 11.74 | Langsa | 0.51 | 0,45 | -1,29 | 0.13 |
| 11.75 | Subulussalam | 1,78 | 4,53 | 3,39 | 1.79 |
| **11** | **Provinsi Aceh** | **0,42** | **0,78** | **0,68** | **0.60** |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, Tahun 2023 (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 2.9, angka pertumbuhan penduduk di Aceh pada tahun 2022 adalah sebesar 0,60 persen. Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terjadi fluktuasi angka pertumbuhan penduduk di Aceh. Perkembangan angka pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota tidaklah sama, di mana terjadi kecenderungan kenaikan yang berbeda setiap tahunnya. Terjadinya angka pertumbuhan penduduk ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, migrasi penduduk, pemutakhiran dan

pembersihan data anomali dan ganda yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

**c) Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokkan penduduk menurut usia sekolah. Selain pengelompokkan berdasarkan komposisi umur penduduk, terdapat juga pengelompokkan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu penduduk usia muda (0-14) tahun penduduk usia produktif (15-59) tahun dan penduduk usia lanjut (>60). Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 2.10. berikut.

**Tabel 2.10.**
**Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

| No. | Kelompok Usia (Tahun) | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| 1. | 0 - 4 | 253,128 | 9.41 | 237,052 | 8.82 | 490,180 | 9.11 |
| 2. | 5 - 9 | 275,703 | 10.24 | 258,286 | 9.61 | 533,989 | 9.93 |
| 3. | 10 - 14 | 274,081 | 10.18 | 257,737 | 9.59 | 531,818 | 9.89 |
| 4. | 15 - 19 | 216,666 | 8.05 | 209,284 | 7.78 | 425,950 | 7.92 |
| 5. | 20 - 24 | 233,819 | 8.69 | 227,972 | 8.48 | 461,791 | 8.58 |
| 6. | 25 - 29 | 220,058 | 8.18 | 214,857 | 7.99 | 434,915 | 8.08 |
| 7. | 30 - 34 | 216,342 | 8.04 | 216,737 | 8.06 | 433,079 | 8.05 |
| 8. | 35 - 39 | 213,503 | 7.93 | 216,229 | 8.04 | 429,732 | 7.99 |
| 9. | 40 - 44 | 189,137 | 7.03 | 192,844 | 7.17 | 381,981 | 7.10 |
| 10. | 45 - 49 | 166,340 | 6.18 | 170,151 | 6.33 | 336,491 | 6.25 |
| 11. | 50 - 54 | 137,639 | 5.11 | 138,933 | 5.17 | 276,572 | 5.14 |
| 12. | 55 - 59 | 102,671 | 3.82 | 111,527 | 4.15 | 214,198 | 3.98 |
| 13. | 60 - 64 | 78,313 | 2.91 | 85,807 | 3.19 | 164,120 | 3.05 |

| No. | Kelompok Usia (Tahun) | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| 14. | 65 - 69 | 50,747 | 1.89 | 56,458 | 2.10 | 107,205 | 1.99 |
| 15. | 70 - 74 | 29,258 | 1.09 | 38,616 | 1.44 | 67,874 | 1.26 |
| 16. | >=75 | 33,804 | 1.26 | 56,238 | 2.09 | 90,042 | 1.67 |
| | **JUMLAH** | **2,691,209** | **100** | **2,688,728** | **100** | **5,379,937** | **100** |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, Tahun 2023 (Diolah)*

Dari Tabel 2.10. menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (20-24) tahun, yaitu 461.791 jiwa (8.58%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 233.819 jiwa (8.69%) dan perempuan sebesar 227.972 jiwa (8.48%). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur antara (70-74) tahun, yakni sebesar 67.874 jiwa (1,26%). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebesar 29.258 jiwa (1,09%) dan perempuan sebesar 38.616 jiwa (1,44%). Jumlah penduduk usia balita dan anak pada kelompok umur antara (00-09) tahun adalah sebesar 1,024,169 jiwa (19,04 %) dan usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun sebesar 531.818 jiwa (9,89%). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 3,558,829 jiwa (66,15%) dengan jumlah terbesar berada pada kelompok umur (20-24) tahun, yaitu 461.791 jiwa (8.58%) yang didominasi jenis kelamin laki-laki. Jika di lihat berdasarkan pengelompokkan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥65 tahun), yaitu sebesar 265,121 jiwa (4,93%).

#### 2.1.1.2.2. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.

Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafik dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas, dan perpindahan-perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain (mobilitas).

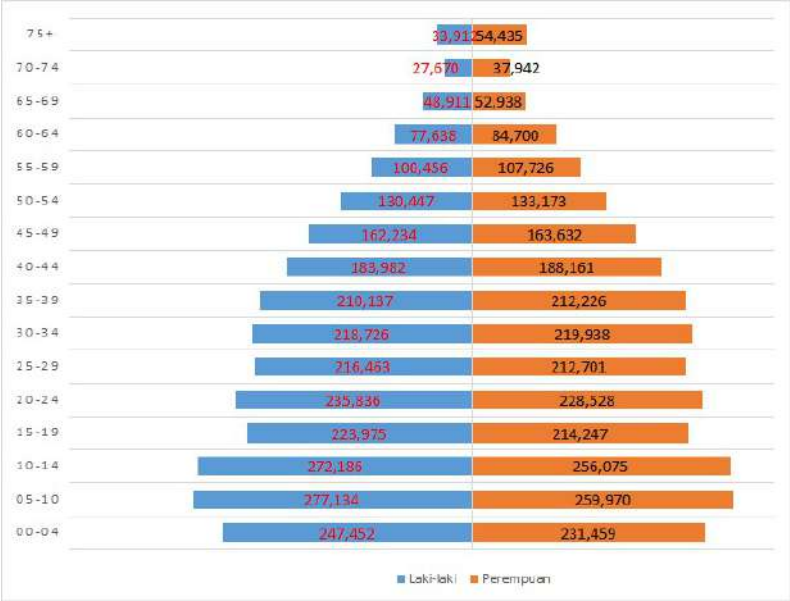


*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, Tahun 2023 (Diolah)*

**Gambar 2.4. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2022 (jiwa)**

Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absulut atau persentase; Sumbu verticalmenunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan; Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dandilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Dengan melihat proporsi dari penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sifat karakteristik suatu penduduk, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuanpada tahun 2022 yang digambarkan dalam bentuk piramida yang dapat dilihat pada gambar Struktur Penduduk Aceh Tahun 2022 pada Gambar 2.4.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin mengurangi beban ekonomi penduduk usia produktif.

Beban Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan meningkatan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

#### 2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center)* tersebar di 6 (enam) zona dengan pusat pengembangannya, meliputi; 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan/Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat Daya dan sekitarnya;
b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
d. Kawasan khusus.

   Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu

mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Pengembangan daerah berbasis kawasan merupakan pilihan utama bagi Pemerintah Aceh karena akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (world intangiable cultural heritage) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas juga dapat dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus - Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: pertanian dan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas berupa pengembangan destinasi berbasis pada kondisi alam, dengan konsep "Pengembangan Ekowisata berbasis Konservasi Alam dan Lingkungan". Pengembangan destinasi juga didukung dengan konsep wisata halal sebagai pertimbangan khusus dalam perumusan konsep pengembangan destinasi pariwisata.

Selanjutnya potensi pengembangan secara kewilayahan lainnya berupa kawasan pantai Timur Aceh yang secara administrative meliputi 4 kabupaten/kota yaitu : Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues atau disingkat dengan TATIMLAGA. Kawasan ini konsentrasi kepada sektor Agroindustri, Perikanan, Pelabuhan, dan Industri Halal Food. Kawasan timur Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan Timur Aceh menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh, sehingga menjadikan lintas Timur Aceh sebagai pintu gerbang utama dalam simpul ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan wilayah Aceh.

#### 2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Aceh kerap didera bencana yang datang silih berganti. Ada sebelas jenis bencana yang tercatat pernah terjadi dan menimbulkan dampak berupa korban jiwa, cedera, kerugian materiel, dan kerusakan lingkungan di Bumi Serambi Mekkah ini. Catatan kejadian bencana sejak tahun 1815 hingga 2015 (selama 200 tahun) yang menimbulkan risiko dan dinukilkan di dalam buku ini diperoleh melalui pencatatan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan lingkup 12 bencana berdasarkan kerangka acuan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu sebagai berikut.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan tranportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia).Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut.

*Sumber: Badan nasional Penanggulangan Bencana, 2020*

**Gambar 2.5. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh**

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, banjir genangan, banjir luapan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dilaporkan sebanyak 2.739 kejadian bencana atau rata-rata 548 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

**Tabel 2.11.**
**Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2021**

| NO. | JENIS BENCANA | TAHUN | | | | | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | Abrasi | | | 6 | 12 | 5 | 23 | |
| 2 | Abrasi, Erosi dan Sedimentasi | | 7 | | | | 7 | |
| 3 | Angin Kencang | | | 7 | | | 7 | |
| 4 | Angin Puting Beliung | 17 | 59 | 95 | 100 | 89 | 360 | |
| 5 | Banjir | | | | 95 | 100 | 195 | |
| 6 | Banjir Bandang | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 | |
| 7 | Banjir dan Longsor | | | 8 | 13 | 12 | 33 | |
| 8 | Banjir Genangan | 61 | 60 | 70 | | | 191 | |
| 9 | Banjir Luapan | | | 24 | | | 24 | |
| 10 | Banjir Rob | | | | 2 | 5 | 7 | |
| 11 | Cuaca Ekstrem | | | 2 | | | 2 | |
| 12 | Gelombang Pasang | 2 | | | 1 | | 3 | |
| 13 | Gempa Bumi | 1 | 6 | 14 | 21 | 1 | 43 | |
| 14 | Hujan Abu | | | 2 | | | 2 | |
| 15 | Kabut Asap | | | 5 | | | 5 | |
| 16 | Kapal Tengelam | | | 1 | | | 1 | |
| 17 | Karhutla | 9 | 33 | 220 | 205 | 133 | 600 | |
| 18 | Kebakaran | 71 | 96 | 285 | 289 | 269 | 1.010 | |
| 19 | Kekeringan | | | | 2 | | 2 | |
| 20 | Longsor | 18 | 25 | 46 | 57 | 42 | 188 | |
| 21 | Orang Tengelam | | | 1 | | | 1 | |

| NO. | JENIS BENCANA | TAHUN | | | | | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 22 | Petir | 1 | | | | | 1 | |
| 23 | Semburan Gas | | | 2 | | | 2 | |
| JUMLAH | | 185 | 294 | 796 | 802 | 662 | 2.739 | |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021*

Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (*Modified Mercally Intensity*) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Indonesia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;

9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Dalam penanganan banjir genangan masih belum optimalnya koordinasi antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkrit terutama pendanaan dari kewenangan pusat dan provinsi yang perlu diperbesar porsinya terutama untuk penyusunan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan wilayah sungai.

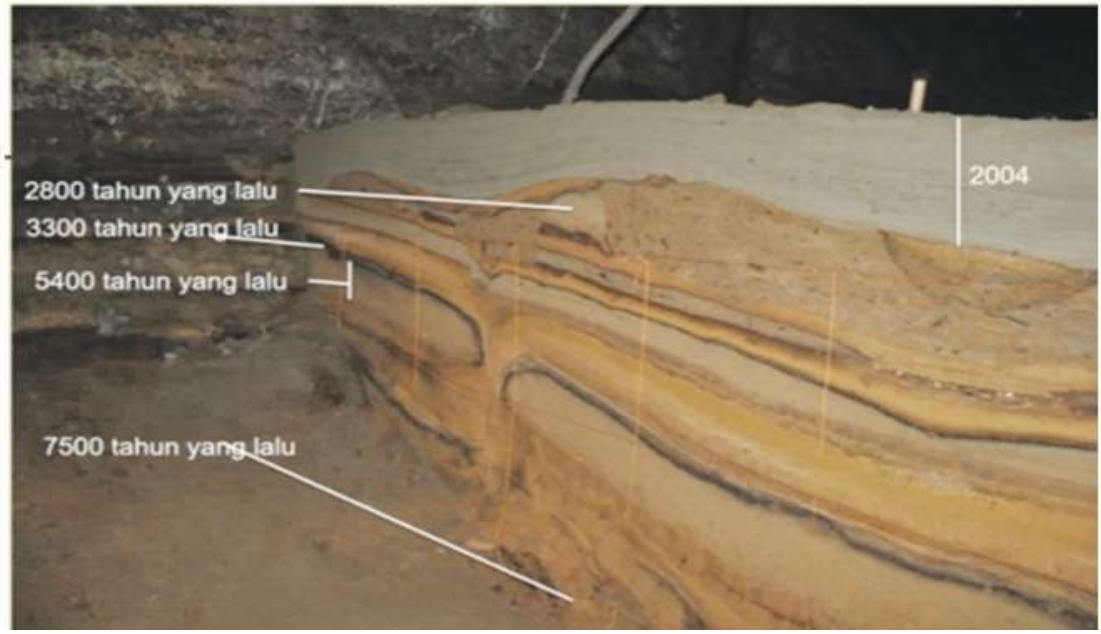


*Sumber : Buku Paleo Smong, penerbit BPBA 2019*

**Gambar 2.6. Lapisan Tanah Pasir di Gua Eek Lunttie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu**

Gambar 2.6. menginformasikan bencana yang secara massif menimbulkan kerusakan yang sangat besar di Aceh adalah gempa yang diikuti dengan tsunami, menurut catatan sendimen dalam Gua Eek Lunttie di Aceh Besar, gempa dan tsunami yang terjadi seperti tahun 26 Desember 2004 sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan rentang waktu mencapai 7500 tahun yang lalu.

Lapisan tanah pasir yang dibawa gelombang tsunami sejak 7500 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa gempa dan tsunami yang terjadi seperti 26 Desember 2004 yang lalu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi sebanyak 17 kali, namun belum berhasil mengubah tata letak kota-kota penting di Aceh untuk antisipasi bila gempa dan tsunami terjadi seperti tahun 2004.

Disamping itu, masih banyak patahan-patahan gempa yang belum terdata dan terdokumentasi ke dalam peta risiko Aceh yang perlu dimikrokan terutama di tengah kepadatan penduduk kota-kota besar di Aceh seperti Banda Aceh, Meulaboh dan lainnya.

#### 2.1.1.5. Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat diperngaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Aceh dapat tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dalam kurun waktu 2018-2022, pertumbuhan ekonomi Aceh berfluktuasi. Pada tahun 2018-2019 kinerja ekonomi Aceh

tumbuh positif masing-masing sebesar 4,61 persen dan 4.14 persen. Pada tahun 2020, ekonomi aceh mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen. Kondisi yang sama terjadi pada perekonomian nasional, dimana terjadi kontraksi sebesar 2,07 persen.

Perekonomian Aceh mengalami pemulihan pada tahun 2021 hingga 2022 dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 2,79 persen dan 4,21 persen namun masih berada dibawah laju pertumbuhan nasional sebesar 3,69 persen dan 5,31 persen. (gambar 2.7).

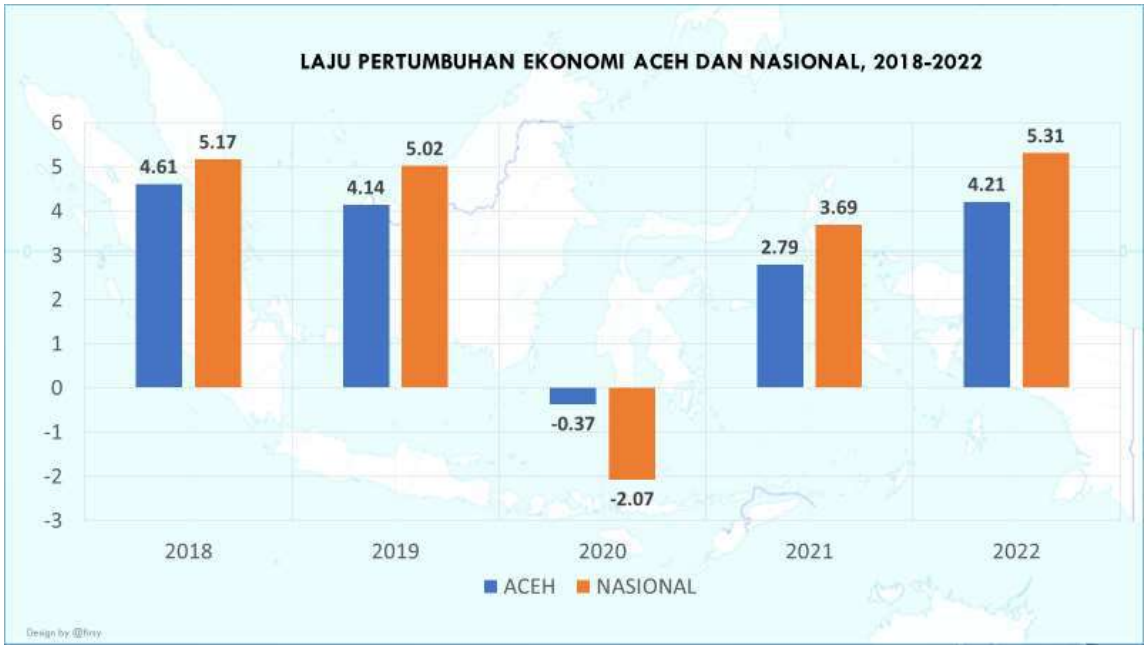


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023*

**Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2018- 2022 (Persen)**

Kontraksi ekonomi di tahun 2020 bukan hanya terjadi di Aceh dan Nasional, namun juga ditandai oleh resesi ekonomi di beberapa negara yang terdampak covid-19 akibat diberlakukannya pembatasan pergerakan orang dan barang (*lockdown*). Meskipun demikian, perekonomian mulai berangsur membaik sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan global.

Bila dilihat sisi lapangan usaha, melonjaknya perekonomian Aceh pada tahun 2022 diakibatkan dari meningkatnya laju pertumbuhan pada seaktor penyediaan akomodasi dan makan minum (32,4 persen) akibat dari peningkatan oleh pelonggaran syarat pelaku perjalanan seiring dengan turunnya kasus covid-19 di Aceh dan bertambahnya rute penerbangan dan aktivitas di Bandara Sultan Iskandar Muda.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun sektor ini memiliki kontribusi yang relatif kecil (1,45 persen) bila dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Pertania masih menjadi sektor yang paling dominan dengan kontribusi sebesar 27,68 persen, dan diikuti beberapa sektor lainnya seperti perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,87 persen dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 9.99 persen. Besarnya kontribusi pada masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12.**
**Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha,Tahun 2018 - 2022 (Persen)**

| KATEGORI | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 27,93 | 27,73 | 28,80 | 27.92 | 27.68 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 7,22 | 7,29 | 7,97 | 6,65 | 9.99 |
| C | Industri Pengolahan | 5,05 | 4,8 | 4,6 | 5,03 | 5.14 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0.16 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0.11 |
| F | Konstruksi | 9,59 | 9,51 | 10,56 | 9,9 | 9,58 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15,56 | 15,39 | 14,62 | 14,3 | 13.87 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 7,55 | 7,47 | 5,36 | 5,13 | 5.43 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,32 | 1,35 | 1,25 | 1,37 | 1.69 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3,47 | 3,51 | 3,94 | 3,01 | 2.93 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,64 | 1,77 | 1,79 | 1,91 | 1.71 |
| L | Real Estate | 4,07 | 4,17 | 4,14 | 4,07 | 3.84 |

| KATEGORI | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,65 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 0.63 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,06 | 8,97 | 8,71 | 10,3 | 8.86 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,56 | 2,67 | 2,77 | 2,98 | 2.73 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,93 | 3,02 | 3,17 | 3,13 | 3.21 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,39 | 1.39 |
| **PDRB** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2023*

Sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang tumbuh cukup menjanjikan pasca covid-19. Hal tersebut dikarenakan perubahan paradigma masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya indek teknologi dan komunikasi sebelum covid-19 berkiasar sebesar 4,17 persen menjadi 5,54 persen di tahun 2021. Indeks tersebut diprediksikan akan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat berdampak bagi peningkatan digitalisasi ekonomi atau perdagangan secara *e-commerce*.

**2.1.2.1.2. Laju Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam perekonomian. Penyebab inflasi antara lain; *cost push inflation*, *demand pull inflation* dan *expected inflation*. Faktor ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecendrungan kenaikan perubahan struktur harga. Begitu juga sebaliknya, deflasi yang terus menerus akan menimbulkan resesi dimana perekonomian mengalami kelesuan, tidak ada gairah bagi produsen untuk meningkatkan produksi.

Menurut Bank Indonesia, tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat

dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga.

#### 2.1.2.1.3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Aceh

Selama periode 2018 - 2022 inflasi Provinsi Aceh relatif stabil dan terkendali. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1.69 persen, sedangkan inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5.89 persen akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 dan mengalami inflasi selama 7 bulan dan 5 bulan deflasi.

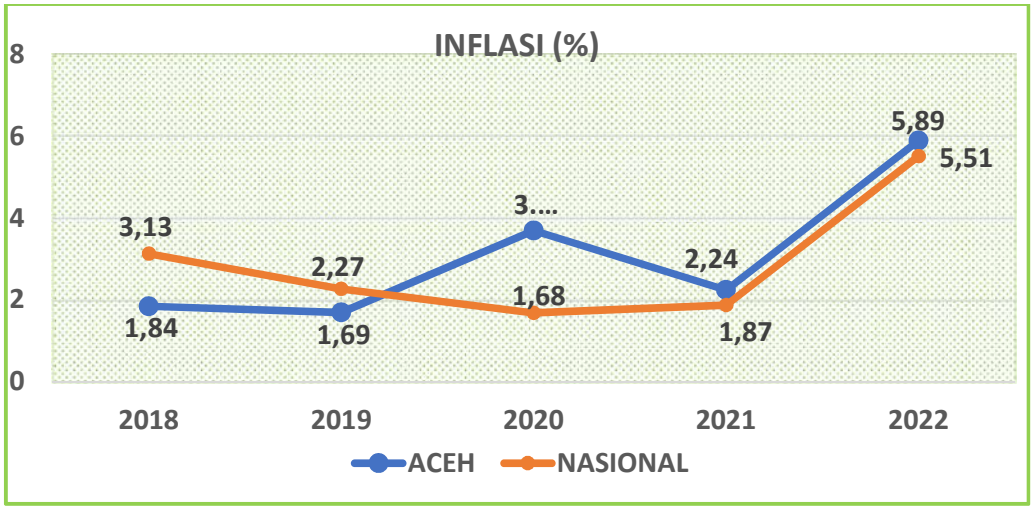


*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023*

**Gambar 2.8. Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022**

Selama tahun 2018 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 1,69 persen. Inflasi tahun 2019 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama

tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen. Perkembangan Inflasi Aceh Selama tahun 2018 Aceh mengalami inflasi sebesar 1,84 persen.

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi : kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Pada tahun 2021 perkembangan inflasi Aceh sedikit mengalami penurunan sebesar 2.24 persen, kemudian pada tahun 2022 kembali naik menjadi 5.89 persen. Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 (Tabel 2.16). Jenis barang dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi Aceh bulan Desember 2021 pada tahun 2021 antara lain Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar 0,26 persen, Angkutan Udara sebesar 0,16 persen, Ikan Dencis sebesar 0,09 persen, Telur Ayam Ras sebesar 0,06 persen, dan Ikan Kembung sebesar 0,04 persen. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,27 persen, Makanan Ringan/Snack 0,02 persen, Cabai Hijau sebesar 0,01 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,01.

Selama tahun 2022 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi year on year (*y on y*) sebesar 5,89 persen. Inflasi tahun 2022 dimulai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 108,93 pada bulan Desember 2021 menjadi 115,35 pada bulan Desember 2022. Inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan september di 3 Kota IHK di Aceh, terutama di Kota Meulaboh dimana inflasi mencapai 8,02 persen, inflasi *y-on-y* ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Perkembangan Inflasi Aceh (Gabungan 3 Kota) Sepanjang tahun 2022, perkembangan IHK gabungan 3 kota di Aceh diwarnai inflasi year on year yang cukup tinggi. Diawali dengan deflasi (*m-to-m*) yang cukup dalam pada bulan Februari (deflasi 0,60 persen) menjadi inflasi (*m-to-m*) sebesar 0,68 persen pada bulan Maret dimana inflasi *y-on-y* pada bulan tersebut hampir mendekati batas atas target inflasi nasional (4 persen). Pada bulan April 2022, untuk pertamakali-nya sejak tahun 2020, inflasi *y-on-y* berada diatas target inflasi nasional (inflasi *y-on-y* bulan April sebesar 4,37 persen) dan terus naik hingga mencapai puncak inflasi *y-on-y* tertinggi (7,38 persen) pada bulan September bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Tingginya inflasi pada bulan September cepat mendapat tanggapan dari pemerintah dalam berbagai upayanya untuk menurunkan inflasi sehingga selama 2 bulan berikutnya (Oktober dan November) terjadi deflasi dan inflasi *y-on-y* pada bulan November menjadi sebesar 5,67 persen.

**Tabel 2.13.**
**Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2018-2022 (Persen)**

| BULAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Januari | -0.11 | 0.4 | 0.66 | 0.79 | 1.04 |
| Februari | -0.31 | -0.6 | 0.44 | -0.65 | -0.60 |
| Maret | -0.09 | -0.34 | 0.6 | -0.37 | 0.68 |
| April | -0.26 | 0.42 | -0.15 | 0.51 | 1.23 |
| Mai | 0.69 | 1.27 | 0.26 | 0.25 | 1.00 |
| Juni | 0.84 | 0.47 | -0.15 | -0.06 | 0.75 |
| Juli | 0.24 | -0.04 | -0.31 | -0.07 | 0.86 |
| Agustus | 0.26 | -0.10 | 0.46 | 0.08 | -0.51 |
| September | -0.74 | -0.32 | -0.1 | -0.2 | 0.77 |
| Oktober | 0.32 | 0.22 | 0.65 | 0.43 | -0.25 |
| November | 0.62 | -0.12 | 0.19 | 0.8 | -0.12 |
| Desember | 0.38 | 0.42 | 0.99 | 0.71 | 0.93 |
| INFLASI | **1,84** | **1,69** | **3.59** | **2.24** | **5.89** |

*Sumber, BPS Aceh, 2023*

Perkembangan Inflasi Bulan Januari - Desember selama tahun 2018 s.d 2022 terjadi fluktuasi harga (inflasi dan deflasi). Selama tahun 2018 Aceh mengalami inflasi sebesar 1,84 persen. Inflasi tahun 2018 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 127,33 pada bulan Desember 2017 menjadi 129,68 pada bulan Desember 2018. Perkembangan inflasi tahun 2018 dapat dilihat dari perkembangan inflasi bulan ke bulan.

Dalam kurun waktu 12 bulan, selama 7 bulan Aceh mengalami inflasi dan 5 bulan mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 0,84 persen dan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,24 persen. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar -0,74 persen. Selama tahun 2018 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,03 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 2,97 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,30 persen, Kelompok Sandang inflasi 3,31 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,65 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,34 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 3,64 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,53 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidik.

Pada bulan Desember 2021, di Kota Meulaboh terjadi inflasi sebesar 0,81 persen, Kota Banda Aceh inflasi sebesar 0,74 persen, dan Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,59 persen. Secara agregat, Aceh (Gabungan 3 Kota) pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,16 pada November 2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,24 persen. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah

tangga sebesar 0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 1,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok kesehatan.

Perkembangan Inflasi Aceh (Gabungan 3 Kota) Sepanjang tahun 2022, perkembangan IHK gabungan 3 kota di Aceh diwarnai inflasi year on year (*y on y*) yang cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Diawali dengan deflasi (m-to-m) yang cukup dalam pada bulan Februari (deflasi 0,60 persen) menjadi inflasi (m-to-m) sebesar 0,68 persen pada bulan Maret dimana inflasi *y-on-y* pada bulan tersebut hampir mendekati batas atas target inflasi nasional (4 persen). Pada bulan April 2022, untuk pertamakali-nya sejak tahun 2020, inflasi *y-on-y* berada diatas target inflasi nasional (inflasi *y-on-y* April sebesar 4,37 persen) dan terus naik hingga mencapai puncak inflasi *y-on-y* tertinggi (7,38 persen) pada bulan September bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Tingginya inflasi pada bulan September cepat mendapat tanggapan dari pemerintah dalam berbagai upayanya untuk menurunkan inflasi sehingga selama 2 bulan berikutnya (Oktober dan November) terjadi deflasi dan inflasi *y-on-y* pada bulan November menjadi sebesar 5,67 persen.

Hampir seluruh kelompok mengalami inflasi pada tahun 2022, kecuali kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi y-on-y di bulan Desember sebesar 0,44 persen yang disebabkan oleh deflasi pada subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,70 persen serta kelompok jasa keuangan dengan deflasi sebesar 3,65 persen. Kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi *y-on-y* selama tahun 2022 adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 2,03 persen, kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 1,45 persen.Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi *y-on-y* antara lain Bensin dengan andil 1,10 persen, Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,50 persen, Angkutan Udara dengan andil sebesar 0,45 persen, Beras dengan andil sebesar 0,36 persen, Sewa Rumah dengan andil 0,35 persen, serta Rokok Kretek Filter dengan andil sebesar 0,25 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil negatif antara lain Minyak Goreng dengan andil -0,29 persen, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar -0,13 persen, juga Biaya Administrasi Transfer Uang sebesar -0,01 persen.Komoditas yang sering memberikan andil inflasi/deflasi bulanan Beberapa komoditas yang sering memberikan andil besar terhadap terjadinya inflasi/deflasi bulanan (m-to-m) antara lain: Telur Ayam Ras yang tercatat 9 kali selama tahun 2022

menjadi penyumbang inflasi/deflasi; Ikan Dencis dan Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu sebanyak 8 kali; Cabai Merah, Cabai Rawit, Ikan Kembung dan Minyak Goreng yang masing-masing tercatat 7 kali sepanjang tahun 2022 memberikan andil terhadap inflasi/deflasi bulanan.

#### 2.1.2.1.4. Pendapatan Per Kapita

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dan PDB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah (negara). Meskipun sebenarnya nilai PDRB dan PDB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB dan PDB Per Kapita dari tahun ke tahun dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh dan Nasional.

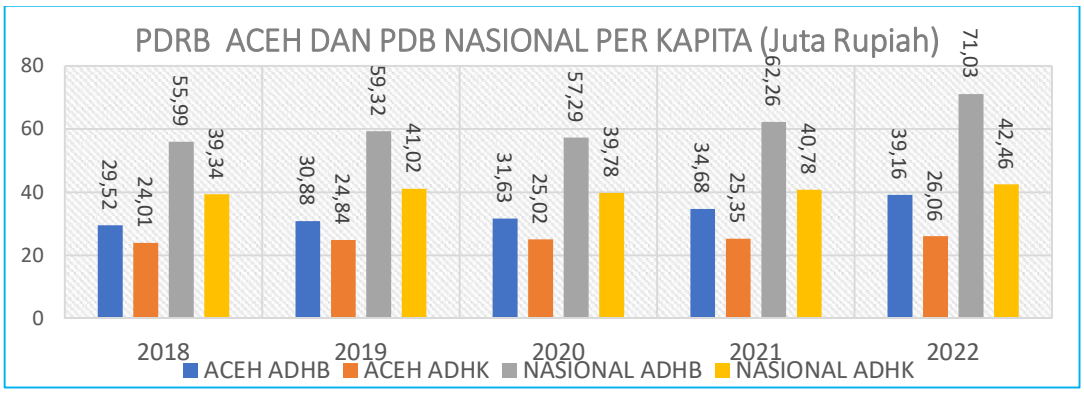


*Sumber : Berita Resmi Statistik (BPS Aceh) Tahun 2023*

**Gambar 2.9. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Aceh 2018-2022**

Perkembangan PDRB Per kapita Aceh dengan ADHB dan ADHK memiliki tren meningkat setiap tahun dan masih berada dibawah rata-rata nasional. Tahun 2018 PDRB Per Kapita ADHB tercatat sebesar 29.52 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 39,16 juta. Demikian pula dengan PDRB Per Kapita ADHK, pada tahun 2018 tercatat sebesar 24,01 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,06 juta. Pada tahun 2023-2024 kecenderungan PDRB ADHB dan ADHK per Kapita akan terjadi perlambatan seiring dengan menurunnya pendapatan otsus dan pengaruh ekonomi global.

Secara umum perkembangan PDB per kapita ADHB dan ADHK dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 PDB per kapita ADHB sebesar 57,29 juta atau terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar -3,42 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019. PDB per kapita ADHK tahun 2020 sebesar 39,78 juta atau mengalami pertumbuhan kontraksi sebesar -3,02 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019.

#### 2.1.2.1.5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefesien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35.

Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Secara rinci Indeks Gini Aceh periode 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.10.

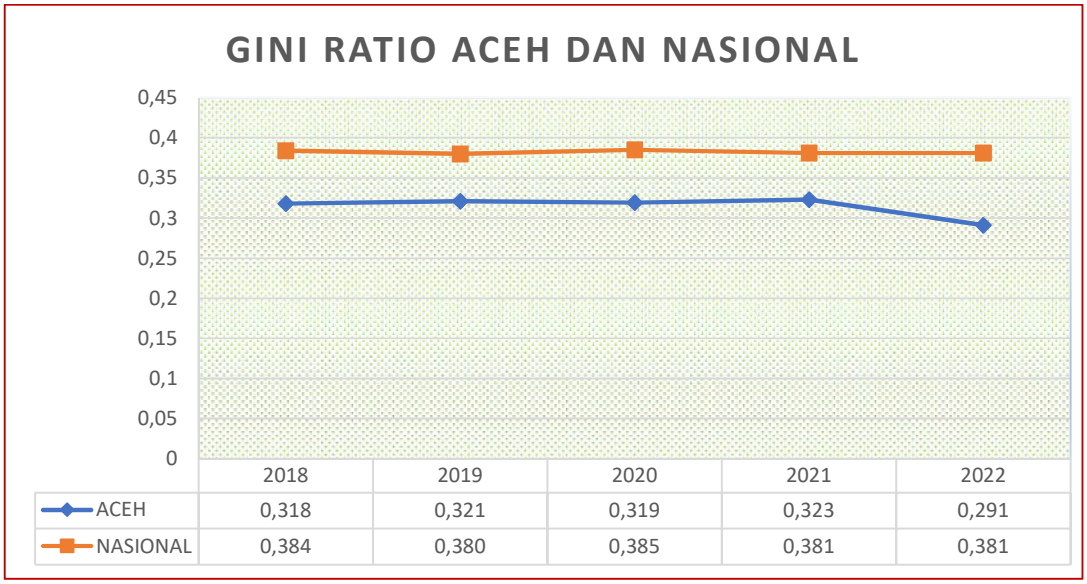


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEH | 0,318 | 0,321 | 0,319 | 0,323 | 0,291 |
| NASIONAL | 0,384 | 0,380 | 0,385 | 0,381 | 0,381 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional, 2023 (diolah)*

**Gambar 2.10. Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2022**

Perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2018 – 2022 berfluktuasi. Kondisi ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2018 sebesar 0,318, meningkat pada tahun 2019 menjadi 0.321. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,319 kemudian kembali naik sebesar 0.323 pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,004 poin. dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 0.291.

Secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indek Gini Nasional, maka ketimpangan Aceh relative lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional. Pada periode 2018-2022 Indek Gini Aceh dan Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama. Pada tahun 2018 sebesar 0.384 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.380 pada tahun 2019 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 0,381.

**Tabel 2.14.**
**Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

| No. | Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh | GINI RASIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Simeulue | 0,307 | 0,343 | 0,34 | 0,296 | 0,310 | 0.324 |
| 2 | Aceh Singkil | 0,321 | 0,336 | 0,282 | 0,287 | 0,336 | 0.310 |
| 3 | Aceh Selatan | 0,321 | 0,312 | 0,273 | 0,313 | 0,295 | 0.336 |
| 4 | Aceh Tenggara | 0,284 | 0,295 | 0,278 | 0,315 | 0,247 | 0.295 |
| 5 | Aceh Timur | 0,265 | 0,272 | 0,249 | 0,282 | 0,271 | 0.247 |
| 6 | Aceh Tengah | 0,238 | 0,26 | 0,256 | 0,331 | 0,290 | 0.271 |
| 7 | Aceh Barat | 0,333 | 0,276 | 0,33 | 0,304 | 0,295 | 0.290 |
| 8 | Aceh Besar | 0,291 | 0,306 | 0,288 | 0,352 | 0,296 | 0.295 |
| 9 | Pidie | 0,305 | 0,262 | 0,249 | 0,249 | 0,220 | 0.296 |
| 10 | Bireuen | 0,315 | 0,305 | 0,295 | 0,304 | 0,296 | 0.220 |
| 11 | Aceh Utara | 0,266 | 0,292 | 0,308 | 0,261 | 0,283 | 0.296 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 0,246 | 0,286 | 0,301 | 0,273 | 0,282 | 0.283 |
| 13 | Gayo Lues | 0,301 | 0,315 | 0,290 | 0,280 | 0,263 | 0.282 |
| 14 | Aceh Tamiang | 0,295 | 0,328 | 0,289 | 0,264 | 0,276 | 0.263 |
| 15 | Nagan Raya | 0,231 | 0,284 | 0,252 | 0,275 | 0,257 | 0.276 |
| 16 | Aceh Jaya | 0,287 | 0,264 | 0,253 | 0,252 | 0,312 | 0.257 |
| 17 | Bener Meriah | 0,213 | 0,254 | 0,267 | 0,259 | 0,255 | 0.312 |
| 18 | Pidie Jaya | 0,22 | 0,233 | 0,236 | 0,227 | 0,236 | 0.255 |
| 19 | Banda Aceh | 0,314 | 0,294 | 0,289 | 0,303 | 0,347 | 0.236 |
| 20 | Sabang | 0,247 | 0,277 | 0,281 | 0,271 | 0,293 | 0.347 |
| 21 | Langsa | 0,342 | 0,356 | 0,363 | 0,356 | 0,340 | 0.293 |
| 22 | Lhokseumawe | 0,291 | 0,305 | 0,306 | 0,307 | 0,296 | 0.34 |

| No. | Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh | GINI RASIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 23 | Subulussalam | 0,33 | 0,291 | 0,342 | 0,344 | 0,303 | 0.296 |
| **Aceh** | | **0,329** | **0,325** | **0,319** | **0,323** | **0,324** | **0.291** |
| **Nasional** | | **0,393** | **0,389** | **0,380** | **0,381** | 0,384 | **0,381** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional , 2023 (diolah)*

Persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatau kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indek Gini terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2018 sebesar 0.233 dan yang tertinggi di Kabupaten Siumeulue sebesar 0.343. Selanjutnya Indek gini pada tahun 2021 yang terrendah di Kabupaten Bireuen sebesar 0.220 dan yang tertinggi di Kota Sabang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi pada program dan kegiatan sebagai upaya untuk dapat terus meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.2.1.6. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah *(regional disparity)* merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (*regional*) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indek Williamson. Indek Williamson merupakan persebaran *(coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Brutu (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, maka akan berdampak pada ketimpangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah 0 < IW < 1. Jika IW= 0, berarti pembangunan wilayah sangat merata, IW=1, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), IW~0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan IW~1, berarti

pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembagunan ekonomi suatu daerah. Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Williamson Aceh terdapat pada Gambar 2.16 berikut:

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (data diolah)*

**Gambar 2.11. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2018-2023**

Pada Gambar 2.16 menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dari tahun 2016 hingga 2019 dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2018 sebesar 0,378 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 0,408, dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan sebesar 1,94 persen. Pada tahun 2019-2021 terjadi peningkatan nilai Indeks Williamson yang signifikan akibat dari tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota karena dampak Covid-19 dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan meningkatnya harga komoditi non migas seperti batubara dan Sawit.

#### 2.1.2.1.7. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan yang signifikan selama lebih dari dua decade, periode tahun 2002-2022. Gambar 2.13 menunjukkan bahwa pada tahun 2000 angka kemiskinan Aceh sebesar 15,20 persen. Angka Kemiskinan tahun 2000 tersebut hampir meyamai kondisi Aceh tahun 2021, yaitu sebesar 15,33 persen (kondisi maret). Naiknya eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2021 telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan Aceh, hingga lonjakan tertinggi pada tahun 2002 yang mencapai 29,83 persen.

Pada tahun 2023, angka kemiskinan Aceh sedikit mengalami penurunan, namun kembali melonjak Kondisi kemiskinan Aceh lonjakan akibat bencana alam gempa dan Tsunami pada akhir tahun 2004. Angka Kemiskinan Aceh pada tahun 2005 mencapai 28,69 persen, bahkan angka kemiskinan perdesaan pada akhir tahun 2005 mencapai

32,80 persen. Bencana alam terbesar dalam sejarah Aceh tersebut telah memberikan dampak kerusakan sangat signifikan dalam tatanan kehidupan social ekonomi masyarakat Aceh.

Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami tahun 2004, Angka Kemiskinan Aceh secara konsisten menunjukkan penurunan yang signifikan. Tren penurunan angka kemiskinan yang positif ini terjadi antara tahun 2005 hingga tahun 2010 (selama 5 tahun), dari yang awalnya 28,69 persen (tahun 2005) menjadi 20,98 persen (tahun 2010). Penurunan yang signifikan ini disinyalir akibat tingginya perputaran uang di Aceh sebagai dampak dari aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh berbagai mitra pembangunan dan dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

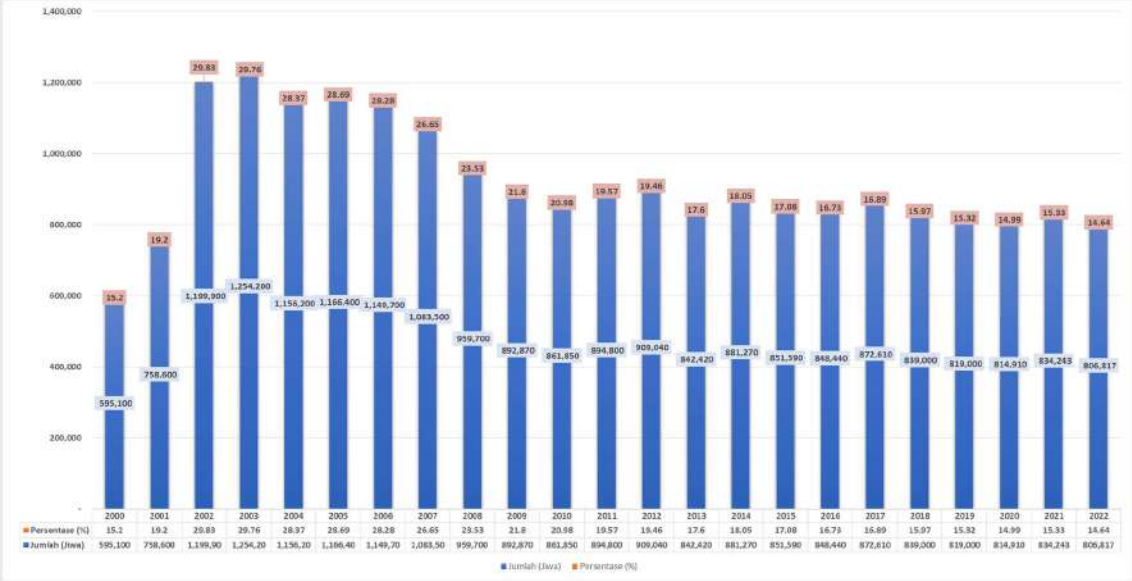


**Gambar 2.12. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000 – 2022**

Berakhirnya masa tugas BRR Aceh Nias pada tahun 2010 sedikitnya telah menyebabkan fluktuasi kondisi ekonomi di Aceh. Kondisi ini terlihat dari melambatnya penurunan angka kemiskinan yang terjadi sejak tahun 2011. Namun demikian, kehadiran Dana Otonomi Khusus di Aceh, dari tahun 2008 hingga saat ini (tahun 2022), telah menyokong perbaikan kondisi social ekonomi dan infrastruktur di Aceh. Angka Kemiskinan Aceh terus mengalami penurunan hingga mencapai 14,64 persen pada periode Maret 2022 dan 14,75 persen pada periode September 2022.

Di samping mengalami paska konflik dan bencana tsunami, Aceh juga tidak luput dari dampak Pandemi Covid 19 yang melanda dunia. Pandemi Covid 19 mulai melanda Aceh pada pertengahan tahun 2020 dan terus menggerogoti kondisi social ekonomi Aceh hingga akhir tahun 2021. Angka Kemiskinan Aceh yang sempat berada pada posisi 14,99 persen pada awal tahun 2020, kembali mengalami lonjakan pada

akhir tahun hingga sepanjang tahun 2021. Pembatasan aktivitas fisik dan social telah menyebabkan begitu banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian bahkan kehancuran faktor-faktor prouksi. Aceh hamper mengalami kelumpuhan social ekonomi, apalagi saat ini Aceh masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan barang-barang kebutuhan pokok dari luar daerah.

Penurunan Angka Kemiskinan Aceh yang terjadi secara terus menerus ini sebagai dampak dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa yang telah mendorong Aceh keluar dari Minus Point kembali ke Zero Point, dimana kondisi tahun 2021 (angka kemiskinan 15,33 persen) menyamai kondisi 20 tahun sebelumnya, yaitu 15,20 persen pada tahun 2000 sebelum naiknya eskalasi konflik dan juga bencana gempa dan tsunami. Jika dilihat secara keseluruhan, penurunan angka kemiskinan Aceh selama dua decade mencapai 15,19 poin, yang mana ini merupakan laju penurunan terbesar di Indonesia.

Data yang disajikan dalam grafik di bawah ini menunjukkan Aceh masih berada jauh di atas rata-rata nasional meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup besar. Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, persentase penduduk miskin Aceh turun 0,86 poin dari dari 15,53 persen menjadi 14,64 persen. Sementara itu Persentase Kemiskinan nasional hanya turun 0,17 poin, dari 9,71 persen pada periode Maret 2021 menjadi 9,54 persen pada periode Maret 2022.

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023*

**Gambar 2.13. Persentase Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2022 (Kondisi Maret)**

Pada tabel 2.15 menggambarkan sebaran data tahun 2017-2022, persentase kemiskinan *(Head count-P0*) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sebesar 7.44

persen dan 7.13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2017 sebesar 22.11 persen dan 2022 sebesar 19.18 persen. Untuk kabupaten/kota, data kemiskinan menggunakan data kondisi Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 (Maret) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.15 berikut.

**Tabel 2.15.**
**Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022 (Maret)**

| Kab/Kota | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Simeulue | 20,20 | 19,78 | 18,99 | 18,49 | 18,98 | 18.37 |
| Aceh Singkil | 22,11 | 21,25 | 20,78 | 20,20 | 20,36 | 19.18 |
| Aceh Selatan | 14,07 | 14,01 | 13,09 | 12,87 | 13,18 | 12.43 |
| Aceh Tenggara | 14,86 | 14,29 | 13,43 | 13,21 | 13,41 | 12.83 |
| Aceh Timur | 15,25 | 14,49 | 14,47 | 14,08 | 14,45 | 13.91 |
| Aceh Tengah | 16,84 | 15,58 | 15,5 | 15,08 | 15,26 | 14.5 |
| Aceh Barat | 20,28 | 19,31 | 18,79 | 18,34 | 18,81 | 17.93 |
| Aceh Besar | 15,41 | 14,47 | 13,92 | 13,84 | 14,05 | 13.38 |
| Pidie | 21,43 | 20,47 | 19,46 | 19,23 | 19,59 | 18.79 |
| Bireuen | 15,87 | 14,31 | 13,56 | 13,06 | 13,25 | 12.51 |
| Aceh Utara | 19,78 | 18,27 | 17,39 | 17,02 | 17,43 | 16.86 |
| Aceh Barat Daya | 18,31 | 17,1 | 16,26 | 15,93 | 16,34 | 15.44 |
| Gayo Lues | 21,97 | 20,7 | 19,87 | 19,32 | 19,64 | 18.87 |
| Aceh Tamiang | 14,69 | 14,21 | 13,38 | 13,08 | 13,34 | 12.61 |
| Nagan Raya | 19,34 | 18,97 | 17,97 | 17,7 | 18,23 | 17.38 |
| Aceh Jaya | 14,85 | 14,16 | 13,36 | 12,87 | 13,23 | 12.51 |
| Bener Meriah | 21,14 | 20,13 | 19,3 | 18,89 | 19,16 | 18.39 |
| Pidie Jaya | 21,82 | 20,17 | 19,31 | 19,19 | 19,55 | 18.45 |
| Banda Aceh | 7,44 | 7,25 | 7,22 | 6,9 | 7,61 | 7.13 |
| Sabang | 17,66 | 16,31 | 15,6 | 14,94 | 15,32 | 14.66 |
| Langsa | 11,24 | 10,79 | 10,57 | 10,44 | 10,96 | 10.62 |
| Lhokseumawe | 12,32 | 11,81 | 11,18 | 10,8 | 11,16 | 10.84 |
| Subulussalam | 19,71 | 18,51 | 17,95 | 17,6 | 17,65 | 16.94 |
| **ACEH** | **16,89** | **15,97** | **15,32** | **14,99** | **15,33** | **14,64** |
| **NASIONAL** | **10,64** | **9,82** | **9,41** | **9,78** | **10,14** | **9,57** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Provinsi Aceh, 2022*

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), dan Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) Aceh dan Nasional, periode 2017-2022 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Aceh pada periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.13.

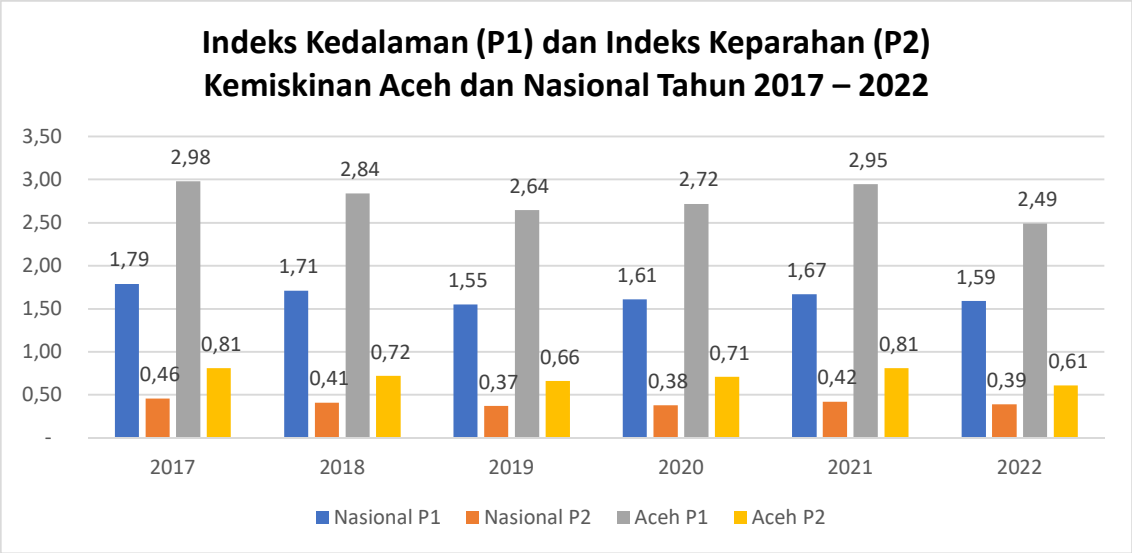


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022*

**Gambar 2.13. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September)**

Perbandingan kedua nilai Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Aceh dan Nasional mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh jauh lebih rendah dari rata–rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh Tahun 2021 sebesar 0,81 lebih tinggi dari Indeks Keparahan Nasional sebesar 0,42. Dari data indeks (P1) dan (P2) Aceh dan Nasional di atas mengambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relatif lebih baik. Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Aceh masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin.

Dengan memperhatikan tren garis kemiskinan Aceh, terlihat bahwa garis kemiskinan aceh mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup tajam dari waktu ke waktu. Tren penurunan kamiskinan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

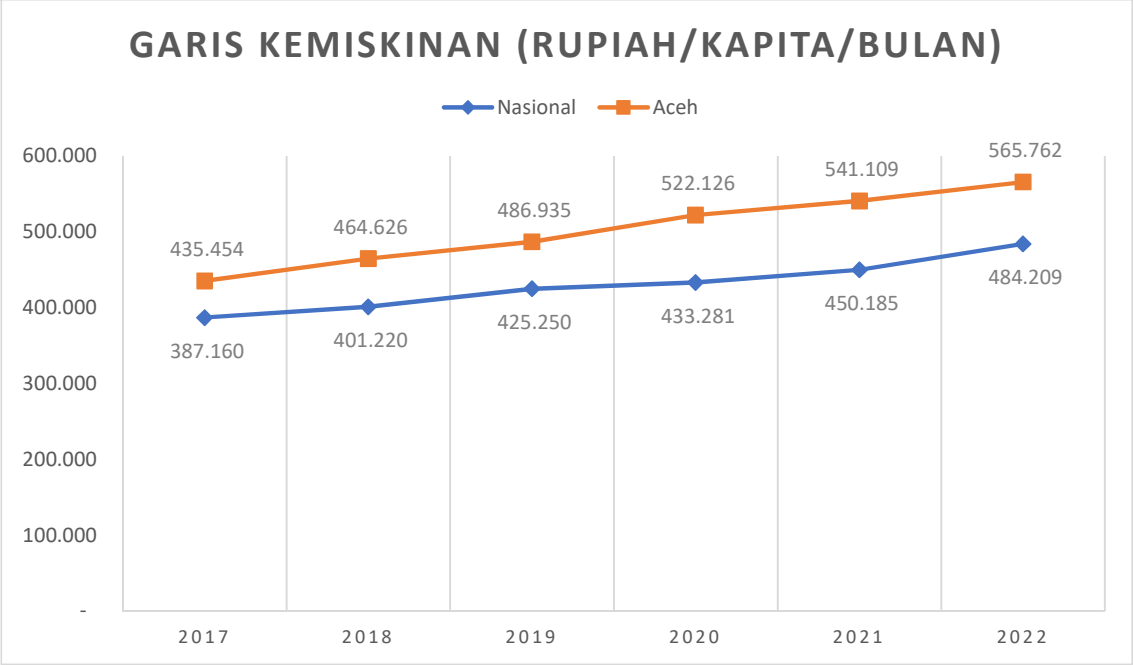


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022*

**Gambar 2.14. Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2022**

Garis Kemiskinan (GK) merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Pada tahun 2017-2022, Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional, tercatat pada tahun 2017 GK Aceh sebesar Rp. 435.454 dan tahun 2022 sebesar Rp. 565.726,- sedangkan GK Nasional tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 387.160 dan tahun 2022 sebesar Rp.484.209.

Naiknya garis kemiskinan yang terus menerus disebabkan oleh naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang sulit dikendalikan karena Aceh dan bahkan Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap suplai bahan kebutuhan pokok dari luar negeri. Kondisi ini memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut; 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan masih cenderung tinggi; 2). Lebih dominan di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian

penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

#### 2.1.2.1.8. Pengangguran

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh sangat variatif. Bila dilihat dari jumlah penduduk usia kerja, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2017 hingga 2022. Peningkatan jumlah tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di Aceh yang juga memiliki tren yang meningkat dari 3,59 juta orang menjadi 4,01 juta orang. Namun demikian, tren fluktuasi terjadi pada jumlah pengangguran dengan puncak tertinggi di tahun 2020 sebanyak 167 ribu dikarenakan pandemi covid-19. Perkembangan ketenagakerjaan di Aceh tahun 2017 hingga 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut:

**Tabel 2.16.**

**Penduduk Berumur 15 Tahun KeAtas Menurut Karakteristik , Tahun 2017-2022**

| KARAKTERISTIK | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Penduduk Usia Kerja** | **3.590.825** | **3.663.250** | **3.734.614** | **3.881.000** | **3.951.368** | **4.019.977** |
| a. Angkatan Kerja | 2.288.777 | 2.353.440 | 2.366.320 | 2.527.000 | 2.520.157 | 2.552.562 |
| - Bekerja | 2.138.512 | 2.203.717 | 2.219.698 | 2.360.000 | 2.361.300 | 2.394.994 |
| - Pengangguran | 150.265 | 149.723 | 146.622 | 167.000 | 158.857 | 157.568 |
| b. Bukan Angkatan Kerja | 1.302.048 | 1.309.810 | 1.368.294 | 1.354.000 | 1.431.211 | 1.467.415 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022*

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kabupaten/kota, Kota Lhokseumawe memiliki persentase tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017 TPT Kota Lhokseumawe sebesar 10,51 persen dan terus meningkat menjadi 11,99 persen pada tahun 2020. Namun 2 (dua) tahun berikutnya TPT di wilayah tersebut menurun hingga 2,84 poin menjadi 9,15 persen. Bener Meriah adalah kabupaten dengan TPT terendah (2,61 persen) bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh. Namun secara agregat terjadi penurunan TPT di Aceh, yang ditandai dengan TPT pada tahun 2022 sebesa 6,17 persen. Perkembangan distribusi TPT di kabupaten/kota tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.17 sebagai berikut:

**Tabel 2.17.**
**Perkembangan Distribusi TPT di kabupaten/kota di Aceh Tahun 2017-2022**

| KAB/KOT | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| SIMEULUE | 3.12 | 4.95 | 5.82 | 5.47 | 5.71 | 6.00 |
| ACEH SINGKIL | 7.14 | 7.96 | 8.58 | 8.24 | 8.36 | 6.88 |
| ACEH SELATAN | 7.24 | 6.03 | 6.54 | 6.54 | 6.46 | 4.82 |
| ACEH TENGGARA | 4.75 | 3.75 | 3.45 | 5.72 | 6.43 | 5.09 |
| ACEH TIMUR | 8.42 | 6.92 | 7.61 | 7.26 | 7.13 | 8.07 |
| ACEH TENGAH | 3.91 | 2.11 | 2.65 | 3.05 | 2.61 | 4.44 |
| ACEH BARAT | 6.20 | 8.58 | 7.41 | 7.30 | 7.09 | 6.09 |
| ACEH BESAR | 8.49 | 7.29 | 7.67 | 7.62 | 7.70 | 8.28 |
| PIDIE | 7.64 | 7.24 | 6.83 | 6.45 | 7.28 | 5.94 |
| BIREUEN | 4.50 | 3.52 | 3.83 | 4.12 | 4.32 | 4.20 |
| ACEH UTARA | 11.02 | 10.14 | 8.65 | 8.56 | 8.31 | 7.08 |
| ACEH BARAT DAYA | 3.16 | 3.93 | 4.29 | 3.93 | 4.04 | 4.12 |
| GAYO LUES | 1.71 | 2.49 | 1.74 | 2.01 | 1.84 | 2.70 |
| ACEH TAMIANG | 5.43 | 6.21 | 6.04 | 7.97 | 5.87 | 7.38 |
| NAGAN RAYA | 4.11 | 5.91 | 5.35 | 5.11 | 4.99 | 5.84 |
| ACEH JAYA | 6.23 | 4.91 | 4.18 | 4.08 | 3.47 | 3.12 |
| BENER MERIAH | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.35 | 1.24 | 2.61 |
| PIDIE JAYA | 4.89 | 5.02 | 4.34 | 6.58 | 3.57 | 4.40 |
| BANDA ACEH | 7.75 | 7.24 | 6.89 | 9.54 | 8.94 | 8.62 |
| SABANG | 3.00 | 4.19 | 4.60 | 4.81 | 3.56 | 4.01 |
| LANGSA | 7.03 | 7.12 | 7.69 | 9.75 | 7.21 | 7.85 |
| LHOKSEUMAWE | 10.51 | 12.51 | 11.01 | 11.99 | 11.16 | 9.15 |
| SUBULUSSALAM | 4.91 | 6.44 | 7.25 | 6.93 | 6.26 | 5.75 |
| ACEH | 6.57 | 6.34 | 6.17 | 6.59 | 6.30 | 6.17 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022*

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 2.1.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang dijalani. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, perkembangan RLS di Aceh relatif merata seperti yang ditunjukkan pada Table 2.18. berikut.

**Tabel 2.18.**
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Simeulue | 9,07 | 9,08 | 9,34 | 9,48 | 9,73 |
| Aceh Singkil | 8,05 | 8,52 | 8,53 | 8,68 | 8,69 |
| Aceh Selatan | 8,38 | 8,59 | 8,87 | 8,88 | 8,89 |
| Aceh Tenggara | 9,64 | 9,65 | 9,66 | 9,67 | 9,92 |
| Aceh Timur | 7,85 | 7,86 | 8,15 | 8,21 | 8,32 |
| Aceh Tengah | 9,68 | 9,69 | 9,85 | 9,86 | 9,87 |
| Aceh Barat | 9,08 | 9,09 | 9,37 | 9,55 | 9,87 |
| Aceh Besar | 10,14 | 10,31 | 10,32 | 10,33 | 10,35 |
| Pidie | 8,81 | 8,82 | 8,99 | 9,00 | 9,02 |
| Bireuen | 9,17 | 9,27 | 9,28 | 9,29 | 9,31 |
| Aceh Utara | 8,11 | 8,46 | 8,63 | 8,64 | 8,73 |
| Aceh Barat Daya | 8,13 | 8,35 | 8,66 | 8,67 | 8,68 |
| Gayo Lues | 7,69 | 7,91 | 8,20 | 8,40 | 8,41 |
| Aceh Tamiang | 8,70 | 8,89 | 8,90 | 8,91 | 9,04 |
| Nagan Raya | 8,26 | 8,50 | 8,68 | 8,69 | 8,95 |
| Aceh Jaya | 8,37 | 8,66 | 8,70 | 8,71 | 8,72 |
| Bener Meriah | 9,56 | 9,78 | 9,79 | 10,00 | 10,01 |
| Pidie Jaya | 8,86 | 9,04 | 9,33 | 9,34 | 9,53 |
| Banda Aceh | 12,60 | 12,64 | 12,65 | 12,83 | 13,03 |
| Sabang | 10,97 | 11,13 | 11,14 | 11,18 | 11,19 |
| Langsa | 11,06 | 11,10 | 11,11 | 11,12 | 11,14 |
| Lhokseumawe | 10,89 | 10,90 | 10,91 | 11,11 | 11,12 |
| Subulussalam | 7,39 | 7,58 | 7,84 | 8,03 | 8,22 |
| **Aceh** | **9,09** | **9,18** | **9,33** | **9,37** | **9,44** |
| **Nasional** | **8,17** | **8,34** | **8,48** | **8,54** | **8,69** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (Data diolah)*

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh tahun 2018-2022 menunjukkan tren positif dan lebih baik dibandingkan dengan nasional. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Aceh tahun 2022 9,44 tahun menunjukkan bahwa secara umum penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas sebahagian besar telah mengenyam tingkat pendidikan hingga kelas XII (SMP kelas III) hingga pendidikan tinggi. Kota Banda Aceh memiliki angka RLS paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah yang terendah capaian angka Rata-rata Lama Sekolah bahkan masih dibawah angka Nasional. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah sulitnya akses menuju

sekolah. Pemerintah Aceh berupaya melakukan pemerataan dan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera (9.02 tahun), namun masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara (9.71 tahun), seperti ditunjukkan pada Tabel 2.19.

**Tabel 2.19.**
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera**
**Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | Aceh | Sumatera Utara | Rata-Rata Sumatera | Nasional |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9,09 | 9,34 | 8,59 | 8,17 |
| 2019 | 9,18 | 9,45 | 8,78 | 8,34 |
| 2020 | 9,33 | 9,54 | 8,89 | 8,48 |
| 2021 | 9,37 | 9,58 | 8.93 | 8,54 |
| 2022 | 9.44 | 9,71 | 9.02 | 8.69 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)*

Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

**2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,63 tahun menjadi 14,37 tahun pada tahun 2022, namun demikian HLS Aceh Tahun 2022 masih berada diatas nasional 13,10 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,37 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh periode tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel 2.20. dibawah ini.

**Tabel 2.20.**
**Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Simeulue | 13,25 | 13,51 | 13,76 | 13,90 | 14,08 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aceh Singkil | 14,29 | 14,30 | 14,31 | 14,32 | 14,34 |
| Aceh Selatan | 14,15 | 14,41 | 14,42 | 14,60 | 14,69 |
| Aceh Tenggara | 13,98 | 13,33 | 14,00 | 14,01 | 14,26 |
| Aceh Timur | 13,01 | 13,02 | 13,03 | 13,04 | 13,06 |
| Aceh Tengah | 14,25 | 14,26 | 14,27 | 14,28 | 14,61 |
| Aceh Barat | 14,58 | 14,59 | 14,60 | 14,61 | 14,63 |
| Aceh Besar | 14,70 | 14,71 | 14,72 | 14,73 | 14,75 |
| Pidie | 14,44 | 14,45 | 14,46 | 14,47 | 14,49 |
| Bireuen | 14,81 | 14,82 | 14,83 | 14,84 | 14,86 |
| Aceh Utara | 14,68 | 14,69 | 14,70 | 14,71 | 14,73 |
| Aceh Barat Daya | 13,56 | 13,57 | 13,58 | 13,65 | 13,66 |
| Gayo Lues | 13,49 | 13,73 | 13,77 | 13,78 | 14,08 |
| Aceh Tamiang | 13,57 | 13,58 | 13,59 | 13,76 | 13,96 |
| Nagan Raya | 14,11 | 14,12 | 14,13 | 14,14 | 14,16 |
| Aceh Jaya | 13,96 | 13,97 | 13,98 | 13,99 | 14,01 |
| Bener Meriah | 13,44 | 13,45 | 13,46 | 13,47 | 13,71 |
| Pidie Jaya | 14,53 | 14,54 | 14,82 | 14,97 | 14,98 |
| Banda Aceh | 17,26 | 17,39 | 17,79 | 17,80 | 17,81 |
| Sabang | 13,66 | 13,81 | 13,95 | 14,13 | 14,40 |
| Langsa | 15,19 | 15,34 | 15,35 | 15,63 | 15,64 |
| Lhokseumawe | 15,18 | 15,19 | 15,20 | 15,21 | 15,27 |
| Subulussalam | 14,20 | 14,21 | 14,61 | 14,62 | 14,81 |
| **Aceh** | **14,27** | **14,30** | **14,31** | **14,63** | **14,37** |
| **Nasional** | **12,91** | **12,95** | **12,98** | **13,08** | **13,10** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (Data diolah)*

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

#### 2.1.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator kesehatan ibu, sebagai nilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan

kesehatan, baik dari sisi aksebilitas maupun kualitas. Aki juga menggambarkan kesehatan ibu, status gizi, kesehatan lingkungan, tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, tingkat pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023*

**Gambar 2.15. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018 – 2022**

Angka kematian Ibu di Aceh mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebesar 139/100.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat lagi menjadi 233/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, sementara pada tahun 2022 mengalami penurunan 141/100.000 Kelahiran Hidup. Ada pun jumlah kematian ibu tertinggi ada di kabupaten Aceh timur sebanyak 14 orang.

#### 2.1.2.2.4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal), tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cederaatau bunuh diri. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 -11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan probabilitas bayi meninggal sbelum mencapai usia satu tahun .

Kesehatan ibu waktu hamil sangat berperan terhadap besarnya angka kematian bayi. Gangguan perinatal menjadi salah satu faktor pemicu yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil. Sedangkan gangguan pernafasan kemungkinan besar disebabkan refleks yang kurang baik dan berhubungan dengan perkembangan fungsi dan organ janin yang kurang sempurna, hal-hal tersebut berhubungan dengan kesehatan ibu selama hamil serta asfiksia pada penanganan proses persalinan.

*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023*

**Gambar 2.16. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018–2022**

Gambar 2.22. diatas menunjukkan Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 10 per 1.000 kelahiran pada tahun 2021 tercatat 11 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 10 per 1.000 kelahiran hidup.

#### 2.1.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup

Status kesehatan masyarakat Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup berarti pada beberapa indikator, namun demikian beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang cukup rendah. Untuk angka usia harapan hidup di Aceh berdasarkan jenis kelamin Tahun 2018 s.d Tahun 2022 dapoat dilihat ddalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.21.**
**Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin**
**Tahun 2018 – 2022**

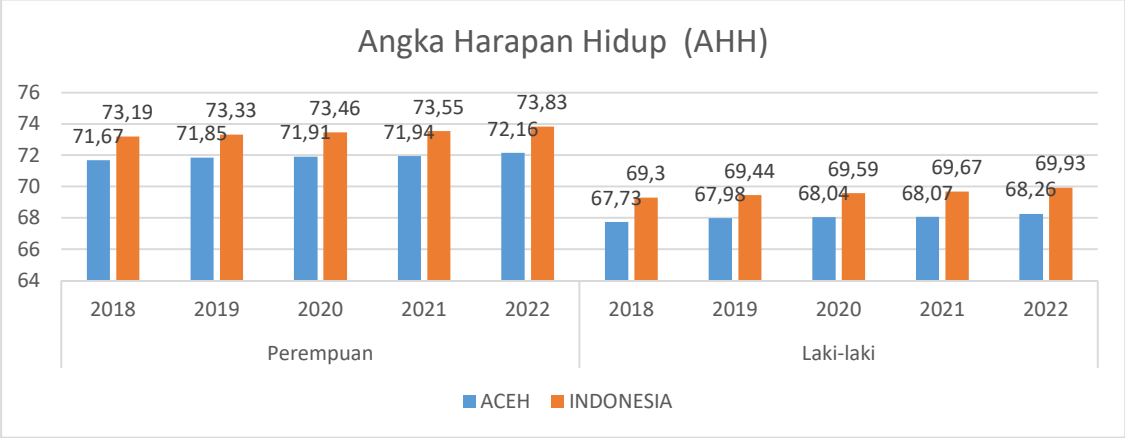


*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023*

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH masyarakat Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Berdasarkan jenis kelamin UHH perempuan dan laki-laki terjadi perbedaan, pada tahun 2018 UHH.

perempuan 71,67 sementara UHH laki-laki 67,73 dan pada tahun 2022 UHH perempuan 72,16 dan UHH laki-laki 68,26 dan masih berada dibawah angka Nasional.

### 2.1.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan jenis kelamin, IPM laki-laki bila kita melihat capaian IPM Aceh secara umum untuk tahun 2021 lebih rendah dari capaian nasional. Namun, kita juga perlu melihat apakah ada ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan, seperti terlihat pada Gambar 2.19. dibawah ini.

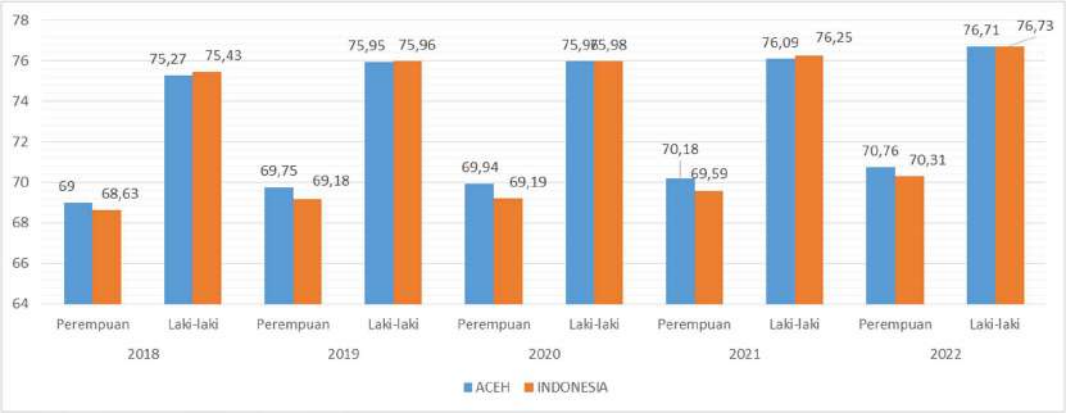


*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023*

**Gambar 2.17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin**
**Tahun 2018 - 2022**

Berdasarkan jenis kelamin, IPM laki-laki bila kita melihat capaian IPM Aceh pada gambar diatas capaian IPM Aceh secara umum untuk tahun 2021 lebih rendah dari capaian nasional. Namun, kita juga perlu melihat apakah ada ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan

Dari Gambar 2.23. terlihat bahwa walaupun IPM meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM laki-laki dan perempuan, baik secara provinsi maupun nasional. Pada tahun 2018, IPM perempuan Aceh 69, sedangkan IPM laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 75,27. Data yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM perempuan Aceh walaupun lebih baik dari pada IPM perempuan secara nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM laki-laki. Sampai dengan tahun 2022, IPM perempuan Aceh mencapai 70,76 sedangkan IPM Laki-laki mencapai 76,71.

#### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan dan kebudayaan yang sudah hampir punah. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (*cultural heritage*). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami (smong). Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (tangible) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.137 cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh pada tahun 2022.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (culture tourism). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasoional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharaannya, terdapat 91 (sembilan puluh satu) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas juru pelihara di berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik lainnya, seperti *tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual*. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simeluedan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan.Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi),dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian yang ada di daerah yang jumlahnya telah mencapai hampir 1.322 sanggar kesenian dan seniman/budayawan berjumlah 8.214 orang. Sanggar-sanggar kesenian tersebut selalu mendapat pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Aceh.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya tak benda lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain.Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh.

Aceh memiliki keragaman budaya dan seni yang memiliki nilai tinggi hal ini dikarenakan Aceh didiami oleh beragamnya etnis masyarakat dan ditunjang posisi geografis yang strategis sehingga memudahkan bangsa lain mencapai Aceh. Keragaman budaya Aceh juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya, baik budaya benda (*tangible*) maupun budaya tak benda (*intangible*). Peninggalan sejarah budaya benda dapat diuraikan mulai dari masa prasejarah, masa klasik, masa Islam, masa kolonial dan masa setelah kemerdekaan.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa

periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat di Tabel 2.22.

**Tabel 2.22.**
**Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2022**

| No. | Kabupaten / Kota | Makam | Mesjid | Tugu | Rumah Tradisional | Monumen | Benteng | Perpus-takaan | Bangunan/Gedung | Tempat Bersejarah | Arca | Gua | Prasejarah | Benda | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh Selatan | 26 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 51 |
| 2. | Aceh Tenggara | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 |
| 3. | Aceh Timur | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 4. | Aceh Tengah | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 13 |
| 5. | Aceh Barat | 16 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 26 |
| 6. | Aceh Besar | 205 | 14 | 3 | 4 | - | 30 | 1 | 3 | - | - | 11 | - | 7 | 278 |
| 7. | Pidie | 34 | 10 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 53 |
| 8. | Aceh Utara | 75 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 84 |
| 9. | Simeulue | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10. | Aceh Singkil | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 21 |
| 11. | Bireuen | 44 | 7 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | 3 | 73 |
| 12. | Aceh Barat Daya | 29 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 36 |
| 13. | Gayo Lues | 20 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 25 |
| 14. | Aceh Jaya | 43 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 64 |
| 15. | Nagan Raya | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 16. | Aceh Tamiang | 27 | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 40 |
| 17. | Bener Meriah | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 18. | Pidie Jaya | 19 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 31 |
| 19. | Banda Aceh | 47 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 11 | 4 | - | - | - | 11 | 89 |
| 20. | Sabang | 4 | 1 | - | - | - | 22 | - | 92 | 1 | - | - | - | 4 | 124 |
| 21. | Lhokseumawe | 16 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 22 |
| 22. | Langsa | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | 18 |
| 23. | Subulussalam | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
| | **Jumlah** | **681** | **64** | **30** | **23** | **9** | **70** | **4** | **159** | **27** | **-** | **14** | **2** | **54** | **1.137** |

*Sumber: Data Statistik Kebudayaan dan Pariwisata – Disbudpar Aceh Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel 2.22, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di wilayah pesisir pantai Utara Aceh yaitu : Kabupaten Aceh Besar 278 situs (terdiri dari 205

makam, 14 masjid, 3 tugu, 4 rumah tradisonal, 30 benteng, 1 perpustakaan, 3 bangunan/gedung, 3 tempat bersejarah, 11 gua, dan 7 benda. Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Simeulue dan Bener Meriah yaitu masing-masing sebanyak 2 situs, berupa 2 makam dan 1 benteng di kabupaten Simeulue.

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 9 (sembilan) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999), Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kec. Mutiara Kab. Pidie (Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004).

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang- tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.137 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2022 baru 91 (sembilan puluh satu) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (*intangible*) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperi: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari

Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011 dan akan dievaluasi kembali di akhir tahun 2015.

Gedung kesenian adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Auditorium dan galeri dilengkapi dengan tata pencahayaan serta akustik yang secara arsitektural mendukung untuk dilakukan sebuah pertunjukan maupun pameran. Sampai saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil. Kondisi gedung kesenian tersebut ada yang baru dibangun, ada juga yang sudah tidak layak digunakan lagi seperti di Sabang, Aceh Tengah dan Aceh Jaya.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat kurang, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memperioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

##### 2.1.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

###### 2.1.3.1.1.1. Syariat Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan

harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.

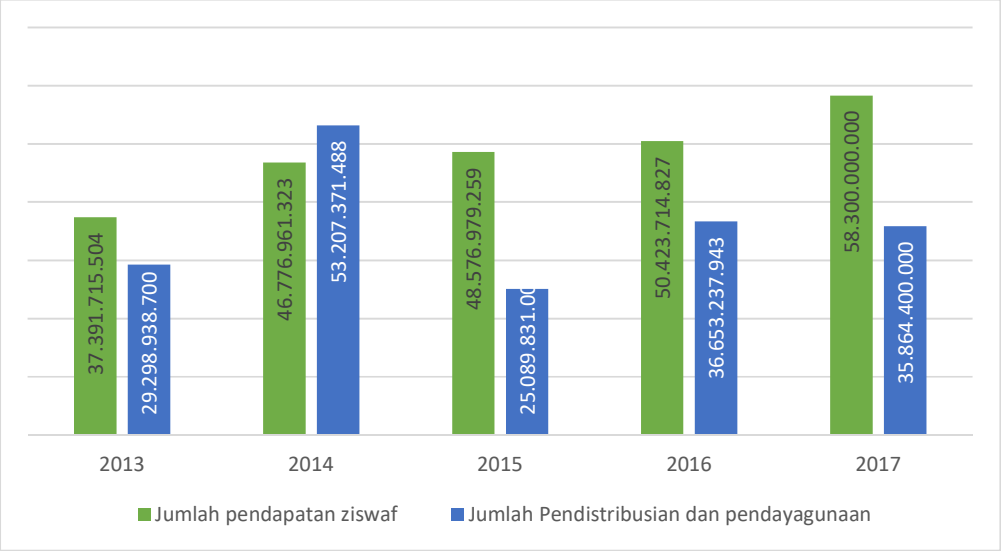


*Sumber : Sekretariat Baitul Maal Aceh, 2017*

**Gambar 2.18. Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017**

Dari tahun 2018–2022, kondisi pelanggaran seperti *Khamar, Khalwat, Ikhtilath, Zina* mengalami pengurangan, dimana *Khamar* pada tahun 2018 dari 33 kasus menjadi 13 kasus, *Khalwat* dari 18 menjadi 7 kasus pada tahun 2022, *Ikhtilath* dari 18 kasus menjadi 7 kasus, dan kasus *Zina* juga mengalami penurunan dari 33 menjadi 28 sedangkan Maisir mengalami meningkatan pada tahun 2022 sebanyak 153 dari 123 kasus di tahun 2018. Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan dan pelecehan seksual juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang dilakukan masyarakat periode tahun 2018-2022 disajikan dalam table 2.23. berikut.

**Tabel 2.23.**
**Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2018 – 2022**

| No. | Jenis Pelanggaran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Khamar | 33 | 11 | 18 | 18 | 13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maisir | 123 | 83 | 65 | 194 | 153 |
| 3 | Khalwat | 18 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| 4 | Ikhtilath | 43 | 84 | 39 | 46 | 25 |
| 5 | Zina | 33 | 32 | 49 | 51 | 28 |
| 6 | Pelecehan Seksual | 43 | 16 | 41 | 36 | 55 |
| 7 | Pemerkosaan | 18 | 21 | 49 | 115 | 136 |
| 8 | Liwath | - | - | 1 | 2 | 2 |
| | Jumlah Kasus | 312 | 312 | 269 | 472 | 419 |

*Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2023*

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran syariat islam, kerawanan terhadap pemahaman syariat islam di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai. Dalam rangka meningkatkan pemahaman syariat islam didaerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan Da'i Perbatasan di 6 (enam) Kabupaten/Kota. Jumlah Da'i Perbatasan dan Da'i Terpencil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 200, namun di tahun 2022 ada pengurangan sebanyak 11 orang dikarenakan mencapai batas umur maksimal tenaga kontrak dan mengundurkan diri karena lulus PPPK. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.24. dibawah ini.

**Tabel 2.24.**
**Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pbts | Tpcl | Pbts | Tpcl | Pbts | Tpcl | Pbts | Tpcl | Pbts | Tpcl |
| Aceh Singkil | 32 | 15 | 26 | 16 | 26 | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 |
| Subulussalam | 13 | 11 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 |
| Aceh Selatan | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 13 |
| Aceh Tamiang | 17 | 22 | 15 | 24 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 13 |
| Aceh Tenggara | 42 | 4 | 40 | 3 | 38 | 5 | 38 | 5 | 38 | 5 |
| Simeulue | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 27 |
| **Jumlah** | 104 | 96 | 89 | 111 | 96 | 104 | 96 | 104 | 96 | 104 |
| **Total** | **200** | | **200** | | **200** | | **200** | | **189** | |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2023*

Ket : Pbts : Perbatasan; Tpcl : Terpenci

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Aceh antara lain berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama.

**2.1.3.1.1.2. Pelaksanaan Ibadah**

Kondisi rumah ibadah yang melaksanakan shalat Jum'at pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini :

**Tabel 2.25.**
**Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2023**

| No. | Kabupaten/Kota | Mesjid Agung | Mesjid Kecamatan | Mesjid Mukim | Mesjid Gampong | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Selatan | 1 | 18 | 50 | 260 | 329 |
| 2 | Aceh Tenggara | 1 | 16 | 51 | 385 | 453 |
| 3 | Aceh Timur | 1 | 24 | 66 | 513 | 604 |
| 4 | Aceh Tengah | 1 | 14 | 20 | 295 | 330 |
| 5 | Aceh Barat | 1 | 12 | 36 | 322 | 371 |
| 6 | Aceh Besar | 1 | 23 | 68 | 604 | 696 |
| 7 | Pidie | 1 | 23 | 97 | 730 | 851 |
| 8 | Aceh Utara | 1 | 27 | 76 | 852 | 956 |
| 9 | Simeulue | 1 | 10 | 29 | 138 | 178 |
| 10 | Aceh Singkil | 1 | 11 | 16 | 116 | 144 |
| 11 | Bireun | 1 | 17 | 75 | 609 | 702 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 1 | 9 | 20 | 152 | 182 |
| 13 | Gayo Lues | 1 | 11 | 25 | 136 | 173 |
| 14 | Aceh Jaya | 1 | 9 | 21 | 172 | 203 |
| 15 | Nagan Raya | 1 | 10 | 30 | 222 | 263 |
| 16 | Aceh Tamiang | 1 | 12 | 31 | 213 | 257 |
| 17 | Bener Meriah | 1 | 10 | 27 | 232 | 270 |
| 18 | Pidie Jaya | 1 | 8 | 34 | 222 | 265 |
| 19 | Banda Aceh | 1 | 9 | 17 | 90 | 117 |
| 20 | Sabang | 1 | 3 | 7 | 18 | 29 |
| 21 | Lhokseumawe | 1 | 4 | 9 | 68 | 82 |
| 22 | Langsa | 1 | 5 | 6 | 66 | 78 |
| 23 | Subulussalam | 1 | 5 | 8 | 82 | 96 |
| | **Jumlah** | **23** | **290** | **819** | **6497** | **7,629** |

*Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Aceh pada tahun 2022 terbanyak berada pada Kabupaten Aceh Utara yaitu 956 mesjid, sedangkan yang paling sedikit berada di Kota Sabang yaitu 29 mesjid. Jumlah mesjid yang melaksanakan shalat Jum

at di Aceh sebanyak 7.629 mesjid yang terdiri dari 23 Mesjid Agung, 290 Mesjid Kecamatan, 819 Mesjid Mukim dan 6.497 Mesjid Gampong.

#### 2.1.3.1.2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman didalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimipin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Adat istiadat diimplementasikan sebagai sumber pedoman dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh di semua sektor kehidupan. Oleh karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh.

#### 2.1.3.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam yang ditujukan sesuai dengan Tabel 2.26 sebagai berikut.

**Tabel 2.26.**
**Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | Jumlah Tipe Dayah | | | | | | Jumlah Dayah | Jumlah Guru Dayah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipe A+ | Tipe A | Tipe B | Tipe C | Tipe D | Non Tipe | | |

| | | | | | | | Tipe & Non Tipe Tipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 27 | 83 | 194 | 313 | 122 | - | 739 | - |
| 2019 | 23 | 94 | 168 | 338 | - | 513 | 1.136 | 22.951 |
| 2020 | 23 | 94 | 168 | 338 | - | 513 | 1.136 | 22.951 |
| 2021 | 23 | 94 | 168 | 338 | - | 513 | 1.136 | 22.951 |
| 2022 | 23 | 110 | 230 | 499 | - | 626 | 1.488 | 23.551 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2023 (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 2.26. diatas terlihat bahwa jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2018 setelah melalui proses verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) dayah dengan kategori tipe A+ dan jumlah ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022, menjadi 23 (dua puluh tiga) dayah atau berkurang sebanyak 4 (empat) dayah. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam penetapan dayah tipe mengalami penurunan yang salah satunya adalah penurunan jumlah santri dan guru yang belajar dan mengajar pada dayah.

Mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat lagi dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A+, Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2020, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh masih belum adanya peningkatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh belum melakukan pendataan ulang/akreditasi terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh bahwa pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Dayah (BADA). Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah melakukan inisiasi terhadap pembentukan BADA yang akan melaksanakan fungsi akreditasi dayah di Aceh. Dengan terbentuknya BADA, pada tahun 2021 akan dilakukannya pendataan ulang terhadap dayah-dayah di Aceh untuk dapat dilakukan proses Akreditasi. Dayah-dayah yang telah terakreditasi akan ditetapkan dalam *database* dayah Aceh untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengembangan dayah di Aceh. Tahun 2022, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh juga belum mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena belum selesainya proses verifikasi yang dilakukan oleh BADA. Walaupun demikian proses verifikasi dayah di Aceh telah dilakukan dan sedang dipacu agar dapat segera ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dayah, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah dengan pelaksanaan akreditasi dayah yang akan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

#### 2.1.3.1.4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini diharapkan akan lahir para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

**Tabel 2.27.**
**Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2018 – 2022**

| | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam | Dokumen | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 |
| 2 | Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i | Naskah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya | Orang | 284 | 72 | 0 | 24 | 48 |
| 4 | Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan | Sertifikat | 172 | 184 | 150 | 213 | 146 |

*Sumber : Sekrt. MPU Aceh, Tahun 2023*

Berdasarkan data Tabel 2.27. dapat diketahui jumlah fatwa, himbauan dan taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari tahun 2018 sebanyak 6 Dokumen mengalami penambahan yang signifikan di tahun 2021 sebanyak 12 Dokumen dan di tahun 2022 tidak mengalami penambahan. Sedangkan jumlah ulama yang ditingkatkan kompetensinya masih sangat terbatas, hal ini dilihat dari jumlah pendidikan kader ulama dari tahun 2018 sebanyak 284 orang tetapi pada tahun 2019 jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya mengalami penurunan menjadi 72 orang. Pada tahun 2020 kegiatan Pendidikan Kader Ulama tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran kegiatan tersebut mengalami refocusing akibat pandemi covid-19. Minimnya kader ulama pada 23 Kabupaten/Kota berdampak pada syiar agama untuk mencegah pelanggaran syariat islam di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan peran ulama dalam pembangunan, terutama TOT pengkaderan untuk 23 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 24 orang dan di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 48 orang.

Dalam pelaksanaan syari'at islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan hal penting dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pelaksanaan syari'at islam juga harus mencakup bidang pangan, makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Oleh karenanya menjadi penting adanya penguatan terhadap lembaga pengkajian kehalalan ini sehingga pada akhirnya masyarakat Aceh terlindungi dan terhindarkan dari mengkonsumsi barang barang yang haram atau diragukan kehalalannya. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada MPU dengan membentuk sebuah badan otonom yang berada langsung dibawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) MPU Aceh.

Penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh terus meningkat. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2018 telah menerbitkan 172 sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 184 sertifikat. Akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, LP-POM Aceh hanya menerbitkan 150 sertifikat halal akibat refocusing pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 213 sertifikat dan 148 sertifikat di tahun 2022.

*Sumber : Sekretariat MPU Aceh, Tahun 2023*

**Gambar 2.19. Penerbitan Sertifikal Halal 2018 – 2022**

#### 2.1.3.1.5. Perdamaian

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 2 (dua) program utama reintegrasi diantaranya: 1) pemberdayaan ekonomi korban konflik dan 2) rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik. Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidakakuratan data. Perkembangan indikator perdamaian disajikan dalam Tabel 2.28. berikut ini.

**Tabel 2.28.**
**Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2022**

| No. | Kelompok Target | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Orang) | 2078 | 2286 | 2514 | 2766 | 3042 |
| 2 | Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik (Orang) | 627 | 690 | 759 | 835 | 918 |

*Sumber : Badan Reintegrasi Aceh, 2023*

#### 2.1.3.1.6. Indeks Demokrasi Indonesia (kesbangpol)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak hak politik (political rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democrasy) , pada Tahun 2021 untuk terakhir kalinya angka IDI yang dikeluarkan oleh BPS merupakan angka IDI yang penghitungannya menggunakan metode lama untuk IDI 2020. Akhirnya, pada tahun 2022 IDI dihitung menggunakan metode baru untuk IDI 2021 mencakup tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. IDI menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain, yaitu: 1. media review (analisis isi berita surat kabar) 2. document review (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah) 3. focused group discussion (FGD). (Tabel 2.29).

**Tabel 2.29.**
**Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 – 2021**

| Aspek | Tahun | | | ASPEK | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| Aspek kebebasan sipil | 96,79 | 93,28 | 84,49 | Aspek Kebebasan | 85,50 |
| Aspek hak-hak politik | 68,09 | 65,22 | 64,94 | Aspek Kesetaraan | 81,41 |
| Aspek lembaga demokrasi | 77,67 | 79,08 | 74,91 | Aspek Kapasitas Lembaga | 75,82 |
| **Indeks Demokrasi Indonesia** | **79,97** | **78,00** | **73,93** | **Indeks Demokrasi Indonesia** | **80,92** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)*

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021 Provinsi Aceh mencapai angka 80,92 dalam skala 0 sampai 100. Klasifikasi tingkat Kinerja demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "Tinggi" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "rendah" (indeks < 60). Hal ini berarti Indeks demokrasi Provinsi Aceh termasuk dalam kategori "kinerja demokrasi tinggi". Nilai IDI Provinsi Aceh menempati peringkat 6 Nasional dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2021, 8 provinsi memiliki indeks Demokrasi dengan kategori tinggi (>80) dan 26 provinsi lainnya berada dalam kategori (60-80). capain IDI tinggi IDI Provinsi Aceh tahun 2021 merupakan yang pertama dihitung menggunakan metode baru

sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2009 – 2020). Pada tahun 2021.

**2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib**

**2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar**

**2.1.3.2.1.1. Pendidikan**

**A. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah**

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, APM Aceh tercatat sebesar 70,70 persen meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara rinci APM pada Tabel 2.37.

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, APM Aceh tercatat sebesar 71,16 persen meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara rinci APM pada Tabel 2.30.

**Tabel 2.30.**
**Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/kota | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Simeulue | 80,70 | 81,02 | 80,90 | 80,51 | 81,94 | 0,39 |
| Aceh Singkil | 67,52 | 68,59 | 68,57 | 67,72 | 68,49 | 0,36 |
| Aceh Selatan | 71,59 | 72,67 | 75,41 | 75,28 | 75,04 | 1,20 |
| Aceh Tenggara | 67,91 | 68,12 | 68,50 | 69,27 | 68,44 | 0,20 |
| Aceh Timur | 58,46 | 58,21 | 58,76 | 59,55 | 59,13 | 0,29 |

| Kabupaten/kota | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Aceh Tengah | 72,54 | 72,76 | 74,12 | 73,48 | 74,18 | 0,57 |
| Aceh Barat | 70,80 | 71,15 | 71,08 | 71,89 | 71,15 | 0,13 |
| Aceh Besar | 72,36 | 72,62 | 72,27 | 73,14 | 72,07 | -0,10 |
| Pidie | 73,98 | 74,05 | 74,19 | 73,59 | 72,43 | -0,53 |
| Bireuen | 72,82 | 72,84 | 72,98 | 72,48 | 71,92 | -0,31 |
| Aceh Utara | 62,46 | 62,63 | 62,87 | 62,38 | 69,21 | 2,71 |
| Aceh Barat Daya | 74,98 | 73,97 | 73,92 | 73,58 | 73,92 | -0,35 |
| Gayo Lues | 70,17 | 70,57 | 73,52 | 73,88 | 74,26 | 1,44 |
| Aceh Tamiang | 65,85 | 66,23 | 66,51 | 66,55 | 66,75 | 0,34 |
| Nagan Raya | 68,11 | 68,39 | 68,60 | 68,05 | 67,51 | -0,22 |
| Aceh Jaya | 74,35 | 74,42 | 74,82 | 74,71 | 74,54 | 0,06 |
| Bener Meriah | 66,51 | 66,88 | 67,28 | 68,29 | 67,37 | 0,33 |
| Pidie Jaya | 78,84 | 79,14 | 78,92 | 78,84 | 72.23 | -2,10 |
| Banda Aceh | 82,45 | 81,47 | 81,51 | 82,08 | 82,91 | 0,14 |
| Sabang | 79,72 | 78,24 | 78,84 | 77,71 | 78,86 | -0,26 |
| Langsa | 72,16 | 72,14 | 73,96 | 74,35 | 74,17 | 0,70 |
| Lhokseumawe | 75,93 | 75,26 | 75,18 | 75,29 | 77,38 | 0,48 |
| Subulussalam | 77,24 | 76,51 | 77,40 | 77,87 | 77,41 | 0,06 |
| **Aceh** | **70,26** | **70,35** | **70,70** | 70,80 | 71,16 | 0,32 |
| **Nasional** | **60,67** | **60,84** | **61,25** | 61,65 | 61,97 | 0,53 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (data diolah)*

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten/Kota tahun 2018-2022, ada beberapa Kabupaten/Kota yang pencapaian APM nya masih rendah, seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Nagan Raya. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh adanya anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di luar wilayah asalnya, dengan dasar pertimbangan sekolah diluar wilayahnya memiliki kualitas yang lebih baik dari pada wilayah tempat tinggalnya.

**B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun**

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode tahun 2018-2021, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami kenaikan, sedangkan ditahun 2022 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2022 APS penduduk usia 16-18 tahun mencapai 83,10 persen, ini berarti masih terdapat 16,9 persen penduduk usia 16-18 tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/sederajat atau tidak bersekolah lagi. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur,

Bener Meriah dan Aceh Tenggara. APS tertinggi terdapat di Kota Sabang, Kota Banda Aceh dan Gayo Lues. Perkembangan APS Penduduk Aceh usia 16 – 18 tahun terlihat pada Tabel 2.31 berikut ini.

**Tabel 2.31.**
**Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16-18 Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Simeulue | 89,29 | 89,02 | 88,63 | 88,29 | 89,20 | -0,02 |
| Aceh Singkil | 85,35 | 85,03 | 84,89 | 84,17 | 83,62 | -0,51 |
| Aceh Selatan | 83,43 | 82,64 | 83,18 | 83,68 | 79,43 | -1,19 |
| Aceh Tenggara | 84,57 | 83,95 | 83,48 | 83,71 | 75,36 | -2,75 |
| Aceh Timur | 74,48 | 73,96 | 73,28 | 73,83 | 65,33 | -3,09 |
| Aceh Tengah | 88,05 | 87,64 | 88,51 | 88,25 | 84,40 | -1,03 |
| Aceh Barat | 77,50 | 79,70 | 78,68 | 79,29 | 80,39 | 0,93 |
| Aceh Besar | 79,50 | 83,47 | 83,08 | 83,75 | 86,14 | 2,05 |
| Pidie | 86,14 | 85,95 | 86,48 | 85,93 | 81,22 | -1,43 |
| Bireuen | 78,10 | 78,76 | 79,55 | 79,15 | 81,67 | 1,13 |
| Aceh Utara | 79,73 | 79,52 | 79,84 | 79,50 | 87,11 | 2,32 |
| Aceh Barat Daya | 85,58 | 85,26 | 84,53 | 84,21 | 81,99 | -1,06 |
| Gayo Lues | 90,03 | 89,79 | 89,20 | 89,63 | 95,46 | 1,52 |
| Aceh Tamiang | 82,59 | 82,43 | 83,11 | 83,01 | 92,99 | 3,13 |
| Nagan Raya | 85,22 | 84,34 | 84,55 | 83,98 | 80,78 | -1,32 |
| Aceh Jaya | 80,61 | 84,56 | 84,90 | 84,05 | 89,26 | 2,62 |
| Bener Meriah | 84,49 | 83,47 | 83,82 | 84,10 | 73,81 | -3,17 |
| Pidie Jaya | 85,16 | 87,74 | 87,29 | 86,74 | 78,75 | -1,83 |
| Banda Aceh | 92,70 | 92,23 | 91,89 | 91,96 | 96,42 | 1,01 |
| Sabang | 99,55 | 98,86 | 98,93 | 97,88 | 98,01 | -0,39 |
| Langsa | 86,27 | 86,92 | 86,76 | 86,73 | 90,32 | 1,17 |
| Lhokseumawe | 87,01 | 87,02 | 86,87 | 87,21 | 91,65 | 1,33 |
| Subulussalam | 89,64 | 89,14 | 88,96 | 89,76 | 83,50 | -1,71 |
| Aceh | 82,92 | 83,26 | 83,27 | 83,28 | 83,10 | 0,05 |
| **Nasional** | **71,99** | **72,36** | **72,72** | 78,66 | 73,15 | 0,54 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (Data diolah)*

## C. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis

pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Pentingnya pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan ini untuk memenuhi hak warga negara dalam hal ini anak usia sekolah. Pada level provinsi terdapat sebanyak 29 indikator yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu:

a. Angka Partisipasi Sekolah, dengan target 100% pertahun;
b. Kemampuan literasi dan numerasi;
c. Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
d. Iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas.

Untuk kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi terdapat sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Capaian 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 57,28 | 56,03 |
| 2 | Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 48,06 | 48,94 |
| 3 | Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 55,28 | 53,27 |
| 4 | Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 47,17 | 47,09 |
| 5 | Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,95 | 58,96 |
| 6 | Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 41,55 | 44,51 |
| 7 | Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 62,14 | 59,6 |
| 8 | Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 53,77 | 53,29 |
| 9 | Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,05 | 57,27 |
| 10 | Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 54,78 | 52,41 |

*Sumber : Indikator Rapor Pendidikan, 2023*

Kemampuan Literasi yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Berdasarkan tabel diatas, capaian literasi dan numerasi untuk masing-masing jenjang pendidikan mengalami penurunan. Kemampuan literasi dan numerasi Jenjang SMA masing lebih baik jika dibandingkan dengan SMK. Secara umum diperlukan upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

**D. Sarana dan Prasarana Sekolah**

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Data persentase kondisi ruang kelas jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.20. berikut ini.

**Gambar 2.20. Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2022**

Gambar 2.26. diatas menginformasikan bahwa kondisi ruang kelas sekolah Negeri/ Swasta tahun 2022 dimana jumlah sekolah dalam Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini terlihat pada kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fokus provinsi pada pembagian urusan bidang pendidikan adalah pada manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Implementasi dari peraturan tersebut adalah diletakkannya kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa berada pada pemerintah provinsi (Aceh).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kondisi ruang kelas dengan kondisi rusak sedang dan rusak ringan. Pada tahun 2022, jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB ruang kelas berjumlah 10.723 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 4.719 ruang kelas (44%). Dalam ruang lingkup Aceh, tren kondisi ruang kelas

baik terus meningkat, artinya progres peningkatan kualitas ruang kelas berjalan dengan baik di provinsi Aceh, namun Jika dibandingkan dengan kondisi ruang kelas nasional, maka ini masih menjadi pekerjaan besar karena ruang kelas baik/rusak ringan rata-rata nasional (SMA, SLB dan SMK).

**E. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian; 3) Kompetensi profesional; dan 4) Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/ SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan guru pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi guru tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.32. berikut ini.

**Tabel 2.32.**
**Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2022**

| Kabupaten/Kota | SMA | | SMK | | SLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum |
| Simeulue | 23,3 | 77,7 | 23,8 | 76,2 | 9,1 | 90,9 |
| Aceh Singkil | 37,4 | 62,6 | 20,7 | 79,3 | 11,1 | 88,9 |
| Aceh Selatan | 39,1 | 60,9 | 39,7 | 60,3 | 39,7 | 60,3 |
| Aceh Tenggara | 37,1 | 62,9 | 20,7 | 79,3 | 21,4 | 78,6 |
| Aceh Timur | 34,5 | 65,5 | 22,6 | 77,4 | 9,1 | 90,9 |
| Aceh Tengah | 48,0 | 52,0 | 54,0 | 46,0 | 14,4 | 85,6 |
| Aceh Barat | 41,5 | 58,5 | 41,5 | 58,5 | 12,9 | 87,1 |
| Aceh Besar | 52,7 | 47,3 | 34,0 | 66,0 | 11,8 | 88,2 |
| Pidie | 40,2 | 59,8 | 26,8 | 73,2 | 25,0 | 75,0 |
| Bireuen | 42,5 | 57,5 | 39,9 | 60,1 | 20,9 | 79,1 |
| Aceh Utara | 40,9 | 59,1 | 23,4 | 76,6 | 4,4 | 95,6 |
| Aceh Barat Daya | 39,6 | 60,4 | 37,1 | 62,9 | 34,8 | 65,2 |
| Gayo Lues | 36,6 | 63,7 | 24,5 | 75,5 | 7,1 | 92,9 |
| Aceh Tamiang | 41,0 | 59,0 | 40,7 | 59,3 | 22,5 | 77,5 |
| Nagan Raya | 35,4 | 64,6 | 17,8 | 82,2 | 4,5 | 95,5 |
| Aceh Jaya | 32,5 | 67,5 | 21,4 | 78,6 | - | - |
| Bener Meriah | 31,2 | 68,8 | 24,5 | 75,5 | 21,4 | 78,6 |
| Pidie Jaya | 36,5 | 63,5 | 19,8 | 80,2 | 4,2 | 95,8 |
| Banda Aceh | 72,4 | 27,6 | 52,0 | 48,0 | 31,3 | 68,7 |

| Kabupaten/Kota | SMA | | SMK | | SLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum |
| Sabang | 60,3 | 39,7 | 61,1 | 38,9 | 30,0 | 70,0 |
| Langsa | 55,0 | 45,0 | 51,4 | 48,6 | 27,3 | 72,7 |
| Lhokseumawe | 60,0 | 40,0 | 40,4 | 59,6 | 4,0 | 96,0 |
| Subulussalam | 27,3 | 72,7 | 24,8 | 75,2 | - | - |
| Aceh | 42,6 | 57,4 | 34,0 | 66,0 | 18,6 | 81,4 |

Berdasarkan data diatas, persentase sertifikasi guru maka pada jenjang pendidikan SLB yang memiliki guru sudah bersertifikasi paling kecil sebesar 16,9% dan yang belum bersertifikasi sebanyak 83,1%.

#### 2.1.3.2.1.2. Kesehatan

**A. Angka Kematian Neonatus (AKN)**

Angka Kematian Neonatus (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2018-2022 AKN Aceh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.33.**
**Angka Kematian Neonatus Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka Kematian Neonatus (per 1.000 Kelahiran) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2023*

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian neonatal berdasarkan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah berat bayi lahir rendah, infeksi atau peradangan, serta pengembangan parasit dalam tubuh dan asfiksia.

**B. Gizi Buruk**

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.34.**
**Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2022**

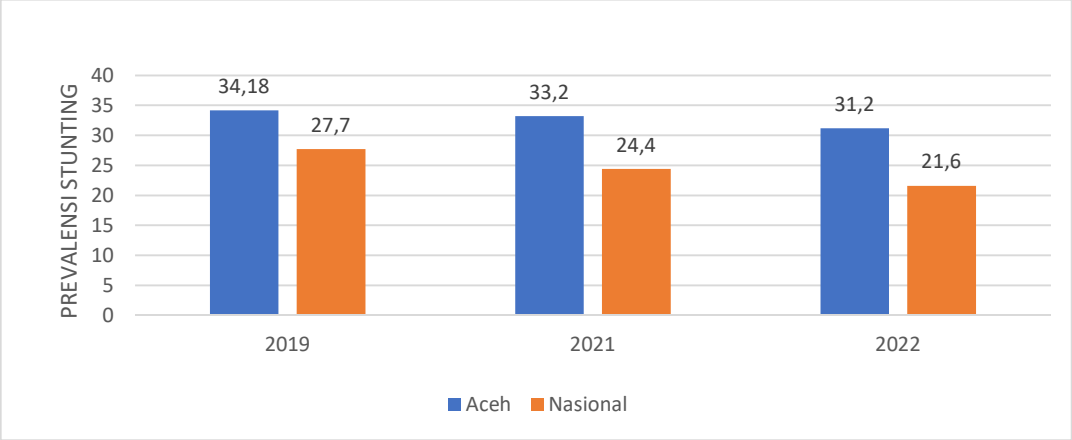


Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berada diatas angka nasional dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Sementara itu prevalensi balita gizi buruk dan kurang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.35.**
**Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk di Aceh Tahun 2018 – 2022**

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Aceh | | 8,4 | 8,8 | 1,1 | ..... |
| 2 | Nasional | | | | ..... | ..... |

*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023*

Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berada diatas angka nasional dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Sementara itu prevalensi balita gizi buruk berdasarkan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.36.**
**Prevalensi Gizi Buruk di Aceh Tahun 2019 – 2022**

| No | Kabupaten/Kota | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1. | KAB SIMEULUE | 110 | 4,5 | 261 | 5 | 169 | 2,5 | 54 | 0,8 |
| 2. | KAB ACEH SINGKIL | 56 | 1,4 | 81 | 1,5 | 72 | 1 | 105 | 1 |

| No | Kabupaten/Kota | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 3. | KAB ACEH SELATAN | 195 | 3,5 | 106 | 0,8 | 81 | 0,5 | 77 | 0,5 |
| 4. | KAB ACEH TENGGARA | 33 | 4,4 | 134 | 2,5 | 85 | 1 | 86 | 0,7 |
| 5. | KAB ACEH TIMUR | 648 | 4,2 | 1077 | 3,6 | 629 | 1,8 | 387 | 1 |
| 6. | KAB ACEH TENGAH | 103 | 1,9 | 83 | 0,8 | 59 | 0,5 | 43 | 0,3 |
| 7. | KAB ACEH BARAT | 21 | 1,9 | 209 | 3,6 | 95 | 1,3 | 137 | 1,1 |
| 8. | KAB ACEH BESAR | 179 | 2,4 | 618 | 2,7 | 300 | 1,3 | 524 | 1,6 |
| 9. | KAB PIDIE | 238 | 2,3 | 402 | 2 | 292 | 1,2 | 219 | 0,7 |
| 10. | KAB BIREUEN | 346 | 1,8 | 481 | 1,9 | 269 | 0,8 | 100 | 0,3 |
| 11. | KAB ACEH UTARA | 194 | 4,9 | 1129 | 3,1 | 688 | 1,6 | 377 | 0,8 |
| 12. | KAB ACEH BARAT DAYA | 47 | 2,1 | 84 | 1,6 | 62 | 0,7 | 57 | 0,5 |
| 13. | KAB GAYO LUES | 55 | 2,3 | 71 | 1,6 | 39 | 0,6 | 18 | 0,2 |
| 14. | KAB ACEH TAMIANG | 80 | 1,3 | 307 | 1,5 | 185 | 0,8 | 84 | 0,4 |
| 15. | KAB NAGAN RAYA | 20 | 1,8 | 267 | 3,5 | 242 | 2,8 | 111 | 1 |
| 16. | KAB ACEH JAYA | 31 | 0,9 | 89 | 1,7 | 38 | 0,7 | 22 | 0,3 |
| 17. | KAB BENER MERIAH | 45 | 4,6 | 96 | 2,5 | 75 | 1 | 41 | 0,4 |
| 18. | KAB PIDIE JAYA | 81 | 2,2 | 122 | 1,9 | 157 | 1,8 | 87 | 0,7 |
| 19. | KOTA BANDA ACEH | 27 | 1,7 | 138 | 1,3 | 113 | 1,3 | 61 | 0,5 |
| 20. | KOTA SABANG | 2 | 0,1 | 15 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | KOTA LANGSA | 33 | 1,4 | 28 | 0,2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 22. | KOTA LHOKSEUMAWE | 80 | 1,3 | 103 | 1,1 | 135 | 1,2 | 53 | 0,4 |
| 23. | KOTA SUBULUSSALAM | 52 | 2,4 | 141 | 4,7 | 158 | 5,5 | 99 | 1,4 |
| **JUMLAH** | | 2676 | 2,4 | 6042 | 2,2 | 3948 | 1,2 | 2744 | 0,7 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 202[*

## C. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Salah satu indikator untuk menilai kinerja rumah sakit adalah *Bed Occupancy Rate (BOR)*. BOR adalah persentase tempat tidur yang terisi dari sekian kapasitas tempat tidur yang disediakan atau tersedia pada layanan rawat inap. Data BOR pada Rumah Sakit di Aceh periode tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.37. dan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.37.**
***Bed Occupancy Rate* (BOR) Tahun 2018 – 2022**

| ***Bed Occupancy Rate* (BOR) (%)** | **Tahun** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 95,00 | 95,00 |
| Rumah Sakit Jiwa (RSJ) | 99,85 | 92,01 | 90,14 | 91,01 | 94,72 |
| Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) | 75,00 | 58,00 | 23,00 | 36,00 | 53,00 |

*Sumber : RSUZA, RSJ, RSIA, 2023*

Persentase *Bed Occupancy Rate* **(**BOR) pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) tahun 2018-2020 sudah sesuai dengan standar ideal BOR berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu 60%-85%. Tahun 2021 dan tahun 2022 persentase BOR pada RSUZA sebesar 95 persen, sudah melebihi standar yang ditetapkan, tingginya nilai BOR ini salah satunya karena RSUZA merupakan rumah sakit rujukan dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Disamping itu, sarana dan prasarana yang memadai dan sumberdaya manusia yang baik juga mempengaruhi bagusnya persentase BOR di RSUZA. Tahun 2018-2022 BOR pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sudah dalam kondisi ideal bahkan lebih, sedangkan BOR pada Rumah Sakir Ibu dan Anak (RSIA) tahun 2018 sebesar 75 persen sedangkan tahun 2019-2012 belum mancapai kondisi ideal.

## D. Gizi Buruk

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.38.**
**Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2022**

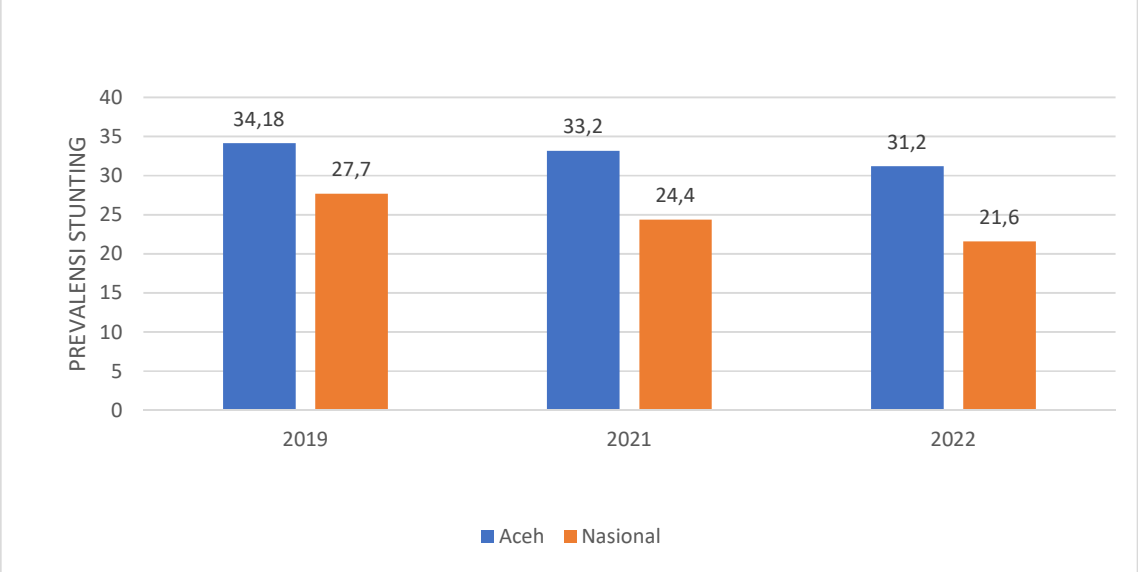


Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berada diatas angka nasional dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Sementara itu prevalensi balita gizi buruk dan kurang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.39.**
**Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk di Aceh Tahun 2018 – 2022**

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Aceh | | 8,4 | 8,8 | 1,1 | ..... |
| 2 | Nasional | | | | ..... | ..... |

*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023*

### 2.1.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**A. Jalan**

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan peritungan rasio pada

bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan yang merupakan jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:

1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.112,07 km (Kepmen PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022) tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 1.781,72 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.766,26 km.

### A.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya seperti Bandara dan

Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada Tabel 2.40.

**Tabel 2.40.**
**Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap**
**Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | Jalan Provinsi | | | | Jalan Nasional | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Panjang Jalan (Km) | Kondisi Mantap | | | Panjang Jalan (Km) | Kondisi Mantap | | |
| | | Baik (B) (Km) | Sedang (S) (Km) | Proporsi | | Baik (B) (Km) | Sedang (S) (Km) | Proporsi |
| 2018 | 1.781,72 | 870,79 | 324,14 | 0,67 | 2.102,08 | 1.161,86 | 812,22 | 0,94 |
| 2019 | 1.781,72 | 1.297,35 | 72,03 | 0,77 | 2.102,08 | 1.203,61 | 828,54 | 0,97 |
| 2020 | 1.781,72 | 1.321,82 | 92,14 | 0,79 | 2.111,39 | 1.210,51 | 821,74 | 0,96 |
| 2021 | 1.781,72 | 1.157,10 | 206,83 | 0,77 | 2.102,07 | 954,84 | 1.109,10 | 0,98 |
| 2022 | 1.781,72 | 1.391,21 | 112,72 | 0,84 | 2.102,07 | 983,54 | 1.090,25 | 0,98 |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2023 dan Satker P2JN Aceh 2023*

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 0,67 di tahun 2018 menjadi 0,84 di tahun 2022. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 0,98.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (Integrated Road Management System/IRMS).

### A.2. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio

panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada Tabel 2.41.

**Tabel 2.41.**
**Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2016-2022**

| Tahun | Panjang Jalan (km) | | | | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Rasio (Jiwa/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jalan Nasional | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten | Total Panjang Jalan | | |
| 2018 | 2.102,08 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.281.314 | 223,31 |
| 2019 | 2.102,08 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.371.532 | 227,13 |
| 2020 | 2.111,39 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.274.871 | 223,04 |
| 2021 | 2.102,08 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.333.733 | 225,53 |
| 2022 | 2.102,08 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.407.855 | 228,66 |

*Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021*

Pada Tabel 2.41, mengambarkan bahwa di Aceh pada tahun 2022, 1 km jalan melayani 228 penduduk. Sementara pada tahun 2018, 1 km jalan melayani 223 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksessibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

**A.3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap**

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *international roughness index/IRI*) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *road condition index/RCI*). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 kondisi mantap adalah sebesar 84,41 persen atau 1.503,93 Km, meningkat dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 67,07 persen atau 1.194,93 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.42.

**Tabel 2.42.**
**Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jalan Provinsi | Kondisi | | | | Mantap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik (B) (km) | % Baik | Sedang (S) (km) | % Sedang | Km | % |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)=(3)/(2)*100* | *(5)* | *(6)=(5)/(2)*100* | *(7)=(3)/(5)* | *(8)=(7)/(2)*100* |
| 2018 | 1.781,72 | 870,79 | 48,87 | 324,14 | 18,19 | 1.194,93 | 67,07 |
| 2019 | 1.781,72 | 1.297,35 | 72,81 | 72,03 | 4,04 | 1.369,38 | 76,86 |
| 2020 | 1.781,72 | 1.321,82 | 74,19 | 92,14 | 5,17 | 1.413,96 | 79,36 |
| 2021 | 1.781,72 | 1.157,10 | 64,94 | 206,83 | 11,61 | 1.363,93 | 76,55 |
| 2022 | 1.781,72 | 1.391,21 | 78,08 | 112,72 | 6,32 | 1.503,93 | 84,41 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2023*

Kedepannya, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Aceh antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Provinsi Aceh.;

**A.4. Pencapaian Target Penyelenggaraan Jalan**

Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.503,93 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,41%. Tentunya Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya-upaya lanjutan penanganan jalan provinsi, terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan prioritas yang sebelumnya pelaksanaannya menggunakan sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy years contract*/MYC), seperti Gambar 2.21 di bawah ini.

**Gambar 2.21. Penanganan Jalan Lintas Strategis Menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak (multy years contract/MYC) Tahun 2020-2022**

Pembangunan jalan yang merupakan lintas strategis ini sudah dimulai sejak Gubernur Aceh Ibrahim Hasan diawal tahun 1990-an yang diberi nama dengan "***Ruas Jalan Terobosan***" kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Syamsuddin Mahmud dengan nama "***Jaring Laba-laba***", berganti dengan Gubernur Abdullah Puteh program itu diberi nama "***Ladia Galaska***". Tujuannya adalah meningkatkan konektifitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Penanganan jalan dengan mekanisme MYC pada tahun 2020-2022 sebanyak 11 ruas dilakukan berdasarkan pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak atau MYC harus mendapatkan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditanda-tangani bersamaan dengan penanda-tangan KUA dan PPAS dan tidak melampui masa jabatan kepala daerah dan RPJMA.

Kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani oleh 4 (empat) pimpinan DPRA (Muhammad Sulaiman, SE. M.S.M, Dalimi, SE. Ak, Teuku Irwan Djohan, ST dan Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si) dan Gubernur Aceh dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan

Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022, tanggal 10 September 2019;

Kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54A ayat (3) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Kesepakatan bersama proyek Multi Years 2020-2022, ditanda tangani bersamaan dengan KUA/PPAS dan menjadi bagian dari QANUN APBA TA. 2020, yang sebelumnya juga telah dimasukkan ke dalam Rancangan Qanun APBA 2019 dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor 903–5297 Tahun 2019. Selanjutnya telah dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA, serta telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tanggal 9 Oktober 2019, dengan Alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.477.278.761.000,-. Selanjutnya penganggaran pelaksanaan peningkatan dan pengawasan jalan MYC masing-masing terbagi pada tahun 2020 sebesar Rp. 341.147.757.000,-, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.169.586.659.000,- dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 966.544.345.000,-.

Penyelesain pembangunan 11 ruas jalan strategis ini diperkirakan turut memberikan kontribusi kenaikan persentase kondisi mantap jalan provinsi keseluruhan yang sebelumnya sebesar 76,86 persen pada tahun 2019 dan diharapkan menjadi sebesar 95,30 persen pada akhir tahun 2026. Namun demikian, pada saat pelaksanaan diperkirankan beberapa ruas jalan sampai dengan akhir tahun 2022 tidak mencapai kondisi mantap jalan 100 persen, sebagai berikut:

1. Jalan Sp.Tiga Redelong- Pondok Baru - Samar Kilang, dengan kondisi mantap jalan sebesar 85,81 persen.
2. Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues, dengan kondisi mantap jalan sebesar 82,85 persen.
3. Jalan Trumon - Batas Singkil, dengan kondisi mantap jalan sebesar 85,38 persen.
4. Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, dengan kondisi mantap jalan sebesar 87,73 persen.
5. Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti, dengan kondisi mantap jalan sebesar 60,83 pesen.
6. Jalan Nasreuhe - Lewak – Sibigo, dengan kondisi mantap jalan 50,81 persen.

Dengan demikian pada akhir tahun 2022, prediksi kondisi mantap 11 ruas jalan MYC sebesar 90,83 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 9,17 persen sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.43 di bawah ini.

**Tabel 2.43.**

| NO | KAB/KOTA | RUAS JALAN | PANJANG ( KM ) | KONDISI PERMUKAAN TAHUN 2021 (KM) | | | | | | | PERKIRAAN PERSENTASE KONDISI MANTAP AKHIR TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BAIK | SEDANG | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | BELUM TEMBUS | MANTAP | TIDAK MANTAP | |
| 1 | Aceh Besar | Jl. Jantho - Batas Aceh Jaya | 41,30 | 36,30 | 0,50 | - | 4,50 | - | 36,80 | 10,90 | 100 |
| 2 | Bener Meria | Jl. Sp.Tiga Redelong- Pondok Baru - Samar Kilang | 57,08 | 36,40 | 1,30 | 1,10 | 18,28 | - | 37,70 | 33,95 | 100 |
| 3 | Aceh Timur | Jl. Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues | 107,30 | 49,40 | 6,70 | 4,90 | 46,30 | - | 56,10 | 47,72 | 100 |
| 4 | Gayo Lues | Jl. Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren | 61,42 | 54,52 | 2,70 | 0,20 | 4,00 | - | 57,22 | 6,84 | 100 |
| 5 | Aceh Tamiar | Jl. Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru | 43,52 | 38,40 | 1,40 | 1,70 | 2,02 | - | 39,80 | 8,55 | 88,50 |
| 6 | Gayo Lues | Jl. Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya | 90,15 | 72,75 | 4,60 | 6,00 | 6,80 | - | 77,35 | 14,20 | 100 |
| 7 | Abdya | Jl. Batas Gayo Lues - Babah Roet | 27,57 | 21,80 | 1,17 | - | 4,60 | - | 22,97 | 16,68 | 100 |
| 8 | Aceh Selatar | Jl. Trumon - Batas Singkil | 51,42 | 19,90 | 5,00 | 0,60 | 25,92 | - | 24,90 | 51,58 | 100 |
| 9 | Aceh Singkil | Jl. Bts. A. Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti | 44,93 | 21,93 | 5,60 | 0,50 | 16,90 | - | 27,53 | 38,73 | 81,08 |
| 10 | Simeulue | Jl. Sinabang - Sibigo | 92,64 | 67,94 | 9,10 | 6,60 | 9,00 | - | 77,04 | 16,84 | 83,80 |
| 11 | Simeulue | Jl. Nasreuhe - Lewak - Sibigo | 129,42 | 61,42 | 0,90 | 0,20 | 66,90 | - | 62,32 | 51,85 | 69,09 |
| **JUMLAH** | | | **746,75** | **480,76** | **38,97** | **21,80** | **205,22** | **-** | **519,73** | **297,82** | |
| **PERSENTASE (%) TOTAL** | | | **100,00** | **64,38** | **5,22** | **2,92** | **27,48** | **-** | **69,60** | **30,40** | |
| **REKAP KONDISI (%)** | | | MANTAP | | | | | **69,60** | | | **90,83** |
| | | | TDK MANTAP | | | | | **30,40** | | | **9,17** |

Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan 11 lintas strategis dengan sistim kontrak MYC sebagai berikut:

1. Adanya hambatan Administrasi selama proses pengadaan Barang dan jasa;
2. Proses lelang yang berlarut-larut, malah ada yang sampai akhir tahun 2021;
3. Terdapat beberapa jembatan yang belum terbangun/tertangani didalam ruas penanganan kontrak tahun jamak.

Untuk mengfungsionalkan beberapa lintas strategis dimaksud sekaligus pencapaian target kondisi mantap jalan provinsi Aceh menjadi 95,30 persen di akhir tahun 2026, maka masih diperlukan diprioritaskan lanjutan pembangunan ruas jalan MYC yang belum mencapai kondisi mantap 100 persen. Selain itu, terhadap beberapa ruas jalan dimaksud dilakukan pemeliharaan baik rutin maupun berkala untuk menjaga umur rencana jalan dan kondisi mantap jalan.

**B. Air Minum dan Sanitasi**

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

**B.1. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi**

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti permukaan sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL),dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Develpoment Goal's*).

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami peningkatan sebesar 23,22 % dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk akses sanitasi layak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 10,39 %. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.22 sebagai berikut.

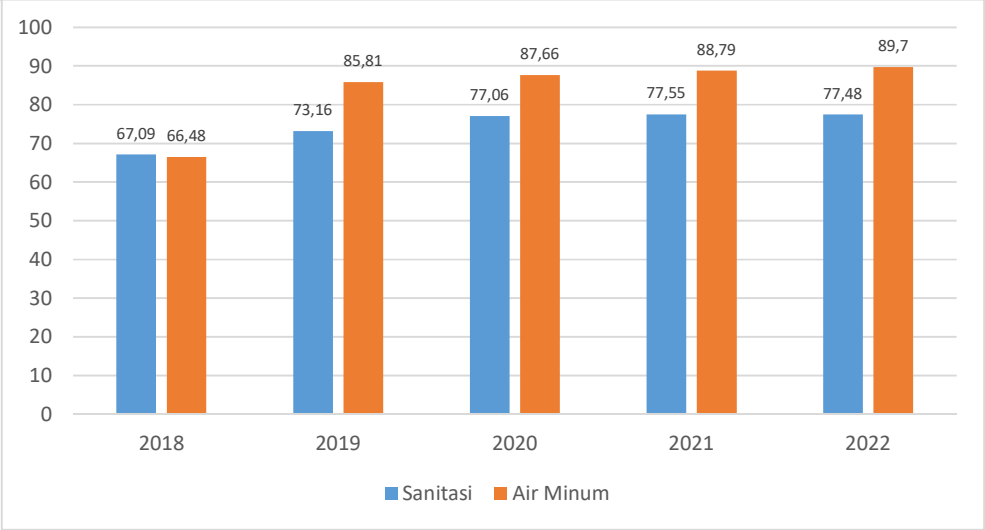


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023*

**Gambar 2.22. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2018 -2022**

Menurut Kabupaten/Kota persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2021 disajikan pada Tabel 2.44.

**Tabel 2.44.**
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2022**

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Simeulue | 55,27 | 65,47 | 66,51 | 71,56 | 70,21 |
| Aceh Singkil | 63,53 | 73,54 | 64,22 | 69,56 | 78,92 |
| Aceh Selatan | 57,83 | 62,28 | 68,78 | 62,55 | 70,83 |
| Aceh Tenggara | 46,73 | 51,18 | 54,04 | 62,71 | 62,88 |
| Aceh Timur | 58,38 | 64,52 | 74,65 | 66,75 | 69,06 |
| Aceh Tengah | 55,43 | 79,99 | 81,26 | 90,58 | 89,69 |
| Aceh Barat | 76,8 | 78,28 | 83,45 | 89,60 | 88,39 |
| Aceh Besar | 84,99 | 85,94 | 87,51 | 87,40 | 83,49 |
| Pidie | 53,22 | 59,06 | 63,54 | 54,10 | 54,68 |
| Bireuen | 73,00 | 77,97 | 84,16 | 81,89 | 85,39 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aceh Utara | 61,83 | 63,66 | 75,83 | 79,97 | 78,92 |
| Aceh Barat Daya | 37,07 | 54,96 | 50,27 | 65,71 | 65,94 |
| Gayo Lues | 36,75 | 44,52 | 43,32 | 47,63 | 46,33 |
| Aceh Tamiang | 79,61 | 80,34 | 84,61 | 87,45 | 82,74 |
| Nagan raya | 62,92 | 70,52 | 80,35 | 74,86 | 79,97 |
| Aceh Jaya | 71,91 | 82,13 | 83,27 | 81,60 | 78,05 |
| Bener Meriah | 60,8 | 79,84 | 84,12 | 86,69 | 81,56 |
| Pidie Jaya | 57,73 | 72,83 | 66,39 | 74,30 | 73,49 |
| Banda Aceh | 99,21 | 99,62 | 99,41 | 99,88 | 96,88 |
| Sabang | 91,65 | 89,71 | 89,20 | 92,25 | 89,52 |
| Langsa | 90,00 | 90,96 | 91,57 | 91,81 | 91,92 |
| Lhokseumawe | 89,83 | 91,00 | 88,07 | 93,10 | 90,27 |
| Subulussalam | 52,99 | 75,14 | 73,54 | 69,71 | 72,46 |
| Aceh | **67,09** | **73,16** | **77,06** | **77,55** | **77,48** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023*

Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagaiman disajikan pada Tabel 2.45. Kota Lhokseumawe adalah yang mendominasi tingkat Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi dan yang terendah adalah Kota Subulussalam.

**Tabel 2.45.**
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2022**

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Simeulue | 67,42 | 83,27 | 79,79 | 87,45 | 83,69 |
| Aceh Singkil | 55,23 | 80,14 | 72,72 | 78,58 | 84,37 |
| Aceh Selatan | 45,42 | 82,27 | 80,44 | 79,65 | 77,45 |
| Aceh Tenggara | 69,53 | 78,03 | 90,92 | 86,71 | 93,80 |
| Aceh Timur | 52,54 | 74,04 | 74,67 | 83,16 | 82,85 |
| Aceh Tengah | 61,41 | 93,63 | 89,38 | 90,10 | 97,10 |
| Aceh Barat | 67,85 | 87,20 | 94,03 | 94,22 | 95,49 |
| Aceh Besar | 82,87 | 92,54 | 88,59 | 82,36 | 90,38 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pidie | 59,06 | 87,21 | 90,35 | 89,24 | 89,22 |
| Bireuen | 60,91 | 93,98 | 91,32 | 93,53 | 94,79 |
| Aceh Utara | 53,42 | 75,57 | 86,25 | 91,09 | 91,25 |
| Aceh Barat Daya | 46,21 | 94,26 | 93,87 | 95,34 | 89,11 |
| Gayo Lues | 66,78 | 77,53 | 71,76 | 84,68 | 86,19 |
| Aceh Tamiang | 75,91 | 78,54 | 78,73 | 83,12 | 83,82 |
| Nagan Raya | 70,60 | 86,94 | 93,32 | 90,13 | 90,49 |
| Aceh Jaya | 76,99 | 90,64 | 89,89 | 86,36 | 83,10 |
| Bener Meriah | 63,36 | 89,50 | 89,50 | 89,71 | 88,48 |
| Pidie Jaya | 70,24 | 88,89 | 93,18 | 93,46 | 90,38 |
| Banda Aceh | 97,23 | 98,79 | 98,85 | 99,37 | 95,66 |
| Sabang | 95,20 | 97,13 | 97,04 | 96,18 | 92,55 |
| Langsa | 88,61 | 98,21 | 99,13 | 97,14 | 98,46 |
| Lhokseumawe | 91,75 | 94,46 | 93,92 | 94,44 | 98,69 |
| Subulussalam | 34,03 | 45,51 | 64,28 | 60,87 | 56,02 |
| **Aceh** | **66,48** | **85,81** | **87,66** | **88,79** | **89,70** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023*

## C. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang mengambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

### C.1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.46.

**Tabel 2.46.**
**Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033**

| Kawasan Lindung | Luas (ha) | Kawasan Budidaya | Luas (ha) |
|---|---|---|---|
| Hutan Lindung | 1.790.626 | Permukiman Perkotaan | 64.164,14 |
| Cagar Alam Serbajadi | 300 | Permukiman Perdesaan | 89.847,78 |
| SM. Rawa Singkil | 81.837 | Bandar Udara | 835,06 |
| SM. Pinus Jantho | 15.375 | Hutan Produksi Terbatas | 141.876,42 |
| TNGL Aceh | 624.651 | Hutan Produksi | 555.948,52 |
| TWA Pulau Weh Darat | 1.250 | Hutan Produksi Konversi | 15.578,28 |
| TWA P. Weh Laut | 5.280 | Hutan Pendidikan | 230,36 |
| TWA Pinus Jantho | 2.614 | Kawasan Konservasi | 4.764,08 |
| TWA P. Banyak Darat | 24.693 | Pertanian Lahan Basah | 252.063,34 |
| TWA P. Banyak Laut | 205.725 | Pertanian Lahan Kering | 436.004,66 |
| TWA Kuta Malaka | 1.549 | Hortikultura | 24.131,38 |
| Tahura PMI | 6.218,34 | Perkebunan Besar | 392.713,78 |
| Tahura Teupah Selatan | 919,58 | Perkebunan Rakyat | 761.099,36 |
| Tahura Gunung Kapor | 1.484,95 | Hutan Rakyat | 11.711,78 |
| Taman Buru Lingga Isaq | 86.319,80 | Kawasan Peternakan | 12.930,99 |
| Kawasan Lindung Mangrove | 1.122,50 | Budidaya Perikanan | 45.223,43 |
| Kawasan Lindung Resapan Air | 2.910 | Kawasan Pertambangan | 27.776,62 |
| Kawasan Lindung Sempadan Danau | 1.504,23 | Kawasan Transmigrasi | 69.354,01 |
| Kawasan Lindung Sempadan Pantai | 9.865,06 | Kawasan Industri | 6.838,58 |
| Kawasan Lindung Sempadan Sungai | 72.780,35 | Pelabuhan | 264,18 |
| Kawasan Lindung Sempadan Waduk | 27,86 | Kawasan Pariwisata | 1.909,77 |
| Kawasan Lindung Cagar Budaya | 64,55 | Cagar Budaya | 510,26 |
| Kawasan Lindung Geologi | 1.141,87 | Pertahanan Keamanan | 567,04 |
| Kawasan Lindung Laut | 319,88 | Aset Sumber Daya Air | 180,64 |
| | | TPA | 20,44 |
| | | Tubuh Air | 32.961,93 |
| **Jumlah** | **2.938.579,68** | **Jumlah** | **2.949.506,83** |

*Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033*

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.46 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan polar uang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

### C.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

**Tabel 2.47.**
**Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2020**

| Keterangan | Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 14,72 | 18,71 | 16,99 | 17,16 | 17,76 | 22.26 | 33.23 | 21,57 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2022*

## D. Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan : perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air sesuai penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Sumber Air.

### 1. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten.

#### 1.1. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.48 sebagai berikut.

**Tabel 2.48.**
**Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya**

| No | Kewenangan | Lintas Kabupaten/Kota (Ha) | Utuh Kabupaten/ Kota (Ha) | Total | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah | 26.397,00 | 82.225 | 108.622 | Ha | 13 | DI |
| 2 | Pemerintah Provinsi | 2.144,00 | 76.324 | 78.468 | Ha | 47 | DI |
| 3 | Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | 203.428 | 203.428 | Ha | 1.439 | DI |
| **Total** | | **28.541** | **361.977** | **390.518** | **Ha** | **1.499** | **DI** |

*Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015*

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari Irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencangkup 1.400 D.I; Irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencangkup 66 D.I; Irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencangkup 3 D.I; dan Irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencangkup 30 D.I sebagaimana disajikan pada Tabel 2.49.

**Tabel 2.49.**
**Jenis Irigasi dan Luasannya**

| No | Daerah Irigasi | Kewenangan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemerintah | | Aceh | | Kabupaten/Kota | |
| | | D.I | Ha | D.I | Ha | D.I | Ha |
| 1 | Permukaan | 12 | 101.622 | 38 | 65.409 | 1.350 | 196.261 |
| 2 | Air Tanah | - | - | - | - | 66 | 1.858 |
| 3 | Rawa | - | - | 3 | 5.724 | - | - |
| 4 | Tambak | 1 | 7.000 | 6 | 7.335 | 23 | 5.309 |
| **Total** | | **13** | **108.622** | **47** | **78.468** | **1.439** | **203.428** |

*Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015*

Tabel 2.49, menunjukkan bahwa irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.50.

**Tabel 2.50.**
**Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota**

| No. | Kabupaten/Kota | Kewenangan Pemerintah Pusat | | Kewenangan Provinsi | | Kewenangan Kabupaten/Kota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.I | Luasan (Ha) | D.I | Luasan (Ha) | D.I | Luasan (Ha) |
| 1 | Simeulue | - | - | - | - | 52 | 5,343 |
| 2 | Aceh Singkil | 1 | 7,000 | 1 | 1,300 | 11 | 698 |
| 3 | Aceh Selatan | - | - | 6 | 10,630 | 131 | 13,655 |
| 4 | Aceh Tenggara | 1 | 15,000 | 6 | 8,169 | 83 | 15,028 |
| 5 | Aceh Timur | - | - | 6 | 10,179 | 73 | 7,578 |
| 6 | Aceh Tengah | - | - | - | - | 126 | 16,010 |
| 7 | Aceh Barat | - | - | 1 | 1,000 | 97 | 15,660 |
| 8 | Aceh Besar | 2 | 12,040 | - | - | 131 | 21,070 |
| 9 | Pi d i e | 2 | 19,118 | 1 | 1,100 | 121 | 12,232 |
| 10 | Bireuen | 2 | 9,683 | 5 | 8,380 | 74 | 13,045 |
| 11 | Aceh Utara | 3 | 32,539 | 5 | 7,834 | 132 | 22,040 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 1 | 5,793 | 2 | 3,234 | 30 | 3,040 |
| 13 | Gayo Lues | - | - | 2 | 4,675 | 116 | 10,011 |
| 14 | Aceh Tamiang | - | - | 1 | 2,000 | 41 | 7,115 |
| 15 | Nagan Raya | 1 | 7,449 | - | - | 37 | 6,931 |
| 16 | Aceh Jaya | - | - | 7 | 13,859 | 58 | 10,669 |
| 17 | Bener Meriah | - | - | 1 | 1,270 | 72 | 14,617 |
| 18 | Pidie Jaya | - | - | 3 | 4,838 | 58 | 6,258 |
| 19 | Banda Aceh | - | - | - | - | 2 | 655 |
| 20 | Sabang | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Langsa | - | - | - | - | 2 | 1,773 |
| 22 | Lhokseumawe | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Subulussalam | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | | **13** | **108,622** | **47** | **78,468** | **1,439** | **203.428** |

*Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015*

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan

dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.51 dan Tabel 2.52.

**Tabel 2.51.**
**Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan**

| 2022 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kewenangan | Luas | | Kuantitas (Km) | Kondisi Saluran | | | | | |
| | | Baku | Fungsional | | Baik | | Rusak Sedang | | Rusak Berat | |
| | | (Ha) | (Ha) | | (km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) |
| 1 | Pusat | 101,622 | 90.544 | 1.011 | 817 | 68,36 | 351 | 29,40 | 27 | 2,24 |
| 2 | Provinsi | 65,409 | 38.462 | 532.51 | 416.68 | 78.25 | 41.38 | 7.77 | 35.02 | 6.58 |
| 3 | Kab/Kota | 196,261 | 104,018 | 2,770 | 1,395.72 | 50.38 | 716.02 | 25.85 | 658.48 | 23.77 |

*Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2023*

**Tabel 2.52.**
**Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan**

| 2022 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kewenangan | Luas | | Kuantitas (Unit) | Kondisi Bangunan | | | |
| | | Baku | Fungsional | | Baik | | Rusak | |
| | | (Ha) | (Ha) | | (Unit) | (%) | (Unit) | (%) |
| 1 | Pusat | 101,622 | 90.544 | 1011 | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 2 | Provinsi | 65.409 | 38.462 | 1,117 | 928 | 83.08 | 189 | 16.92 |
| 3 | Kab/Kota | 196.261 | 104.018 | 10,943 | 5,023 | 45.90 | 5,920 | 54.10 |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2023*

Tabel 2.51 dan Tabel 2.52 menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data tahun 2022, Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota, memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan sepanjang 2.770 km, jumlah bangunan sebanyak 10.943 unit dan luas layanan fungsional 104.018 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan sepanjang 1.011 km, jumlah bangunan 3.347 unit dengan luas layanan fungsional 90,544 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi berdasarkan data yang ada pada Tahun 2022, memiliki panjang jaringan 492.54 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 38.462 Ha. Terjadinya penurunan panjang saluran pembawa dan luas

layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi jika dibandingkan dengan data tahun–tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya upaya updating data inventarisasi jaringan dan luasan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh.

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2022 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 78.25 %, dalam kondisi rusak ringan 3.53 %, dalam kondisi rusak sedang 7.77 % dan dalam kondisi rusak berat 6,58 %. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pelayanan kepada masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan fungsi layanan suatu Daerah Irigasi dilakukan melalui Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (*IPDMIP*) yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

### 1.2. Capaian Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian yang dalam hal ini merupakan luas areal irigasi permukaan. Perhitungan rasio jaringan irigasi hanya didasarkan pada data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas lahan budidaya pertanian merupakan luas areal irigasi permukaan yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. dimana daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 38 Daerah Irigasi dengan luasan 65.409 ha. Selanjutnya Lluas Irigasi Aceh dalam kondisi baik adalah perbandingan antara Luas irigasi Aceh dalam kondisi baik dengan luas irigasi Aceh, yang dalam hal ini merupakan luas areal irigasi permukaan kewenangan pemerintah provinsi. Capaian Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

**Tabel 2.53.**
**Capaian Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2018-2022**

| Keterangan | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio Jaringan Irigasi | Rasio Indeks | 0.679 | 0.699 | 0.714 | 0.741 | 0.760 |

| Keterangan | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | % | 71.16 | 74.20 | 78.79 | 79,55 | 82,56 |

*Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2023*

Berdasarkan Tabel 2.53 Capaian Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik sejak tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik belum dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMA Tahun 2017-2022, sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai hasil yang telah ditargetkan tersebut.

Permasalahan Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Menurunnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) mengalami penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang berada di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi pada WS Pase - Peusangan dan WS Tamiang – Langsa. D.I. Buloh Blang Ara (2.100 Ha) dan D.I. Tenggulon (2.000 Ha) merupakan contoh Daerah Irigasi yang secara signifikan mengalami penurunan debit andalan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Aceh – Meureudu dan WS Jambo Aye, Daerah Irigasi yang mengalami penurunan debit andalan cukup besar adalah D.I. Baro Raya (19.100 Ha) dan D.I. Jambo Aye (17.000 Ha). Akibatnya angka Indeks Pertanaman (IP) penanaman untuk Daerah Irigasi tersebut hanya berkisar sekitar 140. Untuk meningkatkan angka Indeks Pertanaman (IP) tersebut, perlu didukung dengan upaya pembangunan bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinu.

2) Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;

Sebagian besar daerah Irigasi Teknis pada saat ini mengalami penurunan fungsi , yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada era tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan – bangunan bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efisien.

3) Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;

Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka mendukung ketahanan pangan perlu dilakukan upaya pembangunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, upaya ini mengalami beberapa kendala, dimana kendala utama adalah masalah pembebasan lahan. Ada beberapa Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasinya, seperti; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha di Kabupaten Aceh Barat, D.I. Krueng Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tilis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues, dan D.I. Lhok Naga seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pidie, D.I. Mon Seuke Pulot seluas 1.542 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Alue Geureutut seluas 652 Ha (Lintas Kabupaten/Kota) yang bangunan utamanya terletak di Kabupaten Aceh Utara dan areal layanannya terletak di Kabupaten Bireuen serta D.I. Sigulai seluas 1.982 Ha Kabupaten Simeulu.

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang lokasinya mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti: D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kabupaten Aceh Barat), D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I Jambo Aye Kanan seluas 3.500 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I. Kr. Pase seluas 8.922 Ha (Kabupaten Aceh Utara), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Tamiang) dan D.I. Rajui seluas 3.500 Ha (Kabupaten Pidie). Maka dari itu perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan ini, sehingga pembangunan daerah irigasi tersebut dapat segera diwujudkan.

4) Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.

Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan anggaran Operasi dan Pemeliharaan belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNOP) di lapangan. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama (Jaringan Primer dan Sekunder) menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun subtansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka keduanya memerlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi No. 12 Tahun 2017, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; SKPA dan lembaga keistimewaan Aceh yang membidangi Irigasi, Keujreun Blang atau nama lain, Forum Koordinasi Keujreun Blang, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi yang ada di wilayah Aceh..

Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber Daya Air untuk irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani pemakai air (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan SKPA dan Biro terkait, Wakil Keujreun Blang yang dipilih dalam satu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Aceh, Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh, wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit.

### 1.3. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar datau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

### 1.4. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi pada tahun 2022 adalah sepanjang 228.53 Km. Rincian besaran pantai dalam kondisi kritis di kabupaten/kota di Aceh ditunjukkan pada Tabel 2.54:

**Tabel 2.54.**
**Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2018-2022**

| No. | Kabupaten/Kota | Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Sabang | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| 2 | Banda Aceh | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |
| 3 | Aceh Besar | 38,62 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |
| 4 | Aceh Jaya | 34.76 | 34.49 | 33.22 | 33.22 | 32.98 |
| 5 | Aceh Barat | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.90 | 30.90 |
| 6 | Nagan Raya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Aceh Barat Daya | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 8 | Aceh Selatan | 18.3 | 18.3 | 17.84 | 17.56 | 17.56 |
| 9 | Aceh Singkil | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| 10 | Aceh Pidie | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| 11 | Pidie Jaya | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| 12 | Bireuen | 3.66 | 3.52 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 13 | Lhokseumawe | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
| 14 | Aceh Utara | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.07 |
| 15 | Aceh Timur | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |
| 16 | Langsa | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 17 | Simeulue | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| **Jumlah** | | **233.94** | **232.01** | **229.20** | **228.92** | **228.53** |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2023*

Berdasarkan Tabel 2.54, total panjang pantai kritis pada tahun 2018 adalah sepanjang 233.94 km, dimana 16,86 % diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 5.41 km selama rentang waktu 2018 hingga 2022. Dari total pantai yang masih kritis pada tahun 2022, panjang pantai kritis terbesar masih tetap berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 16,86 %.

Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada tahun 2022 diperkirakan sepanjang 228.53 km. Untuk mengatasi abrasi pantai diperlukan kebijakan penanggulangan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder baik masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hal – hal yang perlu dilakukan antara lain adalah: 1) pembangunan bangunan pengaman pantai pada daerah-daerah yang kritis dan 2) penanaman vegetasi jenis-jenis mangrove sesuai dengan karakteristik pantai.

## 1.5. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh– Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

*Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015*

**Gambar 2.23. Pembagian Wilayah Sungai Aceh**

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungpendidikai tersebut diperlukan upaya penertiban

terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

#### 2.1.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi ACEH memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni,

Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.55.

**Tabel 2.55.**
**Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 s.d 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Rumah Layak Huni | % | 57.68 | 73,85 | 60.51 | 78,81 | 63,490 |
| Rasio Permukiman Layak Huni | Rasio | 0,97 | 0,97 | 0.968 | 0.969 | 0,978 |
| Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin | Unit | 34.311 | 38.318 | 42.359 | 43.116 | 30.000 |
| Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk | Rasio | 0,127 | 0,175 | 0.144 | 0.190 | 0,154 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2023*

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688.76 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada Tabel 2.56.

**Tabel 2.56.**
**Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021**

| Kabupaten/ Kota | SK Bupati/Walikota 2013 | | SK Bupati/Walikota 2018 ( Revisi ) | | SK Bupati/Walikota 2020/2021 ( Revisi ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kawasan | Luas (ha) | Kawasan | Luas (Ha) | Kawasan | Luas (Ha) |
| **Aceh** | **362** | **5,814.07** | **319** | **5,310.68** | **473** | **6,688.76** |
| Banda aceh | 21 | 797.56 | 22 | 462.73 | 20 | 451,40 |
| Aceh barat | 15 | 175.49 | 12 | 152.29 | 12 | 152,29 |
| Sabang | 6 | 28.26 | 3 | 48.73 | 4 | 123,713 |
| Aceh besar | 21 | 226.48 | 7 | 190.50 | 7 | 185,37 |
| Langsa | 14 | 90.14 | 9 | 87.66 | 18 | 359,398 |
| Simeulue | 5 | 97.92 | 3 | 97.92 | 1 | 29,55 |
| Aceh tamiang | 6 | 61.83 | 3 | 61.66 | 41 | 348,12 |
| Aceh timur | 10 | 567.90 | 10 | 567.90 | 20 | 538,85 |

| Kabupaten/ Kota | SK Bupati/Walikota 2013 | | SK Bupati/Walikota 2018 ( Revisi ) | | SK Bupati/Walikota 2020/2021 ( Revisi ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kawasan | Luas (ha) | Kawasan | Luas (Ha) | Kawasan | Luas (Ha) |
| Bireuen | 29 | 1,031.72 | 29 | 1,031.72 | 29 | 1.031,72 |
| Aceh tenggara | 52 | 563.89 | 52 | 563.89 | 52 | 563,89 |
| Bener meriah | 10 | 337.25 | 10 | 337.25 | 10 | 337,25 |
| Aceh utara | 7 | 62.97 | 7 | 62.97 | 7 | 62,97 |
| Aceh singkil | 9 | 108.86 | 9 | 108.86 | 9 | 108,86 |
| Aceh barat daya | 41 | 561.44 | 41 | 561.44 | 33 | 832,51 |
| Nagan raya | 4 | 108.33 | 4 | 108.33 | 43 | 108,33 |
| Gayo lues | 30 | 69.34 | 30 | 69.34 | 30 | 69,34 |
| Pidie jaya | 12 | 206.10 | 12 | 206.10 | 12 | 206,1 |
| Lhokseumawe | 19 | 208.50 | 5 | 81.30 | 17 | 120,87 |
| Subulussalam | 5 | 61.77 | 5 | 61.77 | 12 | 320,17 |
| Aceh tengah | 23 | 189.59 | 23 | 189.59 | 14 | 187,37 |
| Pidie | 10 | 67.04 | 10 | 67.04 | 66 | 294,3 |
| Aceh selatan | 5 | 55.40 | 5 | 55.40 | 8 | 120,1 |
| Aceh jaya | 8 | 136.29 | 8 | 136.29 | 8 | 136,29 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022*

Dalam hal infrastuktur pemerintah Aceh terutama gedung-gedung pelayanan publik belum ramah terhadap disabilitas hal ini disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada saat konsultasi publik, oleh karenanya kepada SKPA yang berkepentingan untuk membangun dan memelihara sarana fasilitas publik pemerintah seperti Perkim, Pora, Dishub, Dinkes, Disdik, PUPR agar mengambil langkah – langkah signifikan sebagai berikut.

1) Mengubah infrastuktur pelayanan publik yang sudah ada agar merehabilitasi saranan umum sehingga ramah disabilitas;
2) Perencanaan/DED pembangunan infrastruktur pelayanan publik agar didiskusikan dengan para disabilitas.

**2.1.3.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

**A. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP**

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan

fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, dengan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK Kemenkumham Oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

**Tabel 2.57.**
**Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM danYayasan/Perkumpulan yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2017 – 2022**

| No. | Ormas/LSM/Yayasan/ Perkumpulan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | 16 | 12 | 14 | 10 | .... | 7 |
| 2 | Yayasan / Perkumpulan | 18 | 25 | 37 | 119 | 42 | 39 |
| Jumlah | | 34 | 37 | 51 | 129 | 42 | 46 |

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2023*

Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/d Desember 2022 dengan target penyelesaian Surat Tanda Lapor untuk Yayasan/ Perkumpulan dan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas/LSM.

Proses verifikasi berkas permohonan (Proposal) selambat-lambatnya terhitung 3 hari kerja akan di keluar surat Tanda Lapor, sedangkan Ormas/LSM proses penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) pada web ULA Kemendagri membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan terverifikasi lengkap untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Politik Pemerintahan Umum yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pada Tahun 2022 sebanyak 10 Ormas/LSM memberikan berkas permohonan dan setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari Ormas/LSM tersebut sebanyak 7 Ormas/LSM yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Sementara Yayasan/Perkumpulan yang melaporkan keberadaan kepada Kesbangpol Aceh sebanyak 39 Yayasan/Perkumpulan yang memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Surat Tanda Lapor.

## B. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak tahun 2018-2022 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan untuk setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode berikutnya. Jumlah bantuan keuangan diterima Partai Politik setiap tahunnya dihitung secara Proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu sebelumnya.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun 2022 diberikan dalam 1 tahap dan mendapat kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) menjadi Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dihitung berdasarkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Periode 2019-2024. Hak Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan diatur sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang berbunyi "Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Periode 2019-2024 sampai dengan Tahun 2022 seluruhnya berjumlah Rp. 16.660.150.000,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

## C. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak hak politik (*political rights*) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of*

*democrasy*) , pada Tahun 2021 untuk terakhir kalinya angka IDI yang dikeluarkan oleh BPS merupakan angka IDI yang penghitungannya menggunakan metode lama untuk IDI 2020. Akhirnya, pada tahun 2022 IDI dihitung menggunakan metode baru untuk IDI 2021 mencakup tiga aspek yaitu Aspek **Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi**. IDI menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain, yaitu: 1. media review (analisis isi berita surat kabar) 2. document review (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah) 3. focused group discussion (FGD).

**Tabel 2.58.**
**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh**
**Tahun 2013 – 2021**

| ASPEK | TAHUN 2013-2020 | | | | | | | | ASPEK | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| Aspek Kebebasan Sipil | 71,78 | 69,76 | 74,81 | 92,92 | 87,27 | 96,79 | 93,28 | 84,49 | Aspek Kebebasan | 85,50 |
| Aspek Hak-Hak Politik | 48,59 | 63,94 | 63,98 | 63,94 | 63,94 | 68,09 | 65,22 | 64,94 | Aspek Kesetaraan | 81,41 |
| Aspek Lembaga Demokrasi | 76,97 | 88,73 | 64,97 | 60,33 | 61,47 | 77,67 | 79,08 | 74,91 | Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi | 75,82 |
| **Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh** | **63,6** | **72,3** | **67,8** | **72,5** | **70,9** | **80** | **78,00** | **73,9** | **Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh** | **80,92** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022*

Berdasarkan Tabel 2.64. diatas, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021 Provinsi Aceh mencapai angka **80,92** dalam skala 0 sampai 100. Klasifikasi tingkat Kinerja demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "Tinggi" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "rendah" (indeks < 60). Hal ini berarti Indeks demokrasi Provinsi Aceh termasuk dalam kategori "kinerja demokrasi tinggi".

Nilai IDI Provinsi Aceh menempati peringkat 6 Nasional dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2021, 8 provinsi memiliki indeks Demokrasi dengan kategori tinggi (>80) dan 26 provinsi lainnya berada dalam kategori (60-80). capain IDI tinggi

IDI Provinsi Aceh tahun 2021 merupakan yang pertama dihitung menggunakan metode baru sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2009 – 2020).

**2.1.3.2.1.6. Sosial**

Pada aspek pelayanan umum penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat, serta penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

**a. Sarana Sosial**

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi bangunan perkantoran, asrama serta bangunan penunjang lainnya antara lain mushola, ruang perawatan khusus, aula, rumah dinas sebanyak 13 unit termasuk Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Kampung Ateuk Kota Banda Aceh, guna optimalisasi pelayanan sosial (penyediaan kebutuhan sosial dasar tempat tinggal) yang menjamin keamanan dan kenyamanan penerima manfaat selama proses rehabilitasi sosial.

Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 4 unit dalam kondisi baik. Panti pelayanan sosial merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh sebagai berikut.

**Tabel 2.59.**
**Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2022**

| No. | Nama Panti | Nama Rumah Pelayanan Sosial | Daya Tampung | Jumlah Tertampung | Jenis Pelayanan PMKS | Tempat Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumoh Seujahtera Bejroh Meukarya | Disabilitas | 50 Orang | 50 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Desa Ladong - Aceh Besar |
| | | Gelandangan dan Pengemis | 35 Orang | 35 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Desa Ladong - Aceh Besar |
| 2 | Rumoh Seujahtera | Lanjut Usia | 80 Orang | 60 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Ulee Kareng - |

| No. | Nama Panti | Nama Rumah Pelayanan Sosial | Daya Tampung | Jumlah Tertampung | Jenis Pelayanan PMKS | Tempat Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geunaseh Sayang | | | | | Banda Aceh |
| 3 | Rumoh Seujahtera Jroh Naguna | Remaja Putus Sekolah | 50 Orang | 78 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Lampineung -Banda Aceh |
| 4 | Rumoh Aneuk Nanggroe | Anak Terlantar | 70 Orang | 48 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Geu Gajah - Aceh Besar |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2023*

**b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu Pemerintah Aceh berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial Aceh selama 5 tahun terakhir yaitu periode tahun 2018-2022 sebanyak 40.762 jiwa, dapat dilihat setiap tahunnya sesuai pada Gambar 2.30. berikut.

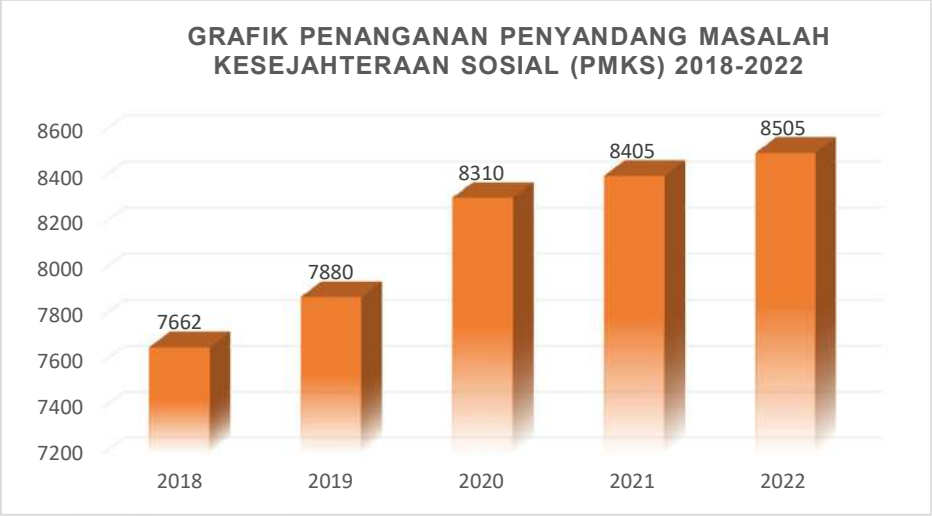


*Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2023*

**Gambar 2.24. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018 – 2022**

**c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuthakiran data tahun 2022 terdiri atas 9.683 orang. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS. Jumlah PSKS di Aceh periode tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel 2.60. dibawah ini.

**Tabel 2.60.**
**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Aceh**
**Tahun 2018 – 2022**

| No. | Jenis | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Karang Taruna | 472 | 501 | 360 | 395 | 400 |
| 2 | LKS / Orsos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | PSM | 1.317 | 1.545 | 1.252 | 1.295 | 1.302 |
| 4 | TKSK | 298 | 295 | 289 | 289 | 285 |
| 5 | LK3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 6 | Kader Perempuan | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 7 | Dunia Usaha | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 |
| 8 | Tagana | 819 | 778 | 772 | 759 | 873 |
| | **JUMLAH** | **1.117** | **1.073** | **1.062** | **1.048** | **3.115** |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2023*

**2.1.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

**2.1.3.2.2.1. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya pendayagunaan angkatan kerja, produktivitas, tingkat pengangguran terbuka serta besarnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif yang tersebar di Aceh. Upaya maksimal dalam pemetaan masalah ketenagakerjaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Aceh secara makro dan ditandai dengan pencapaian indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

## A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 63,50 persen, turun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 81,06 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 46,15 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,21 persen poin.

**Tabel 2.61.**
**Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,**
**Agustus 2020—Agustus 2022**

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agustus 2020 | Agustus 2021 | Agustus 2022 | Perubahan Ags 2020—Ags 2021 | | Perubahan Ags 2021—Ags 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ribu orang | ribu orang | ribu orang | ribu orang | persen | ribu orang | persen |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **Penduduk Usia Kerja (PUK)** | 3.882 | 3.951 | 4.020 | 69 | 1,78 | 69 | 1,75 |
| **Angkatan Kerja** | 2.527 | 2.520 | 2.553 | -7 | -0,28 | 32 | 1,31 |
| - Bekerja | 2.360 | 2.361 | 2.395 | 1 | 0,04 | 34 | 1,44 |
| - Pengangguran | 167 | 159 | 158 | -8 | -4,79 | -1 | -0,63 |
| **Bukan Angkatan Kerja** | 1.355 | 1.431 | 1.467 | 76 | 5,61 | 36 | 2,52 |
| | **persen** | **persen** | **persen** | **persen poin** | | **persen poin** | |
| **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** | 65,10 | 63,78 | 63,50 | -1,32 | | -0,28 | |
| f | | | | | | | |
| - Perempuan | 48,94 | 48,36 | 46,15 | -0,58 | | -2,21 | |

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. Gambar (.....) mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2018 hingga 2022. Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2018 hingga 2022 berfluktuatif. TPAK tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 65,10 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,36 persen. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan TPAK dengan persentase laki-laki sebesar 81,47 persen dan perempuan

sebesar 48,94 persen pada tahun 2020. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen. Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen. Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

**Tabel 2.62.**
**Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2018-2022**

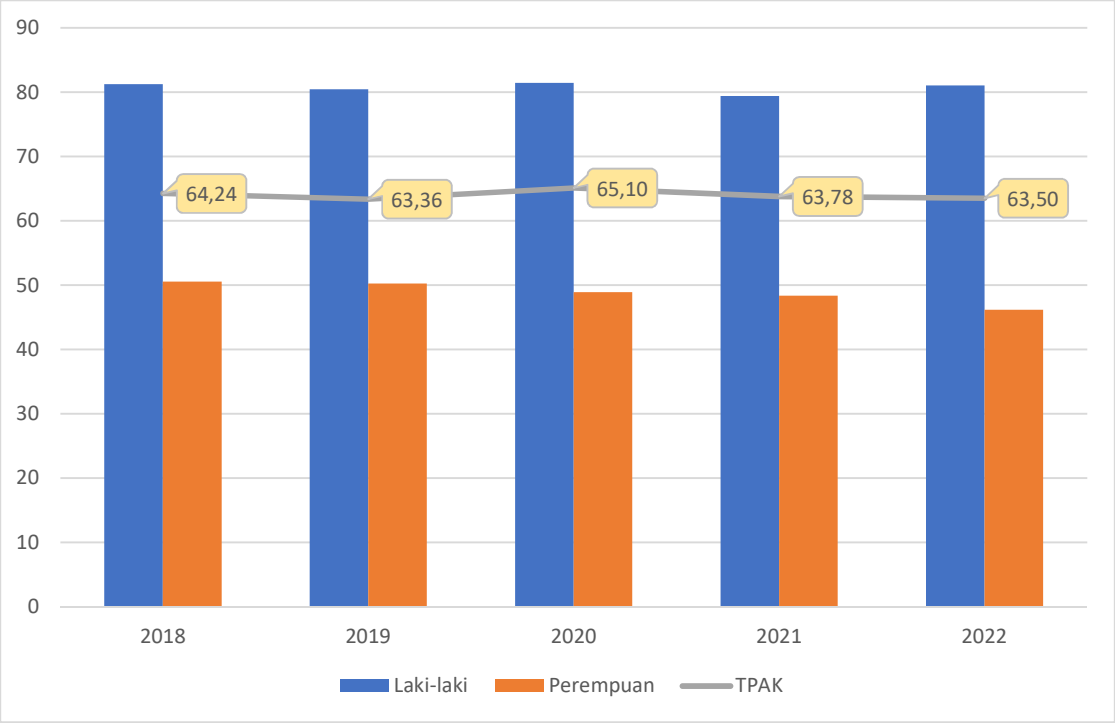


*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. Gambar 2.31. mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2015 hingga 2020.

Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 berfluktuatif. TPAK tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 65,10 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,36 persen. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan TPAK dengan persentase laki-laki sebesar 81,47 persen dan perempuan sebesar 48,94 persen pada tahun 2020. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen.

Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

## A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54-55 penduduk usia tidak produktif. Kecenderungan rasio ketergantungan di Aceh adalah menurun dimana diprediksikan pada tahun 2025 angka rasio ketergantungan Aceh adalah sebesar 50,8. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang

tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2015 hingga 2022 terdapat pada Gambar 2.31 berikut :

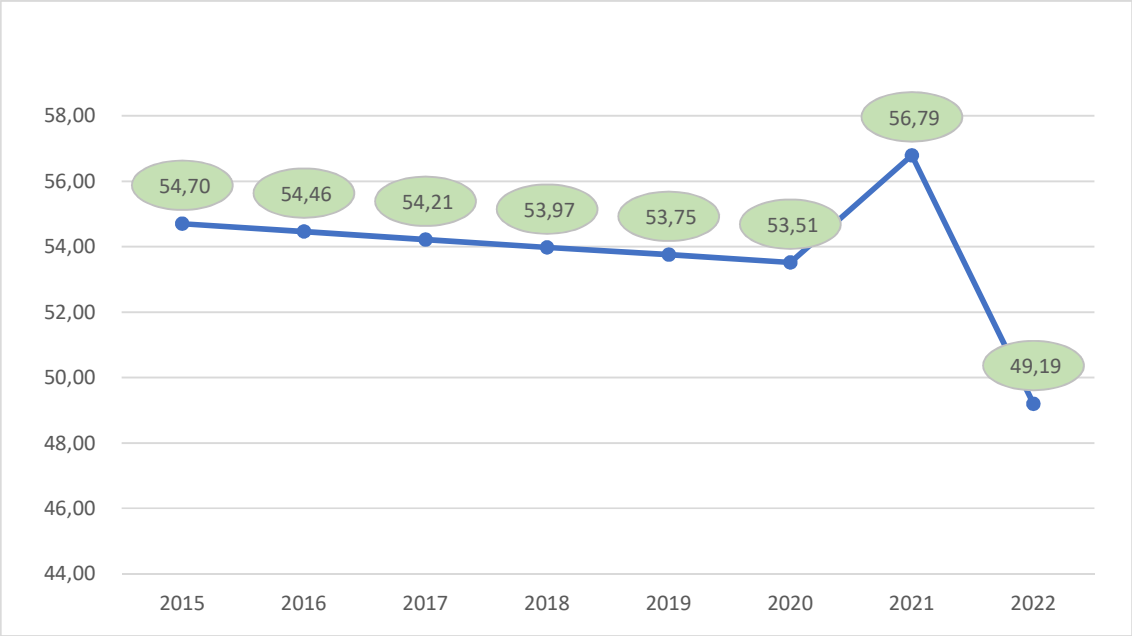


*Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2023 (diolah)*

**Gambar 2.25. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2022**

1. **Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 40,50 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,37 persen; dan Pendidikan sebesar 7,38 persen.

Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan bulan Agustus 2021. Dibandingkan dengan Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,37 persen poin); Konstruksi (0,67 persen poin); Jasa Lainnya (0,55 Persen Poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran (2,87 persen poin); Industri Pengolahan (1,04 persen poin) dan Administrasi Pemerintahan ( 1,01 persen poin).

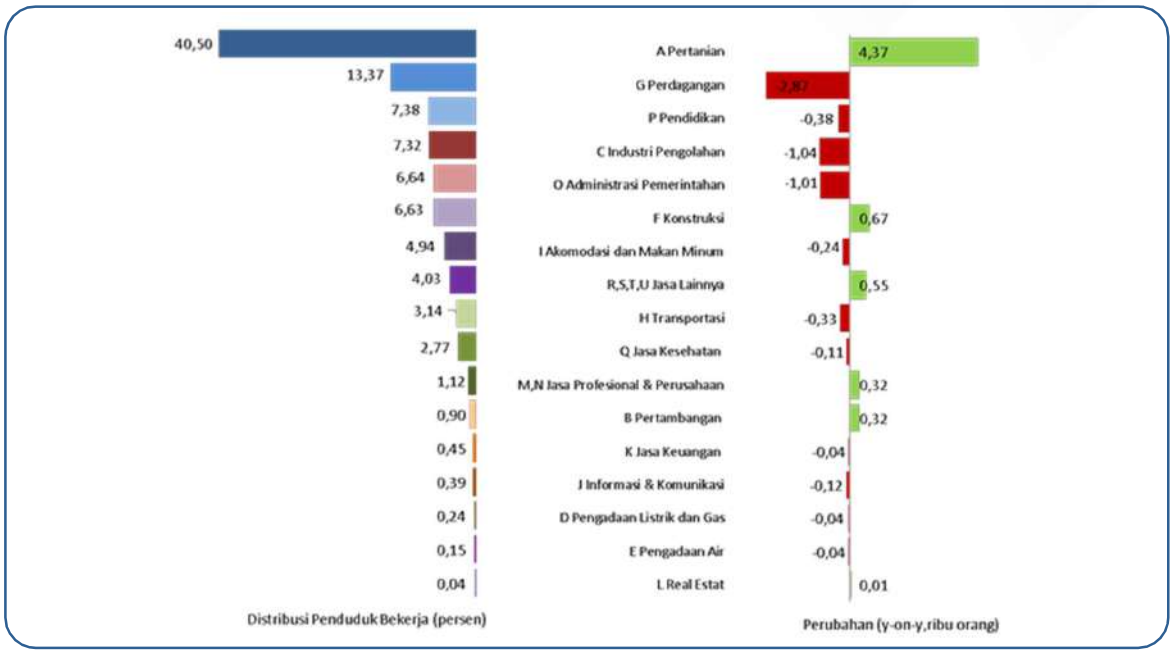


**Gambar 2.26. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022**

**2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

Pada Agustus 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,20 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,35 persen. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,26 persen poin dan 0,70 persen poin. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada pekerja bebas non pertanian yaitu sebesar 1,18 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.472 ribu orang (61,45 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 923 ribu orang (38,55 persen). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,76 persen poin

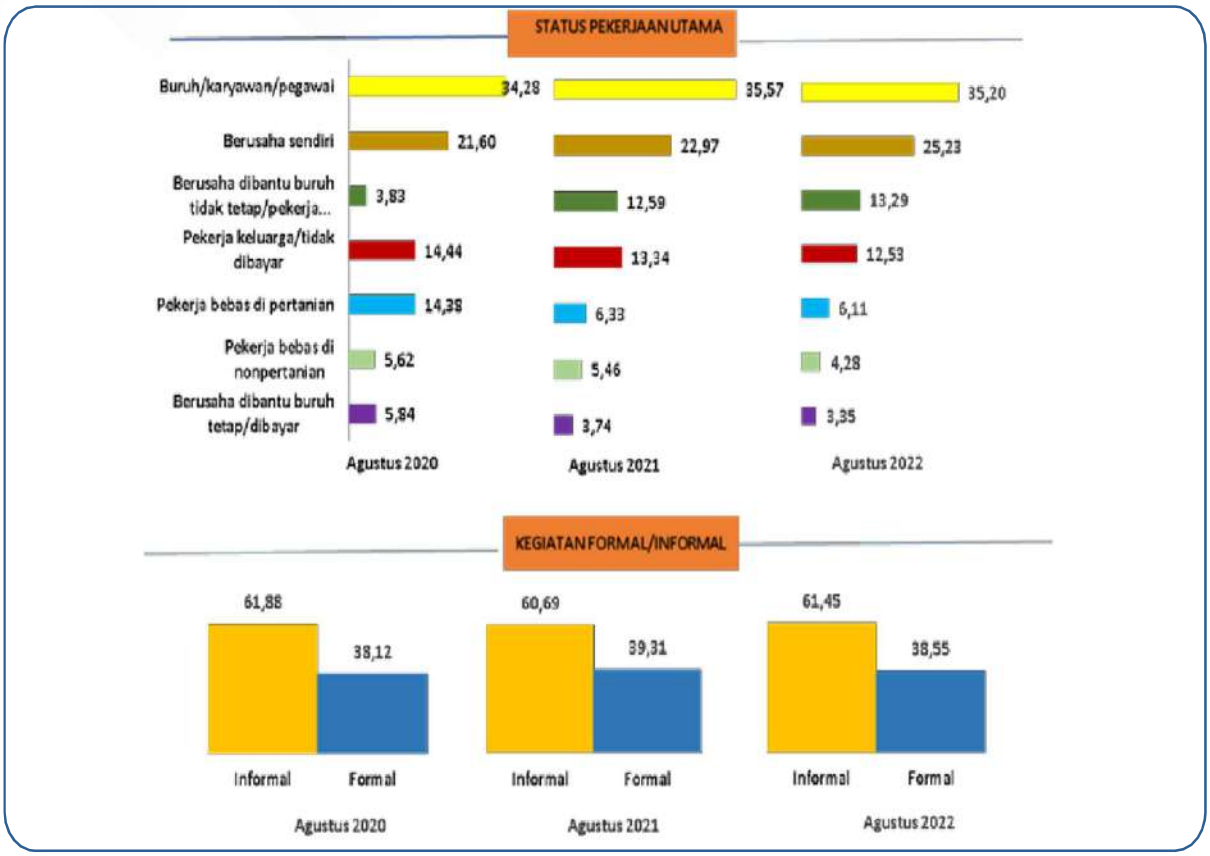


**Gambar 2.27. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020—Agustus 2022**

### 3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SMA, yaitu sebesar 31,07 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 15,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021.

Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 3,52 persen poin dan 0,72 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Universitas mengalami penurunan persentase, denganjumlah angka penurunan penurunan terbesar pada pendidikan Universitas, yakni sebesar 2,15 persen poin.

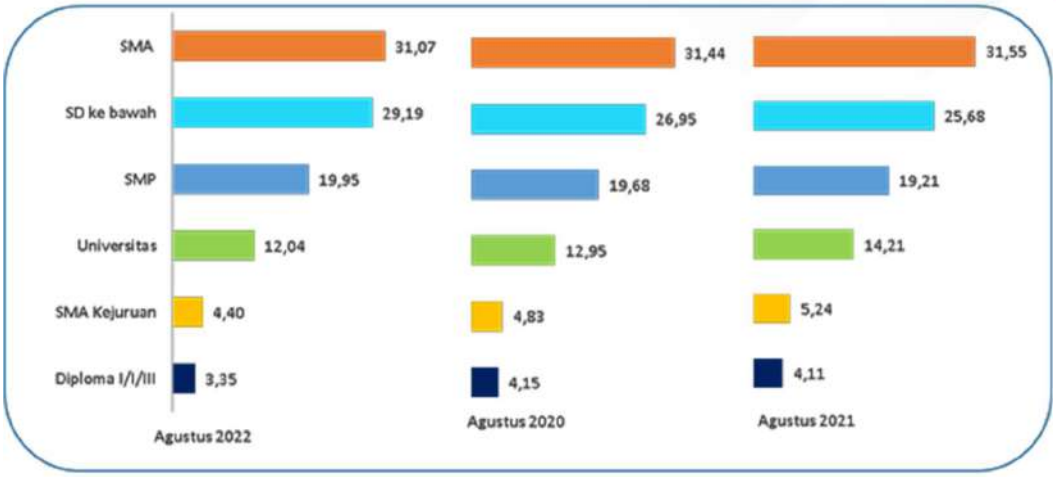


**Keterangan: 1) Diploma mencakup Diploma I/II/III**

**2) Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3**

**Gambar 2.28.**

**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020—Agustus 2022**

**4. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja**

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu), dengan persentase sebesar 61,50 persen pada Agustus 2022. Sementara 38,50 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2021, pekerja tidak penuh mengalami penurunan sebesar 6,44 persen poin.

Gambar 4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2020—Agustus 2022

A. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan tahun 2020 yaitu sebesar 48,94 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 81,47 persen. Pada tahun 2021 TPAK perempuan sebesar 48,36 persen, menurun sebesar 0,58 persen dari tahun 2021, sedangkan tenaga kerja laki-laki sebesar 79,40, menurun sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2022 TPAK perempuan sebesar 46,15 persen dan TPAK laki-laki sebesar 81,06 persen meningkat dari tahun sebelumnya 1,66 persen. Data tersebut menggambarkan partisipasi perempuan Aceh dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

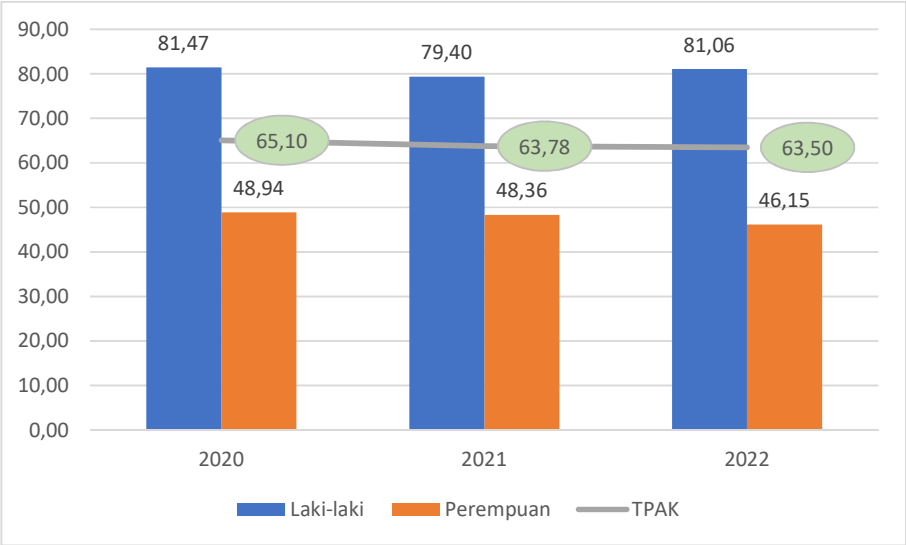


**Gambar 2.29. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2022**

**2.1.3.2.2.2. Pangan**

Pangan masih menjadi isu strategis di Aceh bukan hanya periode pembangunan tahun sebelumnya namun juga periode pembangunan saat ini. Nilai ketersediaan pangan di Aceh saat ini. Pada tahun 2019 angka ketersediaan pangan utama Aceh sebesar 4.006 Kkal/kapita/hari. Nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya sebesar 4.694 kkal/kapita/hari (tahun 2018). Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa angka ketersediaan pangan utama di Aceh masih dengan angka konsumsi standar 3.600 kkal/kapita, namun bila dikaji secara lebih mendalam bahwa angka konsumsi tersebut

sebagian besarnya merupakan konsumsi karbohidarat sedangkan proporsi konsumsi protein masih rendah.

Indikasi capaian ketersediaan pangan utama akan terlihat dari besarnya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi maupun produksi yang diperoleh dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka skor PPH ketersediaan atau produksi pada tahun 2016 terlihat nilai skor PPH cenderung meningkat dimana nilai tertinggi terdapat pada tahun 2018 (87,78 persen) dan namun nilai terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 78,34 persen diakibatkan karena angka AKE (Angka Kecukupan Energi) yang ditetapkan oleh Lembaga Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 sebesar 2.150 kkal/kap/tahun, sedangkan pada tahun 2019 AKE (Angka Kecukupan Energi) sebesar 2.400 kkal/kap/tahun. Sebab apabila nilai pembandingnya yang ditentukan oleh nasional semakin besar maka angka Skor PPH semakin kecil. Sedangkan skor PPH konsumsi juga mengalami hal yang sama mengalami penurunan di tahun 2019 padahal sebelumnya mengalami peningkatan terus dari tahun 2016 sebesar 70,00 persen sampai tahun 2018.

Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu juga meskipun banyak daerah yang notabenenya merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa desa yang mencakup di dalamnya masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan. Ini tercatat dari jumlah kecamatan-kecamatan rawan pangan di wilayah Provinsi Aceh yang masih mencapai 29 kecamatan pada tahun 2019.

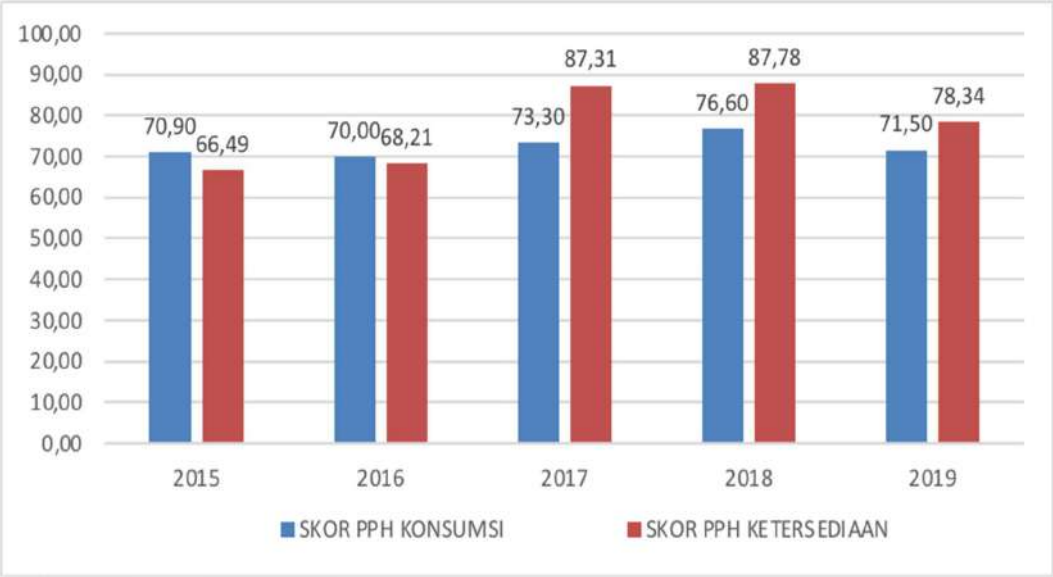


*Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2020 (diolah)*

**Gambar 2.30. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019**

#### 2.1.3.2.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Aceh dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan angkanya lebih baik daripada angka nasional. IPG Aceh tahun 2017 (91.67) lebih tinggi pada nasional (90.96). Kemudian tahun 2021 menjadi 92.23 dan lebih baik dari nasional (91.27). Seperti terlihat pada Gambar 2.37. dibawah ini.

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022*

**Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2017 – 2021**

**B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Perkembangan IDG Aceh dari tahun ke tahun masih belum menunjukkan capaian yang menggembirakan. IDG Aceh tahun 2017 (66.28) lebih rendah daripada nasional (71.74). Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 66.6 namun terus menurun samapi 63.24 di tahun 2021, jauh di bawah IDG Nasional (76.26). Seperti terlihat pada gambar 2.32. di bawah ini.

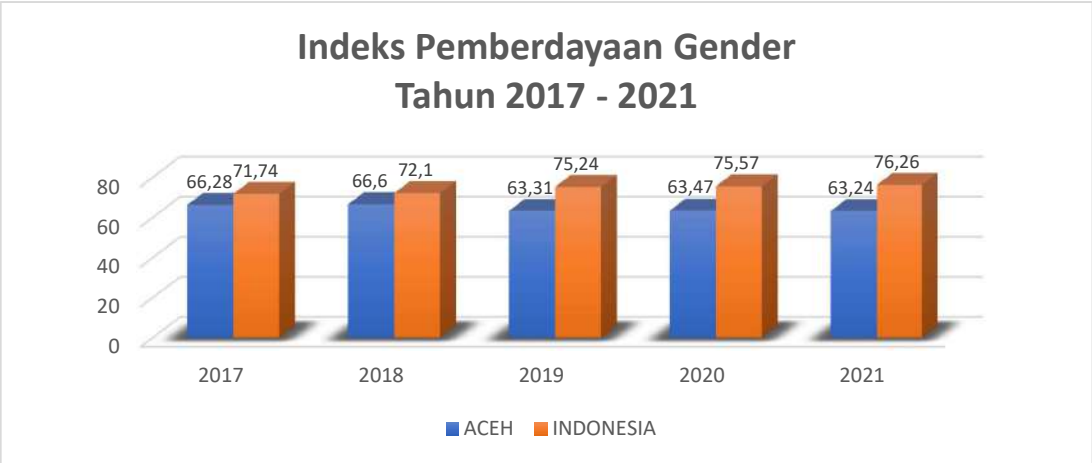


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022*

**Gambar 2.32. Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2017 – 2021**

**C. Proporsi Perempuan di Parlemen**

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat.

Terobosan yang dicapai Aceh dalam mendorong pemenuhan hak politik perempuan, muncul melalui Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang dinyatakan pada Pasal 7 tentang hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan Pasal 8 tentang partisipasi dalam bidang politik.

Namun sampai saat ini jumlah perempuan di lembaga legislatif masih sangat terbatas dan ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan.

Gambar 2.3 berikut menampilkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019-2024 pada di level DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK sesuai gambar di bawah:

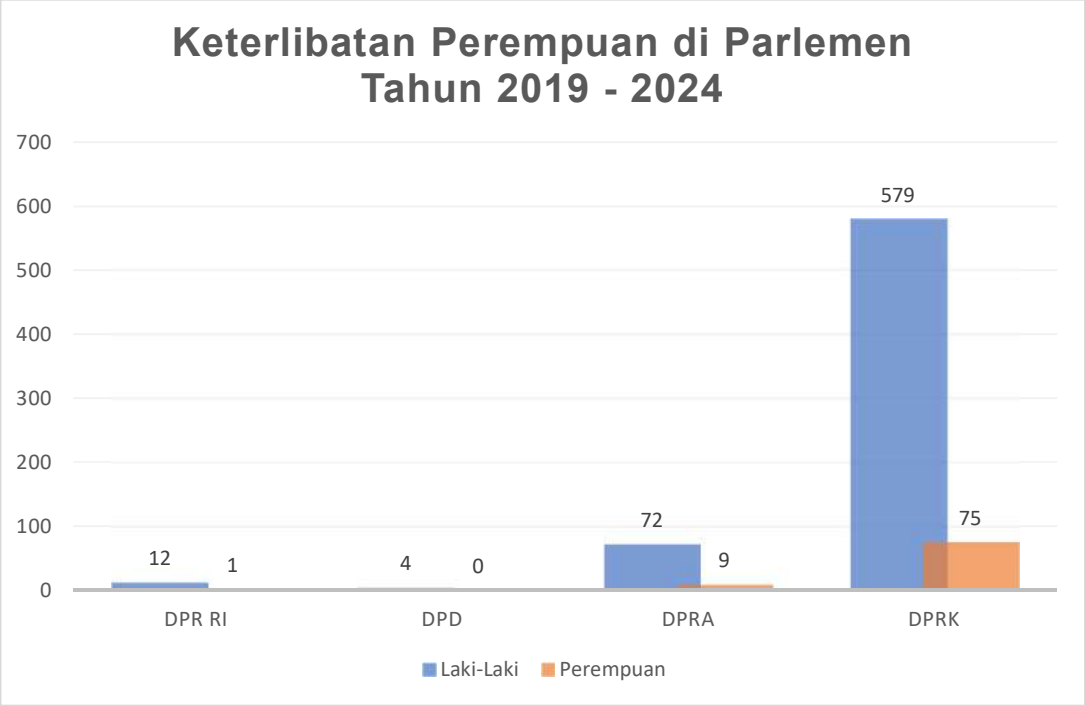


*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2023*

**Gambar 2.33. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR RI, DPD, DPR Aceh, dan DPRK)**

Dari gambar di atas terlihat bahwa hanya pada DPD yang tidak terdapat keterwakilan perempuan. Sedangkan pada DPR RI, DPRA dan DPRK walau terdapat keterwakilan perempuan, namun angkanya masih sangat kecil dan belum mencapai kebijakan *Affirmatif Action* tentang kuota politik minimal 30% untuk perempuan di legislatif.

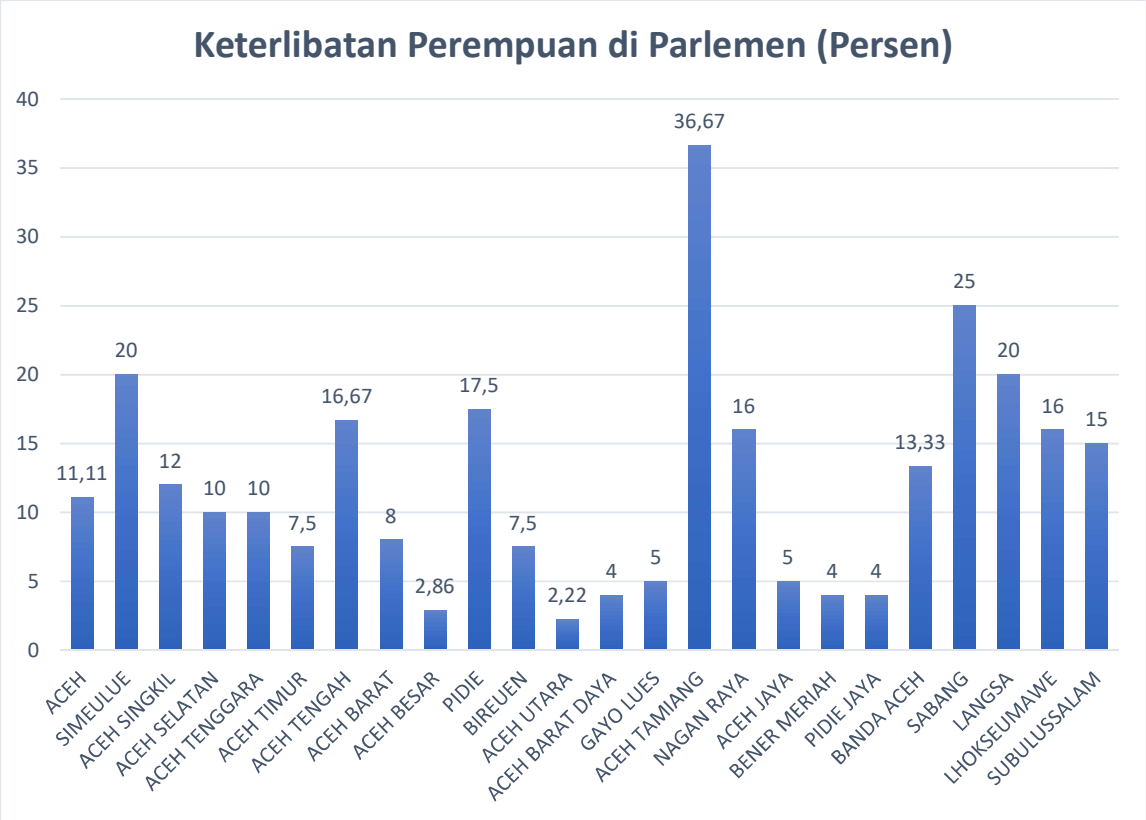


**Gambar 2.34. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen**

Dari 23 Kabupaten/Kota hanya kabupaten Aceh Tamiang keterwakilan perempuan yang melebihi quota politik minimal yaitu sebesar 36,67%, sedangkan terdapat 3 Kabupaten/Kota yang angkanya mencapai atau di atas 20% yaitu Kabupaten Simeuleu, Kota Sabang dan Kota Langsa.

**D. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang belum menggembirakan, walaupun kecenderungan jumlah kasus menurun. Pada tahun 2017 tercatat ada 687 kasus kekerasan terhadap anak dan 1.105 kasus kekerasan terhadap perempuan Di tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun menjadi 458 kasus di tahun 2020, dimana kasus kekerasan terhadap anak dan 571 kasus kekerasan terhadap anak. Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Gambar 2.35. berikut.

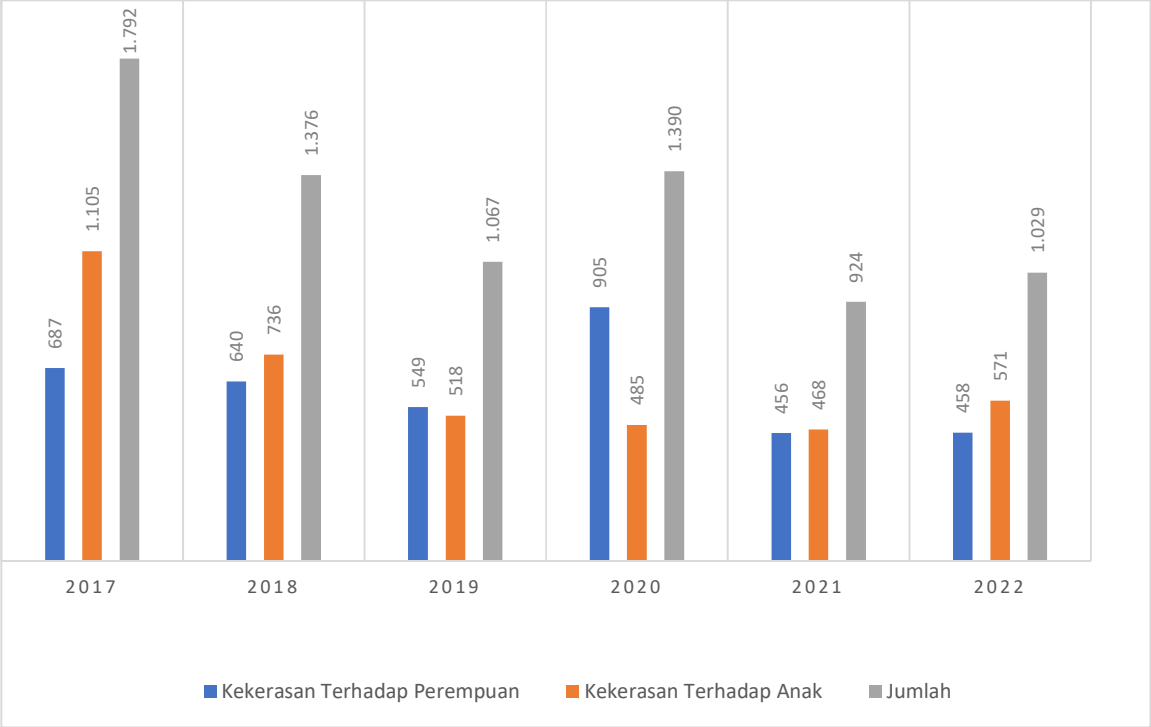


*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2023*

**Gambar 2.35.**
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh**
**Yang terlapor pada UPTD PPA Tahun 2017 – 2022**

## E. Angka Perceraian

Jumlah kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, ada 5.195 kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah, meningkat menjadi 6.063 kasus di tahun 2019, 6.115 kasus di tahun 2020, dan 6.448 kasus di tahun 2021.

Selanjutnya pada Tabel di bawah ini memperlihatkan data jumlah penyebab perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dari tahun 2018 – 2021 jumlah kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyebab perceraian sebagian besar disebabkan oleh perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, dan KDRT sehingga kasus perceraian tidak dapat dihindari dan terus terjadi. Jumlah kasus perselisihan meningkat dari 3.426 kasus di tahun 2018 meningkat menjadi 5.023 kasus di tahun 2021.

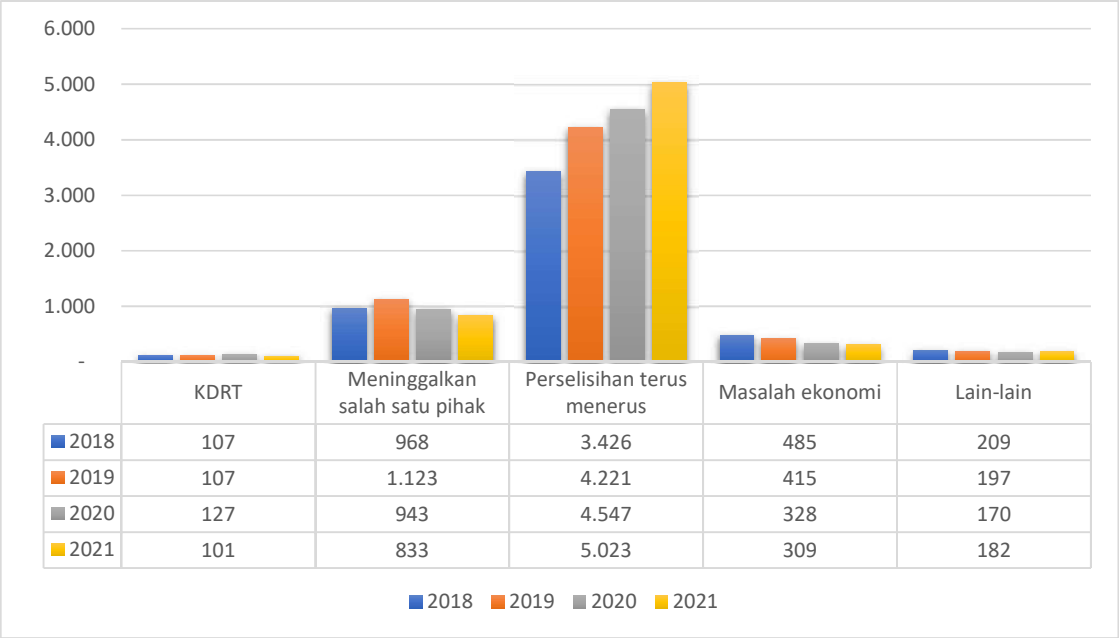


| | KDRT | Meninggalkan salah satu pihak | Perselisihan terus menerus | Masalah ekonomi | Lain-lain |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 107 | 968 | 3.426 | 485 | 209 |
| 2019 | 107 | 1.123 | 4.221 | 415 | 197 |
| 2020 | 127 | 943 | 4.547 | 328 | 170 |
| 2021 | 101 | 833 | 5.023 | 309 | 182 |

**Gambar 2.36.**
**Jumlah Kasus dan Penyebab Perceraian yang Diselesaikan di Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2018 – 2021**

### 2.1.3.2.2.4. Pertanahan

**a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat**

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat semakin besar pula tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan suatu daerah. Reformasi agraria menargetkan 4,5 juta ha yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Separuh dari total alokasi 9 juta ha berupa sertifikasi lahan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Aceh (Desember, 2019) Salah satu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah adalah melalui Reforma Agraria. Reforma Agraria memiliki dua bentuk yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Capaian Reforma Agraria hingga akhir tahun 2019, antara lain: (1) realisasi penerbitan sertipikat tanah transmigrasi sebanyak 56.941 bidang atau seluas 57.169 hektar; (2) legalisasi tanah masyarakat melalui PRONA & Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan realisasi sertipikat sebanyak 17.670.963 bidang atau seluas 4.476.692 hektar; (3) redistribusi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, tanah terlantar dan Tanah Negara lainnya dengan

realisasi sebesar 1.666.349 bidang atau seluas 795.458 hektar; (4) redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dengan realisasi penerbitan sertipikat 47.116 bidang atau seluas 32.753 hektar.

**b. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

**DAFTAR : TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK MASYARAKAT MISKIN (PTM3) DI PROVINSI ACEH TAHUN 2019 DAN 2020**

| NO | KABUPATEN | TARGET BIDANG | REALISASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **TAHUN 2019** | | | |
| 1 | ACEH SELATAN | 500 | 487 | Telah diterima oleh penerima manfaat |
| 2 | ACEH SINGKIL | 400 | 333 | Sda |
| 3 | ACEH BARAT | 200 | 25 | Sda |
| 4 | PIDIE JAYA | 200 | 75 | Sda |
| 5 | NAGAN RAYA | 200 | 193 | Sda |
| | **Jumlah I** | **1,500** | **1,113** | |
| **II.** | **TAHUN 2020** | | | |
| 1 | BENER MERIAH | 75 | 75 | Sda |
| 2 | BIREUN | 75 | 75 | Sda |
| | **Jumlah II** | **150** | **150** | |
| | | **Total I dan II** | **1,263** | |

**c. Jumlah Penyelesaian Sengketa Dan Konflik yang Di Fasilitasi**

Penyelesaian konflik pertanahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur Menurut ketentuan Lampiran Huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu penyelesaian permasalahan tanah garapan dalam 1 (satu) kab/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyelesaian oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kanwil BPN/Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan sbb:

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian (ATR) meliputi:

a) kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, Pemetaan dan/atau perhitungan luas;
b) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
c) kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;

e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
k) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

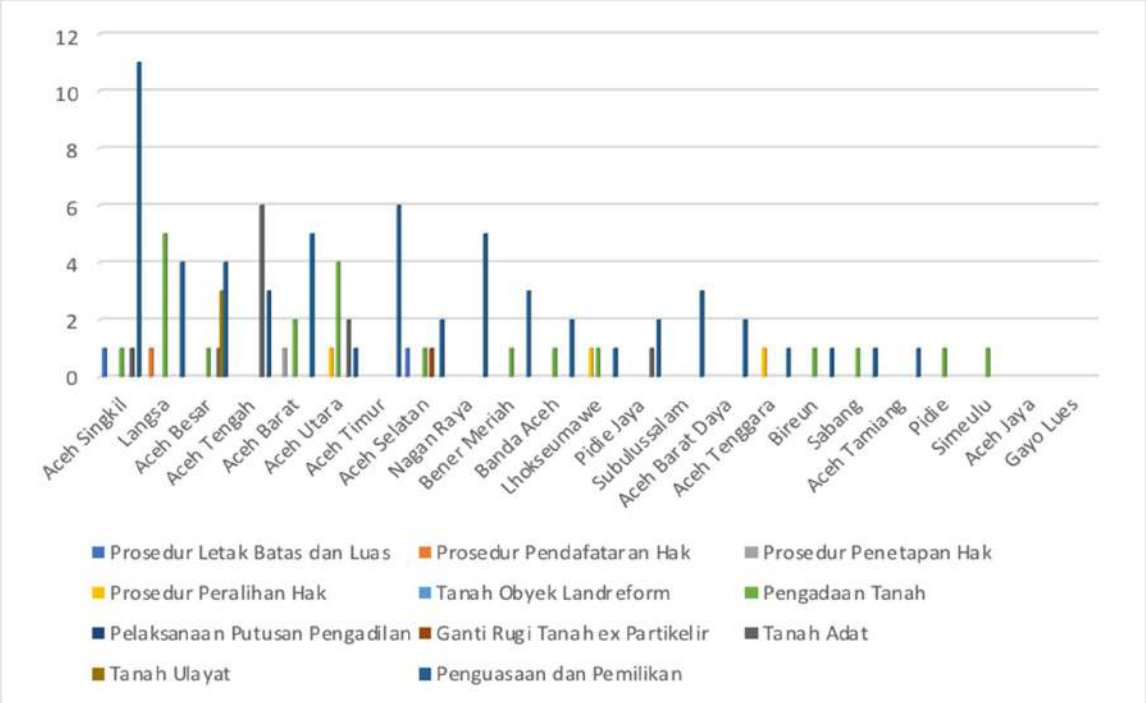


*Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2022*

**Gambar 2.37. Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021**

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang dilaporkan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparatur pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.

*Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2022*

**Gambar 2.38. Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2021**

**d. Penyelesaian izin lokasi**

Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk kewenangan Provinsi dalam penerbitan izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dapat dilihat pada tabel 2.63 sebagai berikut :

**Tabel 2.63.**
**Izin Lokasi Lintas lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi**

| No | Nama Izin Lokasi | Tahun | | | | | | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Izin Usaha pengembangan perumahan dan permukiman | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2 | Izin Usaha Kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, | - | - | - | - | - | - | 0% |

| No | Nama Izin Lokasi | Tahun | | | | | | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | kawasan Pelabuhan bebas dan/atau kawasan lainnya | | | | | | | |
| 3 | Izin Usaha Perkebunan | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 4 | Izin Usaha Tambak | - | - | - | - | - | - | 0% |

Berdasarkan data diatas belum ada permohonan Izin Lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang masuk ke Pemerintah Aceh dan dikeluarkan Izinnya oleh Pemerintah Aceh

**e. Penyelesaian Penetapan Lokasi (pemerintah)**

Penetapan lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

**f. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan**

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

Dalam rangka perencanaan pembangunan dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, diperlukan pelayanan pemberian informasi yang lebih baik melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini adalah memberikan layanan informasi tentang pertanahan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH),

Sistem pengelolaan informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH) adalah sistem informasi yang mengelola dokumen pertanahan secara digital. Sistem ini mendukung lembaga pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan memberikan layanan informasi dalam perencanaan mengenai pertanahan secara up to date. SIMTANAH membantu mengefektifkan pengelolaan dokumen dan informasi pertanahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara terpadu dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengelola informasi tentang pertanahan baik berupa peta (gambar), grafik, table, teks, dan informasi pertanahan lainnya berbasis web online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi SIMTANAH dimulai dengan penyusunan Grand Design/Road Map, Penyusunan Perencanaan Aplikasi dan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola pada tahun 2019. Pembangunan aplikasi SIMTANAH dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2020.

**g. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi**

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi pengunaan dan penguasaannya dan selanjutkan akan diredistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**2.1.3.2.2.5. Lingkungan Hidup**

**A. Tersusunnya RPPLH Provinsi**

Dalam penyusunan RPPLH, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni inventarisasi lingkungan hidup, Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup, Analisis Data dan Informasi, Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan di dalam penyusunan RPPLH adalah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir, profil daerah, Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir atau Data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung dan Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tahapan penyusunan RPPLH dapat dilihat dalam Gambar 2.37.

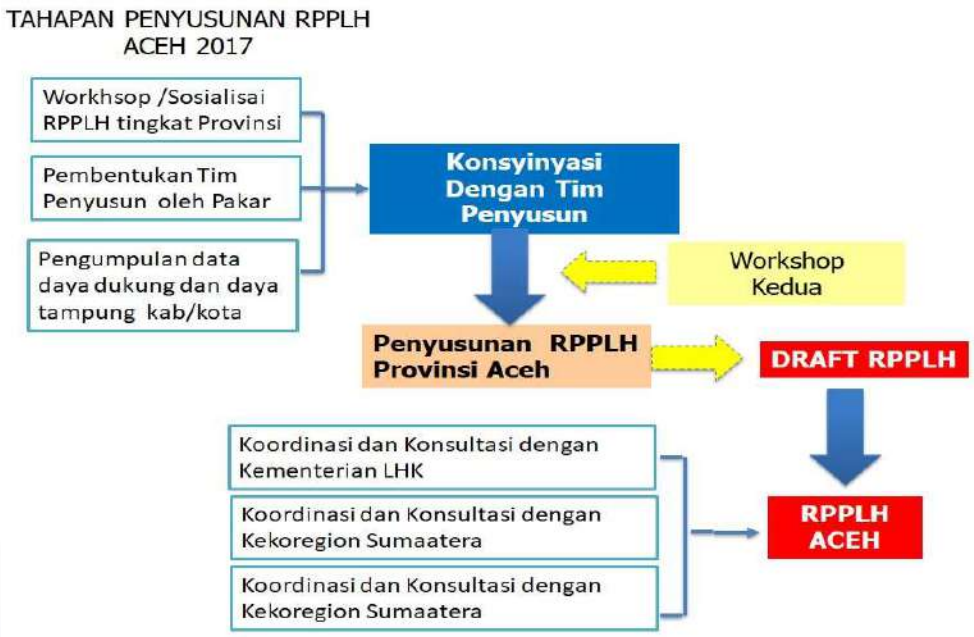


*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2017*

**Gambar 2.39. Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh**

Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan. Sampai saat ini dokumen RPPLH masih belum tersedia.

**B. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi**

Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Pasal 10, Ayat 5). Diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk periode tahun 2013 – 2017, RPPLH belum terintegrasi di dalam RPJM daerah.

**C. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi**

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Adapun tujuan KLHS adalah:

1) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
2) Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
3) Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan

Sampai saat ini dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMA dan KLHS RTRWA. Sementara KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum tersedia.

**D. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi**

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah.

Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMA memberikan pilihan scenario pembangunan di Aceh perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih fokus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi,

utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

#### 2.1.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kondisi kepemilikan penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tahun 2019-2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.64. berikut.

**Tabel 2.64.**
**Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh**
**Tahun 2018 – 2022**

| No. | Uraian | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik | 3.296.329 | 98,25 | 3,309,730 | 98,07 | 3,382,639 | 99,49 | 3,599,123 | 97,45 | 3,668,899 | 98,12 |
| 2 | Kepemilikan Akta Kelahiran | 1,419,965 | 75.58 | 1,584,813 | 84,01 | 1,623,818 | 87,03 | 1,776,750 | 93,83 | 1,755,114 | 96,63 |
| 3 | Kepemilikan Akta Nikah | 582,599 | 26.33 | 831.963 | 36,93 | 1.033.668 | 45,21 | 1.122.897 | 48,81 | 1.379.828 | 58,55 |
| 4 | Kepemilikan Kartu Identitas Anak | - | - | 160,026 | 8,66 | 627,238 | 36,16 | 728,139 | 42,19 | 745,125 | 42,42 |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2023*

**A. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik**

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata penduduk di Aceh yang memiliki KTP mencapai angka 98 persen, hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Penduduk Aceh yang memiliki KTP Elektronik di tahun 2022 berjumlah 3.668.899 atau 98,12 persen dari jumlah wajib KTP Elektronik. Untuk lebih jelas dapat dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota pada tabel 2.65.

**Tabel 2.65.**
**Kepemilikan KTP-Elektronik di Aceh Tahun 2022**

| No. | Prov/Kab/Kota | Jumlah Penduduk (DKB I 2022) | Wajib KTP (DKB I 2022) |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **11** | **Provinsi Aceh** | **5,379,937** | **3,668,899** |
| 1101 | Kab. Aceh Selatan | 234,169 | 169,433 |
| 1102 | Kab. Aceh Tenggara | 227,921 | 151,321 |
| 1103 | Kab. Aceh Timur | 434,929 | 281,864 |
| 1104 | Kab. Aceh Tengah | 219,744 | 148,192 |
| 1105 | Kab. Aceh Barat | 198,858 | 140,007 |
| 1106 | Kab. Aceh Besar | 422,241 | 286,868 |
| 1107 | Kab. Pidie | 436,796 | 307,214 |
| 1108 | Kab. Aceh Utara | 609,705 | 406,751 |
| 1109 | Kab. Simeulue | 94,560 | 65,663 |
| 1110 | Kab. Aceh Singkil | 129,674 | 83,402 |
| 1111 | Kab. Bireuen | 445,503 | 307,589 |
| 1112 | Kab. Aceh Barat Daya | 153,515 | 108,961 |
| 1113 | Kab. Gayo Lues | 101,955 | 68,048 |
| 1114 | Kab. Aceh Jaya | 96,049 | 64,853 |
| 1115 | Kab. Nagan Raya | 172,827 | 121,775 |
| 1116 | Kab. Aceh Tamiang | 301,800 | 207,977 |
| 1117 | Kab. Bener Meriah | 168,469 | 111,789 |
| 1118 | Kab. Pidie Jaya | 160,272 | 112,048 |
| 1171 | Kota Banda Aceh | 254,024 | 170,628 |
| 1172 | Kota Sabang | 42,867 | 29,137 |
| 1173 | Kota Lhokseumawe | 191,688 | 132,102 |
| 1174 | Kota Langsa | 186,075 | 132,985 |
| 1175 | Kota Subulussalam | 96,296 | 60,292 |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, DKB Semester I Tahun 2023*

Dari tabel 2.69. diatas dapat dilihat bahwa penduduk wajib KTP terbesar saat ini di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 406.751, Pidie sebenyak 307.214 dan Aceh Besar sebesar 286.868, sedangkan jumlah penduduk yang cakupan KTP sudah mencapai 100 persen antara lain Kabupaten Aceh Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kab Bireuen dan Kota Banda Aceh.

**B. Persentase Bayi yang memiliki Akta Kelahiran**

Pencatatan kelahiran merupakan wujud pengakuan negara tentang status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Namun belum semua orang tua melaporkan kelahiran anaknya kepada pemerintah. Sepanjang tahun 2018–2022, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, hanya 75,58 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 96,63 persen di tahun 2022. Kepemilikan akte lahir pada kabupaten/kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 2.66.

**Tabel 2.66.**
**Kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun di Aceh Tahun 2022**

| No. | Prov/Kab/Kota | Anak Usia 0-18 (DKB I 2022) | Kepemilikan Akta Lahir 0-18 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **11** | **Provinsi Aceh** | **1,816,400** | **1,755,114** | **96.63%** |
| 1101 | Kab. Aceh Selatan | 70,416 | 69,330 | 98.46% |
| 1102 | Kab. Aceh Tenggara | 82,807 | 80,979 | 97.79% |
| 1103 | Kab. Aceh Timur | 158,882 | 156,447 | 98.47% |
| 1104 | Kab. Aceh Tengah | 75,269 | 74,351 | 98.78% |
| 1105 | Kab. Aceh Barat | 62,775 | 59,963 | 95.52% |
| 1106 | Kab. Aceh Besar | 141,931 | 137,253 | 96.70% |
| 1107 | Kab. Pidie | 139,054 | 131,784 | 94.77% |
| 1108 | Kab. Aceh Utara | 211,335 | 180,474 | 85.40% |
| 1109 | Kab. Simeulue | 31,904 | 31,011 | 97.20% |
| 1110 | Kab. Aceh Singkil | 48,561 | 47,973 | 98.79% |
| 1111 | Kab. Bireuen | 146,730 | 136,620 | 93.11% |
| 1112 | Kab. Aceh Barat Daya | 48,001 | 44,844 | 93.42% |
| 1113 | Kab. Gayo Lues | 36,775 | 39,685 | 107.91% |
| 1114 | Kab. Aceh Jaya | 32,546 | 32,994 | 101.38% |
| 1115 | Kab. Nagan Raya | 54,846 | 52,270 | 95.30% |
| 1116 | Kab. Aceh Tamiang | 100,803 | 102,930 | 102.11% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1117 | Kab. Bener Meriah | 59,098 | 58,725 | 99.37% |
| 1118 | Kab. Pidie Jaya | 52,036 | 51,451 | 98.88% |
| 1171 | Kota Banda Aceh | 88,190 | 86,197 | 97.74% |
| 1172 | Kota Sabang | 14,910 | 15,016 | 100.71% |
| 1173 | Kota Lhokseumawe | 64,020 | 69,251 | 108.17% |
| 1174 | Kota Langsa | 57,917 | 58,968 | 101.81% |
| 1175 | Kota Subulussalam | 37,594 | 36,598 | 97.35% |

*Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, DKB Semester I, Tahun 2023*

Dari tabel 2.66 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepemilikan akta lahir Kota Langsa mencapai 101,81 persen, Kota Lhokseumawe 108.17 persen, Kota Sabang 100.71 persen, Kabupaten Aceh Tamiang 102,11 persen, Kabupaten Gayo Lues mencapai 107.91 persen dikarenakan data DKB belum dilakukan update pada sistem SIAK Pusat sehingga jumlah bayi yang memiliki akta lahir melebihi dari jumlah anak berusia 0-18 di beberapa wilayah tersebut.

**C. Persentase Pasangan yang Memiliki Akta Nikah**

Persentase kepemilikan akta nikah penduduk Aceh masih rendah yaitu rata-rata sebesar 58,55 persen. Namun jika dibandingkan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada tahun 2018 kepemilikan akta nikah sebanyak 26.33 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 58,55 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat serta terobosan dari pemerintah dalam pembuatan akta nikah masih harus terus diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**D. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi anak juga bisa digunakan sebagai pengenal serta memudahkan dalam mengakses pelayanan publik secara mandiri. KIA diberikan kepada anak yang berusia sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Alasan pertimbangan pemerintah menerbitkan KIA antara lain bahwa saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pertimbangan lainnya, pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas penduduk WNI sebagai upaya perlindungan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu, pemberian identitas kependudukan kepada anak mendorong peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 2.67.

**Tabel 2.67.**
**Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Aceh Tahun 2022**

| No. | Prov/Kab/Kota | Wajib KIA 0-17 (DKB I 2022) | Kepemillikan KIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **11** | **Provinsi Aceh** | **1,756,476** | **745,125** | **42.42%** |
| 1101 | Kab. Aceh Selatan | 66,460 | 32,481 | 48.87% |
| 1102 | Kab. Aceh Tenggara | 78,600 | 22,849 | 29.07% |
| 1103 | Kab. Aceh Timur | 157,086 | 69,618 | 44.32% |
| 1104 | Kab. Aceh Tengah | 73,516 | 30,408 | 41.36% |
| 1105 | Kab. Aceh Barat | 60,263 | 27,522 | 45.67% |
| 1106 | Kab. Aceh Besar | 138,727 | 51,989 | 37.48% |
| 1107 | Kab. Pidie | 133,259 | 47,467 | 35.62% |
| 1108 | Kab. Aceh Utara | 208,410 | 53,195 | 25.52% |
| 1109 | Kab. Simeulue | 29,881 | 17,707 | 59.26% |
| 1110 | Kab. Aceh Singkil | 47,528 | 25,369 | 53.38% |
| 1111 | Kab. Bireuen | 141,562 | 43,204 | 30.52% |
| 1112 | Kab. Aceh Barat Daya | 45,638 | 17,780 | 38.96% |
| 1113 | Kab. Gayo Lues | 34,889 | 14,496 | 41.55% |
| 1114 | Kab. Aceh Jaya | 31,909 | 32,941 | 103.23% |
| 1115 | Kab. Nagan Raya | 52,280 | 15,297 | 29.26% |
| 1116 | Kab. Aceh Tamiang | 96,532 | 42,179 | 43.69% |
| 1117 | Kab. Bener Meriah | 58,106 | 29,874 | 51.41% |
| 1118 | Kab. Pidie Jaya | 49,523 | 32,238 | 65.10% |
| 1171 | Kota Banda Aceh | 85,195 | 66,923 | 78.55% |
| 1172 | Kota Sabang | 14,126 | 14,085 | 99.71% |
| 1173 | Kota Lhokseumawe | 61,367 | 19,743 | 32.17% |
| 1174 | Kota Langsa | 54,683 | 29,575 | 54.08% |
| 1175 | Kota Subulussalam | 36,936 | 8,185 | 22.16% |

*Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, DKB Semester I, Tahun 2023*

Berdasarkan table 2.67. anak-anak di Aceh yang memiliki KIA berjumlah 745.125 anak, pencapaian angka ini masih rendah yaitu 42,24 persen dari jumlah anak yang wajib memiliki KIA yaitu 1.756.476. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran orang tua mendaftarkan anaknya untuk memiliki KIA. Dilihat dari kabupaten/kota, Kabupaten Aceh

Jaya berhasil mencatat angka 100 persen untuk kepemilikan KIA, disusul oleh Kota Sabang 99,71 persen, dan Kota Banda Aceh 78,55 persen. Sementara itu, kabupaten dengan jumlah wajib KIA yang tinggi hanya mencapai angka rata-rata 30-40 persen kepemilikan KIA. Kondisi ini terjadi karena wilayah kabupaten yang luas sehingga informasi belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat.

#### 2.1.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Perkembangan status desa di Aceh pada tahun 2018-2022 dapat kita lihat dalam Gambar 2.41. di bawah ini.

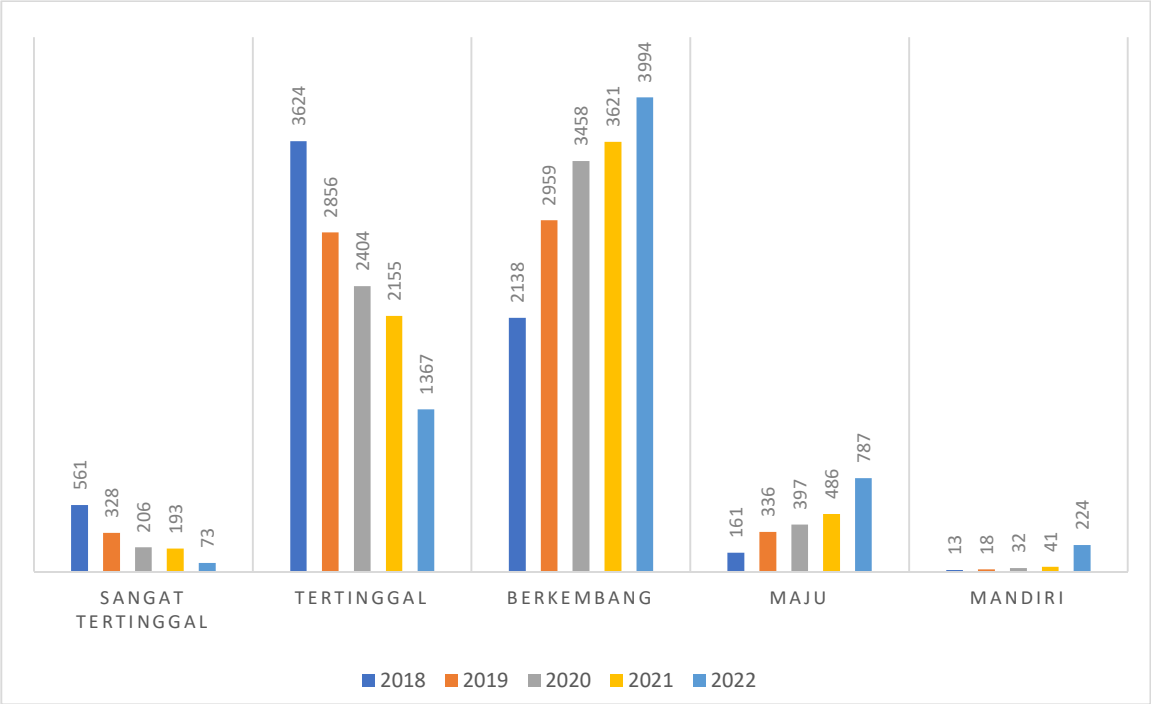


*Sumber : DPMG Aceh, 2022*

**Gambar 2.40. Status Desa di Aceh Tahun 2018 – 2022**

Dari Gambar 2.46. diatas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal di Aceh terus menurun dari tahun 2018 ke tahun 2022. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri terus meningkat. Pada tahun 2018, desa maju di Aceh berjumlah 161 desa meningkat menjadi 787 desa di tahun 2022. Sedangkan desa maju di tahun 2018 berjumlah 13 desa meningkat menjadi 224 desa di tahun 2022.

**Tabel 2.68.**
**Status Desa Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2022**

| INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) PER KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | KABUPATEN/KOTA | STATUS DESA (PERSEN) | | | | |
| | | MANDIRI | MAJU | BERKEMBANG | TERTINGGAL | SANGAT TERTINGGAL |
| 1 | ACEH BARAT | 3.73 | 13.04 | 59.01 | 22.36 | 1.86 |
| 2 | ACEH BARAT DAYA | 1.32 | 7.89 | 82.24 | 8.55 | 0.00 |
| 3 | ACEH BESAR | 2.48 | 21.69 | 70.70 | 5.13 | 0.00 |
| 4 | ACEH JAYA | 5.23 | 15.70 | 66.86 | 11.63 | 0.58 |
| 5 | ACEH SELATAN | 3.08 | 11.15 | 60.77 | 20.38 | 4.62 |
| 6 | ACEH SINGKIL | 6.03 | 21.55 | 35.34 | 28.45 | 8.62 |
| 7 | ACEH TAMIANG | 9.86 | 23.47 | 55.40 | 11.27 | 0.00 |
| 8 | ACEH TENGAH | 4.41 | 15.25 | 59.66 | 20.68 | 0.00 |
| 9 | ACEH TENGGARA | 0.26 | 6.49 | 83.38 | 8.57 | 1.30 |
| 10 | ACEH TIMUR | 0.58 | 11.89 | 74.66 | 12.67 | 0.19 |
| 11 | ACEH UTARA | 0.59 | 3.99 | 46.48 | 46.71 | 2.23 |
| 12 | BENER MERIAH | 7.33 | 23.28 | 52.16 | 16.38 | 0.86 |
| 13 | BIREUEN | 0.66 | 9.69 | 56.16 | 31.69 | 1.81 |
| 14 | GAYO LUES | 0.74 | 8.09 | 63.24 | 27.21 | 0.74 |
| 15 | NAGAN RAYA | 1.35 | 14.41 | 61.26 | 21.62 | 1.35 |
| 16 | PIDIE | 0.55 | 4.93 | 68.22 | 26.30 | 0.00 |
| 17 | PIDIE JAYA | 2.25 | 6.31 | 82.88 | 7.66 | 0.90 |
| 18 | SIMEULUE | 1.45 | 1.45 | 69.57 | 27.54 | 0.00 |
| 19 | BANDA ACEH | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | LANGSA | 15.15 | 21.21 | 62.12 | 1.52 | 0.00 |
| 21 | LHOKSEUMAWE | 14.71 | 45.59 | 39.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | SABANG | 38.89 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | SUBULUSSALAM | 6.10 | 13.41 | 57.32 | 17.07 | 6.10 |

*Sumber: DPMG Aceh, 2023*

Dari tabel 2.68. terlihat bahwa beberapa Kabupaten/Kota masih memiliki desa sangat tertinggal walaupun dengan persentase yang kecil yaitu: Kabupaten Aceh Singkil (8,62 persen), Kota Subulussalam (6,1 persen), dan Kabupaten Aceh Selatan (4,62 persen).

Hampir seluruh Kabupaten/Kota sebagian besar desa nya adalah desa berkembang kecuali Kota Sabang dan Kota Banda Aceh yang seluruh desa nya sudah maju dan mandiri.

**Tabel 2.69.**
**Alokasi Dana Desa Tahun 2018 – 2022**

| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH DESA | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROVINSI ACEH | 6,497 | 4,459,477,194,000 | 4,955,500,482,000 | 4,980,088,180,000 | 4,986,622,278,000 | 4,669,371,747,000 |
| 1 | ACEH SELATAN | 260 | 180,986,876,000 | 203,653,902,000 | 205,268,050,000 | 205,268,050,000 | 194,090,688,000 |
| 2 | ACEH TENGGARA | 385 | 252,238,604,000 | 283,801,698,000 | 284,561,253,000 | 284,561,253,000 | 265,902,419,000 |
| 3 | ACEH TIMUR | 513 | 345,119,425,000 | 387,123,385,000 | 387,787,938,000 | 387,787,938,000 | 373,119,830,000 |
| 4 | ACEH TENGAH | 295 | 197,926,546,000 | 221,436,663,000 | 223,350,548,000 | 223,350,548,000 | 209,831,057,000 |
| 5 | ACEH BARAT | 322 | 220,927,595,000 | 249,482,526,000 | 250,632,328,000 | 250,632,328,000 | 234,408,383,000 |
| 6 | ACEH BESAR | 604 | 394,170,701,000 | 438,519,093,000 | 437,555,848,000 | 437,555,848,000 | 415,515,724,000 |
| 7 | PIDIE | 730 | 498,843,013,000 | 525,951,016,000 | 524,715,756,000 | 524,715,756,000 | 494,424,865,000 |
| 8 | ACEH UTARA | 852 | 562,234,583,000 | 627,981,678,000 | 626,338,212,000 | 626,338,212,000 | 607,509,747,000 |
| 9 | SIMEULUE | 138 | 102,024,542,000 | 117,222,029,000 | 119,684,330,000 | 119,684,330,000 | 107,641,709,000 |
| 10 | ACEH SINGKIL | 116 | 91,394,344,000 | 106,901,862,000 | 108,080,283,000 | 108,080,283,000 | 96,138,732,000 |
| 11 | BIREUEN | 609 | 416,718,854,000 | 453,997,662,000 | 455,523,085,000 | 455,523,085,000 | 442,297,899,000 |
| 12 | ACEH BARAT DAYA | 152 | 105,354,225,000 | 117,947,229,000 | 119,823,288,000 | 119,823,288,000 | 111,846,686,000 |
| 13 | GAYO LUES | 136 | 101,209,135,000 | 112,011,067,000 | 114,193,644,000 | 114,381,709,000 | 101,044,300,000 |
| 14 | ACEH JAYA | 172 | 117,810,988,000 | 134,071,262,000 | 135,065,795,000 | 135,065,795,000 | 118,845,057,000 |
| 15 | NAGAN RAYA | 222 | 158,992,821,000 | 174,634,430,000 | 175,871,395,000 | 175,871,395,000 | 161,264,111,000 |
| 16 | ACEH TAMIANG | 213 | 150,088,313,000 | 170,293,947,000 | 171,672,967,000 | 171,672,967,000 | 163,372,347,000 |
| 17 | BENER MERIAH | 232 | 157,060,749,000 | 180,968,089,000 | 182,834,539,000 | 182,834,539,000 | 167,049,012,000 |
| 18 | PIDIE JAYA | 222 | 151,154,709,000 | 165,797,075,000 | 165,862,465,000 | 165,862,465,000 | 151,746,896,000 |
| 19 | KOTA BANDA ACEH | 90 | 64,464,666,000 | 74,192,333,000 | 75,977,398,000 | 77,702,442,000 | 70,100,703,000 |
| 20 | KOTA SABANG | 18 | 19,527,822,000 | 23,635,698,000 | 25,156,301,000 | 26,798,027,000 | 14,179,325,000 |
| 21 | KOTA LHOKSEUMAWE | 68 | 54,102,499,000 | 58,773,330,000 | 60,285,819,000 | 61,983,149,000 | 53,928,333,000 |
| 22 | KOTA LANGSA | 66 | 53,459,733,000 | 57,772,687,000 | 59,424,404,000 | 60,706,341,000 | 53,156,136,000 |
| 23 | KOTA SUBULUSSALAM | 82 | 63,666,451,000 | 69,331,821,000 | 70,422,534,000 | 70,422,530,000 | 61,957,788,000 |

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap tahun seluruh desa memperoleh alokasi dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera.

Dari Tabel 2.73. diatas terlihat bahwa alokasi dana desa untuk Aceh meningkat dari tahun 2018-2021, namun menurun di tahun 2022. Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang menerima alokasi dana desa paling besar karena memang memiliki jumlah desa paling banyak.

#### 2.1.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial, ekonomi dan kependudukan. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi).

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Aceh selama periode 2018-2022 terus menunjukkan penurunan, yaitu dari 1,96 pada tahun 2018 menjadi 1,43 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Aceh masih terkendali. *Total Fertility Rate (TFR)* Aceh selama periode 2018-2022 mengalami peningkatan, tahun 2018 TFR Aceh sebesar 2,58 persen meningkat menjadi 2,86 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 TFR Aceh mengalami penurunan menjadi 2,42 persen.

Cakupan peserta KB Aktif tahun 2019 sebanyak 404.527 orang menurun dari tahun 2018 sebanyak 715.343 orang, tetapi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 kembali terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 cakupan peserta KB Aktif kembali terjadi penurunan menjadi 407.537 orang. Menurunnya cakupan peserta KB Aktif salah satunya disebabkan oleh karena kondisi *Pandemi Covid-19* yang menyebabkan masyarakat enggan mengunjungi tempat pelayanan KB, disamping itu kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya penggunaan alat kontrasepsi yang masih sangat kurang.

**Tabel 2.70.**
**Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Aceh Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,96 | 1,93 | 1,56 | 1,49 | 1,43 |
| Total Fertility Rate (TFR) | Rata-rata anak per wanita | 2,58 | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 2,42 |
| Cakupan Peserta KB Aktif | Orang | 715.343 | 404.527 | 519.709 | 557.901 | 407.537 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2023*

**2.1.3.2.2.9. Perhubungan**

**A. Jumlah arus penumpang angkutan umum**

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara belum menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk periode tahun 2014-2022 (Gambar 2.47). Jumlah arus penumpang pada tahun 2022 menurun sangat drastis, hal ini disebabkan karena pendemi Covid – 19 yang melanda Indonesia mulai dari bulan Maret 2020 dan berimbas pada penurunan warga yang menggunakan transportasi udara, laut dan darat. Perlahan namun pasti, terdapat tren peningkatan jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum di Aceh pasca kasus Covid-19.

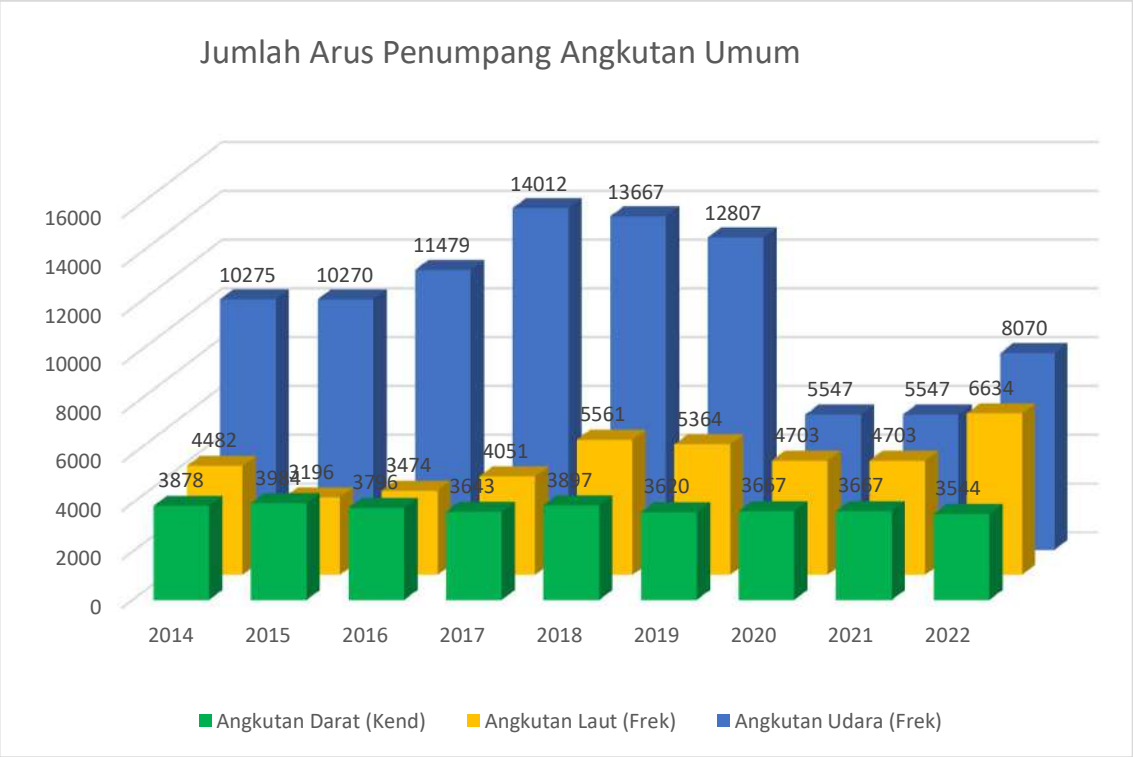


*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023*

**Gambar 2.41. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2014-2022**

**B. Rasio ijin trayek**

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum. Rasio izin

trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2020 sebanyak 1 : 1407 izin/jumlah penduduk.

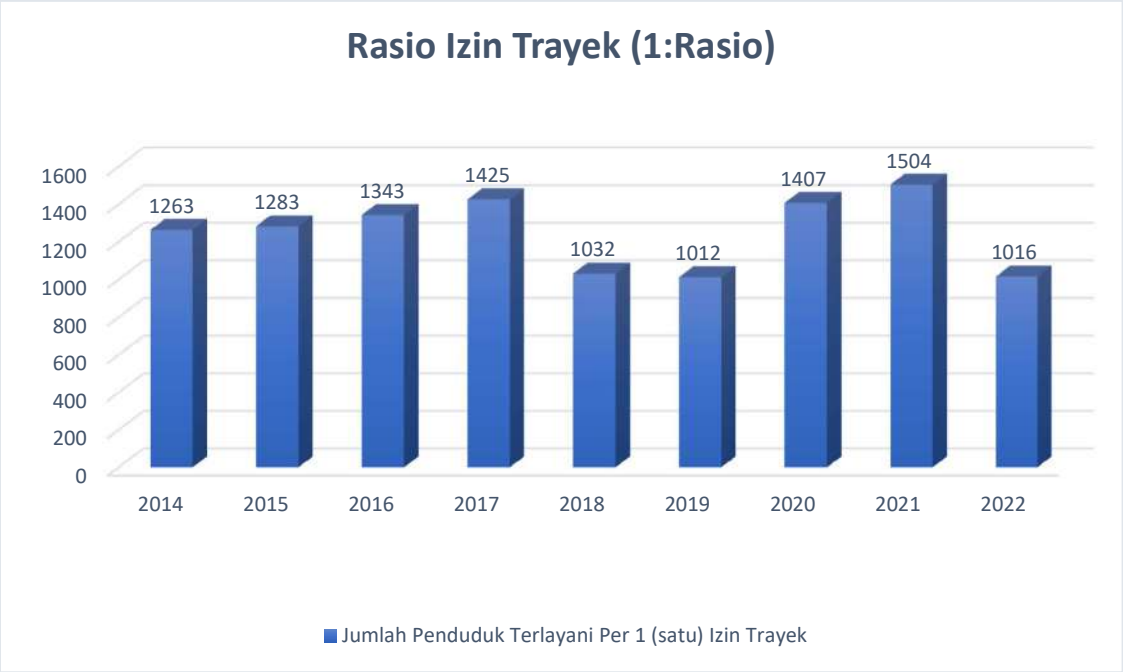


*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023*

**Gambar 2.42. Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2014-2022**

**C. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal**

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

a. Zona 1 Pusat Kegiatan di Kota Sabang;
b. Zona 2 Pusat Kegiatan di Kota Banda Aceh (Kabupaaten Aceh Besar dan Kabupaaten Aceh Jaya);
c. Zona 3 Pusat Kegiatan di Kota Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
d. Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Kabupaaten Bener Meriah, Kabupaaten Gayo Lues, Aceh Tenggara);
e. Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Kabupaaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Kabupaaten Singkil (Kota Subulussalam dan Simeulue);
g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Kota Langsa (Aceh Timur dan Kabupaaten Aceh Tamiang).

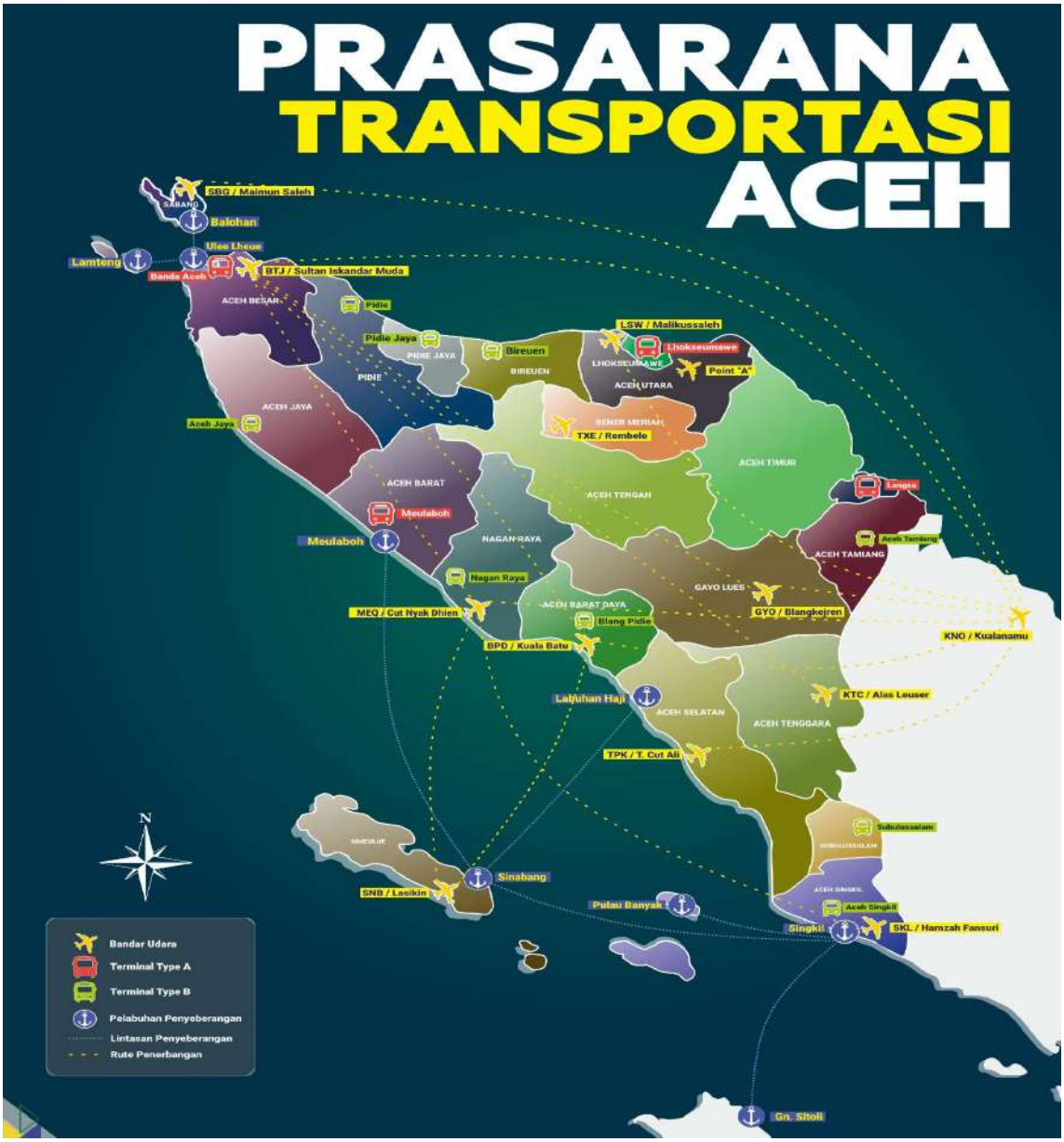


**Gambar 2.43. Prasarana Transportasi Aceh**

Sampai dengan tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 9 tipe B dan 23 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal. Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 11 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.71.

**Tabel 2.71.**
**Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2022**

| Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Pelabuhan Laut | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Jumlah Pelabuhan Penyeberangan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jumlah Bandar Udara | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Terminal Tipe A | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah Terminal Tipe B | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Jumlah Terminal Tipe C | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023*

## D. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkatan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menujukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.72.

**Tabel 2.72.**
**Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021**

| Uraian | | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase layanan angkutan darat | Aceh | 76,30 | 73.89 | 58.3 | 47 | 10 | 71.43 |
| | Nasional | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Aceh | n/a | 13 | 10 | 27 | 64 | 66 |
| | Nasional | 13.19 | 16.7 | 10.27 | 27 | 27 | 30 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023*

## E. Pemasangan Rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu – Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan,

Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan.

Rendahnya persentase fasilitas perlengkapan jalan diakibatkan kebutuhan penanganan pada jalan nasional yang harus diutamakan, peningkatan/rehab panjang jalan Provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas).

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023*

**Gambar 2.44. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2014-2022**

## F. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas dijalan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2014-2020 di sajikan pada Tabel 2.73.

**Tabel 2.73.**
**Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2021**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Total Panjang Jalan (km) | 23.650,05 | 23.650,05 | 23.650,05 | 23.650,05 | 23.650,05 |
| Total Jumlah Kendaraan (unit) | 1.898.398 | 2.073.051 | 2.179.295 | 3.058.000 | 3.544.000 |

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%) | 80,27 | 87,65 | 92,15 | 0,13 | 0,15 |
| Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%) | 1,25 | 1,14 | 1,09 | 773,40 | 667,30 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021*

**G. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum**

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2022 didominasi oleh angkutan darat yaitu 2,964,869 orang (69.35%). Sementara jumlah orang yang terangkut angkutan laut yaitu 1.083.553 orang (25.35%) dan angkutan udara sebesar 226.687 orang (5.30%). Kondisi ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana Angkutan laut mendominasi mobilasi orang dari pada angkutan umum lainnya karena adanya pandemi. Pada Tahun 2021 Angkutan Laut sebesar 76.37 persen diikuti angkutan udara yaitu 16.33 persen dan angkutan darat 7.30 persen. Hal ini menunjukkan angkutan laut menjadi moda utama, meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020-2021 dibandingkan jumlah orang sebelum tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2011-2021 disajikan pada Tabel 2.74.

**Tabel 2.74.**
**Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2022**

| Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angkutan Darat | 13.754.257 | 15.288.280 | 12.672.542 | 633.082 | 612.980 | 2,964,869 |
| Angkutan Laut | 702.801 | 889.329 | 1.099.089 | 566.099 | 729.669 | 1,083,553 |
| Angkutan Udara | 652.938 | 694.866 | 586.508 | 219.111 | 157.975 | 226,687 |
| **Jumlah** | **15.109.996** | **16.872.475** | **14.358.139** | **1.418.292** | **1.500.624** | **4.275.109** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023*

**H. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**

Faktor aksesibiltas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2022 sebesar 79.10 persen cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 37.70 persen atau menurun sebesar 41.35 persen. Dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan yang lebih membuat hampir semua moda transportasi kini lebih nyaman untuk digunakan.

Namun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.75

**Tabel 2.75.**
**Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2022**

| Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terminal | 4.586.484 | 1.719.924 | 1.689.953 | 1.153.344 | 1.154.013 | 5,797,404 |
| Bandara | 1.242.102 | 1.310.898 | 1.290.213 | 427.028 | 302.616 | 448,034 |
| Dermaga | 1.088.949 | 1.016.418 | 1.103.034 | 566.099 | 729.669 | 1,083,553 |
| **Jumlah** | **6.917.535** | **4.047.240** | **4.083.200** | **2.146.471** | **2.186.298** | **2.186.298** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh. 2022*

### 2.1.3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan website milik pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dimana sebelumnya sebanyak 0.45 persen, pada 2019 meningkat menjadi 0.48 persen dan ditargetkan untuk 2020 akan meningkat menjadi 0.51 persen.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan peneyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi

tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Terkait Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) yang terhubung dengan JIPD Provinsi Aceh, saat ini sudah terhubung sebanyak 23 Dinas Kominfo di Kabupaten/Kota di selurtuh Provinsi Aceh secara jaringan Metro dengan kapasitas 10 Mbps. Mengenai Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) yang digunakan sampai dengan saat ini 2 Instansi sudah menggunakan SPLPD (Dinkes Aceh dan Dinas Pangan Aceh) dan 6 Instansi masih menggunakan MANTRA.

Terkait fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola setiap tahun Pemerintah Aceh melalui Dinas kominfo Aceh telah melakukan Peningkatan kapasitas SDM Pengelola SPBE berupa fasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis pengunaan Aplikasi SPBE, Pendampampingan Pelaksanaan SPBE bagi SDM Pemerintah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas SDM TIK bagi pengelolaan Infrastruktur TIK yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan seperti INIXINDO atau Pelatihan yang diselengagrakan oleh Kementerian ( Kominfo, KemenPANRB, BSSN , BPS dan BIG ). Semenjak tahun 2020 Pemerintah Aceh melalui Tim SIAT-Dev Diskominfosandi Aceh telah membangun platform Gampong.id sebanyak 4.967 gampong dan sudah aktif. Platform ini sudah dimanfaatkan sebagai media promosi usaha produksi rumah tangga gampong dan desiminasi informasi gampong dengan dilakukannya penguatan KIG melalui pelatihan jurnalistik desa.

#### 2.1.3.2.2.11. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan peneyelenggaraan

pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

**2.1.3.2.2.12. Statistik**

**1. Statistik Sektoral Daerah**

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan perundang-undangan.

**2. Geospasial**

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya

dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

**2.1.3.2.2.13. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

**A. Koperasi**

Koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Dengan demikian, Koperasi merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang cukup strategis dalam peningkatan perekonomian rakyat. Namun sayangnya koperasi belum berkembangan menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat terutama di pedesaan.

Perkembangan koperasi di Aceh cukup fluktuatif, jumlah koperasi yang tumbuh terus bertambah namun begitu juga dengan jumlah koperasi tidak aktif. Jumlah koperasi di Aceh tahun 2022 mencapai 6.931 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut koperasi aktif sebanyak 3.931 unit atau sebesar 57,00 persen, sedangkan koperasi tidak aktif sebanyak 2.980 unit atau sebesar 43,00 persen. Secara rinci, perkembangan koperasi di Aceh Tahun 2018-2022 sebagai berikut.

**Tabel 2.76.**
**Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2018 – 2023**

| No | Tahun | Total Koperasi (unit) | Koperasi Aktif (unit) | Persentase Koperasi Aktif (%) | Tidak Aktif (unit) | Persentase Koperasi Tidak Aktif (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 6.432 | 3.692 | 57,40 | 2.740 | 42,60 |
| 2 | 2019 | 6.408 | 3.545 | 55,32 | 2.863 | 44,68 |
| 3 | 2020 | 6.602 | 3.777 | 57,21 | 2.825 | 42,79 |
| 4 | 2021 | 6.767 | 3.910 | 57,80 | 2.857 | 42,20 |
| 5 | 2022 | 6.931 | 3.951 | 57,00 | 2.980 | 43,00 |

*Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2023*

Koperasi yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota tersebut bergerak pada sektor perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor rill lainnya. Secara umum koperasi-koperasi tersebut menjalankan usaha di bidang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha kecil menengah (masyarakat/anggota koperasi).

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah koperasi tidak aktif masil relatif besar yaitu sebesar 43,00 persen dan koperasi aktif juga mengalami penurunan dari 57,80 persen pada tahun 2021 menjadi 57,00 persen pada tahun 2022.

Kondisi koperasi yang demikian menunjukkan masih adanya tantangan terhadap perkembangan koperasi di Aceh, terutama alih teknologi dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu, faktor lain penyebab tidak aktifnya koperasi antara lain disebabkan oleh:

1. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi;
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi.

B. **UMKM**

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, salah satunya sektor UMKM yang merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah UMKM di Aceh terus mengalami pertumbuhan, Fasilitasi UMKM untuk berkooperasi terus dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan skala ekonomi.

**Tabel 2.77.**
**Kinerja Pembangunan Kewirausahaan di Provinsi Aceh**
**Tahun 2018-2022**

| No. | Indikator Kinerja | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Rasio Kewirausahaan | 0,030 | 0,050 | 0,045 | 0,06 | 0,08 |
| 2. | Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil | 0,490 | 0,520 | 0,510 | 1,70 | 0,70 |
| 3. | Rasio Pertumbuhan Usaha Menengah | 0,100 | 0,110 | 0,100 | NA | 1,04 |

*Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2023*

Rasio kewirausahaan menunjukkan tren pertumbuhan positif, yang berarti bahwa sudah mulai timbul keyakinan dalam masyarakat untuk berwirausaha. Selain itu ia juga sudah menjadi pilihan karir baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, maka akan semakin besar peluang terbuka untuk berwirausaha, selanjutnya juga membangun status sosial yang baik di tengah masyarakat.

Sedangkan untuk rasio pertumbuhan usaha mikro masih berada pada kondisi yang fluktuatif. Demikian pula rasio pertumbuhan usaha menengah.

Namun perkembangan UMKM saat ini sebagian besarnya belum menunjukkan kapasitas sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana, informasi dan akses pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan/akses modal.

**2.1.3.2.2.14. Penanaman Modal**

**A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah termasuk Aceh peran swasta sangat menentukan. Kemajuan wilayah tersebut sangat didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk melakukan investasi di berbagai sektor sehingga akan meningkatkan keterbukaan perdagangan dan memberikan ruang gerak yang cukup lebar terhadap peningkatan semua sektor bukan hanya pada sektor riil semata namun juga berimplikasi langsung terhadap sektor jasa. Perkembangan investasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lain termasuk Sumatera Utara sebagai provinsi tetangga.

Hal tersebut ditandai dengan berfluktuatifnya jumlah investor baik skala nasional maupun asing. Pada tahun 2017 jumlah investor di Aceh dari Penanaman Modal Asing sebanyak 31 Investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 Investor pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yaitu 70 investor dan kemudian menjadi 173 Investor pada tahun 2020.

Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 346 investor menjadi 211 investor pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yakni sebanyak 376 investor hingga 2241 investor pada tahun 2020.

**Tabel 2.78.**
**Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018-2022**

| Tahun | PMA | | PMDN | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Perusahaan | Realisasi (Rp. Juta) | Jumlah Perusahaan | Realisasi (Rp. Juta) |
| 2017 | 31 | 149.089 | 336 | 1.680.961 |
| 2018 | 29 | 48.016 | 211 | 1.232.545 |
| 2019 | 70 | 1.196.941 | 376 | 4.615.150 |

| Tahun | PMA | | PMDN | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Perusahaan | Realisasi (Rp. Juta) | Jumlah Perusahaan | Realisasi (Rp. Juta) |
| 2020 | 61 | 737.974 | 2.241 | 8.373.043 |
| 2021 | 51 | 1.399.697 | 1.003 | 7.059.417 |
| 2022 | 58 | 127.073 | 786 | 1.433.366 |

*Sumber : DPMPTSP 2023*

**B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Perkembangan jumlah investor berkaitan erat dengan besarnya nilai investasi yang terealisasi di Aceh. Dalam periode tahun 2018-2022 perkembangan nilai realisasi investasi di Aceh juga mengikuti tren fluktuatif bahkan cenderung menurun pada tahun 2022. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing yang awalnya pada tahun 2018 terjadi kenaikan dari 3,58 juta US$ menjadi 79,79 juta US$ pada tahun 2019 mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 51,24 juta US$, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan secara tajam yaitu 203,28 juta US$ dan kembali menurun secara drastis yaitu 127,73 Juta US$ pada tahun 2022.

Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami perkembangan yang kurang baik sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, namun terjadi peningkatan secara signifikan mulai tahun 2019 yaitu 4,61 trilyun rupiah menjadi 8,37 trilyun rupiah pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan dengan besaran masing-masing yaitu 7,05 triliyun rupiah dan 4,43 triliyun rupiah.

Ada beberapa penyebab turunnya realisasi Inventasi di Aceh sejak tahun 2018-2022 diantaranya Pembangunan pabrik Semen Laweung masih sangat lambat atau tidak ada proses kemajuan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur/Kamirzu proses pembangunan kontruksinya belum berjalan sesuai perencanaan awal. beberapa pabrik pengolahan ikan di Kawasan Industri Perikanan Lampulo juga melambat. hal ini disebabkan pada tahun 2017 belum terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga proses pembangunannya terkendala. Selain hal tersebut menurunnya realisasi Investasi di Aceh juga disebabkan belum optimalnya pengelolaan Kawasan Industri Ladong Aceh Besar maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe dan Aceh Utara dan ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 sampai dengan pasca berakhirnya pandemi pada pertengahan tahun 2022. sedangkan terjadinya kenaikan nilai realisasi investasi yang begitu signifikan sebelum masa pandemi covid-19 pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 bahkan pada awal tahun 2020 karena iklim investasi dirasakan relatif membaik di Aceh. Terlaksananya realisasi investasi di Aceh juga sangat dipengaruhi oleh tingkat

pelayanan publik pada lintas sektor. Oleh karena itu perlu juga dilakukan pemahaman secara holistik kepada semua sektor. Pelayanan publik harus dilakukan secara akuntabel, cepat dan murah.

#### 2.1.3.2.2.15. Kepemudaan dan Olahraga

**A. Kepemudaan**

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis startup telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

Pada tahun 2021 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 66 (OKP) namun pada tahun 2022 bertambah 2 (OKP) menjadi 68 (OKP). Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan *partner* pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa.s

Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.79 berikut.

**Tabel 2.79.**
**Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan**
**Tahun 2018 – 2022**

| Organisasi Kepemudaan | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Pemuda | Orang | 1.373.142 | 1.343.768 | 1.343.768 | 1.319.818 | 1.344.984 |
| Jumlah Pemuda Berprestasi | Orang | 45 | 61 | 2 | 80 | 32 |
| Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP) | Unit | 69 | 70 | 71 | 66 | 68 |

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2022*

Kualitas pemuda Aceh masih belum mengembirakan yang terlihat dari masih rendahnya jumlah pemuda yang berprestasi baik dalam bidang wirausaha, sosial, politik, akademik, hukum dan agama. Jumlah pemuda berprestasi Aceh Tahun 2022 hanya 32 turun 60% dari tahun 2021 yang sebesar 80 pemuda. Padahal secara kuantitas jumlah pemuda Aceh tahun 2022 meningkat sebesar 25.166 pemuda menjadi 1.344.984 pemuda. Keadaan dan kondisi ini tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja namun banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya **masih rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan pemuda** dimana hanya 14% persentase pemuda Aceh yang tamat Pendidikan Tinggi, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda Aceh hanya 33,45% dengan rata-rata lama sekolah pemuda Aceh 11,64% dimana 66,12% pemuda Aceh tidak bersekolah lagi, dan 0,43% pemuda Aceh tidak/belum pernah bersekolah (sumber: BPS Susenas, Maret 2022). **Kesehatan dan penyalahgunaan narkoba** dimana masih tingginya angka keterlibatan pemuda dengan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya dengan angka prelevansi mencapai 2,80% dengan angka pecandu narkoba mencapai 83 ribuan (sumber: antaranews.com, 2022), serta masih tingginya angka keluhan kesehatan dan rawat jalan berdasarkan klasifikasi desa dan jenis kelamin yang mencapai 46,62% dengan angka kesakitan pemuda Aceh dengan klasifikasi desa mencapai 13,13% (sumber: BPS Susenas, Maret 2022). Selain itu, sebaran pemuda Aceh yang dominan di pedesaan daripada perkotaan dengan persentase pemuda di perkotaan adalah 24,57% dibandingan dengan persentase pemuda di pedasaaan adalah 25,23% juga menjadi faktor lain yang menyebabkan masih belum maksimalnya kegiatan penyadaran, pembinaan dan pemberdayaan pemuda yang diberikan pemerintah Aceh BPS Susenas, Maret 2022).

**B. Keolahragaan**

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan *national character building* suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh hasil pengukuran *Sport Development Index* (SDI) Tahun 2022, dimana:

(1) Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka olahraga provinsi Aceh juga berada pada kategori tinggi dengan skor indeks 0,975 hal ini menunjukkan bahwa meratanya ruang-ruang olahraga bagi masyarakat Aceh.

(2) Indeks literasi fisik yang mulai membaik pada skor 0,607 dengan kategori menengah, hal ini menunjukkan bahwa mulai meratanya pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggungjawab masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas fisik untuk kehidupan yang berkualitas.

(3) Mulai tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan olahraga meskipun berada dalam kategori rendah namun skor sudah mencapai 0,377.

(4) Indeks kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang mulai membaik meskipun masih berada pada kategori rendah dengan indeks 0,423.

Dengan demikian mulai adanya hasil dari program dan kegiatan pembudayaan dan pembinaan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan pada ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina Pemerintah Aceh. Saat ini terdapat 66 cabang olahraga yang terdaftar dan terhimpun dalam wadah KONI Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti sepakbola, badminton, tenis meja, footsal, volyball, futsal, tinju, panjat tebing, atletik, senam dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak semua cabang olahraga tersebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh dan tidak semua atlet pada cabang olahraga tesebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh. Selain dikarenakan anggaran yang masih belum memadai, namun juga ketersedian sumber daya manusia olahraga yang masih mencukupi baik pelatih, wasit dan calon atlet. Adapun cabang olahraga, sumber daya manusia keolahragaan dan infrasruktur olahraga Aceh disajikan pada Tabel 2.80.

**Tabel 2.80.**
**Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh**
**Tahun 2018 – 2022**

| No. | Keolahragaan | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Cabang Olahraga Binaan | Cabor | 16 | 20 | 24 | 29 | 14 |
| 2 | Atlit Olahraga Binaan | Orang | 443 | 454 | 456 | 309 | 309 |
| 3 | Atlit Berprestasi | Orang | 45 | 42 | 3 | 84 | 75 |
| 4 | Pelatih Berprestasi | Orang | 10 | 13 | 13 | 55 | 15 |
| 5 | Pelatih Olahraga Binaan | Orang | 82 | 84 | 84 | 56 | 35 |
| 6 | Prestasi Olahraga | Cabor | 10 | 15 | 1 | 30 | 12 |

| No. | Keolahragaan | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7 | Gedung Pemuda | Unit | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lapangan Olahraga | Unit | 37 | 122 | 19 | 19 | 19 |

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2022*

Dari Tabel 2.80 diatas diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 14 cabang olahraga binaan yang terbagi dalam 4 kegiatan binaan yaitu 1) Binaan PPLPD/SMAKON 11 jenis cabor, 2) Binaan PPLP 5 jenis cabor, 3) Binaan prestasi tingkat daerah 13 jenis cabor, 4) Binaan cabang olahraga berbakat 6 jenis cabor. Adapun total atlet binaan adalah 309 atlet dengan pelatih Diharapkan dari setiap cabang olahraga binaan akan lahirnya bibit-bibit unggul baru.

Adapun 14 cabang olahraga binaan pada Tahun 2022 diantaranya yaitu: 1) Atletik; 2) Pencak Silat; 3) Karate; 4) Panahan; 5) Anggar; 6) Tarung Derajat; 7) Sepakbola; 8) Bola Voly; 9) Kempo; 10) Bulutangkis; 11) Sepak Takraw; 12) Tenis Meja; 13) Angkat Besi; dan 14) Taekwondo. Dari 14 cabor yang dibina 6 cabang olahraga binaan menyumbang medali yaitu: 1) Sepakbola; 2) Taekwondo; 3) Pencak Silat; 4) Karate; 5) Tarung Derajat; dan 6) Atletik. Meskipun demikian, terdapat cabang olahraga yang juga menyumbangkan medali meskipun bukan binaan yaitu: 1) Para-Cycling; 2) Tinju; 3) Petanque; 4) Drum Band; 5) B-Boyindo; dan 6) Fotografi.

Pada Tahun 2022 jumlah pelatih yang mengukir prestasi berjumlah 15 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga perstasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2021 jumlah gedung pemuda yang telah dibangun sebanyak 5 unit. Sementara lapangan olahraga 19 unit yang tersebar di seluruh kab/kota di Aceh.

Melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII berdasrkan penyerahan petaka pada Tanggal 13 November 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, maka dengan terbitnya Keputusan tersebut Pemerintah Aceh sudah dapat melakukan persiapan-persiapan untuk berbenah dalam Perencanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Olahraga serta pembangunan Venue-Venue cabang Olahraga yang di pertandingkan pada Provinsi Aceh.

Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII tentu mempunyai banyak keuntungan. Selain sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki, aspek ekonomi pun juga akan terdongkrak dengan kedatangan ribuan atlet dan offisial dari provinsi seluruh Indonesia tentu akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa besarnya. Seperti hotel,

penginapan, rumah makan, pariwisata, souvenir dan cenderamata akan menjadi efek positif yang dinikmati tuan rumah, siaran langsung televisi, tentu juga membawa manfaat promosi yang efektif bagi tuan rumah.

**2.1.3.2.2.16. Kebudayaan**

Budaya sebuah bangsa akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang.Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue. Jika ditinjau dari segi kelompok pendaptan, kareakteristik sosial budaya masyarakat aceh dapat diklasifikasi dalam golongan kaya (ureung kaya), golongan berkecukupan (ureung sep pajoh), golongan miskin (ureung gasin), golongan melarat atau fakir (ureung papa).

Berdasarkan pengalaman di beberapa gampong dan mukim Aceh, budaya meusaraya (gotongroyong) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. masalah bersama atau kepentingan bersama diselesaikan secara bersama (lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal hingga negara).
b. keputusan bersama
c. Berbagi sumberdaya
d. Bekerja bersama disetai berbagai peran
e. Partisipatif
f. Murah dan mudah

**A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Penyelenggaran festival seni dan budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Aceh yang beragam kepada masyarakat lokal secara umum dan wisatawan secara terkhusus. Penyelenggaran festival ini bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semata, namun juga memperkenalkan beberapa kebudayaan Aceh yang berbasis islami melalui festival seni yang dilaksankan beragam , pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 44 festival dan meningkat di tahun 2022 diselenggarakan sebanyak 72 festival.

Pembangunan sektor Aceh ditujukan dapat memberikan peran penting dan strategis dalam memperkuat nilai-nilai budaya Aceh yang bersifat khas dan unik serta memiliki ragam kebudayaan, baik budaya benda (*tangible*) maupun bukan benda (*intangible*). Namun. keberagaman budaya tersebut belum sepenuhnya diarahkan dalam pelaksanaan kunjungan wisata. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya. Terkait hal ini, Pemerintah Aceh terus menggalakkan pembangunan kebudayaan Aceh yang diarahkan

sebagai pembangunan karakter bangsa atau *character building* yang sesuai dengan identitas ke-Aceh-an diantaranya melalui penyelenggaraan festival seni, adat dan budaya serta pelestarian benda, situs, artefak dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

**B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya dapat berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, dan lain-lain. Di Aceh terdapat sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdiri dari ; naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dan lain-lain yang telah dilestarikan, namun masih banyak memerlukan perhatian. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs sebagai kegiatan rutin tahunan, selain konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Hingga akhir tahun 2022, jumlah situs kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan mengalami peningkatan sehingga mencapai 810 buah.

**2.1.3.2.2.17. Perpustakaan**

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Pelayanan perpustakaan yang diberikan dapat diakses melalui 2 (dua) cara yaitu akses layanan perpustakaan berkunjung langsung ke gedung perpustakaan dan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui aplikasi playstore i-pustaka, dimana masyarakat dapat memperoleh bahan bacaan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke gedung layanan perpustakaan. Layanan i-pustaka merupakan salah satu inovasi bidang kearsipan yang diluncurkan tahun 2019.

Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.81 berikut.

**Tabel 2.81.**
**Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2018 – 2022**

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | **Jumlah Judul Buku** | | | | | |
| | - Buku cetak | 62.409 | 65.208 | 65.278 | 66.004 | 63.071 |
| | Buku digital | - | 6.024 | 66.571 | 66.004 | 63.071 |
| 2 | **Jumlah Eksamplar Buku** | | | | | |
| | - Buku cetak | 251.037 | 278.554 | 278.628 | 285.890 | 286.485 |
| | - Buku digital | - | 43.310 | 278.628 | 285.890 | 317.885 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh,* 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh setiap tahunnya terus meningkat sehingga berdampak positif kepada jumlah pemustaka baik secara offline maupun online, setiap tahunnya juga terus meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

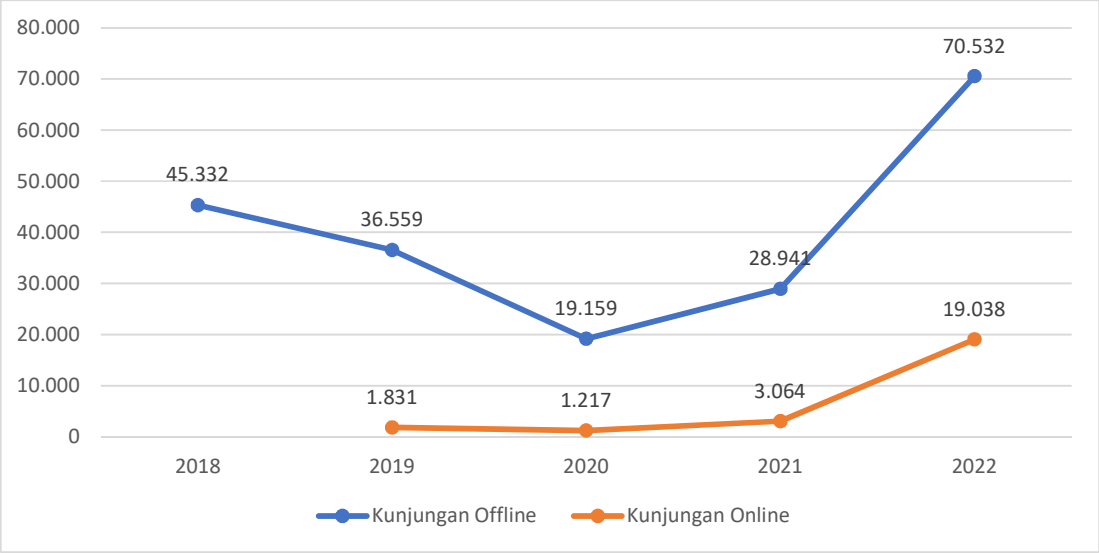


**Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *2023***

**Gambar 2.45. Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018 – 2022**

Berdasarkan Gambar 2.51. diatas, jumlah pemustaka offline yaitu pemustaka yang berkunjung langsung ke gedung layanan perpustakaan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, ini dikarenakan pandemi covid-19, dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melakukan pembatasan layanan perpustakaan untuk menghindari kerumunan dan juga kebijakan menutup layanan perpustakaan. Tahun 2021 ke tahun 2022 layanan perpustakaan kembali meningkat sebesar 41.591 pengunjung menjadi 70.532 pengunjung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kembali melakukan pembukaan layanan dengan tetap menjalankan protap pencegahan covid-19. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan juga dipengaruhi oleh peresmian dan pembukaan gedung layanan perpustakaan baru yang berada di jalan T. Nyak Arief, Lamgugop, Banda Aceh. Untuk layanan online buku digital i-pustaka, jumlah kunjungan pengunjung perpustakaan tahun 2022 juga meningkat dengan pesat sebesar 15.974 menjadi 19.038.

Adapun tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh tahun 2020-2021 disajikan pada Gambar 2.46. berikut.

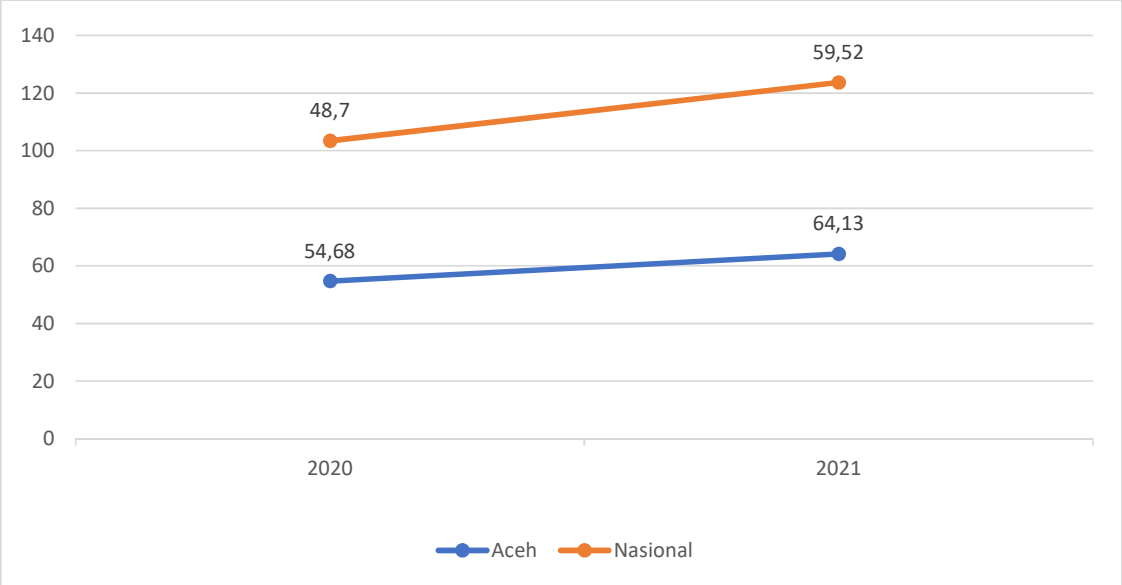


*Sumber : Perpustakaan Nasional, 2022*

**Gambar 2.46. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2021**

Dilihat dari Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), kebiasaan membaca masyarakat Aceh meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh tahun 2021 berada pada kategori tinggi, yaitu meningkat sebesar 9,45 menjadi 64,13 poin, angka ini jauh diatas nasional sebesar 59,52 poin. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyediakan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca.

Selain tingkat kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator kinerja pada RPJMN 2020-2024. Terdapat 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu: (1) Pemerataan layanan perpustakaan; (2) Ketercukupan koleksi; (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan; (4) Tingkat kunjungan masyarakat per hari; (5) Jumlah perpustakaan ber-SNP; (6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi; dan (7) Anggota perpustakaan.

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, Skor IPLM Provinsi Aceh tahun 2022 11,87 (Skala 56,5), lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yaitu 15,12 (Skala 71,97). Berdasarkan data tersebut, IPLM Aceh Tahun 2022 berada pada kategori sedang, sama dengan kategori IPLM Nasional 13,01 (Skala 61,94). Apabila dibandingkan dengan provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara dengan skor IPLM 45,67, IPLM Provinsi Aceh masih lebih tinggi.

Selain menjalankan fungsi layanan perpustakaan, Dinas Perpustakan dan Kearsipan Aceh juga melakukan kegiatan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*). Adapun data koleksi deposit Aceh disajikan pada Tabel 2.82. berikut.

**Tabel 2.82.**
**Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh Tahun 2022**

| No. | Uraian | Jumlah Judul/Naskah | Jumlah Eksampler | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi Buku Deposit dan KCKR | 3.001 | 3.754 | |
| 2 | Koleksi Buku Muatan Lokal | 902 | 1.009 | |
| 3 | Jumlah Naskah Kuno/Manuskrip yang telah ganti rugi | 241 | | Naskah |
| 4 | Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/Alih Media | 74 | | Naskah |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2023*

Tabel 2.82. diatas menyajikan data koleksi deposit sampai dengan akhir tahun 2022. Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan pustakawan yang profesional. Adapun data rinci mengenai jumlah fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.83. berikut.

**Tabel 2.83.**
**Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022**

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan Ruang | | | Pendidikan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 |
| 1 | Kabid/koordinator | | | | | | | | | | |
| 2 | Pustakawan Ahli Muda/Sub. Koordinator | 3 | 5 | | 7 | 1 | | | 7 | 1 | |
| 3 | Pustakawan Ahli Utama | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 4 | Pustakawan Ahli Madya | 5 | 8 | | 4 | 9 | | | 11 | 2 | |
| 5 | Pustakawan Ahli Muda | 7 | 10 | | 17 | | | | 17 | | |
| 6 | Pustakawan Ahli Pertama | 1 | | | 1 | | | | 1 | | |

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan Ruang | | | Pendidikan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 |
| 7 | Pustakawan Penyelia | | 5 | | 5 | | 1 | 3 | 1 | | |
| 8 | Pustakawan Mahir | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| | **Jumlah** | **18** | **28** | **0** | **35** | **11** | **1** | **4** | **38** | **3** | **0** |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2023*

Sampai dengan tahun 2022, jumlah pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak 46 orang dengan berbagai tingkat jabatan dan golongan. Jumlah tersebut tentu masih kurang apabila dibandingkan dengan tugas utama yang harus dijalankan yaitu meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Dari jumlah 46 orang fungsional pustakawan, yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi adalah sebanyak 5 (lima) orang.

#### 2.1.3.2.2.1. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip.

Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD pengelola arsip secara baku Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.84. berikut.

**Tabel 2.84.**
**Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 – 2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Jumlah Arsip | 5.537 | 5.698 | 5.781 | 6.065 | 7.201 | Berkas |
| 2 | Jumlah Arsip Terolah | 7.840 | 8.045 | 8.178 | 9.034 | 10.032 | Berkas |
| 3 | Jumlah Arsip Belum Terolah | 4.523 | 3.871 | 2.100 | 1.874 | 1.061 | Boks |

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 4 | Jumlah Arsip yang telah Alih Media | 1.752 | 1.217 | 3.931 | 10.333 | 14.000 | Lembar |
| 5 | Jumlah OPD yang telah mengelola | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | SKPA |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh,* 2023

Jumlah koleksi arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dapat dilihat pada tabel diatas. Pengolahan arsip dari tahun ke tahun terus meningkat, apabila kita lihat tabel di atas, pada Tahun 2022, jumlah arsip yang diolah meningkat sebesar 998 berkas menjadi 10.032 berkas. Apabila dirata-ratakan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah arsip yang diolah pertahunnya sebanyak 8.626 berkas.

Sedangkan jumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah mengelola arsip secara baku sebanyak 5 SKPA dari 46 SKPA atau sebesar 10,87 persen. Adapun yang dinilai diantaranya Daftar Arsip Aktif dan In Aktif, sarana dan prasana (*record center*, lemari, *filling cabinet*, dll), SDM (Arsiparis/Pengelola Arsip).

JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional. Secara umum, arsip yang telah diproses digitalisasi dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan kemudian diakses oleh publik secara online melalui website JIKN. Saat ini, sudah tersedia informasi arsip dinamis dan statis, yang dapat diakses publik. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip pada JIKN Tahun 2018-2022 yang disajikan pada Tabel 2.85. berikut.

**Tabel 2.85.**

**Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2018 – 2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Jumlah Arsip yang diinput pada Sistem JIKN | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | Berkas |
| 2 | Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN | - | 2 | 2 | 2 | 7 | Simpul JIKN Kab/Kota |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh,* 2023

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022 adalah sebanyak 5.500 berkas. Adapun Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN sampai akhir 2022 sebanyak 13 Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini telah berjalannya Sosialisasi SIKN-JIKN di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten AcehTamiang, Kota Sabang, dan Kota Langsa.

Jumlah pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat kita lihat pada Gambar 2.47. di bawah ini:

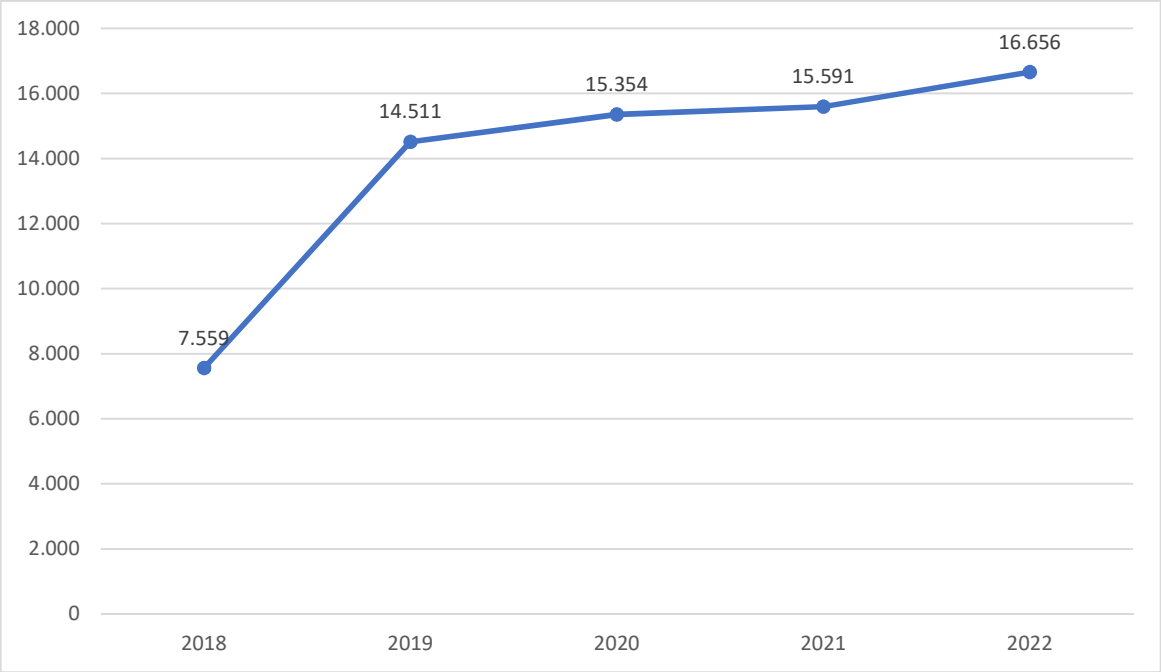


*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2023*

**Gambar 2.47. Jumlah Pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN Tahun 2018 – 2022**

Dilihat dari grafik diatas bahwa kunjungan layanan arsip/JIKN terus terjadi peningkatan dan di Tahun 2022 meningkat sebesar 1.065 menjadi 16.656 pengunjung. Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan arsiparis yang profesional. Adapun data rinci mengenai jumlah fungsional arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.86. berikut.

**Tabel 2.86.**
**Jumlah Fungsional Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022**

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan Ruang | | | | Pendidikan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 |
| 1 | Arsiparis Ahli Muda/ Sub. Koordinator | 2 | 2 | | 4 | | | | 3 | 1 | |
| 2 | Arsiparis Ahli Utama | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | Arsiparis Ahli Madya | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 4 | Arsiparis Ahli Muda | 6 | 4 | | 11 | | | | 11 | | |
| 5 | Arsiparis Ahli Pertama | 2 | | | 2 | | | | 2 | | |
| 6 | Arsiparis Mahir | | | | | | | | | | |
| 7 | Pustakawan Penyelia | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | **Jumlah** | **10** | **8** | **0** | **18** | **1** | **1** | **0** | **17** | **1** | **0** |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2023*

Pada Tabel 2.86. diatas, dapat kita lihat rincian data Fungsional Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Jumlah arsiparis yang paling banyak itu berada pada Jabatan Ahli Muda yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan tingkat pendidikan yang paling banyak sarjana (S1) adalah 17 (tujuh belas) orang. Untuk bidang kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah memperoleh empat 4 (empat) penghargaan yaitu Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional JIKN Tahun 2021, Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional JIKN Aceh Tahun 2022, Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional JIKN Aceh Tahun 2022. Dan AnugerahInovasi Aceh dengan Judul inovasi "JIKA" (Jaringan Invormasi Kearsipan Aceh). JIKN Aceh dapat diakses melaui https://acehprov.sikn.go.id.

**2.1.3.2.2.2. Gedung dan bangunan terbengkalai**

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 masih menyisakan pembangunan beberapa gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai. Lokasi bangunan tersebar di 19 kabupaten/kota dengan jenis bangunan publik yang beragam, mulai dari gedung/bangunan untuk kebutuhan

pendidikan, budaya, sumberdaya air, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan jembatan. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota perlu menuntaskan pembangunan gedung/bangunan yang terbengkalai sehingga fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Tabel 2.87.**
**Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional)**

| NO | JENIS BANGUNAN GEDUNG | LOKASI KAB/KOTA | TAHUN PELAKSANAAN | JMLH BANGUNAN | PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN | SKPA PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *47* | *562.129.384.462* | |
| 1 | Pemb.Stadion Olah Raga Sabang | Kota Sabang | 2018 | 1 | 40.000.000.000 | Dispora |
| 2 | Gedung RS Gigi Kedokteran USK; Gedung MM Fak. Ekonomi USK; Lab.Terpadu Tarbiyah UNMUHA; Ruang Dikti Keterampilan Hafiz Qur'an Deah Baro; Asrama Mahasiswa P. Aceh Kec. Meuraxa; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Gedung oncologycentre | Banda Aceh | 2013 - 2021 | 8 | 253.559.095.000 | Perkim, Dinkes |
| 3 | Sarpras Masjid Al-Ikhlas Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie; Jembatan Panca | Aceh Besar | 2016 - 2018 | 2 | 44.400.000.000 | Perkim, PUPR |
| 4 | Ruang Kuliah Yayasan P.T Islam Al Hilal Kab. Pidie | Pidie | 2014 | 1 | 2.000.000.000 | Disdik |
| 5 | RKB SMKN 1 Ulim; Padang HMT; Lanjutan 4 RKB Lt. 2 SMAN 1 Bandar Dua | Pidie Jaya | 2015 - 2016 | 4 | 2.200.000.000 | Disdik, Disnak |
| 6 | D.I. Aneuk Gajah Rheut; D.I. Mon Seukee Pulot | Bireun | 2018 - 2020 | 2 | 45.000.000.000 | Pengairan |
| 7 | Jmbt Rangka Baja Krueng Kreh - Pirak Timu; Jmbt Langkahan; Jmbt Rayeek Pangee. | Aceh Utara | 2015 - 2017 | 3 | 13.700.000.000 | PUPR |
| 8 | Lab Kimia SMAN 4 Lhoks; Balai Promosi Perdagangan dan Industri Aceh; Gedung Kampus STIE dan STIA; Pabrik Garam Beryodium; Kontruksi Fisik Lanjutan; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Pasar Induk Kota Lhoks. | Lhokseumawe | 2008 - 2018 | 7 | 33.916.289.462 | Disdik, Perkim, Budpar, Indag |
| 9 | Lanjutan Lab. Kimia SMAN 1 Ranto Peureulak; Lanjutan RKB SMAN 1 Peureulak; Asrama IKAWI Limpuk Abes | Aceh Timur | 2008 - 2014 | 3 | 3.904.000.000 | Disdik, Perkim |
| 10 | Pembangunan RSU Regional Langsa | Langsa | 2016 | 1 | 35.000.000.000 | Dinkes |
| 11 | Stadion Aceh Tamiang | Aceh Tamiang | 2009 | 1 | 40.000.000.000 | Dispora |
| 12 | Sarana Kolam Renang; Lapangan H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka; Pemb. Komplek Reje Linge | Aceh Tengah | 2008 - 2015 | 3 | 5.000.000.000 | Disdik, Perkim, Dispora |
| 13 | Pemb. Lab Kimia SMAN 1 Putri Betung | Gayo Lues | 2008 | 1 | 100.000.000 | Disdik |
| 14 | RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane | Aceh Tenggara | 2015 | 1 | 2.000.000.000 | Perkim |
| 15 | Sarpras Mesjid Alue Peuyareng | Aceh Barat | 2016 - 2018 | 1 | 15.000.000.000 | Perkim |
| 16 | Pembangunan Lanjutan Kantor dan Ruang Pertemuan SMAN 4 | Aceh Barat Daya | 2007 - 2009 | 2 | 750.000.000 | Disdik |
| 17 | STAI ARRAHMAN; Komplek Pendidikan Pasya Blangkejeren; Sarana Air Bersih SMKN Trumon Timur; Pembangunan Mushalla SMKN 1 Trumon Timur | Aceh Selatan | 2014 - 2017 | 3 | 2.100.000.000 | Dayah, Disdik |
| 18 | Kolam Renang Kota dan Kantor MPU | Subulussalam | 2013 - 2020 | 2 | 8.500.000.000 | Dispora, Perkim |
| 19 | Jembatan Kilangan | Singkil | 2020 | 1 | 15.000.000.000 | PUPR |

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan bangunan dan gedung pada pemerintah kabupaten/kota dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 juga menyisakan kewajiban penuntasan pembangunan gedung/bangunan yang belum

fungsional dan terbengkalai yang tersebar di 17 kabupaten/kota sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.88.**
**Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota**

| NO | KABUPATEN/KOTA | JENIS BANGUNAN GEDUNG | JMLH BANGUNAN | PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | *39* | *563.620.000.000* |
| 1 | Aceh Besar | Jembatan Lampanah Tunong; Jembatan Lam Sie | 2 | 40.000.000.000 |
| 2 | Pidie | Mesjid Raya Keumala Kec.Keumala; Gedung PDAM Tirta Dharma; Sarana Air Bersih Desa Lhok Panah; Mesjid Agung Al-Falah | 4 | 175.700.000.000 |
| 3 | Pidie Jaya | Pembangunan Pertokoan Tringgadeng 2 Lantai | 1 | 1.500.000.000 |
| 4 | Bireun | Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim; Pustu Lamkuta Kec. Jangka | 2 | 370.000.000 |
| 5 | Lhokseumawe | Jalan menuju Terminal Type A Kota Lhokseumawe | 1 | 4.500.000.000 |
| 6 | Aceh Timur | Revitalisasi Pasar Tradisional; Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Peunaron | 2 | 7.800.000.000 |
| 7 | Tamiang | Jalan Elak Tamiang Bypass; Jembatan Jalan Elak Bypass; Jembatan Pantai Keutapang; Pentas Seni Tamiang | 4 | 141.000.000.000 |
| 8 | Bener Meriah | Lanjutan Stadion Sepak Bola Mini; Jembatan Gp. Pilar Jaya, Kec. Bandar | 2 | 2.000.000.000 |
| 9 | Gayo Lues | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Akul; Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Uning Pune | 2 | 3.700.000.000 |
| 10 | Aceh Tenggara | Ruang Ibadah SDN Lawe Sekerah; RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane; Jalan Lingkungan Pasar Salim Pining, Simpang Semadan dan Titi Pasar; Kantor SDN Rambung Teledak; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Bale Lutu ; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Uning Sigugur; Mesjid Kec. Lawe Alas | 6 | 54.150.000.000 |
| 11 | Aceh Jaya | Lapangan Volly Gampong Dayah Baro | 1 | 400.000.000 |
| 12 | Aceh Barat | Stadion Alue Peunyareng Rehab Stadion | 1 | 10.000.000.000 |
| 13 | Nagan Raya | Pembangunan Gor Kec. Kuala Pesisir | 1 | 1.700.000.000 |
| 14 | Aceh Barat Daya | Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya | 1 | 70.000.000.000 |
| 15 | Aceh Selatan | Tapaktuan Sport Center ( TSC); Bundaran Mesjid Istiqamah (MI) Tahap II | 2 | 27.100.000.000 |
| 16 | Subulussalam | Lanjutan Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Subulussalam | 1 | 1.500.000.000 |
| 17 | Simeulue | Gedung Stadion Kabupaten Simeulue; Pengembangan wisata Pantai Ganting; Landscape Taman PAUD Mulia Dharma; Sarana dan Prasarana MIN Sinabang; Sarana Komplek BLK; Gedung Pelatihan Maritim | 6 | 22.200.000.000 |

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

#### 2.1.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini dapat menggerakkan sebagian besar sektor

penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. Sektor inijugadapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata.

Pariwisata Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. tapi juga mampu memberikan multiplier effect bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Dalam kurun waktu 2018-2022 kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 1,32 persen meningkat menjadi 1,35 persen pada tahun 2019 dengan tren pertumbuhan yang cukup baik yaitu 8,28 persen pada tahun 2018 dan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2018-2022, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan sebesar 6,73 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan sebesar -7,63 persen akibat dari pandemi covid-19, dengan kontribusi sebesar 1,25 persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan sebesar 32,40 persen akibat perekonomian mulai pulih dan kembali normal setelah covid-19 mulai mereda, dengan kontribusi sebesar 1,45 persen.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2018 tercatat sebanyak 106.281 orang. Seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 kunjungan wisatawan mancanegara mulai mengalami penurunan pada tahun 2019 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2021 yaitu hanya sebanyak 1.748 orang. Jumlah kunjungan mancanegara mulai mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 5.752 orang.

Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2018 tercatat sebanyak 106.281 orang, minat kunjungan terhadap Aceh mulai meningkat, dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 tercatat sebanyak 107.037 orang. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang sangat drastis dan beralanjut sampai dengan tahun 2021 dimana tercatat hanya sebanyak 1.748 orang yang berkunjung ke Aceh, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi *covid-19*. Kunjungan mancanegara mulai mengalami peningkatan pada tahun 2022 dimana tercatat sebanyak 5.752 orang, hal ini menunjukkan perbaikan pada sektor pariwisata yang mulai pulih.

A. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2022

**Capaian Pembangunan Kepariwisataan tingkat Provinsi**

| No | Provinsi | Ranking | Enabling Environment | T&T Policy and Conditions | Infrastructure | T&T Demand Drivers | T&T Sustainability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALI | 1 | 5.71 | 3.58 | 4.39 | 3.32 | 5.20 |
| 2 | DI YOGYAKARTA | 2 | 5.43 | 4.46 | 4.28 | 3.63 | 4.28 |
| 3 | DKI JAKARTA | 3 | 5.27 | 3.90 | 3.81 | 4.38 | 4.12 |
| 4 | JAWA TENGAH | 4 | 4.86 | 3.51 | 2.97 | 4.78 | 3.34 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | 5 | 4.15 | 4.85 | 3.48 | 3.78 | 3.92 |
| 6 | JAWA TIMUR | 6 | 4.45 | 3.10 | 3.64 | 4.75 | 3.39 |
| 7 | JAWA BARAT | 7 | 4.50 | 4.69 | 2.34 | 4.49 | 3.31 |
| 8 | KEPULAUAN RIAU | 8 | 4.42 | 3.04 | 4.68 | 2.85 | 3.78 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 9 | 4.38 | 3.78 | 2.65 | 3.77 | 4.35 |
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 10 | 4.63 | 4.15 | 2.69 | 2.68 | 3.85 |
| 11 | NUSA TENGGARA BARAT | 11 | 4.02 | 4.60 | 2.89 | 2.48 | 4.00 |
| 12 | KALIMANTAN UTARA | 12 | 4.67 | 4.81 | 2.48 | 2.09 | 3.54 |
| 13 | ACEH | 13 | 4.05 | 3.55 | 2.23 | 3.86 | 3.89 |
| 14 | SUMATERA UTARA | 14 | 3.82 | 4.08 | 3.02 | 2.99 | 3.83 |
| 15 | SULAWESI UTARA | 15 | 3.82 | 3.27 | 3.38 | 3.00 | 3.83 |

*Sumber: Kemenparekraf 2022*

**Gambar 2.48.** Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi

Berdasarkan data melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomni Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Aceh menduduki peringkat ke-13 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat 5 Sub Pilar Penilaian IPKN yaitu, Enabling Enivornment, T&T Policy and Conditions, Infrastructure, T&T Demand Drivers, dan T&T Sustainability. Dari kelima pilar tersebut ada 3 pilar yang berkaitan dalam sektor pembangunan pariwisata, yaitu :

1) *Travel & Tourism Policy and Conditions*, Provinsi Aceh memperoleh skor 3.55, dengan indikator yang terdiri dari Prioritas Pembangunan Kepariwisataan;
2) *Infrastructure*, Provinsi Aceh memperoleh skor 2.23, terdiri dari indikator Infrastruktur Layanan Pariwisata, dan;
3) *Travel & Tourism Environmental Sustainability*, Provinsi Aceh memperoleh skor 3.89, terdiri dari indikator Dampak dan Tekanan Permintaan Kepariwisataan.

Berikut gambar dibawah ini terdapat penjelasan indikator-indikator dari sektor pariwisata :

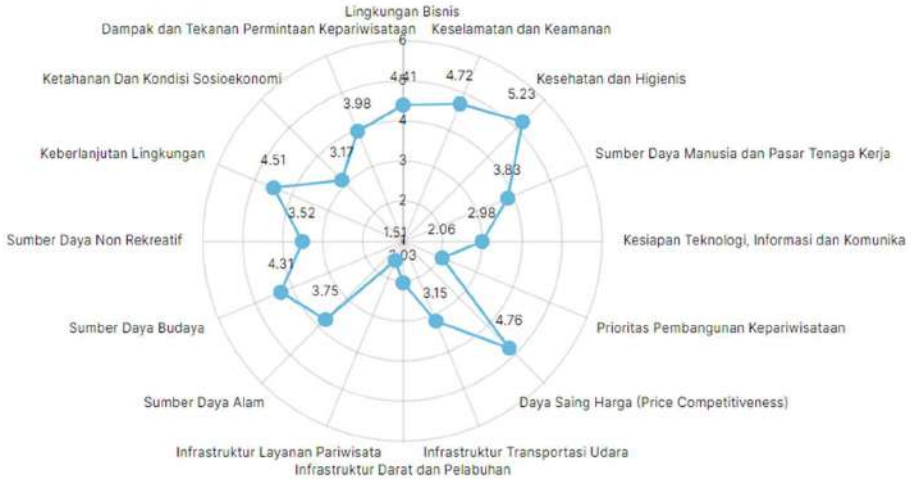


*Sumber: Kemenparekraf 2022*

**Gambar 2.49.** Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2022

Terdapat 3 indikator dalam menghitung Capaian dalam sektor pariwisata, terdiri dari :

1. Prioritas Pembangunan Kepariwisataan (Skor: 2.06)
   - Persentase penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi di sektor pariwisata
   - Ketersediaan data pariwisata
   - Kebaruan data pariwisata, dan
   - Persentase investasi sektor pariwisata terhadap total investasi
2. Infrastruktur Layanan Pariwisata (Skor: 1.51)
   - Jumlah kamar hotel
   - Ketersediaan pondok wisata (non-hotel) per 10.000 penduduk
   - Ketersediaan jumlah perusahaan rental kendaraan yang terdaftar untuk kegiatan pariwisata
   - Jumlah ketersediaan mesin ATM
3. Dampak dan Tekanan Permintaan Kepariwisataan (Skor: 3.98)
   - PDRB sektor perjalanan dan pariwisata
   - Lama tinggal wisatawan
   - Musim kedatangan wisatawan nusantara

- Jumlah pengunjung daya tarik wisata budaya daya tarik wisata budaya (sejarah, kesenian dan kuliner)
- Jumlah pengunjung daya tarik wisata alam (bahari, ekowisata dan petualangan)

Pembangunan pariwisata Aceh merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata, Aceh memiliki potensi alam yang kaya, budaya yang unik, dan sejarah yang menarik, menjadi perhatian bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Aceh. Dari ketiga Indikator tersebut pembangunan pariwisata dihitung untuk memperoleh ranking dari seluruh provinsi se-Indonesia, tahun 2022 Provinsi Aceh berada di peringkat ke-13.

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan pariwisata di Aceh adalah memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, diharapkan akan terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan masyarakat dan penguatan kearifan lokal sosial ekonomi di Aceh.

B. Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Wisnus ke Provinsi Aceh

| Tahun | Jumlah Perjalanan Wisnus |
|---|---|
| 2015 | 3.023.768 |
| 2016 | 4.306.217 |
| 2017 | 4.410.969 |
| 2018 | 6.518.831 |
| 2019 | 25.523.219 |
| 2020 | 4.741.268 |
| 2021 | 5.632.315 |
| 2022 | 7.483.957 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

**Gambar 2.50.** Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel diatas menggunakan perhitungan metode Mobile Positioning Data (MPD), yang menghitung jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang berkunjung ke Aceh. Jumlah perjalanan wisnus di Aceh bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2019, orang yang melakukan perjalanan wisatawan nusantara di Aceh meningkat drastis sebanyak 25.523.219 jiwa, disebabkan oleh banyaknya event-event nasional di Aceh, dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yaitu 4.741.268 jiwa, hingga saat ini tahun 2022 jumlah perjalanan wisatawan nusantara (7.483.957 jiwa) belum mampu menyeimbangi jumlah perjalanan wisatwan nusantara pada tahun 2019.

Angka keseluruhan diatas merupakan perjalanan dari provinsi asal keberangkatan, seperti Penerbangan dari Provinsi Maluku ke tujuan Provinsi Aceh.

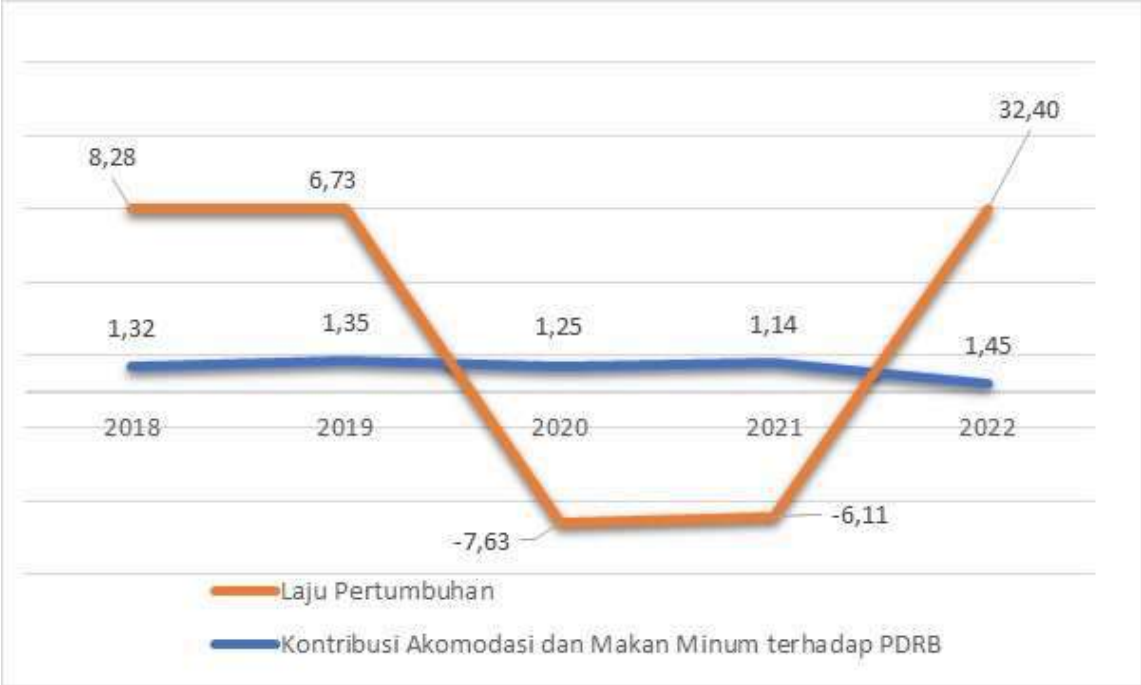


*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2023 (diolah)*

**Gambar 2.51. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen) Tahun 2018 – 2022**

Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama tahun 2022 paling tinggi terdapat pada bulan November yaitu sebesar 42,99 persen, sedangkan pada akomodasi lainnya paling tinggi terdapat pada bulan November yaitu sebesar 28,09 persen. Rata - rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang pada tahun 2022 paling tinggi terdapat pada bulan Oktober yaitu sebesar 4,00 hari, sedangkan pada tamu domestik paling tinggi terdapat pada bulan Januari yaitu sebesar 2,07 hari. Pada Bulan Desember 2022 ada 1.856 wisatawan mancanegara mengunjungi Aceh. Sementara tingkat penghunian kamar hotel bintang berada pada angka 36,82 persen dan hotel non bintang sebesar 24,21 persen.

Selain infrastruktur pada destinasi maupun objek wisata, permasalahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih menjadi kendala dalam peningkatan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat umum. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand *"The Light of Aceh"* atau disebut juga "Cahaya Aceh" belum mampu dioptimalkan.

#### 2.1.3.3.2. Pertanian

Pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Tahun 2020 berdasarkan laporan PDRB BPS bahwa sector Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,96 persen. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,92 persen.

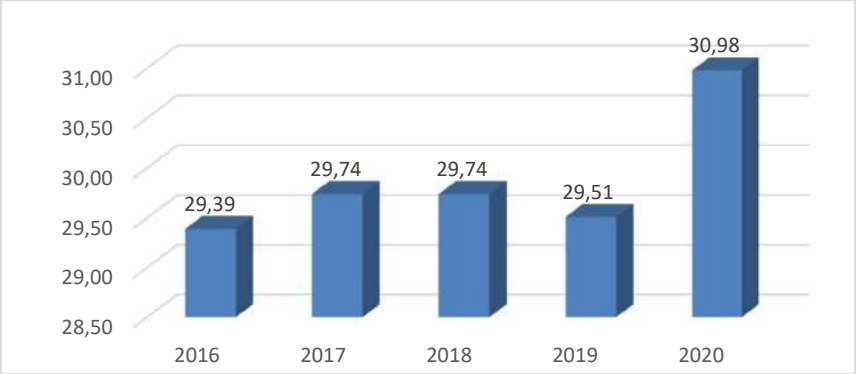


*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022*

**Gambar 2.52. PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2021**

Laju Pertumbuhan perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti, melainkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren positif setiap tahunnya rata-rata pertahun naik 1 persen, namun pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 0,35 persen.

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022*

**Gambar 2.53. Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2022**

Dampak kebijakan penyesuaian luas baku sawah pada tahun 2019, akan mempengaruhi kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Aceh kedepan. Luas baku sawah di Aceh tahun 2019 bertambah sebesar 358.051 Ha. Luas lahan baku sawah akan berdampak lansung pada alokasi pupuk subsidi dan input pertanian lainnya. Dibandingkan tahun 2018 luas baku sawah Aceh sebesar 213.997 Ha hal ini terjadi karena lahan sawah yang belum terpetakan/terdeliniasi lebih besar daripada lahan sawah yang mengalami alih fungsi. Luas lahan baku sawah Aceh tahun 2019 berkurang seluas 287.051 Ha dibandingkan tahun 2013 karena alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya.

Penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi gabah. Tahun 2017 produksi gabah Aceh sudah mencapai 2,54 juta ton, tahun 2018 mencapai 2,56 juta ton sedangkan Tahun 2019 hanya mencapai 1,86 juta ton dan pada tahun 2020 mencapai 1,75 juta ton.

**Gambar 2.54. Tabel Capaian Produksi Gabah Aceh**

Sub sektor perkebunan dengan komoditi andalannya masih pada (5K) Kelapa, kakao, kopi, kelapa sawit, karet dan Nilam) yang merupakan komoditi ekspor utama Aceh. Kopi masih merupakan andalan ekspor dimana pada triwulan 2019 mencapai USD 91,26 juta atau meningkat 70,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 53,64 juta. Peningkatan ini di sebabkan karena melimpahnya pasokan biji kopi sebagai dampak kondisi cuaca dan alam yang mendukung produksi kopi. Ekpor perdana CPO di Kabupen Aceh Jaya sebesar 4.9000 MT dan Lhokseumawe sebanyak 5.422 T juga mempengaruhi nilai ekspor aceh untuk negara India.

#### 2.1.3.3.3. Perkebunan

Perkebunan menyumbangkan kontribusi sebesar 6.63 sampai 10.17 persen dalam periode 2013-2019. Persentase kontribusi tersebut memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya kelapa sawit, Karet, Kopi, kakao dan kelapa dalam.

Perkembangan jumlah produksi kelapa sawit Aceh terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 produksi kelapa sawit sebesar 399.618 ton dan pada tahun 2020 sebesar 456.760 ton. Komoditi kelapa sawit masih merupakan andalan sektor perkebunan, yang di dukukng melalui program replanting melalui dana APBN sangat mempengaruhi produksi kelapa sawit pada tahun mendatang. Komoditas kopi memiliki jumlah produksi menunjukkan tren yang kurang baik pada tahun 2020 sebesar 73.411 ton, produksi meningkat pada tahun 2016 sebesar 65.231 ton sampai tahun 2019 produksi sebesar 76.027 ton . Jenis Produksi utama adalah kopi Arabica. Untuk Kakao, karet dan kelapa dalam belum memperlihatkan produksi yang menggembirakan, dimana rata-rata produksi untuk enam (2016-2020) tahun terakhir komoditi kakao adalah 40.752 ton, karet 66.034 ton dan kelapa dalam 63.306 ton, cengkeh 5.378 ton dan lada hanya 326 ton. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.55 berikut :

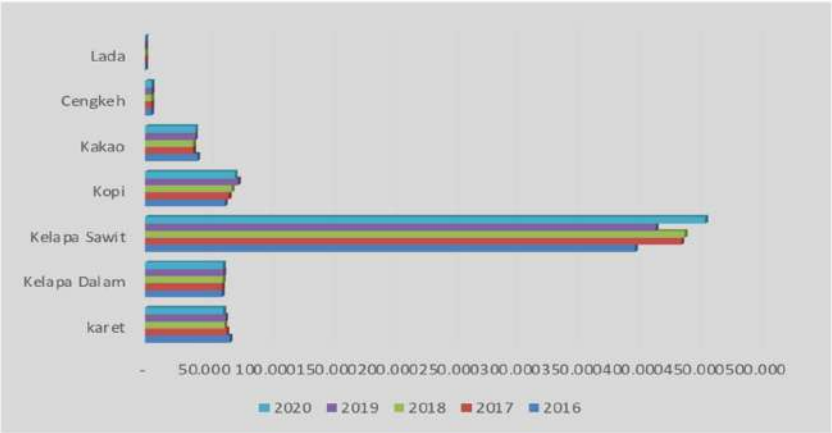


**Gambar 2.55. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020**

Dalam pembangunan sektor perkebunan, permasalahan yang sering dihadapi masih berkisar pada kurang intensifnya pemeliharaan terhadap komoditas perkebunan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikat, SDM petani yang masih kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi pertanian dan perkebunan dan juga fluktuasi harga komoditas perkebunan yang juga masih menjadi permasalahan sehingga mempengaruhi rendahnya daya saing komoditas perkebunan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas SDM petani dan penguatan kelompok tani melalui

koorporarsi yang kuat, ekstensivikasi pertanian serta menjaga kestabilan harga komoditas perkebunan melalui sistem resi gudang.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2016–2020) kondisi luasan tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana perkembangan luas areal perkebunan rakyat dari tahun 2016–2020 komoditi unggulan rata-rata hampir tidak ada perkembangan luas areal yang signifikan.

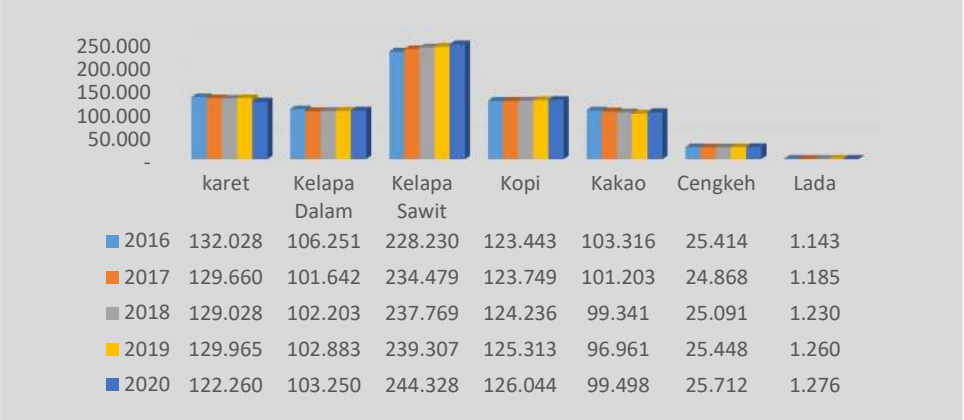


*Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2020*

**Gambar 2.56. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Aceh 2016-2020 (ha)**

Perkembangan perkebunan Aceh tahun 2020 dapat digambarkan bahwa komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao masih tinggi luasannya karena masih dibudidayakan petani. Luas perkebunan rakyat di Aceh 2020 yang terbesar adalah kelapa sawit sebesar 244.328 ha terus meningkat 6,59 persen dari tahun 2016 sebesar 228.230 ha. Tanaman karet seluas 122.260 ha pada tahun 2020 turun -7,99 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 132.028 ha. Komoditi kopi berada pada urutan 3 sebesar 126,044 ha, kemudian kelapa dalam dan kakao.

**Tabel 2.89.**
**Perkembangan Produksi perkebunan Aceh, 2016 - 2020 (Ton)**

| Komoditi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| karet | 69.169 | 66.671 | 64.926 | 65.629 | 63.774 |
| Kelapa Dalam | 62.752 | 62.832 | 63.500 | 63.868 | 63.579 |
| Kelapa Sawit | 399.618 | 437.292 | 440.087 | 416.387 | 456.760 |
| Kopi | 65.231 | 68.493 | 70.774 | 76.027 | 73.411 |
| Kakao | 42.889 | 39.295 | 39.295 | 41.028 | 41.252 |
| Cengkeh | 5.221 | 5.268 | 5.316 | 5.490 | 5.594 |
| Lada | 322 | 324 | 352 | 265 | 368 |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2021*

Perkembangan harga komoditas global masih tertekan seiring dengan belum membaiknya perkembangan perekonomian global, Namun demikian beberapa komoditas seperti kakao dan kelapa terlihat mengalami perbaikan. Sedangkan komoditas karet harganya belum banyak mengalami perubahan masih berada di level bawah.

#### 2.1.3.3.4. Peternakan

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian Aceh serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian. Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat petani khususnya petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif dibidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi petani peternak. Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2016 sebesar 3.92 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 4.11 persen. Peningkatan nilai kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Pada tahun 2020 dan 2021 konstribusinya menurun karena dipengaruhi oleh covid-19 di awal tahun 2020. Penurunan ini juga diakibatkan oleh rendahnya produksi daging ayam petelur.

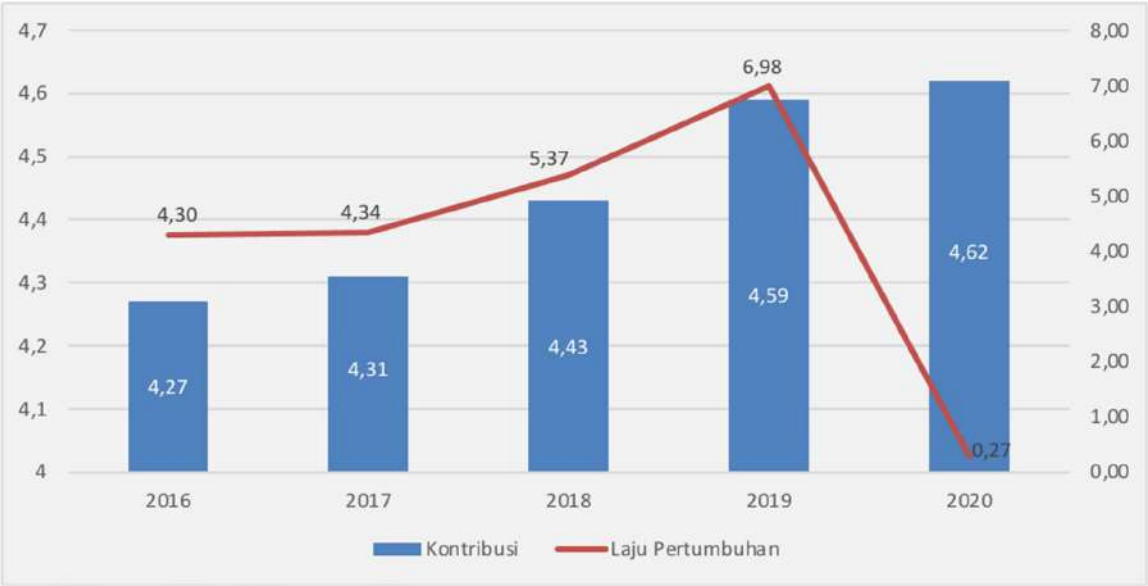


*Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2022*

**Gambar 2.57. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2021**

Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. Nilai tukar petani (NTP) merupakan suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan petani, termasuk peternak. Adapun NTP pada subsektor Peternakan dapat dilihat pada Gambar 2.58 berikut ini:

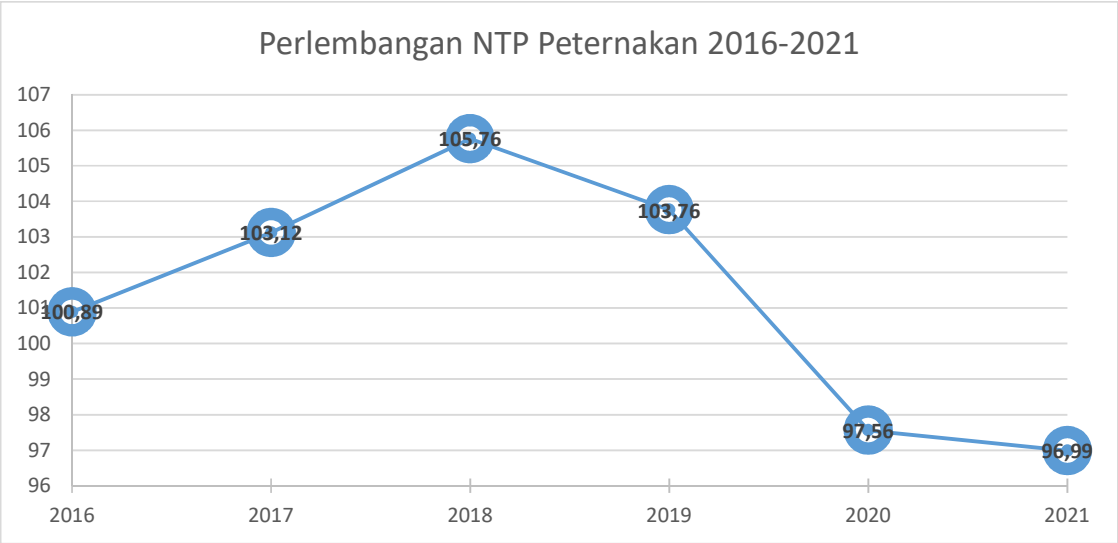


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022*

**Gambar 2.58. Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2016 – 2021**

Subsektor Peternakan sebagai salah satu komponen dalam sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi NTP Peternakan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu berada diatas 100, kemudian mengalami penurunan menjadi 97,56 pada tahun 2020, dan menjadi 96,99 pada tahun 2021. Penurunan Rata-rata NTPt tahun 2019 disebabkan peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata harga yang diterima petani, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak mulai mengalami peningkatan, karena indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayarkan.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang diterima petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Hal ini berarti bahwa produksi hasil peternakan yang dihasilkan telah mampu mengimbangi pengeluaran para peternak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan produksi dan harga-harga produk peternakan. Secara rinci indeks harga yang diterima petani dan indeks yang dibayarkan petani dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.90.**
**Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2016 – 2021**

| Tahun | Indeks Harga yang diterima Petani (IT) | Indeks Harga yang dibayar Petani (IB) | NTP Peternak |
|---|---|---|---|
| 2016 | 120.26 | 119.2 | 100.89 |
| 2017 | 125.96 | 122.19 | 103.12 |
| 2018 | 133.55 | 126.27 | 105.76 |
| 2019 | 135.01 | 130.11 | 103.76 |
| 2020 | 102.66 | 105.22 | 97.56 |
| 2021 | 104.67 | 107.92 | 96.99 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022 (diolah)*

Pada tahun 2019, rata-rata It adalah 135,01. Pergerakan It petani subsektor peternakan pada tahun 2019 cendrung sama dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2019, pola It meningkat hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga akhir tahun. Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun 2019 juga berada pada triwulan dua dan tiga. It petani subsektor peternakan tahun 2019 mengalami penurunan terbesar pada bulan Desember sebesar 0,81 persen dengan rendahnya harga jual ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba) Sedangkan kenaikan It dengan angka tertinggi terjadi pada Mei 2019 sebesar 2.10 persen dengan tingginya harga jual komoditas daging menyambut tradisi Meugang dan Idul Fitri.

Pada tahun 2018, rata-rata Ib adalah 126.27. Pola Ib pada tahun 2018 ini terus meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2019, rata-rata IB adalah 130.11. Selama tahun 2019, pola Ib cenderung meningkat hingga Agustus menurun hingga akhir tahun, Pola perubahan Ib mengikuti Indeks Kelompok Konsumsi Rumahtangga (KRT). Selama tahun 2019, Ib meningkat paling tinggi pada Mei yang disebabkan meningkatnya indeks KRT. Kelompok bahan makanan memang mengalami inflasi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sedangkan penurunan dengan angka tertinggi terjadi pada September 2019 dengan rendahnya indeks KRT. KRT mengalami deflasi dengan menurunnya harga pada kelompok bahan makanan seperti komoditas ikan, cabe merah dan bawang.

Pada Desember 2020, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPt) sebesar 96.75 atau mengalami penurunan 0,84 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) turun sebesar 0,01 persen dengan rendahnya harga jual komoditas ternak besar (sapi) dan ternak kecil (kambing dan domba). Indeks yang dibayar petani Ib naik sebesar 0,84 persen dengan naiknya indeks kelompok KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,52 persen.

Selain faktor eksternal diatas, beberapa faktor internal juga dapat dipengaruhi guna peningkatan kesejahteraan peternak. Dari sisi konsumsi rumah tangga masih sangat dominan dengan konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan transportasi dan komunikasi, dengan nilai rata-rata yang lebih besar daripada indeks yang diterima petani. Selanjutnya dari sisi biaya produksi dan penambahan barang modal telah menunjukkan nilai yang lebih kecil dari indeks terimanya, kecuali pada biaya transportasi. Biaya produksi dapat terus ditekan dengan peningkatan diversifikasi produk peternakan dan integrasi peternakan dan pertanian misalnya dalam pengolahan pupuk dan pakan ternak.

Perkembangan produksi daging ternak ruminansia dan daging unggas selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 produksi daging ternak ruminansia sebesar 16.056.776 kg, tertinggi terdapat pada kelompok ternak sapi sebesar 10.740.148 kg, kerbau sebesar 2.593.879 kg, dan kambing sebesar 2.275.780 kg. Namun untuk produksi daging unggas sebesar 41.690.079 kg di tahun 2020, tertinggi pada ternak ayam pedaging sebesar 34.437.000 kg, ayam kampun sebesar 5.548.861 kg dan itik sebesar 1.696.849 kg. Tingginya peningkatan produksi dan konsumsi daging unggas dikarenakan banyaknya tempat makan siap saji. Meskipun produksi daging pada kedua kelompok ternak cukup tinggi namun secara jumlah populasi masih sangat rendah karena sebagiannya peternakan rakyat dengan jumlah populasi terbatas.

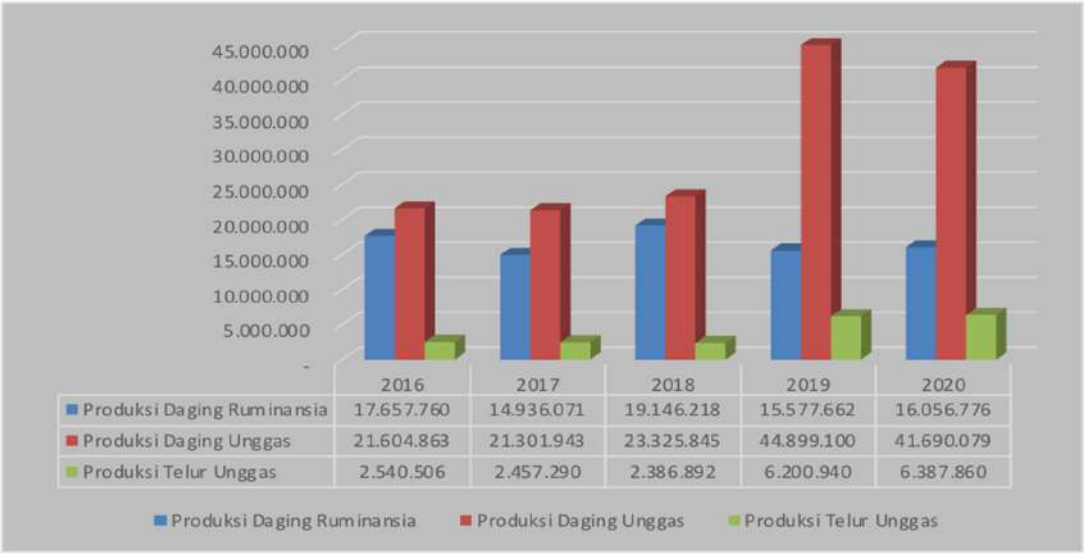


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)*

**Gambar 2.59. Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia, Daging Unggas dan Produksi Telur (kg) di Aceh. Tahun 2016- 2020**

Jumlah populasi ternak juga menjadi indikator pencapaian pembangunan sektor peternakan. Perkembangan jumlah populasi ternak sapi dan kerbau di Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.91.**
**Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020**

| Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality* | Sapi Perah *Dairy Cattle* | | Sapi Potong *Beef Cattle* | | Kerbau *Buffalo* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Simeulue | - | - | 719 | 741 | 9923 | 10221 |
| Aceh Singkil | - | - | 3540 | 3646 | 182 | 187 |
| Aceh Selatan | - | - | 1696 | 1747 | 3567 | 3674 |
| Aceh Tenggara | - | - | 4825 | 4970 | 156 | 161 |
| Aceh Timur | - | - | 38663 | 39823 | 5458 | 5622 |
| Aceh Tengah | 13 | 14 | 4451 | 4585 | 4959 | 5108 |
| Aceh Barat | - | - | 7467 | 7691 | 24244 | 24971 |
| Aceh Besar | - | - | 77192 | 79508 | 10727 | 11049 |
| Pidie | - | - | 44344 | 45674 | 3468 | 3572 |
| Bireuen | - | - | 44895 | 46242 | 945 | 973 |
| Aceh Utara | - | - | 53072 | 54664 | 1143 | 1177 |
| Aceh Barat Daya | - | - | 2830 | 2915 | 3850 | 3966 |
| Gayo Lues | 4 | 4 | 4430 | 4563 | 2734 | 2816 |
| Aceh Tamiang | - | - | 42930 | 44218 | 129 | 133 |
| Nagan raya | - | - | 10830 | 11155 | 4246 | 4373 |
| Aceh Jaya | - | - | 19229 | 19806 | 5591 | 5759 |
| Bener Meriah | 2 | 2 | 779 | 802 | 2293 | 2362 |
| Pidie Jaya | - | - | 21613 | 22261 | 2708 | 2789 |
| Banda Aceh | - | - | 1714 | 1765 | 32 | 33 |
| Sabang | - | - | 2092 | 2155 | 32 | 33 |
| Langsa | - | - | 5952 | 6131 | 150 | 155 |
| Lhokseumawe | - | - | 7192 | 7408 | 36 | 37 |
| Subulussalam | - | - | 2576 | 2653 | 144 | 148 |
| **Aceh** | **19** | **20** | **403 031** | **415 123** | **86 717** | **89 319** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2021*

Tabel 2.97. menunjukkan bahwa populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau terus meningkat bila dibandingkan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Adapun populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah 75.908 ekor sapi potong dan 11.049 ekor kerbau pada tahun 2020. Secara keseluruhan Pada tahun 2020 berdasarkan data dari BPS dalam menunjukkan bahwa populasi sapi perah 20 ekor, sapi perah 415.123 ekor dan Kerbau 89.319 ekor.

Capaian keberhasilan dari sub sektor peternakan bukan hanya terletak pada kemampuan memproduksi daging semata, namun juga ditentukan dari capaian produksi telur dan susu yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut. Bila dilihat dari perkembangannya, produksi telur dan susu yang dihasilkan pada tahun 2019 dan 2020 menujukkan perkembangan yang signifikan, dimana pada tahun 2019 produksi susu sebanyak 5.250 liter dan meningkat menjadi 6.300 liter pada tahun 2020. Sedangkan produksi telur pada tahun 2019 adalah sejumlah 22.863.738 kg dan meningkat menjadi 23.834.852 kg pada tahun 2020. Hasil tersebut mmeperlihatkan bahwa

pertumbuhan produksi susu dipengaruhi oleh belum berkembangnya pengelolaan susu di sektor hilir melalui ketersediaan industri susu. sehingga menyebabkan ketersediaan susu sapi perah Aceh menjadi belum cukup stabil. Sedangkan telur juga belum menunjukkan perkembangan produksi yang cukup baik. sehingga untuk memenuhi kebutuhan telur harus dipasok dari Sumatera Utara.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya: 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

**2.1.3.3.5. Kehutanan**

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.550.390.23 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.92.

**Tabel 2.92.**
**Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya**

| Kawasan Hutan | Luas (ha) | Persentase |
|---|---|---|
| Hutan Konservasi | 1.058.364,40 | 29.81 |
| Hutan Lindung | 1.781.677,92 | 50.18 |
| Hutan Produksi Tetap (HP) | 549.794,88 | 15.49 |
| Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 145.178,34 | 4.09 |
| Hutan Produksi Konversi | 15.374,88 | 0.43 |
| **Jumlah** | **3.550.390,23** | **100,00** |

*Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018*

Tabel 2.92. memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.781.677,92 Ha atau 50.18 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.364,40 Ha atau 29.81 persen dari total luas kawasan hutan.

Luas kawasan hutan Aceh sebesar 62,55 persen dari luas total daratan sebesar 5.675.840,82 Ha. Ditinjau dari peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

**A. Deforestasi**

Pendekatan analisis kerusakan hutan dan lahan dilakukan menggunakan analisis perubahan tutupan lahan pada periode tertentu yang dikelompokan dan dikalkulasi dengan metodelogi tertentu menjadi nilai kehilangan tutupan hutan (deforestasi). Berdasarkan baseline emisi aceh menggunakan data series selama 27 tahun terakhir (1990–2017), Total Deforestasi mencapai ± 675.864 hektar, atau rata-rata 25.032 hektar per tahun (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Berbeda dengan situasi provinsi lain di Pulau Sumatera, pada periode 1990-1996 deforestasi belum terjadi di Aceh mengingat pada saat tersebut konflik bersenjata sedang terjadi sehingga aktifitas dalam sektor berbasis lahan masih sangat terbatas. Deforestasi Aceh baru dimulai pada periode 1996 -2000 dengan luas mencapai 86,000. Setelah periode tersebut luas deforestasi tahunan cenderung menurun. Luas deforetasi meningkat kembali pada periode 2006-2013 pasca peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, sejalan dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan kondisi lahannya, rata-rata deforestasi lebih banyak terjadi di tanah mineral yang mencapai luas 21.675 ha per tahun (87%) dan dalam jumlah sedikit di tanah gambut mencapai luas 3.356 hektar per tahun (13%).

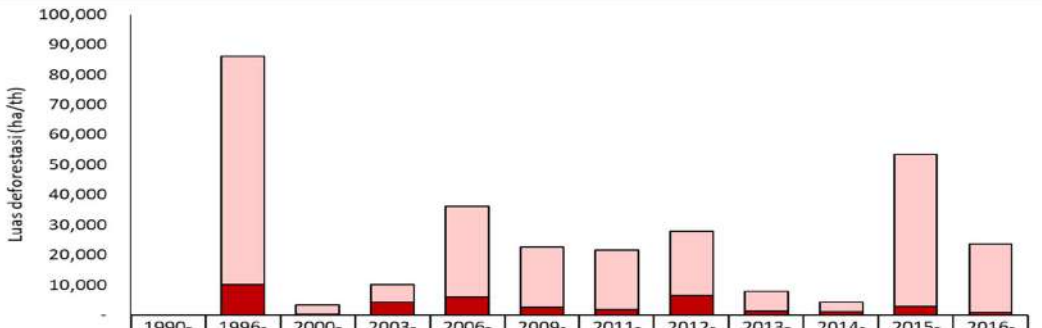


| | 1990-1996 | 1996-2000 | 2000-2003 | 2003-2006 | 2006-2009 | 2009-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral | - | 75,980 | 2,966 | 5,768 | 30,286 | 19,910 | 19,715 | 21,641 | 6,668 | 3,195 | 50,549 | 22,663 |
| Gambut | - | 10,025 | 199 | 4,224 | 5,908 | 2,663 | 1,935 | 6,346 | 1,234 | 1,035 | 2,866 | 800 |
| Total | - | 86,005 | 3,165 | 9,992 | 36,194 | 22,573 | 21,650 | 27,987 | 7,902 | 4,231 | 53,415 | 23,463 |

*ILEDSA, Bappeda Aceh Tahun 2020*

**Gambar 2.60. Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017**

Baseline deforestasi yang terjadi di Aceh selama periode 1990 -2012 sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan negara (APL) mencapai 406.500 hektar (73 % dari luas keseluruhan), sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 152.366

hektar atau 27% (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Deforestasi yang tinggi di luar kawasan hutan sebagian besar adalah deforestasi terencana (deforestasi plan) untuk tujuan pengembangan wilayah dan kegiatan budidaya berbasis lahan khususnya pada kawasan yang telah dibebani izin.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan terhadap perubahan kelas tutupan lahan berhutan menjadi kelas tutupan lahan tidak berhutan di Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2020, diperoleh hasil bahwa selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.93 di bawah ini:

**Tabel 2.93.**
**Luas Deforestasi Aceh Tahun 2013-2022**

| NO | Kabupaten Kota | Fungsi Kawasan | | | | | | | Tidak Ada Data | Grand Total DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SM | TN | HL | HPT | HP | Tubuh Air | APL | | |
| 1 | Aceh Barat | | | 3,41 | | | | 9,73 | | 13,14 |
| 2 | Aceh Barat Daya | | | | | | 4,11 | 3,24 | | 7,35 |
| 3 | Aceh Besar | | | | | | | 13,11 | | 13,11 |
| 4 | Aceh Jaya | | | | | | | 48,66 | | 48,66 |
| 5 | Aceh Selatan | | | 0,85 | 98,01 | 87,52 | | 66,79 | | 253,16 |
| 6 | Aceh Singkil | | | | | | | 39,93 | | 39,93 |
| 7 | Aceh Tamiang | | | 53,13 | | 271,01 | 9,19 | | | 333,33 |
| 8 | Aceh Tengah | | | 216,91 | | | | 13,14 | | 230,05 |
| 9 | Aceh Tenggara | | 15,58 | 7,70 | | | | | | 23,28 |
| 10 | Aceh Timur | | | 12,99 | | 1,70 | 1,07 | 33,00 | 2,03 | 50,78 |
| 11 | Aceh Utara | | | | | 5,31 | | 12,58 | | 17,89 |
| 12 | Bener Meriah | | | | | 16,1 | | 10,12 | | 26,22 |
| 13 | Bireun | | | 19,87 | | 235,82 | | | | 255,69 |
| 14 | Gayo Lues | | | 15,18 | | | | 18,55 | | 97,63 |
| 15 | Langsa | | | | | 28,13 | 0,68 | 34,37 | | 63,18 |
| 16 | Nagan Raya | | | | | | 21,54 | 189,21 | 0,33 | 211,08 |
| 17 | Simeulue | | | | | | | 20,61 | | 20,61 |
| 18 | Subussalam | 1,53 | | | | 42,39 | | 204,84 | | 251,76 |
| | Grand Total | 1,53 | 79,49 | 330,04 | 98,01 | 690,96 | 36,58 | 717,86 | 2,36 | 1,956,83 |

*Sumber: KLHK RI Tahun 2021*

Aktifitas deforestasi tersebut terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas ± 1.200 hektar dan seluas ± 717,86 hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan illegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

Kerusakan juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tanah mineral dan lahan gambut secara umum dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan melalui pembakaran. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Aceh merupakan tipe kebakaran bawah khususnya yang terjadi pada lahan gambut dengan dampak berupa asap dan hilangnya vegetasi serta komoditi yang dikembangkan di atasnya. Tipe kebakaran ini juga sangat sulit untuk dikendalikan serta memerlukan biaya, waktu serta teknologi (high cost).

Lahan gambut Aceh tersebar di wilayah Barat-Selatan Aceh meliputi; Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dengan luas mencapai ± 338.164 Ha. Dari luas tersebut, sekitar ± 256.362 Ha (75,8 %) berada di APL, dengan fungsi budidaya ± 159.651 Ha. Trend kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.94.

**Tabel 2.94.**
**Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2013 s.d. 2022.**

| NO | Provinsi | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Aceh | 831 | 1.025 | 1.025 | 9,158,45 | 3,865,16 | 1,284,70 | 730,00 | 1,078,00 | 788,00 | 175 |

**Sumber: DLHK Aceh Tahun 2023**

Berdasarkan luasan, kebakaran hutan dan lahan di Aceh terjadi penurunan. Upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui peningkatan patroli oleh tenaga pengamanan hutan (PAMHUT), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada masing-masing wilayah KPH. Sosisalisasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan bersama-sama TNI, POLRI dan melibatkan masyarakat terutama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Deforestasi di Aceh tahun 2015 sampai 2022 menurun. Deforestasi tertinggi pada tahun 2015 mencapai 23.072 ha atau 0,648 persen dari total luas kawasan hutan. Persentase deforestasi di Aceh disajikan pada Tabel 2.95.

**Tabel 2.95.**
**Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2022**

| Tahun | Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | Luas Kawasan Hutan (Ha) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2015 - 2016 | 23.072 | 3.557.928,00 | 0,648 |
| 2016 - 2017 | 15.515 | 3.557.928,00 | 0,435 |
| 2017 - 2018 | 7.502 | 3.563.813,00 | 0,211 |
| 2018 - 2019 | 11.608 | 3,550,390.23 | 0,327 |
| 2019 - 2020 | 1.956 | 3,550,390.23 | 0,055 |
| 2020-2021 | 1,956 | 3,550,390.23 | 0,055 |
| 2021-2022 | 1,956,83 | 3,550,390.23 | 0,055 |

*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023*

Penyebab deforestsi antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan dan *Illegal Logging.* Deforestasi dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju deforestasi Pemerintah Aceh telah melakukan operasi pemberantasan *Illegal logging* dan tertanganinya kasus *illegal logging*, operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Deforestasi juga berakibat berkurangnya habitat satwa. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa laju berkurangnya populasi satwa dilindungi atau satwa kunci di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 2011 – 2017 mencapai angka cukup tinggi. Setidaknya populasi gajah yang hilang mencapai 14 persen. sedangkan harimau mencapai 4 persen. dan orangutan sebesar 4 persen.

Berkurangnya satwa-satwa kunci tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya konflik dengan manusia secara terus menerus. Baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat bahwa konflik antara orangutan dengan manusia pada tahun 2017 adalah berjumlah 20 kasus atau lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 17 kasus. Konflik juga terjadi antara manusia dengan harimau. Pada tahun 2017 BKSDA menghimpun data konflik tersebut mencapai 10 kejadian. padahal pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kejadian.

Selain itu, masih tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat di Aceh, dengan jumlah kasus sebanyak 582 kasus dalam kurun waktu 2015-2022. Dari 582 kasus tersebut, sebanyak 46 ekor gajah mati. Tingginya konflik disebabkan maraknya kasus perambahan hutan, alih fungsi hutan dan praktik penebangan liar. Penyebab kematian gajah didominasi konflik gajah dengan masyarakat yakni 57%, sementara 10% akibat perburuan dan 33% mati secara alami.

**B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai 2017. Lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2017 seluas 23.876 ha atau 24.10 persen dari total luas hutan dan lahan kritis. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh tahun 2016 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.96.

**Tabel 2.96.**
**Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2022**

| Tahun | Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) | Luas total hutan dan lahan kritis (Ha) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2016 | 23.876 | 99.052.00 | 24.10 |
| 2017 | 23.876 | 99.052.00 | 24.10 |
| 2018 | 3,144 | 95,884.00 | 12.87 |
| 2019 | 12,520 | 94,949.00 | 15.89 |
| 2020 | 4,009 | 82,429.00 | 4,86 |
| 2021 | 2.456 | 56.753,26 | 4,32 |
| 2022 | 2.194 | 56.753 | 3,86 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2023*

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakterisitik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi.

**C. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB**

Sektor kehutanan dalam struktur PDRB termasuk ke dalam sektor pertanian yang terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan. sub sektor tanaman perkebunan. sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. sub sektor kehutanan dan subsektor perikanan. PDRB Aceh beberapa tahun terakhir didominasi oleh Sektor Pertanian dan mempunyai trend peningkatan yang menggembirakan. Kontribusi sub

sektor kehutanan terhadap PDRB berdasarkan ADHB tahun 2016 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.97.

**Tabel 2.97.**
**Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2016-2022 (dalam Miliar Rupiah)**

| Uraian | Tahun | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Kontribusi Sub Sektor Kehutanan | 1.923.080.000 | 1.535.841.275 | 16.481.769.326 | 18.716.089.216 | 4.631.207.936 | 4.678.000.000 | 3.678.000.000 |
| PDRB Dengan Migas | 136843.82 | 145806.92 | 155911.12 | 164210.64 | 164210.64 | 164210.64 | 164210.64 |
| PDRB Tanpa Migas | 132614 | 141076.46 | 150350.45 | 158555.41 | 158555.41 | 158555.41 | 158555.41 |
| Kontribusi Terhadap PDRB dengan Migas | 1.41 | 1.36 | 1.33 | 1.23 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Kontribusi Terhadap PDRB Tanpa Migas | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022*

Tabel 2.97. memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan mengalami penurunan dari tahun dari tahun 2019 senilai Rp. 18.716.089.216 menjadi Rp. 4.631.207.936 pada tahun 2022 senilai 3.678.000.000. selanjutnya Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2022 dengan migas sebesar 1.13 persen.

**D. Rasio Luas Kawasan Lindung**

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam. sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 865/MENHUT-II/2014 Tanggal

29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh Secara rinci luas kawasan lindung Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.98 berikut ini.

**Tabel 2.98.**
**Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2016-2022**

| Tahun | Luas kawasan lindung (ha) | Total luas kawasan hutan (ha) | Rasio |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.788.265.00 | 3.557.928.00 | 0.5 |
| 2017 | 1.794.350.00 | 3.563.813.00 | 0.5 |
| 2018 | 1,781,677.92 | 3,550,390.23 | 50.18 |
| 2019 | 1,781,677.92 | 3,550,390.23 | 50.18 |
| 2020<br>2021 | 2.840.042,32 | 3,550,390.23 | 79,99 |
| 2022 | 2.840.042,32 | 3,550,390.23 | 79,99 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2022*

**E. Penyelesaian Konflik Tenurial**

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan, dan penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, salah satu skema penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menindaklanjuti peraturan diatas Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada tahun 2017 dan berlanjut hingga tahun 2019 melalui SK Nomor 522.12/1351/2019. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebagai ketua Tim Inver.

Tujuan dari skema TORA didalam Kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat didalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa konflik dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK /SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdapat seluas 95.387 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota yang terdiri dari beberapa kriteria penguasaan lahan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.99.**
**Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2021**

| Kabupaten | Kawasan HPK tidak produktif | Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak | Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi | Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Barat | | | | 121 | 121 |
| Aceh Barat Daya | | 113 | | 0 | 113 |
| Aceh Besar | 1.276 | 7.524 | | 128 | 8.928 |
| Aceh Jaya | | 939 | | 479 | 1.418 |
| Aceh Selatan | | 522 | | 36 | 558 |
| Aceh Singkil | 2.704 | 10.070 | 2.446 | 36 | 15.256 |
| Aceh Tamiang | | 5.427 | 940 | 38 | 6.405 |
| Aceh Tengah | | 20.969 | | 93 | 21.062 |
| Aceh Tenggara | | 3.056 | | 55 | 3.111 |
| Aceh Timur | | 11.340 | 1.813 | 174 | 13.327 |
| Aceh Utara | | 186 | | 4 | 190 |
| Bener Meriah | | 2.641 | | 53 | 2.694 |
| Bireuen | | 370 | | | 370 |
| Gayo Lues | 654 | 1.285 | 544 | 508 | 2.991 |
| Kota Langsa | | 813 | | 2 | 815 |
| Kota Sabang | | 46 | | 22 | 68 |
| Kota Subulussalam | 2.460 | 940 | 3.644 | 8 | 7.052 |
| Nagan Raya | | 159 | 2.896 | | 3.055 |
| Pidie | | 3.135 | 3.672 | 182 | 6.989 |
| Simeulue | | 423 | | 441 | 864 |
| Grand Total | 7.094 | 69.958 | 15.955 | 2.380 | 95.387 |

Penanganan konflik tenurial melalui skema TORA yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan Gubernur untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 1.579,47 Ha diselesaikan melalui perubahan batas dan 319,18 Ha diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial, dan hingga tahun 2021 baru satu Kabupaten yang telah terbit SK dari Menteri LHK dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.100.**
**Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh**

| No | Kab/Kota | Surat Rekom Gubernur | Pertimbangan Tim Percepatan PPTKH (Ha) | | Persetujuan MenLHK (Ha) | | Keputusan MenLHK Atas Penataan Batas Perubahan Batas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perubahan Batas | Perhutanan Sosial | Perubahan Batas | Perhutanan Sosial | SK | Tanggal | Luas (Ha) |
| 1 | Aceh Tamiang | 522.12/4433 tanggal 19 Maret 2019 | 1.326,99 | 47,54 | 1.326,99 | 47,54 | SK.188/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/4/2020 | 13 April 2020 | 1.365,546 |
| 2 | Aceh Timur | 522.12/4434 tanggal 19 Maret 2019 | 139,03 | 178,06 | 139,03 | 178,06 | | | |
| 3 | Langsa | 522.12/4435 tanggal 19 Maret 2019 | 7,51 | 0.00 | 7,51 | 0.00 | | | |
| 4 | Aceh Utara | 522/1614 tanggal 30 Januari 2020 | 78,77 | 88,77 | 78,77 | 88,77 | | | |
| 5 | Sabang | 522.12/21064 tanggal 3 Desember 2019 | 27,17 | 4,81 | 27,17 | 4,81 | | | |

## F. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan program strategis pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian, penyuluh kehutanan berperan sebagai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaaan hutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, terdapat 55 izin yang sudah dikeluarkan oleh kementerian LHK, 10 izin telah didampingi oleh penyuluh, dan 25 izin didampingi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan 15 izin lagi belum dapat didampingi dikarenakan keterbatasan tenaga penyuluh. Untuk hal tersebut, DLHK Aceh akan bermitra dengan PKSM dalam rangka

memfasilitasi kelompok binaannya. Selain itu, Penyuluh kehutanan juga berfungsi sebagai pendamping dalam penyusunan Rencana Kegiatan Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

**Tabel 2.101.**
**Capaian Izin Perhutanan Sosia Aceh Tahun 2017 - 2022**

| No. | Tahun | Jumlah Izin | Luasan (Ha) | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 28 | 38.065 | 8.833 |
| 2 | 2018 | 22 | 72.717 | 5.535 |
| 3 | 2019 | 3 | 2.281 | 234 |
| 4 | 2021 | 11 | 14.659 | 1.400 |
| 5 | 2022 | 21 | 42.693,13 | 2.033 |
| **Jumlah** | | **85** | **170.415,13** | **18.035** |

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan menuju kelestarian hutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan bahwa capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Februari 2023 sebanyak 21 izin dengan luasan 42.693,13 Ha yang terbagi dalam Hutan Desa (HD) 4 izin dengan luas 5.697 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 11 izin dengan luas 16.960,9 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 6 izin dengan luas 18.596 Ha. Provinsi Aceh memiliki potensi perluasan dan capaian Perhutanan Sosial pada skema Hutan Adat, berdasarkan data dari Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diakses pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa ada sekitar 112.610,98 Ha luasan indikatif Hutan Adat di Provinsi Aceh.

#### 2.1.3.3.6. Energi dan Sumber Daya Mineral

**A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN**

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem *isolated* dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah *isolated*. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV

meliputi pantai Timur Provinsi Aceh serta serta Meulaboh dan sekitarnya sedangkan wilayah pantai barat lainnya dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak tertinggi Aceh tahun 2020 sebesar 525 MW terjadi di bulan Maret. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.61, di bawah ini :

*Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028*

**Gambar 2.61. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh**

Pada sistem *isolated* 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa *genset* untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem *Isolated* di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya.

Pada tahun 2020 jumlah Pelanggaran Listrik sebanyak 1.556.984 pelanggan meningkat sebanyak 63.616 dibanding tahun 2019 atau terjadi peningkatan sebesar 4,3% (persen). Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar 1.807 MVA, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.692 MVA yang berarti terjadi peningkatan sebesar 6,8% (persen). Jumlah daya mampu peembangkit tahun 2020 sebesar 641,7 MW, bertambah 55 MW dari sebanyak 586,7 MW unit pada tahun 2019.

Jumlah kWH yang dibangkitkan pada tahun 2020 sebesar 3.351 TWh, sedangkan pada tahun 2019, jumlah kWh 3.161 TWh, atau meningkat sebesar 190 TWh (6%) TWh. Untuk jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100% (persen) sejak tahun 2019.

Jumlah kWh terjual juga mengalami kenaikan sebesar 195 TWh (7%) persen yaitu dari 2.781 TWh tahun 2019 naik menjadi 2.976 TWh pada tahun 2020. Begitupun Volt Ampere tersambung yang naik sebesar 6,8% (persen), yaitu pada tahun 2019 adalah 1.692 MVA, pada tahun 2020 menjadi 1.807 MVA. Untuk melihat jumlah pelanggan dan persentase listrik pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.102, seperti di bawah ini :

**Tabel 2.102.**
**Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2020**

| No. | Kelompok Pelanggan | Jumlah Pelanggan | Persentase ( % ) |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumah Tangga | 1.354.112 | 87,0 |
| 2. | Sosial | 48.577 | 3.1 |
| 3. | Bisnis | 135.764 | 8,7 |
| 4. | Industri | 3.582 | 0.2 |
| 5. | Pemerintah | 14.645 | 0.9 |
| **Total** | | **1.556.680** | **100** |

*Sumber : ESDM*

Kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 2.103 dan 2.104**.**

**Tabel 2.103.**
**Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting**

| Pembangkit | Sistem Tenaga Listrik | Jumlah Unit | Total Kapasitas (MW) | Daya Mampu Netto (MW) | DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLN** | | | | | |
| PLTU | Sumbagut | 2,0 | 220,0 | 180,0 | 180,0 |
| PLTMG | Sumbagut | 19,0 | 184,9 | 179,9 | 179,9 |
| PLTMH | Sumbagut | 4,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| PLTD | Sumbagut | 199,0 | 187,7 | 121,1 | 121,1 |
| | Sinabang | 18,0 | 13,8 | 9,1 | 9,1 |
| | Sabang | 15,0 | 12,9 | 8,7 | 8,7 |
| **Jumlah PLN** | | **257,0** | **621,7** | **500,8** | **500,8** |

| Pembangkit | Sistem Tenaga Listrik | Jumlah Unit | Total Kapasitas (MW) | Daya Mampu Netto (MW) | DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| **IPP** | | | | | |
| PLTMG | Sumbagut | 1,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| PLTMH | Sumbagut | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **Jumlah IPP** | | **7,0** | **25,5** | **25,5** | **25,5** |
| **SEWA** | | | | | |
| PLTD | Sumbagut | 6,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| **Jumlah SEWA** | | **6,0** | **33,0** | **33,0** | **33,0** |
| **Jumlah** | | **270,0** | **680,0** | **559,3** | **559,3** |

*Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028*

**Tabel 2.104.**
**Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)**

| No. | Nama GI | Tegangan (kV) | Jumlah Trafo (Unit) | Total Kapasitas (MVA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Dua / Langsa | 150/20 | 2 | 60 |
| 2 | Tualang Cut | 150/20 | 3 | 60 |
| 3 | Alue Batee / Idi | 150/20 | 2 | 50 |
| 4 | Lhokseumawe | 150/20 | 2 | 120 |
| 5 | Bireuen | 150/20 | 2 | 120 |
| 6 | Sigli | 150/20 | 2 | 90 |
| 7 | Banda Aceh I / Lambaroe | 150/20 | 3 | 180 |
| 8 | Jantho | 150/20 | 1 | 30 |
| 9 | Pantonlabu | 150/20 | 1 | 30 |
| 10 | PLTU Nagan Raya | 150/20 | 1 | 30 |
| 11 | Arun | 150/20 | 1 | 30 |
| 12 | Meulaboh | 150/20 | 2 | 90 |
| 13 | Blang Pidie | 150/20 | 1 | 30 |
| 14 | Kutacane | 150/20 | 1 | 30 |
| **TOTAL** | | | **24** | **950** |

*Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028*

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air. panas bumi. minyak bumi. gas dan batubara. Diperkiran potensi sumber tenaga air mencapai 1.655 MW yang tersebar di 18 lokasi di wilayah Aceh. Potensi panas bumi yamg dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 1.307 MW yang tersebar di 19 lokasi. Adapun potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 151 MMSTB dan 6.93 TSCF. Sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh sebesar 452 juta ton kubik.

Terdapat juga potensi pembangkit listrik tenaga Gas Weehead dengan kapasitas sekitar 140 MW. Potensi ini dapat dikembangkan apabila telah diselesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan sistem yang telah diverifikasi oleh PLN. mempunyai kemampuan pendanaan. dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada Tabel 2.105.

**Tabel 2.105.**
**Rencana Pembangunan Pembangkit**

| No. | Sistem Tenaga Listrik | Jenis | Lokasi/Nama Pembangkit | Kapasitas (MW) | Target COD | Status | Pengembangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera | PLTGU | MPP Banda Aceh | 55 | 2021 | Pengadaan | PLN |
| 2 | Sumatera | PLTA | Peusangan 1-2 | 45 | 2021 | Konstruksi | PLN |
| 3 | Sumatera | PLTU | Meulaboh (Nagan Raya) #3,4 | 200 | 2021 | Konstruksi | IPP |
| 4 | Sinabang | PLTBio | Sinabang (Kuota) Tersebar | 3 | 2021 | Perencanaan | IPP |
| 5 | Sumatera | PLTS | Surya Sumatera (Kuota) Tersebar* | 3,7 | 2021 | Perencanaan | IPP |
| 6 | Sumatera | PLTG | MPP Banda Aceh 2 | 110 | 2022 | Pengadaan | PLN |
| 7 | Sumatera | PLTU | Meulaboh (Nagan Raya) #3,4 | 200 | 2022 | Konstruksi | IPP |
| 8 | Sumatera | PLTS | Surya Sumatera (Kuota) Tersebar* | 48,0 | 2022 | Perencanaan | IPP |

| No. | Sistem Tenaga Listrik | Jenis | Lokasi/Nama Pembangkit | Kapasitas (MW) | Target COD | Status | Pengembangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sumatera | PLT Bio | PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar* | 50,0 | 2022 | Perencanaan | IPP |
| 10 | Sumatera | PLTGU | Sumbagut Wellhead (Kuoata)** | 200 | 2022 | Perencanaan | IPP |
| 11 | Sabang | PLTP | Jaboi (FTP2) | 5 | 2023 | Kontruksi | IPP |
| 12 | Sumatera | PLTA | Kumbih-3 | 45 | 2024 | Commited | PLN |
| 13 | Sinabang | PLTBio | Sinabang (Kuota) tersebar | 2 | 2024 | Perencanaan | IPP |
| 14 | Sumatera | PLTM | Minihidro Sumatera (kuota) tersebar* | 129,6 | 2024 | Perencanaan | IPP |
| 15 | Sumatera | PLTP | Panas Bumi Sumatera (Kuota) Tersebar | 195,0 | 2024 | Perencanaan | IPP |
| 16 | Sumatera | PLT Bio | PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar* | 87,6 | 2024 | Perencanaan | IPP |
| 17 | Sumatera | PLTGU | Sumbagut Wellhead (kuota)** | 300 | 2024 | Perencanaan | IPP |
| 18 | Sumatera | PLTA | Hidro Sumatera (kuota) tersebar* | 720,0 | 2025 | Perencanaan | IPP |
| 19 | Sumatera | PLTP | Panas Bumi Sumatera (kuota) tersebar* | 235,0 | 2025 | Perencanaan | IPP |
| 20 | Sumatera | PLTA | Hidro Sumatera (kuota) tersebar* | 129,0 | 2026 | Perencanaan | IPP |

| No. | Sistem Tenaga Listrik | Jenis | Lokasi/Nama Pembangkit | Kapasitas (MW) | Target COD | Status | Pengembangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sumatera | PLTM | Minihidro Sumatera (kuota) tersebut* | 20,0 | 2026 | Perencanaan | IPP |
| 22 | Sumatera | PLT Bio | PLT Bio Sumatera (kuota) tersebar* | 5,0 | 2026 | Perencanaan | IPP |
| 23 | Sinabang | PLTS | Sinabang (kuota) tersebar | 2,0 | 2027 | Perencanaan | IPP |
| 24 | Sumatera | PLTA | Hidro Sumatera (kuota) tersebar* | 62,0 | 2027 | Perencanaan | IPP |
| 25 | Sumatera | PLTM | Minihidro Sumatera (kuota) tersebar* | 20,0 | 2027 | Perencanaan | IPP |
| 26 | Sabang | PLTS | Sabang (Storage Sistem) | 2,0 | 2028 | Perencanaan | PLN |
| 27 | Sumatera | PLTM | Minihidro Sumatera (kuota) tersebar* | 10,0 | 2028 | Perencanaan | IPP |
| 28 | Sumatera | PLTGU | Sumbagut Wellhead (kuota)** | 300 | 2028 | Perencaaan | IPP |
| Total | | | | 3.183,9 | | | |

*Sumber: PLN Aceh. 2021*

Ket.

* *Kuota Sistem Sumatera*

** *Kuota dapat dikembangkan di Subsistem Sumbagut (Provinsi Aceh dan atau Sumut)*

**B. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan**

Berdasarkan Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh Tahun 2020 adalah 1.556.984 pelanggan dengan persentase daya tersambung per sektor pelanggan paling besar adalah kelompok rumah tangga dengan persentase 86 .9,7persen dengan

jumlah pelanggan 1.354.12 Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.23 persen dengan jumlah pelanggan 3.582 pelanggan (Gambar 2.62 dan Tabel 2.106).

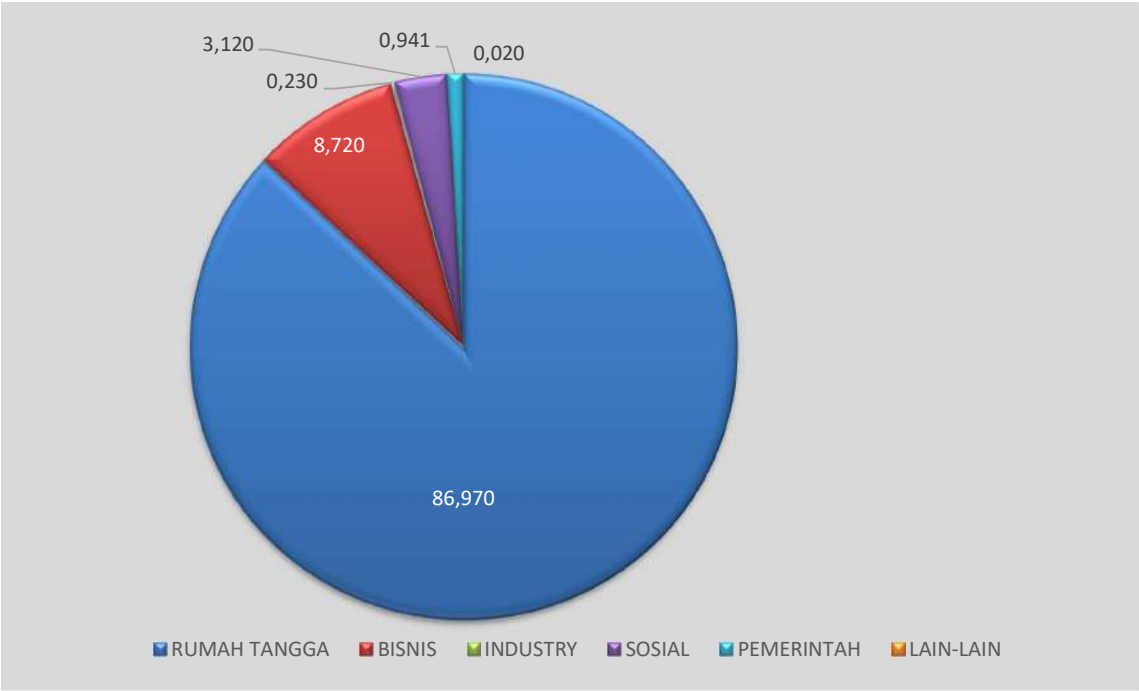


*Sumber : Overview PLN Aceh 2020*

**Gambar 2.62. Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2020**

**Tabel 2.106.**
**Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2020**

| Kelompok Pelanggan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Rumah Tangga | 1.354.112 | 86,970 |
| Sosial | 48.577 | 3,120 |
| Bisnis | 135.764 | 8,720 |
| Industri | 3.582 | 0,230 |
| GD. Kantor Pemerintah | 14.645 | 0,230 |
| Lain-lain | 304 | 0,020 |
| Jumlah | **1.556.984** | **100,00** |

*Sumber : Overview PLN Aceh 2021*

## C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2014 masih menunjukkan besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas).

Kontribusi subsektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh pada Tahun 2015 secara agregat mencapai 0.14 persen, semakin meningkat di tahun 2016 mencapai 0.15 persen hingga 0.16 pada 2019 tahun 2020 sebesar 0,17 persen. Pada tahun 2021 capaiannya menurun menjadi 0,16 persen. Kontribusi terhadap Struktur PDRB Aceh sub sektor listrik dan gas pada Gambar 2.63. berikut.

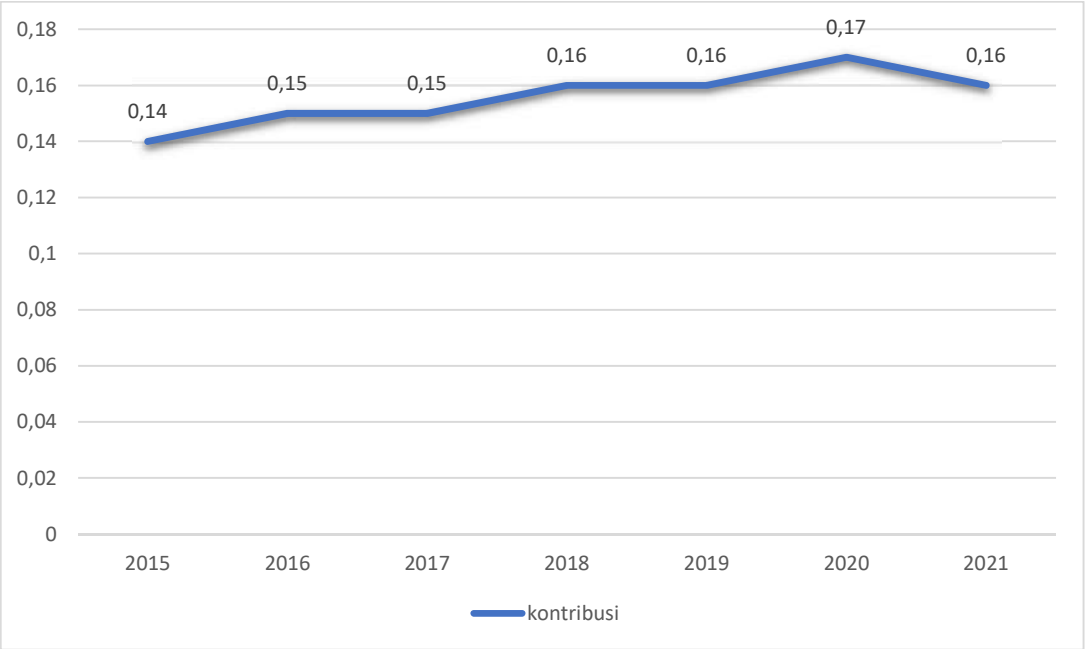


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021*

**Gambar 2.63. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2021**

**D. Pertambangan tanpa ijin**

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang illegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI). tidak membayar pajak dan royalti. terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat. masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun 2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh selatan yang notabenenya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten. secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jenis komoditas penambangan tanpa izin yang marak dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Aceh adalah penambangan tanpa izin komoditas emas. baik emas primer yang terdapat diwilayah perbukitan/pegunungan maupun emas placer yang banyak terdapat di bantaran sungai-sungai. Secara rinci komoditas emas yang diambil pada kegiatan PETI di Aceh adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Kecamatan Geumpang | : | komoditas emas (primer); |
| Lokasi Kecamatan Tangse | : | komoditas emas (primer); |
| Lokasi Gunung Ujeun | : | komoditas emas (primer); |
| Lokasi Kecamatan Manggamat | : | komoditas emas (primer); |
| Lokasi Kecamatan Sawang | : | komoditas emas (primer); |
| Lokasi Tutut Kec. Sungai Mas | : | komoditas emas (placer); |
| Lokasi Panton Reu | : | komoditas emas (placer); |
| Lokasi Kr. Kila dan Kr. Cut | : | komoditas emas (placer); |

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan illegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi. penyuluhan dan pembinaan. pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan illegal tersebut.

Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah di lakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (telah adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya). namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik. perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Diperlukan peningkatan pengelolaan usaha pertambangan. untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini. agar PETI didorong menjadi Izin Prtambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi a

Aspek legal. sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

## E. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Dalam beberapa tahun terakhir ada penambahan kegiatan pertambangan dan penggalian di Aceh, yaitu penggalian batubara. Kegiatan eksplorasi batubara di Aceh telah dimulai sejak tahun 2008 dan kegiatan produksi telah dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan eksplorasi ini banyak yang berakhir di tahun 2015 yang berpengaruh pada menurunnya nilai tambah pada tahun 2016 karena biaya eksplorasi merupakan bagian dari nilai tambah dalam PDRB. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2016 sebesar 4.67 persen mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4.64 persen, namun di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4.99 persen. Tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4.46 persen. Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 2.16 perser, dan sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 1.46 persen.

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)*

**Gambar 2.64. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017-2021 (persen)**

Namun demikian, selama setahun terakhir peranan dari pertambangan dan penggalian bergerak mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT.Perta Arun Gas yang sudah mulai berproduksi sejak tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada nilai peranan minyak, gas dan panas bumi memiliki peranan yang paling besar, yaitu 8.55 persen, selanjutnya peranan yang paling kecil dimiliki oleh sub sektor pertambangan biji logam sebesar 0.49 persen di tahun 2020.

Subkategori Pertambangan bijih logam mulai mengalami penurunan sejak tahun 2015 karena sudah diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batu bara (Minerba) tahun 2014 yang melarang ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah. Dibandingkan tahun 2015, penurunan pada tahun 2018 sudah tidak terlalu dalam, yaitu 2,33 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang turun sebesar 28,03 persen. Pertambangan bijih dan logam hanya tumbuh sebesar 0,49 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun sebelumya mengalami penurunan sebesar 14, 99 persen dan sub sektor yang terakhir yang  mengalami kenaikan pada pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 4,22 persen pada tahun 2020 setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas penggalian pasir secara ilegal sehubungan dengan naiknya permintaan bahan bangunan meskipun izin belum dicabut.

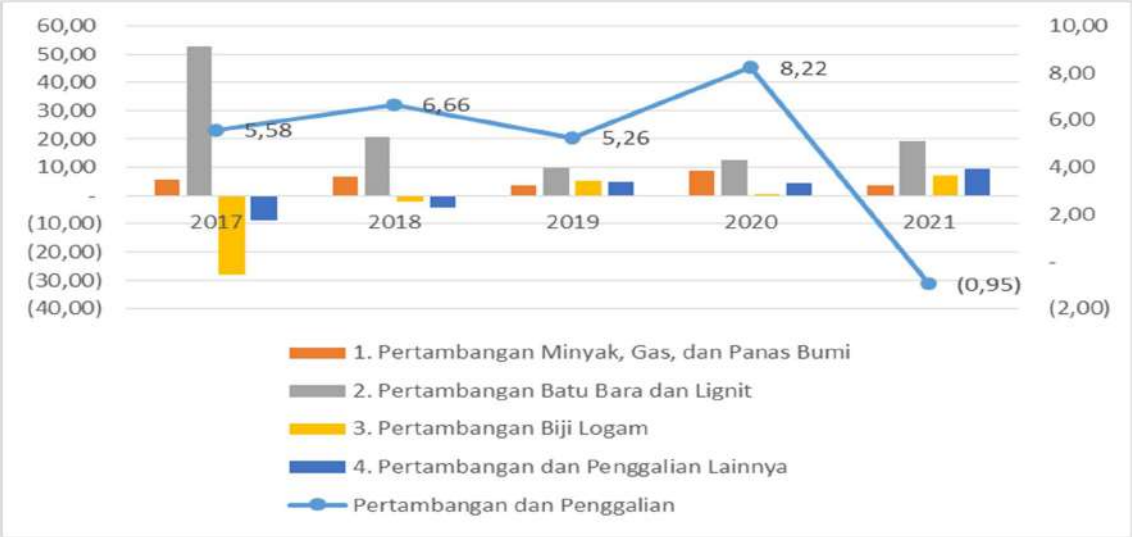


**Gambar 2.65. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017 – 2021 (persen)**

Pada tahun 2020, semua subkategori mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,94 persen. Ditinjau dari perkembangannya, pertambangan minyak dan gas bumi mulai tumbuh positif pada tahun 2020 sebesar 7,88  persen dimana tahun 2019 mengalami

penurunan sebesar 3,39 persen sedangkan Laju pertumbuhan pertambangan batubara dan lignit mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2017, namun kembali melambat pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari 52,7 persen menjadi 20,61 persen dan 9,83 persen. Hal ini disebabkan oleh produksi batubara oleh PT. Mifa pada tahun 2018 dan 2019 tidak lebih besar dibandingkan pada tahun 2017, karena harga sedikit menurun. pada pertambangan Batu bara dan Lignit pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,22 persen.

#### 2.1.3.3.7. Perdagangan

Berdasarkan Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

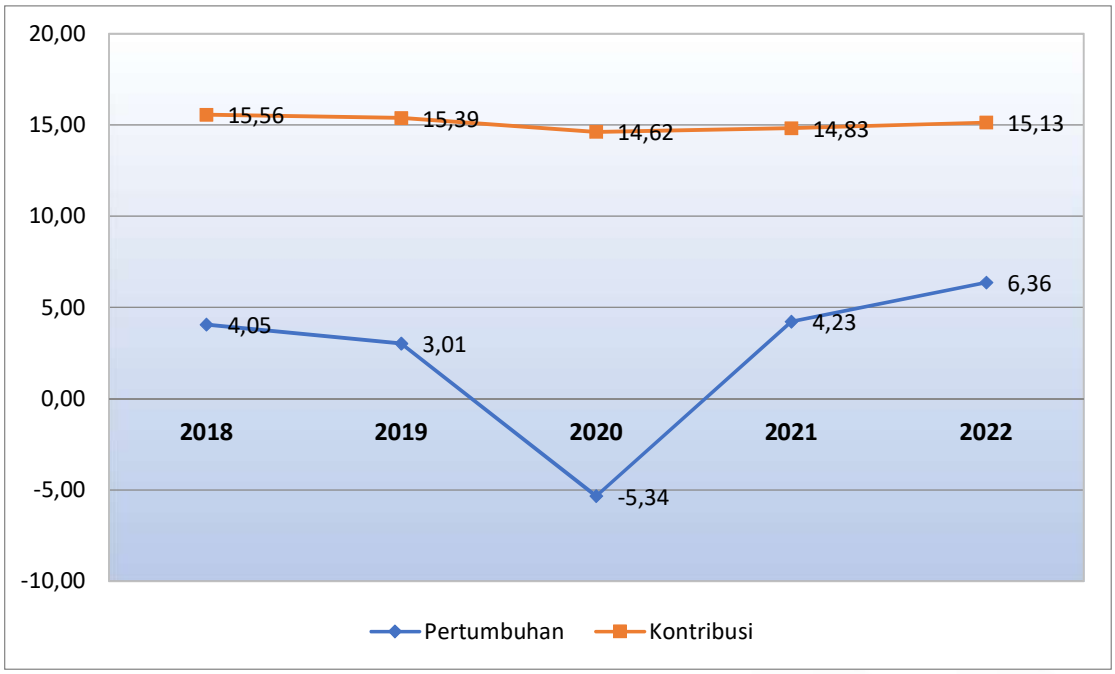


*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2023 (diolah)*

**Gambar 2.66. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018-2022**

Gambar 2.66 menjelaskan bahwa besaran nilai kontribusi dan laju pertumbuhan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sub urusan perdagangan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, dan standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan merupakan sektor atau lapangan usaha yang di dalamnya meliputi kegiatan ekonomi perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang yang memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan restoran merupakan salah satu sektor peyumbang PDRB Aceh terbesar. Pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terus berfluktuatif. Pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan Aceh sebesar 15.56 persen mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 14.62 persen dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 15.13 persen. Sedangkan tingkat pertumbuhan sebesar 4.05 persen pada tahun 2018 juga mengalami kontraksi hingga minus 5,34 persen pada tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2021 Aceh mulai mengalami peningkatan kembali hingga pada tahun 2022 nilai pertumbuhan mencapai 6,36 persen, sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi pasca covid-19. Kontribusi sektor perdagangan di Aceh terhadap PDRB relatif besar, yaitu 15,13 persen, yang merupakan share kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian.

**Tabel 2.107.**
**Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2018-2022**

| Tahun | Ekspor | | | Impor | | | Neraca (USD) | Neraca (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Volume (Kg) | Nilai (USD) | Pertumbuhan (%) | Volume (Kg) | Nilai (USD) | Pertumbuhan (%) | | |
| 2018 | 5.121.043.757 | 250.735.059 | 161,71 | 97.582.007 | 29.690.002 | (24,48) | 221.045.057 | 296,76 |
| 2019 | 7.110.631.807 | 317.684.911 | 26,70 | 97.374.479 | 131.223.716 | 341,98 | 186.461.195 | (15,65) |
| 2020 | 8.118.173.063 | 300.417.274 | (5,44) | 109.695.439 | 25.776.718 | (80,36) | 274.640.556 | 47,29 |
| 2021 | 9.612.621.521 | 402.255.605 | 33,90 | 72.354.768 | 119.048.309 | 361,84 | 283.207.296 | 3,12 |
| 2022 | 8.847.155.976 | 585.724.963 | 45,61 | 100.488.291 | 113.741.989 | (4,46) | 471.982.974 | 22,94 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2023*

Perkembangan ekspor Provinsi Aceh dari kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Neraca perdagangan Aceh pada tahun 2018 sebesar 221.045.057USD yang merupakan nilai ekspor terendah sebesar 250.735.059USD. Sedangkan nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 585.724.963USD dimana komoditas eskpor Aceh adalah bahan bakar mineral.

Negara tujuan utama ekspor Provinsi Aceh adalah Jepang, Thailand, India,Vietnam,United States, Canada dan Jerman. Ekspor komoditi asal Provinsi Aceh yang di ekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh terdiri dari komoditi ikan dan udang, buah-buahan, kopi, teh, rempah-rempah, minyak atsiri, kosmetik, wangi-wangian, dan berbagai produk kimia.

Sedangkan Nilai Impor Aceh dari kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi. Nilai impor tertinggi pada tahun 2019 mencapai 131.223.715 USD dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 25.776.341 USD. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 341,98 persen jika dibandingkakan tahun 2018 sebesar -24,48 persen sepanjang tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan nilai Impor pada tahun 2021 sebesar 119.408.309 USD atau meningkat sebesar 361,84 persen.

Nilai impor terbesar berupa mesin atau mesin/pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, kendaran dan bagiannya senilai 64.609.090 USD. Impor non migas Provinsi Aceh berasal dari negara Tiongkok, Singapura dan Thailand. Provinsi Aceh hanya melakukan impor komoditas non migas yaitu melalui pelabuhan Krueng Raya Malahayati, Calang, Kuala Langsa dan Lhokseumawe.

#### 2.1.3.3.8. Perindustrian

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

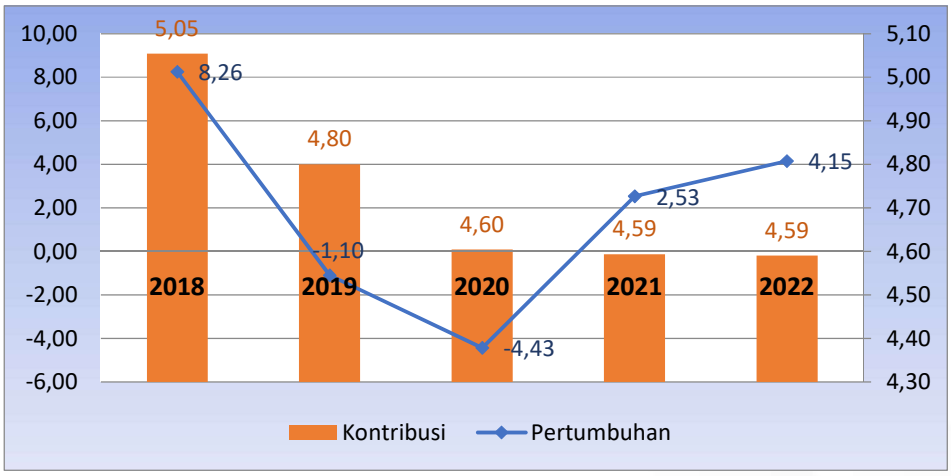


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023*

**Gambar 2.67. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2018-2022**

Kontribusi dan pertumbuhan sektor industri dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Gambar 2.53 menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri kecil dan menengah adalah pembinaan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara menciptakan hubungan kemitraan dengan pengusaha. Permasalahan pada sektor perindutrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Aceh, yaitu menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Perkembangan sektor industri pengolahan di Aceh selama lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh yang dihasilkan saat ini. Pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 8.26 persen dengan kontribusi sektor ini juga tumbuh menjadi 5.05 persen dari keseluruhan PDRB Aceh. Namun pada tahun 2019 laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan dan berlanjut di tahun 2020 hingga minus 4,43 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 4,60 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan sektor industri mulai mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,53 persen diikuti sebesar 4,15 persen pada tahun 2022 dengan share kont[1]ribusi sebesar 4,59 persen.

Sedangkan untuk perkembangan jumlah dan nilai IKM terdapat pada tabel 2.108 bsebagai berikut ini:

**Tabel 2.108.**
**Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh Tahun 2017-2021**

| No | Tahun | JUMLAH | | Nilai (Rp. 000) | | BB/BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IKM (Unit) | T.Kerja (Org) | Investasi | Produksi | |
| 1. | 2017 | 29.433 | 93.021 | 1.953.591.710 | 10.617.821.720 | 8.091.411.409 |
| 2. | 2018 | 32.156 | 98.778 | 4.440.271.128 | 19.970.690.510 | 16.945.097.289 |
| 3. | 2019 | 38.827 | 108.225 | 1.284.418.039 | 10.751.674.843 | 7.899.307.767 |
| 4. | 2020 | 41.672 | 111.216 | 4.316.270.654 | 17.992.842.392 | 7.900.555.231 |
| 5. | 2021 | 46.286 | 126.378 | 1.649.196.388 | 11.757.557.251 | 8.431.718.749 |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2022*

Perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2017 sebesar 29.433 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 93.021 orang, dengan nilai investasi sebesar 1.953.591.710 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah IKM sebesar 46.286 unit dan tenaga kerja sebanyak 126.378 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai investasi tahun 2021 sebesar 1.649.196.388 rupiah.

#### 2.1.3.3.9. Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah .Sub sektor perikanan dalam sektor pertanian saat ini masih merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Provinsi Aceh, dan salah satu sektor yang memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Besarnya peranan sektor tersebut tergambar dari nilainya yang mencapai 5.71 triliun dari total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh sebesar 166,38 triliun atau US$ 11,41 milyar di tahun 2020. Pencapaian nilai sub sektor tersebut terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Besarnya nilai sub sektor perikanan tersebut terdapat pada Gambar 2.68 berikut.

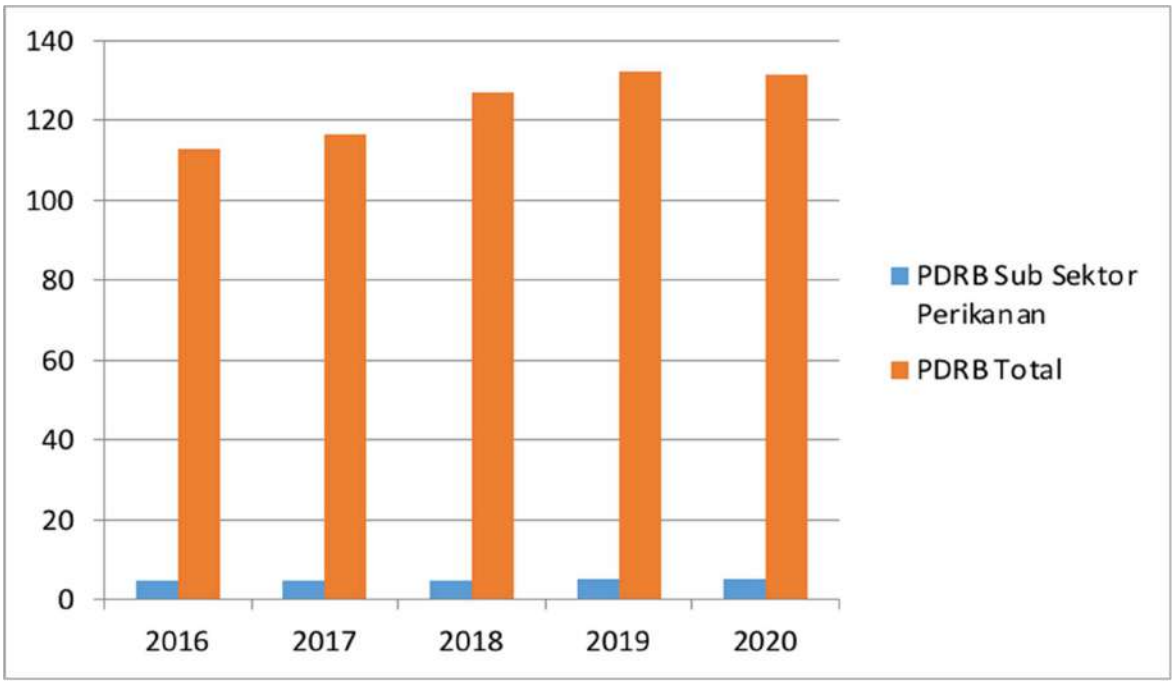


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020*

**Gambar 2.68. Perkembangan Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2016-2020 (Triliun)**

Pembangunan perikanan dan kelautan merupakan upaya pemberian berbagai alternative pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat. Besarnya untuk kontribusi sub sektor perikanan tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang dicapai dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Besarnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 184.190,40 ton meningkat menjadi 211.266,13 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi budidaya sebesar 82.692,0G0 ton di tahun 2016 meningkat menjadi 108.382,33 ton di tahun 2020.

Besarnya produksi perikanan tangkap dan budidaya dari tahun 2016 hingga 2020 terdapat pada Gambar 2.69 berikut.

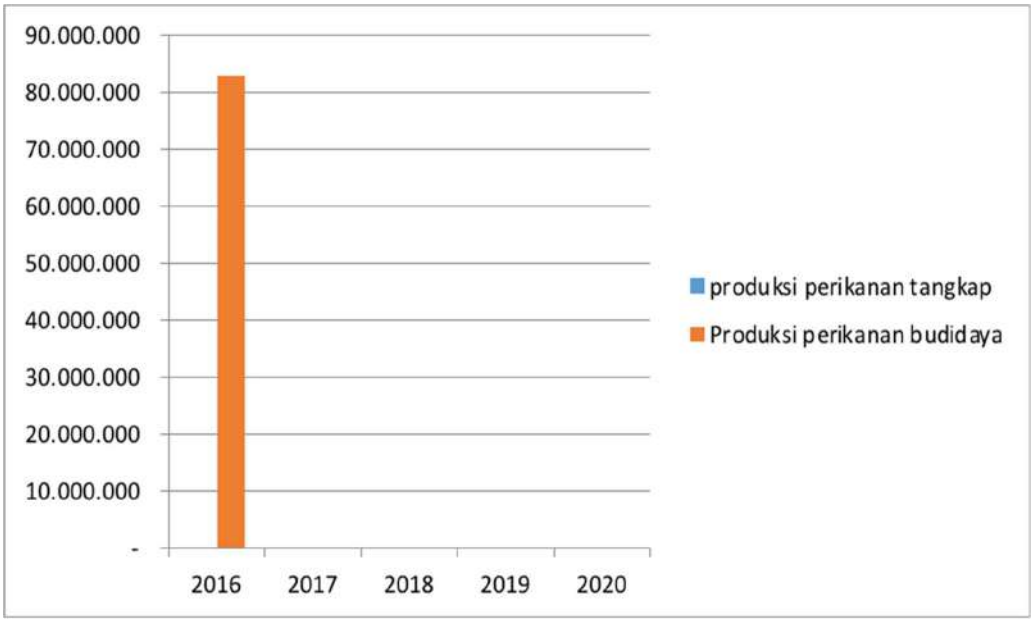


*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2020*

**Gambar 2.69. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Aceh Tahun 2016-2020**

Bila dilihat dari komposisinya perikanan tangkap memiliki produksi dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produksi budidaya. Kondisi tersebut juga dapat diasumsikan bahwa potensi perikanan tangkap Aceh cukup potensial untuk dikembangkan. Sementara produksi budidaya belum sepenuhnya mampu dioptimalkan. Namun secara umum produksi keduanya menunjukkan perkembangan yang cukup positif bagi pembangunan sektor perikanan Aceh.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yakni dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan. Adapun sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh. Kawasan budidaya di pesisir timur banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng. ikan nila. dan udang. Di wilayah pesisir timur ini terdiri dari Kemukiman Glee Bruek. Jambo Aye. Jangka. Julok Cut. Lampanah Leungah. Lancok. Seunebok Antara. Muara Satu. dan Musa. Sedangkan wilayah pesisir barat selatan terdiri dari Kemukinan Pasie. Krueng Batee. dan Indra Damai dengan komoditas ikan nila. Pengembangan kawasan berbasis mukim tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.69 berikut.

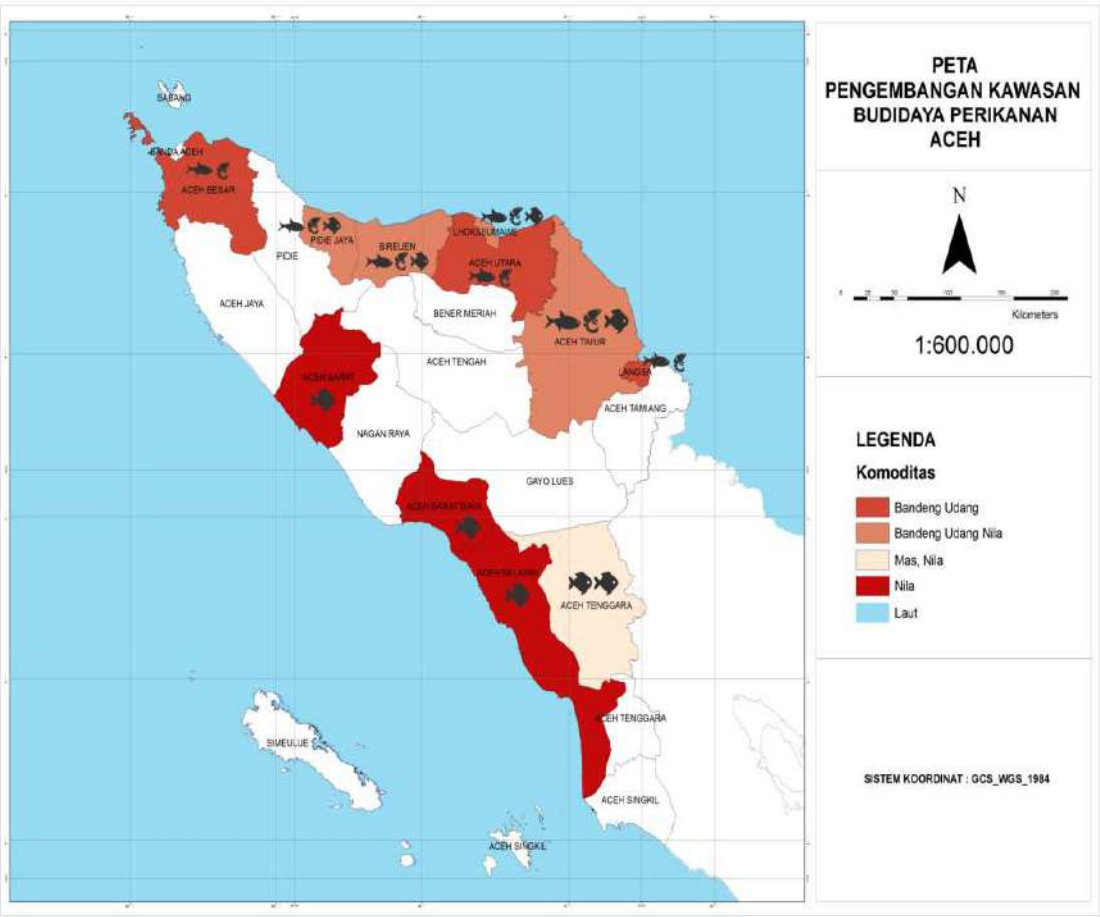


*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)*

**Gambar 2.70. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim**

Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 45,88 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 58,97 Kg/Kapita/tahun di tahun 2019. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun.

Dampak dari pencapaian produksi ekspor perikanan tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan dari kelompok pengolahan maupun kelompok nelayan tangkap dan budidaya. Saat ini cakupan kelompok nelayan tangkap Aceh sebanyak 20 kelompok pada tahun 2020. jumlah tersebut sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Jumlah kelompok nelayan tangkap terbanyak terdapat pada tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah berturut-turut 73 dan 70 kelompok. sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat kelompok yang dibina. Pada sektor budidaya. pembinaan kelompok budidaya terbanyak terdapat pada tahun 2019 sebanyak 60 kelompok sementara jumlah terkecil di tahun 2017 sebanyak 15 kelompok. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tangkap dan budidaya di Aceh terdapat pada Tabel 2.109.

**Tabel 2.109.**
**Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020**

| Cakupan Bina Kelompok | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kelompok Tangkap | 73 | 70 | 0 | 50 | 20 |
| Kelompok Budidaya | 20 | 15 | 20 | 60 | 20 |
| Kelompok Pengolah Ikan | 13 | 15 | 13 | 20 | 10 |

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2020*

Keberhasilan pembinaan kelompok perikanan juga akan berimplikasi bagi upaya konservasi yang terus dicanangkan oleh Pemerintah Aceh. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok bukan hanya berfungsi untuk menangkap ikan semata. namun juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya ikan yang tersedia. Upaya konservasi yang terus dilakukan memberikan hasil yang cukup baik. ini terlihat dari perkembangan luas kawasan konservasi perairan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 luas kawasan konservasi sebesar 71.856,66 Ha. luas tersebut meningkat menjadi 161.772.35 Ha pada tahun 2020. Berdasarkan target di akhir tahun RPJMA luas kawasan konservasi perairan dapat meningkat hingga menjadi 281.100 Ha di tahun 2022.

Selain indikator luas kawasan konservasi. keberlanjutan sumberdaya perikanan juga tergambar dari besarnya proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Saat ini nilai proporsi tangkapan tersebut sudah mencapai 76.70 persen pada tahun 2019. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2015 sebesar 63.46 persen atau meningkat dengan rata-rata 9 Ha per tahunnya. Meskipun hampir mencapai 100 persen. namun proporsi tangkapan tersebut masih kategori aman untuk ditangkap karena belum melewati ambang batas penangkapan atau lebih dikenal dengan *over fishing.*

### 2.1.3.3.10. Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Aceh diprioritaskan khusus untuk masyarakat Aceh atau lebih dikenal dengan transmigrasi lokal dengan harapan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimbangan antar wilayah di Aceh. Kehadiran transmigrasi lokal ini dapat membuka akses yang cukup besar terhadap kawasan yang berada di sekitarnya. Saat ini, aksesibilitas tersebut masih menjadi kendala utama dari kemajuan sebuah kawasan transmigrasi di Aceh. Prasarana dan sarana berupa jalan dan beberapa infrastruktur dasar lainnnya seperti air bersih. jaringan listrik masih minim sehingga pengembangannya pun menjadi terhambat. Tahun 2018 pembangunan rumah transmigrasi dilakukan pada 3 (tiga) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue.

Rumah yang dibangun pada UPT tersebut masing-masing 20 (dua puluh) unit pada setiap UPT. Disamping itu, untuk meningkatkan SDM anak-anak transmigran dilakukan pembangunan rumah sekolah sebanyak 1 unit di UPT Ujong Lamie, dengan harapan mempermudah akses bagi anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Untuk kebutuhan air bersih pemerintah juga membangun 10 unit saluran air bersih pada 10 UPT serta penyediaan perpipaan untuk masyarakat transmigran.

Berdasarkan jumlah penempatan, transmigran yang ditempatkan tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun 2017 jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 115 kepala keluarga (KK), sedangkan tahun 2018 penempatan transmigran sebanyak sebanyak 60 kepala keluarga. Adapun lokasi penempatan yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue. Perkembangan transmigrasi lokal di Aceh juga masih harus mendapat perhatian besar dari segi pengembangan sumberdaya manusianya. Sehingga dengan pembekalan yang baik dapat meningkatkan pendapatan transmigran lokal dan terkoneksinya antar wilayah dalam kawasan transmigrasi. Selain pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Aceh juga akan menetapkan status salah satu kawasan transmigrasi di Aceh menjadi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

### 2.1.3.4. Penunjang Urusan

#### 2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh. badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; sarana dan prasarana dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah

**A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJP Aceh 2012 – 2032 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh priode tahun 2012 sampai tahun 2032 yang diundangkan pada tanggal 19 November 2012. Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah "ACEH YANG ISLAMI. MAJU. DAMAI DAN SEJEAHTERA" yang akan dicapai visi tersebut melalui misi – misi sebagai berikut; Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai – nilai Islami; Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi. sosial dan spiritual; Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum; Mewujudkan Aceh yang aman. damai. dan bersatu; mewujudkan pembangunan yang berkualitas. maju. adil dan merata; Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk merelisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi daan Misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJP Aceh 2012 – 2032 sudah ditetapkan tahapan – tahapan pembangunan lima tahunan yang merupakan fokus pembangunan atau arah kebijakan yang menitik beratkan pencapaian Visi dan Misi Aceh sampai tahun 2032 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

**B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan**

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJM Aceh priode 2017-2022 saat ini masih berbentuk Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh priode tahun 2017 sampai tahun 2022 yang mana nantinya akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Aceh untuk periode 2017-2022 adalah "TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH. ADIL DAN MELAYANI.

**C. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Aceh (RKPA) disusun berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJM Aceh pada Bab VI Arah kebijakan yang mempunyai fokus pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan RKPA ini SKPA akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBA setiap tahunnya.

**2.1.3.4.2. Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke lima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.110.**
**Predikat WTP Kabupaten Kota 2022**

| No. | Kabupaten/Kota | WTP Dari BPK RI | No. | Kabupaten/Kota | WTP Dari BPK RI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Banda Aceh | 13 Kali | 13 | Pemerintah Aceh | 6 Kali |
| 2 | Aceh Besar | 9 Kali | 14 | Aceh Barat Daya | 6 Kali |
| 3 | Kota Sabang | 9 Kali | 15 | Aceh Selatan | 6 Kali |
| 4 | Kota Lhokseumawe | 9 Kali | 16 | Aceh Timur | 6 Kali |
| 5 | Kota Langsa | 9 Kali | 17 | Aceh Utara | 6 Kali |
| 6 | Aceh Barat | 7 Kali | 18 | Nagan Raya | 6 Kali |
| 7 | Aceh Jaya | 7 Kali | 19 | Pidie | 6 Kali |
| 8 | Aceh Tamiang | 7 Kali | 20 | Pidie Jaya | 6 Kali |
| 9 | Aceh Tengah | 7 Kali | 21 | Simeulue | 6 Kali |
| 10 | Bener Meriah | 7 Kali | 22 | Aceh Singkil | 5 Kali |
| 11 | Bireuen | 7 Kali | 23 | Subulusalam | 4 Kali |
| 12 | Gayo Lues | 7 Kali | 24 | Aceh Tenggara | 4 Kali |

*Sumber: BPK, 2022*

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh.

Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

#### 2.1.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

Dari Tabel 2.104. dibawah ini terlihat bahwa profesionalitas pegawai yang diukur melalui Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar (65) menjadi (86,1) di tahun 2021 dan 2022.

**Tabel 2.111.**
**Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP**
**Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) | 62.10 | 85,66 | 65 | 86,1 | 86,1 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Aceh. Tahun 2023*

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui *fit and proper test* sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

**Tabel 2.112.**
**Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2018 – 2022**

| No. | Tahun | Diklat Teknis Fungsional | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jlh PNS Aceh | Jlh Peserta Diklat | % |
| 1 | 2018 | 22.544 | 651 | 2.89 |
| 2 | 2019 | 22.685 | 813 | 3.58 |
| 3 | 2020 | 21.690 | 40 | 0,18 |
| 4 | 2021 | 21.830 | 333 | 1,53 |
| 5 | 2022 | 22.851 | 540 | 2,36 |

*Sumber : BPSDMA / BKA. Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 2.118. dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional pada tahun 2018 sebesar 2,89 persen dan tahun 2019 sebesar 3,58 persen. Namun pada tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran akibat pandemi *covid-19* serta penerapan protokol kesehatan yang ketat maka kegiatan

pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh mengalami penurunan drastis sebanyak hanya 40 peserta atau 0,18 persen. Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDMA) terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sesuai harapan dan kewajiban aparatur untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam melayani masyarakat. Selain itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung program unggulan *Aceh Carong* terus memberikan kesempatan beasiswa Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat Aceh dan ASN Pemerintah Aceh. Pada tahun 2022, beasiswa Pemerintah Aceh dibuka untuk 21 jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.113.

**Tabel 2.113.**
**Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2022 pada 21 Jenjang Pendidikan**

| No. | Jenjang | No. | Jenjang |
|---|---|---|---|
| 1 | Diploma I Agraria | 12 | S-2 Kerjasama DAAD |
| 2 | Diploma STTD | 13 | S-2 Tahfidz Luar Negeri |
| 3 | Diploma Aceh Carong bagi Masyarakat Kurang mampu dan Korban Konflik | 14 | Dokter Spesialis |
| 4 | S-1 Aceh Carong Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Korban Konflik Kerjasama PTN/PTS Aceh | 15 | S-3 Kerjasama DAAD |
| 5 | S-1 Prestasi Dalan Negeri | 16 | S-3 Dosen PTN/PTS Dalam Negeri |
| 6 | S-1 Tahfidz Luar Negeri | 17 | S-3 Masyarakat Aceh Luar Negeri |
| 7 | S-2 Masyarakat Aceh Dalam Negeri | 18 | S-3 Masyarakat Aceh Luar Negeri |
| 8 | S-2 Masyarakat Aceh Luar Negeri | 19 | Dosen PTN/PTS Luar Negeri |
| 9 | Pendidikan Profesi Guru | 20 | Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S-2 |
| 10 | S-2 Guru PAUD Luar Negeri | 21 | Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S-3 |
| 11 | S-2 Kerjasama Pemerintah Aceh-Luar Negeri (USK-Rhole Island) | | |

*Sumber : BPSDMA, 2022*

Dari Tabel 2.104 di bawah ini terlihat bahwa profesionalitas pegawai yang diukur melalui Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar (60.20) menjadi (61,63) di tahun 2020.

**Tabel 2.114.**
**Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) | 60.20 | 62.00 | 62.10 | 64.20 | 61,63 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Aceh. Tahun 2021*

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui Fit and Proper Test sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

**Tabel 2.115.**
**Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016 - 2020**

| No. | Tahun | Diklat Teknis Fungsional | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jlh PNS Aceh | Jlh Peserta Diklat | % |
| 1 | 2016 | 9.075 | 330 | 3.64 |
| 2 | 2017 | 23.180 | 455 | 1.96 |
| 3 | 2018 | 22.544 | 651 | 2.89 |
| 4 | 2019 | 22.685 | 813 | 3.58 |
| 5 | 2020 | 21.690 | 40 | 0,18 |

*Sumber : BPSDMA/ BKA. Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 2.115. dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional tahun 2016 sebesar 3,64 persen kemudian tahun 2017 menurun menjadi 1,96 persen karena jumlah pegawai yang meningkat drastis. Pada tahun 2019 persentase yang mengikuti diklat kembali meningkat menjadi 3,58 persen atau sebanyak 813 peserta. Namun pada tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 serta penerapan protokol kesehatan yang ketat maka kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN Pemerintah Aceh mengalami penurunan drastis sebanyak hanya 40 peserta atau 0,18 persen. Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDMA) terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN dengan melakukan Diklat bagi Aparatur sesuai harapan dan kewajiban Aparatur untuk memenuhi SPM dalam melayani masyarakat. Selain itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung Program Unggulan Aceh Carong terus memberikan beasiswa Diploma, S1, S2, S3 baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat aceh dan Aparatur Pemerintah Aceh. Pada tahun 2021, beasiswa Pemerintah Aceh dibuka untuk 21 jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.116.

**Tabel 2.116.**
**Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2021 pada 21 Jenjang Pendidikan**

| No | Jenjang | No. | Jenjang |
|---|---|---|---|
| 1 | Diploma I Agraria | 12 | S2 Kerjasama DAAD |
| 2 | Diploma STTD | 13 | S2 Tahfidz Luar Negeri |
| 3 | Diploma Aceh Carong bagi Masyarakat Kurang mampu dan Korban Konflik | 14 | Dokter Spesialis |
| 4 | S1 Aceh Carong Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Korban Konflik Kerjasama PTN/PTS Aceh | 15 | S3 Kerjasama DAAD |
| 5 | S1 Prestasi Dalan Negeri | 16 | S3 Dosen PTN/PTS Dalam Negeri |
| 6 | S1 Tahfidz Luar Negeri | 17 | S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri |
| 7 | S2 Masyarakat Aceh Dalam Negeri | 18 | S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri |
| 8 | S2 Masyarakat Aceh Luar Negeri | 19 | Dosen PTN/PTS Luar Negeri |
| 9 | Pendidikan Profesi Guru | 20 | Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S2 |
| 10 | S2 Guru PAUD Luar Negeri | 21 | Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S3 |
| 11 | S2 Kerjasama Pemerintah Aceh-Luar Negeri (USK-Rhole Island) | | |

*Sumber : BPSDMA, 2021*

#### 2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

#### 2.1.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja pegwai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan.

Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan

yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

#### 2.1.3.4.6. Sekretariat DPRD

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRA.

Pelayanan Sekretariat DPRA diberikan dalam bentuk dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRA baik dalam bentuk dukungan administrasi dan keuangan, sarana dan prasarana, serta fasilitasi terhadap 3 (tiga) fungsi Dewan yaitu Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: 1) Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); 2) Tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan 3) Terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRA (RPA 2023-2026).

Sekretariat DPRA dalam hal penyelesaian Rancangan Qanun hanya sebatas memfasilitasi kegiatan pembahasannya, dimana fasilitasi pembahasan Rancangan Qanunnya telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Penyelesaian pembahasan Rancangan Qanun sampai dengan ditetapkan merupakan tugas dan fungsi DPRA.

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Aceh memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan provinsi lain. Namun saat ini Aceh masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Aceh. Meskipun ditengah lesunya

aktifitas perekonomian Aceh, namun terdapat beberapa sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif diantaranya sektor pertanian, pertambangan, listrik dan gas, konstruksi, informasi komunikasi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Diantara sektor-sektor penopang perekonomian tersebut, informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,98 persen atau meningkat tajam dari 5,26 persen pada tahun 2019. Kemudian disusul oleh konstruksi yang tumbuh sebesar 10,61 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021, Aceh mencapai kategori tinggi yaitu 2,763, yang terdiri dari empat aspek daya saing yaitu ekosistem inovasi memperoleh nilai indeks sebesar 2,206; faktor penguat memperoleh indeks sebesar 3,134; sumber daya manusia memperoleh indeks sebesar 3,169; dan faktor pasar sebesar 2,541. Selanjutnya, dari hasil pemetaan 12 (duabelas) pilar dari aspek daya saing yang diukur, ada 10 pilar yang mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya. Pilar-pilar yang mengalami peningkatan yaitu dinamika bisnis sebesar 2,208; kesiapan teknologi sebesar 3, kelembagaan sebesar 4,333; infrastruktur sebesar 3,5; kesehatan sebesar 3,875; pendidikan dan keterampilan sebesar 2,464; efisiensi pasar produk sebesar 2,667; ketenagakerjaan sebesar 3,167; akses keuangan sebesar 2,333; dan ukuran pasar sebesar 2.

Berdasarkan hasil pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek, maka dari 12 (duabelas pilar) tersebut ada dua pilar yang nilainya masih berada dibawah rata-rata keseluruhan indeks yaitu pilar perekonomian daerah sebesar 1,571 dan kapasitas inovasi sebesar 1,411, seperti Gambar 2.71 dibawah ini:

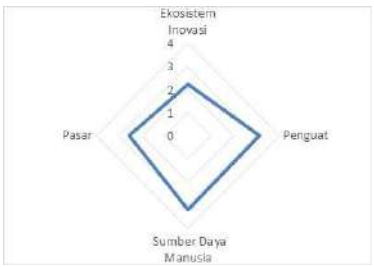

10 Pilar yang mengalami peningkatan Indeks Daya Saing Aceh dibanding rata-rata seluruh Pilar (12 Pilar) yaitu:

1. Pilar kelembagaan;
2. Pilar infrastruktur;
3. Pilar kesehatan;
4. Pilar pendidikan dan keterampilan;

2 Pilar yang mengalami penurunan Indeks Daya Saing Aceh dibanding rata-rata Seluruh Pilar (12 Pilar) yaitu:

1. Pilar perekonomian daerah; dan

**Gambar 2.71. Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Aceh Berdasarkan Aspek & Pilar**

### 2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

#### 2.1.4.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 668 ribu atau sebesar 56,66 persen. Pengeluaran konsumsi non makanan tertinggi juga terjadi pada tahun 2022 sebesar 511 ribu atau sebesar 43,36 persen. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terkahir mengalami peningkatan. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.72 berikut.

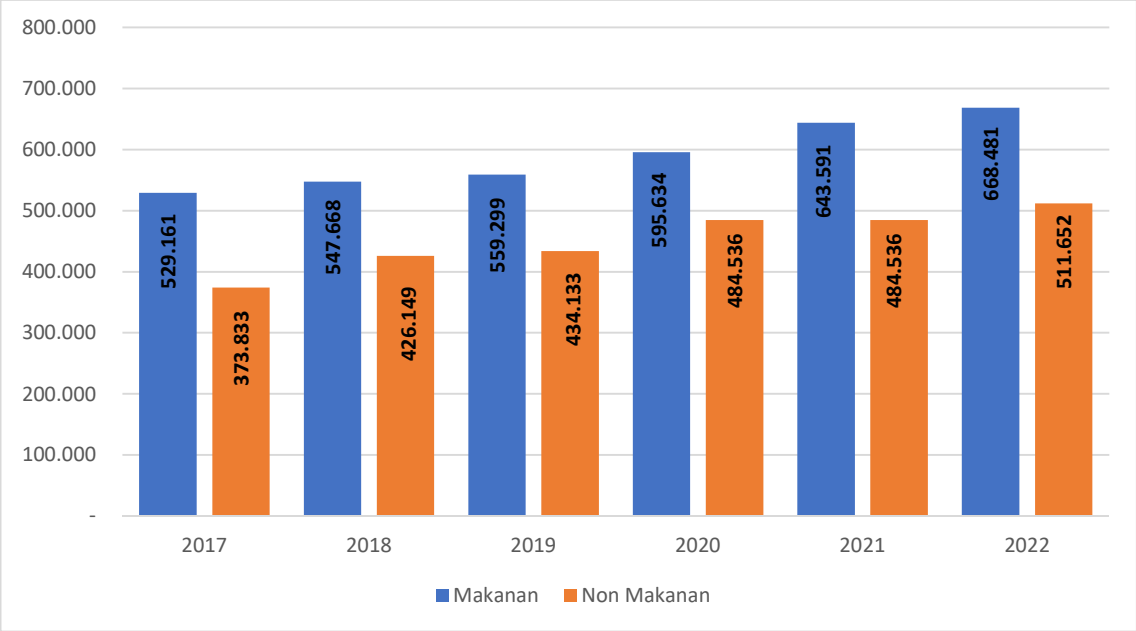


*Sumber: BPS 2022*

**Gambar 2.72. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2022**

#### 2.1.4.2.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Secara umum nilai tukar petani di kepualuan Sumatera tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan tahun tahun 2019. Hanya saja Lampung yang selama ini mempunyai nilai terbaik NTP nya malah terjadi penurunan sebesar 5.76 point. Ada Tiga provinsi yang secara signifikan mengalami perbaikan nilai NTP yaitu Jambi meningkat 34.75 point, Bangka Belitung 30.44 point dan Bengkulu 28.22 point.

Nilai Tukar Petani Aceh untuk wilayah sumatera tahun 2020 juga mengalami peningkatan, tetapi masih berada pada peringkat yang tidak menggembirakan, Aceh turun ke peringkat 2 dari bawah dibandingkan tahun 2019, dimana hanya berada satu tingkat diatas provinsi Lampung atau posisi 9 dari seluruh provinsi di sumatera, yang menarik adalah provinsi Lampung yang NTP nya tertinggi tahun sebelumnya tahun ini turun drastis dari 102.51 menjadi 96.75 atau berada pada peringkat terakhir se Sumatera. Nilai Tukar petani tertinggi adalah pada Provinsi Riau yaitu sebesar 130.34.

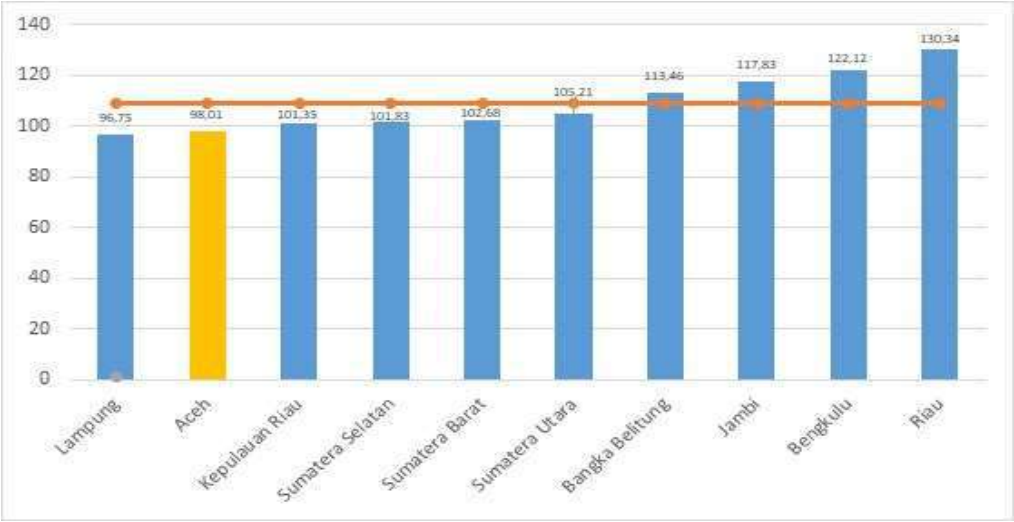


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)*

**Gambar 2.73. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020**

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung mengalami tren penurunan. Tahun 2014 NTP Aceh berada pada angka 98.15 dan terus tertekan sampai tahun 2019 yang sudah menyentuh angka 92.29. Dalam kurun waktu lima tahun NTP jatuh lebih dari 5 poin (5.86). Tahun 2020 inflasi sudah

dapat ditekan sampai angka 0,99 persen dan NTP juga sedikit mengalami perbaikan 5.72 point yaitu menjadi sebesar 98.01.

NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Akibat NTP yang mengalami penurunan ini berdampak melemahnya daya beli petani yang berujung pada tergerusnya kesejahteraan petani.

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020 (diolah)*

**Gambar 2.74. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020**

Bila dilihat per sub sektor NTP sub sektor pertanian mengalami pergerakan. Sub sektor peternakan NTP selama enam tahun terakhir masih mampu berada pada NTP Nilai 100, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 96.75. Sub sektor Tanaman hortikultura yang bergerak pada komoditi buah-buahan, aneka sayuran, tanaman bunga (florikultura), dan tanaman obat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi juga mengalami penurunan nilai tukar petani yaitu 95.52. Akan tetapi pada sub sektor perikanan NTP nya mengalami peningkatan melebihi angka 100 yaitu menjadi 100.67.

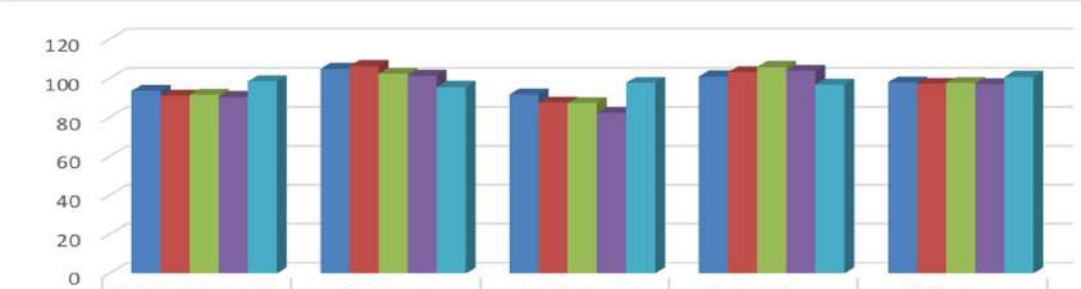


| | Tanaman Pangan | Tanaman Hortikultura | Tanaman Perkebunan | Peternakan | Perikanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 93,54 | 104,84 | 91,73 | 100,89 | 97,86 |
| 2017 | 91,06 | 106,22 | 87,50 | 103,12 | 97,16 |
| 2018 | 91,53 | 102,30 | 87,27 | 105,76 | 97,58 |
| 2019 | 90,32 | 101,19 | 82,22 | 103,76 | 97,02 |
| 2020 | 98,42 | 95,52 | 97,62 | 96,75 | 100,67 |

*Sumber: NTP Aceh 2020. (diolah)*

**Gambar 2.75. NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020**

#### 2.1.4.2.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita juga akan memperlihatkan kecenderungan besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh pada umumnya. Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein perkapita per hari.

Secara umum konsumsi non makanan yang dikeluarkan oleh masyarakat Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp. 511.562 rupiah, dari total pengeluaran sebesar 1.180.113 rupiah. Dari 6 (enam) klasifikasi pengeluarannya, 47 persen dikeluarkan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah. Sedangkan pengeluaran terkecil sebesar 2 persen digunakan untuk memenuhi keperluan pesta dan upacara. Komposisi rata-rata pengeluaran non makanan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.76.

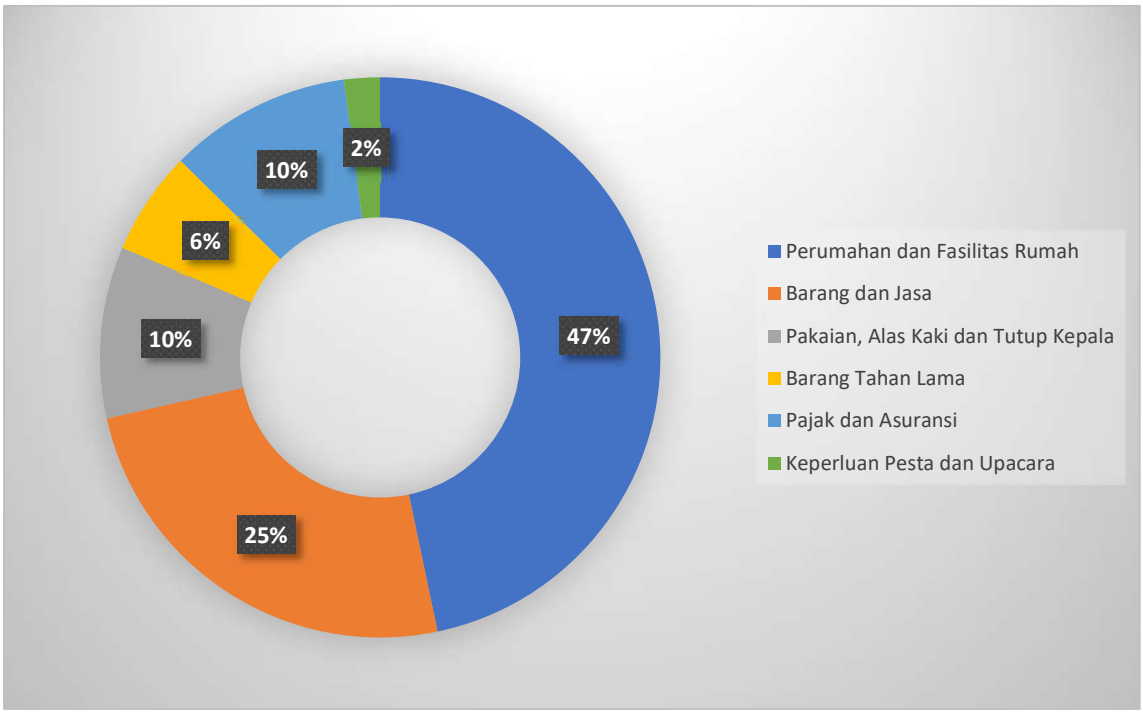


*Sumber: Aceh Dalam Angka, 2021*

**Gambar 2.76. Persentase Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang (Non Makanan), Tahun 2022**

#### 2.1.4.2.4. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

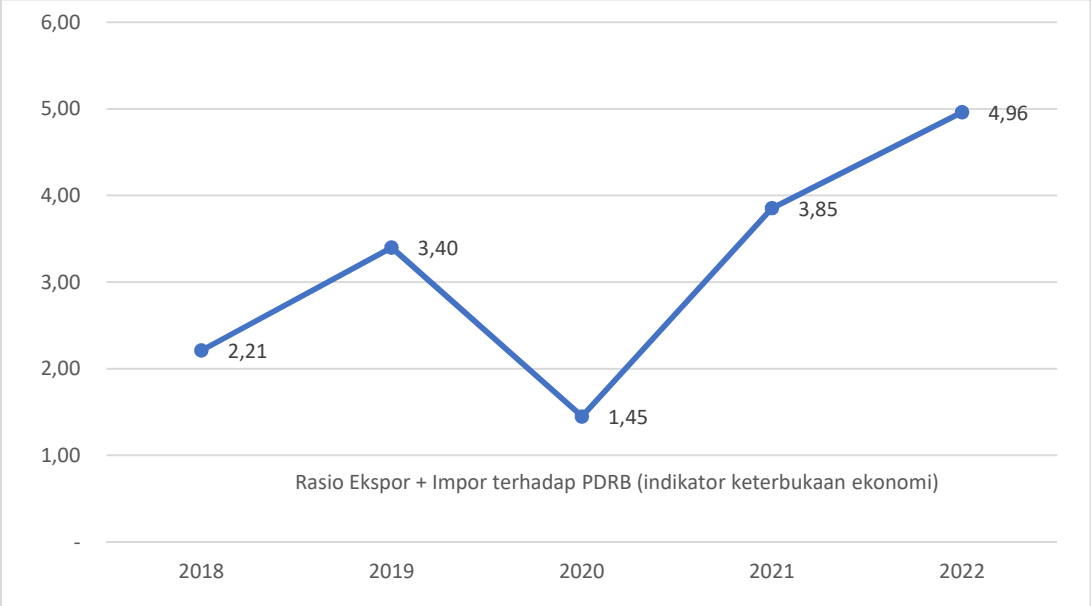


*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2023 (diolah)*

**Gambar 2.77. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2018-2022**

Nilai keterbukaan ekonomi seperti yang disajikan pada Gambar 2.72. Nilai tersebut dapat dihitung dari rasio ekspor dan impor terhadap nilai PDRB. Indeks keterbukaan ekonomi Aceh Indeks keterbukaan ekonomi Aceh pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 3,40 persen dibanding dengan tahun 2018 tumbuh sebesar 2,21 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, dengan pertumbuhan hanya sebesar 1,45 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kemudian sebagai dampak dari pemulihan ekonomi Indeks keterbukaan ekonomi Aceh kembali meningkat di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 sehingga mencapai pertumbuhan sebesar 4,96 persen.

Pada tahun 2022 tersebut nilai ekspor Aceh mencapai 585.724.963 USD sedangkan nilai impor sebesar 113.741.989 USD mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2018 dimana nilai ekspornya sebesar 250.735.059 USD dan nilai impor sebesar 29.690.02 USD.

#### 2.1.4.2.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Aktivitas Perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 masih terpantau terkontraksi namun sudah menunjukan tren yang membaik dan dalam kondisi yang terjaga. Ini tercermian dari ketahanan dan kualitas kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Aceh.

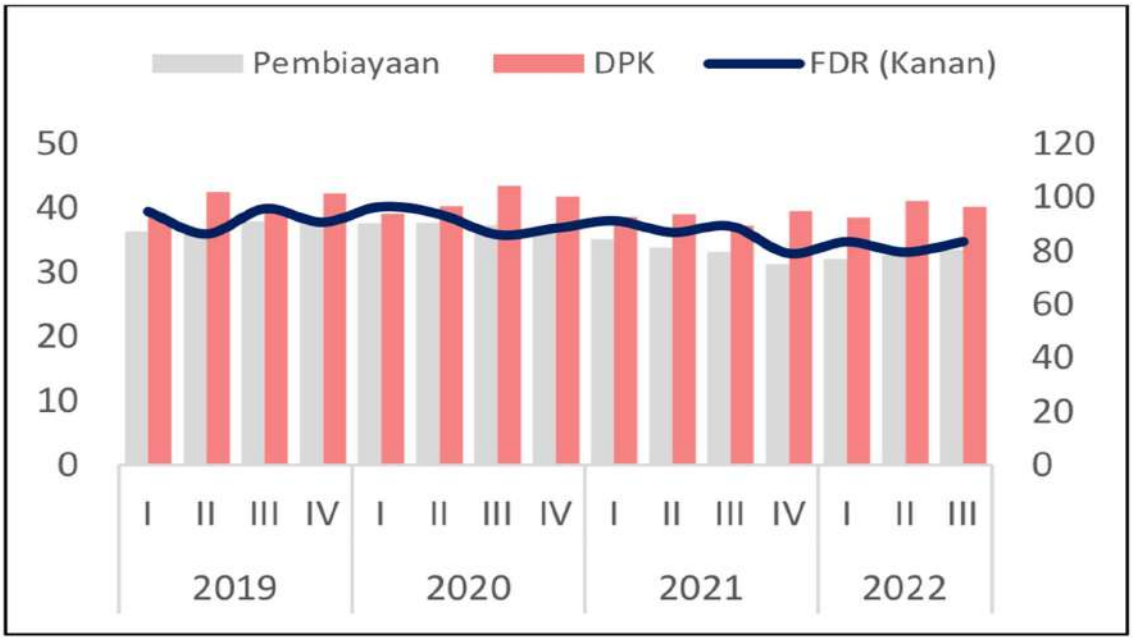


*Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2022*

**Gambar 2.78. Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh, Tahun 2019-2022**

Pembiayaan di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan diiringi dengan indikator *Finance to Deposit Ratio* (FDR) yang meningkat. Namun Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan. Penurunan penggunaan Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dampak dari wabah covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan bahkan Aceh ikut terimbas karena berhentinya aktifitas ekonomi masyarakat yang dibiayai oleh perbankan.

### 2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah kebanjiran. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

#### 2.1.4.3.1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.117.

**Tabel 2.117.**
**Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019**

| Kabupaten/ Kota | Luas ($Km^2$) | Jumlah Penduduk | Panjang Jalan (Km) | Indeks Aksesibilitas ($Km/Km^2$) | Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Simelue | 2051.48 | 93228 | 767.67 | 0.37 | 8.23 |
| Aceh Singkil | 2185 | 124101 | 555.49 | 0.25 | 4.48 |
| Aceh Selatan | 3841.6 | 238081 | 1225.62 | 0.32 | 5.15 |
| Aceh Tenggara | 4231.43 | 216495 | 1253.59 | 0.30 | 5.79 |
| Aceh Timur | 6286.01 | 436081 | 1763.71 | 0.28 | 4.04 |
| Aceh Tengah | 4318.39 | 212494 | 1143.73 | 0.26 | 5.38 |
| Aceh Barat | 2927.95 | 210113 | 884.95 | 0.30 | 4.21 |
| Aceh Besar | 2969 | 425216 | 1635.1 | 0.55 | 3.85 |
| Pidie | 3086.95 | 444976 | 1282.71 | 0.42 | 2.88 |
| Bireuen | 1901.2 | 471635 | 1317.82 | 0.69 | 2.79 |
| Aceh Utara | 3236.86 | 619407 | 2185.75 | 0.68 | 3.53 |
| Aceh Barat Daya | 1490.6 | 150393 | 843.86 | 0.57 | 5.61 |
| Gayo Lues | 5719.58 | 94100 | 1115.17 | 0.19 | 11.85 |
| Aceh Tamiang | 1956.72 | 295011 | 1053.53 | 0.54 | 3.57 |
| Nagan Raya | 3363.72 | 167294 | 1151.96 | 0.34 | 6.89 |
| Aceh Jaya | 3812.99 | 92892 | 710.69 | 0.19 | 7.65 |
| Bener Meriah | 1454.09 | 148175 | 1484.35 | 1.02 | 10.02 |
| Pidie Jaya | 1073.6 | 161215 | 582.06 | 0.54 | 3.61 |
| Banda Aceh | 61.36 | 270321 | 764.12 | 12.45 | 2.83 |
| Sabang | 153 | 34874 | 202.24 | 1.32 | 5.80 |
| Langsa | 262.41 | 176811 | 660.71 | 2.52 | 3.74 |
| Lhokseumawe | 181.06 | 207202 | 455.72 | 2.52 | 2.20 |
| Subulussalam | 1391 | 81417 | 609.5 | 0.44 | 7.49 |

*Sumber: BPS 2020, diolah*

Tabel 2.117, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,45 km/km$^2$), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,19 km/Km$^2$). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (11,85 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,20 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 7.9) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

#### 2.1.4.3.2. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih

Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh pada Tahun 2022 yaitu dengan perpipaan sebesar 7,63 persen, pompa sebesar 9,59 persen, air dalam kemasan sebesar 40,95 persen, sumur terlindung sebesar 26,56 persen, sumur tak terlindung sebesar 3,69 persen, mata air terlindung sebesar  sebesar 8,11 persen, mata air tak terlindung sebesar 1,21 persen, air permukaan sebesar 1,80 persen, air hujan sebesar 0,31 persen dan lainnya sebesar 0,14 persen. Selanjutnya Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.118 berikut.

**Tabel 2.118.**
**Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2022**

| Kabupaten/Kota | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeulue | 0,56 | 1,74 | 75,10 | 9,83 | 2,43 | 4,83 |
| Aceh Singkil | 2,49 | 14,91 | 34,54 | 31,31 | 7,03 | 2,26 |
| Aceh Selatan | 0,12 | 16,44 | 40,17 | 21,39 | 2,57 | 6,31 |
| Aceh Tenggara | 1,53 | 23,71 | 24,93 | 8,25 | 0,21 | 37,94 |
| Aceh Timur | 9,74 | 14,74 | 16,67 | 34,65 | 6,18 | 2,92 |
| Aceh Tengah | 7,22 | 6,84 | 22,12 | 10,59 | 0,36 | 50,21 |
| Aceh Barat | 0,32 | 14,76 | 46,89 | 30,26 | 1,69 | 4,05 |
| Aceh Besar | 6,04 | 2,03 | 65,81 | 20,61 | 1,19 | 1,40 |

| Kabupaten/Kota | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidie | 2,90 | 10,80 | 35,53 | 41,16 | 4,60 | 0,59 |
| Bireuen | 16,74 | 2,47 | 29,10 | 47,03 | 3,73 | 0,70 |
| Aceh Utara | 15,91 | 8,26 | 18,50 | 48,92 | 7,11 | 0,66 |
| Aceh Barat Daya | 2,40 | 29,64 | 35,79 | 17,55 | 1,58 | 8,99 |
| Gayo Lues | 25,65 | 8,41 | 25,06 | 3,94 | 0,87 | 26,64 |
| Aceh Tamiang | 7,02 | 14,07 | 62,52 | 9,21 | 5,90 | 0,34 |
| Nagan raya | 0,81 | 15,00 | 26,44 | 36,36 | 5,80 | 14,86 |
| Aceh Jaya | 7,63 | 5,02 | 28,42 | 24,58 | 2,92 | 19,59 |
| Bener Meriah | 12,63 | 3,09 | 5,77 | 11,74 | 2,35 | 53,87 |
| Pidie Jaya | 15,79 | 3,69 | 33,14 | 38,95 | 2,68 | 0,98 |
| Banda Aceh | 2,62 | 0,00 | 95,81 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| Sabang | 8,84 | 0,56 | 83,74 | 1,82 | 0,00 | 3,51 |
| Langsa | 5,35 | 15,19 | 76,38 | 2,43 | 0,17 | 0,00 |
| Lhokseumawe | 2,28 | 3,19 | 78,17 | 16,36 | 0,00 | 0,00 |
| Subulussalam | 3,52 | 9,10 | 19,25 | 24,33 | 28,70 | 4,60 |
| **Aceh** | **7,63** | **9,59** | **40,95** | **26,56** | **3,69** | **8,11** |

*Lanjutan tabel...*

| Kabupaten/Kota | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Simeulue | 0,71 | 0,49 | 4,31 | 0,00 | 100,00 |
| Aceh Singkil | 0,73 | 4,49 | 2,25 | 0,00 | 100,00 |
| Aceh Selatan | 5,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aceh Tenggara | 2,84 | 0,09 | 0,00 | 0,50 | 100,00 |
| Aceh Timur | 0,14 | 3,81 | 1,14 | 0,00 | 100,00 |

| Kabupaten/Kota | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Tengah | 2,05 | 0,15 | 0,46 | 0,00 | 100,00 |
| Aceh Barat | 0,13 | 1,10 | 0,44 | 0,36 | 100,00 |
| Aceh Besar | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,03 | 100,00 |
| Pidie | 0,82 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Bireuen | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aceh Utara | 0,17 | 0,37 | 0,00 | 0,09 | 100,00 |
| Aceh Barat Daya | 2,18 | 0,91 | 0,00 | 0,96 | 100,00 |
| Gayo Lues | 5,14 | 3,54 | 0,00 | 0,75 | 100,00 |
| Aceh Tamiang | 0,22 | 0,57 | 0,00 | 0,15 | 100,00 |
| Nagan raya | 0,20 | 0,38 | 0,15 | 0,00 | 100,00 |
| Aceh Jaya | 9,07 | 2,45 | 0,10 | 0,24 | 100,00 |
| Bener Meriah | 5,27 | 3,32 | 1,75 | 0,20 | 100,00 |
| Pidie Jaya | 2,93 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Banda Aceh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sabang | 0,48 | 1,02 | 0,00 | 0,03 | 100,00 |
| Langsa | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Lhokseumawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Subulussalam | 1,04 | 6,48 | 0,59 | 2,38 | 100,00 |
| **Aceh** | **1,21** | **1,80** | **0,31** | **0,14** | **100,00** |

*Sumber: BPS 2023, diolah*

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan air baku yang tidak merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pengembangan sistem penyediaan air minum regional.

#### 2.1.4.3.3. Rasio ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Aceh periode 2015-2019 meningkat sebesar 0.64. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan daya listrik sebesar 0.92 dan meningkat menjadi 1.13 pada tahun 2019. Peningkatan ini dikarenakan sudah beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru. Rasio kelistrikan Aceh tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.119.

**Tabel 2.119.**
**Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2015-2019**

| Jenis Penerangan | Tahun (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Daya Listrik Terpasang (MW) | 432,51 | 484 | 524 | 580 | 605 |
| Jml. Kebutuhan Daya Listrik (MW) | 470 | 456 | 470 | 496 | 535 |
| Rasio | 0,92 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,13 |

*Sumber: Dinas ESDM Aceh. 2020*

#### 2.1.4.3.4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah Rumah Tangga yang meggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah meningkat sebanyak 3,53 %. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh hingga tahun 2021 sebanyak 1.367.417 Rumah Tangga. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh dapat di lihat pada gambar 2.79 berikut ini.

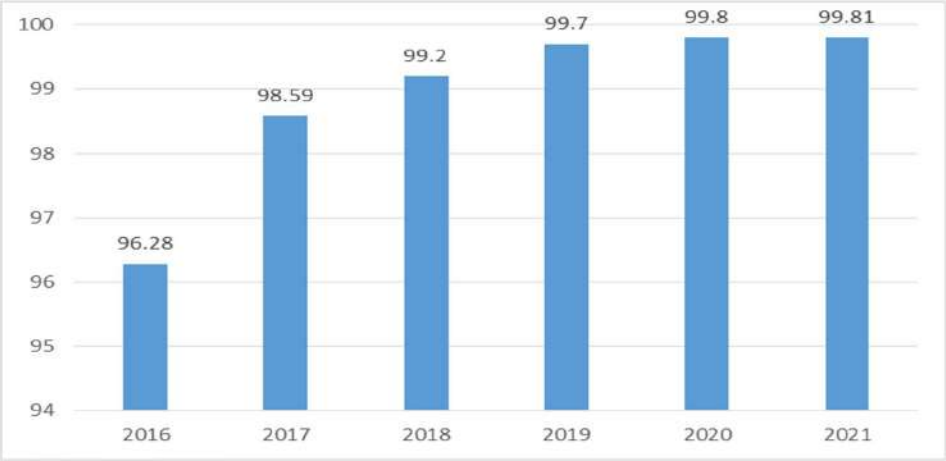


*Sumber : Statistik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022*

**Gambar 2.79. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2016-2021**

Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Aceh diantaranya adalah belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai hasil 100 % melalui penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMA

### 2.2. 1Realisasi Pendanaan

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 13.714.269.633.906,- atau sebesar 102,67 persen dari target RKPA-P Tahun 2022 sebesar Rp. 13.357.540.136.730,-. Realisasi pendapatan ini menurun jika dibandingkan dengan capaian Realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 (audited) sebesar Rp. 13.948.388.273.436,-.

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja Aceh Tahun 2022 mencapai Rp. 15.772.149.267.457,- atau 94,41 persen dari target RKPA-P Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 16.706.704.749.433,- dan nilai capaian realisasi ini lebih besar dari. realisasi belanja Aceh Tahun 2021 (audited) mencapai Rp. 13.683.582.127.432,-. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 tersebut menyebabkan terjadinya Defisit terhadap anggaran sebesar Rp 2.057.879.633.553,-. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.120.

**Tabel 2.120.**
**Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2022**

| No | Uraian | Target RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi | | | | Jumlah Realisasi Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pendapatan | 13.357.540.136.730 | 5.461.901.589.565 | 40,89 | 8.252.368.044.341 | 61,78 | 13.714.269.633.906 | 102,67 |
| 2 | Belanja (termasuk transfer ke Kab/Kota) | 16.706.704.749.433 | 4.776.240.710.934 | 28,59 | 10.995.908.556.524 | 65,82 | 15.772.149.267.459 | 94,41 |
| 3 | Surplus/ Defisit | (3.349.164.612.703) | 685.660.878.630 | | (2.743.540.512.183) | | (2.057.879.633.553) | |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

#### 2.2.1.1 Realisasi Pendapatan

Target penerimaan pendapatan Aceh dalam RKPA Tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 4,63 persen dari RKPA Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp. 14.006.275.954.424. Tingkat realisasi pendapatan tahun 2022 terhadap target RKPA tahun 2022 mencapai 102,67 persen. Jumlah realisasi pendapatan tertinggi berasal dari Dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 10.775.168.990.686,- atau sebesar 78,57 persen dari total pendapatan Aceh, diikuti oleh pendapatan asli Aceh sebesar Rp. 2.917.833.097.662,- (21,28 persen) dan lain-lain pendapatan Aceh sebesar Rp. 21.267.545.558,- (0,16 persen).

Pada umumnya Pendapatan Aceh masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari target besarnya Pendapatan Aceh, besarnya persentase Pendapatan Asli Aceh masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Total Pendapatan/Penerimaan Aceh yaitu sebesar 19,26 persen, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
- Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
- Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target pada RKPA Tahun 2022 mencerminkan bahwa keuangan Aceh masih tergolong dalam kriteria rendah sekali (kriteria 0-25 persen "rendah sekali") atau sebesar 19,26 persen dari pagu Pendapatan Aceh. Jika dilihat dari capaian realisasi sampai dengan Semester II tahun 2022 tercatat pendapatan asli Aceh sebesar 21,28 persen dari total Pendapatan Aceh yang berarti bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah sekali.

Tercatat pada Tahun 2022 dari target RKPA Tahun 2022, pendapatan dari retribusi Aceh merupakan sektor yang masih sangat rendah peranannya dalam kontribusi realisasi Pendapatan Asli Aceh atau sebesar 0,51 persen. Demikian pula peranan penerimaan dari Hasil pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan tercatat hanya sebesar 6,16 persen dari realisasi Pendapatan Asli Aceh. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai realisasi pendapatan, dapat dilihat Tabel berikut 2.121 berikut ini.

**Tabel 2.121.**
**Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2022**

| No | Uraian | Target RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi | | | | Realisasi Tahun 2022 (*Unaudited*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **PENDAPATAN ASLI ACEH** | **2.572.750.100.699** | **1.449.020.992.947** | **56,32** | **1.468.812.104.715** | **57,09** | **2.917.833.097.662** | **113,41** |
| I.1 | Pajak Aceh | 1.574.358.019.378 | 786.008.303.689 | 49,93 | 931.826.263.931 | 59,19 | 1.717.834.567.620 | 109,11 |
| I.2 | Retribusi Aceh | 9.458.309.000 | 4.508.127.760 | 47,66 | 10.489.924.032 | 110,91 | 14.998.051.792 | 158,57 |
| I.3 | Hasil pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan | 179.862.545.155 | 179.036.984.981 | 99,54 | 825.560.175 | 0,46 | 179.862.545.156 | 100,00 |
| I.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah | 809.071.227.166 | 479.467.576.516 | 59,26 | 525.670.356.578 | 64,97 | 1.005.137.933.094 | 124,23 |
| **II** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **10.773.391.568.000** | **3.994.730.459.508** | **37,08** | **6.780.438.531.178** | **62,94** | **10.775.168.990.686** | **100,02** |
| II.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 10.773.391.568.000 | 3.994.730.459.508 | 37,08 | 6.780.438.531.178 | 62,94 | 10.775.168.990.686 | 100,02 |
| II.1.1 | Dana Perimbangan | | 1.726.730.459.508 | - | 1.456.558.362.178 | | 3.183.288.821.686 | |
| II.1.1.1. | Dana Transfer Umum | | 1.220.125.146.556 | - | 997.494.342.801 | | 2.217.619.489.357 | |
| II.1.1.1.1 | Dana Bagi Hasil | | 89.949.545.680 | - | 185.917.693.801 | | 275.867.239.481 | |
| II.1.1.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 1.130.175.600.876 | - | 811.576.649.000 | | 1.941.752.249.876 | |
| II.1.1.3 | Dana Transfer Khusus | | 506.605.312.952 | - | 459.064.019.377 | | 965.669.332.329 | |
| II.1.1.3.1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | | 61.403.565.250 | - | 209.649.232.697 | | 271.052.797.947 | |
| II.1.1.3.2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 445.201.747.702 | - | 249.414.786.680 | | 694.616.534.382 | |

| No | Uraian | Target RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi | | | | Realisasi Tahun 2022 (*Unaudited*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II.1.2 | Dana Insentif Daerah | | - | - | 31.880.169.000 | | 31.880.169.000 | |
| II.1.3 | Dana Otonomi Khusus | | 2.268.000.000.000 | - | 5.292.000.000.000 | | 7.560.000.000.000 | |
| II.2 | Transfer Antar Daerah | - | - | | - | | - | |
| II.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | | - | | | | - | |
| II.2.1 | Bantuan Keuangan | - | - | | | | - | |
| **III** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN** | **11.398.468.031** | **18.150.137.110** | **159,23** | **3.117.408.448** | **27,35** | **21.267.545.558** | **186,58** |
| III.1 | Pendapatan Hibah | 11.398.468.031 | 18.043.837.110 | 158,30 | 3.117.408.448 | 17,28 | 21.161.245.558 | 185,65 |
| III.2 | Dana Darurat | - | - | | | | - | - |
| III.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | | 106.300.000 | - | - | | 106.300.000 | - |
| **JUMLAH PENDAPATAN ACEH (I+II+III)** | | **13.357.540.136.730** | **5.461.901.589.565** | **40,89** | **8.252.368.044.341** | **61,78** | **13.714.269.633.906** | **102,67** |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Pada tahun 2022 realisasi Pendapatan Asli Aceh tercatat sebesar 113,41 persen dari target yang telah ditetapkan pada RKPA tahun 2022 (unaudited), dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,573 Triliun, pada akhir periode tahun 2022 berhasil dicapai sebesar Rp. 2,918 Triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2021), capaiannya mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Aceh selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2017 (audited) mencapai Rp. 2,276 Triliun, tahun 2018 (audited) mencapai Rp. 2,359 Triliun, dan tahun 2019 (audited) mencapai Rp. 2,699 Triliun. Penurunan dimulai tahun 2020 (audited) dengan capaian Rp. 2,571 Triliun, dan Pendapatan Asli Aceh Tahun 2021 kembali menurun jika

dibandingkan dengan tahun 2020 (audited) yang besarnya mencapai Rp. 2,506 Triliun (Audited). Konstribusi tertinggi Pendapatan Asli Aceh tahun 2022 berasal dari Pajak Aceh yaitu sebesar 58,87 persen dari jumlah Pendapatan Asli Aceh tahun 2022.

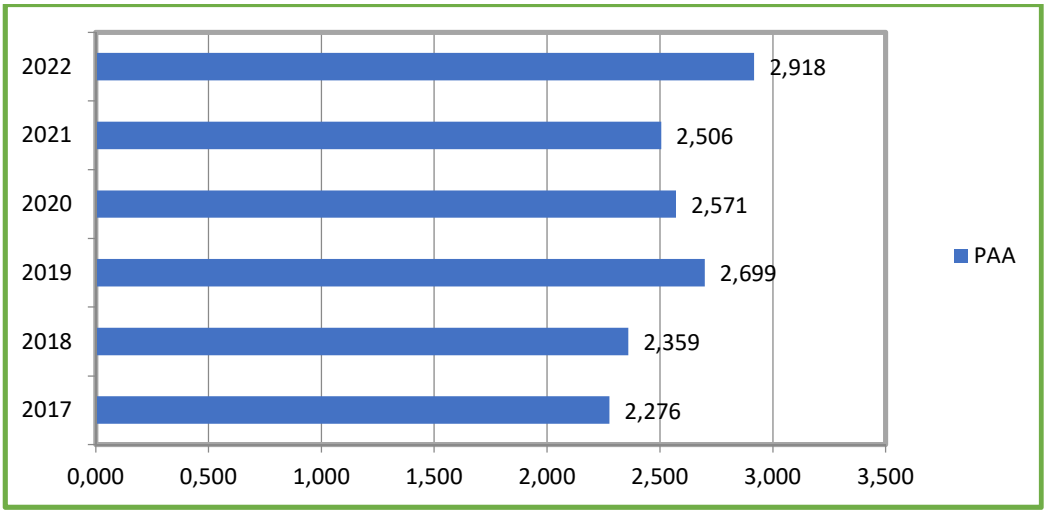


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

**Gambar 2.80. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah)**

Berdasarkan strukturnya, realisasi pendapatan Aceh tahun 2022 didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan peranannya sebesar 78,57 persen, diikuti oleh pendapatan asli Aceh dengan peranannya sebesar 21,28 persen, dan lain-lain pendapatan dengan peranannya sebesar 0,16 persen. Gambar 2.2 berikut memberikan gambaran struktur realisasi pendapatan Aceh tahun 2022.

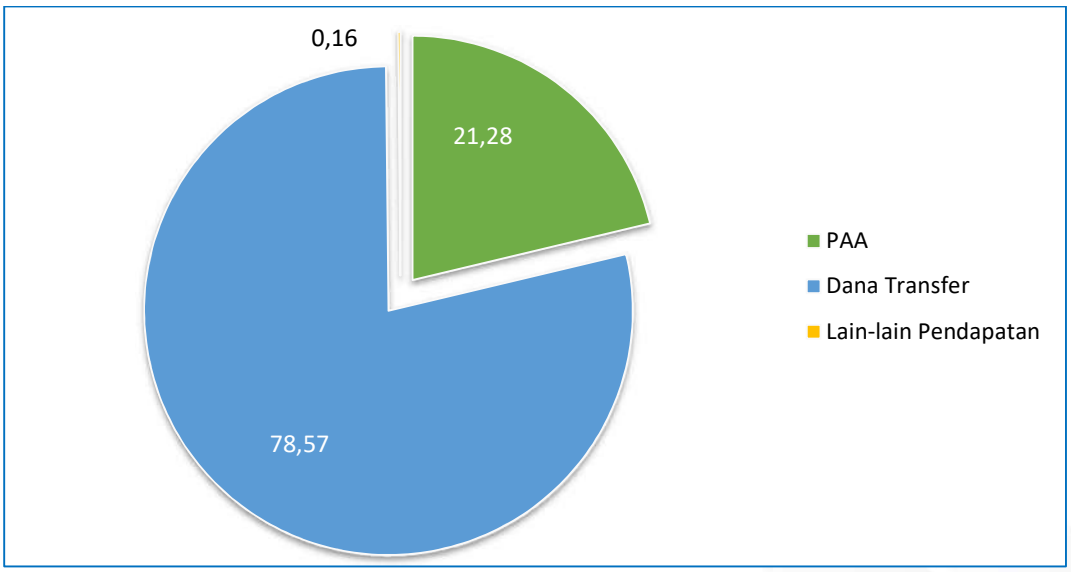


**Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)**

**Gambar 2.81. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2022**

#### 2.2.1.2 Realisasi Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 jenis belanja daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur jenis belanja menjadi 4 jenis belanja.

Realisasi Belanja Aceh tahun 2022 (sampai dengan periode pelaporan) mencapai 94,41 persen dari proyeksi. Realisasi Belanja Operasi merupakan belanja dengan capaian realisasi tertinggi yaitu sebesar 95,24 persen terhadap proyeksi RKPA tahun 2022.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.122.

**Tabel 2.122.**
**Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2022**

| No | Jenis Belanja | Target RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi | | | | Jumlah Realisasi Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **10.360.629.614.682** | **3.198.161.526.919** | **30,87** | **6.669.441.110.007** | **64,37** | **9.867.602.636.925** | 95,24 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.902.060.457.338 | 1.143.633.510.040 | 39,41 | 1.528.893.498.912 | 52,68 | 2.672.527.008.952 | 92,09 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.997.513.034.096 | 1.772.349.690.214 | 29,55 | 4.205.165.243.916 | 70,12 | 5.977.514.934.131 | 99,67 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 9.652.608.000 | 1.804.317.000 | 18,69 | 11.420.966.500 | 118,32 | 13.225.283.500 | 137,01 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.051.567.095.199 | 229.431.577.788 | 21,82 | 795.842.683.336 | 75,68 | 1.025.274.261.123 | 97,50 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 399.836.420.049 | 50.942.431.877 | 12,74 | 128.118.717.342 | 32,04 | 179.061.149.219 | 44,78 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **3.123.715.746.601** | **681.587.012.903** | **21,82** | **2.171.982.389.217** | **69,53** | **2.853.569.402.120** | 91,35 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 51.669.030.643 | 80.660.000 | 0,16 | 45.842.536.963 | 88,72 | 45.923.196.963 | 88,88 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 341.149.530.428 | 104.615.339.403 | 30,67 | 240.533.973.911 | 70,51 | 345.149.313.315 | 101,17 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 917.514.831.483 | 71.675.071.042 | 7,81 | 755.998.029.545 | 82,40 | 827.673.100.586 | 90,21 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.672.784.380.644 | 470.554.933.621 | 28,13 | 1.049.091.175.967 | 62,72 | 1.519.646.109.587 | 90,85 |

| No | Jenis Belanja | Target RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi | | | | Jumlah Realisasi Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 140.597.973.403 | 34.661.008.837 | 24,65 | 80.516.672.832 | 57,27 | 115.177.681.669 | 81,92 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **23.867.364.484** | **623.500.000** | **2,61** | **3.711.530.000** | **15,55** | **4.335.030.000** | 18,16 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 23.867.364.484 | 623.500.000 | 2,61 | 3.711.530.000 | 15,55 | 4.335.030.000 | 18,16 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **3.198.492.023.666** | **895.868.671.113** | **28,01** | **2.150.773.527.300** | **67,24** | **3.046.642.198.413** | 95,25 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 733.192.969.514 | 369.751.818.420 | 50,43 | 395.224.703.839 | 53,90 | 764.976.522.259 | 104,33 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.465.299.054.152 | 526.116.852.693 | 21,34 | 1.755.548.823.461 | 71,21 | 2.281.665.676.154 | 92,55 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **16.706.704.749.433** | **4.776.240.710.934** | **28,59** | **10.995.908.556.524** | **65,82** | **15.772.149.267.459** | **94,41** |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Jumlah realisasi Belanja Aceh Tahun 2022 sebesar Rp. 15,772 Triliun atau mencapai 94,41 persen dari proyeksi RKPA 2022 yang ditetapkan sebesar Rp.16,707 Triliun. Jumlah realisasi belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 9,868 Triliun atau sebesar 95,24 persen, Belanja Modal sebesar Rp. 2,854 Triliun atau sebesar 91,35 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 0,004 Triliun atau sebesar 18,16 persen dan Belanja Transfer sebesar Rp. 3,047 Triliun atau sebesar 95,25 persen terhadap proyeksi RKPA 2022.

Dari gambaran realisasi tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2022 sudah optimal dilaksanakan, hal ini terlihat dari realisasi belanja Aceh sebesar 94,41 persen demikian pula dengan capaian belanja modal tercatat sebesar 91,35 persen dari target RKPA dan tertinggi sejak tahun 2019.

Berdasarkan realisasi semester II tahun 2022, struktur realisasi belanja Aceh didominasi oleh belanja operasi (62,56 persen), diikuti oleh belanja transfer (19,32 persen), belanja modal (18,09 persen), dan belanja tidak terduga (0,03 persen).

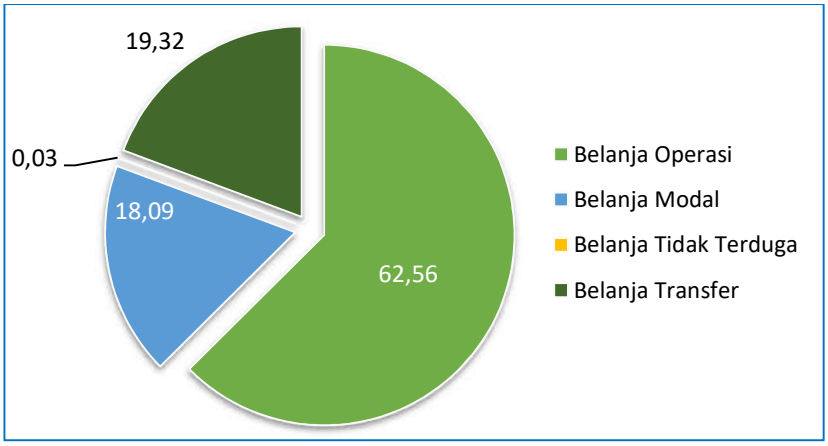


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah)

**Gambar 2.82. Struktur Belanja Aceh Tahun 2022**

### 2.2.1.3 Realisasi Pembiayaan

Sampai dengan semester II tahun 2022, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 3,364 Triliun berasal dari penggunaan SILPA Tahun lalu dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari sisi penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi dari pengeluaran pembiayaan berasal dari realisasi pembentukan dana cadangan dan realisasi penyertaan modal daerah. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat dapat dilihat Tabel berikut.

**Tabel 2.123.**
**Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2022**

| No | Uraian | Target RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi | | | | Jumlah Realisasi Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.01 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 3.934.177.112.703 | 3.933.680.612.390 | 99,99 | 1.003.638.587 | 0,03 | 3.934.684.250.977 | 100,01 |
| 3.01.01 | Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya | 3.933.680.612.390 | 3.933.680.612.390 | 100,00 | - | - | 3.933.680.612.390 | 100,00 |
| 3.01.05 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | 496.500.313 | - | - | 1.003.638.587 | 202,14 | 1.003.638.587 | 202,14 |
| 3.02 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 585.000.000.000 | - | | 570.427.514.078 | 97,51 | 570.427.514.078 | 97,51 |
| 3.02.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 65.000.000.000 | - | - | 50.427.514.078 | 77,58 | 50.427.514.078 | 77,58 |
| 3.02.02 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh | 520.000.000.000 | - | - | 520.000.000.000 | 100,00 | 520.000.000.000 | 100,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **3.349.177.112.703** | **3.933.680.612.390** | **117** | **(569.423.875.491)** | | **3.364.256.736.900** | **100,45** |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

### 2.2.1.4 Trend APBA

Berdasarkan data realisasi APBA kurun waktu 2017-2022, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

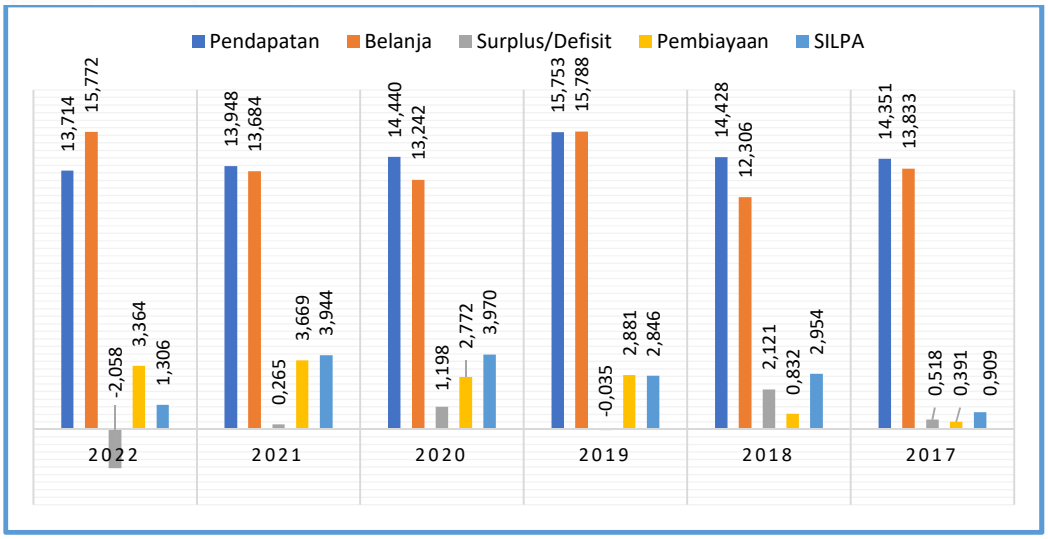


**Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (2017-2022 audited, 2022 angka sementara)**

**Gambar 2.83. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2017-2022 (Dalam Triliun Rupiah)**

Dari gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2017 hingga 2019 terjadi peningkatan pendapatan daerah, namun pendapatan mengalami penurunan mulai di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disebabkan oleh penurunan penerimaan dana otonomi khusus Aceh. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 15,753 triliun sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2022 hanya sebesar Rp 13,714 triliun. Trend belanja daerah mengalami fluktuatif, realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2018. Trend realisasi surplus menunjukkan fluktuatif, defisit terjadi pada tahun 2019 dan 2022. Demikian pula dengan Pembiayaan daerah netto menunjukkan trend yang fluktuatif, pembiayaan netto tertinggi terjadi pada tahun 2022. Trend SILPA selama periode tahun 2017-2022 juga menunjukkan fluktuatif, pada tahun 2020 SILPA tercatat paling tinggi dibandingkan tahun yang lain, salah satunya disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan proyek-proyek pembangunan akibat pembatasan sosial bersekala besar, adanya refocusing anggaran dan lain-lain.

### 2.2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

#### 2.2.2.1 Metode Evaluasi

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Jenis belanja yang dievaluasi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022. Penentuan predikat, ditetapkan berdasarkan kiteria yang telah diatur seperti yang terlihat pada Tabel 2.124.

**Tabel 2.124.**
**Kriteria Kinerja**

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | KODE |
|---|---|---|---|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | ST |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi | T |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang | S |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah | R |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah | SR |

### 2.2.2.2 Hasil Evaluasi

#### 2.2.2.2.1 Capaian Anggaran

Target anggaran RPJMA 2017-2022 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, dengan target alokasi anggaran sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 48.358.533.415.075, dan target alokasi anggaran di tahun 2022 sebesar Rp. 16,707 Triliun dengan tingkat realisasi keuangan sampai dengan Semester II Tahun 2022 sebesar 94,41 persen dengan kriteria nilai sangat tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan anggarannya sudah optimal dilakukan, sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2022 merupakan tahap akhir pelaksanaan RPJMA 2017-2022.

Secara lebih terperinci mengenai kondisi penggunaan anggaran untuk membiaya program/kegiatan selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.125.

**Tabel 2.125.**
**Tingkat Capaian Realisasi RPJMA (2018 s.d. 2022)**

| No | Uraian | Target Anggaran RPJMA 2018 s.d 2022 | Target Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s.d 2020 | Realisasi RKPA Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s.d 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah (Rp) | | 48.358.533.415.075 | 16.706.704.749.433 | 37.752.269.336.922 | 15.772.149.267.459 | 53.524.418.604.381 |
| Persentase (%) | | 100 | 34,55 | 78,07 | 94,41 | 110,68 |

| No | Uraian | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA 2018 s.d 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Persentase (%) | | 90,60 | 94,41 | 90,61 | 110,68 |
| Predikat Kinerja | | ST | **ST** | ST | **ST** |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
T = Tinggi (76% ≤ 90%)
S = Sedang (66% ≤ 75%)
R = Rendah (51% ≤ 65%)
SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Ditinjau secara lebih spesifik dari kinerja yang dicapai dari hasil pelaksanaan RKPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan mencapai 94,41 persen dengan nilai kriteria Sangat Tinggi.
b. Rata-rata tingkat capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 90,60 persen dengan nilai kriteria Tinggi.
c. Urusan yang memiliki nilai realisasi tertinggi adalah unsur pengawasan urusan pemerintahan dengan tingkat realisasi sebesar 95,29 persen dari Target Anggran RKPA Tahun 2022, sedangkan urusan dengan nilai realisasi terendah adalah Unsur Kekhususan dan Keistimewaan Aceh yang hanya mencapai 65,92 persen terhadap Target Anggran RKPA Tahun 2022.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai tingkat realisasi anggaran pada RKPA Tahun 2022 berdasarkan masing-masing urusan/bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 2.126.

**Tabel 2.126.**
**Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2022**
**Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA-P 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA-P 2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **9.458.067.355.630** | **9.125.434.235.204** | **86,46** | **96,48** | **T** | **ST** |
| 1 | 1.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 3.559.775.564.406 | 3.373.569.133.200 | 78,59 | 94,77 | T | ST |
| 2 | 1.02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 2.096.359.043.117 | 2.141.834.146.058 | 88,66 | 102,17 | T | ST |
| 3 | 1.03 | Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 1.768.762.919.024 | 1.699.136.405.045 | 85,51 | 96,06 | T | ST |
| 4 | 1.04 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 1.797.356.281.810 | 1.686.790.459.475 | 90,53 | 93,85 | ST | ST |
| 5 | 1.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 103.747.469.171 | 100.616.139.186 | 93,00 | 96,98 | ST | ST |
| 6 | 1.06 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 132.066.078.102 | 123.487.952.240 | 89,00 | 93,50 | T | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA-P 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA-P 2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **1.165.158.574.183** | **1.134.275.282.387** | **86,85** | **97,35** | **T** | **ST** |
| 7 | 2.07 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 48.982.563.087 | 45.027.016.188 | 93,00 | 91,92 | ST | ST |
| 8 | 2.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 18.604.484.228 | 17.268.120.695 | 85,00 | 92,82 | T | ST |
| 9 | 2.09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 33.786.566.068 | 33.335.294.976 | 97,13 | 98,66 | ST | ST |
| 10 | 2.10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 13.999.638.000 | 12.356.022.683 | 88,00 | 88,26 | T | T |
| 11 | 2.11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 116.015.260.422 | 115.837.686.858 | 79,18 | 99,85 | T | ST |
| 12 | 2.12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 14.610.516.716 | 14.363.599.291 | 89,40 | 98,31 | T | ST |
| 13 | 2.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan | 33.948.093.448 | 31.801.605.048 | 112,92 | 93,68 | ST | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA-P 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA-P 2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Masyarakat dan Desa | | | | | | |
| 14 | 2.14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | |
| 15 | 2.15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 128.608.131.574 | 120.037.854.524 | 100,71 | 93,34 | ST | ST |
| 16 | 2.16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | 48.353.607.451 | 46.077.369.226 | 108,85 | 95,29 | ST | ST |
| 17 | 2.17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 182.429.481.350 | 174.077.296.615 | 87,00 | 95,42 | T | ST |
| 18 | 2.18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 37.180.778.725 | 36.331.280.600 | 90,00 | 97,72 | T | ST |
| 19 | 2.19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 250.805.169.131 | 258.313.200.101 | 81,00 | 102,99 | T | ST |
| 20 | 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | 902.753.156 | 883.099.352 | 103,66 | 97,82 | ST | ST |
| 21 | 2.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | 648.813.500 | 639.195.366 | 40,23 | 98,52 | SR | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA-P 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA-P 2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | 2.22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 132.009.375.687 | 128.354.142.071 | 81,50 | 97,23 | T | ST |
| 23 | 2.23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 101.833.644.859 | 97.217.549.074 | 93,00 | 95,47 | ST | ST |
| 24 | 2.24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 2.439.696.781 | 2.354.949.718 | 96,03 | 96,53 | ST | ST |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | **966.540.440.308** | **942.911.139.602** | **90,71** | **97,56** | **ST** | **ST** |
| 25 | 3.25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | 224.224.003.790 | 215.777.434.107 | 104,63 | 96,23 | ST | ST |
| 26 | 3.26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 90.926.169.375 | 88.290.343.083 | 92,00 | 97,10 | ST | ST |
| 27 | 3.27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 432.798.726.148 | 417.643.256.659 | 90,00 | 96,50 | T | ST |
| 28 | 3.28 | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | 87.720.767.827 | 85.243.739.143 | 89.57 | 97,18 | ST | ST |
| 29 | 3.29 | Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 52.373.367.482 | 53.120.165.778 | 86,22 | 101,43 | T | ST |
| 30 | 3.30 | Urusan Pemerintahan | 42.119.293.565 | 47.996.305.385 | 82,00 | 113,95 | T | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA-P 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA-P 2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Bidang Perdagangan | | | | | | |
| 31 | 3.31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 21.435.531.775 | 20.178.459.301 | 91,23 | 94,14 | ST | ST |
| 32 | 3.32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | 14.942.580.346 | 14.661.436.146 | 90,02 | 98,12 | ST | ST |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **510.562.922.935** | **462.920.248.912** | **96,01** | **90,67** | **ST** | **ST** |
| 33 | 4.01 | Sekretariat Daerah | 281.098.711.579 | 259.001.091.545 | 68,80 | 92,14 | S | ST |
| 34 | 4.02 | Sekretariat DPRD | 229.464.211.356 | 203.919.157.367 | 123,21 | 88,87 | ST | T |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **3.829.662.918.375** | **3.573.553.872.125** | **88,56** | **93,31** | **T** | **ST** |
| 35 | 5.01 | Perencanaan | 71.872.138.685 | 64.737.677.700 | 68,84 | 90,07 | S | ST |
| 36 | 5.02 | Keuangan | 3.484.860.703.556 | 3.245.684.159.699 | 93,21 | 93,14 | ST | ST |
| 37 | 5.03 | Kepegawaian | 33.257.235.033 | 30.431.323.639 | 89,00 | 91,50 | T | ST |
| 38 | 5.04 | Pendidikan dan Pelatihan | 192.806.545.933 | 183.057.055.339 | 95,00 | 94,94 | ST | ST |
| 39 | 5.05 | Penelitian dan Pengembangan *) | 7.630.120.398 | 7.145.756.299 | 99,98 | 93,65 | ST | ST |
| 40 | 5.06 | Penghubung | 39.236.174.770 | 42.497.899.449 | 96,75 | 108,31 | ST | ST |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | **51.693.932.000** | **49.261.634.071** | **95,90** | **95,29** | **ST** | **ST** |
| 41 | 6.01 | Inspektorat Daerah | 51.693.932.000 | 49.261.634.071 | 95,90 | 95,29 | ST | ST |
| **VII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | **40.127.701.755** | **32.334.598.722** | **90,00** | **80,58** | **T** | **T** |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA-P 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA-P 2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 8.01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 40.127.701.755 | 32.334.598.722 | 90,00 | 80,58 | T | T |
| **VIII** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | **684.890.904.247** | **451.458.256.436** | **90,29** | **65,92** | **ST** | **S** |
| 43 | 9.01 | Kekhususan Aceh | | | | | | |
| | | Pendidikan | - | - | | | | |
| | | Kebudayaan | 45.457.160.000 | 44.149.689.524 | 85,67 | 97,12 | T | ST |
| | | Keagamaan | 472.710.080.655 | 247.759.595.405 | 100,00 | 52,41 | ST | R |
| | | Kesatuan dan Perdamaian | 166.723.663.592 | 159.548.971.507 | 100,00 | 95,70 | ST | ST |
| **Jumlah** | | | **16.706.704.749.433** | **15.772.149.267.459** | | | | |
| **Rata-Rata** | | | | | **90,60** | **94,99** | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | ST | ST |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Berdasarkan strukturnya, realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2022 yang terbesar adalah pendanaan untuk bidang urusan wajib pelayanan dasar yaitu sebesar Rp. 9,125 Triliun atau sebesar 57,86 persen dari total realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2022, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urutan kedua adalah urusan penunjang urusan pemerintahan dengan tingkat capaian sebesar 22,66 persen atau sebesar Rp. 3,574

Triliun, meliputi bidang Perencanaan, bidang Keuangan, bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan serta bidang penghubung. Ketiga adalah urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan tingkat capaian sebesar 7,19 persen atau sebesar Rp. 1,134 Trilliun, meliputi bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada gambar 2.84. dibawah ini.

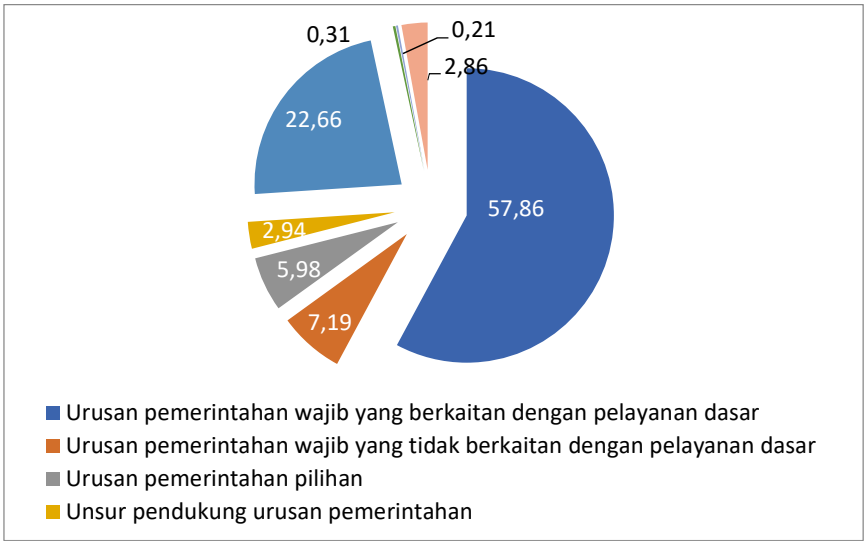


**Gambar 2.84. Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2022**

Tingkat Penggunaan anggaran RPJMA disajikan pada Tabel 2.135. Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan RPJMA mencapai 110,68 persen dengan nilai kriteria Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata capaian kinerja anggaran program/kegiatan mencapai 90,61 persen dengan nilai kriteria Tinggi. Jumlah anggaran RPJMA menggunakan pagu RPJMA berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Sampai dengan tahun 2022, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan urusan dengan tingkat realisasi RPJMA tertinggi yaitu sebesar 461,20 persen dan Urusan Pemerintahan Pilihan memiliki tingkat realisasi RPJMA terendah atau sebesar 65,64 persen. Sedangkan berdasarkan distribusi belanjanya, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan realisasi belanjanya terbesar yaitu

sebesar Rp. 35,143 Triliun atau sebesar 65,66 persen dari total realisasi RPJMA Tahun 2018 s/d 2021.

Pemerintah Aceh tidak melakukan perubahan RPJMA 2017-2022 terhadap beberapa peraturan yang sudah berubah seperti (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun hasil realisasi anggaran program dan kegiatan disesuaikan dengan realisasi APBA, sedangkan hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan disesuaikan berdasarkan sandingan program dan kegiatan.

**Tabel 2.127.**
**Tingkat Capaian Realisasi RPJMA 2018-2022**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **33.355.902.529.973** | **26.017.683.571.128** | **9.125.434.235.204** | **35.143.117.806.332** | **86,53** | **105,36** | **T** | **ST** |
| 1 | 1.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 9.037.329.629.489 | 9.118.124.720.802 | 3.373.569.133.200 | 12.491.693.854.002 | 78,59 | 138,22 | T | ST |
| 2 | 1.02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 8.923.075.582.655 | 7.979.122.753.772 | 2.141.834.146.058 | 10.120.956.899.830 | 89,00 | 113,42 | T | ST |
| 3 | 1.03 | Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 10.549.658.138.740 | 5.631.855.608.109 | 1.699.136.405.045 | 7.330.992.013.154 | 85,51 | 69,49 | T | S |
| 4 | 1.04 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 3.319.747.211.754 | 2.408.337.516.447 | 1.686.790.459.475 | 4.095.127.975.922 | 90,53 | 123,36 | ST | ST |
| 5 | 1.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 667.615.558.285 | 367.896.990.286 | 100.616.139.186 | 468.513.129.472 | 93,00 | 70,18 | ST | S |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | |
| 6 | 1.06 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 858.476.409.051 | 512.345.981.712 | 123.487.952.240 | 635.833.933.952 | 89,00 | 74,07 | T | S |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **4.805.278.354.535** | **2.688.958.578.359** | **1.134.275.282.387** | **3.823.233.860.746** | **86,85** | **79,56** | **T** | **T** |
| 7 | 2.07 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 274.539.845.888 | 127.825.867.143 | 45.027.016.188 | 172.852.883.332 | 93,00 | 62,96 | ST | R |
| 8 | 2.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 64.941.974.873 | 45.088.174.173 | 17.268.120.695 | 62.356.294.868 | 85,00 | 96,02 | T | ST |
| 9 | 2.09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 318.387.976.142 | 135.854.554.461 | 33.335.294.976 | 169.189.849.437 | 97,13 | 53,14 | ST | R |
| 10 | 2.10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 61.951.115.000 | 32.041.278.666 | 12.356.022.683 | 44.397.301.349 | 88,00 | 71,67 | T | S |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 2.11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 370.006.872.227 | 172.974.977.264 | 115.837.686.858 | 288.812.664.123 | 79,18 | 78,06 | T | T |
| 12 | 2.12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 83.772.451.436 | 45.205.734.133 | 14.363.599.291 | 59.569.333.424 | 89,40 | 71,11 | T | S |
| 13 | 2.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 132.740.100.002 | 120.205.648.708 | 31.801.605.048 | 152.007.253.756 | 112,92 | 114,51 | ST | ST |
| 14 | 2.14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | - | - | - | | | | |
| 15 | 2.15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 1.261.193.154.416 | 630.418.652.021 | 120.037.854.524 | 750.456.506.545 | 100,71 | 59,50 | ST | R |
| 16 | 2.16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | 225.289.248.364 | 149.163.713.235 | 47.599.663.944 | 196.763.377.179 | 108,85 | 87,34 | ST | T |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | 2.17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 359.951.935.190 | 156.686.589.422 | 174.077.296.615 | 330.763.886.037 | 87,00 | 91,89 | T | ST |
| 18 | 2.18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 138.171.108.465 | 108.144.794.737 | 36.331.280.600 | 144.476.075.337 | 90,00 | 104,56 | T | ST |
| 19 | 2.19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 686.544.376.919 | 475.454.768.748 | 258.313.200.101 | 733.767.968.849 | 81,00 | 106,88 | T | ST |
| 20 | 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | - | - | - | - | | - | | |
| 21 | 2.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | - | - | - | - | | - | | |
| 22 | 2.22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 305.847.910.050 | 236.295.114.575 | 128.354.142.071 | 364.649.256.645 | 81,50 | 119,23 | T | ST |
| 23 | 2.23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 319.424.616.241 | 207.650.907.335 | 97.217.549.074 | 304.868.456.409 | 94,54 | 95,44 | ST | ST |
| 24 | 2.24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 202.515.669.322 | 45.947.803.739 | 2.354.949.718 | 48.302.753.457 | 96,03 | 23,85 | ST | SR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | **5.945.005.436.590** | **2.959.417.511.040** | **942.911.139.602** | **3.902.328.650.642** | **90,71** | **65,64** | **ST** | **S** |
| 25 | 3.25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | 1.400.830.629.867 | 717.222.832.216 | 215.777.434.107 | 933.000.266.323 | 104,63 | 66,60 | ST | S |
| 26 | 3.26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 563.588.553.777 | 165.588.014.543 | 88.290.343.083 | 253.878.357.626 | 89,00 | 45,05 | T | SR |
| 27 | 3.27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 2.057.443.307.741 | 1.251.901.757.433 | 417.643.256.659 | 1.669.545.014.092 | 90,00 | 81,15 | T | T |
| 28 | 3.28 | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | 702.933.943.478 | 332.196.940.552 | 85.243.739.143 | 417.440.679.694 | 87,09 | 59,39 | T | R |
| 29 | 3.29 | Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 339.305.472.437 | 193.546.972.571 | 53.120.165.778 | 246.667.138.349 | 86,22 | 72,70 | T | S |
| 30 | 3.30 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 273.592.638.166 | 109.687.604.599 | 47.996.305.385 | 157.683.909.984 | 82,00 | 57,63 | T | R |
| 31 | 3.31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 292.237.486.089 | 84.940.247.869 | 20.178.459.301 | 105.118.707.170 | 91,00 | 35,97 | ST | SR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | 3.32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | 315.073.405.035 | 104.333.141.258 | 14.661.436.146 | 118.994.577.404 | 93,56 | 37,77 | ST | SR |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **1.292.995.059.996** | **1.149.834.457.406** | **462.920.248.912** | **1.612.754.706.317** | **96,01** | **124,73** | **ST** | **ST** |
| 33 | 4.01 | Sekretariat Daerah | 890.762.027.975 | 715.724.189.856 | 259.001.091.545 | 974.725.281.400 | 68,80 | 109,43 | S | ST |
| 34 | 4.02 | Sekretariat DPRD | 402.233.032.021 | 434.110.267.550 | 203.919.157.367 | 638.029.424.917 | 123,21 | 158,62 | ST | ST |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **1.645.675.078.037** | **4.016.226.290.449** | **3.573.553.872.125** | **7.589.780.162.574** | **88,56** | **461,20** | **T** | **ST** |
| 35 | 5.01 | Perencanaan | 254.873.678.068 | 156.018.456.103 | 71.883.433.999 | 227.901.890.102 | 68,84 | 89,42 | S | T |
| 36 | 5.02 | Keuangan | 393.408.672.824 | 3.271.260.410.320 | 3.245.684.159.699 | 6.516.944.570.019 | 93,21 | 1656,53 | ST | ST |
| 37 | 5.03 | Kepegawaian | 158.832.921.217 | 63.543.510.305 | 30.431.323.639 | 93.974.833.944 | 89,00 | 59,17 | T | R |
| 38 | 5.04 | Pendidikan dan Pelatihan | 790.637.572.338 | 450.220.894.384 | 183.057.055.339 | 633.277.949.723 | 95,00 | 80,10 | ST | T |
| 39 | 5.05 | Penelitian dan Pengembangan *) | | - | - | | - | | | |
| 40 | 5.06 | Penghubung | 47.922.233.590 | 75.183.019.337 | 42.497.899.449 | 117.680.918.786 | 96,75 | 245,57 | ST | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | **83.667.489.701** | **80.447.567.711** | **49.261.634.071** | **129.709.201.782** | **95,90** | **155,03** | **ST** | **ST** |
| 41 | 6.01 | Inspektorat Daerah | 83.667.489.701 | 80.447.567.711 | 49.261.634.071 | 129.709.201.782 | 95,90 | 155,03 | ST | ST |
| **VII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | **93.520.170.029** | **69.720.450.788** | **32.334.598.722** | **102.055.049.510** | **90,00** | **109,13** | **T** | **ST** |
| 42 | 8.01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 93.520.170.029 | 69.720.450.788 | 32.334.598.722 | 102.055.049.510 | 90,00 | 109,13 | T | ST |
| **VIII** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | **1.136.489.296.214** | **769.980.910.041** | **451.458.256.436** | **1.221.439.166.477** | **90,29** | **107,47** | **ST** | **ST** |
| 43 | 9.01 | Kekhususan Aceh | | | | | | | | |
| | | Pendidikan | - | - | - | - | | | | |
| | | Kebudayaan | 190.401.709.954 | 142.741.033.586 | 44.149.689.524 | 186.890.723.110 | 100,00 | 98,16 | ST | ST |
| | | Keagamaan | 906.345.702.510 | 543.643.821.713 | 247.759.595.405 | 791.403.417.118 | 100,00 | 87,32 | ST | T |
| | | Kesatuan dan Perdamaian | 39.741.883.750 | 83.596.054.742 | 159.548.971.507 | 243.145.026.249 | 93,00 | 611,81 | ST | ST |
| **Jumlah** | | | **48.358.533.415.075** | **37.752.269.336.922** | **15.772.149.267.459** | **53.524.418.604.381** | | | | |
| **Rata-Rata** | | | | | | | **90,61** | **110,68** | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2021 (Audited) | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2022 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Kinerja** | | | | | | | | | ST | ST |

Sumber: BPKA (diolah),2022

Keterangan :

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

#### 2.2.2.2.2 Capaian Kinerja

Berdasarkan data tersebut di atas, tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan Semester II tahun 2022 RKPA sebesar 90,60 persen sedangkan Kinerja capaian RPJMA sampai dengan Semester II tahun 2022 tercatat sebesar 90,64 persen.

Capaian realisasi kinerja belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya disebabkan RPJMA 2017-2022 tidak dilakukan perubahan karena adanya beberapa peraturan yang berubah seperti (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hal ini mengakibatkan tidak konsistennya antara indikator kinerja renstra dengan indikator kinerja renja SKPA, sehingga kinerja pelaksanaan RKPA 2022 belum mencerminkan nilai kinerja yang sesungguhnya untuk setiap program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

### 2.2.3 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO TERHADAP RKPA TAHUN 2023

#### 2.2.3.1 Capaian Tahun 2022

Untuk melihat keberhasilan pembangunan Aceh Secara makro ditunjukkan oleh tingkat capaian indikator pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target indikator pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan Aceh. Terdapat 6 (enam) jenis indikator yang ditetapkan dalam dokumen RKPA Tahun 2023. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan sebagian dari yang diproyeksikan/ditargetkan pada Tahun 2022 telah mencapai target (notifikasi warna hijau), sedangkan sebagian indikator lainnya tidak tercapai (notifikasi warna kuning). Tabel 3.1. memberikan informasi tentang realisasi indikator makro terhadap target yang telah ditetapkan dalam RKPA Tahun 2023. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan capaian indikator pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Migas dan PDRB Tanpa Migas Aceh yang dihitung atas dasar harga konstan selama tiga tahun terakhir (2018-2019) mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun berbeda dalam tahun 2020 PDRB Migas dan non migas mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 131,58 triliyun dengan migas dan sebesar Rp. 124,98 triliun dengan tanpa migas. Tahun 2019 PDRB Migas tercatat sebesar Rp. 132,07 triliun dan tanpa migas sebesar Rp. 125,91 triliun. Penurunan ini disebabkan karena kejadian pendemi covid-19 di dunia yang menyebabkan kinerja

ekspor, investasi, parawisata, konsumsi rumah tangga dunia dan lainnya mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, PDRB Aceh meningkat kembali masing-masing sebesar Rp. 135,25 triliun dan Rp. 140.95 triliun seiring dengan dampak pemulihan ekonomi pasca covid-19.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh masih dalam proyeksi RKPA 2023 yaitu sebesar 3,75-4,16 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,21 persen. Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) Lapangan Usaha dengan kontribusi tertinggi disumbangkan oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27.68 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13.87 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 9.99 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8.86 persen.

Dari sisi PDRB pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi perekonomian Aceh dengan konstribusinya pada tahun 2022 (ADHK) sebesar 54,15 persen, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2020 tercatat sebesar 55,69 persen dan pada tahun 2021 yang tercatat konstribusinya sebesar 54,80 persen.

Komponen pembentukan modal tetap bruto memiliki konstribusi terbesar kedua. Dalam kurun waktu 2018 s.d. 2020 komponen ini menunjukkan peningkatan masing-masing tercatat sebesar 32,15 persen dan 34,23 persen, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 33,60 persen dan berlanjut pada tahun 2022 yaitu sebesar 32,02 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki kontribusi terbesar ketiga. Dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, komponen ini menunjukkan fluktuatif dengan realisasi masing-masing sebesar 16,88 persen pada tahun 2020, sebesar 16,83 persen pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 15,57 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2020 penurunan kontribusi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah disebabkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19, namun di tahun 2021 terjadi peningkatan terhadap komponen ini disebabkan karena dipengaruhi oleh peningkatan realisasi APBA, APBK dan APBN di Aceh. Di lihat dari APBA, Realisasi belanja Pemerintah Aceh hingga akhir tahun 2021 tercatat sebesar 83,02 atau setara dengan Rp. 13,683 Triliun (*audited*). Sementara pada tahun 2020 tercatat sebesar 83,66 persen atau setara dengan Rp 13,242 Triliun (*audited*). Realisasi tersebut menurun bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2019 yang berhasil menyentuh angka 91,11 persen atau setara dengan Rp15,788 triliun (*audited*). Perlambatan realisasi belanja tersebut utamanya tidak terlepas dari adanya refocusing anggaran pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 serta adanya

perubahan prosedur dalam proses realisasi anggaran yang menghambat realisasi belanja daerah. Realisaasi APBA tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 2.85.

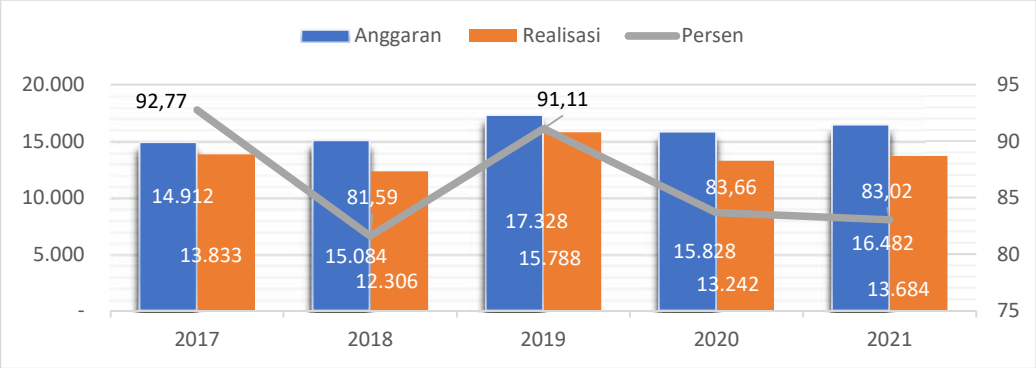


Sumber: BPKA

**Gambar 2.85. Anggaran dan Realisasi Belanja APBA (Rp. Triliun) Tahun 2017-2021**

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Aceh yang diproyeksikan dalam RKPA Tahun 2022 pada tahun 2021 sebesar 13,43 persen belum memenuhi harapan, berdasarkan rilis BPS, Tingkat Kemiskinan Aceh kondisi September 2021 tercatat sebesar 15,53 persen. Hali ini disebabkan karena tingkat kemiskinan masih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh. Dalam kurun waktu 2018-2021 tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,15 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2021 ini berada cukup jauh di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 9,71 persen.

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2021 sebanyak 850,26 ribu orang dan menunjukkan peningkatan sebanyak 16,35 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 833,91 ribu orang (kondisi September). Dalam kurun waktu 2017-2021 jumlah penduduk miskin di Aceh berfluktuatif (kondisi September), pada tahun 2017 tercatat sebanyak 829,80 ribu orang, meningkat menjadi 831,50 ribu orang pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun menjadi sebanyak 809,76 ribu orang.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Barat. Sedangan dari sisi tingkat kemiskinan yang tinggi lebih tekonsentrasi di Kabupaten Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie Jaya, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Simeulue, dan Subulussalam. Berdasarkan hal tersebut, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada daerah dengan kantong kemiskinan tertinggi.

Komoditi makanan berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin dan listrik. Pada September 2021, peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 75,65 persen sementara sumbangan garis kemiskinan bukan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 24,35 persen.

Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,863 pada Maret 2021 menjadi 2,952 pada September 2021. Pada periode yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,749 menjadi 0,813. Meningkatnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, demikian pula dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin besar. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan turun dari 1,793 menjadi 1,702 sedangkan di perdesaan naik dari 3,401 menjadi 3,589. Sementara itu untuk Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama di perkotaan turun dari 0,460 menjadi 0,449 sedangkan di perdesaan naik dari 0,895 menjadi 0,998.

Pengaruh pemerintah terhadap naik turunnya angka kemiskinan masih sangat tinggi, 5 strategi utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh diantaranya (1) mengurangi beban penduduk miskin seperti memberikan beasiswa anak yatim miskin, kesehatan gratis, rumah layak huni, penyambungan arus listrik gratis, sertifikat lahan gratis, mengendali harga pangan strategis dan lain-lain. (2) Meningkatkan pendapatan penduduk miskin yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi (wirausaha baru, pembiayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan & perkebunan, peningkatan pendapatan penduduk petani dan nelayan melalui nilai tambah petani dan nelayan, dan lain-lain, (3) Menguatkan kapasitas penduduk miskin, dengan cara peningkatan skil masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, (4) Menekan biaya transaksi ekonomi, dengan cara meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan (5) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, dengan cara pengendalian inflasi daerah.

Selain bertumpu pada anggaran yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, alokasi anggaran Pemerintah Aceh sebaiknya juga digunakan untuk peningkatan

investasi dan/atau dipergunakan untuk membiayai program-program yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang nantinya akan berdampak pada turunnnya angka kemiskinan seperti untuk mendukung penguatan usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Alasan utamanya antara lain karena kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta sebaran lokasi UMKM yang merata di seluruh daerah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.

Kondisi alam juga mempengaruhi naik turunnya angka kemiskinan di Aceh. Kondisi geografis, geologi, hidrologis dan demografis wilayah Aceh menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia terhadap ancaman berbagai macam bencana. Secara nasional, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan risiko tinggi bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Pemerintah Aceh juga kiranya perlu untuk mendorong perekonomian guna menyediakan lapangan kerja terutama melalui peningkatan investasi PMA dan PMDN dan mendorong sektor swasta untuk ikut serta dalam proses pembangunan di Aceh.

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks gini tahun 2021 sesuai dengan proyeksi RKPA 2022, namun ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi, yang ditunjukkan dengan Rasio Gini Aceh per September 2021 berada pada level 0,323, angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319. Nilai Indek Gini Aceh relatif lebih baik bila dibandingkan dengan Nasional, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh termasuk kategori rendah. Namun kondisi ini juga masih mengindikasikan dan berkorelasi terhadap terjadinya kenaikan angka kemiskinan tahun 2021. Aceh berada pada urutan ke dua belas Gini Ratio terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia.

4. Tingkat Pengangguran

Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan di Aceh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah memenuhi proyeksi dalam RKPA 2022 (tercatat sebesar 6,65 persen), namun TPT pada tahun 2021 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS sebesar 6,30 persen dengan jumlah penduduk menganggur tercatat sejumlah 158.857 jiwa. Secara nasional, TPT Aceh berada di bawah rata-rata TPT Nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, TPT Aceh tahun 2021 turun sebesar 0,29 persen.

Dilihat dari tingkat Pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada tingkat Pendidikan SMK diantara tingkat Pendidikan lainnya atau sebesar 10,55 persen dan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 10,87 persen. Dilihat dengan karakteristik penduduk bekerja di Aceh yaitu sebesar 36,13 persen penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan sebesar

35,57 persen penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Untuk tahun 2022, TPT pada bulan Februari 2022 tercatat sebesar 5,97 persen atau lebih tinggi dari target RKPA 2022 sebesar 0,13 persen. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 2.515 ribu orang, turun 34 ribu orang dibanding Februari 2021.

Sejalan dengan penurunan jumlah Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun sebesar 0,99 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 2.365 ribu orang, turun sebanyak 24 ribu orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (2,93 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (2,30 persen poin). Terdapat 140,1 ribu orang (3,57 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (7,8 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (2,9 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (8,1 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (121 ribu orang).

Berdasarkan Data Statistik, selama periode Agustus 2018 sampai dengan tahun Agustus 2021 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja, demikian pula dengan jumlah penduduk yang menganggur mengalami meningkat. Jumlah angkatan kerja tahun 2018 sebesar 2.396 ribu jiwa meningkat menjadi 2.405 ribu jiwa pada tahun 2019 dan menjadi 2.527 ribu jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebesar 2.244 ribu jiwa meningkat menjadi 2.257 ribu jiwa pada tahun 2019 dan meningkat Kembali pada tahun 2020 menjadi 2.360 ribu jiwa, di sisi lain jumlah penduduk yang menganggur mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang menganggur pada tahun 2018 sebesar 152 ribu jiwa menurun menjadi 148 ribu jiwa pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 167 ribu jiwa. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 yang diproyeksikan pada RKPA Tahun 2022 telah tercapai dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 tercatat selalu mengalami peningkatan. IPM Aceh rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2021 terhadap tahun 2020, IPM Provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,26 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut meningkat jika dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2019-2020 yang tumbuh sebesar 0,13 persen. Indeks Pembangunan Manusia Aceh berstatus “tinggi” dengan nilai 72,18 atau lebih. Namun pencapaian IPM masih di bawah rata-rata nasional.

Pada tahun 2021 dengan melakukan perbandingan pada tahun 2019, komponen-komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. bayi yang baru lahir memiliki

peluang untuk hidup hingga 69,96 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,36 tahun di tahun 2021, meningkat 0,05 tahun dibandingkan 2020. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,37 tahun pada tahun 2021, meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 9,572 ribu rupiah pada 2021, meningkat sebesar Rp. 0,082 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi yang dapat dikendalikan pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,24 persen dan capaiannya sesuai dengan proyeksi RKPA Tahun 2022 yang diproyeksikan terjadi sebesar 1,85 – 2,66 persen. Namun capaian tingkat inflasi masih di bawah rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 (3,59 persen) inflasi tercatat menurun sebesar 1,35 poin, hal ini menunjukkan pengendalian inflasi masih relatif baik.

**Tabel 2.128.**
**Capaian Indikator Tahun 2021 Terhadap Proyeksi RKPA 2022**

| NO | Indikator Makro | Satuan | Realisasi | | Bertambah/ Berkurang | Proyeksi | Capaian 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | | 2021 | Aceh | Nasional |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,14 | -0,37 | (4,51) | 2,30-3,10 | 2,79 | 3,69 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 15,01 | 15,43 | 0,42 | 14,43 | 15,53 | 9,71 |
| 3 | Indeks Gini (Gini Ratio) | Indeks | 0,321 | 0,319 | (0,002) | 0,323 | 0,323 | 0,381 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,17 | 6,59 | 0,42 | 6,65 | 6,30 | 6,49 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 71,90 | 71,99 | 0,09 | 71,85 | 72,18 | 72,29 |
| 6 | Tingkat Inflasi | % | 1,69 | 3,59 | 1,90 | 1,85-2,66 | 2,24 | 1,87 |

Sumber: BPS, 2021

Keterangan : Hijau : tercapai

Kuning : tidak tercapai

#### 2.2.3.2 Capaian Tahun 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa beberapa bagian dari indikator makro yang diproyeksikan pada Tahun 2022 dalam RKPA Tahun 2022 tercatat sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target (notifikasi warna hijau), sedangkan sisanya adalah sebanyak 4 (empat) indikator lain tidak tercapai targetnya di tahun 2022 (notifikasi warna kuning). Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut dapat dilihat Tabel 3.2.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2022 masih di bawah target RKPA 2022. Target pertumbuhan ekonomi Aceh yang ditetapkan dalam RKPA-P adalah sebesar 4,70 persen namun realisasi dalam rilis BPS sebesar 4,21 persen atau kurang 0,49 persen terhadap target RKPA 2022. Adapun lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 32,40 persen, jasa lainnya sebesar 13,59 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 11,25 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi diantaranya jasa keuangan sebesar 5,93 persen dan konstruksi sebesar 2,36 persen.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi menurut pengeluaran terjadi diantaranya pada komponen ekspor barang dan jasa luar negeri yaitu sebesar 20,83 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,13 persen, diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,96 persen, dan komponen impor barang dan jasa luar negeri sebesar 2,58 persen, namun komponen ini merupakan faktor pengurang pada PDRB menurut pengeluaran. Sebaliknya beberapa komponen pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,59 (PK-P) persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,68 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional dimana pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,31 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Aceh pada tahun 2022 tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,79 persen.

Perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 39,02 persen, diikuti oleh perdagangan dan reparasi mobil motor sebesar 21,33 persen, konstruksi sebesar 13,51 persen, administrasi pemerintah sebesar 12,18 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 10,83 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 86,04 persen.

Di sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi perekonomian Aceh dengan andil sebesar 76,32 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 45,13 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 21,94 persen.

Tingkat kemiskinan Aceh yang ditetapkan dalam RKPA-P Tahun 2022 sebesar 13,43 persen tidak tercapai. Berdasarkan rilis BPS, Tingkat Kemiskinan Aceh kondisi September 2022 tercatat sebesar 14,75 persen. Tingkat kemiskinan Aceh belum tercapai masih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh. Dalam kurun waktu 2018-2022 tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,93 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2022 ini berada cukup jauh di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 9,57 persen. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 31,79 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 850,26 ribu orang (kondisi September).

Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kemiskinan Aceh September 2022 antara lain (BPS Aceh, 2022):

1. Inflasi sampai dengan bulan September 2022 tergolong tinggi yaitu sebesar 7,38 persen (*yoy*) Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau (7,93 persen) dan transportasi sebesar 21,00 persen.
2. Garis kemiskinan di Aceh pada September 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,57 persen.
3. Laju pertumbuhan ekonomi year on year triwulan III 2022 sebesar 2,13 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang persentasenya sebesar 3,24 persen. Pada sektor pertanian, yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Aceh pada triwulan III 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan jumlah produksi padi pada September 2022 (sebesar 52,46 ribu ton) yang lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2022 dan September 2021 yang masing-masing produksinya sebesar 207,61 ton dan 150,23 ribu ton gabah kering giling.
4. Laju pertumbuhan year on year triwulan III 2022 pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,01 persen lebih rendah dibanding triwulan I yang sebesar 6,44 persen.
5. Realisasi program penyaluran bantuan sosial dan penyaluran program keluarga harapan (PKH) dalam upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat relatif sudah sangat tinggi.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,201. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,311. Realisasi Gini Ratio Aceh tahun 2022 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RKPA Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu sebesar 0,381, capaian Gini Ratio Aceh sudah lebih baik. Semakin besar nilai Gini Ratio semakin baik ketimpangannya dengan kata lain semakin tinggi koefisien gini maka semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan di Aceh, target Tingkat Pengangguran Terbuka yang sudah ditetapkan dalam RKPA 2022 tidak tercapai, namun dalam tahun 2022 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 (6,30 %). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 yang dirilis oleh BPS sebesar 6,17 persen dengan jumlah penduduk menganggur tercatat sejumlah 157.568 jiwa. Secara nasional, TPT Aceh berada di bawah rata-rata TPT Nasional yang tercatat sebesar 5,86 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, TPT Aceh tahun 2022 turun sebesar 0,13 persen dari tahun sebelumnya. Dilihat dari tingkat Pendidikan, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 10,10 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 2,46 persen. Tahun 2021, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori pendidikan, dengan penurunan terbesar pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 3,10 persen poin. Dilihat dengan karakteristik penduduk bekerja di Aceh yaitu sebesar 40,50 persen penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan sebesar 35,20 persen penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 capaiannya sesuai dengan target RKPA 2022 (notifikasi hijau), namun pencapaian IPM tahun 2022 masih di bawah capaian nasional. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik Kesehatan, Pendidikan maupun pengeluaran per kapita.

Tingkat inflasi yang dapat dikendalikan pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,89 persen dan capaiannya masih di atas target RKPA Tahun 2022 dan RPJMA yang ditargetkan sebesar 1,69 persen. Capaian tingkat inflasi masih di atas rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (2,24 persen) inflasi tercatat meningkat sebesar 3,65 poin, peningkatan inflasi ini sangat dipengaruhi salah satunya oleh peningkatan biaya transportasi dan peningkatan harga bahan bakar minyak.

**Tabel 2.129.**
**Capaian Indikator Tahun 2022 Terhadap**
**Target RKPA 2022**

| NO | Indikator Makro | Satuan | Target | | | Capaian 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RPJMA 2017-2022 | RKPA 2022 | RKPA-P 2022 | Aceh | Nasional |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,00 | 3,73 | 4,70 | 4,21 | 5,31 |

| NO | Indikator Makro | Satuan | Target | | | Capaian 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RPJMA 2017-2022 | RKPA 2022 | RKPA-P 2022 | Aceh | Nasional |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 11,43 | 13,43 | 13,43 | 14,75 | 9,57 |
| 3 | Indeks Gini (Gini Ratio) | Indeks | 0,310 | 0,310 | 0,300 | 0,291 | 0,381 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,00 | 5,60 | 5,60 | 6,17 | 5,86 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73,00 | 72,14 | 72,58 | 72,80 | 72,91 |
| 6 | Tingkat Inflasi | % | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 5,89 | 5,51 |

Sumber: BPS, 2022

Keterangan : Hijau : tercapai

Kuning : tidak tercapai

### 2.2.4 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA TERHADAP RKPA TAHUN 2022

#### 2.2.4.1 Capaian Tahun 2021

Capaian keberhasilan pembangunan Aceh merupakan agregat dari kondisi kinerja makro kabupaten/kota dan menjadi tolak ukur keberhasilan dari segala pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Target indikator makro Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam RKPA Tahun 2022 yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2021, capaian tingkat kemiskinan belum memenuhi proyeksi RKPA Tahun 2022, namun capaian pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah memenuhi proyeksi RKPA Tahun 2022.

Berkenaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2021 terdapat 18 (Delapan belas) kabupaten yang tercapai targetnya sesuai proyeksi RKPA Tahun 2022. Capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Aceh Barat dengan tingkat pencapaiannya sebesar 5,67 persen sedangkan Kabupaten Aceh Utara memperoleh capaian pertumbuhan ekonomi terendah di Aceh, tercatat kontraksi sebesar -0,55 persen.

Capaian tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2021, hanya terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang mencapai target proyeksi RKPA Tahun 2022 yaitu Kabupaten Simeulue dan Aceh Barat Daya. Secara agregat, hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan Aceh mencapai target RKPA Tahun 2022. Terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang angka kemiskinannya di atas angka rata-rata provinsi, bahkan angka kemiskinan di 1 (satu) kabupaten masih di atas 20 persen yaitu Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Aceh yaitu sebesar 20,36 persen, disebabkan oleh karakter wilayahnya yang merupakan wilayah muara beberapa sungai besar di Aceh. Setiap tahun, akibat tingginya curah hujan, wilayah muara ini selalu terdampak banjir. Selain itu, Aceh Singkil juga memiliki wilayah kepulauan yang diantaranya terdapat 6 pulau besar yang dihuni. Akses menuju wilayah pulau tersebut, misalnya dari wilayah kecamatan kuala baru, sangat terbatas dari ibukota kabupaten, sehingga angka kemiskinan juga sangat tinggi. Kota Banda Aceh tercatat dengan tingkat kemiskinan terendah di Aceh.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh yang diproyeksikan pada tahun 2021 memenuhi target RKPA Tahun 2022. Capaian ini juga dipengaruhi oleh tercapainya target tingkat pengangguran terbuka di 15 (lima belas) kabupaten/kota. Jumlah TPT terendah tercatat di Kabupaten Bener Meriah yaitu sebesar 1,24 persen sedangkan yang tertinggi di Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 11,16 persen.

Pencapaian Provinsi Aceh dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia seiring dengan tingkat pencapaian di kabupaten/kota, tercatat sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang capaiannya memenuhi proyeksi RKPA Tahun 2022. Terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang memiliki tingkat capaian IPM di atas rata-rata Aceh, dengan tingkat capaian IPM tertinggi tercatat di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 85,71 persen dan terendah di Kota Subulussalam yaitu sebesar 65,27 persen.

**Tabel 2.130.**
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota**
**Tahun 2021 Terhadap Proyeksi RKPA Tahun 2022**

| NO | Kabupaten/Kota | Indikator Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | Tingkat Kemiskinan (%) | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | Indeks Pembangunan Manusia | |
| | | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Simeulue | 2,50 | 2,85 | 17,76 | 18,98 | 4,91 | 5,71 | 66,38 | 66,41 |

| NO | Kabupaten/Kota | Indikator Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | Tingkat Kemiskinan (%) | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | Indeks Pembangunan Manusia | |
| | | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 2 | Aceh Singkil | 2,25 | 3,90 | 19,41 | 20,36 | 9,80 | 8,36 | 69,94 | 69,22 |
| 3 | Aceh Selatan | 2.23 | 2,46 | 11,93 | 13,18 | 7,04 | 6,46 | 67,29 | 67,44 |
| 4 | Aceh Tenggara | 2.23 | 1,48 | 12,40 | 13,41 | 2,39 | 6,43 | 70,29 | 69,44 |
| 5 | Subulussalam | 2.33 | 3,87 | 13,15 | 17,65 | 8,65 | 6,26 | 68,34 | 65,27 |
| 6 | Pidie Jaya | 1.63 | 2,03 | 14,38 | 19,55 | 5,03 | 3,57 | 73,94 | 73,60 |
| 7 | Banda Aceh | 2.81 | 5,53 | 7,00 | 7,61 | 9,47 | 8,94 | 72,02 | 85,71 |
| 8 | Aceh Timur | 2.30 | 1,94 | 12,52 | 14,45 | 9,21 | 7,13 | 73,95 | 67,83 |
| 9 | Aceh Tengah | 2.35 | 3,21 | 14,10 | 15,26 | 3,00 | 2,61 | 71,11 | 73,37 |
| 10 | Aceh Barat | 2.61 | 5,67 | 17,00 | 18,81 | 6,00 | 7,09 | 73,24 | 71,67 |
| 11 | Aceh Besar | 1.93 | 2,44 | 12,00 | 14,05 | 7,18 | 7,70 | 70,04 | 73,58 |
| 12 | Pidie | 2.46 | 2,63 | 14,91 | 19,59 | 4,51 | 7,28 | 66,88 | 70,70 |
| 13 | Bireuen | 0.42 | 4,13 | 12,00 | 13,25 | 3,00 | 4,32 | 67,33 | 72,33 |
| 14 | Aceh Utara | 2.38 | -0,55 | 12,16 | 17,43 | 7,34 | 8,31 | 69,89 | 69,46 |
| 15 | Aceh Barat Daya | 3.05 | 2,88 | 16,56 | 16,34 | 6,74 | 4,04 | 69,92 | 66,99 |
| 16 | Gayo Lues | 2.04 | 2,32 | 19,00 | 19,64 | 2,00 | 1,84 | 70,32 | 67,56 |
| 17 | Aceh Tamiang | 2.31 | 0,88 | 13,00 | 13,34 | 7,00 | 5,87 | 74,00 | 69,48 |
| 18 | Nagan Raya | 2.20 | 5,34 | 17,98 | 18,23 | 5,38 | 4,99 | 73,55 | 69,31 |
| 19 | Aceh Jaya | 2.25 | 2,59 | 6,08 | 13,23 | 7,73 | 3,47 | 86,04 | 69,84 |
| 20 | Bener Meriah | 2.97 | 3,15 | 14,22 | 19,16 | 4,58 | 1,24 | 76,50 | 73,27 |
| 21 | Sabang | 2.36 | 2,67 | 9,39 | 15,32 | 8,91 | 3,56 | 78,10 | 76,11 |
| 22 | Langsa | 2.20 | 4,23 | 9,99 | 10,96 | 14,34 | 7,21 | 78,50 | 77,44 |
| 23 | Lhokseumawe | 1.91 | 3,84 | 10,50 | 11,16 | 11,00 | 11,16 | 65,00 | 77,57 |
| 24 | Aceh | 2.25 | 2,79 | 14,43 | 15,33 | 6,65 | 6,30 | 71,85 | 72,18 |

Sumber : BPS Aceh

Keterangan : Hijau : Tercapai

Kuning : Tidak tercapai

#### 2.2.4.2 Capaian Tahun 2022

#### 2.2.4.3

Capaian pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jika di bandingkan dengan tahun 2021 peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Barat, Nagan Raya, Kota Subulussalam, Banda Aceh dan Sabang yang pertumbuhannya melambat. Berdasarkan target RKPA Tahun 2022 terdapat 14 kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kota Banda Aceh yang tumbuh sebesar 5,23 persen sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Nagan Raya yang hanya tumbuh sebesar 2,37 persen.

Tingkat kemiskinan di Aceh Kondisi Maret 2022 mengalami perbaikan sebagaimana ditunjukkan dengan perbaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota dan pencapaiannya tidak memenuhi target RKPA 2022. Sesuai dengan target RKPA 2022 terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang tercapai sedangkan 16 (enam belas) kabupaten/kota belum tercapai targetnya. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 19,18 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Banda Aceh sebesar 7,13 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di selutruh kabupaten/kota di Aceh. Penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di Aceh Singkil yaitu sebesar 1,18 persen.

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 (kondisi Agustus 2022) belum memenuhi target RKPA 2022, terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota yang capaian realisasinya sesuai dengan target RKPA 2022 sedangkan 11 (sebelas) kabupaten/kota targetnya tidak tercapai. TPT tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe sebesar 9,15 persen sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah sebesar 2,61 persen.

Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2022 terhadap RKPA 2022 yang tercapai (notifikasi hijau) sejumlah 11 (sebelas) Kabupaten/Kota. Terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki tingkat capaian IPM di atas rata-rata Aceh, dengan tingkat capaian IPM tertinggi tercatat di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 86,28 persen dan terendah di Kota Subulussalam yaitu sebesar 66,20 persen. Semua kabupaten/kota di Aceh mengalami peningkatan IPM, peningkatan tertinggi terjadi di Aceh Tamiang sebesar 0,95 poin.

**Tabel 2.131.**
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota**
**Tahun 2022 Terhadap Target RKPA Tahun 2022**

| NO | Kabupaten/Kota | Indikator Kinerja Tahun 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | Tingkat Kemiskinan Maret (%) | | Tingkat Pengangguran Terbuka, Agust (%) | | Indeks Pembangunan Manusia | |
| | | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Simeulue | 3,85 | 3,62 | 16,52 | 18,37 | 4,00 | 6,00 | 66,69 | 67,27 |
| 2 | Aceh Singkil | 3,50 | 3,61 | 18,06 | 19,18 | 9,04 | 6,88 | 70,38 | 69,62 |
| 3 | Aceh Selatan | 3,48 | 3,11 | 11,11 | 12,43 | 5,70 | 4,82 | 67,67 | 67,87 |
| 4 | Aceh Tenggara | 3,48 | 2,78 | 11,54 | 12,83 | 1,38 | 5,09 | 70,64 | 70,32 |
| 5 | Subulussalam | 3,61 | 4,12 | 12,24 | 16,94 | 7,08 | 5,75 | 68,73 | 66,20 |
| 6 | Pidie Jaya | 2,63 | 3,57 | 13,38 | 18,45 | 6,00 | 4,40 | 74,07 | 74,34 |
| 7 | Banda Aceh | 4,29 | 5,23 | 8,11 | 7,13 | 8,50 | 8,62 | 72,35 | 86,28 |
| 8 | Aceh Timur | 3,57 | 3,73 | 11,65 | 13,91 | 7,98 | 8,07 | 74,07 | 68,72 |
| 9 | Aceh Tengah | 3,64 | 4,90 | 15,00 | 14,50 | 4,00 | 4,44 | 71,27 | 73,95 |
| 10 | Aceh Barat | 4,01 | 3,32 | 18,05 | 17,93 | 7,01 | 6,09 | 73,61 | 72,34 |
| 11 | Aceh Besar | 3,05 | 3,87 | 14,10 | 13,38 | 8,00 | 8,28 | 70,38 | 74,00 |
| 12 | Pidie | 3,80 | 3,98 | 13,88 | 18,79 | 3,18 | 5,94 | 67,17 | 71,20 |
| 13 | Bireuen | 0,92 | 4,31 | 13,01 | 12,51 | 4,07 | 4,20 | 67,65 | 73,16 |
| 14 | Aceh Utara | 3,68 | 4,63 | 11,32 | 16,86 | 5,94 | 7,08 | 70,15 | 70,22 |
| 15 | Aceh Barat Daya | 4,63 | 3,87 | 15,41 | 15,44 | 5,81 | 4,12 | 70,26 | 67,41 |
| 16 | Gayo Lues | 3,21 | 3,51 | 19,32 | 18,87 | 2,52 | 2,70 | 70,55 | 68,25 |
| 17 | Aceh Tamiang | 3,58 | 3,32 | 14,05 | 12,61 | 8,00 | 7,38 | 74,30 | 70,43 |
| 18 | Nagan Raya | 3,43 | 2,37 | 16,74 | 17,38 | 4,33 | 5,84 | 73,79 | 70,10 |
| 19 | Aceh Jaya | 3,49 | 3,68 | 5,66 | 12,51 | 6,25 | 3,12 | 86,24 | 70,36 |
| 20 | Bener Meriah | 4,52 | 3,69 | 13,24 | 18,39 | 3,60 | 2,61 | 76,88 | 73,90 |
| 21 | Sabang | 3,65 | 2,52 | 8,74 | 14,66 | 7,93 | 4,01 | 78,41 | 76,85 |
| 22 | Langsa | 3,43 | 4,78 | 9,30 | 10,62 | 12,75 | 7,85 | 78,81 | 77,82 |
| 23 | Lhokseumawe | 3,03 | 4,01 | 12,00 | 10,84 | 12,52 | 9,15 | 65,36 | 78,04 |
| 24 | Aceh | 4,70 | 4,21 | 13,43 | 14,64 | 5,60 | 6,17 | 72,58 | 72,80 |

Sumber : BPS Aceh

Keterangan : Hijau : Tercapai
Kuning : Tidak tercapai

Rata-rata ketercapaian target makro RKPA dalam kurun waktu tahun 2018-2022 di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di bawah 50 persen antara lain terhadap indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, sedangkan terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terbuka tingkat ketercapaiannya rata-rata di atas 50 persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.86.

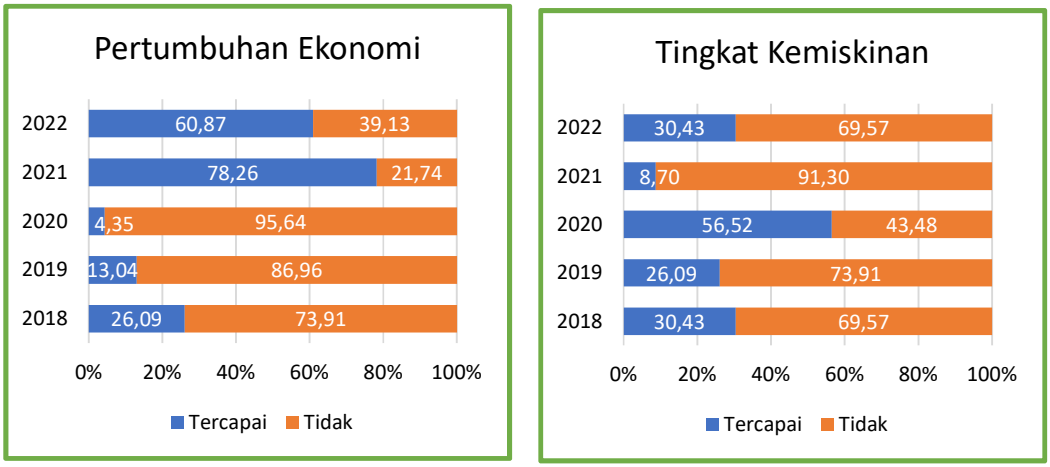


**Gambar 2.86. Rata-Rata Ketercapaian Target Makro Kabupaten/Kota dalam RKPA Selama Tahun 2018-2022 (dalam persentase)**

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6 kabupaten/kota berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi di Aceh, namun tahun 2019 menurun menjadi 3 kabupaten/kota kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 1 kabupaten saja. Untuk tahun 2021 terdapat 18 kabupaten/kota yang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi, sedangkan tahun 2022 hanya 14 kabupaten/kota yang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian target tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebanyak 7 kabupaten/kota dan pada tahun 2019 menurun menjadi 6 kabupaten/kota, pada tahun 2020 meningkat menjadi 13 kabupaten/kota. Namun pada tahun 2021 kembali menurun, hanya 2 kabupaten/kota yang mencapai target. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan ditunjukkan dengan 7 kabupaten/kota yang mencapai target tingkat kemiskinan.

Pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebanyak 10 kabupaten/kota, meningkat pada tahun 2019 menjadi 12 kabupaten/kota dan pada tahun 2020 meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 13 kabupaten/kota. Tahun 2021, kembali menunjukkan peningkatan tercatat terdapat 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2022 pencapaian target TPT mengalami penurunan dengan 12 kabupaten/kota saja yang realisasinya mencapai target.

Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2018 sebanyak 16 kabupaten/kota, meningkat pada tahun 2019 menjadi 18 kabupaten/kota dibandingkan, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 6 kabupaten/kota saja yang mencapai target IPM. Pada tahun 2021, capaiannya meningkat tercatat terdapat 9 kabupaten/kota yang tercapai, demikian pula pada tahun 2022 kembali meningkat dengan sejumlah 11 kabupaten/kota yang realisasinya tercapai terhadap target RKPA.

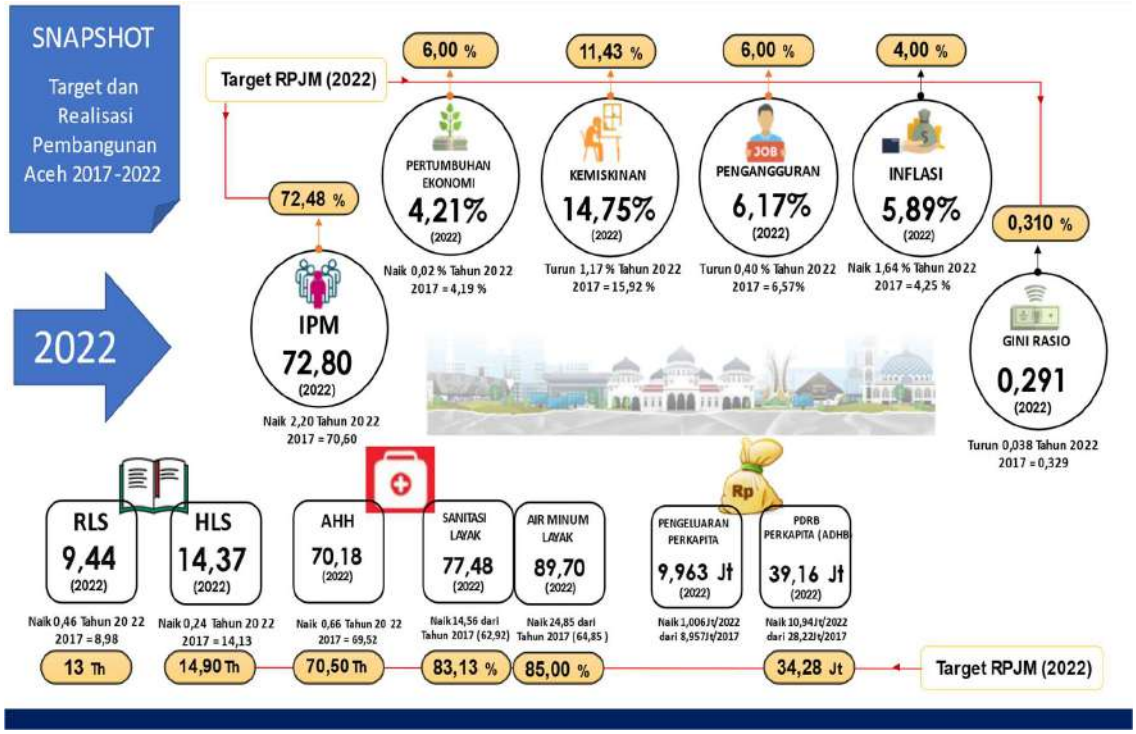


**Gambar 2.87. Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Aceh terhadap Kondisi Akhir RPJMA 2017-2022**

### 2.2.1. Realisasi Pendapatan

Target penerimaan pendapatan Aceh dalam RKPA Tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 4,63 persen dari RKPA Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp. 14.006.275.954.424. Tingkat realisasi pendapatan tahun 2022 terhadap target RKPA tahun 2022 mencapai 102,67 persen. Jumlah realisasi pendapatan tertinggi berasal dari Dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 10.775.168.990.686,- atau sebesar 78,57 persen dari total pendapatan Aceh, diikuti oleh pendapatan asli Aceh sebesar Rp. 2.917.833.097.662,- (21,28 persen) dan lain-lain pendapatan Aceh sebesar Rp. 21.267.545.558,- (0,16 persen).

Pada umumnya Pendapatan Aceh masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari target besarnya Pendapatan Aceh, besarnya persentase

Pendapatan Asli Aceh masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Total Pendapatan/Penerimaan Aceh yaitu sebesar 19,26 persen, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
- Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
- Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target pada RKPA Tahun 2022 mencerminkan bahwa keuangan Aceh masih tergolong dalam kriteria rendah sekali (kriteria 0-25 persen "rendah sekali") atau sebesar 19,26 persen dari pagu Pendapatan Aceh. Jika dilihat dari capaian realisasi sampai dengan Semester II tahun 2022 tercatat pendapatan asli Aceh sebesar 21,28 persen dari total Pendapatan Aceh yang berarti bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah sekali.

Tercatat pada Tahun 2022 dari target RKPA Tahun 2022, pendapatan dari retribusi Aceh merupakan sektor yang masih sangat rendah peranannya dalam kontribusi realisasi Pendapatan Asli Aceh atau sebesar 0,51 persen. Demikian pula peranan penerimaan dari Hasil pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan tercatat hanya sebesar 6,16 persen dari realisasi Pendapatan Asli Aceh. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai realisasi pendapatan, dapat dilihat Tabel 2.132 berikut.

**Tabel 2.132.**
**Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2022**

| No | Uraian | Target RKPA-P Tahun 2022 | Realisasi | | | | Realisasi Tahun 2022 (*Unaudited*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **PENDAPATAN ASLI ACEH** | **2.572.750.100.699** | **1.449.020.992.947** | **56,32** | **1.468.812.104.715** | **57,09** | **2.917.833.097.662** | **113,41** |
| I.1 | Pajak Aceh | 1.574.358.019.378 | 786.008.303.689 | 49,93 | 931.826.263.931 | 59,19 | 1.717.834.567.620 | 109,11 |
| I.2 | Retribusi Aceh | 9.458.309.000 | 4.508.127.760 | 47,66 | 10.489.924.032 | 110,91 | 14.998.051.792 | 158,57 |
| I.3 | Hasil pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan | 179.862.545.155 | 179.036.984.981 | 99,54 | 825.560.175 | 0,46 | 179.862.545.156 | 100,00 |
| I.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah | 809.071.227.166 | 479.467.576.516 | 59,26 | 525.670.356.578 | 64,97 | 1.005.137.933.094 | 124,23 |
| **II** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **10.773.391.568.000** | **3.994.730.459.508** | **37,08** | **6.780.438.531.178** | **62,94** | **10.775.168.990.686** | **100,02** |
| II.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 10.773.391.568.000 | 3.994.730.459.508 | 37,08 | 6.780.438.531.178 | 62,94 | 10.775.168.990.686 | 100,02 |
| II.1.1 | Dana Perimbangan | | 1.726.730.459.508 | - | 1.456.558.362.178 | | 3.183.288.821.686 | |
| II.1.1.1. | Dana Transfer Umum | | 1.220.125.146.556 | - | 997.494.342.801 | | 2.217.619.489.357 | |
| II.1.1.1.1 | Dana Bagi Hasil | | 89.949.545.680 | - | 185.917.693.801 | | 275.867.239.481 | |
| II.1.1.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 1.130.175.600.876 | - | 811.576.649.000 | | 1.941.752.249.876 | |
| II.1.1.3 | Dana Transfer Khusus | | 506.605.312.952 | - | 459.064.019.377 | | 965.669.332.329 | |
| II.1.1.3.1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | | 61.403.565.250 | - | 209.649.232.697 | | 271.052.797.947 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.1.1.3.2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 445.201.747.702 | - | 249.414.786.680 | | 694.616.534.382 | |
| II.1.2 | Dana Insentif Daerah | | - | - | 31.880.169.000 | | 31.880.169.000 | |
| II.1.3 | Dana Otonomi Khusus | | 2.268.000.000.000 | - | 5.292.000.000.000 | | 7.560.000.000.000 | |
| II.2 | Transfer Antar Daerah | - | - | | - | | - | |
| II.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | | - | | | | - | |
| II.2.1 | Bantuan Keuangan | - | - | | | | - | |
| **III** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN** | **11.398.468.031** | **18.150.137.110** | **159,23** | **3.117.408.448** | **27,35** | **21.267.545.558** | **186,58** |
| III.1 | Pendapatan Hibah | 11.398.468.031 | 18.043.837.110 | 158,30 | 3.117.408.448 | 17,28 | 21.161.245.558 | 185,65 |
| III.2 | Dana Darurat | - | - | | | | - | - |
| III.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | | 106.300.000 | - | - | | 106.300.000 | - |
| **JUMLAH PENDAPATAN ACEH (I+II+III)** | | **13.357.540.136.730** | **5.461.901.589.565** | **40,89** | **8.252.368.044.341** | **61,78** | **13.714.269.633.906** | **102,67** |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Pada tahun 2022 realisasi Pendapatan Asli Aceh tercatat sebesar 113,41 persen dari target yang telah ditetapkan pada RKPA tahun 2022 (unaudited), dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,573 Triliun, pada akhir periode tahun 2022 berhasil dicapai sebesar Rp. 2,918 Triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2021), capaiannya mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Aceh selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2017 (audited) mencapai Rp. 2,276 Triliun, tahun 2018 (audited) mencapai Rp. 2,359 Triliun, dan tahun

2019 (audited) mencapai Rp. 2,699 Triliun. Penurunan dimulai tahun 2020 (audited) dengan capaian Rp. 2,571 Triliun, dan Pendapatan Asli Aceh Tahun 2021 kembali menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 (audited) yang besarnya mencapai Rp. 2,506 Triliun (Audited). Konstribusi tertinggi Pendapatan Asli Aceh tahun 2022 berasal dari Pajak Aceh yaitu sebesar 58,87 persen dari jumlah Pendapatan Asli Aceh tahun 2022.

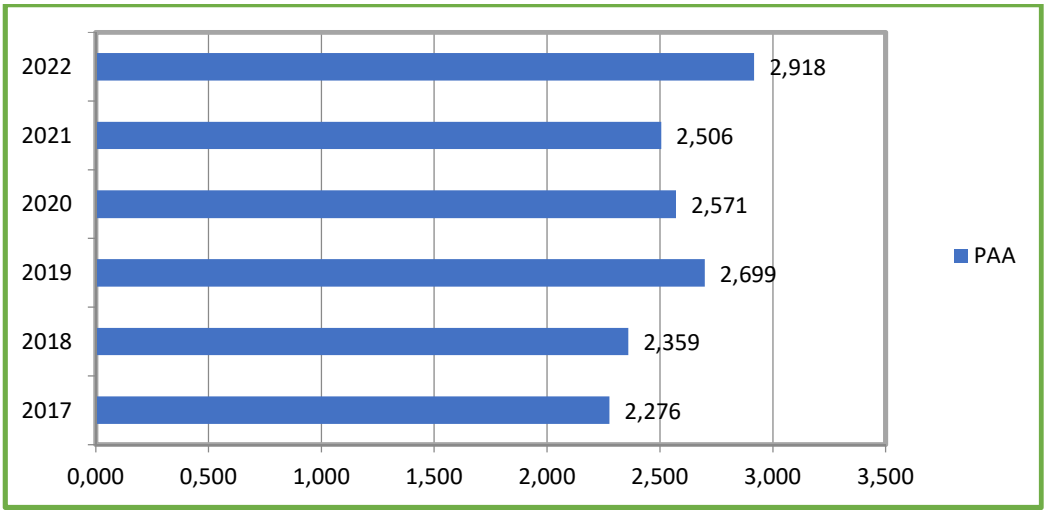


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

**Gambar 2.88. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah)**

Berdasarkan strukturnya, realisasi pendapatan Aceh tahun 2022 didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan peranannya sebesar 78,57 persen, diikuti oleh pendapatan asli Aceh dengan peranannya sebesar 21,28 persen, dan lain-lain pendapatan dengan peranannya sebesar 0,16 persen. Gambar 2.88 berikut memberikan gambaran struktur realisasi pendapatan Aceh tahun 2022.

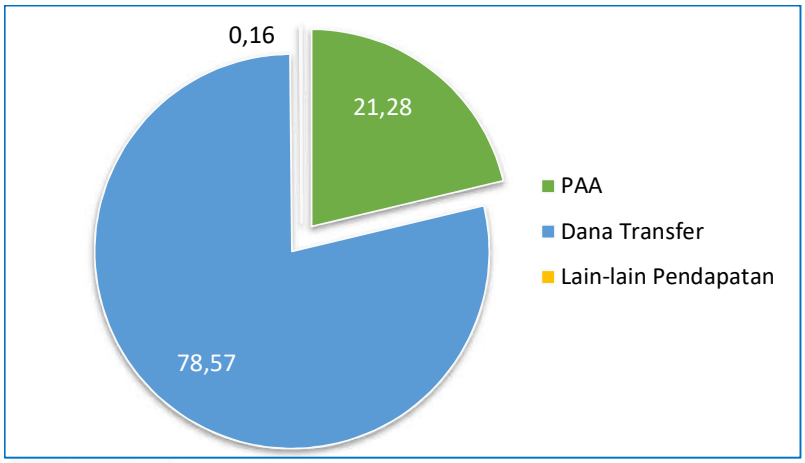


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

**Gambar 2.89. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2022**

Realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2021 masih di bawah target RKPA 2021. Target pertumbuhan ekonomi Aceh yang ditetapkan dalam RKPA adalah sebesar 3,50 persen namun realisasi dalam rilis BPS sebesar 2,79 persen atau kurang 0,71 persen terhadap target RKPA 2021. Adapun lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 19,51 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,71 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,57 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi diantaranya penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 6,11 persen dan jasa keuangan sebesar 5,08 persen. Namun meskipun belum mencapai target RKPA 2021, jika di lihat dalam angka nasional pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah rata-rata nasional dimana pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 3,69 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Aceh pada tahun 2021 tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang mana besarnya dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh sangat berpengaruh terhadap melemahnya laju pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 30,06 persen, diikuti oleh perdagangan dan reparasi mobil motor sebesar 14,30 persen, administrasi pemerintah sebesar 10,30 persen, konstruksi sebesar 9,90 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,65 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 71,22 persen. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 48,19 persen, hal ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekspor pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada kelompok komoditas bahan bakar mineral yaitu batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya. Selanjutnya pertumbuhan diikuti pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,12 persen, hal ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan realisasi APBA dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,16 persen, kondisi pandemi COVID-19 yang melandai dan masyarakat yang sudah banyak melakukan aktivitas diluar rumah juga sangat mempengaruhi pertumbuhan pada komponen ini. Komponen PMTB juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,38 persen, terutama pada subkomponen nonbangunan yaitu dipengaruhi oleh pengadaan barang modal berupa mesin-mesin pendukung pembangunan pembangkit listrik. Sementara itu, komponen

pengeluaran konsumsi LNPRT dan impor luar negeri mengalami penurunan masing-masing 3,98 persen dan 10,06 persen. Berkurangnya kegiatan partai maupun beberapa lembaga non profit lainnya pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi faktor utama menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT.

Tingkat kemiskinan Aceh yang ditetapkan dalam RKPA Tahun 2021 sebesar 15,50 persen tidak tercapai. Berdasarkan rilis BPS, Tingkat Kemiskinan Aceh kondisi September 2021 tercatat sebesar 15,53 persen.

Tingkat kemiskinan Aceh belum tercapai masih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh. Dalam kurun waktu 2018-2021 tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,15 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2021 ini berada cukup jauh di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 9,71 persen. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 16,35 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 833,91 ribu orang (kondisi September).

Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kemiskinan Aceh September 2021 antara lain (BPS Aceh, 2021):

6. Sebagian besar penduduk Aceh bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain kondisi sektor pertanian di Aceh pada September 2021 belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan.
7. Luas panen padi di Aceh mengalami penurunan sebesar 40,2 persen yaitu dari 45.230,45 hektar menjadi 27.037,8 hektar. Demikian juga dengan produksi padi yang juga mengalami penurunan sebesar 39,3 persen dari 250.989,71 Ton-GKG menjadi 152.260,69 Ton-GKG.
8. Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum terjadi peningkatan namun pada sub sektor tanaman pangan pada September 2021 yang sebesar 96,56, lebih rendah dibanding Maret 2021 sebesar 99,13.
9. Konsumsi rumah tangga juga masih belum sepenuhnya stabil dimana sisi pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Triwulan I sd III 2021 terhadap Triwulan I sd III 2021 c to c masih terkontraksi (-0,66%).
10. Berdasarkan data progres penyaluran Bansos sembako alokasi Juli-September 2021 per 2 Oktober 2021 baru tersalur 70,2% dari pagu KPM. Demikian juga yang tergambar melalui Susenas September 2021 dimana terjadi penurunan persentase rumah tangga penerima program sembako pada khususnya pada desil 1.

11. Berdasarkan Sakernas Agustus 2021 masih terdapat sekitar 207 ribu penduduk usia kerja di Aceh yang terdampak Covid-19 baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja dan lainnya

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,323. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,324. Meskipun Gini Ratio Aceh di tahun 2021 belum mencapai target, namun jika di lihat dalam angka nasional Provinsi Aceh sudah lebih baik dari targetnya yaitu sebesar 0,381. Semakin besar nilai Gini Ratio semakin baik ketimpangannya dengan kata lain semakin tinggi koefisien gini maka semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan di Aceh, target Tingkat Pengangguran Terbuka yang sudah ditetapkan dalam RKPA 2021 tidak tercapai, namun dalam tahun 2021 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS sebesar 6,30 persen dengan jumlah penduduk menganggur tercatat sejumlah 158.857 jiwa. Secara nasional, TPT Aceh berada di bawah rata-rata TPT Nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, TPT Aceh tahun 2021 turun sebesar 0,29 persen. Dilihat dari tingkat Pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada tingkat Pendidikan SMK diantara tingkat Pendidikan lainnya atau sebesar 10,55 persen dan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 10,87 persen. Dilihat dengan karakteristik penduduk bekerja di Aceh yaitu sebesar 36,13 persen penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan sebesar 35,57 persen penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 capaiannya sesuai dengan target RKPA 2021 (notifikasi hijau), namun pencapaian IPM tahun 2021 masih di bawah capaian nasional. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas Kesehatan, Pendidikan maupun pengeluaran per kapita.

Tingkat inflasi yang dapat dikendalikan pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,24 persen dan capaiannya sangat baik karena di bawah target RKPA Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 4,00 persen. Namun capaian tingkat inflasi masih di bawah rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 (1,69 persen) inflasi tercatat menurun sebesar 1,35 poin, hal ini menunjukkan pengendalian inflasi masih relatif baik.

**Tabel 2.133.**
**Capaian Indikator Tahun 2021 Terhadap Target RKPA 2021**

| NO | Indikator Makro | Satuan | Realisasi | | | Proyeksi 2021 | Capaian 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | | Aceh | Nasional |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,61 | 4,14 | (0,37) | 3,50 | 2,79 | 3,69 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 15,68 | 15,01 | 15,43 | 15,50 | 15,53 | 9,71 |
| 3 | Indeks Gini (Gini Ratio) | Indeks | 0,318 | 0,321 | 0,319 | 0,313 | 0,323 | 0,381 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,34 | 6,17 | 6,59 | 5,60 | 6,30 | 6,49 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 71,19 | 71,90 | 71,99 | 72,15 | 72,18 | 72,29 |
| 6 | Tingkat Inflasi | % | 1,84 | 1,69 | 3,59 | 4,00 | 2,24 | 1,87 |

Sumber: BPS, 2022

Keterangan : Hijau : tercapai

Kuning : tidak tercapai

### 2.2.2. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 TERHADAP RKPA TAHUN 2021

Capaian pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali Kabupaten Aceh Utara. Jika di bandingkan dengan tahun 2020 peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di hamper seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terpukul akibat pandemi covid-19 yang muncul di seluruh dunia tidak terkecuali dengan Aceh dan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, dimana terdapat 13 kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun atau minus. Berdasarkan target RKPA Tahun 2021 terdapat 8 kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Barat yang tumbuh sebesar 5,67 persen sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara yang turun sebesar 0,55 persen.

Tingkat kemiskinan di Aceh Kondisi Maret 2021 mengalami perbaikan sebagaimana ditunjukkan dengan perbaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota dan

pencapaiannya memenuhi target RKPA 2021. Sesuai dengan target RKPA 2021 terdapat 9 (Sembilan) kabupaten/kota yang tercapai sedangkan 14 (empat belas kabupaten/kota belum tercapai targetnya. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 20,36 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Banda Aceh sebesar 7,61 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di selutruh kabupaten/kota di Aceh.

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 (kondisi Agustus 2021) belum memenuhi target RKPA 2021, terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota yang capaian realisasinya sesuai dengan target RKPA 2021 sedangkan 11 (sebelas) kabupaten/kota targetnya tidak tercapai. TPT tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe sebesar 11,16 persen sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah sebesar 1,24 persen.

Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021 terhadap RKPA 2021 yang tercapai (notifikasi hijau) hanya 6 Kabupaten/Kota. Terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki tingkat capaian IPM di atas rata-rata Aceh, dengan tingkat capaian IPM tertinggi tercatat di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 85,17 persen dan terendah di Kota Subulussalam yaitu sebesar 65,27 persen.

**Tabel 2.134.**
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2021 Terhadap Target RKPA Tahun 2021**

| NO | Kabupaten /Kota | Indikator Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | Tingkat Kemiskinan (%) | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | Indeks Pembangunan Manusia | |
| | | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Simeulue | 3,85 | 2,85 | 18,67 | 18,98 | 4,00 | 5,71 | 66,69 | 66,41 |
| 2 | Aceh Singkil | 3,50 | 3,90 | 20,90 | 20,36 | 9,04 | 8,36 | 70,38 | 69,22 |
| 3 | Aceh Selatan | 3,48 | 2,46 | 12,42 | 13,18 | 5,70 | 6,46 | 67,67 | 67,44 |
| 4 | Aceh Tenggara | 3,48 | 1,48 | 12,94 | 13,41 | 1,38 | 6,43 | 70,64 | 69,44 |
| 5 | Subulussalam | 3,61 | 3,87 | 14,18 | 17,65 | 7,08 | 6,26 | 68,73 | 65,27 |
| 6 | Pidie Jaya | 2,63 | 2,03 | 15,42 | 19,55 | 2,65 | 3,57 | 74,07 | 73,60 |
| 7 | Banda Aceh | 4,29 | 5,53 | 18,52 | 7,61 | 8,50 | 8,94 | 72,35 | 85,71 |

| NO | Kabupaten /Kota | Indikator Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | Tingkat Kemiskinan (%) | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | Indeks Pembangunan Manusia | |
| | | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 8 | Aceh Timur | 3,57 | 1,94 | 13,71 | 14,45 | 7,98 | 7,13 | 74,07 | 67,83 |
| 9 | Aceh Tengah | 3,64 | 3,21 | 19,83 | 15,26 | 7,41 | 2,61 | 71,27 | 73,37 |
| 10 | Aceh Barat | 4,01 | 5,67 | 13,47 | 18,81 | 4,21 | 7,09 | 73,61 | 71,67 |
| 11 | Aceh Besar | 3,05 | 2,44 | 17,48 | 14,05 | 8,39 | 7,70 | 70,38 | 73,58 |
| 12 | Pidie | 3,80 | 2,63 | 16,40 | 19,59 | 3,18 | 7,28 | 67,17 | 70,70 |
| 13 | Bireuen | 0,92 | 4,13 | 20,51 | 13,25 | 0,71 | 4,32 | 67,65 | 72,33 |
| 14 | Aceh Utara | 3,68 | (0,55) | 13,18 | 17,43 | 5,94 | 8,31 | 70,15 | 69,46 |
| 15 | Aceh Barat Daya | 4,63 | 2,88 | 17,76 | 16,34 | 5,81 | 4,04 | 70,26 | 66,99 |
| 16 | Gayo Lues | 3,21 | 2,32 | 12,56 | 19,64 | 3,85 | 1,84 | 70,55 | 67,56 |
| 17 | Aceh Tamiang | 3,58 | 0,88 | 19,08 | 13,34 | 0,69 | 5,87 | 74,30 | 69,48 |
| 18 | Nagan Raya | 3,43 | 5,34 | 19,26 | 18,23 | 4,33 | 4,99 | 73,79 | 69,31 |
| 19 | Aceh Jaya | 3,49 | 2,59 | 6,83 | 13,23 | 6,25 | 3,47 | 86,24 | 69,84 |
| 20 | Bener Meriah | 4,52 | 3,15 | 15,20 | 19,16 | 3,60 | 1,24 | 76,88 | 73,27 |
| 21 | Sabang | 3,65 | 2,67 | 9,76 | 15,32 | 7,93 | 3,56 | 78,41 | 76,11 |
| 22 | Langsa | 3,43 | 4,23 | 10,91 | 10,96 | 12,75 | 7,21 | 78,81 | 77,44 |
| 23 | Lhokseumawe | 3,03 | 3,84 | 17,73 | 11,16 | 7,55 | 11,16 | 65,36 | 77,57 |
| 24 | Aceh | 3,50 | 2,79 | 15,50 | 15,33 | 5,60 | 6,30 | 72,15 | 72,18 |

Sumber : BPS Aceh

Keterangan : Hijau : Tercapai

Kuning : Tidak tercapai

Rata-rata ketercapaian target makro RKPA dalam tahun 2018-2021 di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di atas rata-rata 50 persen antara lain terhadap indikator tingkat pengangguran terbuka, sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat ketercapaiannya di bawah 50 persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.90.

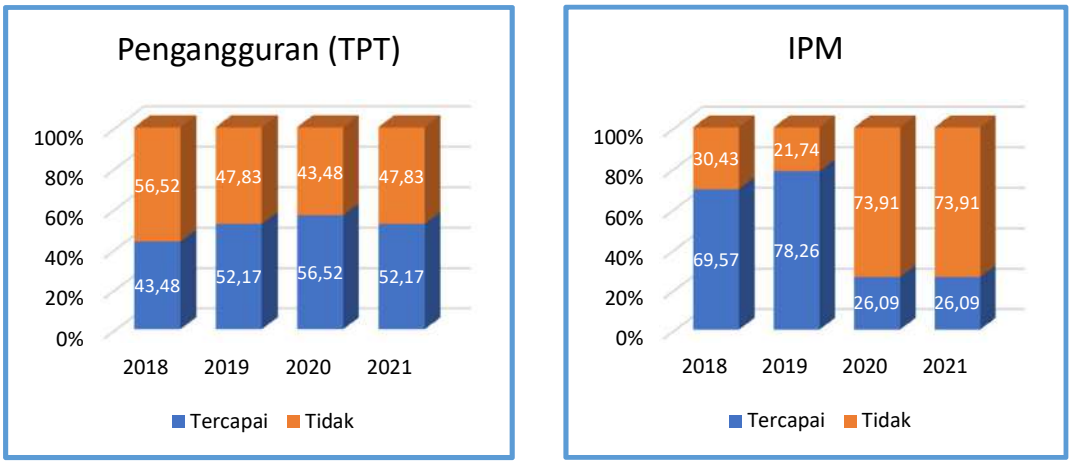


**Gambar 2.90. Rata-Rata Ketercapaian Target Makro Kabupaten/Kota dalam RKPA Selama Tahun 2018-2021 (dalam persentase)**

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6 kabupaten/kota berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi di Aceh, namun tahun 2019 menurun menjadi 3 kabupaten/kota kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 1 kabupaten saja. Pada tahun 2021 ketercapaiannya meningkat menjadi 8 kabupaten/kota. Pencapaian target tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebanyak 7 kabupaten/kota dan pada tahun 2019 menurun menjadi 6 kabupaten/kota, pada tahun 2020 meningkat menjadi 13 kabupaten/kota, namun pada tahun 2021 pencapaiannya menurun menjadi 9 kabupaten/kota saja.

Pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebanyak 10 kabupaten/kota, meningkat pada tahun 2019 menjadi 12 kabupaten/kota dan pada tahun 2020 meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 13 kabupaten/kota, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 12 kabupate/kota. Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2018 sebanyak 16 kabupaten/kota, meningkat pada tahun 2019 menjadi 18 kabupaten/kota dibandingkan, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 6 kabupaten/kota saja. Demikian pula pada tahun 2021 kabupaten/kota yang mencapai target IPM tercatat hanya 6 kabupaten/kota terhadap proyeksi RKPA Tahun 2021.

### 2.2.3 Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

#### 2.2.3.1 Realisasi Pendanaan

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar Rp. 13.948.381.469.096,- atau sebesar 99,59 persen dari target RKPA Tahun 2021 sebesar Rp.

14.006.275.954.424,-. Realisasi pendapatan ini menurun jika dibandingkan dengan capaian Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester II Tahun 2020 (audited) sebesar Rp. 14.439.920.557.021,- dan capaian realisasi pendapatan Tahun 2019 (audited) yang tercatat sebesar Rp. 15.752.800.901.652.

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja Aceh Tahun 2021 mencapai Rp. 13.683.574.081.222,- atau 92,20 persen dari target RKPA Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 14.841.275.954.424,- dan nilai capaian realisasi ini lebih besar dari. realisasi belanja Aceh Tahun 2020 (audited) mencapai Rp. 9.899.914.199.650,-. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 tersebut menyebabkan terjadinya surplus terhadap anggaran sebesar Rp 264.807.387.875,-. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.135.

**Tabel 2.135.**
**Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2021**

| No | Uraian | Target 2021 | Realisasi 2021 | | | | Jumlah Realisasi Tahun 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | Rp | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Pendapatan Daerah | 14.006.275.954.424 | 3.343.191.815.045 | 23,87 | 10.605.189.654.051 | 75,72 | 13.948.381.469.096 | 99,59 |
| 2 | Belanja Daerah | 14.841.275.954.424 | 2.640.195.315.649 | 17,79 | 11.043.378.765.573 | 74,41 | 13.683.574.081.222 | 92,20 |
| 3 | Surplus/ Defisit | (835.000.000.000) | 702.996.499.396 | | (438.189.111.522) | | 264.807.387.875 | |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah),2021*

### 2.2.3.2 Realisasi Pendapatan

Target penerimaan pendapatan Aceh dalam RKPA Tahun 2021 diproyeksikan menurun sebesar 0,09 persen dari RKPA Tahun 2021 yang sebesar Rp. 15.457.220.461.974. Tingkat realisasi pendapatan tahun 2021 terhadap target RKPA tahun 2021 mencapai 99,59 persen. Jumlah realisasi pendapatan tertinggi berasal dari Dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 11.431.169.265.498,- atau sebesar 81,95 persen dari total pendapatan Aceh, diikuti oleh pendapatan asli Aceh sebesar Rp. 2.505.881.104.691,- (17,97 persen) dan lain-lain pendapatan Aceh sebesar Rp.11.331.098.907,- (0,08 persen).

Pada umumnya Pendapatan Aceh masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari target besarnya Pendapatan Aceh, besarnya persentase Pendapatan Asli Aceh masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Total Pendapatan/Penerimaan Aceh yaitu sebesar 16,38 persen, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwaperanan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
- Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
- Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target pada RKPA Tahun 2021 mencerminkan bahwa keuangan Aceh masih tergolong dalam kriteria rendah sekali (kriteria 0-25 persen "rendah sekali") atau sebesar 16,38 persen dari pagu Pendapatan Aceh. Jika dilihat dari capaian realisasi sampai dengan Semester II tahun 2021 tercatat pendapatan asli Aceh sebesar 17,97 persen dari total Pendapatan Aceh yang berarti bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah sekali.

Tercatat pada Semester II Tahun 2021 dari target RKPA Tahun 2021, pendapatan dari retribusi Aceh merupakan sektor yang masih sangat rendah peranannya dalam kontribusi realisasi Pendapatan Aceh atau sebesar 0,33 persen. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai realisasi pendapatan, dapat dilihat Tabel 2.136 berikut.

**Tabel 2.136.**
**Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2021**

| No | Uraian | Target | Realisasi Tahun 2021 | | | | Jumlah Realiasasi Tahun 2021 (Unaudited) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | 2021 | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **PENDAPATAN ASLI ACEH** | **2.294.904.942.424** | **539.976.461.540** | **23,53** | **1.965.904.643.151** | **85,66** | **2.505.881.104.691** | **109,19** |
| I.1 | Pajak Aceh | 1.285.757.350.499 | 481.934.689.210 | 37,48 | 1.047.675.628.898 | 81,48 | 1.529.610.318.108 | 118,97 |
| I.2 | Retribusi Aceh | 12.133.554.700 | 2.223.295.562 | 18,32 | 6.083.808.118 | 50,14 | 8.307.103.680 | 68,46 |

| No | Uraian | Target 2021 | Realisasi Tahun 2021 | | | | Jumlah Realiasasi Tahun 2021 (Unaudited) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.3 | Hasil pengolahan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan | 202.386.465.655 | - | - | 152.434.096.229 | 75,32 | 152.434.096.229 | 75,32 |
| I.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah | 794.627.571.570 | 55.818.476.768 | 7,02 | 759.711.109.907 | 95,61 | 815.529.586.675 | 102,63 |
| **II** | **DANA TRANSFER** | **11.510.180.130.000** | **2.800.313.078.963** | **24,33** | **8.630.856.186.535** | **74,98** | **11.431.169.265.498** | **99,31** |
| II.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 11.331.018.630.000 | 2.800.313.078.963 | 24,71 | 8.630.856.186.535 | 76,17 | 11.431.169.265.498 | 100,88 |
| II.1.1 | Dana Perimbangan | 3.775.740.282.000 | 533.564.736.963 | 14,13 | 3.335.048.522.535 | 88,33 | 3.868.613.259.498 | 102,46 |
| II.1.1.1 | Dana Transfer Umum | 1.961.334.010.000 | - | - | 202.310.251.468 | 10,31 | 202.310.251.468 | 10 |
| II.1.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.961.334.010.000 | - | - | 1.945.980.616.000 | 99,22 | 1.945.980.616.000 | 99 |
| II.1.1.3 | Dana Transfer Khusus | 1.814.406.272.000 | - | - | 1.720.322.392.030 | 94,81 | 1.720.322.392.030 | 95 |
| II.1.2 | Dana Insentif Daerah | - | - | | 6.728.200.000 | | 6.728.200.000 | |
| II.1.3 | Dana Otonomi Khusus | 7.555.278.348.000 | 2.266.748.342.000 | 30,00 | 5.289.079.464.000 | 70,01 | 7.555.827.806.000 | 100,01 |
| II.2 | Transfer Antar Daerah | 179.161.500.000 | - | - | - | - | - | - |
| II.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 179.161.500.000 | | - | - | - | | - |
| II.2.1 | Bantuan Keuangan | - | - | - | - | | - | |
| **III** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN** | **201.190.882.000** | **2.902.274.541** | 1,44 | **8.428.824.366** | **4,19** | **11.331.098.907** | **5,63** |
| III.1 | Pendapatan Hibah | 1.968.000.000 | 1.356.857.387 | 68,95 | 8.458.796.038 | 429,82 | 9.815.653.425 | 498,76 |

| No | Uraian | Target 2021 | Realisasi Tahun 2021 | | | | Jumlah Realiasasi Tahun 2021 (Unaudited) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III.2 | Dana Darurat | - | - | | - | | | |
| III.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 199.222.882.000 | 1.545.417.154 | 0,78 | (29.971.672) | (0,02) | 1.515.445.482 | 0,76 |
| **JUMLAH PENDAPATAN ACEH (I+II+III)** | | **14.006.275.954.424** | **3.343.191.815.044** | **23,87** | **10.605.189.654.052** | **75,72** | **13.948.381.469.096** | **99,59** |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)*

Pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Aceh tercatat sebesar 109,19 persen dari target yang telah ditetapkan pada RKPA tahun 2021 (unaudited), dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.294.904.942.424, pada akhir periode tahun 2021 berhasil dicapai sebesar Rp. 2.505.881.104.691. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pendapatan Asli Aceh selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 (audited) besarnya Pendapatan Asli Aceh mencapai sebesar Rp. 2.060.180.945.551, meningkat di tahun 2017 (audited) mencapai Rp. 2.276.305.568.814, tahun 2018 (audited) mencapai Rp. 2.359.385.393.645,65, dan tahun 2019 (audited) mencapai Rp. 2.698.912.471.144,-. Penurunan dimulai tahun 2020 (audited) dengan capaian Rp. 2.570.775.877.183, dan Pendapatan Asli Aceh Tahun 2021 kembali menurun jika dibandingkandengan tahun 2020 (audited) yang besarnya mencapai Rp. 2.505.881.104.691. Konstribusi tertinggi Pendapatan Asli Aceh tahun 2021 berasal dari Pajak Aceh yaitu sebesar 61,04 persen dari jumlah Pendapatan Asli Aceh tahun 2021.

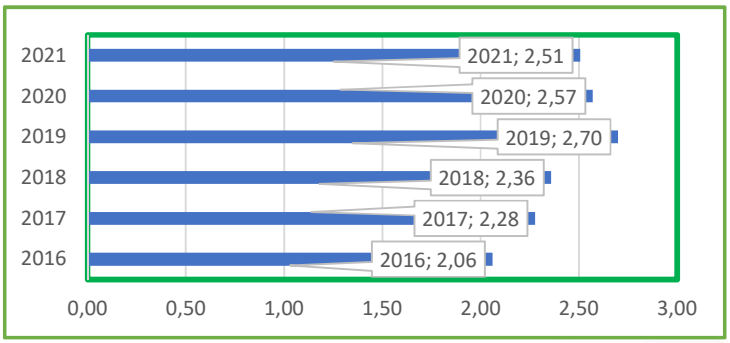


*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah)*

**Gambar 2.91. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah)**

Berdasarkan strukturnya, realisasi pendapatan Aceh tahun 2021 didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan peranannya sebesar 81,95 persen, diikuti oleh pendapatan asli Aceh dengan peranannya sebesar 17,97 persen, dan lain-lain pendapatan dengan peranannya sebesar 0,08 persen. Gambar 2.92 berikut memberikan gambaran struktur realisasi pendapatan Aceh tahun 2021.

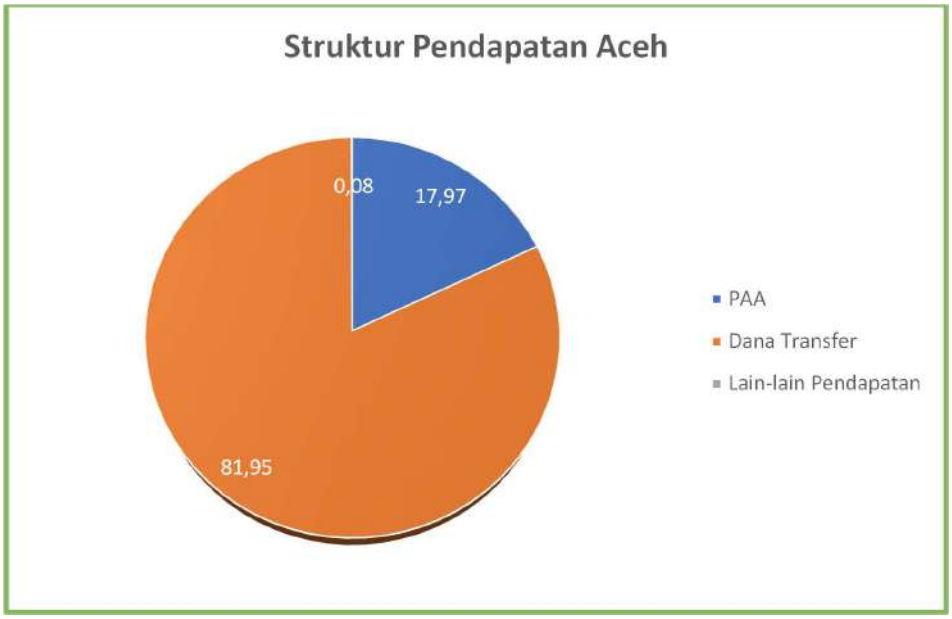


*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah) 2021*

**Gambar 2.92. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2021**

### 2.2.3.3 Realisasi Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 jenis belanja daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur jenis belanja menjadi 4 jenis belanja.

Realisasi Belanja Aceh pada Semester II tahun 2021 (sampai dengan periode pelaporan) mencapai 92,18 persen dari proyeksi. Realisasi Belanja Operasi merupakan belanja dengan capaian realisasi tertinggi yaitu sebesar 100,60 persen terhadap proyeksi RKPA tahun 2021.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanjadimaksud, dapat dilihat Tabel 2.137.

**Tabel 2.137.**
**Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2021**

| No | Jenis Belanja | Target 2021 | Realisasi | | | | Jumlah Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | Rp | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BELANJA OPERASI | 8.568.932.037.593 | 1.799.940.552.331 | 21,01 | 6.820.521.881.994 | 79,60 | 8.620.462.434.326 | 100,60 |
| 2 | BELANJA MODAL | 2.950.259.081.497 | 249.963.489.946 | 8,47 | 1.974.592.416.546 | 66,93 | 2.224.555.906.492 | 75,40 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 80.220.770.552 | 409.571.890 | 0,51 | 2.500.000 | 0,00 | 412.071.890 | 0,51 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | 3.241.864.064.782 | 589.881.701.482 | 18,20 | 2.244.637.843.273 | 69,24 | 2.834.519.544.755 | 87,43 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **14.841.275.954.424** | **2.640.195.315.649** | **17,79** | **11.039.754.641.813** | **74,39** | **13.679.949.957.463** | **92,18** |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah) 2021*

Jumlah realisasi Belanja Aceh Tahun 2021 sebesar Rp. 13.679.949.957.463 atau mencapai 92,18 persen dari proyeksi RKPA 2021 yang ditetapkan sebesar Rp.14.841.275.954.424,-. Jumlah realisasi belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 8.620.462.434.326,- atau sebesar 100,60 persen, Belanja Modal sebesar Rp. 2.224.555.906.492,- atau sebesar 75,40 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 412.071.890,- atau sebesar 0,51 persen dan Belanja Transfer sebesar Rp. 2.834.519.544.755,- atau sebesar 87,43 persen terhadap proyeksi RKPA 2021.

Dari gambaran realisasi tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 masih kurang optimal, hal ini terlihat pada realisasi belanja modal tercatat hanya sebesar 75,40 persen dari target RKPA, pada umumnya disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat dan membutuhkan waktu menjadi penyebab penyerapan belanja modal cenderung rendah.

Berdasarkan realisasi semester II tahun 2021, struktur realisasi belanja Aceh didominasi oleh belanja operasi (63,21 persen), diikuti oleh belanja transfer (20,72 persen), belanja modal (16,26 persen), dan belanja tidak terduga (0,003 persen).

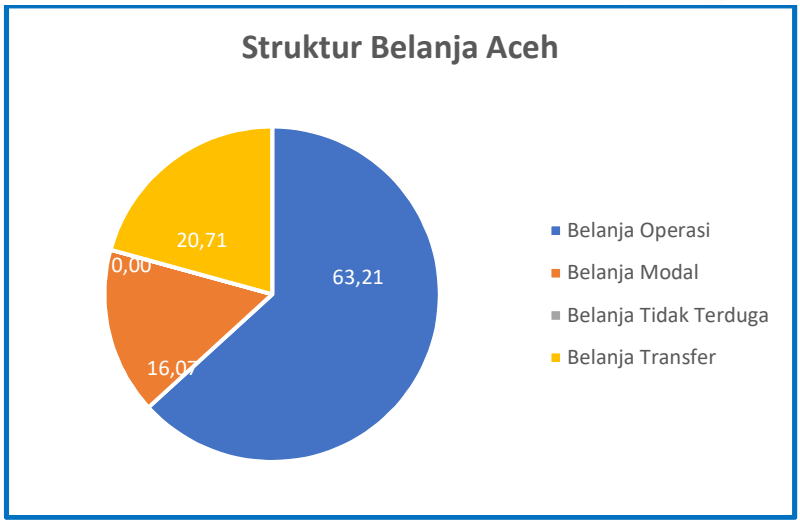


*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah), 2021*

**Gambar 2.93. Struktur Belanja Aceh Tahun 2021**

### 2.2.3.4 Realisasi Pembiayaan

Sampai dengan semester II tahun 2021, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 3.668.874.466.386 berasal dari penggunaan SILPA Tahun lalu dari sisi penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi dari pengeluaran pembiayaan berasal dari realisasi pembentukan dana cadangan dan realisasi penyertaan modal daerah. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat dapat dilihat Tabel berikut.

**Tabel 2.138.**
**Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2021**

| No | Jenis Belanja | Target 2021 | Realisasi 2021 | | | | Jumlah Realisasi Tahun 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | Rp | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **900.000.000.000** | **3.969.617.354.782** | **441,07** | **485.820.813** | **0,05** | **3.970.103.175.595** | **441,12** |
| 3.1.1 | Penggunaan SILPA | 900.000.000.000 | 3.969.617.354.782 | 441,07 | 485.820.813 | 0,05 | 3.970.103.175.595 | 441,12 |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **65.000.000.000** | **-** | **-** | **301.228.709.209** | **91,99** | **301.228.709.209** | **463,43** |

| No | Jenis Belanja | Target 2021 | Realisasi 2021 | | | | Jumlah Realisasi Tahun 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Semester I | | Semester II | | | |
| | | Rp | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 65.000.000.000 | | - | 59.791.509.209 | 91,99 | 59.791.509.209 | 91,99 |
| | Penyertaan Modal Daerah | | | | 241.437.200.000 | | 241.437.200.000 | |
| **JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO** | | **835.000.000.000** | **3.969.617.354.782** | **475,40** | **(300.742.888.396)** | **(36,02)** | **3.668.874.466.386** | **(22,31)** |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah) 2021*

### 2.2.3.5 Trend APBA

Berdasarkan data realisasi APBA kurun waktu 2016-2021, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

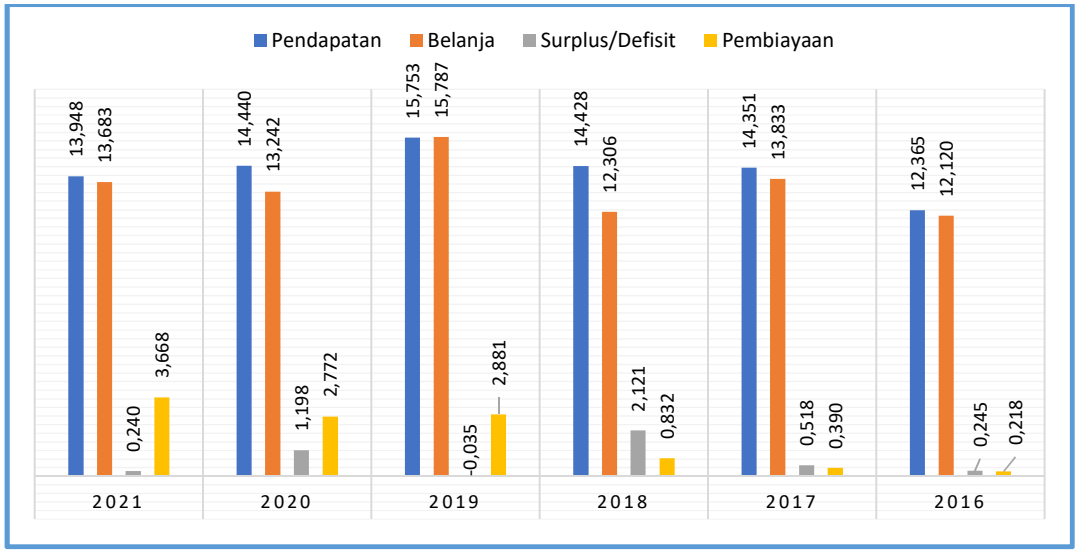


*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (2016-2020 audited, 2021 angka sementara)*

**Gambar 2.94. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)**

Dari gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2016 hingga 2019terjadi peningkatan pendapatan daerah, namun pendapatan mengalami penurunan

mulai di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 15,753 triliun sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 12,365 triliun. Trend belanja daerah mengalami fluktuatif, realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2016. Trend realisasi surplus menunjukkanfluktuatif, defisit terjadi pada tahun 2019. Demikian pula dengan Pembiayaan daerah netto juga menunjukkan trend yang fluktuatif, pada kurun tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 pembiayaan daerah netto menunjukkan penurunan namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan kembali.

#### 2.2.3.6 Metode Evaluasi

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Jenis belanja yang dievaluasi hanya Belanja Operasi dan belnaja Modal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2021. Penentuanpredikat, ditetapkan berdasarkan kiteria yang telah diatur seperti Tabel 2.139.

**Tabel 2.139.**
**Kriteria Kinerja**

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian RealisasiKinerja | KODE |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 % ≤ 100 % | Sangat Tinggi | ST |
| 2 | 76 % ≤ 90 % | Tinggi | T |
| 3 | 66 % ≤ 75 % | Sedang | S |
| 4 | 51 % ≤ 65 % | Rendah | R |
| 5 | ≤ 50 % | Sangat Rendah | SR |

### 2.2.3.7 Capaian Anggaran

Target anggaran RPJMA 2017-2022 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, dengan target alokasi anggaran sampai dengan tahun 2022 adalah sebesarRp. 48.358.533.415.075, dan target alokasi anggaran di tahun 2021 sebesar Rp. 14.841.275.954.424,- dengan tingkat realisasi keuangan sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar 92,18 persen dengan kriteria nilai sangat tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan anggarannya sudah optimal dilakukan, sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2021 merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJMA 2017-2022.

Secara lebih terperinci mengenai kondisi penggunaan anggaran untuk membiayai program/kegiatan selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.140.

**Tabel 2.140.**
**Tingkat Capaian Realisasi RPJMA (2018 s.d. 2022)**

| No | Uraian | Target Anggaran RPJMA 2018 s.d 2022 | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s.d 2020 | Realisasi RKPA Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s.d 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah (Rp) | | 48.358.533.415.075 | 14.841.275.954.424 | 24.068.687.209.491 | 13.679.949.957.463 | 37.748.637.166.953 |
| Persentase (%) | | 100 | 30,69 | 49,77 | 92,18 | 78,06 |

| No | Uraian | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA 2018 s.d 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Persentase (%) | | 75,77 | 92,18 | 86,74 | 78,06 |
| Predikat Kinerja | | T | ST | T | T |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah),2021

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
T = Tinggi (76% ≤ 90%)
S = Sedang (66% ≤ 75%)
R = Rendah (51% ≤ 65%)
SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Ditinjau secara lebih spesifik dari kinerja yang dicapai dari hasil pelaksanaan RKPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

d. Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan mencapai 92,18 persen dengan nilai kriteria Sangat Tinggi.
e. Rata-rata tingkat capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 75,77 persen dengan nilai kriteria Tinggi.
f. Urusan yang memiliki nilai realisasi tertinggi adalah Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan tingkat realisasi sebesar 111,75 persen dari Target Anggran RKPA Tahun 2021, sedangkan urusan dengan nilai realisasi terendah adalah Unsur Kekhususan dan Keistimewaan Aceh yang hanya mencapai 51,03 persen terhadap Target Anggran RKPATahun 2021.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai tingkat realisasi anggaran pada RKPA Tahun 2021 berdasarkan masing-masing urusan/bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 2.141.

**Tabel 2.141.**
**Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2021 Menurut Urusan/Bidang UrusanPemerintah**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **7.293.845.018.446** | **8.150.787.457.639** | **47,89** | **111,75** | **SR** | **ST** |
| 1 | 1.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 3.078.566.642.519 | 3.818.515.779.705 | 31,93 | 124,04 | SR | ST |
| 2 | 1.02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 2.362.533.773.378 | 2.429.814.950.278 | 21,99 | 102,85 | SR | ST |
| 3 | 1.03 | Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 1.475.532.495.179 | 1.191.803.854.546 | 78,96 | 80,77 | T | T |
| 4 | 1.04 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 177.757.511.512 | 517.059.755.568 | 54,49 | 290,88 | R | ST |
| 5 | 1.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 96.225.136.589 | 84.475.162.280 | 0,00 | 87,79 | ERR | T |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 6 | 1.06 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 103.229.459.269 | 109.117.955.262 | 237,04 | 105,70 | ST | ST |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **817.959.593.670** | **821.577.499.563** | **68,13** | **100,44** | **S** | **ST** |
| 7 | 2.07 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 40.587.935.953 | 37.799.323.156 | 58,68 | 93,13 | R | ST |
| 8 | 2.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 20.310.259.333 | 16.126.597.530 | 71,83 | 79,40 | S | T |
| 9 | 2.09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 39.711.833.268 | 37.190.224.108 | - | 93,65 | ERR | ST |
| 10 | 2.10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 13.740.905.219 | 11.167.643.237 | 87,91 | 81,27 | T | T |
| 11 | 2.11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 112.046.387.287 | 101.346.621.149 | 99,27 | 90,45 | ST | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 12 | 2.12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 13.344.803.617 | 13.406.186.707 | 101,52 | 100,46 | ST | ST |
| 13 | 2.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 36.600.271.300 | 23.890.559.791 | 77,69 | 65,27 | T | S |
| 14 | 2.14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | | | | | |
| 15 | 2.15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 97.153.161.084 | 82.550.757.979 | 77,61 | 84,97 | T | T |
| 16 | 2.16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | 40.613.002.393 | 37.630.074.991 | 128,35 | 92,66 | ST | ST |
| 17 | 2.17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 41.441.679.057 | 49.945.337.048 | 19,57 | 120,52 | SR | ST |
| 18 | 2.18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 33.096.006.715 | 45.273.117.182 | 111,11 | 136,79 | ST | ST |
| 19 | 2.19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 177.083.700.752 | 152.380.944.960 | 63,97 | 86,05 | R | T |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 20 | 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | - | 357.777.804 | - | #DIV/0! | ERR | #DIV/0! |
| 21 | 2.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | - | 297.177.479 | - | #DIV/0! | ERR | #DIV/0! |
| 22 | 2.22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 55.846.142.322 | 105.439.746.628 | - | 188,80 | ERR | ST |
| 23 | 2.23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 95.253.005.370 | 105.249.294.104 | - | 110,49 | ERR | ST |
| 24 | 2.24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 1.130.500.000 | 1.526.115.709 | - | 134,99 | ERR | ST |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | **809.063.246.872** | **652.227.659.116** | **66,99** | **80,62** | **S** | **T** |
| 25 | 3.25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | 176.304.617.258 | 137.015.863.977 | 139,92 | 77,72 | ST | T |
| 26 | 3.26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 28.996.830.704 | 28.771.187.623 | - | 99,22 | ERR | ST |
| 27 | 3.27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 434.201.785.832 | 337.977.864.155 | 206,50 | 77,84 | ST | T |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 28 | 3.28 | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | 64.335.200.000 | 59.188.742.216 | - | 92,00 | ERR | ST |
| 29 | 3.29 | Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 34.305.870.607 | 35.933.643.932 | 98,87 | 104,74 | ST | ST |
| 30 | 3.30 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 37.952.824.471 | 11.675.420.115 | 90,66 | 30,76 | ST | SR |
| 31 | 3.31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 19.881.118.000 | 34.504.263.586 | - | 173,55 | ERR | ST |
| 32 | 3.32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | 13.085.000.000 | 7.160.673.512 | - | 54,72 | ERR | R |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **514.821.650.445** | **435.163.200.872** | **72,89** | **84,53** | **S** | **T** |
| 33 | 4.01 | Sekretariat Daerah | 296.321.961.252 | 238.591.127.854 | 48,33 | 80,52 | SR | T |
| 34 | 4.02 | Sekretariat DPRD | 218.499.689.193 | 196.572.073.018 | 97,44 | 89,96 | ST | T |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **4.830.209.878.406** | **3.298.683.160.570** | **68,33** | **68,29** | **S** | **S** |
| 35 | 5.01 | Perencanaan | 113.539.055.288 | 58.478.676.995 | 71,79 | 51,51 | S | R |
| 36 | 5.02 | Keuangan | 4.442.664.356.754 | 3.000.320.320.283 | - | 67,53 | ERR | S |
| 37 | 5.03 | Kepegawaian | 40.912.263.400 | 26.005.841.415 | 88,60 | 63,56 | T | R |
| 38 | 5.04 | Pendidikan dan Pelatihan | 201.327.998.657 | 185.325.293.861 | 114,61 | 92,05 | ST | ST |
| 39 | 5.05 | Penelitian dan Pengembangan *) | 2.550.000.121 | 2.550.144.956 | - | 100,01 | ERR | ST |
| 40 | 5.06 | Penghubung | 29.216.204.186 | 26.002.883.059 | 66,65 | 89,00 | S | T |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | **49.672.353.975** | **39.829.994.928** | **96,85** | **80,19** | **ST** | **T** |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 41 | 6.01 | Inspektorat Daerah | 49.672.353.975 | 39.829.994.928 | 96,85 | 80,19 | ST | T |
| **VII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | **30.665.691.744** | **29.041.145.425** | **92,23** | **94,70** | **ST** | **ST** |
| 42 | 8.01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 30.665.691.744 | 29.041.145.425 | 92,23 | 94,70 | ST | ST |
| **VIII** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | **495.038.520.866** | **252.639.839.350** | **92,85** | **51,03** | **ST** | **R** |
| 43 | 9.01 | Kekhususan Aceh | | | | | | |
| | | Pendidikan | - | - | | | | |
| | | Kebudayaan | 30.584.830.099 | 10.604.043.013 | 55,96 | 34,67 | R | SR |
| | | Keagamaan | 455.187.506.431 | 209.573.417.958 | 91,97 | 46,04 | ST | SR |
| | | Kesatuan dan Perdamaian | 9.266.184.336 | 32.462.378.379 | 135,06 | 350,33 | ST | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014) | Target Anggaran RKPA Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| | | **Jumlah** | **14.841.275.954.424** | **13.679.949.957.463** | | | | |
| | | **Rata-Rata** | | | **75,77** | **92,18** | | |
| | | **Predikat Kinerja** | | | | | T | ST |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)2021

Ket :

ST = (Sangat tinggi / 91% ≤ 100%)

T = (Tinggi / 76% ≤ 90% )

S = (Sedang / 66% ≤ 75%)

R = (Rendah / 51% ≤ 65%)

SR = (Sangat Rendah / ≤ 50%

Berdasarkan strukturnya, realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2021 yang terbesar adalah pendanaan untuk bidang urusan wajib pelayanan dasar yaitu sebesar Rp. 8,151 Triliun atau sebesar 59,58 persen dari total realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2021, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urutan kedua adalah urusan penunjang urusan pemerintahan dengan tingkatcapaian sebesar 24,11 persen atau sebesar Rp. 3,299 Triliun, meliputi bidang Perencanaan, bidang Keuangan, bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan serta bidang penghubung. Ketiga adalah urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan tingakt capaian sebesar 6,01 persen atau sebesar Rp. 0,822 Trilliun, meliputi bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada gambar 2.95 sebagai berikut..

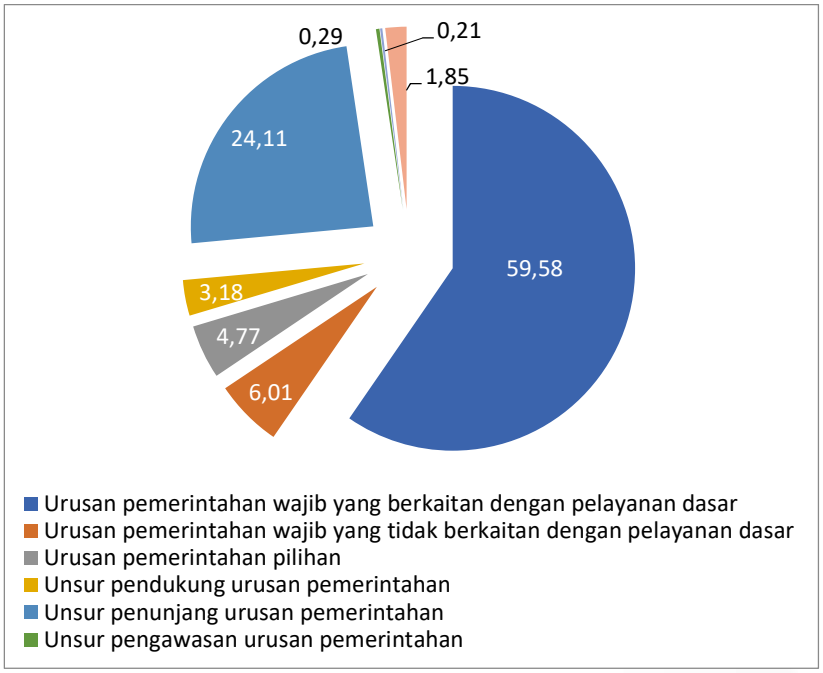


**Gambar 2.95. Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2021 (%)**

Tingkat Penggunaan anggaran RPJMA disajikan pada Gambar 2.82. Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan RPJMA mencapai 85,24 persen dengan nilai kriteria Tinggi, sedangkan rata-rata capaian kinerja anggaran program/kegiatanmencapai 86,74 persen dengan nilai kriteria Tinggi. Jumlah anggaran RPJMA menggunakan pagu RPJMA berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Sampai dengan tahun 2021, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan urusan dengan tingkat realisasi RPJMA tertinggi yaitu sebesar 244,05 persen dan Urusan Pemerintahan Pilihan memiliki tingkat realisasi RPJMA terendah atau sebesar 49,76 persen. Sedangkan berdasarkan distribusi belanjanya, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan realisasi belanjanya terbesar yaitu sebesar Rp. 26,015 Triliun atau sebesar 68,92 persen dari total realisasi RPJMA Tahun 2018 s/d 2021.

Capaian realisasi di atas 100 persen dan capaian kinerja memiliki nilai ERR disebabkan RPJMA 2017-2022 tidak dilakukan perubahan karena adanya beberapa peraturan yang berubah seperti (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera

**Tabel 2.142.**
**Tingkat Capaian Realisasi RPJMA 2018-2022**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **33.355.902.529.973** | **17.864.168.489.965** | **8.150.787.457.639** | **26.014.955.947.605** | **51,58** | **77,99** | **R** | **T** |
| 1 | 1.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 9.037.329.629.489 | 5.296.772.199.117 | 3.818.515.779.705 | 9.115.287.978.822 | 31,93 | 100,86 | SR | ST |
| 2 | 1.02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 8.923.075.582.655 | 5.549.301.823.293 | 2.429.814.950.278 | 7.979.116.773.571 | 58,93 | 89,42 | R | T |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 1.03 | Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 10.549.658.138.740 | 4.440.051.753.563 | 1.191.803.854.546 | 5.631.855.608.109 | 78,96 | 53,38 | T | R |
| 4 | 1.04 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 3.319.747.211.754 | 1.891.327.759.536 | 517.059.755.568 | 2.408.387.515.104 | 54,49 | 72,55 | R | S |
| 5 | 1.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman | 667.615.558.285 | 283.421.828.006 | 84.475.162.280 | 367.896.990.286 | 54,45 | 55,11 | R | R |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | |
| 6 | 1.06 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 858.476.409.051 | 403.293.126.450 | 109.117.955.262 | 512.411.081.712 | 237,04 | 59,69 | ST | R |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | **4.805.278.354.535** | **1.899.962.656.770** | **821.577.499.563** | **2.721.540.156.333** | **68,13** | **56,64** | **S** | **R** |
| 7 | 2.07 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 274.539.845.888 | 90.025.797.281 | 37.799.323.156 | 127.825.120.437 | 58,68 | 46,56 | R | SR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 2.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 64.941.974.873 | 28.961.576.643 | 16.126.597.530 | 45.088.174.173 | 71,83 | 69,43 | S | S |
| 9 | 2.09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 318.387.976.142 | 98.664.530.050 | 37.190.224.108 | 135.854.754.158 | 124,44 | 42,67 | ST | SR |
| 10 | 2.10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 61.951.115.000 | 20.873.635.429 | 11.167.643.237 | 32.041.278.666 | 87,91 | 51,72 | T | R |
| 11 | 2.11 | Urusan Pemerintahan | 370.006.872.227 | 72.148.109.713 | 101.346.621.149 | 173.494.730.862 | 99,27 | 46,89 | ST | SR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 12 | 2.12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 83.772.451.436 | 31.799.547.426 | 13.406.186.707 | 45.205.734.133 | 101,52 | 53,96 | ST | R |
| 13 | 2.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 132.740.100.002 | 96.315.088.917 | 23.890.559.791 | 120.205.648.708 | 77,69 | 90,56 | T | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 2.14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | - | - | - | | | | |
| 15 | 2.15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 1.261.193.154.416 | 547.867.894.042 | 82.550.757.979 | 630.418.652.021 | 77,61 | 49,99 | T | SR |
| 16 | 2.16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | 225.289.248.364 | 110.878.682.960 | 37.630.074.991 | 148.508.757.951 | 128,35 | 65,92 | ST | S |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | 2.17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 359.951.935.190 | 106.601.279.850 | 49.945.337.048 | 156.546.616.898 | 19,57 | 43,49 | SR | SR |
| 18 | 2.18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 138.171.108.465 | 62.871.677.555 | 45.273.117.182 | 108.144.794.737 | 111,11 | 78,27 | ST | T |
| 19 | 2.19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 686.544.376.919 | 323.074.101.288 | 152.380.944.960 | 475.455.046.248 | 63,97 | 69,25 | R | S |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | - | - | 357.777.804 | 357.777.804 | | - | ERR | ERR |
| 21 | 2.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | - | - | 297.177.479 | 297.177.479 | | - | ERR | ERR |
| 22 | 2.22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 305.847.910.050 | 163.057.434.356 | 105.439.746.628 | 268.497.180.985 | 0,00 | 87,79 | ERR | T |
| 23 | 2.23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 319.424.616.241 | 102.401.613.231 | 105.249.294.104 | 207.650.907.335 | 0,00 | 65,01 | ERR | S |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 2.24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 202.515.669.322 | 44.421.688.030 | 1.526.115.709 | 45.947.803.739 | 0,00 | 22,69 | ERR | SR |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | **5.945.005.436.590** | **2.306.231.512.257** | **652.227.659.116** | **2.958.459.171.373** | **133,99** | **49,76** | **ST** | **SR** |
| 25 | 3.25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | 1.400.830.629.867 | 580.206.968.239 | 137.015.863.977 | 717.222.832.216 | 139,92 | 51,20 | ST | R |
| 26 | 3.26 | Urusan Pemerintahan | 563.588.553.777 | 136.454.189.920 | 28.771.187.623 | 165.225.377.543 | - | 29,32 | ST | SR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Bidang Pariwisata | | | | | | | | |
| 27 | 3.27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 2.057.443.307.741 | 913.844.279.438 | 337.977.864.155 | 1.251.822.143.593 | 206,50 | 60,84 | ST | R |
| 28 | 3.28 | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | 702.933.943.478 | 272.488.444.738 | 59.188.742.216 | 331.677.186.954 | - | 47,18 | ST | SR |
| 29 | 3.29 | Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 339.305.472.437 | 157.636.626.410 | 35.933.643.932 | 193.570.270.342 | 98,87 | 57,05 | ST | R |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | 3.30 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 273.592.638.166 | 74.021.572.682 | 11.675.420.115 | 85.696.992.797 | 90,66 | 31,32 | ST | SR |
| 31 | 3.31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 292.237.486.089 | 74.406.963.084 | 34.504.263.586 | 108.911.226.670 | - | 37,27 | ST | SR |
| 32 | 3.32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | 315.073.405.035 | 97.172.467.746 | 7.160.673.512 | 104.333.141.258 | - | 33,11 | ST | SR |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **1.292.995.059.996** | **714.671.256.534** | **435.163.200.872** | **1.149.834.457.406** | **72,89** | **88,93** | **S** | **T** |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 4.01 | Sekretariat Daerah | 890.762.027.975 | 477.133.062.002 | 238.591.127.854 | 715.724.189.856 | 48,33 | 80,35 | SR | T |
| 34 | 4.02 | Sekretariat DPRD | 402.233.032.021 | 237.538.194.532 | 196.572.073.018 | 434.110.267.550 | 97,44 | 107,93 | ST | ST |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | **1.645.675.078.037** | **717.545.188.580** | **3.298.683.160.570** | **4.016.228.349.149** | **85,41** | **244,05** | **T** | **ST** |
| 35 | 5.01 | Perencanaan | 254.873.678.068 | 94.989.634.152 | 58.478.676.995 | 153.468.311.147 | 71,79 | 60,21 | S | R |
| 36 | 5.02 | Keuangan | 393.408.672.824 | 270.940.090.037 | 3.000.320.320.283 | 3.271.260.410.320 | - | 831,52 | ST | ST |
| 37 | 5.03 | Kepegawaian | 158.832.921.217 | 37.537.668.890 | 26.005.841.415 | 63.543.510.305 | 88,60 | 40,01 | T | SR |
| 38 | 5.04 | Pendidikan dan Pelatihan | 790.637.572.338 | 264.895.600.523 | 185.325.293.861 | 450.220.894.384 | 114,61 | 56,94 | ST | R |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39 | 5.05 | Penelitian dan Pengembangan *) | | | 2.550.144.956 | 2.550.144.956 | | | | |
| 40 | 5.06 | Penghubung | 47.922.233.590 | 49.182.194.978 | 26.002.883.059 | 75.185.078.037 | 66,65 | 156,89 | S | ST |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | **83.667.489.701** | **40.617.572.783** | **39.829.994.928** | **80.447.567.711** | **96,85** | **96,15** | **ST** | **ST** |
| 41 | 6.01 | Inspektorat Daerah | 83.667.489.701 | 40.617.572.783 | 39.829.994.928 | 80.447.567.711 | 96,85 | 96,15 | ST | ST |
| **VII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | **93.520.170.029** | **40.679.305.363** | **29.041.145.425** | **69.720.450.788** | **92,23** | **74,55** | **ST** | **S** |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 8.01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 93.520.170.029 | 40.679.305.363 | 29.041.145.425 | 69.720.450.788 | 92,23 | 74,55 | ST | S |
| **VIII** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | **1.136.489.296.214** | **484.811.227.239** | **252.639.839.350** | **737.451.066.589** | **92,85** | **64,89** | **ST** | **R** |
| 43 | 9.01 | Kekhususan Aceh | | | | | | | | |
| | | Pendidikan | - | - | - | - | | | | |
| | | Kebudayaan | 190.401.709.954 | 100.297.561.163 | 10.604.043.013 | 110.901.604.176 | 55,96 | 58,25 | R | R |
| | | Keagamaan | 906.345.702.510 | 333.675.694.693 | 209.573.417.958 | 543.249.112.651 | 91,97 | 59,94 | ST | R |
| | | Kesatuan dan Perdamaian | 39.741.883.750 | 50.837.971.383 | 32.462.378.379 | 83.300.349.762 | 135,06 | 209,60 | ST | ST |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan | Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022) | Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited) | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%) | | Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (K) | (Rp) | (K) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Jumlah** | | | **48.358.533.415.075** | **24.068.687.209.491** | **13.679.949.957.463** | **37.748.637.166.953** | | | | |
| **Rata-Rata** | | | | | | | **86,74** | **85,24** | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | T | T |

Sumber: BPKA (diolah),2021

Keterangan :

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

### 2.2.3.8 Capaian Kinerja

Berdasarkan data tersebut di atas, tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan Semester II tahun 2021 RKPA sebesar 75,77 persen sedangkan Kinerja capaian RPJMA sampai dengan Semester II tahun 2021 tercatat sebesar 86,74 persen.

**Tabel 2.143.**
**Lebih Detail terkait hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022 dilihat pada tabel 2.143 terlampir.**

## 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Aceh menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "Minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas Minimal tingkat cakupan dan kualitas Pelayanan Dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap Provinsi/Kabupaten/Kota pada batas waktu yang ditentukan. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi Dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
f. Sosial.

### 2.3.1 Bidang Urusan Pendidikan

SPM bidang urusan pendidikan mencakup 2 (dua) indikator pencapaian yang meliputi sebagai berikut:

1. Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;

2. Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.

Berdasarkan Tabel 2.122. diketahui Pemerintah Aceh tahun 2024 menargetkan 100% warga negara usia 16-18 tahun yang menerima pendidikan menengah dan 100% bagi warga dengan usia 4-18 tahun pada pendidikan khusus.

**Tabel 2.144.**
**Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2024**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Menengah | Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 100% | 2024 |
| 2. | Pendidikan Khusus | Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. | 100% | 2024 |

Pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 untuk indikator jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tahun 2021 mencapai 70,03 persen atau sebesar 179.785 orang dari 256.741 orang jumlah warga negara usia 16-18 tahun. Sementara itu untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus, dari jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas sebesar 7.662 orang hanya sebesar 4.275 orang atau sebesar 55.79 persen jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.145.

**Tabel 2.145.**
**Pencapaian Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2022**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Menengah | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun | 256.741 org | |
| | | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 | 179.785 org | 70,03% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | | |
| 2. | Pendidikan khusus | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas | 7.662 org | 55,79% |
| | | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus | 4.275 org | |

Realisasi pencapaian indikator kinerja SPM Bidang Pendidikan Aceh tahun 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 2.146. di bawah ini:

**Tabel 2.146.**
**Pencapaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | **TUNTAS MADYA** | | | 87.35% |
| **1.** | **Pendidikan Menengah** | | | | 76.98% |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | **Jumlah Total Yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | **60.99%** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani :** | *455,882* | *347,545* | **108,337** | **76%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **15.99%** |
| | | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** | **79.94%** |
| | 1. Buku teks pelajaran | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2. Perlengkapan belajar | 255,355 | 197,891 | 57,464 | 77.50% |

| No. | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | 6,499 | 6,499 | 0 | 100.00% |
| | 4. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C | 751 | 733 | 18 | 97.60% |
| | 5. Penyediaan biaya personil peserta didik | 167,721 | 117,421 | 50,300 | 70.01% |
| | 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 20,566 | 20,112 | 454 | 97.79% |
| | 7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 746 | 737 | 9 | 98.79% |
| | 8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat | 4,244 | 4,152 | 92 | 97.83% |
| **2 .** | **Pendidikan Khusus** | | | | **97.72%** |
| **s** | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | **Jumlah Total Yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | **78.50%** |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani :** | ***4,005*** | ***3,930*** | **75** | **98%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **19.22%** |
| | | **Jumlah Mutu Barang /** | **Jumlah Mutu Barang /** | **Jumlah Mutu Barang /** | **96.10%** |

| No. | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jasa Yang Dibutuhkan | Jasa Yang Tersedia | Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| | 2 . Perlengkapan belajar | 551 | 549 | 2 | 99.64% |
| | 3 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C | 67 | 56 | 11 | 83.58% |
| | 4 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | 1,322 | 1,322 | 0 | 100.00% |
| | 5 . Penyediaan biaya personil peserta didik | 1,348 | 1,320 | 28 | 97.92% |
| | 6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 436 | 412 | 24 | 94.50% |
| | 7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 63 | 61 | 2 | 96.83% |
| | 8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat | 218 | 210 | 8 | 96.33% |

### 2.3.2 Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan dasar pada SPM Bidang Urusan Kesehatan mencakup 2 (dua) indikator pencapaian yaitu 1) Jumlah warga negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan dan 2) Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan. Lebih jelas terkait target dan indikator penerima layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.147.

**Tabel 2.147.**
**Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi | Jumlah warga negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 2022 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 2022 |

Dari Tabel 2.126. diketahui realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 untuk jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi mencapai 81.25 persen atau sebesar 130 dari 160 yang ditargetkan. Sebaliknya untuk jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Provinsi hanya mencapai 15 persen atau sebesar 18.224 dari 121.499 yang direncanakan.

**Tabel 2.148.**
**Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Tahun 2022**

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI) | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 473,291 | 473,291 | 100,00% | 2,814 | 2,814 | 100,00% | 99,29% | TUNTAS PARIPURNA |
| 2 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar baisa (KLB) | 8,209 | 8,209 | 100,00% | 190,3 | 187,6 | 98,57% | | |

Tabel diatas menjelaskan 2 jenis layanan dasar standar pelayanan minimal bidang kesehatan Provinsi serta target dan realisasi capaian penerima layanan dasar di Aceh, adapun target yang akan diberikan layanan adalah semua penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dan semua penduduk pada kondisi kejadian luar biasa di Aceh tahun 2022.

**Tabel 2.149.**
**Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2022**

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM | TUNTAS PARIPURNA | | | 99.29% |
| **Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi** | | | | **100%** |
| | **Ya terjadi Bencana** | | | |
| **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | **jumlah total yang harus dilayani** | **jumlah total yang Terlayani** | **yang belum Terlayani** | **80%** |
| **Jumlah yang Harus Dilayani :** | **473,291** | **473,291** | **0** | **100%** |
| **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **20%** |
| | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** | **100%** |
| **1. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai** | 900 | 900 | 0 | 100% |
| **2. Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)** | 1400 | 1400 | 0 | 100% |
| **3. Kelengkapan Pendukung Kesehatan** | 500 | 500 | 0 | 100% |

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM<br>KATEGORI PENCAPAIAN SPM | Indikator Pencapaian / Output<br>TUNTAS PARIPURNA | | | Total Pencapaian<br>99.29% |
|---|---|---|---|---|
| **Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)** | | | | |
| **4. Dokter** | 2 | 2 | 0 | 100% |
| **5. Perawat** | 5 | 5 | | 100% |
| **6. Bidan** | | | | 100% |
| **7. Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain** | 1 | 1 | 0 | 100% |
| **8. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa** | 1 | 1 | 0 | 100% |
| **9. Apoteker dan/atau Asisten Apoteker** | 2 | 2 | 0 | 100% |
| **10. Tenaga penyuluh/promosi kesehatan** | 1 | 1 | 0 | 100% |
| **Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi** | **Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar** | | | **98.57 %** |
| | **Ya terjadi Bencana** | | | |
| **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | **jumlah total yang harus dilayani** | **jumlah total yang Terlayani** | **yang belum Terlayani** | **80%** |
| **Jumlah yang Harus Dilayani :** | **8,209** | **8,209** | **0** | **100%** |
| **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **18,57%** |
| | **Jumlah yang harus dilayani** | **Jumlah yang terlayani** | **Jumlah yang belum terlayani** | **92.86%** |
| **1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit** | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% |

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM<br>KATEGORI PENCAPAIAN SPM | Indikator Pencapaian / Output<br>TUNTAS PARIPURNA | | | Total Pencapaian<br>99.29% |
|---|---|---|---|---|
| **2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin** | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
| **3. Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier)** | 500 | 500 | 0 | 100% |
| **4. Tempat Sampah Biologis** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5. Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan** | 8.209 | 8.209 | 0 | 100% |
| **6. Alat Pemeriksaan Fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter,Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)** | 1.500 | 1.500 | 0 | 100% |
| **7. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit** | 2 | 2 | 0 | 100% |
| **8. Dokter** | 5 | 5 | 0 | 100% |
| **9. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi** | 5 | 5 | 0 | 100% |
| **10. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan** | 5 | 5 | 0 | 100% |
| **11. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi** | 5 | 5 | 0 | 100% |

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM | TUNTAS PARIPURNA | | | 99.29% |
| **12. Tenaga LaboratoriumTenaga Laboratorium** | 2 | 2 | 0 | 100% |
| **13. Tenaga penyuluh/promosi kesehatan** | 1 | 1 | 0 | 100% |
| **14. Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi** | 5 | 5 | 0 | 100% |

Untuk indikator pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) tidak dilakukan kajian Epidemiologi Provinsi karena KLB yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota yang meluas ke Kabupaten/Kota lainnya tidak memiliki hubungan epidemiologi yang meluas dengan tidak ada pengajuan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Provinsi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota terhadap dampak KLB yang terjadi di wilayahnya (sesuai dengan PMK Nomor. 4 tahun 2019 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Penanggulangan KLB yang dilakukan Dinas Kesehatan tahun 2021 berdasarkan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) berbasis KLB :

- Keracunan makanan (Kab. Aceh Timur, Kab. Bireuen dan Kab. Pidie)
- Campak (Kab. Bireuen)
- Difteri (4 kasus di Kab. Nagan Raya, 3 kasus di Kota Lhokseumawe, 3 kasus di Kab. Bireuen, 2 kasus di Kota Banda Aceh, dan 2 kasus di Kab. Aceh Timur).

### 2.3.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 adalah sebesar 100 persen dengan 2 (dua) indicator pencapaian yang meliputi: 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan 2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (lihat Tabel 2.150).

**Tabel 2.150.**
**Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Aceh Tahun 2021**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | 100% | 2021 |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | 100% | 2021 |

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Urusan yang meliputi: Sub Urusan Air Minum (Tabel 2.151) dan Sub Urusan Air Limbah (Tabel 2.152).

### 2.3.3.1 Sub Urusan Air Minum

Jenis pelayanan dasar standar teknis perumahan rakyat Pemenuhan kebutuhan layanan dasar Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.151.**
**Jenis Pelayanan Menurut Permen PUPR No 29/PRT/M/2018**

| Jenis Pelayanan | Provinsi | Kab/Kota |
|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota | Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari |
| Penerima Pelayanan Dasar | Penyelenggara SPAM oleh BUMD dan UPTD pada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima layanan Air Minum Curah Lintas kabupaten/kota. | Rumah Tangga, yang diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. |

| Jenis Pelayanan | Provinsi | Kab/Kota |
|---|---|---|
| Mutu Pelayanan Dasar | Kuantitas Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Rumah Tangga, yang diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari. Kualitas Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan (Kekeruhan, Warna, Rasa, Busa, Bau) | |

Untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Air pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Pemerintah Aceh telah merencanakan penyelenggaraan 2 (dua) SPAM Regional Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu :

- SPAM Regional Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara
- SPAM Regional Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar

Sementara itu, realisasi capaian indicator pencapaian SPM Sub Urusan Air Minum yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota sampai Tahun 2021 masih nol persen, hal ini mengingat belum adanya SPAM Regional yang dibangun di Aceh (Lihat Tabel 2.152).

**Tabel 2.152.**
**Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Air Minum Provinsi Aceh Tahun 2021**

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| **Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota** | **Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota** | | | |
| **Jumlah yang Harus Dilayani :** | *jumlah total yang harus dilayani | *jumlah total yang Terlayani | *yang belum Terlayani | |
| | **0** | **0** | **0** | |
| | **Jumlah warga negara yang** | **Jumlah warga** | **Jumlah yang** | **Persentase capaian** |

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| | **berhak mendapat layanan** | **negara yang terlayani** | **belum terlayani** | |
| **Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota** | 0 | 0 | **0** | **0%** |

### 2.3.3.2 Sub Urusan Limbah

Jenis pelayanan dasar standar teknis perumahan rakyat meliputi Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Regional lintas kabupaten/kota, dapat kita lihat pada Tabel 2.153.

**Tabel 2.153.**
**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**

| Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Mutu Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar |
|---|---|---|
| Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota | Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, Kuantitas Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik<br>Kualitas Pelayanan Dasar<br>1. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan<br>2. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan | Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah provinsi, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air. |

| | | |
|---|---|---|
| | kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. | |

Target Dan Indikator Penerima Layanan SPM Sub Urusan Air Limbah terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang meliputi : 1) tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (SPALD-S) dan 2) tersedianya sistem air limbah skala komunitas/Kawasan/kota (SPALD-T). Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.154.

**Tabel 2.154.**
**Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Sub Urusan Air Limbah Tahun 2021**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (SPALD-S) | - Rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestic berupa cubluk (penduduk < 25 jiwa/Ha)<br>- Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT (penduduk > 25 jiwa/Ha) | 100 % | 2021 |
| 2. | Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota (SPALD-T). | Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD | 100 % | 2021 |

Realisasi capaian indicator kinerja SPM Sub Urusan Penanganan Air Limbah Tahun 2021 adalah sebesar nol persen, hal ini disebabkan karena tidak adanya SPALD-S/T di Aceh.

**Tabel 2.155.**
**Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Penanganan Air Limbah Tahun 2021**

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | Total Pencapai an |
|---|---|---|
| **Penyediaan pelayanan** | **Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air** | |

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| **pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota** | **Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota** | | | |
| **Jumlah yang Harus Dilayani :** | jumlah total yang harus dilayani | jumlah total yang Terlayani | yang belum Terlayani | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | **Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan** | **Jumlah warga negara yang terlayani** | **Jumlah yang belum terlayani** | **Persentase capaian** |
| **Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan .** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPAL-T** | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapai an |
|---|---|---|---|---|
| **dengan kualitas pelayanan akses aman** | | | | |

### 2.3.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan dasar SPM Bidang urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.156.

**Tabel 2.156.**
**Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2021**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | 2021 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yangmemperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | 2021 |

Sementara itu, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar standar teknis SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Dari Tabel 2.135 diperoleh informasi mutu pelayanan dasar untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi adalah standar jumlah, dimana setiap unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, untuk kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Selanjutnya, untuk Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, mutu pelayanan dasar meliputi standar jumlah, dimana setiap rumah tangga yang terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani dan kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

**Tabel 2.157.**
**Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

| No | Perumahan Rakyat | Mutu Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi | **Standar jumlah** : Setiap unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi<br>**Kualitas pelayanan dasar** :<br>Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. | Setiap Rumah Tangga korban bencana provinsi yang memenuhi kriteria |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang | **Standar Jumlah**: Setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi sesuai | Setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi |

| No | Perumahan Rakyat | Mutu Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar |
|---|---|---|---|
| | terkena relokasi program pemerintah | dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani<br>K**ualitas pelayanan dasar**: Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing<br>layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni. | program Pemerintah Daerah yang memenuhi |

Untuk capaian indikator SPM Bidang urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.158.**
**Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2021**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi** | **Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni** | | | |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani :** | jumlah total yang harus dilayani | jumlah total yang Terlayani | yang belum Terlayani | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | **Jumlah yang harus dilayani** | **Jumlah yang terlayani** | **Jumlah yang belum terlayani** | **Persentase capaian mutu 100%** |
| | **1.** Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 | 0% |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 3. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2** | **Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi** | **Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi** | | | |
| | **Jumlah yang Harus Dilayani :** | jumlah total yang harus dilayani | jumlah total yang Terlayani | yang belum Terlayani | |
| | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | **Jumlah yang harus dilayani** | **Jumlah yang terlayani** | **Jumlah yang belum terlayani** | **Persentase capaian mutu 100%** |
| | 1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan | 0 | 0 | **0** | 0% |
| | 2. Penyediaan Rumah Layak Huni | 0 | 0 | **0** | 0% |

Pemerintah Aceh menyediakan rumah layak huni tidak hanya untuk korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi, namun juga untuk masyarakat Aceh yang masuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni. Pada tahun 2022 tidak ada bencana skala provinsi dan tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Jumlah Rumah Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dari tahun 2017 s.d Tahun 2022 adalah sebanyak 18.135 Unit dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.159.**
**Rumah Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh dari Tahun 2008 s.d 2021 2017 s.d 2022**

| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | 2017 | 1.389 unit |
| 2. | 2018 | 0 unit |
| 3. | 2019 | 4.007 unit |
| 4. | 2020 | 4.041 unit |
| 5. | 2021 | 757 unit |
| 6. | 2022 | 7.941 unit |
| **TOTAL** | | 18.135 Unit |

### 2.3.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi meliputi jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum nprovinsi dengan indikator pencapaian adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi. Lebih jelas terkait target dan penerima layanan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi disajikan pada Tabel 2.128.

SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi meliputi jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum nprovinsi dengan indikator pencapaian adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi. Lebih jelas terkait target dan penerima layanan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi disajikan pada Tabel 2.160 berikut ini.

**Tabel 2.160.**
**Target dan Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh Tahun 2024**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi Aceh | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | 100% | 2024 |

Target pencapaian SPM Trantibumlinmas Aceh tahun 2022 yang dapat dilaporkan adalah sebagaimana pada Tabel 2.161 berikut ini :

**Tabel 2.161.**
**Target dan Indikator Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | |
| | | Indikator | Target | Batas Capaian Waktu | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada diprovinsi | 100% | 2022 | 1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil<br>2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan<br>3. Standar sarana prasarana Satpol PP<br>4. Standar operasional prosedur Satpol PP | 100% | 2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat<br>6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | | |

Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Aceh tahun 2022 yang dapat dilaporkan pada Tabel 2.162. sebagai berikut.

**Tabel 2.162.**
**Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM** | | **BELUM TUNTAS** | | | **4.06%** |
| **1** | **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi** | | | | **4.06%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | **jumlah total yang harus dilayani** | **jumlah total yang Terlayani** | **yang belum Terlayani** | **0%** |
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani:** | 0 | 0 | 0 | **0%** |

| No. | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **4,06%** |
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** | **Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** | **20,29%** |
| | 1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 3. Standar sarana prasarana Satpol PP | 1.803 | 1.474 | 329 | 81.75% |
| | 4. Standar operasional prosedur Satpol PP | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat | 75 | 30 | 45 | 40% |
| | 6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan | 0 | 0 | 0 | 0% |

| No. | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | | | | |

### 2.3.6 Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menjelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang sosial dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kewenangan pada masing-masing unit pemerintahan yang meliputi kewenangan di tingkat pusat, kewenangan di tingkat provinsi dan kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.163.**
**Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

| No. | Sub Bidang | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pemberdayaan Sosial | a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).<br>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi.<br>c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial. | a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.<br>b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi. | a. Pemberdayaan sosial KAT.<br>b. Penerbitan izin Pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.<br>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.<br>d. Pembinaan lembagakonsultasi kesejahteraankeluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota. |
| 2. | Penanganan Warga | a. Penanganan warga negara | Pemulangan warga negara migran | Pemulangan warga negara migran korban |

| No. | Sub Bidang | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke daerah provinsi asal.<br>b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan(trafi cking) dalam dan luar negeri. | korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal. | tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal. |
| 3. | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficienc y Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome. | Rehabilitasi sosial **bukan/tidak termasuk** bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti. | Rehabilitasi sosial **bukan/tidak termasuk** bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. |
| 4. | Perlindungan dan Jaminan Sosial | a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA.<br>b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan | a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.<br>b. Pengelolaan data fakir miskin | a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.<br>b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. |

| No. | Sub Bidang | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | perintis kemerdekaan.<br>c. Pengelolaan data fakir miskin nasional. | cakupan Daerah provinsi. | |
| 5. | Penanganan Bencana | a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional.<br>b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. | Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi. | a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.<br>b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota. |
| 6. | Taman Makam Pahlawan | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri. | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi. | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. |
| 7. | Sertifikasi dan Akreditasi | a. Pemberian setifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.<br>b. Pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial. | | |

*Sumber : Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Berdasarkan Tabel 2.164. diatas menjelaskan bahwa dari 7 (tujuh) urusan pemerintahan bidang sosial terdapat 6 urusan yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Sosial Aceh. Untuk lebih jelasnya terkait capaian indikator kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.164.**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN BIDANG SOSIAL
SUB BIDANG 1. PEMBERDAYAAN SOSIAL

| No | Kegiatan | Capaian Kinerja | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | **Jumlah Kegiatan** Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang & Barang (PUB) yang sesuai dengan ketentuan. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (**PSKS**) Provinsi. | **Jumlah PSKS** yang mendapatkan penguatan (peralatan kerja, pelatihan, bimtek dan TOT) | **942** | **732** | **0** | **180** | **562** |
| | | 1. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). | 296 | 294 | 0 | 100 | 285 |
| | | 2. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). | 50 | 96 | 0 | 50 | 50 |
| | | 3. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga). | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| | | 4. SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu). | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| | | 5. Karang Taruna | 40 | 60 | 0 | 0 | 70 |
| | | 6. LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). | 25 | 30 | 0 | 0 | 35 |
| | | 7. WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat). | 120 | 130 | 0 | 0 | 30 |
| | | 8. Puspelkesos (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial). | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. CSR Kesos (Coorporate Social Responsibility - Kesejahteraan Sosial). | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel 2.164. di atas menjelaskan bahwa untuk urusan bidang sosial pada sub bidang 1 pemberdayaan sosial terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2018 s.d 2022 rata-rata hanya memberikan izin pengumpulan uang & barang (PUB) untuk 2-4 kegiatan. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proses izin kegiatan PUB.
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) provinsi yang mendapatkan penguatan berupa bantuan peralatan kerja atau pelatihan dan atau

bimbingan teknis dan atau *training of trainer* (TOT) jumlahnya memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2018 hingga 2020 dan menunjukkan trend meningkat kembali sejak tahun 2021. Semua bentuk kegiatan penguatan PSKS pada tahun 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi covid-19 dan refocusing anggaran APBA.

**Tabel 2.165.**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG 2. PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

| No | Kegiatan | Capaian Kinerja | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal. | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga. | 47 | 119 | 658 | 88 | 75 |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, Tahun 2023*

Selanjutnya Tabel 2.171. diatas adalah sub bidang 2 penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan atau mengalami masalah sosial terdampak bencana (alam dan sosial). Data tersebut di atas menunjukkan bahwa lonjakan pemulangan warga migran terjadi paling banyak pada tahun 2020 yang merupakan warga Aceh yang dipulangkan dari luar negeri dan dalam negeri ke provinsi Aceh dikarenakan pandemi *Covid-19*.

Dalam pelaksanaannya pemulangan warga negara migran yang dimaksud bukan hanya korban tindak kekerasan tetapi semua warga Aceh yang memiliki masalah sosial baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti mahasiswa Aceh di Wuhan China saat awal pandemi *Covid-19* melanda, mahasiswa Aceh yang meninggal dunia akibat sakit, nelayan Aceh yang ditangkap akibat melewati batas perairan sebuah negara dan dideportasi ke negara asal.

**Tabel 2.166.**

| CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB BIDANG 3. REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | |
| No | Kegiatan | Capaian Kinerja | Tahun | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rehabilitasi sosial **bukan/tidak termasuk** bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (**HIV/AIDS**) yang memerlukan rehabilitasi pada panti. | **Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** selain Bekas Korban NAPZA dan HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan **di dalam panti** kewenangan provinsi. | 7.640 | 7.154 | 6.612 | 6.568 | 6.519 |
| | | 1. Anak Terlantar | 7.067 | 6.573 | 6.097 | 6.086 | 6.077 |
| | | 2. Disabilitas Terlantar | 87 | 98 | 85 | 90 | 88 |
| | | 3. Lanjut Usia Terlantar | 347 | 358 | 353 | 317 | 279 |
| | | 4. Tuna Sosial | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 |
| | | 5. Anak Berhadapan dengan Hukum | 79 | 65 | 37 | 15 | 15 |
| | | 6. Remaja Putus Sekolah | 60 | 60 | 60 | 84 | 84 |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, Tahun 2023*

Capaian indikator kinerja urusan bidang sosial selanjutnya adalah sub bidang 3 Rehabilitasi Sosial seperti yang terlihat pada Tabel 2.166. tersebut diatas. Pada tabel 2.145. tersebut menjelaskan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti terdiri dari 6 (enam) masalah sosial yaitu anak terlantar, disabilitas terlantar, tuna sosial (gelandangan, pengemis, eks napi dan eks wanita tuna sosial), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan remaja putus sekolah.

Berdasarkan Tabel 2.167. tersebut diatas juga menjelaskan bahwa secara umum jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti cenderung berkurang dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal ini disebabkan jumlah permasalahan yang terjadi juga berkurang dan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), berkurangnya jumlah ABH yang ditangani oleh Dinas Sosial Aceh dikarenakan beberapa Dinas Sosial Kab/Kota telah memiliki Panti LPKS-ABH, sehingga kasus-kasus yang terjadi dapat ditangani langsung dan tidak lagi dirujuk ke LPKS-ABH Dinas Sosial Aceh.

**Tabel 2.167.**

| CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB BIDANG 4. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | |
| No | Kegiatan | Capaian Kinerja | Tahun | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penerbitan Izin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal. | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat (adopsi). | 23 anak | 11 anak | 25 anak | 29 anak | 31 anak |
| 2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah provinsi. | Jumlah Keluarga Miskin penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). | 1.097.326 Keluarga | 1.118.468 Keluarga | 1.155.326 Keluarga | 1.142.341 Keluarga | 1.111.185 Keluarga |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, Tahun 2023*

Selanjutnya berdasarkan Tabel 2.173 tersebut diatas menjelaskan bahwa capaian indikator kinerja urusan bidang sosial untuk sub bidang 4 perlindungan dan jaminan sosial terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal secara umum menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah anak terlantar (bayi terlantar) yang diproses adopsi. Bertambahnya jumlah bayi terlantar disebabkan banyaknya kasus-kasus penelantaran bayi akibat pergaulan bebas dan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi sepanjang kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi dengan capaian kinerja yang menunjukkan jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam **DTKS**. Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin cenderung bertambah sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 dan kemudian menurun sejak tahun 2021 dan terus menurun ditahun 2023. Peningkatan yang paling banyak terjadi di tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang memicu pelemahan pembangunan ekonomi sehingga menambah jumlah keluarga miskin.

Jumlah keluarga miskin perlahan mulai menurun di tahun 2021 dan semakin menurun di tahun 2022. Hal ini disebabkan setelah pandemi mereda berbagai program pemerintah terus diberikan dalam berbagai jenis program perlindungan dan jaminan sosial sehingga meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI.

Dasar hukum penggunaan dan pengelolaan DTKS mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Aplikasi yang digunakan oleh Kemensos RI untuk menjalankan DTKS adalah aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – New Generation (SIKS-NG). Sampai dengan bulan Juli 2022 berdasarkan dashboard SIKS-NG Dinas Sosial Aceh terlihat bahwa dari jumlah 5.347.889 jiwa penduduk Aceh (*Data Konsilidasi Bersih Semester II Tahun 2021 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh*), jumlah penduduk Aceh yang telah terdaftar ke dalam SIKS-NG adalah sebanyak 3.429.389 jiwa atau sama dengan 64,13 % jumlah penduduk Aceh.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa tidak semua keluarga miskin yang masuk ke dalam DTKS mendapatkan semua jenis program perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk *program perlindungan sosial* seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng dan Bahan Bakar Minyak dan lain-lain menyasar keluarga miskin yang berbeda dengan sasaran keluarga miskin yang mendapatkan *program jaminan sosial* seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Indonesia Pintar (PIP) dan bentuk program jaminan sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk pemerataan pemberian bantuan.

**Tabel 2.168.**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG 5. PENANGANAN BENCANA

| No | Kegiatan | Capaian Kinerja | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi. | Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | 125.907 jiwa | 156.203 jiwa | 179.766 jiwa | 205.922 jiwa | 236.080 jiwa |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, Tahun 2023*

Selanjutnya Tabel 2.174. tersebut di atas menjelaskan bahwa jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah korban bencana tersebut disebabkan banyaknya intensitas bencana yang terjadi di Aceh terutama korban bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan kebakaran rumah. Bentuk bantuan sosial yang diberikan adalah logistik sandang (pakaian sehari-hari, perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi dan sanitasi) dan pangan (mie instan, minyak goreng, air mineral, saos sambal, biscuit, sarden dan kecap) dalam masa tanggap darurat bencana (7 hari setelah bencana terjadi).

Bantuan sosial untuk korban bencana tersebut bersifat logistik disimpan di Gudang Bufferstock milik Dinas Sosial Aceh yang berada di 23 Kab/kota dan 2 Gudang Induk di Banda Aceh. Hal ini dimaksudkan agar bantuan untuk korban bencana dapat disalurkan ke lokasi bencana paling lambat 1 jam setelah bencana terjadi oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berjumlah 775 orang di seluruh Aceh. Apabila dibutuhkan dan terjadi pengungsian akibat bencana Dinas Sosial Aceh juga membuka Dapur Umum Lapangan (Dumlap) di lokasi bencana dengan melibatkan pilar-pilar kesejahteraan sosial antara lain Tagana, TKSK, PSM dan Karang Taruna. Pilar-pilar kesejahteraan sosial tersebut juga membantu Dinas Sosial Aceh dalam mendata korban terdampak bencana.

**Tabel 2.169.**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG 6. TAMAN MAKAM PAHLAWAN

| No | Kegiatan | Capaian Kinerja | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi. | Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang terawat. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, Tahun 2023*

Selanjutnya adalah Tabel 2.175. yang merupakan capaian indikator kinerja urusan bidang sosial yang terakhir berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Aceh. Tabel 7 tersebut di atas menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) Makam Pahlawan Nasional (MPN) dan 1 (satu) Taman Makam Pahlawan Provinsi (TMP) yang harus dijaga dan dirawat.

Adapun Makam Pahlawan Nasional yang berada di bawah pengawasan dan perawatan Dinas Sosial Aceh adalah :

1. Taman Makam Pahlawan di Banda Aceh.
2. Taman Makam Pahlawan Nasional Sultan Iskandarmuda di Banda Aceh.
3. Taman Makan Pahlawan Nasional Laksamana Malahayati di Aceh Besar.
4. Taman Makam Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief di Aceh Besar.
5. Taman Makam Pahlawan Nasional Tengku Chik Di Tiro di Aceh Besar.
6. Taman Makam Pahlawan Nasional Teuku Umar di Aceh Barat.
7. Taman Makam Pahlawan Nasional Cut Mutia di Aceh Utara.

Urusan Sosial menjadi salah satu dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 ayat (2). Untuk melaksanakan hal ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Untuk melaksanakan SPM tersebut dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selanjutnya penerapan SPM Bidang Sosial dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permensos ini dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis SPM Bidang Sosial yang menjadi kewenangan dan tupoksi Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.170.**
**Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
**Bidang Sosial**

| No. | Kewenangan Provinsi | Kewenangan Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar **di dalam** Panti Sosial. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar **di luar** Panti Sosial. |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar **di dalam** Panti Sosial. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar **di luar** Panti Sosial. |
| 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar **di dalam** Panti Sosial. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar **di luar** Panti Sosial. |

| No. | Kewenangan Provinsi | Kewenangan Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis **di dalam** Panti Sosial. | Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis **di luar** Panti Sosial. |
| 5. | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. |

*Sumber : Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang SPM Bidang Sosial*

Berdasarkan Tabel 2.169. tersebut diatas dapat dilihat bahwa kewenangan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota adalah **Rehabilitasi Sosial Dasar** kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana (alam dan sosial). **Perbedaan utama kewenangan** antara Dinas Sosial **provinsi** dengan Dinas Sosial **Kabupaten/Kota** adalah **di dalam panti sosial** dan **di luar panti sosial**. Adapun capaian indikator kinerja Dinas Sosial Aceh berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebagai berikut.

**Tabel 2.171.**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL
DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2018 s.d 2022

| No | Jenis SPM Bidang Sosial | Capaian Kinerja | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | **Jumlah Total** | **126.245** | **156.541** | **180.118** | **206.281** | **236.447** |
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar **di dalam** Panti Sosial. | Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. | 55 Org | 53 Org | 56 Org | 57 Org | 54 Org |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar **di dalam** Panti Sosial. | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. | 151 Org | 149 Org | 159 Org | 162 Org | 160 Org |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar **di dalam** Panti Sosial. | Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. | 72 Org | 76 Org | 77 Org | 75 Org | 78 Org |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis **di dalam** Panti Sosial. | Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. | 60 Org | 60 Org | 60 Org | 65 Org | 75 Org |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. | Jumlah masyarakat korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | 125.907 Jiwa | 156.203 Jiwa | 179.766 Jiwa | 205.922 Jiwa | 236.080 Jiwa |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel 2.171. tersebut di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2018 s.d 2022 Dinas Sosial Aceh telah memberikan pelayanan yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial kewenangan provinsi. Semua jenis pelayanan rehabilitasi dasar yang diberikan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial dilaksanakan melalui sistem di dalam panti.

Hingga saat ini Dinas Sosial Aceh memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan SPM Bidang Sosial yaitu :

1. UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya (**RSBM**) adalah panti sosial untuk disabilitas netra dan tuna sosial, berkapasitas 50 orang, berlokasi di Ladong Kabupaten Aceh Besar.
2. UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna (**RSJN**) adalah panti sosial untuk remaja putus sekolah dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), berkapasitas 50 anak, berlokasi di Lampineung Kota Banda Aceh.
3. UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (**RSGS**) adalah panti sosial untuk lanjut usia terlantar, berkapasitas 70 orang, berlokasi di Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
4. UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (**RSAN**) adalah panti sosial untuk anak terlantar, anak korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, berkapasitas 60 anak, berlokasi di Keutapang Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya beradasarkan Tabel 9 tersebut di atas juga memperlihatkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal ini disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial terlantar yang mendapatkan pelayanan di 4 UPTD Dinas Sosial Aceh jumlahnya cenderung stabil dikarenakan disesuaikan dengan jumlah kapasitas setiap panti.

Khusus untuk msayarakat korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat disalurkan langsung kepada masyarakat setelah terjadi bencana dalam bentuk bantuan logistik sandang dan pangan. Penyaluran bantuan logistik tanggap darurat di lokasi bencana dilaksanakan dengan pelibatan dan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, aparat TNI dan Polri ditingkat desa dan kecamatan serta pelibatan aktif pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu : Tagana, TKSK, PSM dan Pendamping PKH serta Karang Taruna.

## 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) global yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 pada saat UN Sustainable Summit 2015 mengadopsi dokumen "*Transformasi Our Word: 2030 Agenda for Sustainable Development*" sebagai dokumen Agenda Pembangunan Berkelanjutan

2030. Dokumen tersebut memuat tujuan/goals dan target dari TPB/SDGs yang terdiri atas 17 tujuan/goals dan 169 target yang menggambarkan sasaran dan lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi. Tujuan dan target tersebut menjadi panduan bagi masyarakat global selama 15 tahun ke depan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan/goals TPB dapat dilihat pada Gambar 2.73

*Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan salah satu elemen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan untuk menghadapi permasalahan global secara menyeluruh dan melibatkan multistakeholder dalam proses pembangunan. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Target pencapaian dari setiap aksi pembangunan yang tertuang dalam RAD TPB harus diukur dan disampaikan ke Bappenas secara tahunan melalui aksi monitoring dan evaluasi (monev). Monev dapat dijadikan sebagai *tools* untuk melihat sejauh mana pencapaian dari setiap target dan indikator serta program kegiatan yang telah melampaui atau bahkan masih jauh dari target pencapaian yang telah ditetapkan. Monev tersebut juga merupakan bagian dari amanat yang tertuang didalam Perpres No. 59 tahun 2018 dan diterjemahkan pelaksanaannya di dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### 2.4.1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan jaminan tersebut merupakan upaya dalam penuntasan kemiskinan yang terjadi dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin. Salah satu program Jaminan Sosial Pemerintah Aceh dalam rangka pemenuhan hak masyarakat adalah Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Persentase proporsi kepesertaan JKA mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2020 dengan capaian berturut-turut sebesar 99,5 persen dan 98,14 persen. Namun sebaliknya pada tahun 2021 persentasenya meningkat tajam menjadi sebesar 105,13 persen. Perkembangan persentase kepesertaan JKA Tahun 2018 s.d 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.96 berikut:

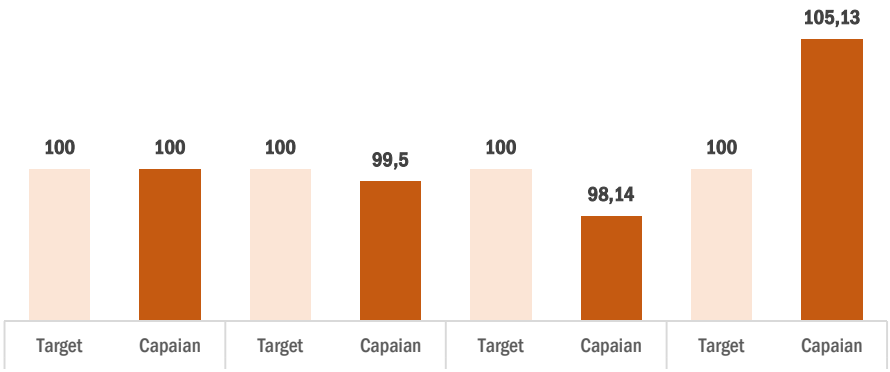


**Gambar 2.96.**
**Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun 2018 – 2021 (Persentase)**

Pencapaian indikator JKA telah diupayakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh dengan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat yang telah direaliasasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.021.230.712.617. Selain jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi hal mendasar dalam pencapaian tujuan ke-1 TPB/SDGs ini. Program jaminan sosial ketenagakerjaan dihadirkan untuk memberikan rasa aman bagi pekerja atas risiko finansial akibat kecelakaan atau kerugian lainnya yang mengancam jiwa selama melakukan aktivitas pekerjaan. Kepesertaan jaminan ketenagakerjaan di Aceh memiliki capaian yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pencapaiannya melebihi angka target yang telah ditetapkan di dalam RAD TPB/SDGs. Pada tahun 2021, kepesertaannya mencapai 276.790 peserta dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 128.000 peserta. Perkembangan indikator kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan di Aceh dari tahun 2018 hingga 2021 dapat diihat pada Gambar 2.97.

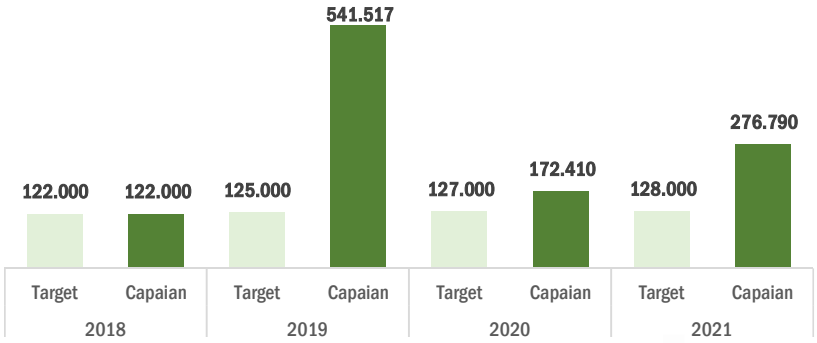


**Gambar 2.97.**
**Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan/Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Tahun 2018 - 2021**

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Jamsostek non ASN pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp.3.290.449.500.-. Selain JKA dan Jamsostek, terdapat beberapa indikator lainnya yang juga mengalami kemajuan, yakni Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah). Namun bila dilihat dari perkembangannya, indikator RT air minum layak telah mencapai target dan meningkat setiap tahun. Namun pada indikator RT sanitasi layak mengalami peningkatan per tahun namun belum mencapai target.

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL),dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Perkembangan RT sanitasi dan air minum layak di Aceh dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.98 berikut.

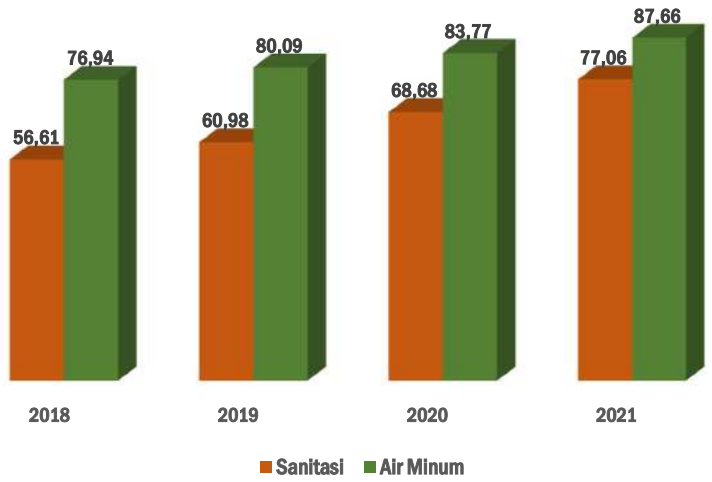


**Gambar 2.98.**

**Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Aceh Tahun 2018 - 2021**

Berdasarkan Gambar 2.98 diketahui persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak Tahun 2016 s.d 2021 mengalami peningkatan. Capaian sanitasi dan air minum secara berurutan 77,06 dan 87,66 persen. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Pencapaian terhadap kedua indikator tersebut telah diupayakan melalui 2 (dua) program yang terdapat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yakni Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) melalui kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang telah direaliasasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 282.609.704.628,-. Program berikutnya yang dilakukan dalam menunjang perbaikan air minum yakni Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.247.368.904,-. Selain sanitasi dan air minum terdapat beberapa indikator lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh. Secara detil status indikator yang mengalami kemajuan tahun 2021 pada tujuan ke-1 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.172.

**Tabel 2.172.**
**Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan**
**(Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan)**

| TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE INDIKATOR | NAMA INDIKATOR SDGs | SUMBER DATA | SATUAN | 2017 (BASELINE) | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | STATUS |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan /Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS | % | 95.051 | 128.000 | 276.790 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 98,28 | 98,5 | 99,81 | ● |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial/ Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (proxy) | Dinas Sosial; BPBA; Podes | Persen | 100 | 100 | 100 | ● |
| 1.3.1 (a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan/ JKA (proxy) | | | | 100 | 105,13 | ● |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 55,6 | 77,2 | 87,66 | ● |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki | Susenas BPS | % | 48,03 | 81,53 | 77,06 | ▶ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah) | | | | | | |

### 2.4.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Stunting (bertubuh pendek) merupakan salah satu masalah serius kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya di provinsi Aceh. Penyebab utama dari stunting diketahui karena kekurangan gizi pada anak usia di bawah lima tahun. Determinasi faktor penyebab stunting pada anak di Aceh sangat diperlukan untuk membantu perencana pengelolaan kesehatan masyarakat, dalam upaya menurunkan masalah stunting.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan bahwa pencapaian angka stunting anak balita di Aceh pada tahun 2021 sebesar 33,02 persen. Nilai tersebut meningkat bila dibandingkan dengan pencapaiannya pada tahun 2019 dan 2020, dengan nilai berturut-turut sebesar 14,50 dan 19 persen. Perkembangan balita stunting di Aceh dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.99 sebagai berikut:

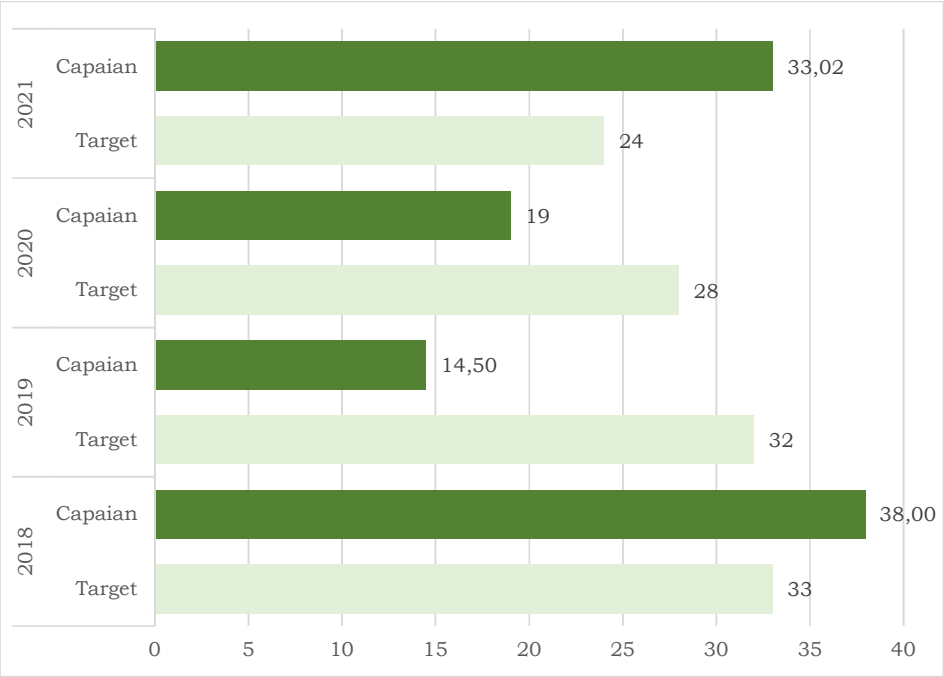


**Gambar 2.99. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.**

Dalam menanggulangi stunting di Aceh, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan yakni kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Selain itu juga penurunan angka stunting dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Secara garis besar penanggulangan stunting dilakukan di beberapa kab/kota dengan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Selain stunting, indikator lainnya yang perlu mendapat perhatian yakni indikator skor PPH yang belum mencapai target. Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Untuk melihat status pencapaian indikator stunting dan skor PPH Aceh.

Berdasarkan peneltian Ramadhan R dan Ramadhan N (2018) bahwa faktor determinan penyebab stunting yang utama di Aceh disebabkan oleh rendahnya pemberian ASI eksklusif terhadap balita (0-59 bulan), selain itu ASI tidak diberikan secara sempurna oleh ibu. Faktor kedua adalah pengangguran yang masih tinggi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi. Hal tersebut menjadi tantangan serta permasalahan dalam penurunan stunting di Aceh, sebagai salah satu indikator dalam tujuan ke-2 TPB/SDGs di Aceh.

Dalam mengatasi permasalahan pada tujuan ke-2 terutama penurunan stunting dan peningkatan skor PPH di Aceh dapat dilakukan dengan beberapa strategi dan arah kebijakan diantaranya: a) Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal; dan b) Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor.

### 2.4.3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

HIV/ AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, tranfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian dan penularan dari ibu ke anak (perinatal). Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui

melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) (Profil Kesehatan Aceh, 2017).

**Gambar 2.100. Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa Tahun 2018 – 2022**

Penurunan angka prevalensi HIV tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan yang telah melakukan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang telah direalisasikan pada tahun 2022. Selain itu juga dalam upaya sosialisasi, telah dilakukan kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi serta kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Selain angka prevalensi HIV, indikator lainnya yang juga mempunyai capaian yang cukup baik yakni Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B dan Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Aceh.

### 2.4.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Insklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan akses bagi penduduk terutama remaja usia sekolah dalam menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA/sederajat. APK untuk jenjang sekolah SMA/SMK/MA/sederajat nilainya dibawah seratus. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua penduduk usia 16-18 tahun sedang mengenyam pendidikan pada jenjang tersebut, kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawah atau di atasnya. Selama tahun 2018-2021, APK SMA/SMK/MA/sederajat

cenderung meningkat. APK pada jenjang ini meningkat 0,81 poin pada tahun 2020 dan 2021 dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan terjadi pada APK SMA/SMK/MA/sederajat jenis kelamin perempuan, yaitu dari 91,65 persen di tahun 2019 menjadi 93,36 persen di tahun 2020.

Di sisi lain, perbedaan APK SMA/SMK/MA/sederajat antar wilayah tempat tinggal juga cukup signifikan, pada tahun 2020 APK SMA/SMK/MA/sederajat di wilayah perkotaan adalah 95,31 persen sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 88,74 persen. Diperlukan perhatian pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan yang sedang dilakukan di perdesaan, agar APK SMA/SMK/MA/sederajat antara perkotaan dan perdesaan menjadi lebih seimbang. Meskipun secara umum terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun pencapaian APK tahun 2021 belum mencapai atau sama dengan target yang telah ditetapkan sebesar 99,3 persen, sehingga indikator ini masih dikelompokkan ke dalam indikator yang masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Perkembangan APK SMA/MA/SMK sederajat di Aceh tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.101 berikut.

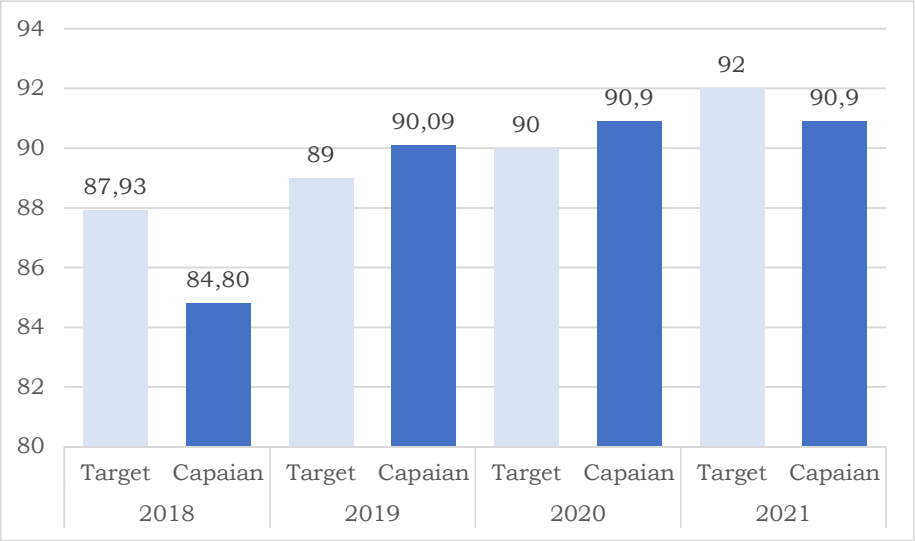


**Gambar 2.101. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat**

Pencapaian indikator tersebut diatas juga tidak terlepas dari peran serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehinga kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan direalisasikan pada tahun 2021. Selain itu juga, kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Penyiapan dan Tindak Lanjut evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan turut direalisasikan

dengan anggaran berturut-turut sebesar Rp. 585.274.600,- dan Rp. 342.329.000,-. Secara umum pencapaian derajat pendidikan di Aceh sudah cukup baik, namun belum dapat mencapai target dan dan melampaui rata-rata nasional. Untuk melihat status pencapaian indikator Pendidikan yang masih memerlukan perhatian khusus pada tujuan ke-4 TPB/SDGs Aceh.

### 2.4.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak hak perempuan dan masyarakat. Secara umum keterwakilan perempuan dalam menempati kursi legislatif di DPRA dan DPRD Kab/Kot pada tahun 2021 masih cukup rendah sebesar 16,05 persen. Namun demikian bila dicermati dari target yang ditetapkan kondisi tersebut sudah melebihi dari nilai target sebesar 16 persen. Secara detail, hanya di Kabupaten Aceh Tamiang yang keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai lebih dari 30 persen yaitu 36,67 persen. Sedangkan Kabupaten/kota lain termasuk provinsi, keterwakilannya bervariasi dari yang peling rendah di Kabupaten Aceh Utara (2.22%) sampai yang tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang. Perkembangan indikator keterwakilan perempuan di DPR Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.102. berikut.

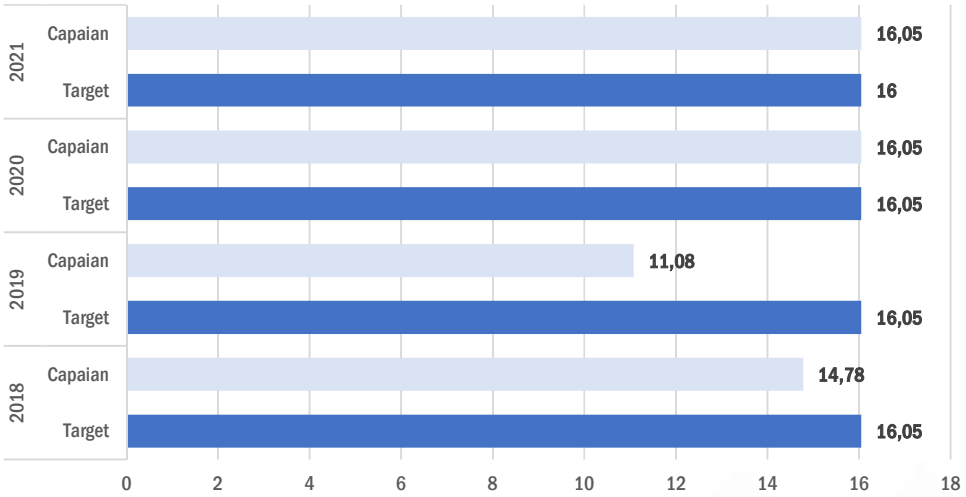


**Gambar 2.102.**

**Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah/Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR (proxy) Tahun 2018 – 2021**

Peran dan fungsi pemerintah tidak luput dalam memberikan pendidikan dan pelayanan politik bagi perempuan Aceh. Hal tersebut terlihat dari peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi. Kegiatan tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 499.677.968,- pada tahun 2021.

Selain keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan, pada tujuan ke-5 TPB/SDGs juga menitikberatkan pada indikator perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yang mendapatkan layanan hukum dari pemerintah. Meskipun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang belum menggembirakan, dengan kasus 689 kasus di tahun 2020, namun perempuan korban kekerasan tersebut telah difasilitasi melalui bantuan hukum sebanyak 80% dari angka total koban kekerasan. Kasus KDRT menjadi kasus yang paling banyak dialami oleh perempuan (216 kasus) dan kekerasan psikis sebanyak 160 kasus. Secara garis besar perkembangan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan bantuan hukum oleh pemerintah dapat dilihat pada Gambar 2.103. berikut.

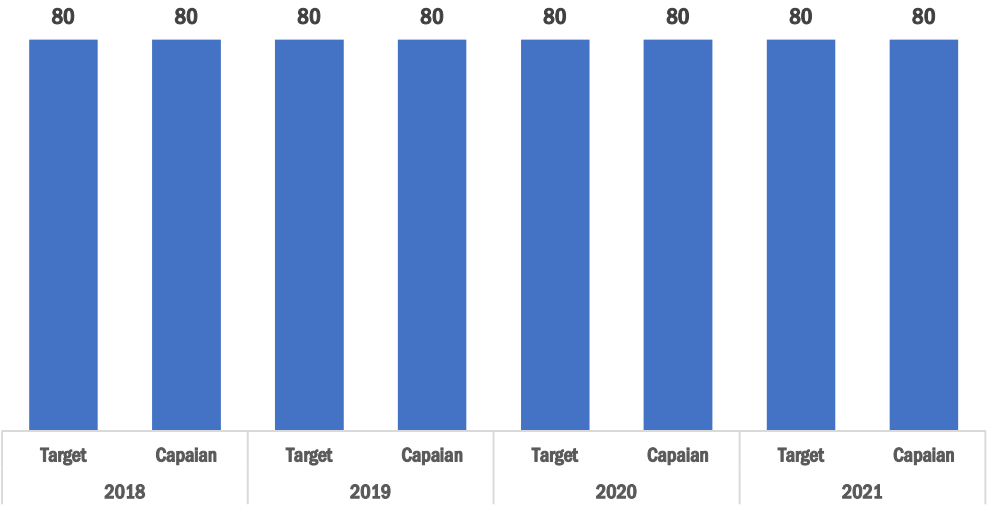


**Gambar 2.103.**
**Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif/ Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Proxy) Tahun 2018 – 2021**

Dalam memberikan layanan dan partisipasi terhadap perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan sejumlah program dan kegiatan melalui Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Program tersebut dintaranya: a) Program Perlindungan Perempuan dan b) Program Perlindungan Khusus Anak. Pada program perlindungan perempuan, realisasi kegiatan terbesar yakni kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 618.991.600,-. Selain itu juga dilakukan kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi. Kedua kegiatan tersebut telah direaliasasikan berturut-turut sebesar Rp. 416.750.730,- dan Rp. 243.086.720,-

Pada program perlindungan khusus anak, terdapat 2 (dua) kegiatan utama yang telah direalisasikan pada tahun 2021 yakni kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan kegiatan Advokasi Kebijakan, Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi, dengan realiasasi masing-masing sebesar Rp. 397.661.900,- dan Rp. 160.519.430,-. Status pencapaian kedua indikator tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 2.173. berikut ini.

**Tabel 2.173.**
**Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan**
**(Tujuan 5 Kesetaraan Gender)**

| TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE INDIKATOR | NAMA INDIKATOR SDGs | SUMBER DATA | SATUAN | 2017 (BASELINE) | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | STATUS 2021 |
| 5.2.2 (a) | Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/ Cakupan perempuan dan anak korban | DP3A | % | 80 | 80 | 80 | ● |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy) | | | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah/Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (proxy) | DP3A | **%** | 13,58 | 16,05 | 16,05 | |

**Gambar 2.104. Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy)**

Dalam memberikan layanan dan partisipasi terhadap perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan sejumlah program dan kegiatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Program tersebut dintaranya: a) Program Perlindungan Perempuan dan b) Program Perlindungan Khusus Anak.

Pada program perlindungan perempuan, realisasi kegiatan terbesar yakni kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilakukan kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.

Pada program perlindungan khusus anak, terdapat 2 (dua) kegiatan utama yang telah direalisasikan pada tahun 2022 yakni kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan kegiatan Advokasi Kebijakan, Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi.

Dalam mencapai tujuan ke-5, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam pencapaian indikator-indikator yang masih menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Aceh. Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian tujuan ke-5 ini. Jika diidentifikasi faktor yang mempengaruhi kelemahan keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen adalah masih kuatnya praktik patriarkhi dari sebagian anggota parlemen laki-laki. Kemudian, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kiprah perempuan di parlemen yang berkaitan dengan agama, tradisi/budaya dan kebijakan pemerintah juga menjadi pemicu kurang bekerjanya peran perempuan parlemen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Aceh. Selain itu, masih lemahnya inisiatif dari perempuan itu sendiri di parlemen ditengarai menjadi salah satu celah perempuan tidak banyak berbuat, bertindak dan bersauara di parlemen. Hal lain yang mungkin menjadi penghambat kurang bekerjanya parlemen di Aceh adalah kurangnya dukungan dari masyarakat sipil, organisasi yang intens dalam gerakan perempuan, media dan akademisi dalam mendampingi para anggota dewan perempuan dalam mengawal agar lebih terarah dan terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

### 2.4.6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Selain pengelolaan air bersih dan sanitasi, Indikator populasi dengan fasilitas cuci tangan juga menjadi indikator yang telah ditetapkan dalam RAD TPB/SDGs. Namun secara pencapaian belum diperoleh data tahun 2022, sehingga masih menggunakan data

tahun 2020. Pada tahun 2020 indikator persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sempat menurun di tahun 2019 namun kemudian kembali meningkat di tahun 2020. Peningkatan di tahun 2020 terjadi baik menurut tempat tinggal maupun secara keseluruhan. Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sebesar 67,98 persen, meningkat 3,98 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kebiasaan dalam mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.

Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, penduduk perkotaan lebih memperhatikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan dibandingkan penduduk perdesaan. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 77,48 persen rumah tangga di perkotaan memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, sedangkan di perdesaan hanya sekitar 63,43 persen. Perkembangan populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dapat dilihat pada Gambar 2.105 berikut ini:

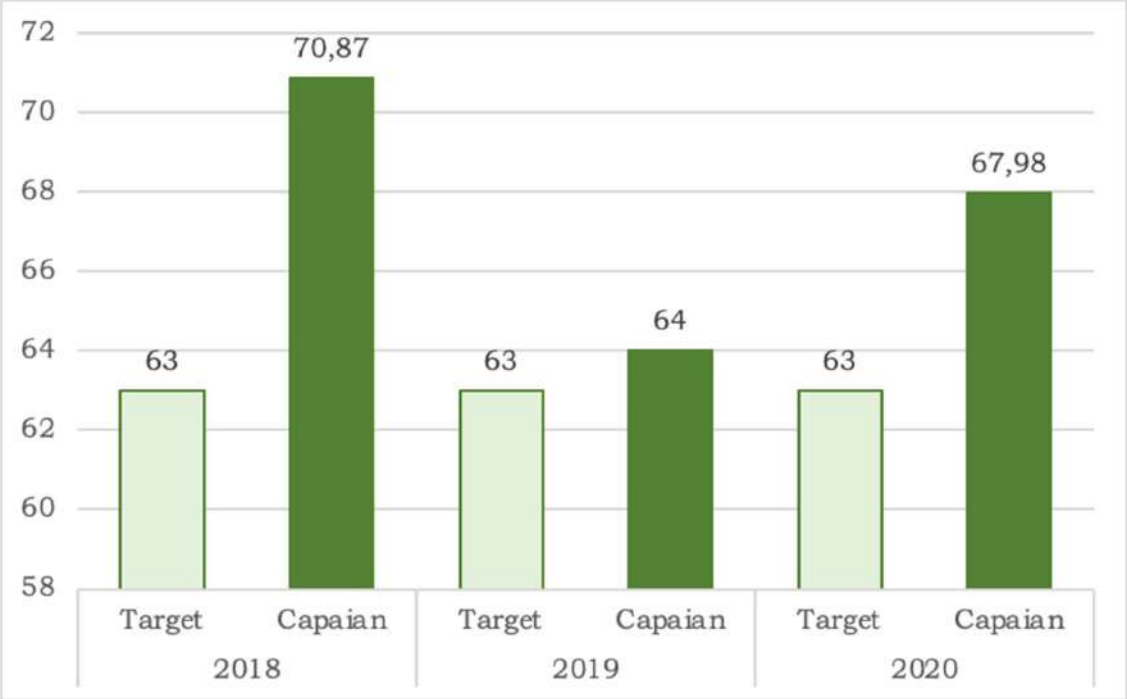


**Gambar 2.105.**
**Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air**

Untuk menindaklanjuti indikator tersebut diatas, Dinas Kesehatan Aceh telah melakukan kegiatan edukasi dengan nomenklatur kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat promosi. Selain indikator fasilitas cuci tangan,

terdapat beberapa indikator lainnya yang juga mengalami perkembangan cukup baik antara lain indikator proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja yang mencapai 100 persen. Begitu juga dengan indikator pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikelola sebanyak 4 (empat) RPDAST dengan target pengelolaan yang juga sebanyak 4 DAS yang dikelola oleh provinsi.

Pada sektor lingkungan hidup, indikator lainnya yang juga menjadi target pada tujuan ke-6 yakni pengelolaan danau sebanyak 2 (dua) danau wilayah pengelolaan. Selain itu juga indikator jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau sebanyak 7 (tujuh) wilayah sungai.

Dalam mencapai tujuan ke-6, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam pencapaian indikator-indikator yang masih menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Aceh. Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan air baku yang tidak merata.

### 2.4.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya penggunaan listrik pada RT tersebut akan tercermin dari besarnya rasio elektrifikasi atau persentase masyarakat yang dapat mengakses energi listik dalam setiap rumah tangganya. Perkembangan rasio elektifikasi di Aceh cukup baik, yang ditandai dengan rasio elektifikasi yang terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 rasio elektrifikasi tersebut sebesar 98,24 persen, persentasenya terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 99,69 persen di tahun 2022. Namun demikian, persentase tersebut belum dapat mencapai 100 persen. Hal tersebut menandakan bahwa masih RT di Aceh belum memiliki akses terhadap listrik terutama yang berasal dari PLN, dan persentase tersebut merupakan RT masyarakat miskin di Aceh. Secara jelas perkembangan rasio elektrifikasi di Aceh tahun 2018-2022 tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.106 berikut.

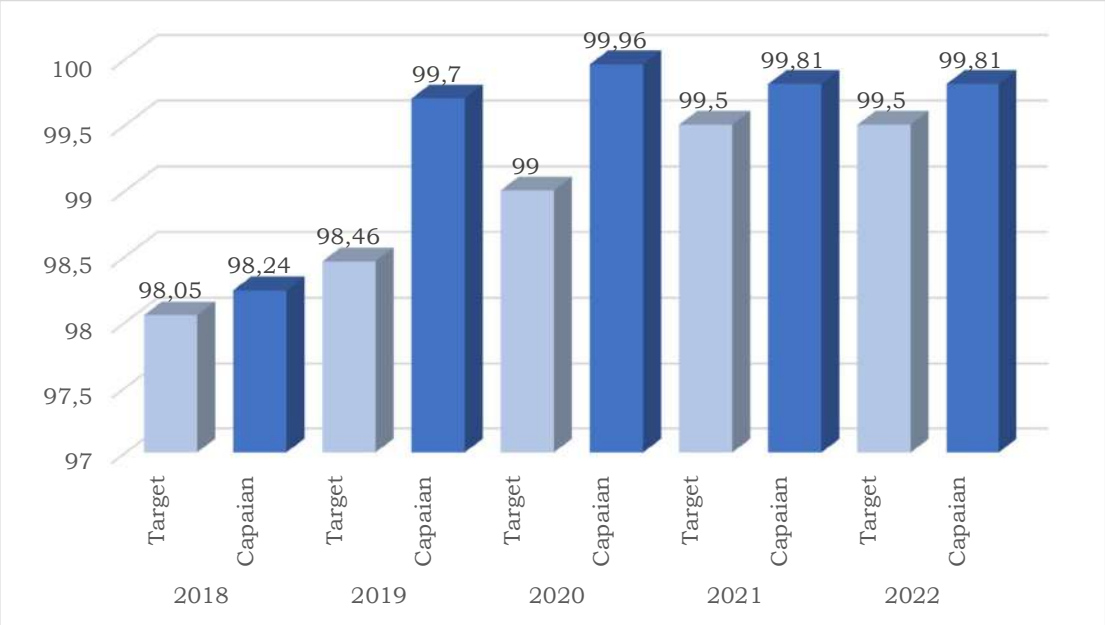


**Gambar 2.106. Rasio elektrifikasi**

Dalam mengupayakan agar rasio elektrifikasi di Aceh menjadi meningkat, Pemerintah Aceh melalui ESDM Aceh melakukan 2 (dua) kegiatan utama dalam menjadikan daerah terpencil dan sebagian masyarakat miskin mendapatkan akses kelistrikan. Kegiatan tersebut yakni Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan serta kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Indikator lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus yakni EBT. EBT merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru dan terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimum 23% (2025) dan 31% (2050).

Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan di Aceh dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi ketergantungan suplai listrik dari luar Aceh. Dalam hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai perpanjangantangan dari Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan PT. PLN Persero untuk mengembangkan potensi EBT sebagai sumber ketenagalistrikan di Aceh. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah

pusat dalam Peraturan Peraturan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang memberi prioritas pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai substansi terhadap energi fosil. (ESDM, 2021).

Dalam menghadapi permasalahan ketenagalistrikan, terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh, diantaranya: 1) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi, dengan melakukan pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur ketenagalistrikan; dan 2) Konservasi energi, dengan melakukan dan mendorong upaya efisiensi penggunaan energi.

### 2.4.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

Satu diantara indikator pada tujuan ke-8 TPB/SDGs yang memiliki perkembangan yang cukup baik yakni PDRB per kapita. Nilai PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh. Gambar 2.104 menggambarkan perkembangan PDRB per kapita Aceh tahun 2018-2022.

**Gambar 2.107. PDRB per kapita**

Dari Gambar 2.108 terlihat bahwa perkembangan PDRB Per kapita Aceh dengan ADHB migas memiliki tren meningkat setiap tahun, dari tahun 2018 PDRB Per Kapita ADHB tercatat sebesar 29.52 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 39,16 juta. Kecenderungan peningkatan PDRB per kapita tahun 2022 meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi karena pulihnya pandemi. Secara garis besar pencapaian PDRB per kapita tidak lepas dari kemajuan yang telah dilakukan semua stakeholders, baik pemerintah maupun swasta.

### 2.4.9 Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Panjang jalan kondisi baik menjadi satu diantara indikator pada tujuan ke-9 yang masih memerlukan perhatian khusus. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 67,07 persen di tahun 2018 menjadi 84 persen di tahun 2022. Perkembangan persentase jalan kondisi baik tahun 2018-2021 di Gambar 2.108.

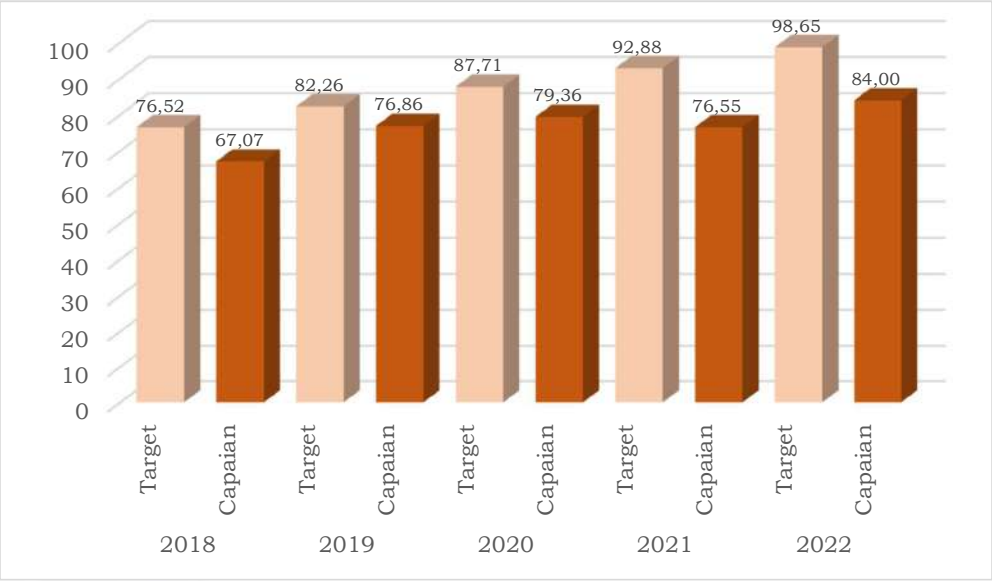


**Gambar 2.108. Kondisi Mantap Jalan Provinsi/ Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) (proxy)**

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (*Integrated Road Management System*/IRMS). Dalam rangka mencapai tujuan ke-9, Pemerintah Aceh Aceh perlu terus untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Ketimpangan antar wilayah di Aceh masih tinggi disebabkan oleh akses infrastruktur yang belum memadai dan tidak terintegrasi, terutama infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur produksi (irigasi, listrik, pabrik pengolahan, dll) wilayah tengah tenggara dan barat selatan. Proyek *Multi Years Contract* (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Dismping itu proyek MYC yang sedang berjalan, Pemerintah Aceh perlu terus memperjuangkan peningkatan dan pelurusan jalan lintas tengah, peningkatan jalan lintas Barat Selatan, serta pembangunan spiral bridge Paro-Kulu-Geurutee untuk mempermudah akses jalur Barat Selatan yang saat ini.

### 2.4.10 Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar Negara

Indeks Gini menjadi indikator yang masih memerlukan perhatian khusus. Meskipun dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena <0,40, namun pencapaiannnya pada tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Gambar 2.105, menunjukkan terjadinya fluktuasi perkembangan ketimpangan gini selama kurun waktu 2018–2021. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2018 sebesar 0,32 dan mengalami penurunan menjadi 0,311 tahun 2022. Pada periode 2018-2021 Indek Gini Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama dengan Aceh. Pada tahun 2018 sebesar 0,393 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0,380 pada tahun 2019 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,381. Perkembangan indeks gini Aceh tahun 2018-2022 dilihat pada Gambar 2.109 berikut:

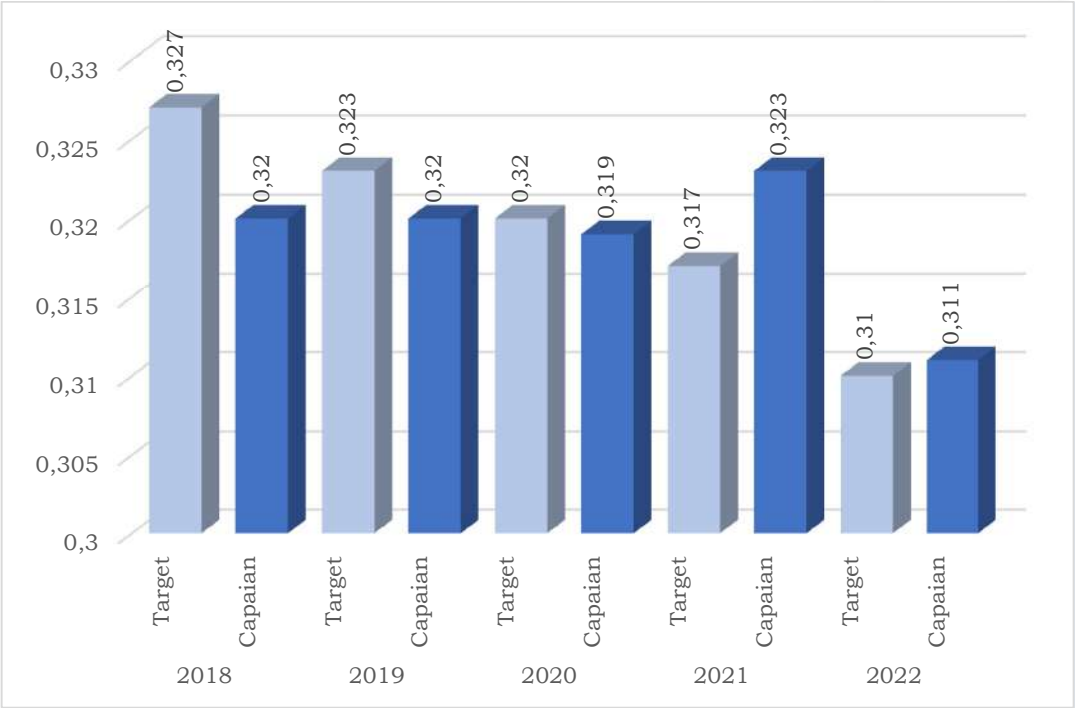


**Gambar 2.109. Koefisien Gini**

Dalam rangka mencapai tujuan ke-10, Pemerintah Aceh berupaya melakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1) Penataan dan pengembangan kawasan; 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur terintegrasi dalam kawasan; 3) Peningkatan akses permodalan; 4) Peningkatan akses kepemilikan lahan bagi petani dan nelayan miskin; 5) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi; 6) Pengembangan wilayah cepat tumbuh berbasis komoditas unggulan lokal; 7) Penyediaan sertifikat tanah bagi lahan publik dan masyarakat miskin; 8) Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya; 9) Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar petani; dan 10) Peningkatan akses permodalan.

### 2.4.11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat.Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah

Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk.

Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk memiliki capaian fluktuatif. Nilai terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 0,100, sedangkan tertinggi di tahun 2019 sebesar 0,175. Sedangkan pada tahun 2022 rasionya sebesar 0,154. Perkembangan rasio rumah layak huni di Aceh tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.110.

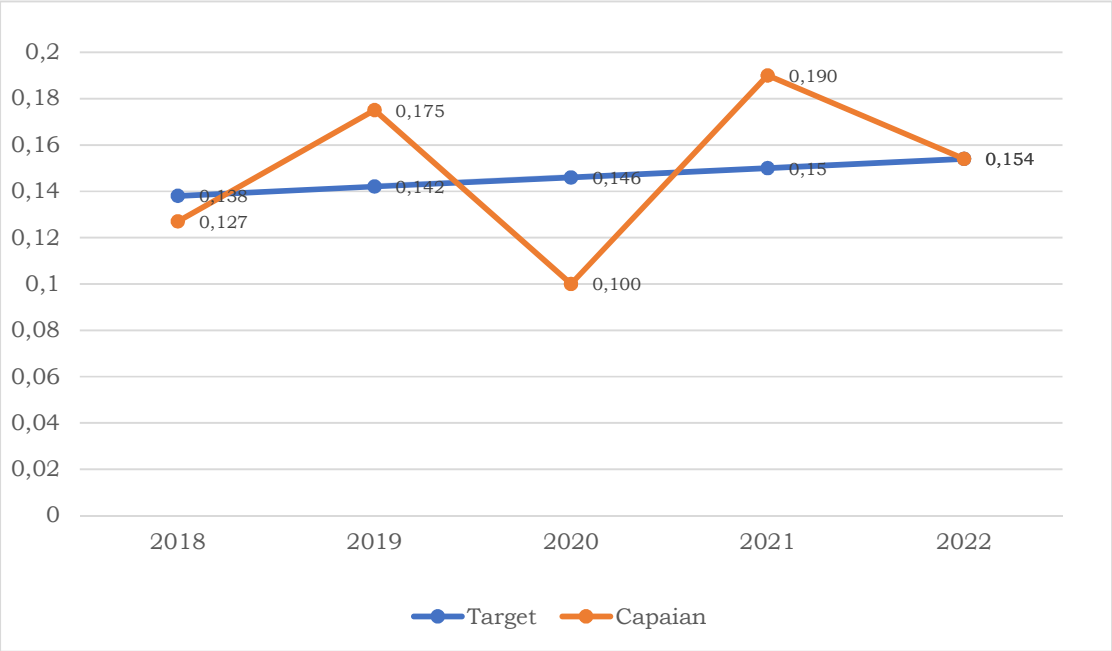


**Gambar 2.110. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau/Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk**

Upaya meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, Dinas Perkim telah melakukan upaya melalui pembangunan rumah sehat sederhana yang diperuntukkan bagi KK miskin di Aceh. Dalam target RPJM yang telah ditetapkan bahwa pembangunan rumah sehat sederhana tersebut dibangun sebanyak 6000 per tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan ke-11, Pemerintah Aceh diarahkan pada penyelesaian dan pembangunan infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian adalah pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan air minum, pembangunan instalasi air minum, penataan sanitasi serta penyediaan listrik untuk kebutuhan pengembangan industri. Selain itu kebiajakan dalam pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui: 1) Pembangunan dan peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, sistem drainase; 2) Pengendalian pencemaran dan

pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim; dan 3) Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan.

### 2.4.12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan

Selama periode Tahun 2017 – 2022, Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah melakukan berbagai bentuk edukasi serta dukungan kepada masyarakat/instansi terkait pengelolaan persampahan dan limbah B3, diantaranya memberikan pendampingan teknis kepada pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten/Kota, pendampingan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota, pembangunan bank sampah mini pada sekolah, Sosialisasi Aceh Bebas Sampah 2025 dan pemberian bantuan tempat sampat terpilah kepada masyarakat pada calon Gampong ProKlim, Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Provinsi Aceh, Fasilitasi Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan berupa RDF pada TPA Regional Blang Bintang serta melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD/RSU/RS Swasta) se-Aceh.

Dalam mencapai tujuan ke-12 terutama dalam pengelolaan sampah masih menjadi kendala dan tantangan bagi Pemerintah Aceh dalam. Faktor pengetahun masyarakat tentang pengolahan sampah menjadi hal yang paling utama penyebab timbulan sampah terutama sampah perkotaan menjadi semakin banyak dan secara langsung dapat berdampak pada terjadinya masalah Kesehatan di masyarakat.

Disarankan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik seperti melakukan tahap pengumpulan dan penyimpanan sampah, memusnahkan sampah dan tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan. Selain itu agar dapat motivasi masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan lingkungannya sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan ke-12, Pemerintah Aceh melakukan langkah besar dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang, Aceh Besar. Sampah yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar itu nantinya akan dikelola secara modern dan ramah lingkungan hingga menjadi sumber bahan bakar atau energi terbarukan melalui kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk serta kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan

Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, terkait pengelolaan sampah di TPA Regional Blang Bintang, Aceh Besar.

### 2.4.13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya

Penanganan darurat bencana yang menjadi kewenangan provinsi sudah sangat baik, hal tersebut dikarenakan semua penanganan darurat bencana level provinsi dapat ditangani seperti Gempa Takengon, Pidie Jaya, Bireun dan Pidie dapat ditangani BPBA dengan dinas terkait dengan baik yaitu mencapai 100 persen, artinya jumlah korban bencana 100 persen mendapatkan intervensi pemerintah. Indikator bantuan sosial korban bencana tersebut di atas ditanggulangi melalui kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana oleh BPBA. Namun secara umum penanganan bencana dan pasca bencana yang terjadi di Aceh dilakukan melalui program penanggulangan bencana.

Selain indikator kebencanaan, pada tujuan ke-13 ini juga berkaitan erat dengan pencapaian indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dimana tujuan dari indikator tersebut yakni ketersediaan dokumen GRK di Provinsi Aceh. Dalam mencapai indikator tersebut, DLHK Aceh telah melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2022.

Dalam mencapai tujuan ke-13, Pemerintah Aceh telah berupaya dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang ramah terhadap lingkungan dengan jargon pembangunan Aceh Green. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah bekerjasama dengan beberapa CSO yang terlibat aktif dalam mewujudkan upaya konservasi SDA. Salah satu bentuk pembelajarannya yakni Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) melalui Nota Kesepahaman Pembangunan Aceh Green dalam bentuk penyusunan dokumen Green Growt Plan (GGP) untuk melihat upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam peningkatan investasi hijau di Aceh dengan skema Businness As Usual (BAU).

### 2.4.14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis aman menjadi satu diantara beberapa indikator pada tujuan ke-14 yang memiliki perkembangan yang cukup baik. Pencapaian indikator tersebut berada di atas target setiap tahunnya. Pencapaian yang

cukup signifikan terjadi di tahun 2021 dengan nilai sebesar 104,02 persen. Batasan biologis aman tersebut berkaitan dengan besarnya kapasitas produksi perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan serta keramahan alat tangkap yang digunakan. Keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap tersebut tersebar di 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 atau wilayah Selat Malaka, dan WPP 572 Samudera Hindia.

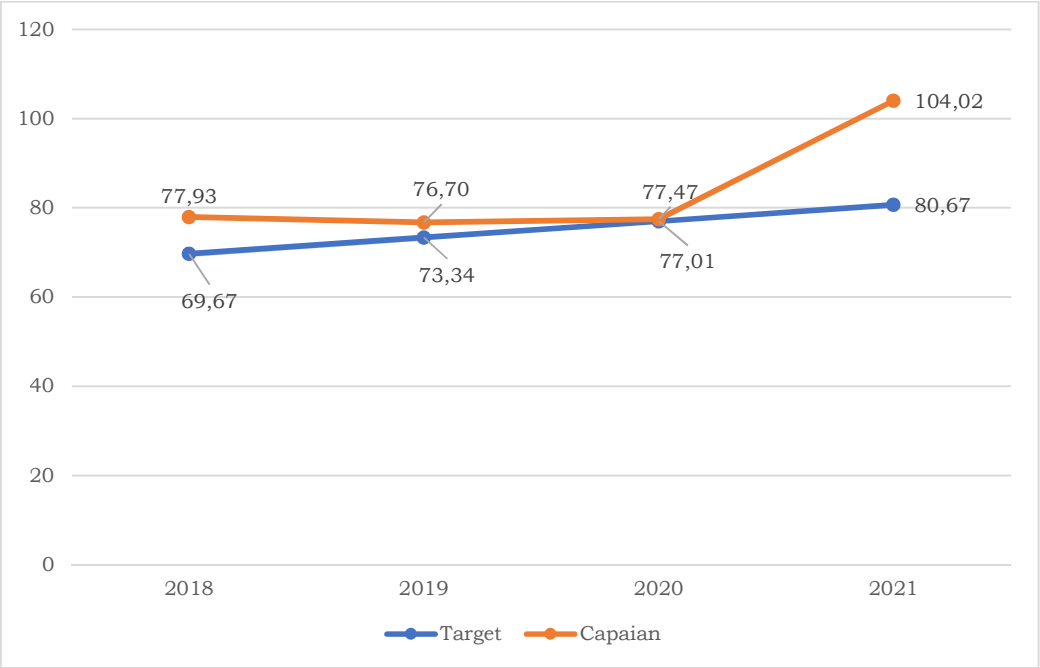


**Gambar 2.111. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**

Pencapaian proporsi batasan aman penangkapan sangat berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2021. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan menjadi satu diantara program yang memiliki arti penting bagaimana pengelolaan ruang laut tersebut dapat diawasi dari aksi *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing*.

Keberhasilan pada sektor perikanan juga merupakan berimplikasi dari upaya konservasi yang terus dicanangkan oleh Pemerintah Aceh. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok bukan hanya berfungsi untuk menangkap ikan semata. namun juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya ikan yang tersedia. Upaya konservasi yang terus dilakukan memberikan hasil yang cukup baik. ini terlihat dari perkembangan luas kawasan konservasi perairan yang terus meningkat dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2018 luas kawasan konservasi sebesar 149,2 Ha. luas tersebut meningkat menjadi 167,2 Ha pada tahun 2021. Meskipun meningkat, namun nilai capaiannya masih berada di bawah target yang ditetapkan.

### 2.4.15. Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kondisi penutupan hutan Aceh berdasarkan hasil interpretasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, wilayah daratan Aceh yang masih memiliki tutupan berupa hutan adalah seluas ± 3.144.216,32 hektar.

Sebaran tutupan hutan tersebut terdistribusi pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL). Tercatat masih terdapat seluas ± 244.162,25 hektar tutupan hutan yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan seluas ± 2.900.054,07 hektar lainnya berada di dalam Kawasan Hutan dalam fungsi Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Baseline deforestasi yang terjadi di Aceh selama periode 1990-2012 sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan negara (APL) mencapai 406.500 hektar (73 % dari luas keseluruhan), sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 152.366 hektar atau 27% (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Deforestasi yang tinggi di luar kawasan hutan sebagian besar adalah deforestasi terencana (deforestasi plan) untuk tujuan pengembangan wilayah dan kegiatan budidaya berbasis lahan khususnya pada kawasan yang telah dibebani izin.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan terhadap perubahan kelas tutupan lahan berhutan menjadi kelas tutupan lahan tidak berhutan di Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2020, diperoleh hasil bahwa selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Dalam mencapai tujuan ke-15, tantangan yang masih dihadapi yakni rusaknya lahan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan melalui pembakaran. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Aceh merupakan tipe kebakaran bawah khususnya yang terjadi pada lahan gambut dengan dampak berupa asap dan hilangnya vegetasi serta komoditi yang dikembangkan di atasnya. Tipe kebakaran ini juga sangat sulit untuk dikendalikan serta memerlukan biaya, waktu serta teknologi (*high cost*).

### 2.4.16 Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke lima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.174 di bawah ini.

**Tabel 2.174.**
**Predikat WTP Kabupaten Kota 2020**

| No. | Kabupaten/Kota | WTP Dari BPK RI | No. | Kabupaten/Kota | WTP Dari BPK RI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Banda Aceh | 13 Kali | 13 | Pemerintah Aceh | 6 Kali |
| 2 | Aceh Besar | 9 Kali | 14 | Aceh Barat Daya | 6 Kali |
| 3 | Kota Sabang | 9 Kali | 15 | Aceh Selatan | 6 Kali |
| 4 | Kota Lhokseumawe | 9 Kali | 16 | Aceh Timur | 6 Kali |
| 5 | Kota Langsa | 9 Kali | 17 | Aceh Utara | 6 Kali |
| 6 | Aceh Barat | 7 Kali | 18 | Nagan Raya | 6 Kali |
| 7 | Aceh Jaya | 7 Kali | 19 | Pidie | 6 Kali |
| 8 | Aceh Tamiang | 7 Kali | 20 | Pidie Jaya | 6 Kali |
| 9 | Aceh Tengah | 7 Kali | 21 | Simeulue | 6 Kali |
| 10 | Bener Meriah | 7 Kali | 22 | Aceh Singkil | 5 Kali |
| 11 | Bireuen | 7 Kali | 23 | Subulusalam | 4 Kali |
| 12 | Gayo Lues | 7 Kali | 24 | Aceh Tenggara | 4 Kali |

*Sumber: BPK, 2020*

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh. Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

### 2.4.17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi dapat dicerminkan melalui jumlah masyarakat yang mengakses internet. Persentase RT yang mengakses internet selama tahun 2018-2021 terus meningkat. Pada tahun 2018 persentase RT mengakses internet sebesar 21,02 persen. Angka tersebut meningkat menjadi sebesar 25 persen di tahun 2021. Kondisi ini menjadi cerminan positif bagi pemerintah Aceh dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang mengakses internet. Namun jumlah tersebut masih terbilang rendah, hanya dua orang dari lima penduduk Aceh yang memiliki akses terhadap internet. Seiring perkembangan dunia digital saat ini, keterbukaan informasi dan komunikasi menjadi peluang untuk masuk dalam revolusi industri. Mengakses internet sebagai sarana meningkatkan relasi dan kapasitas diri. Perkembangan proporsi RT berakses internet dapat dilihat pada Gambar 2.112.

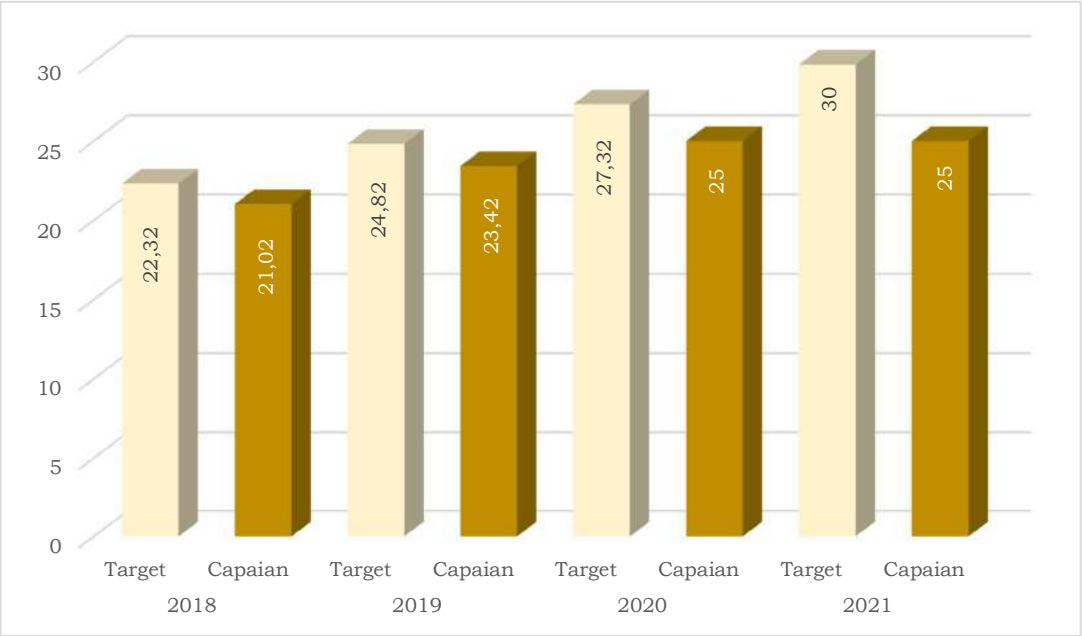


**Gambar 2.112. Proporsi individu yang menggunakan internet/Proporsi rumah tangga dengan akses internet (proxy)**

Aksesibilitas RT terhadap internet sebagian besar masih didominasi pada wilayah perkotaan, sehingga terjadi ketimpangan dalam perolehan informasi bagi publik terutama di daerah perdesaan. Selain itu juga akses terhadap internet sebagian besar oleh RT belum dapat dipergunakan secara optimal dalam penggunaannya untuk media

komunikasi dan e-commerce terutama dalam penjualan produk UMKM yang dapat diperjual belikan berdasarkan *e-commerce platform*.

Dalam mencapai tujuan ke-17, Pemerintah Aceh harus memberikan upaya optimal dalam peningkatan PAA menuju kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Aceh. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan diantaranya: 1) Penyusunan regulasi pemungutan Pajak Aceh; 2) Penyusunan regulasi pemungutan Retribusi Aceh; 3) Membangun teknologi informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor; 4) Membangun layanan unggulan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; 5) Pemutakhiran basis data subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor; 6) Melakukan pelatihan teknis aparatur pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh; 7) Melakukan koordinasi dan penegakan hukum; 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.

## 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPA Tahun berjalan diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi Tahun 2023 sebagai berikut:

### 2.5.1 Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Masing-masing permasalahan untuk aspek ini diuraikan sebagai berikut.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

   Aceh yang berada di ujung barat Indonesia miliki posisi yang tidak diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Indonesia, namun memiliki posisi strategis dalam kancah perdagangan regional dan internasional karena berada pada jalur lalu lintas yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia;

B. Wilayah Rawan Bencana

   Aceh merupakan daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 153,58 (Tahun 2020) yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Risiko Tinggi. Berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Aceh memiliki 11 potensi bencana; banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Dalam hal penanganan banjir genangan masih perlu dioptimalkan koordinasi tentang pelaksanaan kewenangan antar kabupaten kota dan provinsi dan nasional.

C. Demografi

Masyarakat Aceh memiliki Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang tinggi, yaitu 53,75 persen. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53,75 jiwa penduduk tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam kaitan ini kewenangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum masuk kedalam tugas pokok dan fungsi di Pemerintah Aceh.

### 2.5.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan -0.34 persen akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen. Perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021, relatif tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0.74 persen. Pada tahun 2021 perekonomian Aceh non migas tumbuh signifikan sebesar 3.59 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi, dimana ekonomi Nasional rata-rata tumbuh 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.06 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2021 Perekonomian Nasional tumbuh sebesar 3.69 persen.

B. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen pada periode yang sama. Rilis BPS untuk Susenas September 2021 menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia mengalami penurunan Angka Kemiskinan, namun Aceh justru mengalami peningkatan. Bila melihat nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index-P1*), dan Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index-P2*) Aceh dan Nasional. Secara umum selama periode 2016-2021, nilai Indek (P1) dan (P2) Aceh berada dia atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2016 (P1) Aceh sebesar 3,48 dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2,64, begitupun dengan (P1) Nasional masing-

masing, 1,74 dan 1,50. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Aceh dan Nasional nilai Indek bergerak meningkat (2,85; 2,95 dan 1,75 ; 1,67).

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Aceh memiliki 13 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

C. Laju Inflasi

Secara umum perkembangan laju inflasi Aceh selama 2016-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 inflasi Aceh sebesar 2.24 persen dan lebih baik dari tahun 2020 sebesar 3. 59 persen. Inflasi yang lebih rendah pada tahun 2021 disebabkan faktor cuaca yang cukup baik dan tidak terjadi gagal panen sehingga dapat menjaga kestabilan harga komoditas perikanan dan pertanian, serta adanya dampak pemulihan ekonomi yang dapat menstabilkan kembali harga-harga komoditas strategis. Bila dibandingkan dengan Inflasi nasional, maka nilai inflasi Aceh relative masih tinggi, dimana Inflasi Nasional pada tahun 2020 sebesar 1.68 persen dan tahun 2021 sebesar 1.87 persen.

D. Pendapatan per kapita

Pendapatan perkapita masyarakat Aceh yang diukur menurut PDRB ADHB baik dengan migas maupun non migas menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan adanya dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2020 pendapatan perkapita sebesar 31.63 Juta Rupiah dan tahun 2021 meningkat menjadi 34.68 Juta Rupiah. Bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita Nasional, maka Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2020 PDB Perkapita Nasional sebesar 57.3 Juta Rupiah dan tahun 2021 sebesar 62.2 Juta Rupiah (US$ 4.349,4) atau kenaikan sebesar 3,69 persen dan Indonesia berada di kategori kelompok negara berpendapatan menengah bawah *(lower middle income)* dengan pendapatan antara US$1,046 dan US$4,095.

E. Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi, yang ditunjukkan dengan Rasio Gini Aceh per Maret 2021 berada pada level 0,324, dimana angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319. Nilai Indek Gini Aceh relative lebih baik bila dibandingkan dengan Nasional, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh termasuk kategori rendah. Namun kondisi ini juga masih mengindikasikan dan berkorelasi terhadap terjadinya kenaikan angka kemiskinan tahun 2021.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Masih Tinggi;

Jumlah pengangguran Aceh per Februari 2021 tercatat sebanyak 161 ribu orang, turun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 yang berjumlah 167 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2021 sebesar 6,30 persen, turun signifikan dibandingkan dengan periode Agustus 2020 yang mencapai 6,59 persen. Sedangkan TPT Nasional tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 7.07 persen dan 6.49 persen. TPT Aceh relatif lebih baik atau berada dibawah rata-rata nasional, namun persentase TPT ini tidak mencapai target tahun 2021 dan mengindikasikan adanya korelasi terhadap kenaikan tingkat kemiskinan Aceh tahun 2021.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Aceh dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh tahun 2022 mencapai 72,80, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,18). Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama 2010-2022, IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen. Sedangkan IPM Nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91 sedikit lebih tinggi diatas rata-rata IPM Aceh. Kondisi pencapaian nilai IPM Aceh ini masih menjadi perhatian yang serius mengingat terjadinya disparitas pencapaian IPM antar Kabupaten/Kota masih cukup tinggi.

### 2.5.3 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pilihan. Untuk masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

1) Implementasi Lembaga keuangan Syariah belum dapat berjalan dengan optimal di Aceh, hal tersebut terkait dengan pemahaman tentang literasi keuangan syariah oleh masyarakat Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan sudah konversi sebagai Lembaga Keuangan Syariah adalah Perbankan, sementara Lembaga Asuransi, Koperasi simpan pinjam belum melaksanakan konversi. Meskipun demikian Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut berjalan dengan baik.

2) Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah, Pelanggaran syariat islam masih menjadi isu penting di Aceh, dimana kasus khamar mengalami penambahan dari 11 kasus pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pada tahun 2020. Selain itu masih adanya kerawanan terhadap pemahaman syariat islam terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil di 6 Kabupaten/Kota.
3) Masih rendahnya capaian standarisasi dayah, dari 1.488 dayah yang ada di Aceh, hanya 57,93 persen yang termasuk kedalam Dayah Tipe (Tipe : A+, A, B dan C). Sedangkan 626 dayah masih merupakan dayah non tipe.
4) Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan. Pemanfaatan ZISWAF di Aceh belum dapat dikelola secara optimal karena belum tersedianya database muzakki, mustahik, wakaf, muallaf dan potensi harta agama lainnya. Selain itu juga belum tersedianya sistem database yang terintegrasi dengan data kependudukan maupun antara badan Baitul Mal dengan basis data terpadu sebagai bagian dari data kemiskinan di Aceh. Meskipun demikian pendistribusian ZISWAF terus meningkat di Aceh, dari Rp. 41.736.365.693 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 92.442.187.683 di tahun 2021.
5) Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal, Meskipun terjadi peningkatan dalam penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh, namun kesadaran produsen untuk mendapatkan sertifikat halal masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan hanya sebanyak 148 sertifikat pada tahun 2022 dimana jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya.
6) Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat meliputi kesenian, adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim.
7) Belum meratanya intervensi pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi mantan kombatan, mantan tapol/napol dan korban konflik.

B. Layanan Urusan Wajib

1) Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Masih rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan, dimana ranking sekolah menengah (top 1000 UTBK) di Aceh hanya menyisakan 2 sekolah di tahun 2021 sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera;
- Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah, dimana Aceh 9,44 dan Nasional 8,69 tahun 2022;

- Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi, tercermin dari kontribusi TPT yang terbesar adalah dari lulusan SMK;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana SLB, dimana perbandingan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) adalah 1 : 1,6 atau dua kali lipat perbandingan ruang kelas dan rombel SMA (1 : 0,8). Selain itu, pendidik tersertifikasi untuk SLB sangat rendah yakni sebesar 15,5 persen atau dapat diinterpretasikan lebih dari 84 persen dari pendidik SLB tidak tersertifikasi;
- Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2021 masih sebesar 12,12 sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,45 dan yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,7;
- Masih tingginya Angkatan Kerja Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase angkatan kerja terhadap usia kerja pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2020.

b. Kesehatan

- Umur Harapan Hidup Aceh sebesar ..... masih di bawah rata-rata nasional yaitu ..... pada tahun 2022;
- Masyarakat Aceh mengalami double burden penyakit dikarenakan pada waktu yang bersamaan menghadapi permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular dan penyakit tidak menular. Aceh juga dihadapkan pada persoalan beban gizi ganda (Double Burden Malnutrition), dimana Aceh masih memiliki prevalensi yang sama tinggi antara kekurangan gizi dengan kelebihan gizi pada berbagai siklus kehidupan.
- Angka Kematian Ibu tahun 2022 di Aceh 141/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 sebesar 139/100.000 kelahiran hidup;
- Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2022 sebesar 31,20 persen sedangkan Nasional 21,6 persen;
- Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari .....1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022;
- Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin sehingga pemerintah sedang membangun 5 rumah sakit regional lagi yaitu 1)

Rumah Sakit Regional Cut Nyak Dien di Meulaboh, 2) Rumah sakit Regional RSU Yuliddin Awai di Tapaktuan, 3) Rumah sakit regional Datu Beru di Takengon, 4) Rumah sakit regional Langsa, dan 5) Rumah sakit regional Bireuen.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 84,41 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.
   - Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 -2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman dimana luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688,76 ha.
   - Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak yaitu sebesar 89,7 persen sedangkan nasional 91,05 persen.
   - Belum optimalnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak yaitu sebesar 77,48 persen sedangkan nasional 80,92 persen.
   - Belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

e. Sumber daya Air
   - Belum optimalnya Infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 59,11 persen.
   - Penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 37,94 persen dari potensi genangan banjir.
   - Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut :
     a. Menurunnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

        Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) mengalami penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang berada di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi pada

WS Pase - Peusangan dan WS Tamiang – Langsa. D.I. Buloh Blang Ara (2.100 Ha) dan D.I. Tenggulon (2.000 Ha) merupakan contoh Daerah Irigasi yang secara signifikan mengalami penurunan debit andalan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Aceh – Meureudu dan WS Jambo Aye, Daerah Irigasi yang mengalami penurunan debit andalan cukup besar adalah D.I. Baro Raya (19.100 Ha) dan D.I. Jambo Aye (17.000 Ha). Akibatnya angka Indeks Pertanaman (IP) penanaman untuk Daerah Irigasi tersebut hanya berkisar sekitar 140. Untuk meningkatkan angka Indeks Pertanaman (IP) tersebut, perlu didukung dengan upaya pembangunan bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinu.

b. Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;
Sebagian besar daerah Irigasi Teknis pada saat ini mengalami penurunan fungsi , yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada era tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan – bangunan bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efisien.

c. Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;
Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka mendukung ketahanan pangan perlu dilakukan upaya pembangunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, upaya ini mengalami beberapa kendala, dimana kendala utama adalah masalah pembebasan lahan. Ada beberapa Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasinya, seperti; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha di Kabupaten Aceh Barat, D.I. Krueng Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Peunaron

seluas 1.000 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tilis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues, dan D.I. Lhok Naga seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pidie, D.I. Mon Seuke Pulot seluas 1.542 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Alue Geureutut seluas 652 Ha (Lintas Kabupaten/Kota) yang bangunan utamanya terletak di Kabupaten Aceh Utara dan areal layanannya terletak di Kabupaten Bireuen serta D.I. Sigulai seluas 1.982 Ha Kabupaten Simeulu.

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang lokasinya mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti: D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kabupaten Aceh Barat), D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I Jambo Aye Kanan seluas 3.500 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I. Kr. Pase seluas 8.922 Ha (Kabupaten Aceh Utara), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Tamiang) dan D.I. Rajui seluas 3.500 Ha (Kabupaten Pidie). Maka dari itu perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan ini, sehingga pembangunan daerah irigasi tersebut dapat segera diwujudkan.

d. Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.

Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan anggaran Operasi dan Pemeliharaan belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNOP) di lapangan.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama (Jaringan Primer dan Sekunder) menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun subtansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka keduanya memerlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi No. 12 Tahun 2017, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; SKPA dan lembaga keistimewaan Aceh yang membidangi Irigasi, Keujreun Blang atau nama lain, Forum Koordinasi Keujreun Blang, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk

mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber Daya Air untuk irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani pemakai air (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan SKPA dan Biro terkait, Wakil Keujreun Blang yang dipilih dalam satu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Aceh, Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh, wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit;

- Pada pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Masih rendahnya capaian Indikator Kinerja SPM bidang Trantibumlinmas tahun 2022 dengan indikator Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum provinsi sebesar 4,06% yang termasuk dalam kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum belum tuntas.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. Jumlah pemilih Aceh yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 3.453.990 pemilih, yang terdiri dari 1.754.397 perempuan dan 1.699.593 laki-laki. Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Aceh adalah 79,7 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.
- Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada pemilu 2019 terdapat 19 kasus pelanggaran berupa intimidasi dan

teror, politik uang, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih. Terdapat 4 kasus pelanggaran di Pidie dan Bireuen, 3 kasus di Aceh Besar, 2 kasus di Aceh Timur, serta 1 kasus masing-masing di Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

g. Sosial
   - Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Populasi PMKS di Aceh cenderung fluktuatif, dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan dan populasi PSKS, yang semakin meningkat terdiri atas 9.683 orang. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 4 unit dalam kondisi baik.
   - Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong.

h. Gedung dan Bangunan terbengkalai

   Belum tuntas dan fungsionalnya pembangunan gedung/ bangunan publik yang terbengkalai sejumlah 47 unit yang tersebar di 19 kabupaten/kota.

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Ketenagakerjaan

   Pengangguran di Aceh sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,75 persen.

b. Pangan
   - Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain;
   - Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman serealia (padi dan jagung), dan komoditi pangan lainnya;
   - Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan;
   - Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik.
   - Dari sisi produksi atau ketersediaan juga diakibatkan oleh dimasih terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta rendahnya mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan akibat dari perubahan iklim yang ditandai

dengan luas lahan pertanian tanaman pangan yang gagal panen berupa padi tahun 2019 sebesar 992,7 Ha, jagung 655,5 Ha, dan kedelai 52 Ha.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

d. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun;
- Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga dalam rangka persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 yaitu Aceh hanya memiliki stadion harapan bangsa dan beberapa tempat untuk perlombaan cabang olahraga. Selain itu, cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.

e. Pertanahan

Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh pemerintah pusat pada Pemerintah Aceh.

f. Lingkungan Hidup

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Indeks kualitas hidup Aceh masih 75,54 walaupun indeks kualitas hidup nasional 71,00 persen, namun Aceh masih belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap kualitas air dengan capaian 57,14 persen, lahan dengan capaian 76,63 persen serta gas rumah kaca.

g. Perhubungan

Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2021 sebesar 0,71 dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2026.

h. Persandian

- Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi,
- Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian.

i. Koperasi dan UKM
   - Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026;
   - Masih rendahnya kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen.

j. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti persentase kepemilikan akta nikah penduduk Aceh masih rendah yaitu rata-rata sebesar 58,55 persen, persentase anak yang wajib memiliki KIA yang masih rendah sebesar 42,24 persen.

3) Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

   Menurunnya kunjungan wisata karena pandemi covid-19 .

b. Pertanian
   - Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar. Disamping itu hasil pertanian Aceh masih dalam tingkat petik dan jual, belum diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah;
   - Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai tukar petani yaitu 101,19 pada tahun 2021 sedangkan capaian nasional 107,18. Nilai tukar petani Aceh diharapkan mencapai 101,8 pada tahun 2026.
   - Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalah Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) yang merupakan komoditi perkebunan terbesar di Aceh;

c. Kehutanan

   Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh. Penyebab kerusakan hutan antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar. Kerusakan kawasan hutan dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Deforestasi ini juga mengakibatkan tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat dengan jumlah kasus sebanyak 528 kasus dalam kurun waktu

2015-2021. Selain itu, Aceh memiliki potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar, namun belum dikelola secara optimal.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Aceh belum memiliki dan mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan seperti eksplorasi terhadap PLTB, PLTA, PLTMH yang belum maksimal pertumbuhannya.

e. Perdagangan

Aceh masih mengalami defisit perdagangan, karena masih bergantung pada pasokan barang-barang dari luar Aceh, termasuk untuk kebutuhan pokok. Namun sektor perdagangan memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Aceh setelah sektor pertanian, yaitu 15,13 persen.

f. Perindustrian

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih rendah, dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 baru mencapai 4,59 persen.

g. Kelautan Perikanan

Aceh belum mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam mendukung pemanfaatan potensi perikanan pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 yang berbatasan dengan Selat Malaka dan WPP 572 yang berhadapan dengan Samudera Hindia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (WPP PUD) 439. Termasuk juga, masih terbatasnya teknologi pasca panen hasil perikanan dan keberlanjutan klaster perikanan budidaya dan tambak garam. Permasalahan dalam produksi garam di Aceh adalah masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Kandungan garam yang dihasilkan petani garam di Aceh masih mengandung impurities.

h. Transmigrasi

Banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

4) Penunjang Urusan Pilihan

a. Perencanaan Pembangunan

Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.

b. Keuangan
   - Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA;
   - Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen;
   - Peruntukan dana Otsus belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana untuk kegiatan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masih rata-rata di bawah 5 persen dari jumlah APBA;
   - Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
   - Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga belum terselesaikan masalah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Aceh dan Nasional;
   - Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN, hanya 2,36 persen dari total keseluruhan ASN Pemerintah Aceh.

d. Penelitian dan Pengembangan

   Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pembangunan Aceh. Hal ini disebabkan karena penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

e. Pengawasan

   Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan .

### 2.5.4 Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan untuk Aspek Daya Saing Daerah dapat ditelaah melalui unsur Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan unsur Sumber Daya Manusia. Masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pada suatu wilayah memang merupakan kondisi alamiah atau natural yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.

Dalam konteks pembangunan di Aceh, pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Masih ada wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rendahnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh ditandai dengan indeks ketimpangan (Williamson) Aceh pada tahun 2021 berada pada angka 0,491.

B. Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita masih rendah masih 56,7 persen dan direncanakan pada tahun 2026 sebesar 67,22 persen;
2) Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106.

C. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum layak 87,66 sedangkan di tingkat nasional 90,21;
2) Ketersediaan Daya Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik masih sekitar 5,58 persen dan target peningkatan tahun 2026 sebesar 22,08 persen.

D. Iklim Berinvestasi

1) Jumlah investasi berskala nasional masih sekitar 8,45 triliun dan diharapkan pada tahun 2026 sebesar 12,86 triliun hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya Ketersediaan sarana dan prasarana investasi serta produktivitas tenaga kerja di Aceh;
2) Persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh belum membaik dikarenakan adanya konflik sosial dan isu lingkungan yang berdampak belum optimalnya realisasi investasi.

E. Sumber Daya Manusia

Indeks pembangunan manusia Aceh masih di bawah rata-rata nasional yaitu 72,14 yang lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 72,29 dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pada tabel 2.175 dapat dilihat permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

**Tabel 2.175.**
**Permasalahan Pembangunan Aceh yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| NO | TUJUAN | SASARAN | | PERMASALAHAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Meningkatkan Pembangunan Demokrasi | 1.1 | Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi. | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada |
| 2 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional | 2.1 | Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP | Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA |
| | | 2.2 | Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Masih rendahnya nilai LPPD |
| | | 2.3 | Meningkatnya tingkat maturitas SPIP | Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan |
| | | 2.4 | Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Tahun 2021 masih berada pada kategori B (60-70) |
| | | 2.5 | Meningkatkan Profesionalitas ASN | Rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen; Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan |
| | | 2.6 | Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik | Masih lemahnya sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi |

| NO | TUJUAN | SASARAN | | PERMASALAHAN |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah | 3.1 | Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Al-Quran | Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah |
| | | 3.2 | Meningkatnya Kemandirian Dayah | Masih rendahnya capaian standarisasi dayah |
| | | 3.3 | Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan | Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal |
| | | 3.4 | Meningkatnya Penyaluran ZIS | Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan |
| | | 3.5 | Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh | Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat meliputi kesenian, adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim |
| 4 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan | 4.1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan; Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi; Disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi; Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah |
| | | 4.2 | Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi | Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan |
| | | 4.3 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. | Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif; Masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dengan kompleksitas masalah yang semakin tinggi |
| | | 4.4 | Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga | Masih rendahnya part isipasi pemuda dalam pembangunan; Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun; |

| NO | TUJUAN | SASARAN | | PERMASALAHAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.5 | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh |
| | | 4.6 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,57 pada tahun 2021; Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Aceh 172/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 139/100.000 kelahiran hidup; Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen |
| | | 4.7 | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan | Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022 |
| 5 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi COVID-19 | 5.1 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan | Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106 |
| | | 5.2 | Menurunkan Beban Penduduk Miskin | Angka Kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen pada periode yang sama. |
| | | 5.3 | Pengendalian Inflasi | Nilai inflasi Aceh relative masih tinggi dibandingkan nilai inflasi Nasional |
| | | 5.4 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong |
| | | 5.5 | Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19 | Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan |

| NO | TUJUAN | SASARAN | | PERMASALAHAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mencapai 67 persen pada tahun 2026; |
| | | 5.6 | Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman serealia (padi dan jagung), dan komoditi pangan lainnya; Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan; Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan; Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan; Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalah Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) yang merupakan komoditi perkebunan terbesar di Aceh |
| | | 5.7 | Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian | Aceh belum memiliki dan mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan seperti eksplorasi terhadap PLTB, PLTA, PLTMH yang belum maksimal pertumbuhannya. |
| | | 5.8 | Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh | Aceh mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi; Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah |
| | | 5.9 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh | Jumlah investasi berskala nasional masih sekitar 8,45 triliun dan diharapkan pada tahun 2026 sebesar 12,86 triliun hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya Ketersediaan sarana dan prasarana investasi serta produktivitas tenaga kerja di Aceh; Persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh belum membaik dikarenakan |

| NO | TUJUAN | SASARAN | | PERMASALAHAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | adanya konflik sosial dan isu lingkungan yang berdampak belum optimalnya realisasi investasi |
| | | 5.10 | Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata | Menurunnya kunjungan wisata karena pandemi COVID-19 |
| | | 5.11 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan | Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP). |
| | | 5.12 | Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan | Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain; |
| | | 5.13 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar | Pengangguran di Aceh sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,75 persen |
| 6 | Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana | 6.1 | Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah | Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen. |
| | | 6.2 | Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 -2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) |
| | | 6.3 | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Belum optimalnya Infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 59,11 persen; Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik |
| | | 6.4 | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar | Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman |

| NO | TUJUAN | SASARAN | | PERMASALAHAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.5 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan |
| | | 6.6 | Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari | |
| | | 6.7 | Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana | Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh; |
| 7 | Meningkatkan Penguatan Perdamaian | 7.1 | Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal | Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada |

## 2.6 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan di atas dan merujuk pada Dokumen RPA Tahun 2023-2026 serta hasil kesepakatan pada RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023, maka isu-isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.6.1 Peningkatan Kualitas Demokrasi

Sesuai dengan amanat pada Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, maka diperlukan berbagai upaya komprehensif dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi melalui sosialisasi dan memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman dan pelayanan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat.

### 2.6.2 Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam

Masyarakat Aceh telah lama dikenal sebagai masyarakat yang memegang kuat ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, adat, budaya, pendidikan, dan lainnya nilai-nilai Islam telah lama menjadi "*living law*" dan telah berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang mengatur semua sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dimulai pada tahun 2000 sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Meskipun telah lebih dari 20 tahun, pelaksanaan Syariat Islam belum optimal karena hanya lebih banyak menyoroti aspek

jinayah, padahal Syariat Islam juga mengatur aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa agenda penting Syariat Islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: peningkatan kualitas Pendidikan dayah, optimalisasi pelaksanaan ekonomi syariah, optimalisasi Baitul Mal, pembinaan dan penerbitan sertifikat halal, serta pembinaan pelaksanaan ibadah dan perbaikan akhlak dalam rangka reformasi mental masyarakat Aceh.

### 2.6.3 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang lebih baik mengingat tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Aceh 9,44 tahun, sehingga belum memenuhi target Pendidikan Universal 12 Tahun. Rendahnya kualitas SDM juga dapat dilihat dari distribusi pengangguran yang disumbangkan oleh penduduk tamatan SMA/sederajat. Untuk itu pemerintah perlu memperkuat upaya peningkatan kualitas dan daya saing lulusan SMA/sederajat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Kesetaraan gender masih menjadi isu global yang tercantum dalam tujuan kelima SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta terintegrasi ke dalam setiap tujuan lainnya. Untuk itu pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) harus diperkuat dan diimplementasikan secara masif pada berbagai level pemerintahan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga perlu memperkuat partisipasi perempuan pada ruang publik, terutama pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.

Selain itu dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan permasalahan sosial lainnya, perlindungan perempuan dan anak serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi isu penting yang harus menjadi perhatian. Sementara itu, pemerintah Aceh sedang mengusulkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi DP3A.

### 2.6.4 Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Masih Minim

Peningkatan produktivitas belum mampu mendorong kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Kondisi ini perlu penanganan yang lebih serius dari pemerintah agar sektor pertanian tetap menjadi harapan para petani termasuk generasi muda. Rendahnya pendapatan petani dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti modal usahatani, pengetahuan, keterampilan tentang agribisnis, dan lain sebagainya termasuk rendahnya nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Perbaikan atau peningkatan nilai tambah produk pertanian dapat dilakukan melalui hilirisasi pertanian. Hilirisasi pertanian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan produk pertanian melalui industri yang dikenal dengan sebutan agroindustri.

Melalui agroindustri di pedesaan akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat dan memberikan jaminan menurunkan angka pengangguran dan mencegah adanya urbanisasi. Disamping itu, akan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Dengan kata lain bahwa konsep hilirisasi dapat diimplementasikan secara langsung di tingkat petani atau kelompok petani atau pelaku bisnis pertanian lainnya, guna memberikan jaminan adanya peningkatan pendapatan. Industri pertanian atau agroindustri harus dibangun secara terintegrasi baik vertikal maupun horizontal, serta bersinergi dengan subsistem agribisnis lainnya, seperti subsistem penyediaan sarana produksi dan Alsintan, subsistem pemasaran dan subsistem budidaya serta subsistem penunjang.

### 2.6.5 Pengembangan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masih Terhambat

Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan strategis sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di Aceh yang mencakup kawasan strategis sebagai berikut:

a. Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan DTGA berbasis pariwisata dan pertanian, sehingga dijadikan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang mendukung Kawasan Danau Toba sebagai 10 Destinasi Wisata Prioritas Indonesia.
b. Kawasan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues (Tatimlaga) memiliki fungsi utama sebagai kawasan agro industri, agropolitan, minapolitan serta memiliki potensi untuk pengembangan agro wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan keamanan. Pengembangan Tatimlaga menjadi Kawasan Ekonomi/Kawasan Industri sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan dalam kawasan dan sekitarnya.
c. Kawasan Industri (KI) Ladong Aceh merupakan salah satu KI yang termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Saat ini di KI Ladong telah tersedia lahan seluas 66,89 ha dengan lahan siap pakai seluas 17,5 ha dan juga telah tersedia beberapa infrastruktur dasar seperti jalan, kantor pengelola, maupun jaringan energi dan jaringan air yang terkoneksi dengan PLN dan PDAM. Untuk mempercepat pengembangan KI Ladong serta menarik minat investasi dari luar, perlu pembentukan kluster industri halal dan menetapkan KI Ladong sebagai salah satu KI Halal Nasional.

### 2.6.6 Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 dan setara 1% (satu persen) plafon DAU Nasional untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027. Sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasian Dana OTSUS ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Menindaklanjuti penurunan alokasi Dana OTSUS mulai tahun 2023 Pemerintah Aceh telah menyiapkan berbagai langkah strategis (exit strategy) seperti: untuk meningkatkan PAA, Pemerintah Aceh mendorong optimalisasi PAA melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS), mendorong kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mendorong bangkitnya Badan Usaha Masyarakat Aceh (BUMA), optimalisasi pemanfaatan Dana CSR, optimalisasi dan integrasi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan (APBN. KPBU, PINA, sector swasta dan sumber dana lainnya), dan pengintegrasian pemanfaatan dana desa dalam mencapai target pembangunan provinsi.

### 2.6.7 Mitigasi dan Penanganan Bencana

Mitigasi Bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Terdapat empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana yaitu sebagai berikut: 1) tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, 2) sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, 3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan 4) pengaturan, penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Selain itu, mitigasi bencana juga harus diintegrasikan dengan proses pembangunan lainnya seperti pendidikan, pangan, tenaga kerja, perumahan bahkan kebutuhan dasar lainnya.

Penanganan bencana bersifat luas, kompleks dan multidisiplin ilmu serta multidimensional sehingga memerlukan sinergi multi pihak dalam membangun masyarakat tahan bencana. Selain itu juga diperlukan integrasi sistem informasi komunikasi kebencanaan dengan multi pihak dan akselerasi tata kelola risiko bencana berbasis kawasan. Dengan kata lain, BNPB dan BPBD dalam menyusun rencana aksi terhadap pengelolaan risiko bencana harus menghilangkan batas administrative dan menjadikan wilayah terdampak sebagai dasar dalam menyusun strander operasional dan

prosedur penanganan bencana serta pembagian peran yang jelas pada saat terjadi bencana.

### 2.6.8 Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data September 2022, persentase kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 14,75 persen. Capaian persentase kemiskinan Aceh tahun 2022 ini merupakan capaian persentase kemiskinan tertinggi sejak tahun 1998. Selanjutnya, Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya persentase kemiskinan Aceh mengalami penurunan sebesar 0,78 poin. Persentase kemiskinan Aceh September 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,57 persen. Selain permasalahan angka kemiskinan yang masih tinggi, masalah kemiskinan ekstrim juga memerlukan penanganan yang komprehensif. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2021, jumlah kemiskinan ektrim Aceh adalah sebesar 188 ribu jiwa atau 3,47 persen dari total penduduk Aceh, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 162.085 orang atau tercacat sebesar 2,95 persen.

### 2.6.9 Optimalisasi Kemandirian Pangan

Pemenuhan pasokan pangan di Aceh masih sangat tergantung dari Provinsi Sumatera Utara, sehingga diperlukan pengembangan komoditi-komoditi pangan yang meliputi 12 (dua belas) jenis komoditi pangan strategis, yaitu: beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), dan juga peternakan (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan Unggas). Disamping itu, pengembangan komoditi-komoditi pangan tersebut tidak hanya terbatas pada tingkat budidaya, tetapi juga mencakup pengolahan dan distribusi/pemasaran yang berada dalam satu skema mata rantai hulu hilir yang terintegrasi.

### 2.6.10 Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Masih tingginya ketimpangan antar wilayah di Aceh disebabkan oleh akses infrastruktur yang belum memadai dan tidak terintegrasi, terutama infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur produksi (irigasi, listrik, pabrik pengolahan, dll) wilayah Tengah Tenggara dan Barat Selatan. Proyek *Multi Years Contract* (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Dismping itu proyek MYC yang sedang berjalan, Pemerintah Aceh perlu terus memperjuangkan peningkatan dan pelurusan jalan lintas tengah dan peningkatan jalan lintas Barat Selatan untuk mempermudah akses jalur Barat Selatan yang saat ini. Infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian adalah pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan air minum, pembangunan instalasi air minum, penataan sanitasi serta penyediaan listrik untuk kebutuhan pengembangan industri.

### 2.6.11 Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk memastikan program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *outcome* dan *impact* yang telah ditentukan dalam IKD, IKU dan *key performance* lainnya, maka perlu penguatan pada Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Sistem ini harus menggunakan pendekatan *performance cascading* agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat dipastikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang dengan indikator kinerja mikro dan makro.

# Tabel Evaluasi Hasil Terhadap RKPA
## Periode Pelaksanaan : s.d. Triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun 2022

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | **DINAS PENDIDIKAN** | | **DINAS PENDIDIKAN** | | | **2,972,815,740,711** | | | **346,082,499,111** | | | **969,471,411,576** | | | **1,074,955,065,959** | | | **992,353,807,360** | | | **3,030,076,156,521** | | **101.93** | | | **6,712,069,564,601** | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **2,972,815,740,711** | | | **346,082,499,111** | | | **969,471,411,576** | | | **1,074,955,065,959** | | | **992,353,807,360** | | | **3,030,076,156,521** | | **101.93** | | | **6,712,069,564,601** | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **BIDANG URUSAN PENDIDIKAN** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **2,972,815,740,711** | | | **346,082,499,111** | | | **981,013,682,840** | | | **1,074,955,065,959** | | | **992,353,807,360** | | | **3,030,076,156,521** | **66.67** | **101.93** | | | **6,712,069,564,601** | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **100** | **%** | **1,620,054,605,963** | **13** | **%** | **201,952,831,529** | **24** | **%** | **734,940,671,018** | **36** | **%** | **602,847,845,616** | **27** | **%** | **436,071,603,657** | | | **1,611,484,053,071** | | **99.47** | **-** | **-** | **1,759,520,574,944** | **tdr** | **150.00** | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran** | | **100** | **%** | | **13** | **%** | | **24** | **%** | | **36** | **%** | | **27** | **%** | | **100** | **%** | | 100.00 | | **193** | **%** | **41,468,744,873** | **192.92** | **34.59** | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah** | | **100** | **%** | | **13** | **%** | | **24** | **%** | | **36** | **%** | | **27** | **%** | | **100** | **%** | | **100.00** | | **195** | **%** | **40,547,317,046** | **194.67** | **23.96** | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | | **100** | **%** | | **13** | **%** | | **24** | **%** | | **36** | **%** | | **27** | **%** | | **100** | **%** | | **100.00** | | **193** | **%** | **18,306,059,035** | **193.33** | **52.13** | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** | **Peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan MBS** | | **100** | **%** | | **13** | **%** | | **24** | **%** | | **36** | **%** | | **27** | **%** | | **100** | **%** | | **100.00** | | **181** | **%** | **45,775,999,863** | **181.33** | **41.44** | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Personil** | | **100** | **%** | | **13** | **%** | | **24** | **%** | | **36** | **%** | | **27** | **%** | | **100** | **%** | | **100.00** | | **206** | **%** | **1,938,401,056** | **206.25** | **35.29** | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | **100** | **%** | | **13** | **%** | | **24** | **%** | | **36** | **%** | | **27** | **%** | | **100** | **%** | | **100.00** | | **100** | **%** | **-** | **tdr** | **tdr** | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2** | **Dokumen** | **4,773,003,361** | **0** | **Dokumen** | **130,663,780** | **0** | **Dokumen** | **1,214,080,312** | **1** | **Dokumen** | **733,427,755** | **0.5** | **Dokume** | **1,104,266,225** | **2** | **Dokume** | **3,182,438,072** | **75.00** | **66.68** | **2** | **Dokume** | **3,182,438,072** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | Kegiatan | 195,236,002 | 1 | Kegiatan | 19,600,000 | 0 | Kegiatan | 29,400,000 | 1 | Kegiatan | 55,589,700 | 0 | Kegiatan | 39,200,000 | 2 | Kegiatan | 143,789,700 | 100.00 | 73.65 | 2 | Kegiatan | 143,789,700 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Dokumen | | 0 | Dokumen | | 1 | okumen | | 0 | Dokumen | | 1 | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyusunan, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan | Tersedianya Data dan Informasi Pendidikan | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6 | Kegiatan | 3,178,952,674 | 1 | Kegiatan | 78,063,780 | 2 | Kegiata | 1,034,184,080 | 2 | Kegiatan | 504,312,055 | 2 | Kegiatan | 803,339,225 | 7 | Kegiatan | 2,419,899,140 | 116.67 | 76.12 | sts | sts | 11,738,407,950 | sts | 37.33 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Dokumen | | 0 | Dokumen | | 1 | Dokumen | | 0 | Dokumen | | 0 | Dokumen | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penerapan Manajemen layanan Data dan publikasi Informasi Pendidikan | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data Informasi Pelayanan Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 3,763,205,160 | sts | 150.53 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penerapan Manajemen layanan Data dan publikasi Informasi Pendidikan | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data dan Publikasi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | 36,600,000 | sts | 0.45 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Monitoring dan pelaporan program Pendidikan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program Pendidikan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | Kegiatan | 445,774,685 | 0 | Kegiatan | 23,800,000 | 1 | Kegiata | 124,196,232 | 0 | Kegiatan | 51,300,000 | 1 | Kegiatan | 90,289,200 | 2 | Kegiatan | 289,585,432 | 100.00 | - | sts | sts | 2,787,060,935 | sts | 35.49 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 4 | Dokumen | | 1 | Dokumen | | 1 | Dokumen | | 1 | Dokumen | | 1 | Dokumen | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 | Kegiatan | 953,040,000 | 1 | Kegiatan | 9,200,000 | 1 | Kegiata | 26,300,000 | 1.00 | Kegiatan | 122,226,000 | 1 | Kegiatan | 171,437,800 | 4 | Kegiatan | 329,163,800 | 100.00 | - | sts | sts | 329,163,800 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan Evaluasi dan capaian kinerja Program | Terciptanya akuntabilitas kinerja Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 884,059,001 | sts | 22.51 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Tersedianya Laporan Evaluasi dan Capaian Kinerja Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Laporan | 560,505,619 | - | 77.31 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **1,517,802,479,012** | **3** | **Bulan** | **198,762,563,958** | **3** | **Bulan** | **370,872,065,767** | **3** | **Bulan** | **584,994,113,319** | **3** | **Bulan** | **386,736,727,842** | **12** | **Bulan** | **1,541,365,470,886** | **100.00** | **-** | **12** | **Bulan** | **1,541,365,470,886** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | Bulan | 1,516,504,801,500 | 3 | Bulan | 198,677,963,958 | 3 | Bulan | 370,591,576,017 | 3 | Bulan | 584,806,883,319 | 3 | Bulan | 386,101,919,361 | 12 | Bulan | 1,540,178,342,655 | 100.00 | 101.56 | 12 | Bulan | 1,540,178,342,655 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Kegiatan | 546,058,304 | 0,25 | Kegiatan | 75,200,000 | 0,25 | Kegiatan | 156,323,750 | 0,25 | Kegiatan | 158,000,000 | 0,25 | Kegiatan | 200,932,297 | #### | Kegiatan | 590,456,047 | tdr | 108.13 | #VALUE! | Kegiatan | 590,456,047 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan Evaluasi dan capaian kinerja Program pendidikan | Terciptanya akuntabilitas kinerja Pendidikan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Kegiatan | 425,554,604 | 0,25 | Kegiatan | 9,400,000 | 0,25 | Kegiatan | 14,100,000 | 0,25 | Kegiatan | 23,500,000 | 0,25 | Kegiatan | 315,615,667 | #### | Kegiatan | 362,615,667 | tdr | 85.21 | - | - | 138,400,000 | sts | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan Evaluasi dan capaian kinerja Program pendidikan | Terciptanya akuntabilitas kinerja Pendidikan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 | Kegiatan | 326,064,604 | 0 | Kegiatan | - | 0,50 | Kegiatan | 110,066,000 | 0,25 | Kegiatan | 5730000 | 0,25 | Kegiatan | 118,260,517 | #### | Kegiatan | 234,056,517 | tdr | - | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pelaksanaan Evaluasi dan capaian kinerja Program pendidikan | Terciptanya akuntabilitas kinerja Pendidikan | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **2,030,063,000** | **3** | **Bulan** | **161,260,106** | **3** | **Bulan** | **214,030,900** | **3** | **Bulan** | **306,771,000** | **3** | **Bulan** | **730,680,926** | **12** | **Bulan** | **1,412,742,932** | **100.00** | **69.59** | **12** | **Bulan** | **1,412,742,932** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 22 | Kegiatan | 2,030,063,000 | 1 | Kegiatan | 161,260,106 | 6 | Kegiatan | 214,030,900 | 4 | Kegiatan | 306,771,000 | 9 | Kegiatan | 730,680,926 | 20 | Kegiatan | 1,412,742,932 | 90.91 | - | 20 | Kegiatan | 1,412,742,932 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **389,971,954** | **3** | **Bulan** | **30,548,000** | **3** | **Bulan** | **163,582,000** | **3** | **Bulan** | **58,119,185** | **3** | **Bulan** | **123,330,400** | **12** | **Bulan** | **375,579,585** | **sts** | **-** | **12** | **Bulan** | **375,579,585** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 | Kegiatan | 188,728,000 | - | Kegiatan | 30,548,000 | 0,50 | Kegiatan | 13,133,800 | 0,25 | Keg | 25,233,617 | 0,25 | Keg | 119,064,600 | #### | Kegiatan | 187,980,017 | tdr | - | #VALUE! | Kegiatan | 187,980,017 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 | Kegiatan | 201,243,954 | - | Kegiatan | - | 0,50 | Kegiatan | 150,448,200 | 0,25 | Keg | 32,885,568 | 0,50 | Kegiatan | 4,265,800 | #### | Kegiatan | 187,599,568 | tdr | 93.22 | #VALUE! | Kegiatan | 187,599,568 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **2,404,856,604** | **3** | **Bulan** | **90,820,000** | **3** | **Bulan** | **120,620,000** | **3** | **Bulan** | **278,311,000** | **3** | **Bulan** | **1,528,427,710** | **12** | **Bulan** | **2,018,178,710** | **100.00** | **-** | **12** | **Bulan** | **2,018,178,710** | **tdr** | **4.08** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 | Paket | 195,530,000 | 0 | Paket | 5,800,000 | - | Paket | 43,500,000 | - | Paket | 49,000,000 | 1 | Paket | 92,670,000 | 1 | Paket | 190,970,000 | 100.00 | - | sts | sts | 1,856,297,600 | sts | 39.49 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan | | 2 | Paket | | 0 | Paket | | - | Paket | | - | Paket | | 2 | Paket | | 2 | Paket | - | 100.00 | tdr | sts | sts | 273,073,456 | sts | 34.46 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 21 | Paket | | 0 | Paket | | 9 | Paket | | 9 | Paket | | | Paket | | 18.00 | Paket | - | 85.71 | tdr | 18 | Paket | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan mental dan fisik aparatur | Terbinanya Mental dan fisik Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 | Kegiatan | 357,840,000 | 1 | Kegiatan | 70,020,000 | 1 | Kegiatan | 54,620,000 | 1 | Keg | 43,800,000 | 1 | Keg | 74,000,000 | 4 | Kegiatan | 242,440,000 | 100.00 | 67.75 | sts | sts | 2,905,679,000 | sts | 50.32 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan kualitas pelayanan publik | Terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 15,934,820,035 | sts | 82.33 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan | Terlaksananya Kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 8 | Kegiat | 1,851,486,604 | 1 | Kegiatan | 15,000,000 | 1 | Keg | 22,500,000 | 3 | Keg | 185,511,000 | 3 | Keg | 1,361,757,710 | 8 | Kegiatan | 1,584,768,710 | 100.00 | 85.59 | sts | sts | 10,987,882,029 | sts | 59.96 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan, Bantuan dan perlindungan hukum Pendidikan | Tersedianya bantuan dan perlindungan hukum bagi siwa, pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | orang | 4,115,243,934 | - | 749.18 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 11 | Keg | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1** | **Tahun** | **24,673,922,625** | **0** | **Tahun** | **737,227,880** | **0** | **Tahun** | **4,598,121,026** | | | **5,279,915,368** | | | **12,207,389,235** | **-** | **Tahun** | **1,975,809,465** | **-** | **8.01** | | | | | | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23 | Paket | 841,485,700 | 5 | Paket | 53,212,160 | 8 | Paket | 257,560,702 | 22 | Paket | 50,304,141 | 5 | Paket | 326,169,582 | 40 | Paket | 687,246,585 | 173.91 | - | sts | sts | 2,984,355,848 | sts | 86.10 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 23 | Paket | 1,306,956,231 | 1 | Paket | 39,409,426 | 7 | Paket | 574,033,604 | 4 | Keg | 208,040,360 | 10 | Paket | 467,079,490 | 22 | Paket | 1,288,562,880 | 95.65 | 98.59 | sts | sts | 1,522,842,880 | sts | 101.52 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 80 | Kegiatan | 6,690,766,505 | 19 | Kegiatan | 225,935,711 | 20 | Kegiatan | 1,107,870,325 | 1 | Keg | 1,247,038,427 | | Keg | 3,755,360,595 | **Kegiatan** | | **6,336,205,058** | **-** | **-** | **-** | **Kegiatan** | **6,336,205,058** | **tdr** | **6.28** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58 | Kegiatan | 11,061,277,759 | 4 | Kegiat | 361,613,883 | 5 | Kegiata | 2,025,979,915 | 1 | Keg | 2,897,271,238 | 45 | Keg | 4,766,165,303 | 55 | Kegiatan | 10,051,030,339 | 94.83 | - | 55 | Kegiatan | 10,051,030,339 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 83 | Kegiatan | 1,426,457,618 | - | Kegiatan | 52,973,700 | 6 | Kegiatan | 249,459,480 | 14 | Keg | 75,096,900 | 60 | Keg | 904,912,065 | 80 | Kegiatan | 1,282,442,145 | 96.39 | 89.90 | sts | sts | 2,515,127,355 | sts | 1,047.97 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | Bulan | 751,339,604 | 3 | Bulan | 4,083,000 | 3 | Bulan | 6,321,000 | 3 | Bulan | 43,140,000 | 3 | Bulan | 572,108,800 | 12 | Bulan | 625,652,800 | sts | - | sts | sts | 8,554,296,713 | sts | 120.82 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | 15=14/9*100 | | | 16=14+8 | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makan dan Minum rapat-rapat, tamu dan petugas penjagaan malam | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | Kegiatan | 76,897,302 | - | Kegiat | - | - | Kegiata | - | - | Kegiatan | | 1 | Kegiatan | 74,200,000 | 1 | Kegiatan | 74,200,000 | 100.00 | 96.49 | sts | sts | 1,117,347,250 | sts | 36.85 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan Event Pendidikan | Terlaksananya Event-event Pendidikan | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 15 | Kegiatan | 2,518,741,906 | - | Kegiat | - | 8 | Kegiata | 376,896,000 | - | Kegiatan | 759,024,302 | 5 | Kegiatan | 1,341,393,400 | | | | - | - | sts | sts | 12,016,543,703 | sts | 30.77 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam dan luar negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 8,111,737,117 | sts | 800.20 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam dan luar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 7,597,428,140 | sts | 19.11 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Konsultasi dan kerjasama dalam dan luar negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 713,805,283 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 5,208,291,890 | sts | 53.42 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 425,509,000 | sts | 41.76 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | **1** | **Tahun** | **27,949,579,199** | **0.25** | **Tahun** | **4,078,500** | **0.25** | **Tahun** | **9,846,958,400** | **0.25** | **Tahun** | **2,364,154,390** | **0.25** | **Tahun** | **14,284,297,500** | **1** | **Tahun** | **26,499,488,790** | **100.00** | **94.81** | **1** | **Tahun** | **26,499,488,790** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 33 | Unit | 16,992,539,000 | - | unit | | 4 | unit | 9,271,387,000 | - | unit | - | 29 | Unit | 6,619,935,000 | 33 | unit | 15,891,322,000 | 100.00 | 93.52 | sts | sts | 19,911,385,040 | sts | 139.44 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaan Mebel | 56 | Paket | 1,682,301,870 | - | Paket | - | 15 | Paket | 300,090,400 | 10 | Paket | 136,442,000 | 30 | Paket | 1,172,420,820 | 55 | Paket | 1,608,953,220 | 98.21 | 95.64 | 55 | Paket | 1,608,953,220 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Paket | 603,110,385 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | | 1 | Paket | 598,412,100 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan rumah dinas | Terbangunnya rumah dinas | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 149 | Paket | 8,671,627,944 | - | Paket | 4,078,500 | 10 | Paket | 275,481,000 | 26 | Paket | 2,227,712,390 | - | Paket | 5,893,529,580 | 36 | Paket | 8,400,801,470 | 24.16 | 96.88 | sts | sts | 8,400,801,470 | sts | 2,034.09 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan gedung kantor | Terbangunnya gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 6,372,681,018 | sts | 9.34 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan gedung kantor | Terbangunnya gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Tersedianya Peralatan rumah jabatan/dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 16,176,779,499 | sts | 46.55 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 7,026,456,860 | sts | 113.82 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan peralatan studio dan komunikasi | Tersedianya peralatan studio dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1** | **Tahun** | **17,565,474,840** | **0.25** | **Tahun** | **1,452,343,017** | **0.25** | **Tahun** | **3,579,465,914** | **0.25** | **Tahun** | **4,065,074,487** | **0.25** | **Tahun** | **5,923,730,376** | **1** | **Tahun** | **15,020,613,794** | **100.00** | **85.51** | **1** | **Tahun** | **15,020,613,794** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terkirimnya Surat-surat Dinas Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Bulan | 62,392,000 | 4 | Bulan | 13,825,000 | 3 | Bulan | 3,220,000 | 3 | Bulan | 4,997,500 | 2 | Bulan | 16,117,000 | 12 | Bulan | 38,159,500 | sts | 61.16 | sts | sts | 176,173,500 | sts | 28.84 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Air dan Internet | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | Bulan | 4,120,621,872 | 3 | Bulan | 450,373,017 | 3 | Bulan | 617,604,039 | 3 | Bulan | 632,752,496 | 3 | Bulan | 878,798,848 | 12 | Bulan | 2,579,528,400 | sts | 62.60 | sts | sts | 13,022,863,521 | sts | 61.76 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Pelayanan Administrasi yang baik | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15 | Kegiatan | 13,382,460,968 | 1 | Kegiatan | 988,145,000 | 4 | Kegiata | 2,958,641,875 | 6 | Keg | 3,427,324,491 | 3 | Kegiatan | 5,028,814,528 | 14 | Kegiatan | 12,402,925,894 | 93.33 | - | sts | sts | 40,817,844,480 | sts | 349.95 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 4,445,856,000 | sts | 42.79 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penatausahaan Aset | Tertatanya aset Dinas Pendidikan Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 2,262,285,135 | sts | 48.18 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penatausahaan Dokumen dan Kearsipan | Tersedianya Dokumen dan Kearsipan Dinas Pendidikan Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 118,974,200 | sts | 8.78 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pusat Layanan Autis Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | Bulan | 1,805,071,244 | - | 57.30 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | **1** | **Tahun** | **15,774,488,863** | **0.25** | **Tahun** | **357,390,577** | **0.25** | **Tahun** | **1,530,144,186** | **0.25** | **Tahun** | **3,520,920,685** | **0.25** | **Tahun** | **9,677,392,848** | **1** | **Tahun** | **15,085,848,296** | **100.00** | **-** | **1** | **Tahun** | **15,085,848,296** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya pajak dan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 | Bulan | 1,379,605,000 | 3 | Bulan | 139,757,748 | 3 | Bulan | 358,073,856 | 3 | Bulan | 370,430,210 | 3 | Bulan | 415,805,898 | 12 | Bulan | 1,284,067,712 | 100.00 | 93.08 | sts | sts | 3,004,670,032 | sts | 450.10 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Berfungsinya kendaraan dinas/operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | 1 | - | 12,570,000 | sts | 1.90 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | Bulan | 1,485,365,000 | 3 | Bulan | 50,009,829 | 3 | Bulan | 266,907,025 | 3 | Bulan | 181,020,665 | 3 | Bulan | 797,193,901 | 12 | Bulan | 1,295,131,420 | 100.00 | 87.19 | sts | sts | 4,787,668,022 | sts | 64.96 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 | Bulan | 914,582,287 | 3 | Bulan | 55,409,000 | 3 | Bulan | 143,019,820 | 3 | Bulan | 98,858,540 | 3 | Bulan | 532,294,180 | 12 | Bulan | 829,581,540 | 100.00 | - | 12 | Bulan | 829,581,540 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 42 | Kegiatan | 11,717,763,840 | 2 | Kegiatan | 72,615,000 | 4 | Kegiata | 734,730,985 | 12 | Keg | 2,841,911,270 | 24 | Keg | 7,753,249,869 | 42 | Kegiatan | 11,402,507,124 | 100.00 | 97.31 | sts | sts | 16,942,269,677 | sts | 306.52 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Terehabnya gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 7,453,783,649 | sts | 39.76 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | 16=14+8 | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 | Paket | 277,172,736 | 2 | Paket | 39,599,000 | 1 | Paket | 27,412,500 | 1 | Paket | 28,700,000 | 1 | Paket | 178,849,000 | 5 | Paket | 274,560,500 | 100.00 | - | sts | sts | 1,051,137,600 | sts | 143.21 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 1,318,313,020 | sts | 31.59 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon | Terpeliharanya Jaringan listrik dan telepon | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 191,336,600 | sts | 12.51 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91.47 | 50.41 | | | | - | 163.31 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | R | | | | ERR | ST | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **90** | **%** | **1,350,028,472,721** | | | **143,954,718,582** | | | **245,435,357,554** | | | **471,442,386,224** | | | **555,085,406,683** | | | **1,415,917,869,043** | | **104.88** | **-** | **-** | **4,054,570,945,976** | **tdr** | **80.14** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | **Program Pendidikan Menengah** | **Terwujudnya peningkatan APK SMP/MTS/Paket B** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | **%** | - | **tdr** | | 57 | % | 642,319,037,929 | 66.71 | 64.52 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan** | **Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan** | | **70** | **%** | | | | | | | | | | | | | | - | **%** | - | **-** | | 93 | % | 17,193,350,942 | 132.29 | 17.25 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Peningkatan Pendidikan Menengah Atas dan Sederajat** | **%tase angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA** | | **100** | **%** | | | | | | | | | | | | | | - | **%** | - | **-** | | 99 | % | 36,346,826,528 | 98.88 | 21.69 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Peningkatan Pendidikan Menengah Kejuruan** | **%tase angka partisipasi kasar (APK) SMK** | | **100** | **%** | | | | | | | | | | | | | | - | **%** | - | **-** | | 98 | % | 49,773,723,541 | 98.00 | 23.30 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan** | **%tase Sekolah yang memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | % | 1,045,660,259,423 | 103.15 | 48.78 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Wajib Belajar Pendidikan Dua belas Tahun** | **Angka Harapan Lama Sekolah** | | **14.9** | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | tahun | 813,282,927,257 | 97.72 | 60.91 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Pendidikan Luar Biasa** | ***Peningkatan jumlah siswa yang terlayani pada lembaga pendidikan luar*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | % | 23,004,281,802 | 84.10 | 69.86 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus** | **%tase angka partisipasi kasar (APK) SLB dan Layanan Khusus** | | **65.1** | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | % | 11,072,669,511 | sts | 15.60 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | **14.9** | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **100** | **%** | **873,616,422,620** | | **%** | **105,248,726,891** | **55** | **%** | **208,922,424,929** | | | **332,274,598,727** | | | **310,306,617,996** | **55** | **%** | **956,752,368,543** | **55.00** | **-** | **sts** | **sts** | **4,082,098,257,323** | **tdr** | **95.37** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Pembangunan gedung sekolah | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 31,374,550,343 | sts | 230.92 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Dokumen Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah | Tersedianya Dokumen DED, Feasibility Study, Siteplan, dan Dokumen Perencanaan Pemenuhan Sarpras lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang kelas sekolah | | Penambahan Ruang Kelas Baru | 8 | Paket | 8,483,358,335 | 1 | Paket | 33,896,500 | 4 | Paket | 862,560,300 | 3 | Paket | 3,255,565,871 | 21 | Paket | 5,201,228,639 | 29 | Paket | 9,353,251,310 | 362.50 | - | sts | sts | 30,561,213,056 | sts | 147.38 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pendidikan | Tersedianya bangunan sekolah yang memadai | | 7 | Paket | | | Paket | | 2 | Paket | | 2 | | | | | | | | | - | tdr | sts | sts | 25,650,670,666 | sts | 59.16 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Ruang kelas sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 90,381,735,612 | sts | 25.25 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang guru sekolah | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 22 | Paket | 8,354,022,000 | | Paket | - | 1 | Paket | 288,781,000 | 2 | Paket | 2,121,195,675 | 19 | Paket | 6,231,941,257 | 22 | Paket | 8,641,917,932 | 100.00 | - | sts | sts | 18,697,027,292 | sts | 415.49 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Ruang guru sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Ruang guru sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 12144 | sts | 16,059,832,900 | sts | 46.07 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA | | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi | 9 | Paket | 3,910,369,000 | | Paket | - | 1 | Paket | 82,665,000 | 0 | Paket | 923,865,423 | 8 | Paket | 2,986,452,764 | 9 | Paket | 3,992,983,187 | 100.00 | - | sts | sts | 53,063,540,518 | sts | 89.18 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi rumah dinas Guru dan rumah Penjaga Sekolah | Terbangunnya/ terehabnya rumah dinas Guru dan rumah Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 2160 | Paket | 141,776,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA | | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika | 6 | Paket | 2,617,432,000 | | Paket | - | 1 | Paket | 49,357,000 | 0 | Paket | 614,660,300 | 5 | Paket | 2,002,770,132 | 6 | Paket | 2,666,787,432 | 100.00 | 101.89 | 6 | Paket | 2,666,787,432 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA | | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | 20 | Paket | 8,622,157,000 | | Paket | - | 1 | Paket | 147,754,000 | 0 | Paket | 1,926,501,600 | 19 | Paket | 6,695,630,148 | 20 | Paket | 8,769,885,748 | 100.00 | - | 20 | Paket | 8,769,885,748 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA | | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer | 8 | Paket | 2,152,954,000 | | Paket | - | 1 | Paket | 47,971,000 | 0 | Paket | 631,199,200 | 7 | Paket | 1,521,702,536 | 8 | Paket | 2,200,872,736 | 100.00 | - | 8 | Paket | 2,200,872,736 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA | | Pembangunan Ruang aboratorium IPA | 1 | Paket | 47,911,508 | | | - | | | | | | | - | | 47,785,500 | - | - | 47,785,500 | sts | - | - | - | 47,785,500 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi ruang unit kesehatan sekolah | Terbangunnya ruang unit kesehatan SMA/SMK/PKLK | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 21 | Paket | 6,492,990,000 | | Paket | - | 1 | Paket | 123,704,000 | 0 | Paket | 1,817,072,400 | 20 | Paket | 4,675,895,767 | 21 | Paket | 6,616,672,167 | 100.00 | - | sts | sts | 19,011,716,302 | sts | 261.87 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan perpusatakaan sekolah | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 1 | Paket | 2,266,901,363 | 0 | Paket | - | 1 | Paket | 75,006,000 | 0 | Paket | 533,679,000 | 9 | Paket | 1,722,774,958 | 10 | Paket | 2,331,459,958 | 1,000.00 | 102.85 | sts | sts | 3,277,196,358 | sts | 75.34 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi perpustakaan sekolah | Terbangunnya/ terehabnya perpustakaan sekolah | | 6 | Paket | | 0 | Paket | | 2 | Paket | | 2 | Paket | | | | | | | | - | tdr | 237 | sts | 17,562,508,097 | sts | 66.52 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan ruang serba guna/aula | | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | 12,500,000 | tdr | #DIV/0! | sts | sts | 4,660,387,150 | sts | 582.55 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Ruang serba guna/aula sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Ruang serba guna/aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 4,668,336,341 | sts | 5.48 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | | 16=14+8 | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Asrama sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Asrama | Pembangunan Asrama Sekolah | 3 | Paket | 1,656,619,000 | | | - | | | | | | 368,698,000 | 3 | Paket | 1,257,286,562 | 3 | - | 1,625,984,562 | sts | 98.15 | sts | sts | 18,193,683,346 | sts | 15.43 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 367 | Paket | 89,177,335,416 | 2 | Paket | 149,436,000 | 97 | Paket | 1,396,046,846 | 34 | Paket | 7,533,918,044 | 158 | Paket | 77,883,551,644 | 291 | Paket | 86,962,952,534 | 79.29 | 97.52 | sts | sts | 135,962,043,850 | sts | 9,064.14 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | | | 36 | Paket | | 8 | Paket | | 12 | Paket | | 9 | Paket | | | | | | | | | | - | sekolah | 16,734,721,685 | - | 1,115.65 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan ruang ibadah | | | 26 | Paket | | 2 | Paket | | 7 | Paket | | 12 | Paket | | | | | | | | | | - | Ruang | 8,386,991,565 | - | 223.65 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 5,088,135,900 | - | 254.41 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga sekolah | Terbangunnya/ terehabnya sarana dan prasarana olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3001069 | sts | 26,437,937,790 | sts | 260.60 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi ruang Pengamanan sekolah | Terbangunnya/ terehabnya ruang Pengamanan sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 2,731,916,500 | sts | 26.02 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Kantin Sehat sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Kantin Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 33,768,352,517 | sts | 267.81 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi ruang ibadah sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Mushalla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 7,171,410,500 | sts | 15.08 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi jaringan instalasi listrik dan Jaringan Instalasi Internet sekolah | Terbangunnya/ terehabnya jaringan instalasi listrik dan Jaringan Instalasi Internet sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3001069 | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary | Terbangunnya/ terehabnya sarana air bersih dan sanitary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 141,844,304,094 | sts | 154.79 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Pagar Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 14,353,199,764 | sts | 6.36 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | | Pembangunan Fasilitas Parkir | 30 | Paket | 6,089,380,169 | 7 | Paket | 76,814,000 | 9 | Paket | 90,614,000 | 15 | Paket | 210,174,800 | 5 | Paket | 5,619,735,160 | 36 | Paket | 5,997,337,960 | 120.00 | - | 36 | Paket | 5,997,337,960 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penataan/Rehabilitasi Halaman dan fasilitas parkir/lapangan upacara sekolah | Tertatanya/ terehabnya Halaman dan fasilitas parkir/lapangan upacara | | 3 | Paket | | 0 | Paket | | 1 | Paket | | 1 | Paket | | | | | | | | | | sts | sts | 56,450,239,577 | sts | 317.12 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | Tertatanya/ terehabnya Halaman dan fasilitas parkir/lapangan upacara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 9,825,200 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Kantin Sekolah | 23 | Paket | 4,856,013,546 | 2 | Paket | 89,906,000 | 4 | Paket | 98,726,000 | 6 | Paket | 239,997,400 | 13 | Paket | 4,577,213,179 | 25 | Paket | 5,005,842,579 | 108.70 | - | 25 | Paket | 5,005,842,579 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | 0 | Paket | | 0 | Paket | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 1 | Paket | 5,145,728,417 | | Paket | - | 1 | Paket | 144,617,000 | 0 | Paket | 889,194,300 | 9 | Paket | 4,250,121,960 | 10 | Paket | 5,283,933,260 | 1,000.00 | - | sts | sts | 52,066,949,979 | sts | 2,603.35 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 9 | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | | 4 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi rumah dinas Guru dan rumah Penjaga Sekolah | Terbangunnya/ terehabnya rumah dinas Guru dan rumah Penjaga Sekolah | | 9 | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | | 4 | Paket | | | | | | | | | | 2160 | Paket | 141,776,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 106 | Paket | 26,243,041,689 | 2 | Paket | 434,274,165 | 16 | Paket | 906,388,005 | 19 | Paket | 1,866,739,938 | 72 | Paket | 23,607,686,886 | 109 | Paket | 26,815,088,994 | 102.83 | - | sts | sts | 67,742,275,180 | sts | 5,645.19 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 6 | Paket | | 1 | Paket | | 1 | Paket | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 9 | Paket | | 1 | Paket | | 1 | Paket | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 32 | Paket | 7,144,103,588 | 1 | Paket | 168,920,000 | 1 | Paket | 173,920,000 | 1 | Paket | 395,109,900 | 28 | Paket | 6,443,876,271 | 31 | Paket | 7,181,826,171 | 96.88 | - | 31 | Paket | 7,181,826,171 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 4 | Paket | | 1 | Paket | | 1 | Paket | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium dan praktikum sekolah | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biolog | 3 | Paket | 1,089,014,910 | | Paket | | 1 | Paket | 9,540,000 | 0 | Paket | 149,684,500 | 2 | Paket | 916,656,975 | 3 | Paket | 1,075,881,475 | 100.00 | - | sts | sts | 4,185,771,867 | sts | 9.30 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | 10 | Paket | 2,715,840,696 | 1 | Paket | 10,000,000 | 2 | Paket | 15,000,000 | 2 | Paket | 272,712,800 | 6 | Paket | 2,436,586,180 | 11 | Paket | 2,734,298,980 | 110.00 | 100.68 | 11 | Paket | 2,734,298,980 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 4 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | 5 | Paket | 1,582,431,140 | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | 206,554,650 | 4 | Paket | 1,371,410,953 | 5 | Paket | 1,577,965,603 | 100.00 | - | 5 | Paket | 1,577,965,603 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | 15=14/9*100 | | | 16=14+8 | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | | 3 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | 11 | Paket | 2,752,360,437 | 1 | Paket | 43,719,600 | 5 | Paket | 48,519,600 | 1 | Paket | 736,640,710 | 4 | Paket | 1,980,883,789 | 11 | Paket | 2,809,763,699 | 100.00 | - | 11 | Paket | 2,809,763,699 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 3 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | 4 | Paket | 1,052,004,334 | 1 | Paket | 16,520,000 | 1 | Paket | 24,780,000 | 1 | Paket | 75,570,000 | 1 | Paket | 959,828,155 | 4 | Paket | 1,076,698,155 | 100.00 | 102.35 | 4 | Paket | 1,076,698,155 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA | 7 | Paket | 1,466,563,823 | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | 69,296,850 | 6 | Paket | 1,377,921,448 | 7 | Paket | 1,447,218,298 | 100.00 | 98.68 | 7 | Paket | 1,447,218,298 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | - | Paket | - | - | tdr | - | Paket | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1 | Paket | 657,095,027 | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | 138,161,000 | - | Paket | 506,347,329 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 10 | Paket | 2,526,558,928 | | | | | | | 1 | Paket | 179,881,800 | 10 | Paket | 2,315,780,314 | 11 | - | 2,495,662,114 | sts | - | 11 | - | 2,495,662,114 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 3 | Paket | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | 2 | Paket | 426,072,670 | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | 26,373,600 | 3 | Paket | 390,445,250 | 4 | Paket | 416,818,850 | 200.00 | 97.83 | 4 | Paket | 416,818,850 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | | Paket | | | Paket | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Asrama Sekolah | 3 | Paket | 631,663,257 | | | | | | | 1 | Paket | 13,253,400 | - | Paket | 597,727,522 | 1 | - | 610,980,922 | sts | 96.73 | 1 | - | 610,980,922 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Ibadah | | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 60 | Paket | 13,399,113,723 | 1 | Paket | 107,885,000 | | | | 2 | Paket | 819,931,150 | 57 | Paket | 12,138,339,435 | 60 | Paket | 13,066,155,585 | 100.00 | 97.52 | sts | sts | 25,581,718,828 | sts | 2,558.17 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan Pagar sekolah | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | tdr | - | Sekolah | 18,800,107,000 | - | 1,880.01 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 6 | Paket | 1,204,038,756 | | | | | | | | | | 7 | Paket | 1,186,270,040 | 7 | - | 1,186,270,040 | sts | 98.52 | 7 | - | 1,186,270,040 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan mebelaer sekolah | | Pengadaan Mebel Sekolah | 7 | Paket | 4,594,620,580 | | | | | | | 2 | Paket | 3,841,810,400 | 466 | set | 746,742,400 | 468 | - | 4,588,552,800 | sts | 99.87 | sts | sts | 22,545,788,300 | sts | 71.82 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan meubelair sekolah | Tersedianya Meubelair sekolah yang berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 56,427 | Bulan | 44,977,700,800 | sts | 21.93 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 35 | Paket | 7,141,245,280 | | Paket | - | 2 | Paket | 3,720,720 | 3 | Paket | 4,198,853,760 | 30 | Paket | 2,906,600,785 | 35 | Paket | 7,109,175,265 | 100.00 | 99.55 | sts | sts | 8,153,549,265 | sts | 236.33 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 17,117,365,000 | - | 163.02 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan perlengkapan sekolah | Tersedianya perlengkapan sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3001069 | Paket | 11,749,133,000 | sts | 19.98 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan buku-buku dan Alat tulis siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan buku-buku dan Alat Tulis Siswa | Tersedianya buku bacaan dan pemenuhan alat tulis bagi siswa dan guru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Bulan | 46,000,000 | sts | 0.32 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 4 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 6 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | 1 | Paket | 200,000,000 | | | - | | | | 1 | Paket | 199,179,954 | | | | 1 | - | 199,179,954 | sts | 99.59 | 1 | - | 199,179,954 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 9 | Kegiatan | 223,912,794,136 | 1 | Kali | 63,190,014,400 | 3 | Kegiatan | 116,743,468,800 | 2 | Kali | 174,459,286,000 | 4 | Keg | 48,719,957,740 | 10 | Kali | 403,112,726,940 | sts | - | sts | sts | 671,284,117,764 | sts | 1,367.54 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | 16=14+8 | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraaa Siswa | 10 | Paket | 24,464,998,800 | | Paket | - | 3 | Paket | 5,344,961,800 | 0 | Paket | 11,789,680,300 | 4 | Paket | 13,449,854,107 | 7 | Paket | 30,584,496,207 | 70.00 | 125.01 | sts | sts | 156,841,484,837 | sts | 285.17 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaaan alat praktik dan peraga Siswa | Tersedianya Alat praktek dan peraga yang berkualitas bagi siswa | | 81 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 220,922,780,795 | sts | 62.84 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penggandaan naskah, pendistribusian, pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK | Tersedianya dan Terdistribusinya Naskah Ujian Bagi Siswa yang mengikuti UAS/UN | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 9 | Kegiatan | 1,153,319,624 | 1 | Kegiatan | 35,330,000 | | | | 2 | Keg | 216,700,200 | 6 | Keg | 694,251,900 | 9 | Kegiatan | 946,282,100 | 100.00 | - | sts | sts | 6,098,311,078 | sts | 221.76 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan Penyelenggaraan UN/USBN | Terlaksananya Try Out dan Penyelenggaraan UN/USBN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | ulanPaket | 5,908,612,878 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan Penyelenggaraan UN/USBN | Terlaksananya Try Out dan Penyelenggaraan UN/USBN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Sekolah | 9,704,990,593 | - | 16.28 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Supervisi pengawas satuan pendidikan | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas | 4 | Kegiatan | 957,683,280 | 1 | Kegiatan | 20,000,000 | | | | 1 | Keg | 335,461,100 | 2 | Keg | 567,013,110 | 4 | Kegiatan | 922,474,210 | 100.00 | - | sts | sts | 4,104,747,588 | sts | 273.65 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Minat Bakat Siswa | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 80 | Kegiatan | 6,958,233,660 | 1 | Kegiatan | 193,611,200 | 2 | Kegiata | 936,985,250 | 15 | Keg | 2,202,681,145 | 62 | Keg | 3,562,127,065 | 80 | Kegiatan | 6,895,404,660 | 100.00 | - | sts | sts | 19,790,164,604 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Siswa | Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 545,095,000 | - | 9.88 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan Lomba kreativitas dan Minat Bakat Siswa | Terlaksananya Lomba kreativitas dan Minat Bakat Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 27,703,587,449 | sts | 25.32 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan Lomba kreativitas dan Minat Bakat Siswa | Terlaksananya Lomba kreativitas dan Minat Bakat Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Lomba Kompetensi dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | Bulan | 229,035,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Insentif/Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 6 | Kegiatan | 143,127,109,696 | 2 | Kegiatan | 37,724,887,000 | 1 | Kegiata | 73,634,554,700 | 2 | Keg | 94,573,785,158 | 1 | Keg | 44,695,844,970 | 6 | Kegiatan | 250,629,071,828 | 100.00 | 175.11 | sts | sts | 777,039,579,666 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS SMK, SMA dan PKLK | Tersedianya Honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS SMK, SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 168,976,211,351 | sts | 17.37 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 204,806,587,859 | - | 693.46 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Oprasional Sekolah Berasrama | Tersedianya Oprasional Sekolah Berasrama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 31,205,463,915 | sts | 48.68 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Terciptanya kompetesi kegiatan standar pendidikan yang sesuai keahlian pendidikan | Pengembang an Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 368 | Kegiatan | 30,697,548,085 | 31 | Kegiatan | 2,810,353,026 | 10 | Kegiata | 7,512,565,508 | 89 | Keg | 14,079,077,899 | 238 | Keg | 12,834,508,356 | 368 | Kegiatan | 37,236,504,789 | 100.00 | 121.30 | sts | sts | 54,575,168,579 | sts | 844.06 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan Kompetensi dan Supervisi pengawas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | ulanPaket | 1,716,569,894 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | Tersedianya pelatihan bagi tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "100% 1 | Bulan | 9,007,117,056 | sts | 17.87 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | Jumlah guru berkompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 6,940,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | Peningkatan Kualitas Guru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ""60 %1 | Bulan | 385,024,799 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) | Jumlah kelompok MGMP Tingkat SMP, KKG Tingkat TK dan SD, MKPS Pengawas Tingkat TK, SD, dan SMP yang dibina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 3,437,313,700 | - | 27.07 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | Terlaksana kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 11,558,054,168 | sts | 42.64 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | - | 5,404,233,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Guru Yang memenuhi standar pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | Pengmbangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik | Kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 79,939,385,305 | sts | 28.51 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 4,000,982,198 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | Tersediannya Beasiswa Lanjutan Tenaga Pendidik SMA/ SMK/ SLB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 405 | Bulan | 449,774,779 | sts | 10.07 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | Meningkatkan pelaksanaan pendidikan lanjutan untuk standar kualifikasi bagi Pendidik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 10,845,550,646 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat Pendidik dan kependidikan SMK, SMA dan PKLK | Terlaksananya perlombaan dan pengembangan kreativitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 16,040,769,749 | sts | 19.52 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat Pendidik dan kependidikan SMK, SMA dan PKLK | Terlaksananya perlombaan dan pengembangan kreativitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 632,665,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Terlaksananya uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Terlaksananya uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 996,088,100 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,551,042,400 | sts | 14.93 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK | Terlatihnya Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 406,145,200 | sts | 0.24 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK | Terlatihnya Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 3,736,625,889 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 4,050,520,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kapasitas dan Supervisi pengawas Sekolah SMA dan PKLK | Terlaksananya Pengawasan Pendidikan SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 3,736,625,889 | sts | 16.32 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kapasitas dan Supervisi pengawas Sekolah SMA dan PKLK | Terlaksananya Pengawasan Pendidikan SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 2,356,238,200 | - | 15.71 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 14,073,885,923 | - | 187.65 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 4,209,902,070 | - | 140.33 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan Manajemen dan Kelembagaan Sekolah | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 8 | Kegiatan | 698,869,908 | 1 | Kegiatan | 93,960,000 | 1 | Kegiata | 160,218,400 | 0 | Keg | 264,050,500 | 6 | Keg | 384,664,520 | 8 | Kegiatan | 902,893,420 | 100.00 | - | sts | sts | 3,239,939,920 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan Manajemen dan kelembagaan sekolah | Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 3,768,514,072 | sts | 38.31 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Fasilitasi Peningkatan akreditasi SMA | Terakreditasinya Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan Teknologi dan Informasi Pendidikan | Meningkatnya Kompetensi IT bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 3,421,131,090 | sts | 30.65 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan | Terbinanya Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 13,772,219,852 | sts | 18.32 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan kelembagaan Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan | Terbinanya kelembagaan Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan UKS SMA/SMK/MA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 3,998,158,300 | - | 228.47 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Teknologi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 4,328,307,455 | - | 84.87 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 6,666,815,620 | - | 53.33 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 7,572,988,199 | - | 60.58 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH III Lhokseumawe) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 7,503,541,702 | - | 68.21 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 5,611,954,836 | - | 49.88 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH V TAKENGON) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 4,418,237,828 | - | 35.35 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VI KUTACANE) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 6,105,587,136 | - | 50.88 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 21,385,751,550 | - | 185.96 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANGPIDIE) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 8,034,989,401 | - | 80.35 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUAN) | Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG IX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 10,539,229,294 | sts | 105.39 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan Sekolah Berwawasan Keunggulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,696 | Orang | 6,479,083,662 | 101.50 | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | Terselenggaranya Sekolah Berwawasan Keunggulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan perlomba Sekolah Sehat | Terlaksananya pembinaan dan perlombaan sekolah sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,517,431,657 | sts | 6.19 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan bantuan operasional sekolah | Tersedianya bantuan operasional sekolah | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 1 | Kegiatan | 215,986,879,000 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | sts | sts | 267,109,082,487 | sts | 3,874.90 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 2 | Kegiatan | 960,045,839 | 1 | Kali | 49,200,000 | | | | 1 | Keg | 98,400,000 | - | Keg | 841,202,290 | 2 | Kali | 988,802,290 | sts | - | 2 | Kali | 988,802,290 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | **1** | **Tahun** | **413,867,030,504** | | **Tahun** | **29,615,333,391** | **0** | **Tahun** | **21,310,368,884** | | | **128,496,080,254** | | | **211,721,653,987** | **-** | **Tahun** | **391,143,436,516** | **-** | **-** | **-** | **Tahun** | **391,143,436,516** | **tdr** | **61.95** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 1 | Paket | 22,920,000 | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 8 | Paket | 10,872,566,673 | | | | 1 | Paket | 1,001,343,000 | 0 | Paket | 5,676,255,635 | 7 | Keg | 5,107,078,856 | 8 | - | 11,784,677,491 | sts | - | 8 | - | 11,784,677,491 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1 | Paket | 231,271,091 | | | - | | | | | | | | | 219,189,150 | - | - | 219,189,150 | sts | - | - | - | 219,189,150 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi laboratorium dan Ruang praktikum sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 1 | Paket | 2,025,585,292 | | | | | | | 1 | Paket | 882,000,000 | - | Paket | 921,446,400 | 1 | - | 1,803,446,400 | sts | - | sts | sts | 162,821,043,042 | sts | 44.44 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi laboratorium dan Ruang praktikum sekolah | Terbangunnya/ terehabnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | - | tdr | 237 | - | 31,141,444,440 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | 1 | Paket | 432,000,000 | | | | | | | 1 | Paket | 216,000,000 | 1 | Paket | 86,400,000 | 2 | - | 302,400,000 | sts | - | 2 | - | 302,400,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 3 | Paket | 2,982,692,909 | 2 | Paket | 229,317,500 | | | | 0 | Paket | 1,218,264,500 | 1 | Paket | 1,753,135,700 | 3 | Paket | 3,200,717,700 | 100.00 | - | 3 | Paket | 3,200,717,700 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 10 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 2 | Paket | 1,068,000,000 | | | | | | | 1 | PAket | 534,000,000 | 1 | Paket | 534,000,000 | 2 | - | 1,068,000,000 | sts | 100.00 | 2 | - | 1,068,000,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Asrama Sekolah | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | 230,842,600 | - | - | 230,842,600 | sts | 3,077.90 | - | - | 230,842,600 | sts | 97.89 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 179 | Paket | 42,865,141,347 | 2 | Paket | 476,705,100 | 19 | Paket | 989,991,900 | 12 | Paket | 4,645,070,950 | 146 | Paket | 37,532,951,004 | 179 | Paket | 43,644,718,954 | 100.00 | 101.82 | 179 | Paket | 43,644,718,954 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 13 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 12 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pembangunan Fasilitas Parkir | 21 | Paket | 4,303,691,229 | 1 | Kali | 13,632,000 | 2 | Paket | 29,732,000 | 0 | PAket | 122,090,650 | 18 | Paket | 3,895,247,160 | 21 | Kali | 4,060,701,810 | sts | 94.35 | 21 | Kali | 4,060,701,810 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Kantin Sekolah | 3 | Paket | 1,889,003,309 | | | | | | | 1 | Paket | 25,125,950 | 2 | Paket | 1,806,735,250 | 3 | - | 1,831,861,200 | sts | 96.98 | 3 | - | 1,831,861,200 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 9 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 3 | Paket | 672,795,836 | 1 | Paket | 8,663,200 | 1 | Paket | 8,663,200 | 0 | Paket | 8,663,200 | 1 | Paket | 649,479,050 | 3 | Paket | 675,468,650 | 100.00 | 100.40 | 3 | Paket | 675,468,650 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang/Sudut Baca | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 50 | Paket | 24,294,256,997 | 1 | Paket | 17,900,000 | 2 | Paket | 68,600,000 | 4 | Paket | 7,550,405,650 | 43 | Paket | 16,529,750,240 | 50 | Paket | 24,166,655,890 | 100.00 | 99.47 | 50 | Paket | 24,166,655,890 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 11 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 13 | Paket | 4,983,858,791 | | | | 1 | Paket | 2,652,000 | 1 | Paket | 1,057,565,000 | 11 | Paket | 3,833,407,510 | 13 | - | 4,893,624,510 | sts | 98.19 | 13 | - | 4,893,624,510 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 6 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa | 30 | Paket | 23,424,622,162 | 1 | Paket | 59,936,000 | 1 | Paket | 111,036,000 | 3 | Paket | 8,878,404,350 | 25 | Paket | 14,460,263,630 | 30 | Paket | 23,509,639,980 | 100.00 | 100.36 | 30 | Paket | 23,509,639,980 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 8 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | 12 | Paket | 6,872,777,948 | 1 | Paket | 10,000,000 | 4 | Paket | 15,000,000 | 1 | Paket | 2,886,501,940 | 6 | Paket | 3,734,878,520 | 12 | Paket | 6,646,380,460 | 100.00 | 96.71 | 12 | Paket | 6,646,380,460 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 9 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | 1 | Paket | 478,781,384 | | | | | | | 1 | Paket | 129,600,000 | - | Paket | 344,481,700 | 1 | - | 474,081,700 | sts | 99.02 | 1 | - | 474,081,700 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula | 1 | Paket | 252,069,440 | | | | | | | | | | | | 243,261,300 | - | - | 243,261,300 | sts | 96.51 | - | - | 243,261,300 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 25 | Paket | 5,504,420,510 | 1 | Paket | 13,230,000 | 2 | Paket | 18,230,000 | 0 | Paket | 540,581,500 | 22 | Paket | 4,596,609,410 | 25 | Paket | 5,168,650,910 | 100.00 | 93.90 | 25 | Paket | 5,168,650,910 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 3 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Fasilitas Parkir | 0 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Kantin Sekolah | 5 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 3 | Paket | 584,375,523 | | | | | | | 1 | Paket | 13,986,000 | 2 | Paket | 556,835,000 | 3 | - | 570,821,000 | sts | 97.68 | 3 | - | 570,821,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca | 0 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penoadaan Mebel Sekolah | 5 | Paket | 2,070,347,362 | | | | | | | 1 | Paket | 1,699,084,900 | 4 | Paket | 362,275,000 | 5 | - | 2,061,359,900 | sts | 99.57 | 5 | - | 2,061,359,900 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 23 | Paket | 9,570,185,280 | | | | 1 | Paket | 3,122,293,280 | 1 | Paket | 4,612,791,430 | 21 | Paket | 4,906,984,080 | 23 | - | 12,642,068,790 | sts | - | 23 | - | 12,642,068,790 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 34 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 333 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | 2 | Kegiatan | 15,073,200,000 | 1 | Kegiatan | 4,694,000,000 | | | | 1 | Keg | 12,020,400,000 | - | Kegiatan | 2,810,600,000 | 2 | Kegiatan | 19,525,000,000 | 100.00 | - | 2 | Kegiatan | 19,525,000,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraoa Siswa | 7 | Paket | 61,156,200,000 | | | - | 1 | Paket | 11,329,040,392 | 1 | Paket | 11,527,879,392 | 5 | Paket | 49,667,145,238 | 7 | - | 72,524,065,022 | sts | 118.59 | 7 | - | 72,524,065,022 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 39 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 10 | Kegiatan | 732,499,016 | 2 | Kegiatan | 92,200,600 | 1 | Kegiata | 179,101,510 | 4 | Keg | 470,208,898 | 3 | Kegiatan | 156,797,800 | 10 | Kegiatan | 898,308,808 | 100.00 | - | 10 | Kegiatan | 898,308,808 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan | 1 | Kegiatan | 156,308,000 | | | | | | | | | | - | Kegiatan | 139,518,991 | - | - | 139,518,991 | sts | 89.26 | - | - | 139,518,991 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 3 | Kegiatan | 9,924,743,980 | 2 | Kegiatan | 1,766,655,897 | 1 | Kegiata | 4,434,685,602 | 21 | Keg | 7,750,268,562 | 8 | Kegiatan | 1,829,353,628 | 32 | Kegiatan | 15,780,963,689 | 1,066.67 | - | sts | sts | 71,042,806,586 | sts | 710.43 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan Lomba Kompetensi dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Lomba-lomba Kompetensi dan kreativitas Siswa | | 9 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 22,767,956,072 | sts | 23.97 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa | Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 1,738,897,310 | - | 7.39 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Kerja Siswa | Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Kerja Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 11,933,900,240 | sts | 46.65 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan Sertifikasi Profesi | Terselenggaranya Sertifikasi Profesi Pada SMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 1,101,062,143 | - | 10.22 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 3 | Kegiatan | 81,468,385,348 | 2 | Kegiatan | 21,906,780,000 | | | | 2 | Keg | 54,271,304,625 | 1 | Kegiatan | 25,732,138,000 | 5 | Kegiatan | 101,910,222,625 | 166.67 | 125.09 | 5 | Kegiatan | 101,910,222,625 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 21 | Kegiatan | 2,748,118,821 | 1 | Kegiatan | 29,200,000 | | | | 12 | Keg | 540,528,740 | 8 | Kegiatan | 1,841,810,530 | 21 | Kegiatan | 2,411,539,270 | 100.00 | 87.75 | sts | sts | 11,019,167,594 | sts | 109.89 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMK | Terlatihnya Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 2,493,747,185 | sts | 11.69 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMK | Terlatihnya Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 12,847,195,921 | - | 94.40 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri | Terselenggaranya Kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 1,293,869,661 | - | 9.90 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan Manajemen dan kelembagaan sekolah | Terbinanya Manajemen dan kelembagaan sekolah | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 10 | Kegiatan | 2,137,738,954 | 2 | Kegiatan | 216,788,094 | | | | 4 | Keg | 1,073,993,382 | 6 | Kegiatan | 736,171,240 | 12 | Kegiatan | 2,026,952,716 | 120.00 | - | sts | sts | 5,399,745,306 | sts | 108.62 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 3 | Kegiatan | 94,885,241,000 | 1 | Kegiatan | 94,885,241,000 | | | | 1 | Keg | 64,780,000 | 1 | Kegiatan | 26,496,872,000 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 2 | Kegiatan | 145,732,302 | 1 | Kegiatan | 80,325,000 | | | | 1 | Keg | 80,325,000 | 0 | Kegiatan | 5,995,000 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelayanan dan Pengembangan Unit Produksi dan Jasa | Terlaksananya Pelayanan dan Pengembangan Unit Produksi dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 3,172,362,600 | sts | 30.42 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Fasilitasi Peningkatan akreditasi SMK | Terakreditasinya Pendidikan Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan Pendidikan Vokasional | Terbinanya Pendidikan Vokasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 3,921,189,641 | sts | 20.80 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | **1** | **Tahun** | **62,545,019,597** | | **Tahun** | **9,090,658,300** | **0** | **Tahun** | **15,202,563,741** | | | **10,671,707,243** | | | **33,057,134,700** | **-** | **Tahun** | **68,022,063,984** | **-** | **-** | **-** | **Tahun** | **68,022,063,984** | **tdr** | **64.90** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Pembangunan gedung sekolah | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | sts | sts | 4,177,417,400 | sts | 208.87 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang kelas sekolah | | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 10 | Paket | 4,147,215,261 | - | Paket | | 1 | Paket | 189,147,000 | 2 | Paket | 974,298,720 | 7 | Paket | 2,964,258,651 | 10 | Paket | 4,127,704,371 | 100.00 | - | sts | sts | 4,127,704,371 | sts | 137.59 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 3 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang guru sekolah | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 4 | Paket | 718,261,820 | | Paket | | 1 | Paket | 24,825,000 | - | Paket | 206,072,000 | 3 | Paket | 487,353,673 | 4 | Paket | 718,250,673 | 100.00 | 100.00 | sts | sts | 1,288,793,673 | sts | 128.88 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 3 | Paket | 548,518,348 | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | 163,025,800 | 2 | Paket | 385,492,548 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 3 | Unit | 695,295,870 | | Unit | | 1 | Unit | 26,527,000 | 1 | Unit | 185,929,800 | 1 | Unit | 482,835,255 | 3 | Unit | 695,292,055 | 100.00 | - | 3 | Unit | 695,292,055 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan ruang serba guna/aula | | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | 8 | Unit | - | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Asrama Sekolah | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 14 | Paket | 6,784,095,372 | | Paket | | 1 | Paket | 176,709,551 | 3 | Paket | 1,155,351,703 | 10 | Paket | 5,299,792,337 | 14 | Paket | 6,631,853,591 | 100.00 | - | sts | sts | 8,974,376,948 | sts | 897.44 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | | | 16 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan ruang ibadah | | | 9 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 273,623,000 | - | 10.94 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Fasilitas Parkir | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Kantin Sekolah | 2 | paket | 2,175,111,913 | | paket | | 0 | paket | 49,462,916 | 1 | paket | 349,885,800 | 1 | Paket | 1,759,735,073 | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 6 | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | sts | sts | 1,578,961,000 | sts | 157.90 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA | | Pembangunan Ruang Laboratorium | 3 | Unit | - | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | sts | sts | 738,470,000 | sts | 73.85 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 3 | Paket | 813,057,416 | | Paket | | | Paket | | | Paket | 41,165,000 | 6 | Paket | 763,325,679 | 6 | Paket | 804,490,679 | 200.00 | - | sts | sts | 6,565,073,439 | sts | 875.34 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 2 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan perpusatakaan sekolah | | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | 155,661,340 | sts | 15.57 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula | 3 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Asrama Sekolah | 3 | Paket | 541,347,395 | | Paket | | | Paket | | | Paket | | 3 | Paket | 531,381,583 | 3 | Paket | 531,381,583 | 100.00 | - | 3 | Paket | 531,381,583 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1 | Paket | 1,010,391,750 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Fasilitas Parkir | 1 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | 2 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) | 1 | paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) | 1 | paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) | 2 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan mebelaer sekolah | | Pengadaan Mebel Sekolah | 1 | Paket | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | sts | sts | 692,780,000 | sts | 23.09 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | 16=14+8 | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1 | Paket | 40,000,000 | | Paket | | | Paket | | | Paket | | 1 | Paket | 37,900,000 | 1 | Paket | 37,900,000 | 100.00 | 94.75 | 1 | Paket | 37,900,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 0 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | 12 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 50 | Set | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Biaya untuk Kegiatan SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | 3 | Kegiatan | 6,866,238,540 | 0 | Kegiatan | 75,661,000 | 1 | Kegiatan | 2,185,704,800 | 1 | Kegiatan | 1,807,573,000 | 1 | Kegiatan | 2,698,998,193 | 3 | Kegiatan | 6,767,936,993 | 100.00 | 98.57 | sts | sts | 17,217,176,993 | sts | 175.81 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Bantuan Oprasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | Tersedianya Bantuan Oprasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 6,259,025,000 | sts | 22.24 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan Bantuan Oprasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | Tersedianya Bantuan Oprasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 62 | Paket | 5,106,266,000 | | Paket | | | Paket | | | Paket | | 62 | Paket | 5,103,661,760 | 62 | Paket | 5,103,661,760 | 100.00 | - | sts | sts | 6,344,728,360 | sts | 169.19 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 1 | Paket | 121,239,000 | | Paket | - | 0 | Paket | 2,000,000 | | Paket | - | 1 | Paket | 56,125,000 | 1 | Paket | 58,125,000 | 100.00 | 47.94 | 1 | Paket | 58,125,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus | 1 | Kegiatan | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa | Terbinanya Siswa Berpendidikan Khusus | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 4 | Kegiatan | 1,563,387,816 | 1 | Kegiatan | 30,635,000 | 2 | Kegiatan | 531,100,950 | 3 | Keg | 629,489,500 | 1 | Keg | 293,478,640 | 7 | Kegiatan | 1,484,704,090 | 175.00 | 94.97 | sts | sts | 5,633,821,290 | sts | 38.27 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Lomba kreativitas dan Minat Bakat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus dan Layanan Khusus | Terlaksananya kegiatan perlombaan dan Kegiatan Kreativitas Pendidik dan Tenanga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | 2 | Kegiatan | 18,742,647,908 | 1 | Kegiatan | 3,406,844,000 | | | 4,529,905,000 | 4 | Keg | 5,041,295,120 | 1 | Keg | 5,623,701,108 | 6 | Kegiatan | 18,601,745,228 | 300.00 | - | 6 | Kegiatan | 18,601,745,228 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | 5 | Kegiatan | 1,622,333,257 | 1 | Kegiatan | 14,600,000 | 3 | Kegiatan | 71,887,260 | 3 | Keg | 34,580,000 | 1 | Keg | 879,826,200 | 8 | Kegiatan | 1,000,893,460 | 160.00 | - | sts | sts | 5,121,403,686 | sts | 102.43 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemantapan program sistem isyarat bahasa indonesia (SIBI), netra, autis melalui magang dan pembekalan guru berijazah non PLB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 717,694,000 | - | 49.50 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan Manajemen dan kelembagaan sekolah | Terbinanya Manajemen dan kelembagaan sekolah | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 2 | Kegiatan | 267,071,931 | 0 | Kegiatan | 15,000,000 | 1 | | 43,035,664 | 1 | Keg | 53,040,800 | 1 | Keg | 120,110,000 | 2 | Kegiatan | 231,186,464 | 100.00 | - | sts | sts | 1,110,810,692 | sts | 40.88 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Fasilitasi Peningkatan akreditasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | Terakreditasinya Lembaga Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Lembaga | 6,152,794 | - | 0.26 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaran Sekolah Keberbakatan | Terselenggaranya Sekolah Keberbakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 904,500,000 | sts | 38.33 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 1 | Kegiatan | 10,625,040,000 | 0 | Kegiatan | 5,547,918,300 | 0 | Kegiatan | 7,372,258,600 | 0 | Kegiatan | 30,000,000 | 0 | Kegiatan | 5,569,159,000 | 1 | Kegiatan | 18,519,335,900 | 100.00 | 174.30 | 1 | Kegiatan | 18,519,335,900 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 1 | Kegiatan | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145.21 | #DIV/0! | | | | 3.38 | 331.60 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | #DIV/0! | | | | SR | ST | Dinas Pendidikan Aceh |
| **18** | **Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Berkarakter Kearifan Lokal** | **%tase Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) yang menerapkan pendidikan berbasis kearifan lokal** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **100** | **%** | **1,030,216,142** | | **%** | **116,480,000** | **0** | **%** | **222,814,668** | | | **143,037,420** | | | **526,485,600** | - | % | 1,008,817,688 | **-** | **97.92** | 62 | % | 7,161,612,547 | 68.89 | 55.72 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | **14.9** | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | | 65.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | 68,05/ 68,88 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah** | **1** | **Tahun** | **1,030,216,142** | **0.25** | **Tahun** | **116,480,000** | **0.25** | **Tahun** | **222,814,668** | **0.25** | **Tahun** | **143,037,420** | **0.25** | **Tahun** | **526,485,600** | **1** | **Tahun** | **1,008,817,688** | **100.00** | **-** | **1** | **Tahun** | **1,008,817,688** | **tdr** | **1.58** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Sosialisasi kurikulum | | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 2 | Kegiatan | 734,345,582 | 1 | Kegiatan | 112,250,000 | 1 | Kegiatan | 215,764,668 | 1 | Kegiatan | 48,408,420 | 1 | Kegiatan | 354,519,600 | 2 | Kegiatan | 730,942,688 | 100.00 | 99.54 | sts | sts | 2,629,239,874 | sts | 525.85 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh pada | | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 1 | Kegiatan | 4,230,000 | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 5 | Bulan | 843,765,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penulisan bahan ajar untuk Pendidikan menengah | Tersedianya Bahan Ajar untuk Pendidikan menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | #VALUE! | - | #VALUE! | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan kurikulum Aceh bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Pendidikan Menengah | Terlatihnya Guru pada Jenjang Pendidikan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh pada SMA/MA | Terlaksananya Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh Pada SMA/MA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 4,329,630,007 | sts | 10.75 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh pada SMK | Terlaksananya Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh Pada SMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 2,725,527,904 | sts | 31.98 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh | Terimplementasinya kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh pada pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 976,948,989 | - | 17.06 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal | 2 | Kegiatan | 295,870,560 | | Kegiatan | - | 1 | Kegiatan | 7,050,000 | 1 | Kegiatan | 94,629,000 | 1 | Kegiatan | 171,966,000 | 2 | Kegiatan | 273,645,000 | 75.00 | 92.49 | 2 | Kegiatan | 273,645,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.50 | 96.01 | | | | - | #VALUE! | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | ST | | | | ERR | #VALUE! | Dinas Pendidikan Aceh |
| **9** | **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **Terlaksananya peningkatnya jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **68.05** | **%** | **1,330,577,885** | **2.99** | **%** | **58,469,000** | **20.549** | **%** | **401,799,600** | **15.40** | **%** | **301,211,200** | **27.56** | **%** | **538,811,820** | **67** | **%** | **1,300,291,620** | **97.72** | **97.72** | **138** | **%** | **890,451,306,035** | **157.72** | **49.15** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | | **14.9** | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | **Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi** | **1** | **Tahun** | **1,330,577,885** | **0.25** | **Tahun** | **58,469,000** | **0** | **Tahun** | **401,799,600** | | | **301,211,200** | | | **538,811,820** | **0** | **Tahun** | **1,300,291,620** | **25.00** | **-** | **0** | **Tahun** | **1,300,291,620** | **tdr** | **19.57** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | meningkatnya kualitas data pendidik dan tenaga kependidikan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 3 | Kegiatan | 1,092,211,931 | 0 | Kegiatan | 8,220,000 | 1 | Kegiatan | 260,520,600 | 1 | Keg | 293,711,200 | 1 | Keg | 429,186,820 | 3 | Kegiatan | 991,638,620 | 90.79 | 90.79 | sts | sts | 81,826,385,820 | sts | 3,164.75 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga | Kompetensi Guru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 10,803,350,646 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendataan, Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, SMA dan PKLK | Terlaksananya distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 | Kegiatan | 238,365,954 | 0 | Kegiatan | 50,249,000 | 0 | Kegiatan | 64,200,000 | 0 | Keg | 7,500,000 | 0 | Keg | 109,625,000 | 1 | Kegiatan | 231,574,000 | 100.00 | - | sts | sts | 1,505,603,550 | sts | 37.10 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.40 | 45.40 | | | | #DIV/0! | 1,600.92 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | | #DIV/0! | ST | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **14,90** | **Tahun** | **371,868,000** | | | **-** | | | **13,040,000** | | | **220,585,500** | | | **131,499,600** | **-** | **-** | **365,125,100** | **sts** | **98.19** | **-** | **-** | **365,125,100** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| | | | **Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **1** | **Tahun** | **334,490,000** | | | **-** | | | **13,040,000** | | | **220,585,500** | | | **96,302,000** | **-** | **-** | **329,927,500** | **sts** | **-** | **-** | **-** | **329,927,500** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pendidikan Aceh** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | | 16=14+8 | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 2 | Kegia | 334,490,000 | | Kegia | - | 1 | Kegiata | 13,040,000 | 1 | Kegiatan | 220,585,500 | 1 | Kegiatan | 96,302,000 | 2 | Kegiatan | 329,927,500 | 115.95 | - | 2 | Kegiatan | 329,927,500 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang** | **1** | **Tahun** | **37,378,000** | | | **-** | | | | | | | **1** | **Tahun** | **35,197,600** | 1 | - | 35,197,600 | **sts** | **94.17** | 1 | - | 35,197,600 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 | Kegiatan | 37,378,000 | | Kegia | - | Kegiatan | | | | Kegiatan | | 1 | Kegiatan | 35,197,600 | 1 | Kegiatan | 35,197,600 | 100.00 | 94.17 | 1 | Kegiatan | 35,197,600 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107.97 | 47.08 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | 14,73 | **Tahun** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi | 1 | Keg | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91.15 | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **tdr** | **tdr** | | | **371,596,100,825** | | | **Dinas Pendidikan Aceh** |
| **5** | **Program Pendidikan Anak Usia Dini** | **Terwujudnya peningkatan mutu dan akses pendidikan anak usia dini** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 83 | % | 40,157,386,503 | 123.13 | 41.51 | Dinas Pendidikan Aceh |
| **8** | **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** | **Terwujudnya peningkatan angka kelulusan SD/MI, - Terwujudnya peningkatan angka kelulusan SMP/MTs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 89 | % | 309,627,239,659 | 90.82 | 74.12 | Dinas Pendidikan Aceh |
| **11** | **Program Pendidikan Non Formal** | **Terwujudnya peningkatan angka melek huruf** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 106 | % | 21,811,474,663 | 106.10 | 42.78 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Sumber | Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Dukungan siswa berprestasi dan guru pendamping siswa berprestasi SD/MI | Tersedianya Dukungan siswa berprestasi dan guru pendamping siswa berprestasi SD/MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan gedung sekolah | Terbangunnya RKB Kelompok Bermain dan TK Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 13,482,831,935 | - | 37.00 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang kelas sekolah | Kurangnya ruang kelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ruang | 4,354,791,664 | - | 38.58 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan saranan dan prasarana bermain | Meningkatnya mutu pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan ruang serbaguna/aula | Tersedianya ruang serbaguna TK Negeri Pembina I Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Penataan Halaman Sekolah Merupakan Tata Letak Lingkup Sekolah yang nyaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Sekolah | 136,470,000 | - | 4.83 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi | MCK Mengajarkan Kebersihan Para siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan alat praktik seragam siswa | Mutu pendidikan anak usia dini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 7,633,595,975 | - | 87.09 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa | Tersedianya buku baraan bagi guru dan siswa dalam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan mebeluer sekolah | Tersedianya Loker bagi siswa TK/RA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Set | 4,431,498,000 | - | 33.79 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah Perlengkapan APE sekolah paud yang tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | sts | 1,745,746,200 | sts | 32.41 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | Tersedianya pelatihan bagi guru PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 976,862,600 | - | 17.76 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan Pendidik anak usia dini | Jumlah Penyelenggaraan Lomba Kreatif Untuk PAUD dan DIKMAS yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 2,699,185,555 | - | 73.68 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Jumlah Siswa PAUD yang Mengikuti Pekan Kreatifitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,379,598,312 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini | Terciptanya tenaga pendidik dalam pengayaan edukasi minat belajar siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini | Tersusunnya kemampuan dan ketrampilan pengetahuan peserta didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran | terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Anak Usia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran | Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan koordinasi dan kertasama pendidikan anak | Terbinanya Gugus PAUD dalam Kabupaten Aceh Java | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Terehabilitasinya bangunan sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary | Terehabilitasinya sarana air bersih dan sanitary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan pagar sekolah | Pembangunan Pagar Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kelembagaan paud | Terlaksananya kegiatan Kelembagaan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 1,000,885,334 | sts | 12.08 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan pendidikan anak usia dini | Meningkatnya mutu PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum paud | Tercapainya standar nasional pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 752,827,483 | sts | 8.17 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan kompetensi Guru dan Pengelola PAUD | Meningkatnya kompetensi Guru dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan sistem pendataan pendidikan PAUD | Tersedianya data pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan lomba kreativitas PAUD | Terbinanya kelembagaan dan kreativitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 563,093,445 | sts | 14.29 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan gedung sekolah | Terbangunnya Gedung Sekolah (langsa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 18,331,975,495 | - | 29.13 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga | Ruang Kelas Baru SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 3,687,582,000 | - | 62.87 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang kelas sekolah | Tersedianya RKB Sekolah (Blang Mangat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 35,172,158,654 | sts | 41.77 | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | | | Vol | Satuan | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penambahan ruang kelas sekolah | Tersedianya RKB Sekolah(Gedung RKB SD Trans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang kelas sekolah | Tersedianya RKB Sekolah (tanah Jambo Ave aceh Utara) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1,082,630,579 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang guru sekolah | Tersedianya Kantor Dewan Guru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ruang | 12,200,177,828 | - | 27.62 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang guru sekolah | Tersedianya Kantor Dewan Guru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 907,431,172 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang guru sekolah | Tersedianya Kantor Dewan Guru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah | Terbangunnya Lab Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ruang | 3,150,463,766 | - | 15.18 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga | Tersedianya Alat peraga olahraga bagi siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan ruang serba guna/aula | Terbangunya ruang serba guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ruang | 10,032,366,660 | - | 69.75 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Tersedianya pemasangan paving block jalan dan taman SD Neg 11 Kota Sabang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Sekolah | 4,044,486,628 | - | 32.02 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan ruang ibadah | tersedianya mushalla SMP5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 4,647,904,307 | - | 33.22 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan perpustakaan sekolah | ruang pustaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ruang | 4,682,925,981 | - | 65.82 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | Peningkatan Sarana Kebersihan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan buku dan alat tulis siswa | Tersedianya Buku Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa | Meningkatnya kualitas pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 69,313,430,878 | - | 59.19 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa | Meningkatnya kualitas pendidikan (Bireuen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan mebeluer sekolah | Tersedianya meubeleir ruang kelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Set | 35,048,560,340 | - | 39.01 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan perlengkapan sekolah | Tersedianya perlengkapan sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 8,299,405,500 | - | 29.55 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah | tertatanya halaman/lingkungan sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas | Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Terpeliharanya gedung sekolah yang representatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa | Terhabilitasinya asrama siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Terhabilitasinya ruang kelas sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ruang | 3,743,693,272 | - | 76.15 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah | Terhabilitasinya ruang guru sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 603,840,000 | sts | 44.86 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah | Meningkatnyan Sarana Dan Prasarana Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat ruang serbagunan/aula | Meningkatnyan Sarana Dan Prasarana Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ruang | 66,305,000 | - | 9.11 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan | Terciptanya Fasilitas keamanan terhadap lingkungan sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah | Jumlah ruang sekolah yang direvitalisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | unit | 505,422,000 | - | 46.28 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | Rehabilitasi sedang / berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary | Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB | Terpenuhinya Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan | Tersedianya buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Paket | 1,130,238,971 | - | 112.46 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah | Terbangunnya Laboratorium dan ruang praktikum sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan Pagar Sekolah | Terbangunnya Pagar Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Sekolah | 25,812,310,508 | - | 47.24 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan Pagar Sekolah | Terbangunnya Pagar Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 5,544,513,800 | - | 22.82 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 150,000,000 | - | 6.78 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi tenaga pendidik | Terlatihnya pendidik yang memenuhi standar kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 2,490,327,700 | - | 39.22 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | Tersedianya Beasiswa bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | Tersedianya data dan terdistribusinya pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 676,557,060 | - | 22.34 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik | Meningkatnya motivasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 589,430,000 | - | 53.10 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan mutu dan kwalitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | Meningkatnya Mutu dan Kwalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 3,210,281,900 | - | 22.99 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan | Meningkatnya minat dan Kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 6,315,376,965 | - | 125.71 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan kependidikan SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Guru yang memenuhi standar nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan Pendidikan lanjutan bagi pendidik SD/MI dan SMP/MTS | Terpenuhinya Kualifikasi Guru yang memenuhi standar nasional pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs | Terselenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 9,298,524,100 | sts | 44.59 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs | Terselenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | BulanKeg | 1,273,505,400 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs | Terselenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs | Terselenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs | Terselenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pelatihan kompetensi siswa bermotasi | Meningkatnya kompetensi siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 304,905,566 | - | 3.21 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non- | Tersedianya bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan Paket B setara SMP | Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan | Terbinanya kelembagaan manajemen berbasis sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 885,459,380 | - | 12.04 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Terbinanya minat,bakat dan kreativitas siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 21,381,706,059 | - | 55.81 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) | Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi | Meningkatnya proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan | Terlaksananya sosialisasi berbagai informasi pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan beasiswa transisi | Tersedianya beasiswa transisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI dan SMP/MTs | Tercapainya standar nasional pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 10,612,883,536 | - | 124.56 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi peserta didik dan Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS | Menngkatnya Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Bimbingan belajar siswa kelas III SMP/MTs khusus mata pelajaran ujian Nasional | Terbimbingnya Siswa yang mengikuti Ujian Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 552,644,480 | - | 47.77 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga | Tersedianya data pendidikan dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat tenaga pendidik dan kependidikan SD/MI dan | Terselenggaranya lomba kreativitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SD/MI dan SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 3,206,291,847 | - | 8.00 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan pembinaan karakter siswa SD/MI dan | Terwujudnya siswa berkarakter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan metode pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi | Meningkatnya mutu pembelajaran pendidikan dengan teknologi informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan dasar | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyelenggaraan akreditasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs | Terpenuhinya standar nasional pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan kelembagaan sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah | Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik dibidang pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) | Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standard mutu dan kualitas pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | - | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Migas Kab/Kota) | Terlaksananya kegiatan Pengembangan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 976,802,700 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pelatihan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 871,519,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non | Meningkatnya sarana dan Prasarana Pendidikan Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 7,013,083,400 | sts | 38.35 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal | Terciptanya Proses Belajar Mengajar Terhadap Peserta dalam mengentaskan Buta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 2,495,400,200 | - | 71.30 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal | Tersedianya Peningkatan mutu pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 875,939,468 | - | 10.24 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan pendidikan keaksaraan | Peningkatan Hari Aksara Internasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 4,659,220,000 | - | 159.56 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan pendidikan kecakapan hiduo | Terlatihnya warga belajar non formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 1,700,167,896 | - | 26.45 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kebijakan pendidikan non formal | Jumlah lembaga pendidikan nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 500,000,000 | - | 48.05 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | orang | 1,468,484,300 | - | 80.69 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan kependidikan Non formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Bulan | 9,800,000 | sts | 0.54 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembinaan dan lomba kreativitas pendidikan non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 3,089,379,399 | sts | 16.05 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | Paket | 2,851,085,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas sekolah (Migas Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80625 | Paket | 2,039,453,064 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi laboratorium dan Ruang praktikum sekolah (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Paket | 333,215,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Pengamanan sekolah (Migas Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | keg | 245,072,600 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Penataan/Rehabilitasi Halaman dan Fasilitas Parkir/Lapangan Upacara Sekolah (Migas Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | Paket | 2,489,086,470 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi ruang ibadah sekolah (Migas Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | Paket | 2,248,737,075 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary (Migas Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3001069 | Paket | 4,934,597,000 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Sekolah (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | Paket | 6,045,120,200 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaaan alat praktik dan peraga Siswa (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | Paket | 10,385,255,040 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan Meubelair Sekolah (Migas Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,952 | Unit | 14,270,194,800 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Pengadaan peringkapan sekolah (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Paket | 4,085,007,800 | tdr | tdr | Dinas Pendidikan Aceh |
| | Dukungan Penyediaan beasiswa | Tersedianya beasiswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 497,608,310,727 | sts | 46.11 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 7.11 | 21.84 | Dinas Pendidikan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | SB | SB | Dinas Pendidikan Aceh |
| | **DINAS KESEHATAN** | | **DINAS KESEHATAN** | | | **1,186,065,393,016** | | | **18,936,040,339** | | | **370,274,817,340** | | | **76,786,979,647** | | | **680,958,285,522** | | | **1,146,956,122,848** | | **96.70** | | | **5,944,859,420,023** | | **119.44** | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **1,186,065,393,016** | | | **18,936,040,339** | | | **370,274,817,340** | | | **76,786,979,647** | | | **680,958,285,522** | | | **1,146,956,122,848** | | **96.70** | | | **5,944,859,420,023** | | **119.44** | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **BIDANG URUSAN KESEHATAN** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **1,186,065,393,016** | | | **18,936,040,339** | | | **370,274,817,340** | | | **76,786,979,647** | | | **680,958,285,522** | | | **1,146,956,122,848** | | **96.70** | | | **5,944,859,420,023** | **83.83** | **119.44** | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **100** | **%** | **70,703,335,969** | | | **9,195,324,609** | | | **15,086,427,405** | | | **16,969,894,188** | | | **18,919,202,176** | | | **60,170,848,378** | | **85.10** | - | - | 131,190,507,880 | tdr | 131.69 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana** | | **100** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **-** | **tdr** | 85 | % | 46,143,834,777 | 85.00 | 112.70 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan** | | **100** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **-** | **tdr** | 100 | % | 396,198,000 | 100.00 | 12.93 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 100 | % | 886,915,029 | 100.00 | 23.42 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 64 | % | 22,145,840,882 | 64.17 | 49.56 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 49 | % | 1,446,870,814 | 70.00 | 20.25 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat** | **4** | **Dokumen** | **781,005,948** | | **Dokumen** | **226,964,000** | | **Dokumen** | **64,307,138** | | | **118,586,302** | | | **169,838,760** | **-** | **Dokumen** | **579,696,200** | **-** | **-** | **-** | **Dokumen** | **579,696,200** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 | % | 506,858,317 | 30 | % | 204,336,600 | | % | - | 25 | % | 71,346,173 | 20 | % | 46,320,000 | 75 | % | 322,002,773 | 75.00 | 63.53 | 75 | % | 322,002,773 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 100 | % | 274,147,631 | 30 | % | 22,627,400 | 30 | % | 64,307,138 | 20 | % | 47,240,129 | 40 | | 123,518,760 | 120 | % | 257,693,427 | 120.00 | 94.00 | 120 | % | 257,693,427 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **45,887,942,319** | | **Bulan** | **7,097,859,492** | | **Bulan** | **11,004,543,407** | | | **11,935,309,339** | | | **10,207,035,312** | **-** | **Bulan** | **40,244,747,550** | **-** | **87.70** | **-** | **Bulan** | **40,244,747,550** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | % | 45,887,942,319 | 30 | % | 7,097,859,492 | 30 | % | 11,004,543,407 | 25 | % | 11,935,309,339 | 27 | % | 10,207,035,312 | 112 | % | 40,244,747,550 | tdr | 87.70 | 112 | % | 40,244,747,550 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **32,940,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 80 | % | 32,940,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **3,951,936,504** | | **%** | **225,727,544** | | **%** | **1,013,651,335** | | | **1,169,391,408** | | | **1,435,972,076** | **-** | **%** | **3,844,742,363** | **tdr** | **-** | **-** | **%** | **3,844,742,363** | **tdr** | **125.44** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 | bulan | 123,173,231 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 5,910,750 | 3 | Bulan | 5,488,950 | 3 | Bulan | 109,875,570 | 12 | Bulan | 121,275,270 | 100.00 | 98.46 | sts | sts | 394,818,490 | sts | 376.02 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | Bulan | 1,445,104,508 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 468,340,008 | 3 | Bulan | 662,707,000 | 3 | Bulan | 246,052,350 | 12 | Bulan | 1,377,099,358 | 100.00 | 95.29 | sts | sts | 3,141,085,358 | sts | 314.11 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | bulan | 726,342,765 | 3 | Bulan | 16,307,000 | 3 | Bulan | 150,467,500 | 3 | Bulan | 192,516,056 | 3 | Bulan | 275,041,654 | 12 | Bulan | 634,332,210 | 100.00 | 87.33 | sts | sts | 2,185,651,628 | sts | 437.13 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 | bulan | 210,610,000 | 3 | Bulan | 9,262,450 | 3 | Bulan | 45,348,900 | 3 | Bulan | 55,455,000 | 3 | Bulan | 98,614,700 | 12 | Bulan | 208,681,050 | 100.00 | 99.08 | sts | sts | 706,127,918 | sts | 336.25 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar dan media cetak lainnya | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | bulan | 272,360,000 | 3 | Bulan | 27,000,000 | 3 | Bulan | 55,420,000 | 3 | Bulan | 44,960,000 | 3 | Bulan | 43,890,000 | 12 | Bulan | 171,270,000 | 100.00 | 62.88 | sts | sts | 316,209,000 | sts | 632.42 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Jenis Kegiatan | 1,174,346,000 | 3 | Kegiatan | 173,158,094 | 3 | Kegiatan | 288,164,177 | 3 | Kegiatan | 208,264,402 | 3 | Kegiatan | 662,497,802 | 12 | Kegiatan | 1,332,084,475 | sts | 113.43 | sts | sts | 6,622,666,508 | sts | 551.89 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **10** | **Unit** | **24,000,000** | | | | | | | | | | | | **23,976,000** | | | | **-** | **-** | | | | | | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | Pengadaan mebeleur | Tersedianya kebutuhan meubeleur kantor | Pengadaan Mebel | 3 | Paket | 24,000,000 | | | | | | | | | | | | 23,976,000 | - | - | 23,976,000 | sts | - | sts | sts | 1,915,763,350 | sts | 957.88 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 42 | unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 2,264,463,565 | sts | 45.06 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **13,258,868,100** | | **%** | **1,522,189,796** | | **%** | **2,307,892,883** | | | **2,869,400,400** | | | **3,534,578,121** | | | **10,234,061,200** | **-** | **77.19** | | | | | | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Biaya Pengiriman Surat dan Materai | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | bulan | 30,880,000 | 3 | Bulan | 1,102,500 | 3 | Bulan | 9,418,500 | 3 | Bulan | 1,534,400 | 3 | Bulan | 6,277,350 | 12 | Bulan | 18,332,750 | 100.00 | - | sts | sts | 86,600,300 | sts | 192.45 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | bulan | 3,216,416,788 | 3 | Bulan | 468,069,671 | 3 | Bulan | 446,434,783 | 3 | Bulan | 522,177,899 | 3 | Bulan | 775,950,471 | 12 | Bulan | 2,212,632,824 | 100.00 | - | sts | sts | 9,298,307,072 | sts | 470.88 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | bulan | 10,011,571,312 | 3 | Bulan | 1,053,017,625 | 3 | Bulan | 1,852,039,600 | 3 | Bulan | 2,345,688,101 | 3 | Bulan | 2,752,350,300 | 12 | Bulan | 8,003,095,626 | 100.00 | - | 12 | Bulan | 8,003,095,626 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | 12 | bulan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | | 12 | bulan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 587,776,300 | sts | 143.36 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyediaan jasa dokumentasi kantor | Tersedianya dokumentasi kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 241,053,000 | sts | 120.53 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 9,976,062,012 | sts | 225.80 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **6,766,643,098** | | **%** | **122,583,777** | | **%** | **696,032,642** | | | **877,206,739** | | | **3,547,801,907** | | | **5,243,625,065** | **-** | **77.49** | | | | | | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 | % | 3,607,057,027 | 10 | % | 113,943,277 | 10 | % | 602,645,710 | 10 | % | 403,988,139 | 50 | % | 1,171,051,902 | 80 | % | 2,291,629,028 | 80.00 | 63.53 | sts | sts | 5,076,483,120 | sts | 507.65 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | Unit | 1,699,680,235 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | | 0 | Unit | 411,426,180 | 0.5 | Unit | 1,271,465,420 | 1 | Unit | 1,682,891,600 | 50.00 | - | 1 | Unit | 1,682,891,600 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya tempat kerja yang memadai | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 32,892,228,799 | sts | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 2,092,051,788 | tdr | 83.68 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 | Unit | 1,459,905,836 | 0 | Unit | 8,640,500 | 0 | Unit | 93,386,932 | 1 | Unit | 61,792,420 | 0.5 | Unit | 1,105,284,585 | 2 | Unit | 1,269,104,437 | 37.50 | 86.93 | sts | sts | 1,672,357,525 | sts | 1,672.36 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 814,460,592 | sts | 254.52 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pembangunan rumah dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 199,383,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,700,107,556 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | | | **5,334,984,320** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | - | - | - | **tdr** | **-** | - | - | - | tdr | - | Dinas Kesehatan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 544 | stel | 334,984,320 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | 396,198,000 | tdr | 30.85 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan formal | Meningkatnya pengetahuan perencanaan dan wawasan sdm kesehatan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 60 | % | 5,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | sts | sts | 699,162,614 | tdr | 99.88 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Rapat koordinasi teknis (Rakornis) | Meningkatnya Pengetahuan SDM Kesehatan dan Koordinasi Lintas sektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 747,708,200 | tdr | 105.31 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Meningkatnya pengetahuan tentang penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | - | 886,915,029 | tdr | 119.85 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.61 | 39.43 | | | | #DIV/0! | 287.65 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | | #DIV/0! | ST | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **57 / 100 / 100/ 2 / 60% / % /%// 100.000** | **Penduduk / %** | **1,107,045,185,183** | | | **9,439,189,066** | | | **354,145,349,949** | | | **58,354,808,463** | | | **659,600,857,563** | | | **1,081,540,205,041** | **-** | **97.70** | - | - | 3,402,917,661,332 | tdr | 70.36 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Meningkatnya Jumlah pasien dengan gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 30,123,200,999 | sts | 30.34 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan AmBulance Terpadu** | **Terbangunnya Unit Terpadu (Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Terbentuknya Unit Public Safety Centre (PSC)** | | **n/a** | | | **0** | **Jumlah Kab/Kota** | | **0** | **Jumlah Kab/Kota** | | **0** | **Jumlah Kab/Kota** | | | | | - | lah Kab/ | - | **sts** | **tdr** | - | lah Kab/ | 4,457,173,192 | - | 23.40 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis** | **Peningkatan Pelayanan yang lengkap dan berkualitas** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 6,489,721,835 | sts | 24.78 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit** | **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | | | | | | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 50 | % | 15,656,587,393 | 87.72 | 39.00 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya** | **Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk** | | **n/a** | | | **0** | **/1000 Penduduk** | | **0** | **/1000 Penduduk** | | **0** | **/1000 Penduduk** | | | | | - | 0Penduc | - | **sts** | **tdr** | - | /1000 Penduduk | 105,061,270,275 | - | 60.04 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-** | **Meningkatnya %tase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit** | | **n/a** | | | **-** | **Jumlah** | | **-** | **Jumlah** | | **-** | **Jumlah** | | | | | - | Jumlah | - | **sts** | **tdr** | - | Jumlah | 519,734,163,816 | - | 26.25 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | **Cakupan Rumah sehat** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 34 | % | 1,764,743,900 | 37.22 | 22.44 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program pengadaan, pengawasan dan pembinaan obat dan perbekalan kesehatan** | **Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 6,432,093,035 | sts | 33.27 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pengawasan Obat dan Makanan** | **Jumlah Kab/kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar pangan industri rumah tangga (PIRT)** | | **n/a** | | | **0** | **Jumlah** | | **0** | **Jumlah** | | **0** | **Jumlah** | | | | | - | Jumlah | - | **sts** | **tdr** | - | Jumlah | 494,216,000 | - | 54.97 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Pengembangan Obat Asli Indonesia** | **Jumlah Kab/kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar pangan industri rumah tangga (PIRT)** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | - | % | 52,785,000 | - | 35.19 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** | **%tase Puskesmas dengan ketersediaan Obat dan vaksin esensial** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | - | % | 4,202,356,422 | - | 71.67 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan kesehatan Keluarga** | ***Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan*** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 42 | % | - | 41.50 | - | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** | ***%tase Stunting*** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 7 | % | 13,909,850,481 | 36.25 | 44.41 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | ***%tase PHBS di Masyarakat*** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | - | % | 4,542,533,241 | - | 18.68 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan** | ***Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan*** | | **n/a** | | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | **0** | **%** | | | | | - | % | - | **sts** | **tdr** | 50 | % | 1,608,456,760,702 | 50.00 | 67.40 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **100** | **%** | **182,788,810,262** | | **%** | **3,711,879,788** | | **%** | **38,531,128,076** | | | **42,452,107,679** | | | **91,826,719,847** | **-** | **%** | **176,521,835,390** | **-** | **-** | **-** | **%** | **176,521,835,390** | **tdr** | **30.81** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | Pembangunan rumah sakit | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 100 | % | 154,851,594,144 | | | | 7 | % | 21,000,033,500 | 28.14 | % | 37,652,930,013 | 30 | % | 76,978,662,867 | 65 | - | 135,631,626,380 | sts | - | sts | sts | 590,414,805,291 | tdr | 117.36 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | tersedianya alat kesehatan untuk dokter spesialis mata dan gigi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | | | | | | Dinas Kesehatan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 | Unit | 13,966,865,292 | | Unit | | 0.4 | Unit | 3,123,770,419 | 0.6 | Unit | 864,935,000 | | | 9,760,738,210 | 1 | Unit | 13,749,443,629 | 100.00 | - | 1 | Unit | 13,749,443,629 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | 83 | - | 56,584,602,264 | tdr | 141.46 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial | adanya alat kalibrasi sesuai standar | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 1 | Paket | 900,000,000 | 0 | Paket | 11,320,000 | 0.25 | Kegiat | 86,932,367 | | | 18,128,464 | 0.50 | Paket | 650,966,629 | 1 | Paket | 767,347,460 | 75.00 | - | sts | sts | 2,687,500,998 | sts | 211.90 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | 1 | Paket | 8,359,523,868 | | Paket | 927,998,120 | 0.25 | Paket | 4,489,728,170 | | | 1,408,609,859 | 0.25 | Paket | 912,849,208 | 1 | Paket | 7,739,185,357 | 50.00 | 92.58 | 1 | Paket | 7,739,185,357 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 85/85/85 | % | 648,812,500 | | % | 82,422,000 | 63/47/15 | % | 185,621,122 | | | 129,564,800 | 80/75/50 | % | 182,394,088 | 63/47/15 | % | 580,002,010 | tdr | 89.39 | 63/47/15 | % | 580,002,010 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 55/100 | % | 4,062,014,458 | 10 | % | 489,925,428 | 30 | % | 808,707,948 | | | 1,159,710,703 | 30 | % | 1,242,403,005 | 70 | % | 3,700,747,084 | tdr | - | 70 | % | 3,700,747,084 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 55/100 | % | 16,455,778,855 | 30 | % | 2,200,214,240 | 40 | % | 8,836,334,550 | 20 | % | 1,218,228,840 | 10 | % | 2,098,705,840 | 100 | % | 14,353,483,470 | tdr | - | 100 | % | 14,353,483,470 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan | %tase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 | % | 4,198,269,119 | 337.78 | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | Persetase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,6 | % | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | Presentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemrn pengelolaan obat dan vaksin sesuai standart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | % | - | 104.44 | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | %tase Kab/Kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253 | % | 2,075,686,114 | 459.93 | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan | Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memnuhi standart pangan industri rumah tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | % | 887,876,033 | sts | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan Alat Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | % | 579,863,172 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penilaian Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 | % | 709,643,414 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | Jumlah Kab/kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar pangan industri rumah tangga (PIRT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3,958,308,585 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | *%tase Puskesmas yang mengembangkan program tanaman obat keluarga (TOGA)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 244,047,837 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 494,216,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 52,785,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | Jumlah fasilitas yang mendapat pembinaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182 | % | 3,096,914,946 | sts | 96.78 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | revitalisasi sistem kesehatan | Terakreditasinya RSU dan Puskesmas, Penyusunan Data, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 9,443,327,928 | sts | 72.48 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan kesehatan masyarakat | Tersedianya fasilitas dan operasional pelayanan kesehatan bagi pasien penderita Paru☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | % | 508,671,247 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Meningkatnya Koordinasi dengan kabupaten/ kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 785,250,798 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat | Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 3,300,386,356 | sts | 150.02 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan | Terlakasanannya pengdistribusi obat yang baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,442,140,235 | sts | 155.32 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | % | 314,052,470 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pengadaaan puskesmas keliling | Tersedianya mobil Pusling di Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 7,043,699,450 | tdr | 1,173.95 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pembangunan posyandu | Pembangunan Poskesdes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 9,368,673,314 | tdr | 1,561.45 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas | Tersedianya sarana dan prasarana untuk Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 47,729,731,250 | tdr | 954.59 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (Migas Kabupaten/Kota) | Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas Tersedianya AmBulance di Puskesmas Selaleh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 16,285,066,173 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 558,287,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan sarana dan prasarana posyandu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1,109,219,656 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3,749,204,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,285,144,156 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,666,645,266 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 7,771,566,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,494,034,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 11,316,393,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan mobil amBulance/mobil jenazah | Tersedianya mobil AmBulance di Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | - | 4,430,787,500 | tdr | 147.69 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pembangunan gudang obat/apotik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,018,469,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengembangan ruang operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3,237,727,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Rehabilitasi bangunan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,124,127,887 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan mebeler rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,996,674,977 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1,122,964,500 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah** | **100** | **%** | **919,423,825,993** | | **%** | **5,045,371,514** | | **%** | **312,384,210,155** | | | **15,474,179,263** | | | **567,477,087,107** | **-** | **%** | **900,380,848,039** | **-** | **-** | **-** | **%** | **900,380,848,039** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | Penyuluhan kesehatan anak balita | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 90/95/100 | % | 1,372,752,506 | | | 17,897,600 | 4 | Kab/kota | 28,336,834 | | | 398,466,600 | | | 648,043,800 | 4 | - | 1,092,744,834 | sts | - | 4 | - | 1,386,609,033 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyuluhan kesehatan anak balita | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 35/100 | % | 675,006,400 | 1 | Kab/kota | 52,806,460 | 5 | Kab/kota | 223,231,320 | 4 | Kab/Kota | 201,970,315 | 3 | Kab/Kota | 148,959,920 | 13 | Kab/kota | 626,968,015 | sts | - | sts | sts | 744,837,643 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita | Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ahir Hidu | 465,495,400 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyuluhan kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu | Menurunnya Angka Kematian Ibu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ahir Hidu | 1,634,048,912 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) | | Peningkatan Capaian Pelayanan Kesehatan Remaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | % | 744,635,592 | 48.07 | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bagi Ibu Hamil dan Keluarga | | Peningkatan Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | % | 338,248,300 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut | Peningkatan Capaian Pelayanan Kesehatan Lansia | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 80 | % | 333,784,628 | | % | 16,735,400 | 26 | % | 81,188,600 | | | 156,724,720 | | | 41,264,630 | 26 | % | 295,913,350 | 32.50 | - | 30 | % | 317,233,350 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak | Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | % | 26,960,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 90/55/95 | % | 13,520,048,783 | | % | 88,078,800 | 10 | % | 436,240,950 | 40 | % | 5,239,277,870 | 40 | % | 6,348,389,830 | 90 | % | 12,111,987,450 | tdr | - | 90 | % | 12,111,987,450 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | Jumlah Masyarakat yang Mencapai Gizi Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | orang | 160,411,025 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi | Menurunnya Prevalensi Balita Kurus (wasting) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Kab/Kota | 236,881,500 | sts | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang | %tase Bumil KEK yang mendapat PMT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 4,774,286,326 | sts | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | Tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | % | 275,220,600 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | Kab/Kota | 7,968,623,030 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | Rp | K | | K | | | |
| | | | | | | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | | | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 251/80/80 | Pos/%/% | 455,829,242 | | Pos/%/% | 29,258,287 | 0/13/0 | Pos/%/% | 54,730,207 | | | 187,191,749 | 170/59/75 | POS/%/% | 166,441,400 | 0/13/0 | Pos/%/% | 437,621,643 | tdr | - | 0/13/0 | Pos/%/% | 437,621,643 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 6509/23/100/100/66/65/50/64 | Desa /kab/kota/%/%/%/%/%/% | 1,041,668,100 | | Desa/kab/kota/%/%/%/%/%/% | 45,055,344 | 1/1/0/0/0 | Desa/kab/kota/%/%/%/%/%/% | 295,038,300 | | | 203,223,741 | 4940/1/82,02/85,4/46,7/45,83/31,84/48,52 | Desa/kab/kota/%/%/%/%/%/% | 335,669,412 | #### | ota/%/% | 878,986,797 | tdr | - | #VALUE! | ota/%/% | 878,986,797 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 23 | Kab/Kota | 16,250,000,000 | | Kab/Kota | 58,245,000 | 23 | Kab/Kota | 1,681,320,000 | | | 2,725,490,000 | | | | 23 | Kab/Kota | 4,465,055,000 | 100.00 | 27.48 | 23 | Kab/Kota | 4,465,055,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | terlaksananya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 694,377,500 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Jumlah media promosi kesehatan dan informasi yang dikembangkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 1,811,253,500 | - | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Cakupan %tase masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 739,331,788 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan | Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Puskesmas dalam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 109,803,200 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan | Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas di Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 485,011,375 | - | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Sosialisasi informasi hukum kesehatan kepada masyarakat | kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 13,757,500 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit | Jumlah Petugas Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang terlatih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 254,279,500 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengembangan sistem imformasi rumah sakit | Terkonekesinya data Pasien dengan Finger Print Pasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5,338,767,500 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | Kab/Kota | 123,946,771 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengembangan dan Pemanfaatan Saluran Media Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | aluran Me | 1,051,875,800 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 23 | Kab/Kota | 13,860,672,608 | 2 | Kab/Kota | 530,785,544 | 10 | Kab/Kota | 4,718,608,477 | 5 | Kab/Kota | 526,880,426 | 6 | Kab/Kota | 6,032,258,906 | 23 | Kab/Kota | 11,808,533,353 | 100.00 | - | 23 | Kab/Kota | 11,808,533,353 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 4 | Kegiatan | 339,523,350 | 1 | Kegiatan | 145,935,350 | 1 | Kegiatan | 56,330,000 | 1 | Kegiatan | 63,305,150 | 1 | Kegiatan | 53,404,800 | 4 | Kegiatan | 318,975,300 | 100.00 | - | 4 | Kegiatan | 318,975,300 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 30 | % | 320,087,304 | 5 | % | 61,618,000 | 5 | % | 57,214,000 | 10 | % | 139,654,500 | 10 | % | 47,155,600 | 30 | % | 305,642,100 | 100.00 | - | 30 | % | 305,642,100 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat | %tase Penduduk Aceh yang mendapatkan jaminan kesehatan (JKA+ dan Asuransi lainnya) | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 100 | % | 857,852,111,514 | 1 | % | 3,669,266,710 | 85.8 | % | 301,333,589,399 | | | 3,332,929,330 | | | 548,918,925,268 | 87 | % | 857,254,710,707 | 86.80 | - | 247 | % | 3,740,790,712,708 | 246.52 | 337.37 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 | Kegiatan | 11,001,945,385 | 0 | Kegiatan | 168,873,700 | 2 | Kegiatan | 2,747,283,057 | 0 | Kegiatan | 1,539,691,430 | 2 | Kegiatan | 4,302,470,936 | 4 | Kegiatan | 8,758,319,123 | 100.00 | - | 4 | Kegiatan | 8,758,319,123 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 359/10/157 | Puskesmas/Kabkota/Puskesmas | 920,618,550 | 5 | % | 44,432,443 | 17.11 | % | 128,131,811 | 20 | % | 419,123,490 | 10 | % | 126,248,499 | 52 | % | 717,936,243 | sts | - | 52 | % | 717,936,243 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | 5 | Kasus | 770,387,123 | | Kasus | 54,986,759 | 1 | Kasus | 290,170,525 | 2 | Kasus | 180,171,950 | 2 | Kasus | 151,589,500 | 5 | Kasus | 676,918,734 | 100.00 | - | 5 | Kasus | 676,918,734 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 100/100/23 | Persen/Kab/kota | 709,390,500 | 2 | Kab/Kota | 61,396,117 | 4 | Kab/Kota | 252,796,675 | | | 160,077,992 | | | 156,264,606 | 6 | Kab/Kota | 630,535,390 | sts | - | 6 | Kab/Kota | 630,535,390 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | % | 290,735,188 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan krisis kesehatan | Jumlah Petugas Yang Mampu Melaksanakan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Surveilans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | % | 1,179,393,736 | sts | 29.48 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelayanan amBulance terpadu | Cakupan Pelayanan AmBulans Terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,9 | % | 2,493,531,451 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelayanan Krisis Kesehatan dan Pelayanan AmBulans Terpadu (PSC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | Kab/Kota | 784,248,005 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan pelayanan patologi klinik | Terlayaninya pemeriksaan laboratorium medik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5,841,988,196 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan | terlayaninya pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | % | 3,434,884,567 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengujian dan Kalibrasi Alkes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | | 16=14+8 | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secaraTerintegrasi** | **100** | **%** | **119,412,000** | | **%** | **5,660,000** | | **%** | **44,580,000** | | | **61,272,000** | | | **7,500,000** | **-** | **%** | **119,012,000** | **-** | **99.67** | **-** | **%** | **119,012,000** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | Peningkatan Pelaporan Data dan Informasi Kesehatan Terintegrasi | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 23 | Kab/kota | 119,412,000 | | Kab/kota | 5,660,000 | 14 | Kab/k | 44,580,000 | 9 | Kab/kota | 61,272,000 | | | 7,500,000 | 23 | Kab/kota | 119,012,000 | 100.00 | 99.67 | sts | sts | 508,842,040 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **100** | **%** | **4,713,136,928** | | **%** | **676,277,764** | | **%** | **3,185,431,718** | | | **367,249,521** | | | **289,550,609** | **-** | **%** | **4,518,509,612** | **-** | **95.87** | **-** | **%** | **4,518,509,612** | **tdr** | **29.79** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 22 | RSUD | 4,047,530,228 | 23 | RSUD | 654,407,764 | 0 | RSUD | 2,787,110,097 | 1 | RSUD | 283,591,180 | 0 | RSUD | 209,167,636 | | RSUD | 3,934,276,677 | - | - | - | RSUD | 3,934,276,677 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasyankes | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 95 | % | 665,606,700 | 10 | % | 21,870,000 | 57.4 | % | 398,321,621 | 12 | % | 83,658,341 | 10 | % | 80,382,973 | | % | 584,232,935 | - | - | sts | sts | 2,489,599,757 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | Terlaksananya Fogging di 5 Kecamatan Kota Subulussalam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | % | 2,234,621,000 | sts | 83.95 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging | Meningkatnya fasilitas sarana & Prasarana Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | % | 1,672,309,600 | sts | 219.22 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | Peningkatan cakupan imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 414,309,600 | sts | 34.53 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulagan Penyakit Menular | - Meningkatnya pengetahuan petugas dan mampu mendeteksi dini kasus HIV/AIDS<br>- Meningkatnya pengetahuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | % | 2,512,818,875 | sts | 115.17 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik | Peningkatan kemapuan petugas pengelolaan program Diare, Kusta, Rabies, TB, ISPA, Filariasis, Malaria, HIV/AIDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72,4 | % | 2,751,522,639 | sts | 91.42 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Imunisasi | 1. Peningkatan Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)<br>2. Penurunan kasus penyakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,248,757,645 | sts | 56.76 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Imunisasi | 1. Peningkatan Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)<br>2. Penurunan kasus penyakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | % | - | 26.32 | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | Peningkatan Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Untuk Mencegah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,077,357,285 | sts | 215.47 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | Jumlah peserta workshp lintas program dan lintas sektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 704,918,800 | sts | 117.49 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Presentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | % | 3,039,971,949 | 179.63 | 148.29 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan Kesehetan Jiwa Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Pencapaian kajian pengembangan terhadap lingkungan sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 505,845,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | Terlaksananya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,015,718,800 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 179,325,100 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pembinaan Pengolahan Limbah dan Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 63,855,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Kesehatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pembinaan Lingkungan Sehat (DAK Non Fisik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.59 | 12.36 | | | | 155.85 | 283.28 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | | ST | ST | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan** | ***%tase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan*** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **100** | **%** | **6,643,047,642** | | **%** | **207,846,664** | | **%** | **618,205,686** | | | **793,302,196** | | | **2,057,710,943** | **-** | **%** | **3,677,065,489** | **-** | **55.35** | **-** | **%** | **6,362,193,963** | **-** | **20.16** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan** | **100** | **%** | **4,070,456,647** | | **%** | **129,938,700** | | **%** | **471,626,389** | | | **439,558,113** | | | **552,914,656** | **-** | **%** | **1,594,037,858** | **-** | **-** | **-** | **%** | **1,594,037,858** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 50/65 | %/% | 4,070,456,647 | | %/% | 129,938,700 | 36,56/12,20 | % | 471,626,389 | 69/75 | % | 439,558,113 | 72/71 | % | 552,914,656 | | %/% | 1,594,037,858 | tdr | - | - | %/% | 1,594,037,858 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah** | **100** | **%** | **2,572,590,995** | | **%** | **77,907,964** | | **%** | **146,579,297** | | | **353,744,083** | | | **1,504,796,287** | **-** | **%** | **2,083,027,631** | **-** | **-** | **-** | **%** | **2,083,027,631** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 560 | Orang | 2,572,590,995 | 30 | Orang | 77,907,964 | 90 | Orang | 146,579,297 | | | 353,744,083 | | | 1,504,796,287 | 120 | Orang | 2,083,027,631 | 21.43 | - | 120 | Orang | 2,083,027,631 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan diklat medis/non medis | tersedianya sumber daya kesehatan pelayanan dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 1,922,239,757 | sts | 55.72 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penelitian dan pengembangan medis/non medis | Jumlah Kajian yang dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis dan non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 762,888,717 | sts | 58.54 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.43 | - | | | | #DIV/0! | 57.13 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | ERR | | | | #DIV/0! | R | Dinas Kesehatan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **55** | **%** | **1,673,824,222** | | **%** | **93,680,000** | | **%** | **424,834,300** | | | **668,974,800** | | | **380,514,840** | **-** | **%** | **1,568,003,940** | **-** | **93.68** | | | 6,779,972,498 | tdr | 69.36 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah** | **100** | **%** | **223,323,959** | | **%** | **-** | | **%** | **66,914,300** | | | **-** | | | **119,243,840** | **-** | **%** | **186,158,140** | **-** | **83.36** | **-** | **%** | **186,158,140** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 3/1 | Kali/Kebijakan | 223,323,959 | 3./1 | Kali/Kebijakan | | 3./1 | Kali/Kebijakan | 66,914,300 | 3./1 | Kali/Kebijakan | | 4./1 | Kali/Kebijakan | 119,243,840 | Kali/Kebijak | | 186,158,140 | - | - | - | ali/Kebijak | 186,158,140 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi** | **100** | **%** | **1,360,000,000** | | **%** | **90,000,000** | | **%** | **352,211,000** | | | **609,394,000** | | | **247,936,000** | **-** | **%** | **1,299,541,000** | **-** | **95.55** | **-** | **%** | **1,299,541,000** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 30/30/55 | %/%/% | 1,360,000,000 | 25/28/45 | % | 90,000,000 | 26/30/46 | % | 352,211,000 | 25/30/40 | % | 609,394,000 | 22/28/40 | % | 247,936,000 | | % | 1,299,541,000 | - | - | - | % | 1,299,541,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat** | **100** | **%** | **90,500,263** | | **%** | **3,680,000** | | **%** | **5,709,000** | | | **59,580,800** | | | **13,335,000** | **-** | **%** | **82,304,800** | **-** | **-** | **-** | **%** | **82,304,800** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Kesehatan Aceh** |
| | | | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 250/57/60 | Orang/%/% | 90,500,263 | 0/69.5/0 | Orang/%/% | 3,680,000 | 60/69.5/0 | Orang/%/% | 5,709,000 | 0/69.5/0 | | 59,580,800 | 0/69.5/0 | | 13,335,000 | | Orang/%/% | 82,304,800 | tdr | - | - | krang/%/% | 82,304,800 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peningkatan diklat medis/non medis | tersedianya sumber daya kesehatan pelayanan dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,922,239,757 | sts | 55.72 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penelitian dan pengembangan medis/non medis | Jumlah Kajian yang dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis dan non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 762,888,717 | sts | 58.54 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | #DIV/0! | 57.13 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ERR | ERR | | | | #DIV/0! | R | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 1,489,713,700 | - | 50.57 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | /1.000 k | - | - | | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | /1.000 k | - | - | | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | /1.000 k | - | - | | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | /1.000 k | - | - | | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 857,339,200 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Advokasi dan KIE tentang reproduksi remaja (KRR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 632,374,500 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita** | ***Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 00 pendu | 2,232,111,200 | sts | 67.88 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Peyuluhan kesehatan anak balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 799,570,200 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1,432,541,000 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | 67.88 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | S | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** | ***Ratio dokter persatuan penduduk dan ratio tenaga medis per satuan penduduk*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 00 pendu | 1,490,143,658 | tdr | 42.07 | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 179,637,400 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 451,668,958 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar mutu pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 739,793,100 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 119,044,200 | tdr | tdr | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Kesehatan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Kesehatan Aceh |
| | **RSUD dr. Zainoel Abidin** | | **RSUD dr. Zainoel Abidin** | | | **820,803,343,884** | | | **118,051,632,322** | | | **#VALUE!** | | | **208,008,575,041** | | | **273,091,164,491** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | RSUD dr. Zainoel Abidin |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **820,803,343,884** | | | **118,051,632,322** | | | **#VALUE!** | | | **208,008,575,041** | | | **273,091,164,491** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **BIDANG URUSAN KESEHATAN** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **820,803,343,884** | | | **118,051,632,322** | | | **#VALUE!** | | | **208,008,575,041** | | | **273,091,164,491** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | | **#VALUE!** | **80.80** | **#VALUE!** | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **100** | **%** | **742,724,114,612** | | | **114,922,080,012** | | | **181,396,558,257** | | | **197,121,316,494** | | | **253,186,370,446** | - | - | **746,626,325,209** | **sts** | **100.53** | - | - | 825,546,363,412 | tdr | 1,028.37 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | **100** | **%** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | sts | sts | 73,292,306,072 | sts | 98.09 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | - | sts | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 4,439,061,131 | sts | 1,347.30 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 1,188,671,000 | sts | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **194,477,701,194** | | **%** | **25,923,506,925** | | **%** | **41,468,728,570** | | **%** | **46,795,150,895** | | **%** | **46,745,096,105** | - | % | 160,932,482,495 | **-** | **-** | sts | sts | 335,849,919,369 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | % | 194,477,701,194 | 25.17 | % | 25,923,506,925 | 25.00 | % | 41,468,728,570 | 25.60 | % | 46,795,150,895 | 24.00 | % | 46,745,096,105 | 100 | % | 160,932,482,495 | 99.77 | - | 100 | % | 160,932,482,495 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1** | **tahun** | **32,040,777,052** | | **tahun** | **6,355,991,884** | | **tahun** | **8,329,863,029** | | **tahun** | **6,688,558,713** | | **tahun** | **8,451,427,915** | - | tahun | 29,825,841,541 | **-** | **93.09** | sts | sts | 91,462,867,986 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 | % | 10,879,448,352 | 25.00 | % | 2,600,471,884 | 31 | % | 2,483,714,629 | 19 | % | 2,498,326,313 | 25 | % | 2,939,260,415 | 100 | % | 10,521,773,241 | 100.00 | 96.71 | sts | sts | 49,807,346,101 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 | % | 21,161,328,700 | 18.75 | % | 3,755,520,000 | 43 | % | 5,846,148,400 | 19 | % | 4,190,232,400 | 19 | % | 5,512,167,500 | 100 | % | 19,304,068,300 | 99.75 | 91.22 | 100 | % | 19,304,068,300 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional** | **%tase penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **36** | **unit** | **108,718,500** | | **unit** | **7,033,800** | | **Unit** | **15,584,900** | | **Unit** | **585,800** | | **Unit** | **7,176,400** | **-** | **unit** | **30,380,900** | **-** | **27.94** | **sts** | **sts** | **37,102,104,386** | **tdr** | **38.70** | **RSUD dr. Zainoel Abidin** |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36 | unit | 108,718,500 | 7 | unit | 7,033,800 | 9.00 | Unit | 15,584,900 | 1.00 | Unit | 585,800 | 1.00 | Unit | 7,176,400 | 18 | unit | 30,380,900 | 50.00 | - | sts | sts | 37,102,104,386 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | %tase kebersihan RS | | 1 | tahun | | | | | | | | | | | | | | - | % | - | sts | tdr | 160 | % | - | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Penyediaan makanan dan minuman | %tase penyediaan makanan dan minuman | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2 | area | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 35,801,747,801 | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **97** | **%** | **516,096,917,866** | | **%** | **82,635,547,403** | | **%** | **131,582,381,758** | | | **143,637,021,086** | | | **197,982,670,026** | | | | | | | | | | | **RSUD dr. Zainoel Abidin** |
| | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 97 | % | 516,096,917,866 | 25 | % | 82,635,547,403 | 20 | % | 131,582,381,758 | 25 | % | 143,637,021,086 | 30 | % | 197,982,670,026 | | | | | | | | | | | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **-** | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **-** | **RSUD dr. Zainoel Abidin** |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | %tase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4210 | porsi | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 187,999,932 | tdr | 9.35 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | %tase penyediaan surat menyurat | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | 1,249,991,104 | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Penyediaan jasa administrasi dan sewa kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 163,547,123 | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | %tase pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 2,149,800,000 | sts | 27.85 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,147,260,000 | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | - | - | 1,188,671,000 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | **RSUD dr. Zainoel Abidin** |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya** | **%tase penyediaan pakaian dinas harian** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | **-** | **-** | **511,664,924,782** | **sts** | **10,935.35** | **RSUD dr. Zainoel Abidin** |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | %tase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | 511,664,924,782 | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Rapat koordinasi teknis (Rakornis) | Peresentase rapat-rapat koordinat teknis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 507,225,863,651 | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pengelolaan perpustakaan satuan kerja | %tase pengolalaan perpustakaan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | - | sts | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pendidikan dan pelatihan teknis | Peningkatan kapasitas SDM aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | - | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,439,061,131 | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.38 | 46.98 | | | | #DIV/0! | 2.86 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | | | #DIV/0! | SR | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN** | **1** | **Tahun** | **78,079,229,272** | | | **3,129,552,310** | | | **#VALUE!** | | | **10,887,258,547** | | | **19,904,794,045** | - | - | **#VALUE!** | **sts** | **#VALUE!** | - | - | #VALUE! | tdr | #VALUE! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-** | **Meningkatnya %tase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional** | | **80** | **persen** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | - | - | 1,973,477,209,896 | sts | 603.27 | RSUD dr. Zainoel Abidin |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | **Program pemeliharaan saran dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-** | **Meningkatnya %tase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 287,019,168,647 | sts | 594.20 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Pelayanan Penunjang Medis/Non** | **Peningkatan Pelayanan yang lengkap dan** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 24,079,167,081 | sts | 19.56 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Pelayanan Medis** | **%tase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 24,290,201,316 | sts | 21.34 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** | **%tase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 109,157,266,208 | sts | 4.32 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah** | **1** | **Tahun** | **31,541,276,335** | | | **-** | | | **14,222,842,460** | | | **3,635,562,535** | | | **12,823,962,909** | - | - | 30,682,367,904 | **sts** | **-** | sts | sts | 1,559,613,774,548 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pembangunan rumah sakit | | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 1 | gedung | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 503,520,493,185 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pembangunan gudang obat/apotik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 241,994,917,695 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pengembangan ruang operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 12,763,979,752 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pengadaan mobil amBulance/mobil Jenazah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 201,635,202,215 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 985,500,000 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 1 | Gedung | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 6,356,635,100 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 817 | Unit/Set | 23,329,566,185 | | | | 70 | % | 14,222,842,460 | 22 | % | 3,635,562,535 | 8 | % | 5,180,467,909 | 92 | % | 23,038,872,904 | sts | - | 92 | % | 57,930,623,296 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pemeliharaan rutin/berkala mobl amBulance/jenazah | | Pengadaan Sarana di Fasilitas layanan Kesehatan | 1 | Gedung | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 34,891,750,392 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 11 | Unit | 8,211,710,150 | | | | | | | | | | #### | % | 7,643,495,000 | | | | - | - | sts | sts | 1,857,803,031 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah** | **100** | **%** | **46,537,952,937** | | **%** | **3,129,552,310** | | **%** | **16.512.362.255** | | | **7,251,696,012** | | | **7,080,831,136** | **-** | **%** | **#VALUE!** | **-** | **#VALUE!** | **-** | **%** | **#VALUE!** | **tdr** | **#VALUE!** | **RSUD dr. Zainoel Abidin** |
| | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 100 | % | 46,537,952,937 | 25 | % | 3,129,552,310 | 26.37 | % | 16.512.362.2 | 24.00 | % | 7,251,696,012 | 24.00 | % | 7,080,831,136 | 99 | % | #VALUE! | 99.37 | #VALUE! | 99 | % | #VALUE! | tdr | #VALUE! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan | %tase peningkatan pelayanan BLUD | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 1,528,931,406,644 | sts | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis | %tase peningkatan pelayanan rehab medis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan gigi dan mulut | %tase peningkatan pelayanan gigi dan mulu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan haemodialisasi | %tase peningkatan pelayanan hemodilisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan gawat darurat | %tase peningkatan pelayanan IGD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 6,704,291,780 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT) | %tase peningkatan pelayanan kamar operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 9,082,370,674 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak | %tase peningkatan pelayanan perawatan intensif anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 29,370,189,824 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa | %tase peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | - | 8,407,859,185 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan rawat jantung | %tase peningkatan pelayanan rawat jantung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 8,753,813,127 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi | %tase peningkatan pelayanan anesthesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan rawat jalan | %tase peningkatan pelayanan rawat jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan rawat inap | %tase peningkatan pelayanan rawat inap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 10,032,046,556 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan rawat inap | %tase peningkatan pelayanan rawat inap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 36,806,695,062 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan radiologi | %tase peningkatan pelayanan radiologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan farmasi | %tase peningkatan pelayanan farmasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 18,002,947,169 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan gizi | %tase peningkatan pelayanan gizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan pemulasaraan Jenazah | %tase peningkatan kualitas pelayanan pemulasaraan jenazah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan patologi anatomi | %tase peningkatan pelayanan patologi anatomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 963,420,000 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan patologi klinik | %tase peningkatan pelayanan patologi klinik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan loundry | %tase peningkatan pelayanan loundry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | - | 3,702,039,773 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi | %tase peningkatan pelayanan CSSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1,170,271,458 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Peningkatan pelayanan rekam medis | %tase peningkatan pelayanan rekam medis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 451,522,916 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.69 | #VALUE! | | | | #DIV/0! | #VALUE! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | #VALUE! | | | | #DIV/0! | #VALUE! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan** | **%tase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 2,224,966,720 | - | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan diklat medis/non medis | %tase peningkatan diklat medis/non medis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Penelitian dan pengembangan medis/non medis | %tase penelitian dan pengembangan medis/non medis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Penelitian | 2,224,966,720 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | **%tase PHBS di Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 226,681,584 | - | 118.06 | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit | %tase peningkatan pelayanan penyuluhan kesehatan RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 226,681,584 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Pengembangan sistem imformasi rumah sakit | %tase pengembangan sistem IT RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | Peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kehumasan | %tase peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kehumasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 226,681,584 | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | RSUD dr. Zainoel Abidin |
| | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** | | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** | | | **90,315,150,173** | | | **12,407,667,897** | | | **21,344,071,139** | | | **25,325,978,230** | | | **29,798,693,685** | | | **88,876,410,951** | | **98.41** | | | **450,101,914,894** | | **104.41** | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **90,315,150,173** | | | **12,407,667,897** | | | **21,344,071,139** | | | **25,325,978,230** | | | **29,798,693,685** | | | **88,876,410,951** | | **98.41** | | | **450,101,914,894** | | **104.41** | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **BIDANG URUSAN KESEHATAN** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **90,315,150,173** | | | **12,407,667,897** | | | **21,344,071,139** | | | **25,325,978,230** | | | **29,798,693,685** | | | **88,876,410,951** | | **98.41** | | | **450,101,914,894** | **70.00** | **104.41** | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **100** | **%** | **78,431,633,510** | | | **10,720,004,697** | | | **21,344,071,139** | | | **21,247,651,426** | | | **24,161,371,426** | - | - | **77,473,098,688** | **sts** | **98.78** | - | - | 93,691,007,190 | tdr | 223.99 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | **100** | **%** | | **0** | | | | | | | | | | | | - | - | **-** | **sts** | **tdr** | sts | sts | 15,608,598,585 | sts | 40.47 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut** | | **100** | **%** | | **0** | | | | | | | | | | | | - | - | **-** | **sts** | **tdr** | sts | sts | 515,868,000 | sts | 38.19 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | **-** | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 41,741,917 | sts | 15.72 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | **-** | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 51,700,000 | sts | 4.10 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu** | | **n/a** | | | **0** | | | | | | | | | | | | - | - | **-** | **tdr** | **tdr** | sts | sts | - | sts | - | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **41,637,427,534** | **3** | **Bulan** | **7,758,965,668** | **3** | **Bulan** | **11,402,798,759** | **3** | **Bulan** | **12,306,479,512** | | | **11,172,211,715** | **9** | **Bulan** | **42,640,455,654** | **75.00** | **-** | **9** | **Bulan** | **42,640,455,654** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | Bulan | 41,637,427,534 | **3** | Bulan | 7,758,965,668 | **3** | Bulan | 11,402,798,759 | 3 | Bulan | 12,306,479,512 | | | 11,172,211,715 | 9 | Bulan | 42,640,455,654 | 75.00 | 102.41 | 9 | Bulan | 42,640,455,654 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **105,528,104** | | | | | | **-** | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **sts** | **-** | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | Pendidikan dan pelatihan teknis | Tersedianya biaya kursus singkat | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 250 | Peserta | 105,528,104 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | sts | sts | 130,884,347 | sts | 49.29 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 | stell | 260,316,000 | 47.99 | 50.30 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 | tel pakaia | 228,448,000 | sts | 38.79 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **151,430,392** | | **Bulan** | **-** | | **Bulan** | **-** | | | **149,191,790** | | | **22,155,500** | **-** | **Bulan** | **171,347,290** | **-** | **-** | **-** | **Bulan** | **171,347,290** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya pengadaan mebeleur | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 183,199,500 | sts | 348.95 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya administrasi kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | Bulan | 151,430,392 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 149,191,790 | 3 | Bulan | | 12 | Bulan | 149,191,790 | 100.00 | 98.52 | sts | sts | 410,611,035 | sts | 135.71 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | Bulan | | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 22,155,500 | 12 | Bulan | 22,155,500 | 100.00 | #DIV/0! | 12 | Bulan | 22,155,500 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | | | | | | - | | | 0 | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 62,826,516 | sts | 16.16 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 | % | 114,750,150 | 199.27 | 38.36 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | Bulan | 9,838,296,653 | 300.00 | 45.63 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12** | **Bulan** | **9,398,344,980** | **3** | **Bulan** | **1,578,373,995** | | **Bulan** | **1,991,890,232** | | | **2,237,973,791** | | | **3,197,294,426** | **3** | **Bulan** | **9,005,532,444** | **25.00** | **95.82** | **3** | **Bulan** | **9,005,532,444** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | - | Bulan | - | tdr | tdr | sts | sts | 25,334,800 | sts | 54.60 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya telepon, air, listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | Bulan | 1,725,624,516 | **3** | Bulan | 351,700,081 | **3** | Bulan | 247,575,209 | **3** | Bulan | 571,593,511 | **3** | Bulan | 438,184,938 | 12 | Bulan | 1,609,053,739 | 100.00 | 93.24 | 48 | Bulan | 7,015,571,973 | 400.00 | 63.94 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor | 12 | Bulan | 7,672,720,464 | **3** | Bulan | 1,226,673,914.00 | **3** | Bulan | 1,744,315,023.00 | **3** | Bulan | 1,666,380,280 | **3** | Bulan | 2,759,109,488 | 12 | Bulan | 7,396,478,705 | 100.00 | 96.40 | 12 | Bulan | 7,396,478,705 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor | 12 | Bulan | | **3** | Bulan | | **3** | Bulan | | **3** | Bulan | | **3** | Bulan | | 12 | Bulan | - | 100.00 | tdr | 12 | Bulan | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **29/24** | **Unit/Unit** | **1,008,830,000** | **3** | **Bulan** | **17,704,839** | | | **117,821,479** | | | **106,349,552** | | | **661,511,746** | **3** | **Bulan** | **903,387,616** | **sts** | **-** | **3** | **Bulan** | **903,387,616** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya perawatan kendaraan dinas/operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | Bulan | 1,008,830,000 | 3 | Bulan | 17,704,839 | 3 | Bulan | 117,821,479 | 3 | Bulan | 106,349,552 | 3 | Bulan | 661,511,746 | 12 | Bulan | 903,387,616 | 100.00 | 89.55 | sts | sts | 2,973,899,545 | sts | 66.96 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **12** | **Bulan** | **26,130,072,500** | **3** | **Bulan** | **1,364,960,195** | **3** | **Bulan** | **7,831,560,669** | **3** | **Bulan** | **6,447,656,781** | **3** | **Bulan** | **9,108,198,039** | **3** | **bln** | | | | | | | | | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 12 | Bulan | 26,130,072,500 | 3 | Bulan | 1,364,960,195 | 3 | Bulan | 7,831,560,669 | 3 | Bulan | 6,447,656,781 | 3 | Bulan | 9,108,198,039 | 12 | Bulan | | | | | | | | | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.43 | #DIV/0! | | | | 400.00 | 114.39 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | #DIV/0! | | | | ST | ST | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA** | **100** | **%** | **11,883,516,663** | | | **1,687,663,200** | | | **-** | | | **4,078,326,804** | | | **5,637,322,259** | - | - | **11,403,312,263** | **sts** | **-** | - | - | 175,798,155,732 | tdr | 45.16 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** | **Indeks Kepuasan Pasien Jiwa** | | **95** | **Indeks** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | sts | sts | 106,522,289,931 | sts | 71.00 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Pelayanan Medis** | **%tase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien** | | **6** | **Jumlah** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | sts | sts | 8,836,053,244 | sts | 57.50 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata** | **Meningkatnya %tase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | - | sts | - | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-** | **Meningkatnya %tase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit** | | **40** | **%** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | sts | sts | 47,449,832,359 | sts | 43.02 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Meningkatnya Jumlah pasien dengan gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan** | | **2100** | **Jumlah pasien** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | sts | sts | 1,586,667,936 | sts | 48.70 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **100** | **%** | **734,095,732** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **733,928,830** | **-** | **-** | **733,928,830** | **sts** | **-** | **-** | **-** | **733,928,830** | **tdr** | **1.28** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | Pembangunan rumah sakit | Tersedianya fasilitas pelayanan dan penunjang lainnya bagi pasien | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Saranan & Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 22,014,420,867 | sts | 41.36 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Terlaksananya peralatan kesehatan yang memadai bagi pasien | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 4,679,087,456 | sts | 112.47 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 12 | Bulan | 734,095,732 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 733,928,830 | 12 | Bulan | 733,928,830 | 100.00 | - | 12 | Bulan | 733,928,830 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **11,149,420,931** | **3** | **Bulan** | **1,687,663,200** | **3** | **Bulan** | **-** | **3** | **Bulan** | **4,078,326,804** | **3** | **Bulan** | **4,903,393,429** | **12** | **Bulan** | **10,669,383,433** | **100.00** | **95.69** | **12** | **Bulan** | **10,669,383,433** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa ODMK | 648/48/12 | Pasien/Pasien/Bulan | 10,470,086,992 | 3 | Bulan | 1,687,663,200 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 3,984,937,194 | 3 | Bulan | 4,397,713,799 | 12 | Bulan | 10,070,314,193 | sts | 96.18 | 12 | Bulan | 10,070,314,193 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA | 120 | Resident | 89,060,000 | 3 | Bulan | - | 3 | Bulan | 0 | 3 | Bulan | 2,243,000 | 3 | Bulan | 62,433,600 | 12 | Bulan | 64,676,600 | sts | - | 12 | Bulan | 64,676,600 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 12 | Bulan | 590,273,939 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 91,146,610 | 3 | Bulan | 443,246,030 | | | | | | | | | | | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | | | | | **6,447,656,781** | | | | **-** | **-** | **6,447,656,781** | **tdr** | **tdr** | **-** | **-** | **6,447,656,781** | **tdr** | **2.99** | **BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh** |
| | Peningkatan pelayanan rawat inap | Tersedianya kegiatan pelayanan rawat inap | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 12 | Bulan | | | | | | | | | | **6,447,656,781** | | | | - | - | 6,447,656,781 | sts | tdr | sts | sts | 36,057,113,481 | sts | 234.65 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Peningkatan kesehatan masyarakat | Terpenuhinya penjemputan pasien pasung dan dropping pasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,586,667,936 | sts | 48.70 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Peningkatan kualitas dan Pendukung Pelayanan | Terlaksananya pelayanan rawat inap dan rawat jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | Bulan | 79,884,689,401 | 60.00 | 56.22 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Biaya Pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 22,216,315,288 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Biaya Umum dan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3,760,405,242 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Biaya Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 660,880,000 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan ambulance/mobil jenazah | Tersedianya pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Unit | 560,350,000 | 100.00 | 85.48 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit | Tersedianya Makanan dan Minuman Pasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 21,569,965,136 | sts | 41.28 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan mesin absensi | Tersedianya pengadaan mesin absensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan pakaian KORPRI | Tersedianya pengadaan pakaian korpri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 32.06 | | | | #DIV/0! | 76.91 | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | | #DIV/0! | T | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh |
| | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** | | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** | | | **85,495,088,800** | | | **16,075,700,039** | | | **22,304,876,173** | | | **23,044,480,912** | | | **27,623,537,967** | | | **89,048,595,091** | - | **104.16** | | | **401,204,542,923** | *120* | **103.15** | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **85,495,088,800** | | | **16,075,700,039** | | | **22,304,876,173** | | | **23,044,480,912** | | | **27,623,537,967** | | | **89,048,595,091** | - | **104.16** | | | **401,204,542,923** | *120* | **103.15** | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **BIDANG URUSAN KESEHATAN** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **85,495,088,800** | | | **16,075,700,039** | | | **22,304,876,173** | | | **23,044,480,912** | | | **27,623,537,967** | | | **89,048,595,091** | - | **104.16** | | | **401,204,542,923** | | **103.15** | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **100** | **%** | **74,789,743,622** | | **%** | **15,096,913,519** | | **%** | **19,658,082,379** | | | **20,213,982,901** | | | **24,551,021,690** | - | % | **79,520,000,489** | **-** | **106.32** | sts | sts | 98,776,504,299 | tdr | 135.70 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | **100** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | - | % | - | **-** | **tdr** | 100 | % | 16,372,865,285 | 100 | 48.33 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 1,042,943,000 | sts | 3.08 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 75,557,900 | sts | 22.93 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 1,765,137,625 | sts | 40.76 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang berkualitas** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | - | sts | - | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **273** | **Orang** | **34,206,090,180** | | **Orang** | **6,392,348,068** | | **Orang** | **9,096,823,168** | | **Orang** | **9,381,808,370** | | **Orang** | **8,548,657,888** | **-** | **Orang** | **33,419,637,494** | **-** | **-** | **-** | **Orang** | **33,419,637,494** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 273 | orang | 34,206,090,180 | 273 | orang | 6,392,348,068 | | orang | 9,096,823,168 | | orang | 9,381,808,370 | | orang | 8,548,657,888 | 273 | orang | 33,419,637,494 | 100.00 | 97.70 | 273 | orang | 33,419,637,494 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **137** | **Orang** | **387,996,000** | | **Orang** | **-** | | **Orang** | **58,028,430** | | | **105,633,639** | | | **197,494,573** | **-** | **Orang** | **361,156,642** | **-** | **93.08** | **-** | **Orang** | **361,156,642** | **tdr** | **4.09** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya belanja material dan jasa pengiriman surat | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 2 | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 7,241,000 | sts | 18.10 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 137 | Orang | 387,996,000 | | Orang | - | | orang | 58,028,430 | 62 | orang | 105,633,639 | 75 | orang | 197,494,573 | 137 | Orang | 361,156,642 | 100.00 | 93.08 | sts | sts | 4,663,653,780 | sts | 53.11 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor** | **Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **2,426,280,006** | | **%** | **319,500,053** | | **%** | **1,337,179,801** | | **%** | **1,138,975,189** | | **%** | **3,429,370,794** | **-** | **%** | **6,225,025,837** | **-** | **-** | **sts** | **sts** | **7,280,307,860** | **sts** | **259.24** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya perawatan kendaraan dinas/operasional | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Kegiatan | 59,472,446 | 1 | Kegiatan | 58,924,690 | | | | | | | | | | 1 | Kegiatan | 58,924,690 | 100.00 | - | sts | sts | 110,705,410 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | | 16=14+8 | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | (9) (24) (43) (3) (63) | Unit | 1,362,051,459 | 1 | Kegiatan | 97,300,000 | 1 | Kegiata | 622,231,350 | | Kegiatan | 318,930,056 | | Kegiatan | 501,761,980 | 2 | Kegiatan | 1,540,223,386 | sts | - | 2 | Kegiatan | 1,540,223,386 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpeliharanya kebersihan rumah sakit | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | tahun | 243,162,091 | 1 | Kegiatan | 19,107,000 | 1 | Kegiata | 86,462,070 | | Kegiatan | 17,929,295 | | Kegiatan | 102,434,995 | 2 | Kegiatan | 225,933,360 | sts | - | sts | sts | 5,221,221,005 | sts | 55.13 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | | 1 | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 | kegiatan | 514,887,010 | 1 | Kegiatan | 144,168,363 | 1 | Kegiata | 70,913,981 | | | | | Kegiatan | 299,804,666 | 2 | Kegiatan | 514,887,010 | 150.00 | 100.00 | sts | sts | 1,502,758,910 | sts | 151.71 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | kegiatan | 5,475,000 | 10.5 | Kegiatan | | | | | 1 | Kegiatan | 2,655,000 | | Kegiatan | 2,250,000 | 11 | Kegiatan | 4,905,000 | 1,100.00 | 89.59 | sts | sts | 29,061,990 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya bahan habis pakai instalasi listrik | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 | Orang | 241,232,000 | | | | | | | 10 | Orang | 58,798,914 | 15 | Orang | 119,865,916 | 25 | - | 178,664,830 | sts | 74.06 | sts | sts | 469,800,961 | sts | 92.14 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Penyediaan peralatan rumah tangga** | **Tersedianya bahan bakar** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1** | **kegiatan** | **1,908,942,381** | | **kegiatan** | | | **kegiatan** | **278,786,200** | | | **370,330,962** | | | **1,201,626,619** | **-** | **kegiatan** | **1,850,743,781** | **-** | **-** | **sts** | **sts** | **2,486,493,581** | **sts** | **326.96** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Koran serambi indonesia | Pengadaan Mebel | 1 | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 31,500,000 | sts | 42.92 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Kegiatan | 1,908,942,381 | | | | 1 | Kegiat | 278,786,200 | | Kegiatan | 370,330,962 | 1 | Kegiatan | 1,201,626,619 | | | | | | | | | | | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Penyediaan makanan dan minuman** | **Tersedianya makanan dan minuman** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **10,691,789,637** | | **%** | **1,709,528,541** | | **%** | **2,255,368,261** | | **%** | **2,503,031,568** | | | **3,342,019,376** | **-** | **%** | **9,809,947,746** | **-** | **91.75** | **sts** | **sts** | **19,887,201,819** | **sts** | **10,567.06** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 | Kegiatan | 9,780,000 | 0 | Kegiatan | - | 1 | Kegiata | 4,500,000 | 1 | Kegiatan | 4,500,000 | | Kegiatan | 363,200 | 2 | Kegiatan | 9,363,200 | 100.00 | 95.74 | sts | sts | 456,009,415 | sts | 28.14 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | Bulan | 1,542,094,000 | 0 | Bulan | - | 3 | Bulan | 290,391,562 | 6 | Bulan | 551,902,255 | 3 | Bulan | 481,219,517 | 12 | Bulan | 1,323,513,334 | 100.00 | 85.83 | 12 | Bulan | 1,323,513,334 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 | Kegiatan | 92,700,000 | 0 | Kegiatan | - | 1 | Kegiata | 13,380,000 | 1 | Kegiatan | 20,284,000 | 2 | Kegiatan | 16,590,000 | 4 | Kegiatan | 50,254,000 | 100.00 | 54.21 | 4 | Kegiatan | 50,254,000 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 169 | Orang | 9,047,215,637 | 169 | Orang | 1,709,528,541 | | | 1,947,096,699 | | Orang | 1,926,345,313 | | Orang | 2,843,846,659 | 169 | Orang | 8,426,817,212 | 100.00 | - | 169 | Orang | 8,426,817,212 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **1,570,817,605** | | **%** | **207,874,480** | | | **164,234,142** | | | **246,540,796** | | | **950,452,466** | **-** | **%** | **1,569,101,884** | **-** | **99.89** | **-** | **%** | **1,569,101,884** | **tdr** | **10.23** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | Pengadaan mobil jabatan | Tersedianya mobil jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | unit | 1,233,408,125 | 50.00 | 40.50 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya pemeliharaan kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 531,729,500 | sts | 41.36 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya honorarium pegawai, publikasi dan survey verifikasi akreditasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 4,617,439,060 | sts | 53.46 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | (3) (11) | Unit/ Unit | 422,421,000 | 1 | Unit | 36,136,000 | 1 | Unit | 30,511,822 | 4 | Unit | 145,871,161 | 8 | Unit | 184,123,481 | 14 | Unit | 396,642,464 | sts | 93.90 | 14 | Unit | 396,642,464 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian PDH dan pakaian kerja lapangan berserta atribut | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 41 | kegiatan | 581,219,500 | 1 | Kegiatan | 139,736,480 | 1 | Kegiata | 133,722,320 | 2 | Kegiatan | 100,669,635 | | Kegiatan | 204,630,640 | 4 | Kegiatan | 578,759,075 | 9.76 | 99.58 | sts | sts | 2,054,934,319 | sts | 96.40 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan teknis | Tersedianya biaya kursus singkat | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 | Kegiatan | 567,177,105 | 1 | Kegiatan | 32,002,000 | | | | | | | 1 | Kegiatan | 561,698,345 | 2 | Kegiatan | 593,700,345 | 100.00 | 104.68 | sts | sts | 1,034,977,895 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Peningkatan kegiatan keagamaan** | **Meningkatnya wawasan keagamaan aparatur** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **100** | **%** | **23,597,827,813** | | **%** | **6,467,662,377** | | **%** | **6,467,662,377** | | **%** | **6,467,662,377** | | | **6,881,399,974** | - | % | 26,284,387,105 | **-** | **111.38** | sts | sts | 26,359,945,005 | sts | 8,000.58 | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 12 | bulan | 23,597,827,813 | 3 | bulan | 4,499,276,959 | 3 | bulan | 6,467,662,377 | 3 | bulan | 5,534,180,495 | 3 | bulan | 6,881,399,974 | 12 | bulan | 23,382,519,805 | 100.00 | 99.09 | 12 | bulan | 23,382,519,805 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179.98 | 67.97 | | | | 50.00 | 56.08 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | S | | | | SR | R | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA** | **100** | **%** | **10,061,417,796** | | | **978,786,520** | | | **2,635,057,794** | | | **2,799,362,011** | | | **2,731,969,057** | **-** | **-** | **9,145,175,382** | **sts** | **90.89** | **-** | **-** | **144,804,856,911** | **tdr** | **47.06** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | **Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** | **Indeks Kepuasaan Masyarakat** | | **85** | **indeks** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | sts | sts | 85,654,250,420 | sts | 54.52 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Pelayanan Medis** | **%tase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 31,416,862,470 | sts | 46.23 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis** | **Peningkatan Pelayanan yang lengkap dan berkualitas** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 1,633,642,276 | sts | 17.22 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata** | **Meningkatnya %tase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 3,307,405,696 | sts | 38.88 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata** | **Meningkatnya %tase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 13,647,520,667 | sts | 21.11 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **100** | **persen** | **6,840,421,746** | | **persen** | **551,101,440** | | **persen** | **1,910,320,894** | | | **2,228,737,735** | | | **1,800,549,263** | **-** | **persen** | **6,490,709,332** | **tdr** | **94.89** | **-** | **persen** | **6,490,709,332** | **tdr** | **16.67** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | | | Rehabilitasi dan Pemelharaan Rumah Sakit | 1/3/1/1 | Paket /ruangan/paket/paket | 711,989,511 | | | | 0.5 | Kegiata | 130339750 | | | | | | 515,328,029 | 1 | - | 645,667,779 | sts | 90.69 | 1 | - | 645,667,779 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pengadaan Alat-Alat kesehatan Rumah Sakit | Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 3 | kegiatan | 2,516,459,085 | | | | 1 | Kegiata | 878173198 | 1 | Kegiatan | 1,018,004,519 | 1 | Kegiatan | 402,001,737 | 3 | - | 2,298,179,454 | sts | - | sts | sts | 11,400,616,538 | tdr | 33.05 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pengadaan mebeleur rumah sakit | Tersedianya mebeleur rumah sakit | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 5 | kegiatan | 3,364,257,150 | 1 | kegiatan | 551,101,440 | 1 | Kegiata | 901,807,946 | 2 | kegiatan | 1,181,993,216.00 | 1 | kegiatan | 728,571,528 | 5 | kegiatan | 3,363,474,130 | 100.00 | - | sts | sts | 6,542,987,808 | tdr | 367.58 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pemelharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Tersedianya bahan habis pakai dan terkalibrasinya alat kesehatan | Pemelharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 7/39/1 | Orang /Item/tahun | 247,716,000 | | | | | | | | | 28,740,000 | 7 | Orang/Item/tahun | 154,647,969 | 7 | - | 183,387,969 | sts | 74.03 | sts | sts | 662,018,909 | sts | 24.93 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pemelharaan rutin/berkala rumah sakit | Terpelharanya gedung rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 538,057,900 | sts | 35.76 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pemelharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit | Tersedianya honorarium, bahan habis pakai dan jasa pemelharaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 504,484,180 | sts | 49.66 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pemelharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit | Tersedianya honorarium dan jasa pemelharaan perlengkapan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,877,160,676 | sts | 56.37 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pembangunan Rumah Sakit | Tersedianya bangunan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 284,524,000 | tdr | 1.70 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Penambahan Rumah Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I, II dan III) | Tersedianya ruang rawat inap rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1,965,000,000 | tdr | 78.60 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Rehabilitasi bangunan rumah sakit | Terpelihara bangunan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 889,923,000 | tdr | 32.85 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pengadaan mobil amBulance/mobil jenazah | Tersedianya mobil amBulance/mobil jenazah rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 11,309,000 | tdr | 0.50 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit | Tersedianya percetakan adm dan surat menyurat rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,341,930,240 | tdr | 32.25 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pengadaan Alat-Alat kesehatan Rumah Sakit | Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pembangunan Rumah Sakit | Tersedianya bangunan rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | % | - | tdr | - | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah** | **100** | **persen** | **3,220,996,050** | | **persen** | **427,685,080** | | **persen** | **724,736,900** | | **persen** | **570,624,276** | | | **931,419,794** | **-** | **persen** | **2,654,466,050** | **-** | **-** | **-** | **persen** | **2,654,466,050** | **tdr** | **1.17** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 100 | Persen | 3,220,996,050 | 0.2 | Kegiata | 427,685,080 | 0.8 | Kegiata | 724,736,900 | 0.5 | Kegiatan | 570,624,276 | 0.5 | Kegiatan | 931,419,794 | 2 | Kegiatan | 2,654,466,050 | sts | - | 2 | Kegiatan | 2,654,466,050 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | | 1 | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | | 1 | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan | Terlaksananya pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 | % | 85,654,250,420 | 434.00 | 57.05 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan gawat darurat | Tersedianya honorarium dokter dan alat-alat kesehatan gawat darurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,408 | pasien | 2,617,425,234 | 46.24 | 50.59 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT) | Tersedianya honorarium dokter anastesi dan alat-alat kesehatan kamar operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,763 | pasien | 1,438,351,160 | 31.74 | 13.80 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak | Tersedianya alat kesehatan anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,748 | pasien | 2,708,602,749 | 45.66 | 37.17 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa | Tersdianya honorarium perawat dan alat-alat kesehatan ICU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 370 | pasien | 4,626,082,917 | 39.74 | 95.25 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Peningkatan pelayanan rawat jalan | Tersedianya honorarium dan alat-alat kesehatan poliklinik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,771 | pasien | 3,591,340,890 | 45.49 | 47.75 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan rawat inap | Tersedianya honorarium, honor jaga malam, BHP dan alat kesehatan rawat inap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,636 | pasien | 16,435,059,520 | 44.83 | 50.08 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan radiologi | Terlayaninya pasien radiologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 332,800,000 | sts | 9.57 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan gizi | Terlaksananya pelayanan gizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 3,930,000 | sts | 1.40 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan patologi klinik | Terlayaninya pasien patologi klinik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 435,520,216 | sts | 10.36 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan pelayanan laundry | Terpenuhinya kebutuhan linen diruang pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 861,392,060 | sts | 56.52 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 32.94 | | | | 98.24 | 47.62 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | | ST | SR | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan** | **%tase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **90** | **persen** | **643,927,382** | | **persen** | **-** | | **persen** | **11,736,000** | | | **31,136,000** | | | **340,547,220** | **-** | persen | **383,419,220** | **-** | **59.54** | sts | sts | 2,706,996,374 | sts | 32.06 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah** | **100** | **persen** | **643,927,382** | | **persen** | **-** | | **persen** | **11,736,000** | | | **31,136,000** | | | **340,547,220** | **-** | **persen** | **383,419,220** | **-** | **-** | **-** | **persen** | **383,419,220** | **tdr** | **tdr** | **BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh** |
| | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 | kegiatan | 643,927,382 | | | | 0.5 | Kegiatan | 11,736,000 | | Kegiatan | 31,136,000 | | Kegiatan | 340,547,220 | 1 | - | 383,419,220 | sts | - | 1 | - | 383,419,220 | tdr | tdr | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | Peningkatan diklat medis/non medis | Tersediannya tenaga yang memiliki sikap dan perilaku melayani, pengetahuan yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | sts | sts | 2,323,577,154 | sts | 27.52 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | - | | | | #DIV/0! | 27.52 | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ERR | | | | #DIV/0! | SR | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh |
| | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** | | | **1,591,184,159,349** | | | **187,515,342,785** | | | **270,284,616,561** | | | **321,707,410,441** | | | **566,901,568,412** | | | **1,346,408,938,199** | | **84.62** | | | **3,328,989,223,954** | | **210.59** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** | | | **1,591,184,159,349** | | | **187,515,342,785** | | | **270,284,616,561** | | | **321,707,410,441** | | | **566,901,568,412** | | | **1,346,408,938,199** | | **84.62** | | | **3,328,989,223,954** | | **210.59** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | **1,591,184,159,349** | | | **187,515,342,785** | | | **270,284,616,561** | | | **321,707,410,441** | | | **566,901,568,412** | | | **1,346,408,938,199** | | **84.62** | | | **3,328,989,223,954** | | **210.59** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | **100** | **%** | **78,881,006,306** | | **%** | **11,214,549,440** | | **%** | **17,591,649,392** | | | **18,109,002,392** | | | **20,467,320,947** | - | % | **67,382,522,171** | **-** | **85.42** | sts | sts | 292,703,431,038 | tdr | 517.64 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | **11,214,549,440** | **tdr** | | sts | sts | 29,049,542,056 | sts | 69.70 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | tdr | sts | sts | 4,792,427,368 | sts | 38.83 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | tdr | sts | sts | 941,650,000 | sts | 139.89 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | tdr | sts | sts | 201,751,838,883 | sts | 10,894.84 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | | **100** | **%** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | tdr | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7** | **Dokumen** | **463,595,152** | **7** | **Dokumen** | **58,388,350** | **2** | **Doku** | **102,419,604** | **1** | **Dokume** | **63,169,700** | **5** | **Dokume** | **130,090,610** | **15** | **Dokume** | **354,068,264** | **214.29** | **-** | **15** | **Dokume** | **354,068,264** | **tdr** | **tdr** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | 55,532,479 | 4 | Dokumen | 11,582,600.00 | 1 | Dokur | 13,662,200.00 | 1 | Dokumen | 11,891,200 | 0 | Dokumen | 13,094,750 | 6 | Dokumen | 50,230,750 | 100.00 | 90.45 | 6 | Dokumen | 50,230,750 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5 | Dokumen | 408,062,673 | 3 | Dokumen | 46,805,750.00 | 1 | Dokur | 88,757,404.00 | 0 | Dokumen | 51,278,500 | 5 | Dokumen | 116,995,860 | 9 | Dokumen | 303,837,514 | 180.00 | 74.46 | 9 | Dokumen | 303,837,514 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1/835/1** | **Tahun/Orang/Tah** | **70,571,410,207** | | **Tahun/Orang/Tahun** | **10,642,387,313** | | **Tahun/Orang/Tahun** | **15,983,471,994** | | **Tahun/Orang/Tahun** | **16,004,906,446** | **1/835/1** | **Tahun/Orang/Tahun** | **16,148,671,163** | **####** | **/Orang/** | **58,779,436,916** | **tdr** | **83.29** | **#####** | **/Orang/** | **58,779,436,916** | **tdr** | **tdr** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | | 16=14+8 | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14/14 | Bulan/Bulan | 55,998,230,207 | 3 | Bulan/Bulan | 8,777,967,813 | 3 | Bulan/Bulan | 12,588,467,119 | 3 | Bulan/Bul | 12,583,843,946 | 3 | Bulan/Bul | 11,458,391,913 | 12 | ulan/Bula | 45,408,670,791 | tdr | 81.09 | 12 | ulan/Bula | 45,408,670,791 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | Bulan | 14,573,180,000 | 3 | Bulan | 1,864,419,500 | 3 | Bulan | 3,395,004,875 | 3 | Bulan | 3,421,062,500 | 3 | Bulan | 4,690,279,250 | 12 | Bulan | 1,864,419,500 | 100.00 | - | 12 | Bulan | 1,864,419,500 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **12** | **Bulan** | **1,521,291,533** | **25** | **%** | **122,505,065** | **25** | **%** | **341,668,176** | **25** | **%** | **539,390,823** | **25** | **%** | **668,489,738** | **100** | **%** | **1,672,053,802** | **sts** | **-** | **100** | **%** | **1,672,053,802** | **tdr** | **128.34** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 | Jenis | 14,743,496 | 8 | Jenis | 2,804,057.00 | 8 | Jenis | 4,553,312.00 | 8 | Jenis | 3,908,874 | 8 | Jenis | 713,000 | 32 | Jenis | 11,979,243 | 320.00 | - | 63 | Jenis | 58,837,524 | 96.92 | 81.16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 73/11 | Jenis/Bulan | 293,539,099 | 59 | Jenis/Bulan | 43,135,350.00 | 59 | Jenis/ | 70,576,820.00 | 59 | Jenis/Bulan | 57,691,400 | 59 | Jenis/Bulan | 120,366,150 | 236 | enis/Bula | 291,769,720 | tdr | - | 236 | enis/Bula | 291,769,720 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 | Bulan | 98,570,938 | ### | Lembar | 18,902,200.00 | 63362 | Lembar | 26,225,710.00 | 66105 | Lembar | 23,464,300 | 50437 | Lembar | 34,530,762 | #### | Lembar | 103,122,972 | sts | - | #### | Lembar | 731,956,972 | 16,459.01 | 68.09 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Literatur untuk menunjang Pelaksanaan Tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | Bulan | 13,560,000 | 13 | eks/Bula | 1,170,000.00 | 13 | eks/Bu | 4,680,000.00 | 13 | eks/Bulan | 3,510,000 | 13 | eks/Bulan | 4,680,000 | 52 | eks/Bular | 14,040,000 | sts | 103.54 | sts | sts | 96,000,000 | sts | 61.76 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Bulan | 1,100,878,000 | 30 | erjalana | 56,493,458.00 | 38 | Perjala | 235,632,334.00 | 37 | Perjalanan | 450,816,249 | 52 | Perjalanan | 508,199,826 | 157 | Perjalanan | 1,251,141,867 | sts | 113.65 | 157 | Perjalanan | 1,251,141,867 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12/7** | **Bulan/Dokumen** | **3,640,138,431** | | **Bulan/Dokumen** | **364,901,712** | | **Bulan** | **832,627,188** | | **Bulan/Do** | **868,857,316** | **12/7** | **Bulan/Dokumen** | **1,669,397,244** | **####** | **n/Doku** | **3,735,783,460** | **100.00** | **102.63** | **####** | **n/Doku** | **3,735,783,460** | **tdr** | **tdr** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tercapainya Informasi Melalui Persuratan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1000 | Lembar | 10,000,000 | 245 | Lembar | 2,450,000 | 305 | Lembar | 3,050,000 | 190 | Lembar | 1,900,000 | 260 | Lembar | 2,600,000 | 1,000 | Lembar | 10,000,000 | 100.00 | 100.00 | 8,100 | Lembar | 46,776,500 | 52.26 | 53.03 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70 | Rekening | 1,371,247,990 | 62 | Rekening | 249,432,712 | 62.00 | Rekening | 221,347,854 | 62 | Rekening | 279,157,728 | 62 | Rekening | 312,786,225 | 248 | Rekening | 1,062,724,519 | 354.29 | 77.50 | 442 | Rekening | 4,589,802,573 | 130.00 | 87.73 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Terpeliharanya peralatan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13/12 | Jenis/Bulan | 1,675,905,042 | 13 | Jenis/Bulan | 36,995,000 | 13 | Jenis/Bulan | 492,737,250 | 13 | Jenis/Bulan | 472,914,500 | 13 | Jenis/Bulan | 1,190,424,051 | 52 | enis/Bula | 2,193,070,801 | tdr | 130.86 | 73 | enis/Bula | 2,838,384,951 | sts | 1,103.09 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10000/12 | M2/Bulan | 582,985,399 | | M2/Bulan | 76,024,000 | 32,85 | persen | 115,492,084 | 19.71 | persen | 114,885,088 | 10000/12 | M2/Bulan | 163,586,968 | #### | M2/Bular | 469,988,140 | tdr | 80.62 | #VALUE! | M2/Bular | 469,988,140 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12** | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **sts** | **tdr** | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah** | **1** | **Tahun** | **2,684,570,983** | | **Tahun** | **26,367,000** | | **Tahun** | **331,462,430** | | **Tahun** | **632,678,107** | **1** | **Tahun** | **1,850,672,192** | **1** | **Tahun** | **2,841,179,729** | **100.00** | **105.83** | **1** | **Tahun** | **2,841,179,729** | **tdr** | **5.72** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 58/12 | Unit/Bulan | 1,415,179,000 | 13 | Unit/Bulan | 26,367,000.00 | 13 | Unit/Bu | 207,645,347.00 | 13 | Unit/Bulan | 168,108,138 | 13 | Unit/Bulan | 738,074,731 | 52 | Jnit/Bula | 1,140,195,216 | tdr | 80.57 | 52 | Unit/Bular | 1,140,195,216 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1000/13 | M2/Gedung | 1,269,391,983 | | | | 9,75 | Persen | 123,817,083.00 | 72.52 | Persen | 464,569,969 | 750/9 | M2/Gedung | 909,842,461 | #### | - | 1,498,229,513 | #VALUE! | 118.03 | #VALUE! | - | 1,498,229,513 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | | 58 /12 | Unit/Bulan | | | | | | | | | | | 3 | Unit | 202,755,000 | 3 | - | 202,755,000 | sts | #DIV/0! | 3 | - | 202,755,000 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 | Unit | 323,320,922 | 19.75 | 28.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 439 | Jenis | 594,254,028 | 207.08 | 53.56 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | peralatan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | Item/kor | 1,047,953,038 | 29.41 | 41.05 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,597 | Kotak/ B | 289,445,000 | tdr | 44.23 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | kali perja | 1,215,229,657 | 64.96 | 27.26 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269 | OB | 10,706,415,380 | 48.04 | 43.05 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALUE! | roda 4/ | 1,685,934,389 | tdr | 27.97 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | fasilitas lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | unit gedi | 3,106,492,979 | 75.00 | 49.19 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas harian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,038 | stel | 941,650,000 | 231.07 | 139.89 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pendidikan dan pelatihan formal | Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | Peserta | 201,751,838,883 | tdr | 10,894.84 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALUE! | #DIV/0! | | | | 1,583.05 | 800.24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALUE! | #DIV/0! | | | | ST | ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Program Penyelenggaraan Jalan** | **98,65** | **%** | **1,508,269,553,210** | | **%** | **176,281,825,545** | | **%** | **252,452,338,819** | | **%** | **302,701,214,982** | **84.41** | **%** | **544,309,537,718** | **84** | **%** | **1,275,744,917,064** | **tdr** | **84.58** | **84** | **%** | **1,275,744,917,064** | **tdr** | **tdr** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | **98,65** | **%** | **1,508,269,553,210** | | **%** | **176,281,825,545** | | **km** | **252,452,338,819** | | **km** | **302,701,214,982** | **84.41** | **%** | **544,309,537,718** | **84** | **%** | **1,275,744,917,064** | **tdr** | **-** | **84** | **%** | **1,275,744,917,064** | **tdr** | **290.69** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH** |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 3 | Dokumen | 3,244,025,993 | | Dokumen | 4,202,450 | 13,73 | persen | 897,861,235 | 31.28 | persen | 671,884,345 | 15 | Dokumen | 3,839,181,302 | #### | Dokumen | 5,413,129,332 | tdr | - | #VALUE! | Dokumen | 5,413,129,332 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | 1 | Ruas | 46,272,928,093 | | Ruas Jalan | | 0 | persen | 80,660,000 | 92.89 | persen | 41,781,681,303 | 1 | Ruas Jalan | 60,954,550 | 94 | Ruas Jalan | 41,923,295,853 | 9,389.00 | - | 94 | Ruas Jalan | 41,923,295,853 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 81 | Ruas | 1,686,924,742 | | Ruas Jalan | | 0 | persen | 292,020,080 | 3.58 | persen | 62,287,524 | 81 | Ruas Jalan | 1,310,817,344 | 85 | Ruas Jalan | 1,665,124,948 | 104.42 | - | 85 | Ruas Jalan | 1,665,124,948 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Rekonstruksi Jalan | 61/190 | Jenis /Km | 1,229,639,404,965 | | Jenis/ Km | 160,430,103,884 | 51,10 | persen | 225,889,459,931 | 14.89 | persen | 211,547,628,826 | 61/375,5 | Jenis/Km | 450,618,624,244 | #### | Jenis/Km | 1,048,485,816,885 | tdr | - | #VALUE! | Jenis/Km | 1,048,485,816,885 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Rehabilitasi Jalan | 1 | ruas jalan | | | ruas jalan | | | ruas jalan | | | ruas jalan | | | ruas jalan | | - | ruas jalan | - | - | tdr | - | ruas jalan | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan | terpeliharanya kondisi jalan baik | Pemeliharaan Berkala Jalan | 5 | km | 35,979,412,245 | | km | 9,149,291,920 | 30,22 | persen | 6,512,225,017 | 30.34 | persen | 26,330,971,499 | 9 | km | 26,005,062,498 | #### | km | 67,997,550,934 | tdr | - | #VALUE! | km | 156,439,477,837 | tdr | 200.63 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan | terpeliharanya kondisi jalan baik | Pemeliharaan Rutin Jalan | 81 | ruas | 8,344,811,958 | | ruas | 1,496,958,128 | 47,94 | persen | 4,860,683,973 | 29.74 | persen | 4,393,466,102 | 81 | ruas | 4,468,524,152 | #### | Km | 15,219,632,355 | #VALUE! | - | #VALUE! | Km | 39,694,575,103 | tdr | 396.95 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan | Pelaksanan Pembangunan Jembatan secara efektif | Pembangunan Jembatan | 20 | Unit | 139,000,000,000 | | Unit | 3,302,531,457 | 11,17 | persen | 7,333,406,273 | 23.10 | persen | 7,596,935,580 | 20 | Unit | 36,132,656,564 | #### | Meter | 54,365,529,874 | #VALUE! | - | #VALUE! | Meter | 236,150,749,799 | tdr | 69.27 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Pananganan fungsional jembatan | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 81 | Ruas | 2,000,000,000 | | Ruas Jalan | | 9,39 | persen | 321,339,121 | 45.01 | persen | 766,681,640 | 81 | Ruas Jalan | 810,223,452 | #### | meter | 1,898,244,213 | #VALUE! | 94.91 | #VALUE! | meter | 15,106,589,201 | tdr | 151.07 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | 81 | Ruas | | | Ruas | | | Ruas | | | Ruas | | | Ruas | | - | Ruas | - | - | tdr | - | Ruas | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 81 | Ruas | 337,039,212 | | Ruas J | 5,347,625 | 6,57 | persen | 17,329,959 | 28.29 | persen | 97,573,580 | 81 | Ruas Jalan | 113,742,933 | #### | Ruas Jalan | 233,994,097 | tdr | 69.43 | #VALUE! | Ruas Jalan | 233,994,097 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 43 | Paket | 41,765,006,002 | | Paket | 1,893,390,081 | 51,38 | persen | 6,247,353,230 | 17.34 | persen | 9,452,104,583 | 43 | Paket | 20,949,750,678 | #### | Paket | 38,542,598,572 | tdr | 92.28 | #VALUE! | Paket | 38,542,598,572 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penunjang Operasioal penyelenggaraan jalan | terlaksananya penyelenggaraan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan | Tersedianya Program Perencanaan Umum dan Bahan Perencanaan Tehnis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Dokumen | 3,924,276,341 | 41.67 | 30.08 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan jalan | Panjang pembangunan jalan efektif dan fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | Km | 120,216,626,796 | 161.14 | 84.62 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan | Panjang pembangunan jalan efektif dan fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | Km | 391,430,748,497 | 75.69 | 85.46 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jalan (Km) | Panjang pembangunan jalan efektif dan fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Km | 11,277,144,828 | 78.43 | 73.71 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jembatan | Pelaksanan Pembangunan Jembatan secara efektif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan | Tersedianya bahan laporan pelaksanaan pengawasan teknis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | dokumen | 17,345,322,943 | 64.71 | 50.03 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | tersedianya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan seluruh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | laporan | 1,215,300,477 | 45.00 | 46.21 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Inspeksi kondisi jalan dan jembatan | Tersedianya Program Perencanaan Umum dan Bahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | dokumen | 186,397,380 | 100.00 | 46.27 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Alat Survey Jalan dan Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Survey IRMS Jalan Provinsi | Tersedianya data kondisi jalan provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Survey BMS Jembatan di Jalan Provinsi | Tersedianya data kondisi jembatan provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Kegiatan Inventarisasi Jembatan Gantung dan Kabel | Tersedianya data jembatan gantung dan kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Kegiatan Survey Perubahan fungsi dan Status Jalan Provinsi | Tersedianya dokumen survey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan alat-alat berat | tersedianya peralatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 | item | 24,215,302,320 | 2,140.00 | 87.81 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Excavator | tersedianya peralatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Excavator mini | tersedianya peralatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Backho Louder | tersedianya peralatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Vibro Roller | tersedianya peralatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Unit Penilik Jalan (UPJ) | Tersedianya Unit Penilik Jalan (UPJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Jalan dan Jembatan | Tersedianya alat-alat laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | Terpeliharanya peralatan dan perbengkelan yang baik dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | Unit | 3,433,078,866 | 37.50 | 21.56 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penataan, Pemboongkaran, Pengangkatan dan Pemasangan | Terlaksananya pemboongkaran, pengangkatan dan pemasangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | unit | 592,666,575 | 16.67 | 6.59 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan | Terpeliharanya peralatan dan perbekalan yang baik dan siap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | item | 1,723,313,600 | 40.16 | 40.47 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Study LARAP Ruas Jalan Geumpang-Pameu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 1,533,416,048 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Study LARAP Ruas Jalan Jantho - Keumala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 1,018,186,686 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | | K | Rp | K | | | K | Rp | |
| | | | | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | | | Vol | Satuan | Rp | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pembangunan Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014) (Terobos) | Terlaksananya Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jl. Jantho - Batas Aceh Jaya (P. 013.11)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 21,485,337,376 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Km | 21,590,726,155 | 8.05 | 31.84 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Krueng Raya-Batas Pidie (P.015.11) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5,375,166,700 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Krueng Raya-Batas Pidie (P.015.11) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 17,070,054,776 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | % | 6,705,899,741 | sts | 111.76 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Tanah Terusan T. Nyak Makam-Elak II | Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 31,566,561,765 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | % | 18,796,897,108 | sts | 11.99 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Biaya Pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan Tanah Terusan Ruas Jalan Mr. Mohd. Hasan | Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Biaya Pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jalan Batas Banda Aceh-Blang Bintang (P. 010.13) | Terlaksananya pelebaran jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Blang Bintang-Krueng Raya (P.011) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jalan Blang Bintang-Krueng Raya (P.011) | Terlaksananya pelebaran jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jalan T. Iskandar (Banda Aceh-Batas Aceh Besar) | Terlaksananya pelebaran jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembebasan Tanah Ruas Jalan T. Iskandar (Banda Aceh - Batas Aceh Besar) (P.010.13 K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.13) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 10,054,824,385 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jalan Sp. Bili Aron-Teupin Raya (P.023) | Terlaksananya pelebaran jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Geumpang-Batas Aceh Barat (P.024.11) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Turu-Lutung-Geumpang (P.025) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jalan Lingkar Kota Sigli (P.016.11.K) | Terlaksananya pelebaran jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelebaran Jalan Lingkar Kota Sigli (P.016.12.K) | Terlaksananya pelebaran jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Trieng Gadeng-Batas Bireuen (P.035.11) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Trieng Gadeng-Batas Bireuen (P.035.11) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Meureudeu-Babah Jurong (P.028) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | sts | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 10,869,564,656 | sts | 905.80 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Krueng Geukueh-Batas Bener Meriah (P.030.11) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 4,882,730,618 | sts | 67.82 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Lhoksukon-Cot Girek (P.030) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 15,389,046,000 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Lhoksukon - Cot Girek (P.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | % | 1,755,641,133 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Cunda-Lhokseumawe (P.034.11.K) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,868,031,000 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11)(13 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 45,770,207,000 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11)(Sesuai 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 307,396,155 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11)(Sesuai 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 277,636,155 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11)(Sesuai 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 287,806,155 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11)(13 Ruas | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12)(13 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 40,926,675,787 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12)(13 | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Blangkejeren-Tongra-Batas Aceh Barat Daya (P.038.11)(13 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 72,685,765,567 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Blangkejeren-Tongra-Batas Aceh Barat Daya (P.038.11)(12 | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Batas Gayo Lues-Babah Roet (P.038.12)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | % | 37,313,829,760 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Gayo Lues-Babah Roet (P.038.12)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Sp. Lawe Deski-Muara Situlen-Batas Kota Subulussalam (P.043.11)(12 | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | % | 17,701,411,889 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lawe Deski-Muara Situlen-Batas Kota Subulussalam | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Batas Aceh Tenggara-Gelombang (P.043.12)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,683,073,935 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Tenggara-Gelombang (P.043.12)(12 | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan-Rundeng (P.043.12) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Selatan-Rundeng (P.043.12) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 6,753,577,400 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemelihraan Berkala Jalan Subulussalam-Rundeng (P.044) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | % | 10,910,851,646 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Gunung Kapur-Trumon (P.045.11) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Kapur-Trumon (P.045.11) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3,193,075,000 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Trumon-Batas Singkil (P.045.12)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | % | 19,726,850,537 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Trumon-Pulo Paya (P.046) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,373,483,000 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Teluan Bakti (P.045.12)(12 | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 10,576,426,343 | sts | 48.56 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Teluan Bakti | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Lipat Kajang - Telaga Bakti (P.047) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Pulau Balai - Pulau Ujung Batu (P.049.11) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,320,832,000 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Pulau Ujung Batu - Teluk Nibung (P.049.12) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2,297,364,000 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru (P.036) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 9,068,653,425 | sts | 34.35 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru (P.036) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Utara-Bandara Rembele (P.029.12) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Bandara Rembele-Batas Aceh Tengah (P.029.13) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 11,889,653,500 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (P.031)(12 Ruas Paket) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 | % | 32,330,933,155 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (P.031)(12 Ruas Paket) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah) (P.033) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Takengon-Bintang (P.040) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 7,548,164,300 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Takengon-Bintang (P.040) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jl. Batas Aceh Besar -Lamno (P. 013.12)(12 Ruas Paketan) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 24,386,710,000 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Batas Pidie-Meulaboh (P.024.12) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 14,716,601,554 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Pidie-Meulaboh (P.024.12) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Pribue - Kuala Bee - Sp. Suak Tinggi (P.053) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Kuala Tuha - Lamie (P.051) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 5,506,291,048 | sts | 45.89 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Kuala Tuha - Lamie (P.051) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 13,142,148,466 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Sinabang - Sibigo (P.056.11) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | % | 9,611,283,757 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo (P.056.12)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 15,121,386,696 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo (P.056.12)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif peningkatan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 19,606,025,155 | sts | 4.51 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo (P.056.12)(12 Ruas Prioritas) | Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Motodam I Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | sts | 9,761,330,070 | sts | 97.61 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Motodam II Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | sts | 8,729,729,306 | sts | 87.30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Biang Rheu Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Jamboe Seng Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Krueng Cot Empee Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 9,743,292,960 | sts | 97.43 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Tuwi Keube Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 8,814,765,312 | sts | 88.15 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Krueng Sabit Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Leupu Ruas Jalan Sp. Turu Lutung-Geumpang | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Krueng Lhok Tunggok Ruas Jalan Sp. Turu Lutung- | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 15,274,465,121 | sts | 152.74 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Cerucuk Ruas Jalan Sigli-Kembang Tanjong-Teunin Raya | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Meunasah Mee Ruas Jalan Teiong Cadong-Batas Bireuen | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Samarkilang Ruas Jalan Sp.Tiga Redelong-Pondok Baru | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Wih Kanis Ruas Jalan Sp.Tiga Redelong-Pondok Baru-Gunung | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Alur Trap Ruas Jalan Sp.Tiga Redelong-Pondok Baru-Gunung | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Seuma III Ruas Jalan Trumon-Batas Singkil (12 Ruas | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Bulu Seuma IV Ruas Jalan Trumon-Batas Singkil (12 Ruas | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Bulu Seuma V Ruas Jalan Trumon-Batas Singkil (12 Ruas | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Luan Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lawak Sibigo (12 Ruas | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Suak Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lawak Sibigo (12 Ruas | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Lanjutan Pembangunan Jembatan Kilangan Ruas Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 42,950,000,137 | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 14,953,819,745 | sts | 99.69 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Kayu Menang Ruas Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Pribu-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (B 053) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Cot Darat Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (B 053) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Cot Mesjid Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (B 053) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pembangunan Jembatan Cot Meurong 2 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee Sp. Suak Timah (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Cot Meurong 3 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee Sp. Suak Timah (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Suak Trieng 1 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee Sp. Suak Timah (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Suak Trieng 2 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee Sp. Suak Timah (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Suak Trieng 3 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee Sp. Suak Timah (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Gle Sibilah Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee Sp. Suak Timah (P. DES) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Krueng Luas 1 Ruas Jalan Krueng Luas-Batas Kota | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Krueng Luas 2 Ruas Jalan Krueng Luas-Batas Kota | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Alue Titibok Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Sarang Jala 1 Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Sarang Jala 2 Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Alue Pakam Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Alue Putoh Harapan Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Alue Diek Ie Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Alue Ekan Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Gumpa Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Gajah Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (B. 035.11) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Cot Bak Culih Ruas Jalan Batas Banda Aceh-Blang Bintang | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pelmbangunan Jembatan Cot Peurabeu Ruas Jalan Batas Banda Aceh-Blang Bintang | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Swi Simpang 1 Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Ujung Rimba Chot 1 Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan JembatanUjung Rimba Chot 2 Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Meugit Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Blang Kupula Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Leuhan Ruas Jalan Batas Pidie-Meulaboh (B. 034.13) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Gampa Ruas Jalan Batas Pidie-Meulaboh (B. 034.13) | Terbangunanya efektif jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan Jembatan Gantung | Terbangunnya efektif jembatan gantung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | - Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD I (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Aceh | Terpeliharanya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | Ruas/Km | 11,132,292,735 | tdr | 125.03 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD II (Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Tamiang) | Terpeliharanya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | Ruas/Km | 5,661,713,517 | tdr | 94.36 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD III (Bireuen, Bener Meriah, Aceh | Terpeliharanya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | Ruas/Km | 5,229,747,796 | tdr | 81.31 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD IV (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan) | Terpeliharanya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | Ruas/Km | 6,291,118,499 | tdr | 38.10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD V (Aceh Tenggara, dan Gayo | Terpeliharanya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | Ruas/Km | 2,420,311,395 | 1,353,047.78 | 49.68 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Ruas Jantho-Batas Aceh Jaya | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 1,006,704,372 | 100.00 | 100.67 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Batas Aceh Besar-Lamno | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 745,894,012 | 100.00 | 99.45 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Ruas Jalan Batas Aceh Besar-Tibang | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 1,004,602,500 | 100.00 | 133.95 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Krueng Geukueh - Batas Bener Meriah | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 340,791,000 | 100.00 | 45.44 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Batas Aceh Utara - Bandara Rembele | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 249,986,000 | 100.00 | 33.33 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Geudong - Makam Malikul Saleh - Mancang | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 325,645,100 | 100.00 | 108.55 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Perencanaan Jalan Sp. Tiga Redelong- Pondok Baru - Genap Kilang | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | dok | 803,628,389 | 100.00 | 53.58 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blang Kejeren | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 820,954,870 | 100.00 | 109.46 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Mr. Mohd. Hassan | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Blang Kejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | dok | 776,631,239 | 100.00 | 51.78 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Isaq - Jagong Jeget - Sp. Gelelungi | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 1,039,706,800 | 100.00 | 138.63 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencaan Jalan Lipat Kajang - Telaga Bakti | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 770,970,750 | 100.00 | 102.80 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Kuala Tuha - Lamie | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 3,037,854,500 | 100.00 | 405.05 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jalan Nasreuheu - Lewak - Sibigo | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 790,901,239 | 100.00 | 105.45 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jembatan Ruas Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (3 Jembatan) | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jembatan Ruas Jalan Pribue - Kuala Bee - Sp. Geuh Tinggi (3 Jembatan) | Tersusunnya dokumen perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Jembatan Gantung (6 Unit/Tahun) | Tersusunnya dokumen perencanaan jembatan gantung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 537,710,800 | 100.00 | 128.03 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALUE! | 23.33 | | | | 12,227.54 | 15.31 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALUE! | SR | | | | ST | SR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang** | **%tase kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** | **98** | **%** | **4,033,599,833** | | **%** | **18,967,800** | | **%** | **240,628,350** | | **%** | **897,193,067** | **100** | **%** | **2,124,709,747** | 100 | % | **3,281,498,964** | **102.04** | **81.35** | 177 | % | 47,814,789,797 | 1,183.30 | 125.05 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi** | **100** | **%** | **4,033,599,833** | | **%** | **18,967,800** | | **%** | **240,628,350** | | **%** | **897,193,067** | **100** | **%** | **2,124,709,747** | 100 | % | 3,281,498,964 | **100.00** | **-** | 100 | % | 3,281,498,964 | tdr | 8.58 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | 1 | dokumen | 4,033,599,833 | | dokumen | 18,967,800 | | dokumen | 240,628,350 | | dokumen | 897,193,067 | 1 | dokumen | 2,124,709,747 | 1 | dokumen | 3,281,498,964 | 100.00 | - | 1 | dokumen | 3,281,498,964 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Revisi Qanun RTRW Aceh | Jumlah Qanun Penataan Ruang Aceh dan Kab/Kota yang di evaluasi☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 | % | 1,173,067,785 | tdr | 13.17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Koordinasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | rekomendasi kesesuaian tata ruang☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 | dokumen | 813,524,445 | tdr | 26.31 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Koordinasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | rekomendasi kesesuaian tata ruang☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Aceh | Tata Ruang yang terintegrasi dan terarah☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | % | 258,994,805 | tdr | 14.95 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Wilayah pengembangan infrastruktur yang telah sesuai dengan turunan tata ruang☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | keg/dok | 4,554,484,309 | tdr | 62.12 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Tata Ruang yang terintegrasi dan terarah☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Evaluasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Hasil Penilitian terhadap tingkat pencapaian dan kesesuaian perencanaan, pemograman, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | rekomen | 148,880,103 | 384.55 | 34.54 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penunjang Operasional Perencanaan Tata Ruang | Terlaksananya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyusunan Masterplan Kawasan terpadu | Tersusunnya masterplan kawasan terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dokumen | 1,395,852,166 | 100.00 | 279.17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyusunan Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur | Tersusunnya dokumen evaluasi pemanfaatan infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Evaluasi Lingkungan Hidup ruas jalan provinsi | Tersusunnya dokumen evaluasi lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | dokumen | 1,408,515,221 | 4,897.50 | 159.29 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pemantauan Lingkungan Hidup Ruas Jalan Provinsi | Tersusunnya dokumen pemantauan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | dokumen | 645,995,421 | 10,000.00 | 129.20 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Kajian Koprenensif Pengembangan Jaringan Jalan untuk mendukung Pengembangan Wilayah | Tersususunya dokumen kajian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Dokumen | 555,312,507 | 3,333.33 | 37.02 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | monitoring pelaksanaan RKL/RPL | Tersusunnya data pelaksanaan RKL/RPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | dokumen | 605,714,916 | 10,000.00 | 121.14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyusunan RTR KSP Agro Industri | Tersusunnya RTR KSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyusunan RTR KSP Agro Wisata | Tersusunnya RTR KSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyusunan RTR KSP Kawasan Khusus | Tersusunnya RTR KSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Lanjutan Pembangunan Jembatana Bintah (Tahap III / Selesai) Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya (Sl.Bl.Ch.Sg.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | % | 11,259,023,000 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Peningkatan Jalan Jantho - Batas Aceh Jaya (P. 013.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | % | 21,713,926,155 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | - | | | | 4,785.90 | 52.09 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ERR | | | | ST | R | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** | **Panjang jalan Aceh dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,369 | KM | 1,222,017,045,712 | sts | 88.07 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan jalan | Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | km | 913,774,865,581 | - | 114.98 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pembangunan jembatan | Panjang Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | km | 248,364,935,738 | - | 49.39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengawasan teknis jalan dan jembatan | Tersedianya Bahan Laporan Pelaksanaan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | km & m | 44,863,398,548 | tdr | 83.67 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan pembangunan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 11,089,569,504 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Perencanaan jalan dan jembatan | Tersedianya Program Perencanaan Umum dan Bahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ruas jala | 3,924,276,341 | - | 10.81 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | - | 69.39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | ERR | S | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** | **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | KM | 213,110,579,140 | sts | 242.45 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Panjang penanganan fungsional jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | unit | 201,662,132,383 | 36.36 | 611.10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Terlaksananya pemeliharaan aksesibilitas pergerakan orang dan barang terbatas pantang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | km | 11,448,446,757 | 522.93 | 20.85 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 279.65 | 291.47 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | ST | ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| 73 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarga** | **%tase alat berat dan dan sarana laboratorium kebinamargaan dalam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | % | 36,342,474,958 | 73.35 | 462.11 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Pengadaan alat-alat berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | - | 4,410,000,000 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat | Tersedianya peralatan dan perbekalan yang baik dan siap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 4,974,439,253 | 100.00 | 73.13 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | Tersedianya peralatan dan perbekalan yang baik dan siap pakai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | % | 2,742,733,385 | 68.14 | 258.09 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 80.50 | 264.44 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | T | ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| 74 | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **Jumlah Kab/Kota dengan Ketersediaan dokumen tata ruang dan kawasan strategis Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | % | 764,869,413 | tdr | 103.63 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota | tersedianya kesesuaian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 764,869,413 | - | 103.63 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | - | 103.63 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | ERR | ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| 75 | **Program Pemanfaatan Ruang** | **Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 | % | 3,560,376,436 | tdr | 213.96 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Survey dan pemetaan | tersedianya rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 3,500,973,584 | - | 261.59 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 3,500,973,584 | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP NAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | Tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan perencanaan tata ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | - | 158.52 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | ERR | ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| 76 | **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang** | **Tingkat ketaatan terhadap RTRW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | % | 395,282,089 | tdr | 110.76 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota | tersedianya data pengendalian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | 395,282,089 | - | 110.76 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | - | 110.76 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | ERR | ST | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH |
| | **Dinas Pengairan Aceh** | | **DINAS PENGAIRAN ACEH** | | | **977,521,135,338** | | | **17,326,683,225** | | | **#VALUE!** | | | **817,244,702,728** | | | | | | **201,987,199,454** | | **20.66** | | | **250,015,016,202** | | **4.78** | Dinas Pengairan Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **977,521,135,338** | | | **17,326,683,225** | | | **#VALUE!** | | | **817,244,702,728** | | | | | | **201,987,199,454** | | **20.66** | | | **250,015,016,202** | | **4.78** | Dinas Pengairan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | **BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **977,521,135,338** | | | **17,326,683,225** | | | **#VALUE!** | | | **817,244,702,728** | | | | | | **201,987,199,454** | | **20.66** | | | **1,954,159,183,951** | 91.02 | **37.38** | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | **53,060,935,621** | | | **7,286,254,860** | | | **11,176,563,658** | | | **12,394,165,260** | | | | **-** | - | **30,856,983,778** | tdr | **58.15** | - | - | 78,884,800,526 | tdr | 66.54 | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | **100** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | | | | **-** | **tdr** | 99 | % | 32,794,240,545 | 99.02 | 42.61 | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 95 | % | 10,954,946,105 | 94.75 | 39.09 | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 100 | % | 1,116,294,186 | 100.00 | 35.11 | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya** | **Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 55 | % | 3,162,335,912 | 54.55 | 30.45 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | | **100** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | **-** | **%** | **-** | **-** | **tdr** | **-** | **%** | - | **tdr** | **tdr** | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **451,018,963** | **5** | **%** | **23,144,500** | **19.467** | **%** | **64,365,500** | **25.03** | **%** | **25,003,700** | **43.71** | **%** | **197,159,700** | **93** | **%** | **309,673,400** | **93.36** | **-** | **93** | **%** | **309,673,400** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | 451,018,963 | - | Dok | 23,144,500 | 0 | Dok | 64,365,500 | 4 | Dok | 25,003,700 | 2 | Dok | 197,159,700 | 6 | Dok | 309,673,400 | sts | 68.66 | 6 | Dok | 309,673,400 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **38,859,185,056** | **###** | **%** | **6,524,682,703** | **24.24** | **%** | **9,414,963,597** | **24.8** | **%** | **9,635,225,557** | **24.41** | **%** | **9,485,773,678** | **90** | **%** | **35,060,645,535** | **90.24** | **90.22** | **90** | **%** | **35,060,645,535** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 279 | Orang | 33,603,650,056 | 837 | Orang | 5,799,682,703 | 837 | Orang | 8,310,003,597 | 279 | Org | 8,508,995,557 | 279 | Org | 7,912,616,178 | 2,232 | Orang | 30,531,298,035 | 800.00 | 90.86 | 2,232 | Orang | 30,531,298,035 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | Tahun | 5,255,535,000 | 0 | Tahun | 725,000,000 | 0 | Tahun | 1,104,960,000 | 0.25 | Tahun | 1,126,230,000 | 0.25 | Tahun | 1,573,157,500 | 1 | Tahun | 4,529,347,500 | 50.00 | 86.18 | 1 | Tahun | 4,529,347,500 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **720,000,000** | **0.35** | **%** | **2,500,000** | **14.93** | **%** | **107,538,100** | **21.41** | **%** | **175,708,230** | **61.99** | **%** | **446,349,288** | **99** | **%** | **732,095,618** | **98.68** | **-** | **99** | **%** | **732,095,618** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 | Kali | 122,500,000 | 1 | Kali | 2,500,000 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 49,880,130 | 4 | Kali | 65019870 | 5 | Kali | 117,400,000 | 125.00 | - | 5 | Kali | 117,400,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | Kegiatan | 0 | 0 | Kegiatan | 0 | 0 | Kegiatan | 0 | | Kegiatan | | | | | - | Kegiatan | - | tdr | - | - | Kegiatan | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 | Akt | 597,500,000 | 0 | Akt | 0 | 1 | Akt | 107,538,100 | 4 | Akt | 125,828,100 | 2 | Akt | 381329418 | 7 | Akt | 614,695,618 | 350.00 | - | 7 | Akt | 614,695,618 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **3,249,756,984** | **8.09** | **%** | **237,070,150** | **24.5** | **%** | **715,286,122** | **23** | **%** | **660,047,235** | **40** | **%** | **1,279,776,932** | **95** | **%** | **2,892,180,439** | **95.45** | **-** | **95** | **%** | **2,892,180,439** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor | 182 | Buah | 50,000,000 | 0 | buah | - | 0.0 | buah | - | 97 | buah | 28,787,850 | 85.00 | buah | 25,223,640 | | | | | | | | | | | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40 | Unit | 500,000,000 | 6 | Unit | 79,404,600 | | Unit | 327,114,336 | 17 | Unit | 156,243,100 | 13 | Unit | 527,434,710 | 36 | Unit | 1,090,196,746 | 90.00 | - | sts | sts | 1,090,196,746 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | Tahun | 582,229,861 | 0.25 | Tahun | 60,535,000 | 0.3 | Tahun | 116,998,600 | 0.25 | Tahun | 122,123,421 | 0.25 | Tahun | 154,647,692 | 1 | Tahun | 454,304,713 | 100.00 | 78.03 | sts | sts | 1,362,922,742 | sts | 86.32 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan kotak yang disediakan | | 1500 | Kotak | | 1120 | Kotak | | 550 | Kotak | | 754 | Kotak | | 800 | Kotak | | 3,224 | Kotak | | 214.93 | tdr | #### | Kotak | 437,341,040 | 55.54 | 112.35 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang yang dicetak dan dokumen yang dijilid | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1870 | Buah | 222,900,330 | - | Buah | - | 350 | Buah | 41,259,500 | 766 | Buah | 91,689,221 | 740 | Buah | 51,826,904 | 1,856 | Buah | 184,775,625 | 99.25 | 82.90 | 8,726 | Buah | 1,012,468,750 | 93.33 | 64.47 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah surat kabar/majalah yang di baca | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 544 | Eksmplar | 15,200,000 | 0 | Eks | - | | Eks | 1,863,000 | 166 | Eks | 2,794,500 | 198 | Eks | 5,589,000 | 364 | Eks | 10,246,500 | sts | 67.41 | sts | sts | 61,366,500 | sts | 84.50 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 | Kali | 1,879,426,793 | 9 | Kali | 97,130,550 | 9 | Kali | 228,050,686 | 6 | Kali | 258,409,143 | 6 | Kali | 515,054,986 | 30 | Kali | 1,098,645,365 | 100.00 | 58.46 | 1,095 | Kali | 4,410,569,471 | 446.94 | 68.12 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100** | **%** | **3,197,487,574** | **0.08** | **%** | **3,430,000** | **7.20** | **%** | **24,813,388** | **30.43** | **%** | **339,694,000** | | | **4,295,040,290** | **38** | **%** | **4,662,977,678** | **37.71** | **-** | **38** | **%** | **4,662,977,678** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 2000 | m2 | 1,827,487,574 | - | m2 | 3,430,000 | | m2 | 24,813,388 | | m2 | 8,530,000 | 2000 | m2 | 3,054,348,290 | 2,000 | m2 | 3,091,121,678 | 100.00 | 169.15 | sts | sts | 3,091,121,678 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | 200,000,000 | - | Unit | - | | Unit | - | 0 | Unit | - | 1 | Unit | 199160000 | 1 | Unit | 199,160,000 | 100.00 | - | sts | sts | 199,160,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 | Keg | 1,170,000,000 | - | Keg | - | - | Keg | - | 2 | Keg | 331,164,000 | 1 | Keg | 1,041,532,000 | 3 | Keg | 1,372,696,000 | 150.00 | 117.32 | sts | sts | 1,372,696,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **2,700,630,627** | **9** | **%** | **286,736,807** | **23.71** | **%** | **430,812,006** | **44.38** | **%** | **625,363,268** | **36.22** | **%** | **978,208,399** | **113** | **%** | **2,321,120,480** | **113.31** | **85.95** | **113** | **%** | **2,321,120,480** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Perangko/Materai dan Jasa Pengiriman | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 | Paket | 9,757,800 | - | Paket | 3,000,000 | - | Paket | 2,500,000 | - | Paket | | | | 13,500,000 | - | Paket | 19,000,000 | - | 194.72 | sts | sts | 30,302,500 | sts | 100.30 | Dinas Pengairan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Menyurat | [illegible] | | 900 | Lembar | | 300 | Lembar | | 300 | Lembar | | 300 | Lembar | | | | | | | [illegible] | - | tdr | - | - | [illegible] | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Air PDAM, Listrik, Internet dan Pulsa yang dibayarkan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 588 | Rek | 1,100,499,120 | 36 | Rek | 189,662,307 | 36 | Rek | 163,521,755 | 36 | Rek | 194,579,793 | 36 | Rek | 193,024,065 | 144 | Rekening | 740,787,920 | sts | - | 438 | Rekening | 3,490,044,977 | 178.78 | 66.00 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Sarana Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berfungsi Optimal | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 811 | Unit | 907,742,352 | 31 | Unit | 6,666,000.000 | | Unit | 137,639,301 | 262 | Unit | 278,615,475 | 387 | Unit | 453,217,622.0 | 680 | Unit | | 83.85 | - | sts | sts | 1,099,708,300 | sts | 22.66 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa Cleanning Service yang bekerja | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 180 | Orang | 682,631,355 | 45 | Orang | 87,408,500 | 45 | Orang | 127,150,950 | 45 | Orang | 152,168,000 | 45 | Orang | 318,466,712 | 180 | Orang | 685,194,162 | 100.00 | 100.38 | 304 | Orang | 2,353,811,572 | 741.46 | 103.58 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **3,882,856,417** | **4.32** | **%** | **208,690,700** | **8.66** | **%** | **418,784,945** | **34.45** | **%** | **933,123,270** | **50.24** | **%** | **1,950,925,313** | **98** | **%** | **3,511,524,228** | **97.67** | **90.44** | **98** | **%** | **3,511,524,228** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas yang dipelihara/operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 91 | Unit | 1,536,028,984 | 13 | Unit | 208,690,700 | 13 | Unit | 216,646,965 | 32 | Unit | 454,924,770 | 33 | Unit | 468,738,025.00 | 91 | Unit | 1,349,000,460 | 100.00 | - | 327 | Unit | 4,279,935,774 | 112.76 | 89.13 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 500 | Unit | 1,688,427,433 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | - | 52 | Unit | 171,940,000 | 300 | Unit | 335,583,400 | | unit | | | | | | | | | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 8 | Unit | 658,400,000 | - | Unit | - | 0 | Unit | 202137980 | 5 | Unit | 306,258,500 | 3 | Unit | 1,146,603,888 | 8 | Unit | 1,655,000,368 | 100.00 | 251.37 | 19 | Unit | 7,163,693,193 | 316.67 | 106.38 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147.95 | 68.27 | | | | 277.93 | 82.17 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | S | | | | ST | T | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** | **Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | % | 905,868,250,764 | 89.31 | 20.33 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan Prasarana Air Baku | Luas area yang dibebaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | sts | sts | - | sts | - | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak | %tase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | % | 227,457,488,475 | 109.60 | 10.82 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | %tase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | % | 273,743,463,443 | 87.76 | 32.20 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu | Terlaksananya kegiatan peningkatan tata kelola pengelolaan SDA terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | % | 6,557,442,495 | 100.00 | 13.29 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya | %tase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | % | 97,196,076,802 | 92.30 | 14.91 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA | %tase Sarana da Prasarana SDA Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi sb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | % | 14,366,053,242 | 105.74 | 15.35 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya dokumen pelaporan monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 617,430,688 | 100.00 | 30.38 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengelolaan SDA WS. Teunom-Lambesoi | Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Lap | 1,155,936,115 | 100.00 | 48.79 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | tahun | 493,355,445 | 100.00 | 30.89 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meo Sarka Pulet Kab. | Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun Jumlah dokumen yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,542 | Ha/ Lapo | 48,582,339,900 | sts | 86.53 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalem Kab. Aceh | Panjang Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Dok | 146,973,640 | sts | 2.85 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Dok | 99,052,800 | sts | 1.77 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ujok Nagu Kab. Pidie | Jumlah Dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | dok | 168,702,160 | sts | 1.02 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Dok | 104,374,600 | sts | 1.75 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Gajah Kab. Aceh Timur | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Dok | 147,262,500 | sts | 4.14 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kab. Bireuen | Jumlah bendung yang dibangun / Jumlah dokumen pengawasan/ Panjang Jaringan irigasi yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Dok | 27,573,543,136 | sts | 76.87 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Siyulai Kab. Simeulue | Jumah bendung yang dibangun / Jumlah dokumen pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Lapo | - | sts | - | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Cuka/Trienggadeng Kab. | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,400 | Ha/ Ha/ | 949,776,973 | sts | 5.90 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meureudu Kab. Pidie Jaya | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,566 | Ha/ Ha/ | 862,862,477 | sts | 12.86 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Glee Kab. Pidie Jaya | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,551 | Ha/ Lapo | 325,257,138 | sts | 10.06 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Pidie Jaya/Bireuen | Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 539 | Ha/ Lapo | 15,813,861,920 | sts | 242.75 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Nalan Kab. Bireuen | Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 | Ha/ Ha/ | 17,835,109,729 | sts | 477.67 | Dinas Pengairan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pandrah Kab. Bireuen | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 658 | Ha | 493,540,882 | sts | 5.85 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Peudada Kab. Bireuen | Jumlah dokumen pengawasan<br>Panjang jaringan irigasi yang dibangun<br>Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 607 | Ha/ Ha/ | 412,990,253 | sts | 9.19 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 553 | Ha | 326,114,553 | sts | 5.68 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jamuan Kab. Aceh Utara | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | Ha | 205,961,413 | sts | 3.76 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Reubat Kab. Aceh | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 542 | Ha | 373,734,631 | sts | 4.27 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Peusangan Kab. Aceh Tengah | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 | Ha/ Ha/ | 49,009,580 | sts | 0.91 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ilee Gatah Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Lapo | 347,874,952 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Tuan Kab. Aceh | Luas area yang dibebaskan<br>Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Km | 560,642,994 | sts | 3.69 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mhang Kab. Aceh Utara | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Lapo | 427,373,658 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lambeso Kab. Aceh Jaya | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 426 | Ha | 159,828,969 | sts | 1.65 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Paste Kuyun Kab. Aceh | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 | Ha | 224,772,355 | sts | 2.59 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Babah Rote Kab. Aceh Barat | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | Ha | 3,326,543,434 | sts | 29.25 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Beutong Kab. Aceh Selatan | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 292 | Ha | 402,469,886 | sts | 2.56 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Guyung Burkon Kab. Aceh | Jumlah bendung yang dibangun<br>Jumlah dokumen pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | Ha/ Ha/ | 522,582,910 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalam Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Lapo | 58,409,263 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Raya Dapur Kab. Aceh | Jumlah bendung yang dibangun<br>Jumlah dokumen pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 763 | Ha/ Ha/ | 500,518,334 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Cane Lama Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | lap | 23,757,386 | sts | 1.34 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 | Ha | 344,696,398 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Bulan Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597.97 / | Ha/ Lapo | 426,335,883 | sts | 20.59 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Kinga/Maha Singkil | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387.84 / | Ha/ Lapo | 205,492,907 | sts | 19.91 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Seluk Kab. Gayo Lues | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1621.19/ | Ha/ Lapo | 400,446,143 | sts | 5.17 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Tilis Kab. Gayo Lues | Jumlah dokumen pengawasan<br>Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 945.9 / 1 | Ha/ Ha/ | 419,874,711 | sts | 6.24 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I P. Kabupongo Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan<br>Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 945.9 / 1 | Ha/ Lapo | 388,188,578 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Teunom - Lamboyo | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Ha/ Ha/ | 39,547,470,974 | sts | 40.85 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Pase - Peusangan | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | 20,341,431,474 | sts | 21.60 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Tamiang - Langsa | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Lap/ | 1,434,926,768 | sts | 6.36 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Baru - Kluet | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | 18,521,397,274 | sts | 27.79 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyediaan Prasarana Air Baku | Luas area yang dibebaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | 11,639,232,200 | - | 91.73 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Tampungan Air | Jumlah embung yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | unit | 293,297,449 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Aceh | Terlaksanya Koordinasi Pengelolaan SDA Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | % | 307,202,477 | sts | 8.86 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengelolaan SDA WS. Pase-Peusangan | Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk peningkatkan kualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | lap | 849,311,517 | 50.00 | 35.85 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengelolaan SDA WS. Tamiang-Langsa | Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk peningkatkan kualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | lap | 993,918,894 | 50.00 | 41.96 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengelolaan SDA WS. Baru-Kluet | Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk peningkatkan kualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | lap | 737,502,835 | 50.00 | 31.13 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi | Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan Pemberdayaan Kelembagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | % | 8,955,186,286 | sts | 89.55 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA | Terlaksananya kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | keg | 140,202,182 | sts | 70.10 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Terkelolanya Data Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | layanan | 197,585,835 | 100.00 | 97.28 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak (Migas Kabupaten/Kota) | %tase peningkatan Jaringan Irigasi yang dibangun/ditingkatkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5,806,482,400 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Uleh Nieng Kab. Pidie | Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 843,510,800 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meu Seuke Pulot Kab. | Jumlah bendung yang dibangun<br>Jumlah dokumen pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Ha/ Lapo | 1,563,743,500 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureuhet Kab. | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Dok | 1,537,803,190 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sinyal Kab. Simeulue | Jumlah bendung yang dibangun<br>Jumlah dokumen pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,197 | Unit/ Do | 26,133,815,100 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Cuka/Trangadang Kab. | Jumlah dokumen pengawasan<br>Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Ha/ | 710,957,500 | sts | 4.42 | Dinas Pengairan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meurayuk Kab. | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Ha/ | 709,313,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Glee Kab. | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 719,411,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Bidie | Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Nalan Kab. Bireuen | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pandrah Kab. Bireuen | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Peusalat Kab. | Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jamuan Kab. Aceh | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Reuhat Kab. | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Peunaron Kab. Aceh Timur | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Galah Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 736,312,500 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Tuan Kab. Aceh | Luas area yang dibebaskan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ % | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 521,873,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lambesoi Kab. | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Pante Kuyan Kab. Aceh | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Rahah Rota Kab. Aceh Barat | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mangonong Kab. | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,163 | Ha | 746,805,044 | sts | 15.10 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Beutong Kab. Aceh Selatan | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Gunung Burugo Kab. Aceh | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | sts | - | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalam Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 734,868,200 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Baya Dapur Kab. Aceh | Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | sts | - | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Cane Lama | Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | lap | 744,300,700 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 495,264,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Bulan Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 495,054,450 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Kinga/MahaSingkil | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 493,428,650 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mieh Seluk Kab.Gayo Lues | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Lapo | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mieh Tilie Kab. Gayo Lues | Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I B.Katawanga Kab. Aceh | Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ha/ Lapo | 710,820,000 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Teunom - Lambesoi | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | 2,657,521,500 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Pase - Peusangan | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | 3,158,022,875 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Tamiang - Langsa | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Ha/ Lap/ | 863,897,800 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Baru - Kluet | Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Ha/ Ha/ | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Tampungan Air | Jumlah embung yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | laporan | 3,511,268,200 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pendukung Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | Terlaksananya kegiatan pendukung pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | tahun | 1,527,019,539 | 365.00 | 95.07 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengairan (SiLPA Otsus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengairan (SiLPA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 1,690,567,900 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengairan (SiLPA Otsus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengairan (SiLPA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengairan (SiLPA Otsus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Infrastruktur Pengairan (SiLPA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Tampungan Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | % | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 100.74 | 34.93 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | ST | SR | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya** | **%tase jaringan irigasi dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 54 | % | 240,703,889,437 | 71.43 | 60.19 | Dinas Pengairan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | Jumlah Dokumen yang direncanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | Dok | 1,396,400,012 | 2.33 | 27.87 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | jumlah irigasi yang memalhara/rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | KM | 51,434,503,470 | 100.00 | 86.73 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Terlaksananya bendung dan Bangunan/saluran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Panjang Jaringan Irigasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | tersedianya jaringan irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Tersedianya air untuk pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,542 | Ha | 78,392,112,037 | 84.94 | 91.88 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | terlaksananya kegiatan Peningkatan Fungsi jaringan yang telah dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Terlaksananya pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | bertambahnya panjang saluran irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Meningkatnya ketersediaan air untuk persawahan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan jaringan irigasi | Panjang Jaringan irigasi Aceh dalam kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #### | M | 109,480,873,918 | 74.71 | 57.15 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan jaringan irigasi | Tersedianya sumber air alternatif untuk mencegah kekeringan di areal persawahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan jaringan irigasi | Tersedianya Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan jaringan irigasi | Tersedianya air untuk saluran irigasi yang memadai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan jaringan irigasi | Terbangunan jaringan irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan jaringan irigasi | Terbangunnya Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 65.50 | 65.91 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | S | S | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air** | **Volume tampungan air** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Juta m3 | 78,251,203,860 | 50.00 | 72.01 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya | Terlaksananya Pembangunan fisik sarana prasarana irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | Unit | 74,817,225,876 | 100.00 | 70.23 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data hidrologi | Jumlah Pos Hidrologi yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | unit | 3,433,977,984 | 12.12 | 90.03 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 56.06 | 80.13 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | R | T | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Program Pengendalian Banjir** | **%tase luas genangan banjir luapan sungai dan pasang purnama** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | % | 479,320,823,688 | 100.74 | 88.07 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai | Areal permukiman dan fasilitas umum yang aman dari ancaman banjir sungai kewenanoan oemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,730 | Ha | 217,756,217,942 | 81.15 | 83.18 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan prasarana pengaman pantai | Luas kawasan yang diamankan dari banjir pasang purnama dan abrasi pantai kewenangan pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 | Ha | 261,564,605,746 | 16.92 | 92.60 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 49.04 | 87.89 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | SR | T | Dinas Pengairan Aceh |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **83.77** | **%** | **155,278,446,772** | **###** | **%** | **4,006,702,726** | **28.85** | **%** | **10,463,046,918** | **30.96** | **%** | **17,967,812,601** | **70.74** | **%** | **138,692,653,431** | **####** | **%** | **171,130,215,676** | **156.67** | **110.21** | **131** | **%** | **171,130,215,676** | **159.36** | **-** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota** | **Persentase Luas genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **40.68** | **%** | **155,278,446,772** | **###** | **%** | **4,006,702,726** | **22.47** | **%** | **10,463,046,918** | **48.64** | **%** | **17,967,812,601** | **88.25** | **%** | **138,692,653,431** | **####** | **%** | **171,130,215,676** | **394.64** | **-** | **161** | **%** | **171,130,215,676** | **412.09** | **-** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya | Jumlah dokumen yang direncanakan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya | 1 | Dokumen | 500,000,000 | - | Dok | - | 0 | Dok | 215,426,508 | 1 | Dok | 274,179,192 | 11 | Dok | 198,643,170 | 12 | Dok | 688,248,870 | sts | - | - | Dok | 733,363,064 | - | 50.58 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | 0 | Dok | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan | Jumlah dokumen yang direncanakan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 3 | Dok | 3,900,000,000 | 0 | Dok | 569,835,340 | 6 | Dok | 1,845,233,320 | 11 | Dok | 2,146,737,002 | 17 | Dok | 2,823,908,623 | 34 | Dok | 7,385,714,285 | 1,133.33 | - | - | Dok | 1,855,706,000 | - | 52.27 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS. Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS. Kewenangan Provinsi yang disusun | Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya | 0 | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | 0 | | Unit | | | | | - | Unit | - | tdr | - | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya | Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air lainnya yang terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan Unit Air Baku | Jumlah Air Baku yang terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 2,592,834,175 | - | - | - | Unit | 399,000,000 | - | 79.80 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Pembangunan Unit Air Baku | 1 | Unit | 4,500,000,000 | | Unit | 998,105,100 | | Unit | 1,594,729,075 | | | | 0 | Unit | 734,182,825 | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang dibangun | Pembangunan Tanggul Sungai | 0.15 | Km | 900,000,000 | - | Km | 20,895,500 | 0 | Km | 2,336,574,500 | 1.02 | Km | 3,105,534,774 | 4.18 | Km | 5,160,283,931 | 5 | Km | 10,623,288,705 | 3,466.67 | - | - | Km | 3,021,989,000 | - | 64.30 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang terbangun | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 2 | Km | 57,883,529,017 | - | Km | - | - | Km | 21,454,680 | 2.36 | Km | 3,668,736,100 | 0.95 | Km | 63,038,278,206 | 3 | Km | 66,728,468,986 | 165.50 | 115.28 | - | Km | 81,488,616,526 | - | 93.98 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Terbayarnya hutang Pemerintah Aceh | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1.1 | Km | 80,219,917,755 | - | Km | 1,741,984,500 | 0 | Km | 3412048160 | 0.3825 | Km | 6,247,830,390 | 0.1 | % | 59,548,600,006 | 0 | Km | 70,950,463,056 | 43.86 | 88.44 | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | Km | 33,085,870,100 | - | 345.11 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya | Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air lainnya yang direhabilitasi | Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya | 1 | Unit | 450,000,000 | | Unit | 375,000,000 | | | | | | | 1 | - | 1,089,504,000 | 1 | Unit | 1,464,504,000 | 100.00 | - | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Rehabilitasi Unit Air Baku | 1 | Unit | 450,000,000 | | | | 1 | Unit | 108,277,200 | | | | 0 | Unit | 284,267,400 | | | | | | | | | | | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi Tanggul Sungai | Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 0.67 | Km | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | Km | - | - | - | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | 0.45 | Km | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | Km | 615,582,710 | - | 123.12 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai | Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi/didipelihara | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1 | Km | 450,000,000 | - | Km | 118,166,700 | 0 | Km | 0 | 0.443 | Km | 1,047,540,200 | 2.41 | % | 2,572,966,600 | 3 | Km | 3,738,673,500 | 285.30 | - | - | Km | 16,700,383,100 | - | 96.81 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 3 | Unit | 900,000,000 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 33,653,000 | | Unit | 308,762,000 | 4 | Unit | 551,789,780 | 4 | Unit | 894,204,780 | 133.33 | 99.36 | - | - | - | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 5 | Km | 1,000,000,000 | 0 | Km | 0 | 0 | Km | 249,671,362 | 1 | Km | 372,962,443 | 0.86 | Km | 803,457,326 | 2 | Km | 1,426,091,131 | 37.20 | #REF! | 2 | Km | 1,426,091,131 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Unit Pos Hidrologi dan Kualitas air WS Kewenangan yang dikelola | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | 4 | WS | 1,000,000,000 | 0 | WS | 151,362,886 | 0 | WS | 198,398,380 | | WS | 106,901,300 | 4 | WS | 448,970,644 | 4 | WS | 905,633,210 | 100.00 | 90.56 | sts | sts | 905,633,210 | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan Pengelolaan SDA | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 6 | Kab/ Kota | 700,000,000 | 0 | Kab/ Kota | 0 | 0 | Kab/ Kota | 38,355,550 | 0 | Kab/Kota | 45,992,750 | 3 | Kab/ Kota | 134,076,000 | 3 | Kab/Kota | 218,424,300 | 50.00 | 31.20 | sts | sts | 218,424,300 | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek0 Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | Terlaksananya kegiatan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | 30 | Dok | 300,000,000 | 5 | Dok | 5,632,500 | 0 | Dok | 38,031,690 | 0 | Dok | 61,276,500 | 16 | Dok | 116,285,800 | 21 | Dok | 221,226,490 | 70.00 | - | sts | sts | 377,239,447 | sts | 238.16 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan SDA Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 4 | Kab/ Kota | 2,125,000,000 | 0 | Kab/ Kota | 25,720,200 | 0 | Kab/ Kota | 371,193,493 | 1 | Kab/Kota | 581,359,950 | 3 | Kab/Kota | 1,187,439,120 | 4 | Kab/Kota | 2,165,712,763 | 100.00 | 101.92 | sts | sts | 5,186,054,140 | sts | 134.95 | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Aceh dalam kondisi baik** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **83.77** | **%** | **128,260,617,607** | **###** | **%** | **10,877,486,723** | **32.04** | **%** | **30,115,833,469** | **22.13** | **%** | **27,054,656,451** | **49.6** | **%** | **63,818,707,149** | **104** | **%** | **131,866,683,792** | **124.41** | **-** | **sts** | **sts** | **131,866,683,792** | **sts** | **115.92** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | **-** | **-** | **92,037,842,824** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Pengairan Aceh** |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 5 | Dok | 3,200,000,000 | 0 | Dok | 4,609,075 | 2 | Dok | 1,172,286,664 | 7 | Dok | 1,556,720,280 | 0 | Dok | 1,439,907,181 | 9 | Dok | 4,173,523,200 | 180.00 | - | sts | sts | 4,173,523,200 | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang irigasi yang dibangun | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 19 | Km | 89,680,249,194 | 0 | Km | 9,780,957,604 | - | Km | 14,955,084,127 | 6.535 | Km | 7,513,759,860 | 12.46 | Km | 50,980,448,303 | 19 | Km | 83,230,249,894 | 99.97 | 92.81 | sts | sts | 118,976,749,633 | sts | 140.39 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung yang dibangun | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | 0 | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | | | | | - | Unit | - | tdr | - | sts | sts | 5,676,498,000 | sts | 80.98 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | Jumlah unit irigasi yang dibangun | Pembangunan Bendung Irigasi | 0 | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | | | | | - | Unit | - | tdr | - | sts | sts | 1,107,645,000 | sts | 73.84 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang peningkatan jaringan irigasi yang dibangun | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.6 | Km | 675,000,000 | - | Km | - | 0 | Km | 5,657,520,612 | 2.4 | Km | 8,945,658,193 | 0.2 | Km | 4,196,821,206 | 3 | Km | 18,800,000,011 | 100.00 | 2,785.19 | sts | sts | 29,306,400,196 | sts | 488.44 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Peningkatan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi Permukaan yang ditingkatkan | Peningkatan Bendung Irigasi | 1 | Unit | 4,750,000,000 | - | Unit | 5,401,595 | 0 | Unit | 1,112,553,733 | 1 | Unit | 1,576,517,200 | 0 | Unit | 1,207,239,260 | 1 | Unit | 3,901,711,788 | 100.00 | - | sts | sts | 3,901,711,788 | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 3.1 | Km | 15,305,368,413 | - | Km | 890,096,547 | 0 | Km | 3,416,037,468 | 2.144 | Km | 964,000,740 | 0.96 | Km | 1,358,182,220 | 3 | Km | 6,628,316,975 | 100.13 | 43.31 | sts | sts | 33,597,707,375 | sts | 2,239.85 | Dinas Pengairan Aceh |
| | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 1 | Unit | 900,000,000 | | Unit | - | 1 | Unit | 215971500 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | 567,898,500 | 1 | Unit | 783,870,000 | 100.00 | 87.10 | sts | sts | 783,870,000 | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | | 16=14+8 | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang direhabilitasi | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | 0 | Km | - | - | Km | - | 0 | Km | 0 | | Km | | | | | - | Km | - | tdr | - | sts | sts | - | sts | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 573 | Km | 13,200,000,000 | - | Km | 135,369,870 | - | Km | 3,413,045,052 | 409 | Km | 5,887,889,636 | 164 | Km | 3,967,336,965 | 573 | Km | 13,403,641,523 | 100.00 | 101.54 | sts | sts | 25,435,051,023 | sts | 195.65 | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 3 | Unit | 300,000,000 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 117,057,773 | 3 | Unit | 145,627,922 | 2 | Unit | 17,137,502 | 5 | Unit | 279,823,197 | 166.67 | 93.27 | 5 | Unit | 279,823,197 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 0 | Km | 0 | 0 | Km | 0 | 0 | Km | 0 | | Km | | | | | - | Km | - | tdr | - | - | Km | - | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Operasional Unit Pengelola Irigasi | 5 | Unit | 250,000,000 | 1 | Unit | 61,052,032 | 0 | Unit | 56,276,540 | 2 | Unit | 68,186,400 | 2 | Unit | 83,736,012 | 5 | Unit | 269,250,984 | 100.00 | - | 5 | Unit | 269,250,984 | tdr | tdr | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 4 | WS | 400,000,000 | 0 | WS | 0 | 0 | WS | 0 | 4 | WS | 396,296,220 | 0 | WS | - | | | | | | | | | | | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133.33 | 31.09 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Pengairan Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Pengairan Aceh |
| | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** | | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** | | | **769,181,752,945** | | | **6,033,725,639** | | | **#VALUE!** | | | **786,386,921,151** | | | **############** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **769,181,752,945** | | | **6,033,725,639** | | | **#VALUE!** | | | **786,386,921,151** | | | **############** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM** | | **BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM (1.03)** | | | **196,788,622,945** | | | **238,314,650** | | | **#VALUE!** | | | **84,408,573,669** | | | **242,216,804,472** | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **2000** | **Ha** | **9,288,622,945** | | **Ha** | **-** | | **Ha** | **1,749,800,615** | | **Ha** | **1,749,800,615** | | | **8,879,479,279** | - | Ha | **12,379,080,509** | **-** | **133.27** | - | Ha | 12,379,080,509 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** | **1** | **Tahun** | **9,288,622,945** | | **Tahun** | **-** | | **Tahun** | **1,749,800,615** | | **Tahun** | **1,749,800,615** | | | **8,879,479,279** | **-** | **Tahun** | **12,379,080,509** | **-** | **-** | **-** | **Tahun** | **12,379,080,509** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 1 | Dokumen | 9,084,567,400 | | Dokumen | | | Dokumen | 1,749,800,615 | - | Dokumen | 1,749,800,615 | - | Dokumen | 8,781,020,080 | - | Dokumen | 12,280,621,310 | - | - | - | Dokumen | 12,280,621,310 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota | 2 | Dok | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | 2/23 | Lemoga/Kabu | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | 1 | Dok | 204,055,545 | | | | | | | | | | - | Dokumen | 98,459,199 | - | - | 98,459,199 | sts | - | - | - | 98,459,199 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota | 1 | Unit Organisasi | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM AIR LIMBAH** | **2000** | **Ha** | **950,000,000** | | | | | | | | **Ha** | **300,451,985** | | **Ha** | **871,721,653** | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik Regional** | **1** | **Tahun** | **950,000,000** | | | | | | | | **Tahun** | **300,451,985** | | **Tahun** | **871,721,653** | | | | | | | | | | | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 | Dokumen | 750,000,000 | | | | | | | - | Dokumen | 141,441,417 | - | Dokumen | 707,207,085 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 | Kegiatan | 200,000,000 | | | | | | | - | Kegiatan | 159,010,568 | - | Kegiatan | 164,514,568 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE** | **2000** | **Ha** | **1,000,000,000** | | | | | | | | **Ha** | **195,351,731** | | **Ha** | **976,758,653** | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas** | **1** | **Tahun** | **1,000,000,000** | | | | | | | | **Tahun** | **195,351,731** | | **Tahun** | **976,758,653** | | | | | | | | | | | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 1 | Dokumen | 1,000,000,000 | | | | | | | - | Dokumen | 195,351,731 | - | Dokumen | 976,758,653 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ERR | ERR | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **2000** | **Ha** | **183,450,000,000** | | **Ha** | **238,314,650** | | **Ha** | **30,659,937,430** | | **Ha** | **77,843,113,422** | | **Ha** | **216,337,554,204** | - | Ha | **325,078,919,706** | **-** | **177.20** | - | Ha | 325,078,919,706 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** | **29/43** | **Unit/Unit** | **183,450,000,000** | | **Unit/Unit** | **238,314,650** | | **Unit/Unit** | **30,659,937,430** | | **Unit/Unit** | **77,843,113,422** | | **Unit/Unit** | **216,337,554,204** | **-** | **Unit/Unit** | **325,078,919,706** | **tdr** | **177.20** | **-** | **Unit/Unit** | **325,078,919,706** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 43 | Gedung | 171,850,000,000 | | Gedung | 238,314,650 | | Gedung | 27,579,618,430 | - | Gedung | 71,734,746,442 | - | Gedung | 215,860,934,234 | - | Gedung | 315,413,613,756 | - | 183.54 | - | Gedung | 315,413,613,756 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 1 | Unit | 11,000,000,000 | | | | | | 3,080,319,000 | - | Unit | 6,108,366,980 | - | Unit | 10,725,116,000 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 1 | Prasarana | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | 1 | Tahun | 500,000,000 | | | | | | | | | | - | Tahun | 476,619,970 | - | - | 476,619,970 | sts | - | - | - | 476,619,970 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara | 1 | Tahun | 100,000,000 | | | | | | | | | | - | Tahun | 72,000,000 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 120.25 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ERR | ST | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **2000** | **Ha** | **2,100,000,000** | | **Ha** | **-** | | **Ha** | **1199251555,17** | | **Ha** | **4,319,855,917** | | **Ha** | **15,151,290,684** | - | Ha | #VALUE! | **-** | **#VALUE!** | - | Ha | #VALUE! | tdr | #VALUE! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **1** | **Kawasan** | **2,100,000,000** | | **Kawasan** | **-** | | **Kawasan** | **1199251555,17** | | **Kawasan** | **4,319,855,917** | | **Kawasan** | **15,151,290,684** | **-** | **Kawasan** | **#VALUE!** | **-** | **#VALUE!** | **-** | **Kawasan** | **#VALUE!** | **tdr** | **#VALUE!** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 1 | Kawasan | 2,100,000,000 | | Kawasan | | | Kawasan | 1199251555,17 | - | Kawasan | 4,319,855,917 | - | Kawasan | 15,151,290,684 | - | Kawasan | #VALUE! | - | #VALUE! | - | Kawasan | #VALUE! | tdr | #VALUE! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (1.04)** | | | **572,393,130,000** | | | **6,033,725,639** | | | **#VALUE!** | | | **786,386,921,151** | | | **############** | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | | **#VALUE!** | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | **41,707,300,000** | | | **4,665,175,237** | | | **13,025,309,700** | | | **22,867,308,270** | | | **37,614,535,688** | **-** | **-** | **78,172,328,895** | | **187.43** | **-** | **-** | **118,421,265,509** | **tdr** | **160.72** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **103** | **%** | **31,009,383,775** | **103.40** | **50.17** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **63** | **%** | **7,958,859,750** | **63.00** | **86.40** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **100** | **%** | **641,115,300** | **100.00** | **31.44** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **96** | **%** | **639,577,789** | **95.73** | **103.46** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | | **100** | **Persen** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12** | **Dokumen** | **1,600,000,000** | | **Dokumen** | **-** | | **Dokumen** | **153,951,793** | | **Dokumen** | **473,006,464** | | **Dokumen** | **1,630,107,968** | **-** | **Dokumen** | **2,257,066,225** | **-** | | **-** | **Dokumen** | **2,257,066,225** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | Dokumen | 100,000,000 | | Dokumen | | | Dokumen | **14,900,793** | - | Dokumen | 14,900,793 | - | Dokumen | 99,150,793 | - | Dokumen | 128,952,379 | | | | | | | | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6 | Dokumen | 700,000,000 | | Dokumen | | | Dokumen | 21550000 | 1 | Dokumen | 126,778,085 | 1 | Dokumen | 693,509,151 | 2 | Dokumen | 841,837,236 | 33.33 | 120.26 | 2 | Dokumen | 841,837,236 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 | Dokumen | 800,000,000 | | Dokumen | | | Dokumen | 117,501,000 | - | Dokumen | 331,327,586 | - | Dokumen | 837,448,024 | - | Dokumen | 1,286,276,610 | - | 160.78 | - | Dokumen | 1,286,276,610 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1** | **Tahun** | **31,051,377,291** | | **Tahun** | **4,313,764,862** | | **Tahun** | **11,265,202,019** | | **Tahun** | **18,156,244,612** | | **Tahun** | **26,062,181,941** | **-** | **Tahun** | **59,797,393,434** | **-** | **192.58** | **-** | **Tahun** | **59,797,393,434** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Tahun | 21,775,124,949 | | Tahun | 3,310,810,612 | 0.5 | Tahun | 8,368,579,769 | 0.5 | Tahun | 13,440,917,987 | 0.5 | Tahun | 17,981,263,062 | 2 | Tahun | 43,101,571,430 | 150.00 | 197.94 | 2 | Tahun | 43,101,571,430 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | Tahun | 9,276,252,342 | | Tahun | 1,002,954,250 | 0.5 | Tahun | 2,896,622,250 | 0.5 | Tahun | 4,715,326,625 | 0.5 | Tahun | 8,080,918,879 | 2 | Tahun | 16,695,822,004 | 150.00 | - | 2 | Tahun | 16,695,822,004 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1** | **Tahun** | **195,500,625** | | **Tahun** | **-** | | **Tahun** | **5,300,000** | | **Tahun** | **119,550,450** | | **Tahun** | **86,500,000** | **-** | **Tahun** | **211,350,450** | **-** | **-** | **-** | **Tahun** | **211,350,450** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10 | Kali | 100,000,000 | | Kali | | 2 | Kali | 5,300,000 | 2 | Kali | 75,050,000 | 2 | Kali | 86,500,000 | 6 | Kali | 166,850,000 | 60.00 | - | 6 | Kali | 166,850,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undanga | 1 | Kegiatan | 95,500,625 | | | | | | | - | Kegiatan | 44500450 | - | Kegiatan | 89,900,150 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1** | **Tahun** | **2,760,000,000** | | **Tahun** | **158,551,493** | **0.5** | **Tahun** | **770,342,825** | **0.5** | **Tahun** | **1,958,360,611** | **0.5** | **Tahun** | **3,083,510,696** | **2** | **Tahun** | **5,970,765,625** | **150.00** | **-** | **2** | **Tahun** | **5,970,765,625** | **tdr** | **83.73** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis instalasi listrik/penerangan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Tahun | 125,000,000 | | Tahun | | 0.5 | | 41362618 | 0.5 | Tahun | 85,654,060 | 0.5 | Tahun | 124,775,233 | 2 | Tahun | 251,791,911 | 150.00 | - | sts | sts | 692,674,876 | sts | 122.24 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Tahun | 700,000,000 | | Tahun | | | | | - | Tahun | 629021460 | - | Tahun | 755,297,280 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | Tahun | 500,000,000 | | Tahun | 84506954 | 0.5 | Tahun | 169,009,004 | 0.5 | Tahun | 244,009,004 | 0.5 | Tahun | 443,834,218 | 2 | Tahun | 941,359,180 | 150.00 | 188.27 | 2 | Tahun | 941,359,180 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | | 5000 | Kotak | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah dokumen yang digandakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 | Tahun | 200,000,000 | | Tahun | | 0.5 | Tahun | 66,728,255 | 0.5 | Tahun | 136,349,231 | 0.5 | Tahun | 199,792,169 | 2 | Tahun | 402,869,655 | 150.00 | 201.43 | sts | sts | 1,100,772,636 | sts | 240.05 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | Tahun | 35,000,000 | | Tahun | | 0.5 | Tahun | 2,640,000 | 0.5 | Tahun | 8,490,000 | 0.5 | Tahun | 14,970,000 | 2 | Tahun | 26,100,000 | 150.00 | 74.57 | sts | sts | 127,185,200 | sts | 102.32 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Tahun | 1,200,000,000 | | Tahun | 74,044,539 | 0.5 | Tahun | 490,602,948 | 0.5 | Tahun | 854,836,856 | 0.5 | Tahun | 1,544,841,796 | 2 | Tahun | 2,964,326,139 | 150.00 | 247.03 | sts | sts | 6,767,162,622 | sts | 113.13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1** | **Tahun** | **950,000,000** | | | | | | | | **Tahun** | **162,337,500** | | **Tahun** | **1,016,593,500** | | | | | | | | | | | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | Pengadaan Mebel | 1 | Tahun | 350,000,000 | | | | | | | | | | - | Tahun | 342,329,550 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Tahun | 600,000,000 | | | | | | | | | 162,337,500 | - | Tahun | 674,263,950 | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1** | **Tahun** | **1,430,422,084** | | **Tahun** | **170,593,752** | | **Tahun** | **423,785,445** | | **Tahun** | **676,795,793** | | **Tahun** | **986,149,208** | **-** | **Tahun** | **2,257,324,198** | **-** | **157.81** | **-** | **Tahun** | **2,257,324,198** | **tdr** | **54.22** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat dan Materai | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Tahun | 30,690,000 | | Tahun | | 0.5 | Tahun | 4,950,000 | | lembar | 12,450,000 | 0.5 | Tahun | 30,687,300 | 1 | Tahun | 48,087,300 | 100.00 | 156.69 | sts | sts | 100,227,300 | sts | 79.80 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah tagihan telepon, air, dan listrik perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Tahun | 1,019,732,084 | | Tahun | 170,593,752 | 0.5 | Tahun | 319,335,445 | | rek | 564,845,793 | 0.5 | Tahun | 756,461,908 | 1 | Tahun | 1,811,236,898 | 100.00 | 177.62 | sts | sts | 5,042,621,884 | sts | 124.89 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | Tahun | 380,000,000 | | Tahun | | 0.5 | Tahun | 99,500,000 | 19 | - | 99,500,000 | 0.5 | Tahun | 199,000,000 | 20 | Tahun | 398,000,000 | 2,000.00 | 104.74 | 20 | Tahun | 398,000,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1** | **Tahun** | **3,720,000,000** | | **Tahun** | **22,265,130** | | **Tahun** | **406,727,618** | | **Tahun** | **1,321,012,840** | | **Tahun** | **4,749,492,375** | **-** | **Tahun** | **6,499,497,963** | **-** | **174.72** | **-** | **Tahun** | **6,499,497,963** | **tdr** | **60.43** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | Tahun | 1,970,000,000 | | Tahun | 22,265,130 | 0.5 | Tahun | 319,916,128 | | | 623,789,690 | 0.5 | Tahun | 1,419,046,055 | 1 | Tahun | 2,385,017,003 | 100.00 | 121.07 | sts | sts | 7,198,344,566 | sts | 112.33 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | Tahun | 250,000,000 | | Tahun | | 0.5 | Tahun | 86,811,490 | | | 117,842,650 | 0.5 | Tahun | 213,632,320 | 1 | Tahun | 418,286,460 | 100.00 | - | 1 | Tahun | 418,286,460 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | Tahun | 1,500,000,000 | | Tahun | | | Tahun | | | | 579,380,500 | - | Tahun | 3,116,814,000 | - | Tahun | 3,696,194,500 | - | 246.41 | sts | sts | 9,557,372,000 | sts | 219.83 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 368,095,500 | sts | 47.40 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 456,640,717 | sts | 57.34 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | jenis | 1,463,731,820 | sts | 64.15 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 147,470,000 | sts | 37.15 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pengelola Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 20,933,762,770 | sts | 52.52 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | unit | 2,776,837,750 | sts | 142.40 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pengadaan Mebeleur | Jenis Alat Rumah Tangga Lainnya, Meja/Kursi, Kerja & Lemari/Arsip Pelabat Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 619,208,500 | sts | 58.21 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pengadaan Komputer | Jumlah Komputer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | unit | 827,909,000 | sts | 97.40 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir Dan Halaman Kantor | Jumlah Paket Pemeliharaan Halaman Kantor Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 372,577,000 | sts | 37.26 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 641,115,300 | sts | 124.45 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Peserta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 96,373,973 | sts | 81.55 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Jumlah Peserta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 543,203,816 | sts | 108.64 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 167.88 | 120.09 | | | | #DIV/0! | 96.58 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | #DIV/0! | ST | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **340,903,200,000** | | | **568,649,900** | | | **147,189,841,192** | | | **503,508,408,006** | | | **797,732,087,494** | **-** | **-** | **1,448,998,986,592** | **tdr** | **425.05** | **-** | **-** | **2,823,653,558,634** | **tdr** | **114.24** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pengembangan Perumahan** | **Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **4,243** | **Unit** | **725,944,254,686** | **14.14** | **29.78** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman** | **Luas Permukiman yang Tertangani meliputi sarana air bersih, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, gedung strategis provinsi dan kawasan kumuh** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **352** | **Ha** | **648,710,317,356** | **17.58** | **1,908.83** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | | **68311** | **Unit** | | | **Unit** | | | **Unit** | | | | | | | | - | Unit | - | **-** | **tdr** | - | Unit | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha** | **4500** | **Unit** | **340,903,200,000** | | **Unit** | **568,649,900** | | **Unit** | **147,189,841,192** | | | **503,508,408,006** | | | **797,732,087,494** | **-** | **Unit** | **1,448,998,986,592** | **-** | **-** | **-** | **Unit** | **1,448,998,986,592** | **tdr** | **14,088.38** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | Pengembangan rumah sehat sederhana | Jumlah rumah layak huni yang terbangun | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan | 3256 | Unit | 340,903,200,000 | | | 568,649,900 | 7066 | Unit | 147,189,841,192 | | | 503,508,408,006 | 7066 | Unit | 797,732,087,494 | #### | - | 1,448,998,986,592 | sts | 425.05 | 14,132 | - | 1,448,998,986,592 | sts | 14,088.38 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum | Jumlah Peserta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | peserta | 330,553,686 | 100.00 | 16.53 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembinaan Teknik Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | jenis | 183,461,180 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | Jumlah laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 2,480,420,867 | sts | 310.05 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tahun Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 2,261,991,215 | sts | 46.31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan jalan dan jembatan kawasan permukiman | Panjang Jalan dan jembatan yang terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | kwsn | 118,916,683,272 | 623.08 | 1,189.17 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | "Pembangunan WTP dengan kapasitas 100L/dtk dan jaringan Transmisi ke Jadong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | unit | 2,201,267,500 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Sabang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | unit | 1,864,889,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Timur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 m sa | km, unit | 10,865,212,154 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Bener Meriah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4110 m j | unit | 1,471,150,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Barat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1127,3 m | unit | 17,823,817,100 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pemeliharaan Payung Elektrik dan Pengadaan Automatic Volt Regulator (AVR) Kaoasitas 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | unit | - | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Barat Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | km, unit | 4,740,748,500 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4110 m j | km, unit | 28,182,151,814 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Jaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1127,3 m | unit | 5,326,331,650 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1127,3 m | km, unit | 6,724,529,900 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Singkil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | km, unit | 1,136,002,500 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Tamiang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | unit | 12,255,507,500 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Tengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2550 m j | unit | 4,046,179,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Tenggara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | unit | 5,551,557,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2766 m j | km, unit | 25,093,208,069 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Bireuen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15536,8 | km, unit | 29,402,459,800 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Gayo Lues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 sal. | unit | 3,867,326,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Nagan Raya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 m j | km, unit | 16,116,787,700 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Pidie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 m s | km, unit | 17,509,630,800 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Pidie Jaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2550 m j | km, unit | 16,143,696,500 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Simeulue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3378 m d | km, unit | 1,005,932,500 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sal. Drain | km, unit | 21,076,533,634 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Langsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1752 m j | unit | 14,473,767,980 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Lhoksemawe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1308, 1 u | M, km, u | 7,340,707,940 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Bebesen Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2550 m j | M, km, u | 3,315,946,010 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Darul Imarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3378 m d | m | 1,012,863,577 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Linge Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sal. Drain | km, unit | 1,196,196,072 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Lueng Bata Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1752 m j | unit | 4,656,034,000 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Syiah Kuala Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1308, 1 u | unit | 3,236,122,313 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Subulussalam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1752 m j | M, unit | 2,476,832,781 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Perkotaan Beureunuen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1308, 1 u | M | 1,747,571,885 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Perkotaan Lut Tawar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1308, 1 u | unit | 3,245,825,230 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Migas Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,445 | m | 3,168,561,362 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM) Kabupaten/kota (Migas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,093 | km | 3,228,857,756 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana gedung | Jumlah sarana prasarana gedung yang terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Unit | 234,817,207,445 | sts | 1,467.61 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | 425.05 | | | | 361.54 | 2,853.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ST | | | | ST | ST | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **2000** | **Ha** | **189,782,630,000** | | **Ha** | **561,585,852** | | **Ha** | **#VALUE!** | | **Ha** | **176,098,434,921** | | **Ha** | **597,378,935,737** | **-** | **Ha** | **#VALUE!** | **-** | **#VALUE!** | **-** | **Ha** | **#VALUE!** | **tdr** | **#VALUE!** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |
| | | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman** | **23** | **Kab/Kota** | **189,782,630,000** | | **Kab/Kota** | **561,585,852** | | **Kab/Kota** | **#VALUE!** | | **Kab/Kota** | **176,098,434,921** | | **Kab/Kota** | **597,378,935,737** | **-** | **Kab/Kota** | **#VALUE!** | **-** | **#VALUE!** | **-** | **Kab/Kota** | **#VALUE!** | **tdr** | **#VALUE!** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 5 | Dokumen | 134,000,000 | | | 103,412,232 | | | | | | 103,412,232 | - | Dokumen | 1,340,952,630 | - | - | 1,444,364,862 | sts | - | - | - | 1,444,364,862 | tdr | tdr | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan Prasarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Umum | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 23 | Kab/Kota | 189,648,630,000 | | Kab/Kota | 561,585,852 | | Kab/Kota | 38501873042,5 | | | 175,995,022,689 | - | Kab/Kota | 596,037,983,107 | - | Kab/Kota | #VALUE! | - | #VALUE! | sts | sts | #VALUE! | sts | #VALUE! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | #VALUE! | | | | #DIV/0! | #VALUE! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ERR | #VALUE! | | | | #DIV/0! | #VALUE! | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi** | **%tase penyedia jasa kontruksi yang tersertifikasi (SKA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **-** | **%** | **197,300,024** | **sts** | **25.82** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah | Jumlah Peserta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | Peserta | 197,300,024 | 28.57 | 25.82 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 28.57 | 25.82 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | SR | SR | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong** | **%tase Panjang drainase dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **482** | **km** | **64,372,827,094** | **42.08** | **94.59** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | panjang saluran drainase/gorong-gorong perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 64,372,827,094 | sts | 94.59 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | 94.59 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | ST | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** | **%tase penduduk berakses air minum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **-** | % | 125,991,537,706 | sts | 104.92 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah | Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | unit | 3,455,803,000 | sts | 34.27 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum | Jumlah Peserta Pembinaan Teknik Air Minum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | peserta | 291,036,354 | 200.00 | 5.29 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Panjang jaringan distribusi air bersih yang terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 111,369,474,025 | sts | 117.23 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah peralatan pendukung dan bangunan pengolahan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | unit | 10,875,224,327 | sts | 114.48 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 200.00 | 67.82 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | ST | S | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** | **Proporsi Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | - | % | 47,623,908,074 | - | 80.70 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | Jumlah produk perencanaan pengembangan kawasan wilayah strategis dan cepat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | lap | 4,607,615,913 | sts | 45.91 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur | Jumlah infrastruktur yang tertangani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | kwsn | 42,260,550,946 | 40.00 | 88.21 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Monitoring dan evaluasi pelaporan | Jumlah produk monitoring dan evaluasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | lap | 755,741,215 | sts | 70.73 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | 40.00 | 68.28 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | SR | S | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan** | **Rasio pemukiman layak huni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | - | Rasio Ind | 240,411,309,632 | sts | 90.95 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | Panjang pembangunan jalan perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | km | 39,264,501,606 | sts | 39.26 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana gedung | Jumlah sarana Gedung (Seni Budaya, perkantoran/fasilitas umum) yang terbangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | unit | 201,146,808,026 | sts | 122.40 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | 80.83 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | #DIV/0! | T | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
| | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** | | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** | | | **42,740,538,508** | | | **7,417,529,157** | | | **10,464,667,251** | | | **4,439,607,085** | | | **1,201,356,445** | | | **23,523,159,938** | | **55.04** | | | **208,350,455,506** | | **117.48** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **42,740,538,508** | | | **7,417,529,157** | | | **10,464,667,251** | | | **4,439,607,085** | | | **1,201,356,445** | | | **23,523,159,938** | | **55.04** | | | **208,350,455,506** | | **117.48** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | **BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **42,740,538,508** | | | **7,417,529,157** | | | **10,464,667,251** | | | **4,439,607,085** | | | **1,201,356,445** | | | **23,523,159,938** | | **55.04** | | | **208,350,455,506** | | **117.48** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | **41,096,238,393** | | | **7,106,917,057** | | | **10,107,186,554** | | | **3,997,299,065** | | | **677,830,309** | - | - | **21,889,232,985** | **tdr** | **53.26** | - | - | 41,161,912,181 | tdr | 78.56 | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| 98 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | 100 | % | | | % | | | % | | | | | | | | - | % | - | - | | 33 | % | 8,570,028,178 | 33.33 | 41.66 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| 101 | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | | sts | sts | 130,920,000 | sts | 15.14 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| 102 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | | sts | sts | 1,999,186,194 | sts | 28.73 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| 103 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | | sts | sts | 8,563,384,824 | sts | 36.28 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| 104 | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan** | **%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | | sts | sts | 9,160,000 | sts | 2.29 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **11** | **Dokumen** | **144,255,490** | | **Dokumen** | **62,780,000** | | **Dokumen** | **48,381,850** | | | **18,410,000** | | | **13,145,350** | **-** | **Dokumen** | **142,717,200** | **-** | | **-** | **Dokumen** | **142,717,200** | **tdr** | **330.44** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | 16=14+8 | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun | Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | Dok | - | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | - | - | - | 43,190,000 | sts | 65.44 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 | Dokumen | 80,394,999 | 1 | Dokumen | 37,635,000 | | Dokumen | 30,175,050 | | Dokumen | 11,310,000 | | Dokumen | 1,250,000 | 1 | Dokumen | 80,370,050 | 100.00 | 99.97 | sts | sts | 107,456,050 | sts | 33.48 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 10 | Dokumen | 63,860,491 | 10 | Dokumen | 25,145,000 | | Dokumen | 18,206,800 | | Dokumen | 7,100,000 | | Dokumen | 11,895,350 | 10 | Dokumen | 62,347,150 | 100.00 | 97.63 | sts | sts | 71,507,150 | sts | 22.28 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **36** | **Dokumen** | **14,595,680,009** | | **Dokumen** | **2,800,161,797** | | **Dokumen** | **3,708,387,068** | | | **3,042,535,969** | | | **-** | **-** | **Dokumen** | **9,551,084,834** | **-** | **65.44** | **-** | **Dokumen** | **9,551,084,834** | **tdr** | **108.21** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | Honorarium PNS | Jumlah Orang yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 79 | org | 14,595,680,009 | 75 | orang | 2,800,161,797 | 76 | orang | 3,708,387,068 | 81 | orang | 3,042,535,969 | | | | 232 | orang | 9,551,084,834 | sts | 65.44 | 426 | orang | 46,507,921,093 | 591.67 | 469.17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | **-** | **-** | **-** | **tdr** | **tdr** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **79** | **Orang** | **249,989,405** | | **Orang** | **31,075,000** | | **Orang** | **75,607,277** | | | **35,370,000** | | | **93,217,100** | **-** | **Orang** | **235,269,377** | **-** | **-** | **-** | **Orang** | **235,269,377** | **tdr** | **23.73** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas harian PNS dan jumlah pakaian batik PNS | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 122 | Pasang | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 238,885,000 | sts | 7.12 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 24 | kali | 131,387,000 | 6 | kali | 31,075,000 | 13 | kali | 22,675,000 | | kali | | 5 | kali | 77,636,500 | 24 | kali | 131,386,500 | 100.00 | - | 24 | kali | 131,386,500 | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah peserta diklat profesional aparatur | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 43 | orang | 118,602,405 | | | | 15 | orang | 52,932,277 | 10 | orang | 35,370,000 | 10 | Orang | 15,580,600 | 35 | - | 103,882,877 | sts | 87.59 | sts | sts | 295,401,785 | sts | 27.13 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Qanun Syariat Islam dan Trantibum | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 449,472,286 | sts | 42.73 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pembinaan mental dan fisik aparatur | Jumlah personil yang mengikuti uji kesehatan /jasmani tenaga kontrak | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 1,358,195,000 | sts | 53.62 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **5** | **Kegiatan** | **836,436,276** | | **Kegiatan** | **240,663,435** | | **Kegiatan** | **178,120,232** | | | **368,469,347** | | | **144,195,047** | **-** | **Kegiatan** | **931,448,061** | **-** | **111.36** | **-** | **Kegiatan** | **931,448,061** | **tdr** | **62.76** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah item-item yang dibeli | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 40 | Item | 17,093,000 | | item | | 9 | item | 4,032,500 | 15 | item | 4,032,500 | 15 | item | 8,685,000 | 39 | item | 16,750,000 | 97.50 | 97.99 | 78 | item | 66,465,000 | 600.00 | 65.16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11 | item | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 2,071,895,302 | sts | 75.37 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang dibeli | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6 | item | 394,625,446 | 2 | item | 122,016,000 | 1 | item | 35,340,000 | 5 | item | 134,504,000 | 5 | item | 86,173,400 | 13 | item | 378,033,400 | 216.67 | - | 463 | item | 1,400,480,626 | 342.96 | 126.17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah frekuensi cetakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | item | 69,918,830 | 2 | item | 7,877,853 | 2 | item | 5,350,150 | 1 | item | 12,558,353 | 2 | item | 43,975,647 | 7 | item | 69,762,003 | 350.00 | 99.78 | sts | sts | 285,669,103 | sts | 72.32 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah frekuensi pembayaran surat kabar dan majalah | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3,360 | eks | 12,600,000 | 688 | eks | 2,064,000 | | eks | | 840 | eks | 4,388,000 | 470 | eks | 5,361,000 | 1,998 | eks | 11,813,000 | 59.46 | - | 7,370 | eks | 52,370,000 | 58.96 | 69.83 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah laporan dalam daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah SKPD | 35 | laporan | 342,199,000 | 17 | laporan | 108,705,582 | 17 | laporan | 133,397,582 | 10 | laporan | 212,986,494 | | | | 44 | laporan | 455,089,658 | 125.71 | 132.99 | 244 | laporan | 2,359,832,977 | 244.00 | 108.30 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10,047 | Kali | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan roda 4 yang dibeli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 17 | unit | 3,312,979,000 | 1,700.00 | 106.87 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **4** | **Jasa** | **24,235,897,560** | | **Jasa** | **3,879,651,254** | | **Jasa** | **5,867,719,660** | | | **161,312,449** | | | **114,242,420** | **-** | **Jasa** | **10,022,925,783** | **-** | **41.36** | **-** | **Jasa** | **10,022,925,783** | **tdr** | **471.09** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 99 | kali | 24,470,000 | 30 | kali | 3,450,000 | 20 | kali | 1,073,000 | 23 | kali | 3,576,700 | 20 | kali | 9,886,000 | 93 | kali | 17,985,700 | 93.94 | 73.50 | sts | sts | 51,479,717 | sts | 59.17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah telepon yang dibayarkan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36 | Struk | 420,550,464 | 12 | struk | 98,148,004 | 6 | struk | 90,984,471 | 9 | struk | 127,987,749 | 9 | struk | 69,215,036 | 36 | struk | 386,335,260 | 100.00 | - | sts | sts | 1,869,482,038 | sts | 83.50 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11 | Item | 82,262,053 | | item | | 6 | item | 11,874,711 | 6 | item | 29,748,000 | 6 | item | 35,141,384 | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Honorarium PNS | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | Bulan | 23,708,615,043 | 3 | bulan | 3,778,053,250 | 3 | bulan | 5,763,787,478 | 3 | bulan | | | | | 9 | bulan | 9,541,840,728 | 75.00 | 40.25 | sts | sts | 14,729,704,964 | sts | 137.66 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | Bulan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **165** | **Item** | **1,033,979,653** | | **Item** | **92,585,571** | | **Item** | **228,970,467** | | | **371,201,300** | | | **313,030,392** | **-** | **Item** | **1,005,787,730** | **-** | **97.27** | **-** | **Item** | **1,005,787,730** | **tdr** | **106.28** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | Pemelharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah servis mobil, | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21 | Unit | 287,611,000 | 21 | unit | 33,123,877 | 21 | unit | 80,988,376 | 21 | unit | 28,761,000 | 21 | unit | 140,626,217 | 84 | unit | 283,499,470 | 400.00 | 98.57 | 397 | unit | 2,539,924,117 | 79.40 | 69.00 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | 25 | Unit | 480,865,000 | 25 | unit | 27,632,694 | 25 | unit | 108,007,955 | 25 | unit | 266,735,000 | 25 | unit | 62,644,271 | 100 | unit | 465,019,920 | 400.00 | - | 100 | unit | 465,019,920 | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pembangunan gedung kantor | Jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 100 | % | 2,940,852,000 | 100.00 | 80.57 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pemelharaan rutin/berkala gedung kantor | Belanja Pemelharaan | Pemelharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 | Item | 160,490,000 | 1 | item | 20,509,000 | 1 | item | 33,476,500 | 1 | item | 57,040,000 | 2 | item | 47,142,200 | 5 | item | 158,167,700 | 250.00 | - | sts | sts | 1,875,470,449 | sts | 161.54 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pemelharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor | Pemelharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90 | Unit | 105,013,653 | 15 | unit | 11,320,000 | 90 | unit | 6,497,636 | 90 | unit | 18,665,300 | 90 | unit | 62,617,704 | 285 | unit | 99,100,640 | 316.67 | 94.37 | sts | sts | 390,646,835 | sts | 109.73 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | | | Vol | Satuan | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191.78 | 52.38 | | | | 288.14 | 95.85 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | R | | | | ST | ST | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **65** | **%** | **1,644,300,115** | | **%** | **310,612,100** | | **%** | **357,480,697** | | | **442,308,020** | | | **523,526,136** | - | % | **1,633,926,953** | **-** | **99.37** | sts | sts | 74,774,895,541 | tdr | 59.85 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| **99** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** | **%tase peningkatan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat** | | **65** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | - | % | - | **-** | **tdr** | 30 | % | 1,539,682,659 | 33.33 | 30.31 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| **100** | **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** | **%tase penurunan pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah, dan gangguan** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **tdr** | **tdr** | sts | sts | 71,601,285,929 | sts | 59.73 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **95** | **Persen** | **692,560,115** | | **Persen** | **115,120,000** | | **Persen** | **115,043,839** | | | **222,712,039** | | | **242,518,684** | **-** | **Persen** | **695,394,562** | **-** | **100.41** | **-** | **Persen** | **695,394,562** | **tdr** | **75.50** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah | Jumlah kegiatn KTR | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan dan Pengawalan | 16 | kali | 204,000,000 | 198 | kali | 97,520,000 | 15 | kali | 45,553,839 | 50 | kali | 42,763,839 | 42 | kali | 17,949,322 | 305 | kali | 203,787,000 | 1,906.25 | 99.90 | sts | sts | 745,121,021 | sts | 111.55 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini | Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan PULBAKET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 70 | Orang | 125,322,114 | 140.00 | 40.56 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Aset Milk Daerah | Jumlah sosialisasi/pengawasan dan penertiban aset milk daerah | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Ketib Perd dan Kawalan Massa | 20 | kali | 110,000,000 | | | | 6 | kali | 46,900,000 | 10 | kali | 68,054,000 | 20 | kali | 20,407,000 | 36 | - | 135,361,000 | sts | 123.06 | sts | sts | 209,897,400 | sts | 31.10 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kelaksaan | Jumlah peserta pertemuan | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat | 23 | orang | 40,000,000 | | | | | orang | | | orang | 1,034,900 | | orang | 37,607,000 | - | - | 38,641,900 | sts | 96.60 | sts | sts | 247,252,105 | sts | 64.22 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan anggota kesiap-siagaan linmas | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 40 | Orang | 120,000,000 | | | | 40 | orang | 13,140,000 | | orang | 13,140,000 | | orang | 88,700,182 | 40 | - | 114,980,182 | sts | - | sts | sts | 535,267,913 | sts | 74.86 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pembinaan Aparatur perlindungan masyarakat | Jumlah aparatur linmas yang mengikuti pembinaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 81 | Orang | 329,548,225 | 168.75 | 32.21 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan | Jumlah perangkat gampong yang mengikuti kerjasama dengan asarat keamanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 240 | Orang | 258,892,336 | 200.00 | 41.22 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Penyelenggaraan gampong sadar hukum | jumlah perangkat gampong dan aparatur linmas yang mengikuti pertemuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 255 | Orang | 260,326,447 | 98.08 | 45.27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan Pengendalian dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat | Jumlah pengendalian dan mobilisasi perlindungan masyarakat | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 221 | orang | 40,000,000 | 4 | kali | 17,600,000 | 9 | kali | 9,450,000 | 5 | kali | 4,725,000 | | kali | 8,138,000 | 18 | kali | 39,913,000 | sts | - | 24 | kali | 116,900,000 | 120.00 | 34.90 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan kapasitas Polisi PP | Jumlah peserta Pelathan pengembangan kelembagaan Satpol PP-WH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 251 | orang | 762,483,249 | tdr | 36.71 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan | Kerja sama antar Lembaga dan Kemtiraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 1 | kab/kota | 40,000,000 | | | | | | | | kab/kota | | 1 | kab/kota | 38,672,180 | 1 | - | 38,672,180 | sts | 96.68 | sts | sts | 971,295,342 | sts | 194.65 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Satpol PP-WH | jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Kelembagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | orang | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenterama n dan Ketertiban Umum | 4 | Item | 99,500,000 | | Item | | | Item | | 5 | Item | 92,994,300 | | Item | | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenterama n Masyarakat | 6 | SOP | 39,060,115 | | SOP | | | SOP | | | SOP | | 126 | SOP | 31,045,000 | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur** | **15** | **Kasus** | **129,740,000** | | **Kasus** | **11,880,000** | | **Kasus** | **17,800,000** | | | **34,081,000** | | | **65,421,000** | **-** | **Kasus** | **129,182,000** | **-** | **99.57** | **-** | **Kasus** | **129,182,000** | **tdr** | **0.67** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | Pengawasan pelaksanaan Perda, Qanun, Pergub, kepgub, ingub tentang trantibum | Jumlah tenaga kontrak yang tersedia; Jumlah pengawasan yang dilakukan | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 22 | Kali | 52,000,000 | | kali | | 4 | kali | 11,580,000 | 9 | kali | 22,406,000 | 9 | kali | 17,911,000 | 22 | kali | 51,897,000 | 100.00 | 99.80 | | kali | 65,133,875,301 | tdr | 57.71 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan Pengawasan dan Pengembangan SDM Petugas Tindak Internal | Jumlah pengawasan personil; Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM Petugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 6 | Kali | 9,000,000 | tdr | 1.28 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Inspeksi dan Investigasi Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah | Jumlah inspeksi dan investigasi | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 15 | Kasus | 77,740,000 | 12 | kasus | 11,880,000 | 14 | kasus | 6,220,000 | 8 | kasus | 11,675,000 | 19 | kasus | 47,510,000 | 53 | kasus | 77,285,000 | 353.33 | - | 53 | kasus | 188,877,150 | 176.67 | 112.43 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi** | **40** | **Orang** | **183,000,000** | | **Orang** | **6,222,000** | | **Orang** | **31,490,000** | | | **49,435,281** | | | **91,090,300** | - | Orang | 178,237,581 | **-** | **-** | - | Orang | 178,237,581 | tdr | 21.78 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan kapasitas PPNS | Jumlah PNS yang mengkuti diklat PPNS | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 25 | Orang | 59,000,000 | | orang | 3,172,000 | | orang | 17,090,000 | | orang | 13,125,281 | 25 | orang | 21,737,300 | 25 | orang | 55,124,581 | 100.00 | 93.43 | 41 | orang | 303,814,111 | tdr | 19.02 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota | Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | 39 | Berkas | 124,000,000 | 12 | berkas | 3,050,000 | 9 | berkas | 14,400,000 | 8 | berkas | 36,310,000 | 25 | berkas | 69,353,000 | 54 | berkas | 123,113,000 | 138.46 | - | sts | sts | 1,484,089,794 | sts | 40.32 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-Kab/kota | Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 17 | kab/kota | 176,013,400 | 73.91 | 43.25 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** | **95** | **Persen** | **639,000,000** | | **Persen** | **177,390,100** | | **Persen** | **193,146,858** | | | **136,079,700** | | | **124,496,152** | **-** | **Persen** | **631,112,810** | **-** | **-** | **-** | **Persen** | **631,112,810** | **tdr** | **38.69** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat islam | 20 | orang | 40,000,000 | 20 | orang | 15,685,000 | | orang | 24,315,000 | | orang | 6,410,000 | | | | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | | 16=14+8 | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah | Jumlah operasi gabungan | Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | 40 | kali | 125,000,000 | 11 | kali | 31,916,100 | 26 | kali | 59,149,300 | 4 | kali | 15,270,000 | 157 | kali | 18,601,100 | 198 | kali | 124,936,500 | 495.00 | 99.95 | sts | sts | 1,473,185,626 | sts | 41.90 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Pengawasan terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | 2 | kali | 44,000,000 | | kali | | 1 | kali | 25,758,300 | 1 | kali | 14,655,200 | | kali | | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang Undangan Syariat Islam | 350 | orang | 50,000,000 | 1 | kab/kota | 31,075,000 | | kab/kota | 18,027,700 | kab/kota | | | | kab/kota | 630,300 | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Konsultasi, Informasi dan Instruksi terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | 15 | Kab/Kota | 50,000,000 | 2 | kab/kota | 10,340,000 | 11 | kab/kota | 32,204,800 | 1 | kab/kota | 4,245,000 | 1 | kab/kota | 3,140,000 | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se- kab/kota dalam wilayah Aceh | Jumlah kegiatan sosialisasi Satpol PP dan WH (HUT Satpol PP-WH Aceh) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 3 | keg | 1,021,589,388 | 300.00 | 38.95 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Monitoring kegiatan Pol PP se-kab/kota | Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 23 | kab/kota | 287,201,812 | 100.00 | 57.90 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kab/kota | Jumlah peserta rakor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 96 | Orang | 351,423,266 | 200.00 | 35.90 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan penditikan dan pelatihan syariat Islam bagi aparatur | Jumlah peserta yang mengkuti Bimtek Qanun Jinayah | Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota | 35 | orang | 80,000,000 | 35 | orang | 67,714,000 | | orang | | | orang | 6,930,000 | | orang | | 35 | orang | 74,644,000 | sts | 93.31 | 185 | orang | 567,514,579 | 385.42 | 55.15 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Pelaksanaan Eksekusi bagi pelanggar qanun | Jumlah eksekusi terhadap pelanggar qanun | Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | 2 | Kali | 50,000,000 | | kali | | | kali | 4,158,058 | 1 | kali | 4,130,000 | | kali | 40,424,942 | 1 | kali | 48,713,000 | 50.00 | 97.43 | 49 | kali | 166,718,560 | 700.00 | 35.55 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | 60 | Orang | 40,000,000 | | orang | | | orang | 8,833,700 | 15 | orang | 12,304,500 | | orang | 18,294,720 | 15 | orang | 39,432,920 | 25.00 | - | sts | sts | 39,432,920 | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | 30 | Orang | 40,000,000 | | | 420,000 | | orang | | 30 | orang | 31,145,000 | | orang | 7,030,000 | 30 | - | 38,595,000 | sts | 96.49 | 30 | - | 38,595,000 | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam | jumlah peserta pertemuan | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 210,388,686 | sts | 36.85 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Peningkatan Kapasitas Layanan Pengaduan Masyarakat | Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima; jumlah tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat | Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi | 12 | bulan | 80,000,000 | 3 | bulan | 20,240,000 | 3 | bulan | 20,700,000 | 3 | bulan | 19,800,000 | 3 | bulan | 18,799,000 | 12 | bulan | 79,539,000 | 100.00 | - | sts | sts | 148,619,000 | sts | 24.57 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | 40 | Orang | 40,000,000 | | orang | | | | | 20 | orang | 21,190,000 | | orang | 17,576,090 | | | | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan qanun syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 89 | Orang | 170,333,508 | 178.00 | 28.34 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326.80 | 58.63 | | | | 189.39 | 47.73 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | R | | | | ST | SR | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh |
| | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** | | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** | | | **60,919,067,298** | | | **5,973,826,986** | | | **13,318,107,207** | | | **13,186,393,396** | | | **28,857,046,855** | | | **60,869,092,408** | | **99.92** | | | **349,090,402,422** | | **65.64** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **60,919,067,298** | | | **5,973,826,986** | | | **13,318,107,207** | | | **13,186,393,396** | | | **28,857,046,855** | | | **60,869,092,408** | | **99.92** | | | **349,090,402,422** | | **65.64** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **BIDANG KEBENCANAAN** | | **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **60,919,067,298** | | | **5,973,826,986** | | | **13,318,107,207** | | | **13,186,393,396** | | | **28,857,046,855** | | | **60,869,092,408** | | **99.92** | | | **349,090,402,422** | | **65.64** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | **16,706,446,958** | | | **2,233,216,566** | | | **3,607,026,806** | | | **4,066,038,859** | | | **6,851,953,160** | | | **16,758,235,391** | tdr | **100.31** | - | - | 16,758,235,391 | sts | 492.22 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah** | | 100 | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | - | % | | **-** | **tdr** | 74 | % | 15,775,100,753 | 73.53 | 45.77 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai** | | 100 | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | - | % | - | **-** | **tdr** | 99 | % | 11,319,768,865 | 99.33 | 67.81 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara** | | 100 | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | - | % | - | **-** | **tdr** | sts | sts | - | sts | - | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur** | | 100 | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | - | % | - | **-** | **tdr** | 95 | % | 3,957,335,388 | 95.00 | 23.71 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | K | | | K | | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | | 100 | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | - | % | - | - | tdr | 63 | % | - | 62.50 | - | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Perencanaan , Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **256,113,270** | | **%** | **55,342,280** | | **%** | **32,712,000** | | | **75,815,515** | | | **91,888,500** | **-** | **%** | **255,758,295** | **-** | **-** | **-** | **%** | **255,758,295** | **tdr** | **tdr** | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5 | dokumen | 256,113,270 | 2 | Dok | 55,342,280 | 1 | Dok | 32,712,000 | 1 | Dok | 75,815,515 | 2 | Dok | 91,888,500 | 6 | Dok | 255,758,295 | sts | 99.86 | 6 | Dok | 255,758,295 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **53** | **orang** | **7,119,538,652** | | **orang** | **1,215,751,764** | | **orang** | **1,823,783,457** | | | **1,794,351,678** | | | **1,871,774,750** | **-** | **orang** | **6,705,661,649** | **-** | **94.19** | **-** | **orang** | **6,705,661,649** | **tdr** | **tdr** | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 53 | orang | 6,978,802,652 | 3 | Bulan | 1,215,751,764 | 3 | Bulan | 1,773,972,457 | 3 | Bulan | 1,782,780,678 | 3 | Bulan | 1,792,647,217 | 12 | Bulan | 6,565,152,116 | sts | 94.07 | 12 | Bulan | 6,565,152,116 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 | bulan | 140,736,000 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 49,811,000 | 3 | Bulan | 11,571,000 | 3 | Bulan | 79,127,533 | 12 | Bulan | 140,509,533 | 100.00 | 99.84 | 12 | Bulan | 140,509,533 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **13** | **Kegiatan** | **2,102,675,656** | | **Kegiatan** | **424,905,450** | | **Kegiatan** | **561,124,979** | | | **686,677,782** | | | **290,522,379** | **-** | **egiatan** | **1,963,230,590** | **-** | **-** | **-** | **:egiatan** | **1,963,230,590** | **tdr** | **27.03** | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Kebutuhan komponen listrik kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 522 | Buah | 68,952,688 | 200 | Buah | 16,772,800 | | Buah | | 50 | Buah | 20,082,120 | 240 | Buah | 31,758,210 | 490 | Buah | 68,613,130 | 93.87 | 99.51 | sts | sts | 241,634,277 | sts | 110.03 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah kebutuhan peralatan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36 | Jenis | 932,817,900 | 38 | Jenis | 343,112,000 | | Jenis | 228,438,000 | 5 | Jenis | 347,899,400 | 30 | Jenis | 9,990,000 | 73 | Jenis | 929,439,400 | 202.78 | - | sts | sts | 5,182,978,463 | sts | 336.56 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 18/3140 | Jenis/Orang | 330,066,800 | 3 | Bulan | 40,030,650 | 3 | Bulan | 73,512,200 | 3 | Bulan | 59,388,155 | 3 | Bulan | 53,187,185 | 12 | Bulan | 226,118,190 | sts | 68.51 | 24 | Bulan | 768,373,671 | 40.00 | 134.74 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan konsumsi peserta rapat, tamu dan tenaga pengaman kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 424,566,350 | sts | 43.70 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetak dan penggandaan dokumen | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | 12 | Bulan | 219,082,268 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 61,594,160 | 3 | Bulan | 100,065,906 | 3 | Bulan | 42,346,900 | 12 | Bulan | 204,006,966 | 100.00 | - | 24 | Bulan | 517,689,906 | 40.00 | 135.85 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | #### | Lembar | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Media Bacaan Koran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 228 | Eksempla | 21,120,000 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 9,068,000 | 3 | Bulan | | 3 | Bulan | 11,839,200 | 12 | Bulan | 20,907,200 | sts | 98.99 | 24 | Bulan | 75,524,000 | 40.00 | 63.07 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Pelaksanaan Rapat/Konsultasi Pelayanan Penanggulangan Bencana | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 | kali | 530,636,000 | 17 | Kali | 24,990,000 | 17 | Kali | 188,512,619 | 25 | jkali | 159,242,201 | 11 | Kali | 141,400,884 | 70 | Kali | 514,145,704 | 100.00 | 96.89 | sts | sts | 2,559,145,795 | sts | 73.95 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | | orang/kali | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **7** | **Unit** | **568,753,500** | | **Unit** | | | **Unit** | **60,963,500** | | | **-** | | | **686,243,160** | **-** | **Unit** | **747,206,660** | **-** | **131.38** | **-** | **Unit** | **747,206,660** | **tdr** | **tdr** | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 | Unit | 568,753,500 | | | | 1 | paket | 60,963,500 | | | | | | 686,243,160 | 1.00 | - | 747,206,660 | sts | 131.38 | 1 | - | 747,206,660 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **3** | **kegiatan** | **3,738,774,909** | | **kegiatan** | **482,017,072** | | **kegiatan** | **759,986,420** | | | **828,635,535** | | | **1,167,621,231** | **-** | **kegiatan** | **3,238,260,258** | **-** | **86.61** | **-** | **kegiatan** | **3,238,260,258** | **tdr** | **16.30** | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Keluar Yang Tersedia | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | Persen | 18,660,000 | | % | | 25 | % | 2,000,000 | | | | 45 | % | 10,000,000 | 70 | % | 12,000,000 | sts | - | sts | sts | 46,930,000 | sts | 53.11 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 2,950 | buah | | | | | | | | | | | | | | | | | - | tdr | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening listrik, jaringan telpon, air bersih dan sambungan internet | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | bulan | 398,994,400 | 3 | Bulan | 79,917,072 | **3** | Bulan | 52,568,895 | 3 | Bulan | 118,918,010 | 3 | Bulan | 94,846,021 | 12 | Bulan | 346,249,998 | sts | - | 48 | Bulan | 1,814,022,122 | 80.00 | 95.37 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 12 | bulan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 12 | bulan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 12 | bulan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah peningkatan sarana administrasi perkantoran | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | bulan | 3,321,120,509 | 3 | Bulan | 402,100,000 | 3 | Bulan | 705,417,525 | 3 | Bulan | 709,717,525 | 3 | Bulan | 1,062,775,210 | 12 | Bulan | 2,880,010,260 | sts | 86.72 | 24 | Bulan | 9,846,603,660 | 40.00 | 132.34 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 12 | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 12 | bulan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah** | **8** | **Unit** | **2,920,590,971** | | **Unit** | **55,200,000** | | **Unit** | **368,456,450** | | | **680,558,349** | | | **2,743,903,140** | **-** | **Unit** | **3,848,117,939** | **-** | **131.76** | **-** | **Unit** | **3,848,117,939** | **-** | **320.68** | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 53 | Unit | 1,776,947,971 | 3 | Bulan | 35,070,000 | 3 | Bulan | 315,484,350 | 3 | Bulan | 443,525,269 | 3 | Bulan | 726,915,790 | 12 | Bulan | 1,520,995,409 | sts | - | sts | sts | 1,925,195,409 | sts | 160.43 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 74 | unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 46 | unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Jumlah jasa perawatan dan pemeliharaan kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 113 | Unit | 1,143,643,000 | 28 | Unit | 20,130,000 | 28 | Unit | 52,972,100 | 30 | Unit | 237,033,080 | 11 | Unit | 2,016,987,350 | 97 | Unit | 2,327,122,530 | 85.84 | 203.48 | sts | sts | 2,327,122,530 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 4 | Unit | 1,505,837,925 | 33.33 | 43.53 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.50 | 71.95 | | | | 45.56 | 115.22 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | S | | | | SR | ST | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **42,170,047,601** | | | **3,616,090,642** | | | **8,599,623,397** | | | **8,367,444,285** | | | **21,961,849,359** | **-** | **-** | **42,545,007,683** | **sts** | **100.89** | - | - | 168,558,176,554 | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Penanggulangan Bencana** | **Index Risiko Bencana** | | **130** | **Indeks** | | | **Indeks** | | | **Indeks** | | | | | | | | **-** | **Indeks** | - | **-** | **tdr** | - | Indeks | 17,084,120,941 | - | 4.53 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam** | **Menurunnya %tase korban terdampak bencana** | | **132.5** | **Indeks** | | | **Indeks** | | | **Indeks** | | | | | | | | | | | **-** | **tdr** | 1 | % | 2,238,316,880 | sts | 129.73 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana** | **%tase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 74 | % | 64,477,558,072 | 92.50 | 173.42 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana** | **Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 68 | % | 35,119,882,375 | sts | 89.05 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Kedaruratan dan Logistik Bencana** | **Respon Cepat Darurat Bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 75 | % | 5,612,079,963 | 93.75 | 77.42 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana** | **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 35 | % | 1,481,210,640 | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi** | **130** | **Indeks** | **3,016,944,703** | | **Indeks** | **74,931,000** | | **Indeks** | **698,015,758** | | | **763,309,829** | | | **1,406,279,385** | **-** | **Indeks** | **2,942,535,972** | **-** | **97.53** | **-** | **Indeks** | **2,942,535,972** | **tdr** | **29.89** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi | 1 | Dokumen | 372,341,372 | | Dok | | | Dok | | 1 | Dok | 105,000,000 | 1 | Dok | 264,044,540 | 2 | Dok | 369,044,540 | sts | - | sts | sts | 740,103,825 | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Penguatan kelembagaan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan Bencana Aceh | Meningkatnya Penyebaran Informasi dan data bencana | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | 21 | kegiatan | 2,644,603,331 | 8 | Jenis | 74,931,000 | 8 | Jenis | 698,015,758 | 3 | Jenis | 658,309,829 | 2 | Jenis | 1,142,234,845 | 21 | Jenis | 2,573,491,432 | sts | - | sts | sts | 6,319,897,501 | sts | 64.20 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **30** | **%** | **29,270,973,700** | | **%** | **1,348,515,646** | | **%** | **6,081,251,791** | | | **5,869,893,067** | | | **16,534,109,902** | **-** | **%** | **29,833,770,406** | **-** | **-** | **-** | **%** | **29,833,770,406** | **tdr** | **8.83** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Penyusunan Rencana Kontijensi Mitigasi Bencana | Sosialisasi Rencana Kontijensi | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | 1 | dok | 275,000,000 | | dok | | | dok | | 1 | Dok | 19,397,360 | 1 | Dok | 224,228,500 | 2 | dok | 243,625,860 | 200.00 | - | sts | sts | 1,242,730,260 | sts | 132.40 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | 1 | okumen | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana | Peningkatan Kapasitas SDM kebencanaan | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 840 | orang | 5,872,218,133 | 210 | orang | 585,482,563 | 210 | orang | 981,360,274 | 210 | Orang | 1,251,186,557 | 185 | Orang | 2,858,066,589 | 815 | orang | 5,676,095,983 | 97.02 | - | sts | sts | 7,578,824,132 | sts | 365.00 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana | - | | 2 | unit | | | Unit | | | unit | | | | | | | | | | | - | tdr | 108 | % | 8,400,000 | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana | Peningkatan Kapasitas SDM kebencanaan | | 2,003 | Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | tdr | 350 | org | 467,704,200 | 175.00 | 159.88 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana | Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanggulangan bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 12 | bulan | 7,251,488,061 | 3 | bulan | 185,670,010 | 3 | bulan | 2,097,254,985 | 3 | bulan | 1,116,006,034 | 3 | Bulan | 3,812,392,012 | 3 | Laporan | 133,612,450 | sts | - | sts | sts | 44,003,836,313 | sts | 39.42 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | | 1 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | | 2 | Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | | 2 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana | Meningkatnya Sarana Prasarana Menghadapi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 113,400,000 | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | 5 | paket | 5,110,253,700 | | | | 2 | paket | 1,008,041,800 | 2 | Paket | 1,097,407,500 | 1 | Paket | 4,540,703,500 | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam PRB | Pengelolaan Risiko Bencana | 1 | Desa | 3,849,122,025 | - | Desa | 75,081,729 | | Desa | 566,051,000 | | Desa | 977,024,054 | 1 | Desa | 2,170,015,160 | 1 | Desa | 3,788,171,943 | 100.00 | - | sts | sts | 5,904,531,759 | sts | 34.65 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | | 4 | Lokasi | | | Lokasi | | | Lokasi | | 4 | Lokasi | | | | | 4 | Lokasi | - | 100.00 | tdr | 4 | Lokasi | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | | 1 | kegiatan | | | kegiatan | | | kegiatan | | | Kegiatan | | | | | - | kegiatan | - | - | tdr | - | kegiatan | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | | 4 | kegiatan | | | kegiatan | | | kegiatan | | 2 | Kegiatan | | | | | 2 | kegiatan | - | 50.00 | tdr | 2 | kegiatan | - | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Penguatan Forum pengurangan resiko bencana | Meningkatnya Partisipasi Masayarakat dalam PRB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,340,799,016 | sts | 30.26 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana | Jumlah Sosialisasi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana Yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | dokumen | 2,642,484,966 | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana | Terlaksananya gerakan PRB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | % | 479,220,000 | tdr | tdr | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi penanggulangan bencana | Tersedianya dokumen perencanaan dan kajian serta evaluasi PRB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | dokumen | 2,415,340,564 | sts | 22.06 | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penguatan desa tangguh bencana | Meningkatnya jumlah desa siaga bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | orang | 404,895,219 | sts | 7.36 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana | Jumlah data dan dokumen rekam jejak penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 5 | kegiatan | 1,077,962,611 | 2 | kegiatan | 172,639,474 | 1 | kegia | 144,734,390 | 1 | kegiatan | 231,447,785 | 1 | Kegiatan | 469,312,070 | 5 | kegiatan | 1,018,133,719 | 100.00 | 94.45 | sts | sts | 2,468,853,684 | sts | 130.70 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 1 | Laporan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Koordinasi Penanggulangan Bencana | Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | org | 158,126,700 | 100.00 | 85.47 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Kajian kebutuhan pasca bencana | Tersedianya informasi tentang kajian kebutuhan pasca bencana | Penanganan Pascabencana Provinsi | 4 | Dokumen | 5,000,000,000 | | Dokumen | 324,339,103 | 2 | Dokumen | 961,961,342 | 1 | Dok | 869,855,724 | 1 | Dok | 2,273,627,051 | 4 | Dokumen | 4,429,783,220 | 100.00 | - | sts | sts | 7,374,979,378 | sts | 294.76 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 3 | Kegiatan | | 2 | Kegiatan | | | Kegiatan | | | | | | | | 2 | Kegiatan | - | 66.67 | tdr | 2 | Kegiatan | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 23 | kab/Kota | | | kab/Kota | | | kab/Kota | | | | | | | | - | kab/Kota | - | - | tdr | - | kab/Kota | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 23 | kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 100 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | 5 | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana | Peningkatan Penanganan Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | kali | 766,835,963 | sts | 1.12 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi kerusakan akibat | Meningkatnya Penanganan Kerusakan Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | Proposal | 649,257,082 | 23.91 | 47.34 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Iventarisasi, verifikasi dan validasi kerusakan akibat | Peningkatan Penanganan Rehabilitas dan Rekontruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | dok | 128,686,134 | 100.00 | 94.43 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Perbaikan lingkungan daerah bencana | Meningkatnya Penanganannan Perbaikan Lingkungan Pasca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | paket | 4,365,459,451 | 100.00 | 94.90 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Perbaikan Lingkungan daerah bencana | Terlaksanakanya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | paket | 13,041,969,640 | 100.00 | 88.75 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilavah terjadinya | Pulihnya Pelayanan Publik dalam wilavah terjadinya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | paket | 547,860,627 | 25.00 | 2.70 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah | Terlaksanakanya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | paket | 21,190,517,540 | 100.00 | 89.53 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah | Terlaksanakanya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | paket | 21,190,517,540 | 100.00 | 89.53 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekontruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | dok | 1,435,295,921 | 33.33 | 30.93 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana | Meningkatnya Pemulihan Ekonommi masyarakat pasca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 | KK | 2,358,084,912 | 34.50 | 25.21 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana | Terlaksananya Pemulihan ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | % | 839,675,923 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Psikososial bagi masyarakat korban bencana | Tertanganinya psikologi korban bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 301,571,080 | sts | 25.46 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bencana | Peningkatan Penanganan Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | org | 565,097,689 | 100.00 | 79.28 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Koordinasi penilaian kerusakan bencana | Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | lap | 193,611,372 | 100.00 | 86.41 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana | Meningkatnya respon penanganan penanggulangan darurat bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 60 | orang | 225,500,000 | 15 | orang | 5,302,767 | 15 | orang | 25,760,000 | 15 | Orang | 7,080,000 | 15 | Orang | 185,765,020 | 60 | orang | - | 100.00 | - | 180 | orang | 1,886,071,186 | sts | 28.97 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pengurangan Risiko Bencana | Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan | Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 2 | kali | 609,429,170 | | | | 1 | kali | 296,088,000 | 1 | Kali | 300,488,053 | | Kali | | 2 | - | 596,576,053 | sts | 97.89 | sts | sts | 1,353,682,293 | sts | 172.06 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Pelayanan Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana** | **23** | **ab/Ko** | **8,645,122,180** | | | **2,087,463,996** | | | **1,656,853,848** | | | **1,489,749,389** | | | **3,365,460,920** | | | | | | | | | | | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 23 | ab/Kot | 2,558,148,100 | | kab/K | 422,736,085 | | kab/K | 598,887,000 | | kab/Kota | 636,095,710 | 23 | kab/Kota | 880,752,000 | | | | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | Penyediaan Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana | 23 | ab/Kot | 6,086,974,080 | | kab/K | 1,664,727,911 | | kab/K | 1,057,966,848 | | kab/Kota | 853,653,679 | 23 | kab/Kota | 2,484,708,920 | | | | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **18** | **kegiatan** | **1,237,007,018** | | | **105,180,000** | | | **163,502,000** | | | **244,492,000** | | | **655,999,152** | **-** | **persen** | **708,903,352** | **sts** | **-** | **-** | **persen** | **141,890,000** | **tdr** | **tdr** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana | Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | dokumen | 200,000,000 | | | | | | | | | 90,480,000 | | | 101,369,912 | - | - | 191,849,912 | sts | - | sts | sts | 305,249,912 | sts | 119.54 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Koordinasi penanggulangan bencana | Jumlah Sidang Tahunan Unsur Pengarah | Penyusunan Regulasi Penanggulan gan Bencana Daerah | 1 | dokumen | | | | | | | | | | | | | | 1 | Keg | 141,890,000 | sts | tdr | sts | sts | 684,769,400 | sts | 38.00 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Koordinasi penanggulangan bencana | Jumlah Sidang Tahunan Unsur Pengarah | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | 2 | Kegiatan | 827,007,018 | | | 105,180,000 | | | 163,502,000 | | | 154,012,000 | | | 345,439,740 | 1 | Keg | 141,890,000 | sts | - | sts | sts | 684,769,400 | sts | 38.00 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 7 | kegiatan | 210,000,000 | | | | | | | | | | 7 | Kegiatan | 209,189,500 | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Peningkatan sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana | Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penguatan sekolah, madrasah aman bencana dan fasilitas publik lainnya | Meningkatnya Sekolah, Madrasah, Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana | Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sts | sts | 1,923,051,291 | sts | 33.05 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Sistem Pusat Kendali Operasi | Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | unit | 555,045,925 | 100.00 | 85.00 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana | Meningkatnya sarana dan prasarana pendukungan pelayanan penanggulangan bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | % | 63,466,800,472 | 200.00 | 174.13 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penanganan Darurat Bencana | Pertolongan Korban, Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh, Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana dan | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 23 | kab/ Kota | | | | | | | | | | | | | | 2 | Paket | 6,400,000 | sts | tdr | sts | sts | 9,136,024,956 | sts | 16.05 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penilaian cepat kerusakan akibat bencana | Peningatan penanganan darurat dan logistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | org | 592,898,038 | 100.00 | 96.49 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 | Persen | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penguatan logistik dan peralatan penanggulangan bencana | Tersedinya logistik dan peratan untuk penanggulangan bencana | Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana | 23 | Kab/ Kota | | | | | | | | | | | | | | 23 | Kab/Kota | 226,873,440 | 100.00 | tdr | sts | sts | 4,498,819,605 | sts | 60.71 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Manajemen Logistik dan peralatan penanggulangan bencana | Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 3 | jenis | 4,464,136,000 | 100.00 | 74.63 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Tersedianya kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan bagi Korban Bencana sesuai standar kebutuhan | Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | sts | sts | 3,454,626,788 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Koordinasi Penanggulangan Bencana | Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | org | 158,126,700 | 100.00 | 85.47 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.41 | 13.74 | | | | 93.99 | 82.73 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | | ST | T | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON** | **130** | **Indeks** | **2,042,572,739** | | | **124,519,778** | | | **1,111,457,004** | | | **752,910,252** | | | **43,244,336** | | | **1,565,849,334** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6,708,616,600** | **tdr** | **tdr** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | **Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran** | **3** | **kegiatan** | **2,042,572,739** | | | **124,519,778** | | | **1,111,457,004** | | | **752,910,252** | | | **43,244,336** | | | **1,565,849,334** | **-** | **-** | | | | **-** | **tdr** | **Badan Penanggulangan Bencana Aceh** |
| | | | Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | 60 | unit | 255,000,000 | | unit | 5,398,444 | 30 | unit | 219,323,000 | | | 16,482,252 | 30 | Unit | 6,742,336 | - | - | - | sts | - | - | - | - | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana | Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan loader | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 6 | paket | 1,565,851,525 | | paket | 1,319,334 | 6 | paket | 828,102,000 | | | 736,428,000 | | Paket | | 6 | paket | 1,565,849,334 | 100.00 | 100.00 | sts | sts | 7,250,741,899 | tdr | tdr | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | Penguatan kapasitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Menurunya angka kebakaran hutan dan lahan | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | 60 | Orang | 221,721,214 | 20 | Orang | 117,802,000 | 20 | Orang | 64,032,004 | | | | 20 | Orang | 36,502,000 | - | - | - | sts | - | sts | sts | 1,023,724,035 | sts | 23.69 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 33.33 | | | | #DIV/0! | 23.69 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | | #DIV/0! | SR | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| | **DINAS SOSIAL** | | **DINAS SOSIAL** | | | **124,643,048,895** | | | **9,731,375,411** | | | **29,839,053,869** | | | **35,649,076,823** | | | **46,435,102,147** | | | **121,654,608,250** | | **97.60** | | | **6,363,469,186,237** | | | Dinas Sosial Aceh |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **124,643,048,895** | | | **9,731,375,411** | | | **29,839,053,869** | | | **35,649,076,823** | | | **46,435,102,147** | | | **121,654,608,250** | | **97.60** | | | **6,363,469,186,237** | | | Dinas Sosial Aceh |
| | **BIDANG URUSAN SOSIAL** | | **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **124,643,048,895** | | | **9,731,375,411** | | | **29,839,053,869** | | | **35,649,076,823** | | | **46,435,102,147** | | | **121,654,608,250** | | **97.60** | | | **6,363,469,186,237** | | | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | **28,993,743,145** | | | **5,756,887,799** | | | **7,721,111,359** | | | **9,518,209,266** | | | **10,801,849,019** | **-** | **-** | **33,798,057,443** | **tdr** | **116.57** | **-** | **-** | **56,747,426,480** | **tdr** | **106.10** | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran** | | **n/a** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | 99 | % | 13,188,256,681 | 99.01 | 52.58 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai** | | **n/a** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | - | % | - | **tdr** | **tdr** | **sts** | sts | 1,211,273,550 | sts | 33.43 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%tase aparatur yang memenuhi kompetensi** | | **n/a** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | - | % | - | **tdr** | **tdr** | **sts** | sts | 1,720,571,600 | sts | 34.29 | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | | | Vol | Satuan | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)** | | **n/a** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | - | % | - | **tdr** | **tdr** | **sts** | sts | 133,997,223 | sts | 38.75 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur** | | **n/a** | **%** | | | **%** | | | **%** | | | | | | | | - | % | - | **tdr** | **tdr** | **sts** | sts | 6,695,269,982 | sts | 34.48 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9** | **Bidang** | **1,665,984,956** | | **Bidang** | **171,193,500** | | **Bidang** | **472,891,000** | | | **299,807,140** | | | **706,078,764** | **-** | **Bidang** | **1,649,970,404** | **-** | **-** | **-** | **Bidang** | **1,649,970,404** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Sosial Aceh** |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23 | kab/kota | 700,730,000 | 10 | Kab/kota | 79,651,000 | 12 | kab/kota | 114,931,000 | 1 | kab/kota | 208,417,000 | | kab/kota | 294,934,839 | 23 | Kab/kota | 697,933,839 | 100.00 | 99.60 | 23 | Kab/kota | 697,933,839 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | Dokumen | 935,254,956 | 1 | Dokumen | 61,900,000 | 1 | Dokumen | 357,960,000 | 1 | Dokumen | 91,390,140 | 4 | Dokumen | 411,143,925 | 7 | Dokumen | 922,394,065 | 700.00 | 98.62 | 7 | Dokumen | 922,394,065 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | Tahun | 30,000,000 | 1 | Tahun | 29,642,500 | | Tahun | - | | | | | Tahun | | 1 | Tahun | 29,642,500 | 100.00 | 98.81 | 1 | Tahun | 29,642,500 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 23 | Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 23 | Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **393** | **Orang** | **27,327,758,189** | | **Orang** | **5,585,694,299** | | **Orang** | **7,248,220,359** | | | **6,749,094,186** | | | **6,868,341,734** | **-** | **Orang** | **26,451,350,578** | **-** | **-** | **-** | **Orang** | **26,451,350,578** | **tdr** | **13,691.18** | **Dinas Sosial Aceh** |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 200 | ASN | 18,145,808,189 | 138 | ASN | 4,227,666,299 | 138 | ASN | 5,082,988,859 | 138 | ASN | 4,562,949,186 | 138 | ASN | 3,866,210,308 | 552 | ASN | 17,739,814,652 | 276.00 | - | 552 | ASN | 17,739,814,652 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | Bulan | 9,159,950,000 | 3 | Bulan | 1,358,028,000 | 3 | Bulan | 2,143,232,000 | 3 | Bulan | 2,186,145,000 | 3 | Bulan | 2,980,131,926 | 12 | Bulan | 8,667,536,926 | 100.00 | - | 12 | Bulan | 8,667,536,926 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Tahun | 22,000,000 | | Tahun | | | | 21,999,500 | | | | | | 21,999,500 | - | Tahun | 43,999,000 | - | - | - | Tahun | 43,999,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 1 | Tahun | | | Tahun | | | | | | | | | | | - | Tahun | - | - | tdr | - | Tahun | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 1 | Tahun | | | Tahun | | | | | | | | | | | - | Tahun | - | - | tdr | - | Tahun | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pegawai | | 1 | Kegiatan | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | - | Kegiatan | - | - | tdr | 1 | Kegiatan | 33,073,450 | 100.00 | 26.57 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Dinas Sosial Aceh | | 1 | Kegiatan | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | - | Kegiatan | - | sts | tdr | 1 | Kegiatan | 56,764,606 | 12.50 | 176.29 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 1 | Tahun | | | Tahun | | | | | | | | | | | - | Tahun | - | - | tdr | - | Tahun | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Terselesaikannya proses administrasi keuangan | | 1 | Kegiatan | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | - | Kegiatan | - | - | tdr | 1 | Kegiatan | 44,159,167 | 33.33 | 120.98 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 100 | **%** | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | **tdr** | - | - | - | tdr | - | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Kebutuhan materai dan benda pos lainnya | | 2000 | Buah | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 47,055,000 | sts | 44.70 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, internet dan listrik bagi | | 1 | Unit/Thn | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 1,415,554,198 | sts | 37.70 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 50 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan operasional dinas dengan baik | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 137,591,625 | sts | 26.61 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpeliharanya kebersihan dan keindahan gedung kantor | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 1,125,161,720 | sts | 50.97 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 789,980,100 | sts | 61.62 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | 1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 356,034,600 | sts | 44.53 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor | | 934 | Buah | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 293,926,000 | sts | 52.96 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan untuk Kepala Dinas Sosial,bidang-bidang dan para karyawan-karyawati | | 350 | Eksemplar | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 128,725,000 | sts | 55.97 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedia logistik kantor | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 411,370,500 | sts | 41.76 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedia makan dan minum bagi para tamu | | 1000 | Orang | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 504,777,400 | sts | 64.32 | Dinas Sosial Aceh |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | | 233 | Kali | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 1,848,606,000 | sts | 38.99 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Kendaraan dinas operasional dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan | | 4 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 772,610,000 | sts | 15.68 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Kendaraan dinas operasional dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan | | 22 | Unit/Paket | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 615,505,582 | sts | 45.42 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | | 20 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | - | sts | - | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan mebeleur | Tersedianya sarana kerja bagi aparatur | | 70 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 77,330,000 | sts | 7.44 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 2 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung kantor | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 1,268,439,200 | sts | 101.88 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 5 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | | | Vol | Satuan | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan operasional dinas | | 45 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 2,212,037,000 | sts | 46.84 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor | | 1 | Tahun | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 348,164,000 | sts | 36.12 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya Peralatan Kantor | | 70 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 374,985,000 | sts | 56.81 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terpeliharanya Meubleir | | 60 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 33,000,000 | sts | 14.71 | Dinas Sosial Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Terpeliharanya Rumah Dinas | | 1 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 166,681,000 | sts | 34.65 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 4 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | | 5 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 426,357,000 | sts | 58.09 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | Keg | 6,129,474,538 | 109.09 | 61.46 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor | Terpeliharanya Pagar Lingkungan Kantor 1 Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | M2 | 156,085,000 | 0.33 | 35.80 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Terpeliharanya Tempat parkir dan halaman Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | Meter | 93,469,200 | sts | 9.49 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor | Tersedianya Dokumen dan Buku Bacaan kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Kegiatan | 106,705,000 | 50.00 | 54.66 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan rutin/berkala sound system | Sound system kantor dapat berfungsi dengan baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Unit | 43,902,000 | sts | 25.09 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 100 | % | - | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **sts** | - | - | - | - | tdr | - | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya Mesin Absensi | | 6 | Unit | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 65,316,500 | sts | 217.72 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan PNS | | 436 | Stel | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 900,161,550 | sts | 31.49 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan PNS | | 36 | Stel | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 245,795,500 | sts | 21.24 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | 200 | Stel | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pegawai | | 20 | ASN | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 63,421,000 | sts | 10.93 | Dinas Sosial Aceh |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyampaian Informasi tentang Qanun tentangKesejahteraan Sosial | | 23 | Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | sts | sts | 377,910,800 | sts | 32.86 | Dinas Sosial Aceh |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti kegiatan | | 60 | ASN | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | - | - | - | sts | - | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembinaan mental dan fisik aparatur | Telaksananya Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Bagi Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | Orang | 271,688,000 | 100.00 | 31.04 | Dinas Sosial Aceh |
| | Rapat koordinasi teknis (Rakornis) | Terlaksananya Koordinasi Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial dengan Instansi Sosial Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | Orang | 706,471,800 | 114.29 | 45.56 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyelenggaraan kegiatan keagamaan | Terciptanya Ketaqwaan dan Ulhuwah Pegawai 1 Tahun dan Meningkatnya Ketaqwaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | Kegiatan | 301,080,000 | 100.00 | 32.55 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengembangan SDM Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | n/a | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **393** | **Orang** | **469,897,252** | | **Orang** | **-** | | | **128,329,900** | | | **183,987,900** | | | **152,615,057** | **-** | **Orang** | **464,932,857** | **-** | **-** | **-** | **Orang** | **464,932,857** | **tdr** | **tdr** | **Dinas Sosial Aceh** |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 393 | Stel | 87,897,252 | | Stel | | | Stel | | 33 | Stel | 62,037,900 | 36 | Stel | 25,398,000 | 69 | Stel | 87,435,900 | 17.56 | - | 69 | Stel | 87,435,900 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 20 | ASN | 110,000,000 | | ASN | | 10 | ASN | 53,330,000 | 10 | ASN | - | 20 | ASN | 52,669,595 | 40 | ASN | 105,999,595 | 200.00 | - | 40 | ASN | 105,999,595 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 | Kab/Kota | 75,000,000 | | Kab/Kota | | | Kab/Kota | | | Kab/Kota | - | 23 | Kab/Kota | 74,547,462 | 23 | Kab/Kota | 74,547,462 | 100.00 | - | 23 | Kab/Kota | 74,547,462 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 | Orang | 197,000,000 | | Orang | | 8 | Orang | 74,999,900 | 7 | Orang | 121,950,000 | 25 | Orang | - | 40 | Orang | 196,949,900 | 266.67 | - | 40 | Orang | 196,949,900 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **393** | **Orang** | **3,456,504,397** | | **Orang** | **303,183,430** | | **Orang** | **613,251,765** | | | **808,766,435** | | | **1,673,473,523** | - | Orang | 3,398,675,153 | **-** | **-** | - | Orang | 3,398,675,153 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 934 | Buah | 97,587,754 | 50 | Buah | 16,810,000 | 100 | Buah | 40,238,000 | 300 | Buah | 39,234,504 | 484 | Buah | - | 934 | Buah | 96,282,504 | 100.00 | - | 934 | Buah | 96,282,504 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45 | Unit | 700,732,226 | 4 | Unit | 62,308,500 | 4 | Unit | 43,822,245 | 20 | Unit | 144,072,450 | 17 | Unit | 433,237,886 | 45 | Unit | 683,441,081 | 100.00 | - | 45 | Unit | 683,441,081 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25 | Unit | 283,463,000 | | Unit | | 5 | Unit | 73,945,820 | 5 | Unit | 70,169,273 | 15 | Unit | 133,714,591 | 25 | Unit | 277,829,684 | 100.00 | - | 25 | Unit | 277,829,684 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2,500 | Buah | 249,960,000 | 200 | Buah | 11,250,000 | 250 | Buah | 23,450,000 | 900 | Buah | 111,520,000 | 1,150 | Buah | 90,992,000 | 2,500 | Buah | 237,212,000 | 100.00 | 94.90 | 2,500 | Buah | 237,212,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 200 | Buah | 119,768,925 | 100 | Buah | 55,946,500 | 1 | Buah | 6,275,500 | 87 | Buah | 21,008,270 | 12 | Buah | 35,458,300 | 200 | Buah | 118,688,570 | 100.00 | 99.10 | 200 | Buah | 118,688,570 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | **350** | Exemplar | 44,163,900 | | Exemplar | | | Exemplar | | | | | 350 | Exemplar | 44,133,000 | 350 | Exemplar | 44,133,000 | 100.00 | 99.93 | 350 | Exemplar | 44,133,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | 325 | Buah | 186,071,592 | 87 | Buah | 41,902,500 | 1 | Buah | 17,700,000 | 116 | Buah | 74,098,924 | 121 | Buah | 51,296,950 | 325 | Buah | 184,998,374 | 100.00 | 99.42 | 325 | Buah | 184,998,374 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1,000 | orang | 164,240,000 | | orang | | 500 | orang | 40,646,400 | 500 | orang | 40,880,000 | 200 | orang | 82,410,000 | 1,200 | orang | 163,936,400 | 120.00 | 99.82 | 1,200 | orang | 163,936,400 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 233 | kali | 927,280,000 | 50 | kali | 101,316,930 | 100 | kali | 282,248,800 | 50 | kali | 230,496,014 | 33 | kali | 307,756,900 | 233 | kali | 921,818,644 | 100.00 | - | 233 | kali | 921,818,644 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 70 | unit | 189,737,000 | | unit | | 10 | unit | 24,225,000 | 12 | unit | 12,800,000 | 48 | unit | 147,659,520 | 70 | unit | 184,684,520 | 100.00 | 97.34 | 70 | unit | 184,684,520 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 70 | unit | 493,500,000 | 25 | unit | 13,649,000 | 15 | unit | 60,700,000 | 16 | unit | 64,487,000 | 14 | unit | 346,814,376 | 70 | unit | 485,650,376 | 100.00 | 98.41 | 70 | unit | 485,650,376 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 70 | **unit** | **1,057,804,571** | | | **-** | | | **-** | | | **872,822,970** | | | **166,758,790** | - | - | 1,039,581,760 | **sts** | **98.28** | - | - | 1,039,581,760 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 70/1 | unit/tahun | 1,057,804,571 | | unit / | - | | unit/tahun | | 1 | unit / tah | 872,822,970 | 69 | unit / tah | 166,758,790 | 70 | nit / tahu | 1,039,581,760 | sts | 98.28 | 70 | nit / tahu | 1,039,581,760 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 9 | **UKE** | **1,330,291,305** | | **UKE** | **121,690,490** | | **UKE** | **250,202,105** | | | **298,577,694** | | | **468,466,459** | - | UKE | 1,138,936,748 | **-** | **85.62** | - | UKE | 1,138,936,748 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | 2000 buah | 44,912,000 | 50 | 2000 buah | 7,210,000 | 150 | 2000 b | 13,000,000 | 100 | Buah | 7,000,000 | 2,000 | 2000 bua | 14,920,500 | 2,300 | 2000 bua | 42,130,500 | tdr | 93.81 | 2,300 | 2000 bua | 42,130,500 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | tahun | 637,463,920 | | tahun | 114,480,490 | 1 | tahun | 71,950,105 | | tahun | 158,678,369 | 1 | tahun | 121,846,134 | 2 | tahun | 466,955,098 | 200.00 | 73.25 | 2 | tahun | 466,955,098 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 | unit | 256,678,385 | | unit | | 20 | unit | 91,430,000 | 12 | unit | 64,799,325 | 18 | unit | 83,864,875 | 50 | unit | 240,094,200 | 100.00 | 93.54 | 50 | unit | 240,094,200 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | tahun | 391,237,000 | | tahun | | 1 | tahun | 73,822,000 | | tahun | 68,100,000 | 1 | tahun | 247,834,950 | 2 | tahun | 389,756,950 | 200.00 | - | 2 | tahun | 389,756,950 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **80** | **unit** | **1,539,265,569** | | **unit** | **94,861,000** | | **unit** | **321,825,300** | | | **305,152,941** | | | **766,114,692** | - | unit | 1,487,953,933 | **-** | **-** | - | unit | 1,487,953,933 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan | 1 | tahun | 135,632,000 | | tahun | 9,191,000 | 1 | tahun | | | tahun | 9,029,100 | | tahun | 69,963,152 | 1 | tahun | 88,183,252 | 100.00 | - | 1 | tahun | 88,183,252 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | 45 | unit | 843,507,000 | 5 | unit | 85,670,000 | 15 | unit | 203,219,300 | 20 | unit | 296,123,841 | | unit | 257,316,540 | 40 | unit | 842,329,681 | 88.89 | - | 40 | unit | 842,329,681 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | tahun | 560,126,569 | | tahun | | 1 | tahun | 118,606,000 | | | | | tahun | 438,835,000 | 1 | tahun | 557,441,000 | 100.00 | - | 1 | tahun | 557,441,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117.78 | 46.37 | | | | 68.84 | 47.99 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | | S | SR | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **%tase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ikut serta dalam** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | 52/96 | **Orang/Lembaga** | **11,284,540,931** | | **Oran** | **999,547,440** | | **Oran** | **2,359,640,362** | | | **2,706,590,475** | | | **4,427,075,547** | - | ng/Lemb | **10,492,853,824** | **tdr** | **92.98** | sts | sts | 57,415,532,969 | sts | 72.50 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | 100 | **%** | **200,000,005** | | **%** | | | **%** | **7,349,500** | | | **96,577,800** | | | **93,431,900** | - | % | 197,359,200 | **-** | **98.68** | - | % | 197,359,200 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 1 | Tahun | 200,000,005 | | Tahun | | | Tahun | 7,349,500 | | | 96,577,800 | 1 | Tahun | 93,431,900 | 1 | Tahun | 197,359,200 | 100.00 | 98.68 | 1 | Tahun | 197,359,200 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi** | 462 orang | **lembaga** | **11,084,540,926** | | **lembaga** | **999,547,440** | | **lembaga** | **2,352,290,862** | | | **2,610,012,675** | | | **4,333,643,647** | - | lembaga | 10,295,494,624 | **tdr** | **92.88** | - | lembaga | 10,295,494,624 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | 1 | Tahun | 1,379,169,554 | | Tahun | 4,556,000 | 1 | Tahun | 163,619,876 | 1 | Tahun | | | Tahun | 629,645,182 | 2 | Tahun | 797,821,058 | 200.00 | 57.85 | 2 | Tahun | 797,821,058 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | 289 | TKSK | 8,641,562,406 | | TKSK | 993,911,440 | 289 | TKSK | 1,854,278,060 | 289 | TKSK | 2,322,075,175 | | TKSK | 3,315,447,075 | 578 | TKSK | 8,485,711,750 | 200.00 | 98.20 | 578 | TKSK | 8,485,711,750 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kewenangan Provinsi | 1 | Tahun | 651,177,916 | | Tahun | | 1 | Tahun | 27,937,376 | 1 | Tahun | 241,593,500 | | Tahun | 348,300,890 | 2 | Tahun | 617,831,766 | 200.00 | - | 2 | Tahun | 617,831,766 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 155 | Lembaga | 412,631,050 | | Lembaga | 1,080,000 | 30 | Lembaga | 306,455,550 | 45 | Lembaga | 46,344,000 | | Lembaga | 40,250,500 | 75 | Lembaga | 394,130,050 | 48.39 | - | 75 | Lembaga | 394,130,050 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Terjalinnya koordinasi dengan Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Kegiatan | 628,073,680 | sts | 46.24 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Terlaksananya kegiatan penguatan ketahanan sosial masyarakat pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Desa | 717,865,700 | sts | 35.26 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Terlatih dan terbinanya para TKSK dan PSM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,185 | Orang | 23,104,443,596 | 395.00 | 68.20 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengembangan model kelembagaan perlindungan masyarakat | Terlaksananya Koordinasi Pencapaian Target SPM Bidang Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | Puspelke | 1,743,514,090 | 10.38 | 29.00 | Dinas Sosial Aceh |
| | Kerjasama usaha antara pemda dengan organisasi/lembaga sosial masyarakat | Terlaksananya Pertemuan antar Pemerintah dengan Lembaga Pengangangan Kesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | Orang | 321,611,900 | 64.29 | 59.25 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan bencana (Tagana) | Terlatihnya Keterampilan Tagana dalam Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,195 | Orang | 3,446,854,145 | 140.59 | 71.36 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan karang taruna | Terlaksananya peningkatnya kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | Karang T | 4,283,593,000 | 47.43 | 72.54 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling | Penyebaran informasi pembangunan kesejahteraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Orang;D | 5,327,275,500 | tdr | 160.45 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan | Terbinanya Organisasi Sosial dalam Kegiatan Usaha 60 Orsos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | Yys/Orsa | 6,617,732,506 | 37.50 | 122.93 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149.68 | 50.94 | | | | 115.86 | 73.91 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | R | | | | ST | S | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | | | **805,506,808** | | | **86,406,604** | | | **170,502,698** | | | **144,283,226** | | | **140,374,313** | - | - | **541,566,841** | **tdr** | **67.23** | - | - | 541,566,841 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal** | 250 | **orang** | **805,506,808** | 20 | Orang | **86,406,604** | **20** | **Orang** | **170,502,698** | | | **144,283,226** | | | **140,374,313** | 40 | Orang | 541,566,841 | **16.00** | **-** | 40 | Orang | 541,566,841 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi diDaerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 250 | orang | 805,506,808 | 20 | orang | 86,406,604 | 20 | | 170,502,698 | 25 | orang | 144,283,226 | | orang | 140,374,313 | 65 | orang | 541,566,841 | 26.00 | - | 65 | orang | 541,566,841 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 | - | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | ERR | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | **41,506,672,496** | | | **2,257,852,722** | | | **16,467,286,298** | | | **9,006,638,674** | | | **11,407,621,960** | - | - | **39,139,399,654** | **tdr** | **94.30** | - | - | 193,029,477,119 | tdr | 61.73 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | **%tase Lansia yang Mendapat Bantuan** | | **100 /100 /10** | **% / % / Jumlah** | | | **% / % / Jumlah** | | | **% / % / Jumlah** | | | | | | | | - | / % / Jur | - | **tdr** | **tdr** | **sts** | sts | 128,788,966,143 | sts | 61.45 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pembinaan Anak Terlantar** | **%tase Anak terlantar yang tertangani** | | **37 / 38 / 20 / 75** | **% / % / % / %** | | | **% / % / % / %** | | | **% / % / % / %** | | | | | | | | - | / % / % | - | **tdr** | **tdr** | **sts** | sts | 18,337,058,195 | sts | 21.21 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)** | **Jumlah penanganan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani** | | **285** | **Jumlah** | | | **Jumlah** | | | **Jumlah** | | | | | | | | - | Jumlah | - | **-** | **tdr** | **128** | Jumlah | 6,764,053,127 | 35.07 | 40.57 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** | 50 | **orang** | **5,640,881,055** | | **orang** | **427,221,984** | | **orang** | **1,454,276,942** | | | **1,642,307,363** | | | **1,933,469,756** | - | orang | 5,457,276,045 | **-** | **-** | - | orang | 5,457,276,045 | tdr | 2.75 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Permakanan | 50 | orang | 1,000,000,000 | | orang | 162,250,000 | | orang | 162,250,000 | 50 | orang | 305,360,000 | | orang | 330,550,000 | 50 | orang | 960,410,000 | 100.00 | 96.04 | 50 | orang | 960,410,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Sandang | 50 | orang | 149,185,505 | | orang | 5,481,500 | | orang | 96,059,520 | 50 | orang | 38,195,100 | | orang | 8,440,000 | 50 | orang | 148,176,120 | 100.00 | 99.32 | 50 | orang | 148,176,120 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 7 | unit | 3,488,896,550 | 1 | unit | 134,294,919 | | unit | 903,982,367 | 1 | unit | 1,084,222,264 | | unit | 1,273,825,186 | 2 | unit | 3,396,324,736 | 28.57 | 97.35 | 2 | unit | 3,396,324,736 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Alat Bantu | 50 | orang | 115,000,000 | | orang | | | orang | 33,757,100 | 45 | orang | 58,745,250 | | orang | 21,000,000 | 45 | orang | 113,502,350 | 90.00 | - | 45 | orang | 113,502,350 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 50 | orang | 98,799,000 | 10 | orang | 19,599,850 | 20 | orang | 38,054,380 | 15 | orang | 12,866,500 | | orang | 21,888,500 | 45 | orang | 92,409,230 | 90.00 | - | 45 | orang | 92,409,230 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 50 | orang | 214,000,000 | | orang | 37,855,000 | | orang | 46,865,350 | 50 | orang | 62,844,120 | | orang | 65,326,200 | 50 | orang | 212,890,670 | 100.00 | 99.48 | 50 | orang | 212,890,670 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 50 | orang | 275,000,000 | | orang | 29,500,000 | | orang | 91,066,300 | 50 | orang | 43,520,000 | | orang | 105,576,200 | 50 | orang | 269,662,500 | 100.00 | - | 50 | orang | 269,662,500 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 10 | orang | 25,000,000 | 1 | orang | 2,639,715 | 1 | orang | 3,740,285 | 1 | orang | 2,000,000 | | orang | 9,320,000 | 3 | orang | 17,700,000 | 30.00 | - | 3 | orang | 17,700,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 50 | orang | 50,000,000 | | orang | 3,500,000 | | orang | 25,007,640 | 5 | orang | - | | orang | 20,500,000 | 5 | orang | 49,007,640 | 10.00 | - | 5 | orang | 49,007,640 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 15 | kab/kota | 94,500,000 | 5 | kab/kota | 19,026,000 | 6 | kab/kota | 40,124,000 | 6 | kab/kota | 13,485,000 | | kab/kota | - | 17 | kab/kota | 72,635,000 | 113.33 | 76.86 | 17 | kab/kota | 72,635,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 10 | kab/kota | 63,000,000 | 3 | kab/kota | 12,877,000 | 2 | kab/kota | 13,370,000 | 5 | kab/kota | 4,300,000 | | kab/kota | 30,776,000 | 10 | kab/kota | 61,323,000 | 100.00 | 97.34 | 10 | kab/kota | 61,323,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | 12 | kegiatan | 67,500,000 | 1 | kegiatan | 198,000 | 1 | kegiatan | - | 5 | kegiatan | 16,769,129 | | kegiatan | 46,267,670 | 7 | kegiatan | 63,234,799 | 58.33 | 93.68 | 7 | kegiatan | 63,234,799 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Pembangunan Panti Asuhan Muhamadiah Mampak Kec. Kebayakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | Kab/Kota | 4,161,482,007 | 126.09 | 29.58 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | pemberdayaan penyandang cacat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | - | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | Jumlah peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi PMKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Unit | 653,569,000 | 10.00 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat | Tersediannya Bantuan bagi Penyandang Cacat yang mendapat bantuan Kursi Roda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | Orang | 707,954,419 | 2.08 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat | Tersediannya sarana prasarana bagi penyandang cacat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat | Terbantunya penyandang disabilitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar | Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 | Orang | 2,346,827,430 | 14.97 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan, penyiksaan dan | Terlaksananya Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | Kab/kot | 888,742,850 | 100.00 | 38.61 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Terkoordinasinya Pelaksanaan PKH Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | Kab/kot | 10,978,416,653 | 100.00 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | Keg | 293,472,968 | 2,200.00 | 32.41 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah | Terlaksananya penyusunan program dan rencana kerja pembangunan kesejahteraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | Org/Keg | 1,501,044,030 | 307.69 | 62.74 | Dinas Sosial Aceh |
| | Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanganan | Tercapainya pemahaman perumusan kebijakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Kegiatan | 809,790,500 | 300.00 | 45.37 | Dinas Sosial Aceh |
| | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan | Tersedia dan tersalurnya bantuan untuk korban bencana secara cepat dan tepat sasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | Kab/kota | 52,897,982,327 | sts | 72.02 | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dapat dan | Terlindungnya Korban Bencana Secara cepat dan tepat Sasaran Sesuai Kebutuhannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | Kab/Kota | 19,100,000 | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Sinkronisasi Program Pembangunan Bidang kesejahteraan Sosial yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 | Org/Keg | 1,108,246,053 | 208.33 | 58.10 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) | Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 4,222,871,263 | - | 127.75 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pendayagunaan sumber dana sosial | Jumlah kegiatan Sosialisasi PUB dan UGB yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | Instansi/ | 753,019,300 | tdr | 41.11 | Dinas Sosial Aceh |
| | Sosialisasi bahaya narkotika berbasis masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | orang | 1,036,500,800 | 43.48 | 94.69 | Dinas Sosial Aceh |
| | Sosialisasi bahaya narkotika berbasis masyarakat | 1. Meningkatnya Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Narcoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Orang | 255,860,000 | - | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal korban narkotika | Terlaksananya Korban Narkotika Yang Mendapatkan Pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | Anak | 1,096,223,900 | 96.67 | 22.84 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana | Terselenggaranya pemenuhan hak-hak dasar anak dan pembinaan sosial anak jalanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 482 | Anak | 6,061,696,350 | 482.00 | 42.54 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat | Terbedayanya penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,895 | orang | 15,753,391,647 | sts | 66.78 | Dinas Sosial Aceh |
| | Sosialisasi pelaksanaan KIE konseling bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Terlaksananya Penyuluhan Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Kegiatan | 751,073,637 | sts | 71.62 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi panti | Terlaksananya Pelayanan Bagi Panti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | LKS | 8,053,648,216 | 52.94 | 41.41 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar | Terlaksana kegiatan pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 556 | orang | 2,727,747,805 | 168.48 | 60.82 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar | Orang terlantar dapat berkumpul kembali dengan keluarganya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 223 | Orang | 1,022,561,551 | 65.98 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan bagi lansia terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,863 | Orang | 10,687,743,437 | 293.15 | 38.03 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti** | 148 | **Anak** | **13,865,250,258** | | Anak | **1,045,065,645** | | **Anak** | **3,273,037,566** | | | **3,152,134,734** | | | **5,551,573,273** | - | Anak | 13,021,811,218 | **-** | **-** | - | Anak | 13,021,811,218 | tdr | - | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengasuhan | 15 | orang | 80,000,000 | | orang | | | orang | - | 9 | orang | 22,390,000 | 43 | orang | 40,940,000 | 52 | orang | 63,330,000 | 346.67 | - | 52 | orang | 63,330,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Makanan | 154 | anak | 2,514,504,300 | 34 | anak | 288,357,500 | 26 | anak | 607,236,500 | 62 | anak | 538,178,200 | 42 | anak | 859,339,000 | 164 | anak | 2,293,111,200 | 106.49 | - | 164 | anak | 2,293,111,200 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Sandang | 200 | orang | 497,911,315 | 34 | orang | 40,022,180 | 26 | orang | 250,257,210 | 62 | orang | 170,598,094 | 32 | orang | 36,054,342 | 154 | | 496,931,826 | sts | - | 154 | - | 496,931,826 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 1 | Tahun | 7,870,496,177 | | Tahun | 437,952,965 | | Tahun | 1,599,052,295 | 1 | Tahun | 1,488,109,540 | 1 | Tahun | 3,961,599,892 | 2 | Tahun | 7,486,714,692 | 200.00 | - | 2 | Tahun | 7,486,714,692 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 200 | orang | 233,450,846 | 34 | orang | 33,073,500 | 26 | orang | 67,628,660 | 62 | orang | 61,498,300 | 42 | orang | 40,960,000 | 164 | orang | 203,160,460 | 82.00 | - | 164 | orang | 203,160,460 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 200 | orang | 1,583,383,000 | 34 | orang | 159,033,000 | 26 | orang | 421,863,775 | 62 | orang | 442,035,030 | 42 | orang | 486,586,533 | 164 | orang | 1,509,518,338 | 82.00 | - | 164 | orang | 1,509,518,338 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | 200 | orang | 504,051,200 | 34 | orang | 57,452,000 | 26 | orang | 117,715,500 | 62 | orang | 284,015,300 | 42 | orang | (4,567,230) | 164 | orang | 454,615,570 | 82.00 | - | 164 | orang | 454,615,570 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | 25 | orang | 3,750,000 | | orang | | 2 | orang | 755,000 | 2 | orang | 754,950 | 5 | orang | 560,000 | 9 | orang | 2,069,950 | 36.00 | - | 9 | orang | 2,069,950 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Akses ke Layanan Pendidkan dan Kesehatan Dasar | 190 | orang | 189,903,420 | 10 | orang | 19,084,500 | 35 | orang | 68,856,790 | 62 | orang | 61,924,320 | 83 | orang | 31,461,000 | 190 | orang | 181,326,610 | 100.00 | - | 190 | orang | 181,326,610 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 28 | kab/kota | 158,300,000 | 2 | kab/kota | 4,560,000 | | kab/kota | 80,285,000 | 8 | kab/kota | 30,331,500 | 13 | kab/kota | 35,181,000 | 23 | kab/kota | 150,357,500 | 82.14 | 94.98 | 23 | kab/kota | 150,357,500 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | Vol | Satuan | | | | Vol | Satuan | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 15 | kab/kota | 94,500,000 | 2 | kab/kota | 5,530,000 | | kab/kota | 30,688,000 | 2 | kab/kota | 5,755,000 | 11 | kab/kota | 24,319,000 | 15 | kab/kota | 66,292,000 | 100.00 | 70.15 | 15 | kab/kota | 66,292,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti | 1 | kegiatan | 10,000,000 | | kegiatan | | 1 | kegiatan | 2,883,836 | 1 | kegiatan | 2,605,000 | 1 | kegiatan | 5,488,836 | 3 | kegiatan | 10,977,672 | 300.00 | 109.78 | 3 | kegiatan | 10,977,672 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 1 | tahun | 125,000,000 | | tahun | | 1 | tahun | 25,815,000 | | tahun | 43,939,500 | 1 | tahun | 33,650,900 | 2 | tahun | 103,405,400 | 200.00 | 82.72 | 2 | tahun | 103,405,400 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar | Terlaksananya Pembinaan Anak Terlantar Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | Anak | 2,431,145,700 | 400.00 | 68.50 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar | Terlaksanaanya Kegiatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | Orang | 936,471,080 | 77.42 | 52.08 | Dinas Sosial Aceh |
| | Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar | Terlaksananya Advokasi dan Perlindungan Untuk Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 244 | Anak | 5,243,076,940 | 348.57 | 55.76 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak | Terlaksananya Kegiatan Bagi Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,802 | Anak | 8,320,385,475 | 3,003.33 | 9.88 | Dinas Sosial Aceh |
| | | Tersantuninya anak terlantar dalam panti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | Anak Te | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar | Terbangunnya tempat penampungan anak terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Panti | 1,405,979,000 | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti** | 63 | **orang** | **4,859,450,085** | | orang | **446,424,833** | | orang | **1,529,244,038** | | | **1,278,329,137** | | | **1,429,745,738** | - | orang | 4,683,743,746 | **-** | **96.38** | - | orang | 4,683,743,746 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Permakanan | 60 | orang | 1,371,574,300 | 60 | orang | 194,444,500 | | orang | 359,437,300 | 60 | orang | 374,542,500 | 60 | orang | 442,497,500 | 180 | orang | 1,370,921,800 | 300.00 | 99.95 | 180 | orang | 1,370,921,800 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Sandang | 60 | orang | 312,983,779 | 60 | orang | | | orang | 229,372,659 | 60 | orang | 40,439,520 | 60 | orang | 41,726,232 | 180 | orang | 311,538,411 | 300.00 | 99.54 | 180 | orang | 311,538,411 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | 10unit | wisma | 1,892,103,530 | 1 | wisma | 108,196,172 | 1 | wisma | 603,551,510 | 1 | wisma | 589,275,558 | 1 | wisma | 510,108,659 | 4 | wisma | 1,811,131,899 | tdr | 95.72 | 4 | wisma | 1,811,131,899 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Alat Bantu | 68 | unit | 28,000,000 | | unit | | | unit | - | | unit | - | 68 | unit | 18,509,250 | 68 | unit | 18,509,250 | 100.00 | - | 68 | unit | 18,509,250 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | 1 | Tahun | 297,532,976 | | Tahun | 11,666,761 | | Tahun | 71,997,119 | | Tahun | 48,213,163 | 1 | Tahun | 124,403,953 | 1 | Tahun | 256,280,996 | 100.00 | - | 1 | Tahun | 256,280,996 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 12 | bulan | 200,000,000 | 3 | bulan | 25,400,000 | 3 | bulan | 73,500,000 | 3 | bulan | 38,900,000 | 3 | bulan | 58,200,000 | 12 | bulan | 196,000,000 | 100.00 | - | 12 | bulan | 196,000,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 12 | bulan | 271,810,000 | 3 | bulan | 39,630,000 | 3 | bulan | 68,670,000 | 3 | bulan | 69,910,000 | 3 | bulan | 93,150,000 | 12 | bulan | 271,360,000 | 100.00 | - | 12 | bulan | 271,360,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 30 | orang | 5,000,000 | 1 | orang | 1,000,000 | 1 | orang | - | 1 | orang | 1,800,000 | 2 | orang | 2,200,000 | 5 | orang | 5,000,000 | 16.67 | - | 5 | orang | 5,000,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 12 | bulan | 260,687,500 | 3 | bulan | 45,860,000 | 3 | bulan | 59,875,000 | 3 | bulan | 61,195,000 | 3 | bulan | 88,545,000 | 12 | bulan | 255,475,000 | 100.00 | - | 12 | bulan | 255,475,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 13 | kab/kota | 137,600,000 | 4 | kab/kota | 13,252,000 | 6 | kab/kota | 43,860,450 | 3 | kab/kota | 38,520,000 | 1 | kab/kota | 26,182,000 | 14 | kab/kota | 121,814,450 | 107.69 | 88.53 | 14 | kab/kota | 121,814,450 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 13 | kab/kota | 64,058,000 | 2 | kab/kota | 6,975,400 | 4 | kab/kota | 18,980,000 | 3 | kab/kota | 15,533,396 | 4 | kab/kota | 22,333,144 | 13 | kab/kota | 63,821,940 | 100.00 | 99.63 | 13 | kab/kota | 63,821,940 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemulasaraan | 10 | orang | 18,100,000 | | orang | - | | orang | | | orang | - | 6 | orang | 1,890,000 | 6 | orang | 1,890,000 | 60.00 | 10.44 | 6 | orang | 1,890,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti** | 25 | **Orang** | **2,796,472,576** | | orang | **160,114,860** | | orang | **685,326,832** | | | **1,070,320,526** | | | **790,875,972** | - | orang | 2,706,638,190 | **-** | **96.79** | - | orang | 2,706,638,190 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Permakanan | 30 | orang | 292,750,000 | | orang | 12,750,000 | | orang | 77,000,000 | 20 | orang | 64,000,000 | 35 | orang | 116,400,000 | 55 | orang | 270,150,000 | 183.33 | 92.28 | 55 | orang | 270,150,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Sandang | 30 | orang | 90,000,000 | | orang | 42,588,425 | | orang | 33,008,250 | 20 | orang | 7,199,500 | 35 | orang | 7,199,500 | 55 | orang | 89,995,675 | 183.33 | 100.00 | 55 | orang | 89,995,675 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | 1 | Tahun | 1,681,350,029 | | Tahun | 31,749,994 | | Tahun | 337,726,193 | 1 | Tahun | 835,162,914 | 1 | Tahun | 439,771,068 | 2 | Tahun | 1,644,410,169 | 200.00 | 97.80 | 2 | Tahun | 1,644,410,169 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 30 | orang | 97,843,847 | | orang | 22,411,641 | | orang | 35,687,389 | 20 | orang | 27,623,112 | 35 | orang | 11,226,344 | 55 | orang | 96,948,486 | 183.33 | 99.08 | 55 | orang | 96,948,486 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 30 | orang | 276,000,000 | | orang | 16,020,000 | | orang | 109,700,000 | 20 | orang | 77,150,000 | 35 | orang | 69,180,000 | 55 | orang | 272,050,000 | 183.33 | 98.57 | 55 | orang | 272,050,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 30 | orang | 188,528,700 | | orang | 6,050,000 | | orang | 59,250,000 | 20 | orang | 48,825,000 | 35 | orang | 56,800,000 | 55 | orang | 170,925,000 | 183.33 | 90.66 | 55 | orang | 170,925,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 30 | orang | 72,500,000 | | orang | 1,600,000 | | orang | 6,900,000 | 20 | orang | 1,600,000 | 35 | orang | 61,013,060 | 55 | orang | 71,113,060 | 183.33 | 98.09 | 55 | orang | 71,113,060 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,Surat Nikah, Akta Nikah, Akta Kematian, | 30 | orang | 4,500,000 | | orang | | | orang | 1,950,000 | | orang | - | | orang | 2,250,000 | - | orang | 4,200,000 | - | 93.33 | - | orang | 4,200,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 30 | orang | 30,000,000 | | orang | | | orang | 4,800,000 | | orang | - | 35 | orang | 25,200,000 | 35 | orang | 30,000,000 | 116.67 | 100.00 | 35 | orang | 30,000,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemulangan ke Daerah Asal | 10 | orang | 63,000,000 | | orang | 26,944,800 | | orang | 19,305,000 | 20 | orang | 8,760,000 | 35 | orang | 1,836,000 | 55 | orang | 56,845,800 | 550.00 | 90.23 | 55 | orang | 56,845,800 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | tdr | tdr | - | - | - | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan** | 6000 | **orang** | **14,344,618,522** | | orang | **179,025,400** | | orang | **9,525,400,920** | | | **1,863,546,914** | | | **1,701,957,221** | - | orang | 13,269,930,455 | **-** | **92.51** | - | orang | 13,269,930,455 | tdr | 66.70 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Permakanan | 6,275 | orang | 8,941,032,023 | | orang | 60,353,500 | | orang | 8,198,666,000 | 6,200 | orang | 472,916,000 | 6,200 | orang | 191,243,000 | #### | orang | 8,923,178,500 | 197.61 | 99.80 | 12,400 | orang | 8,923,178,500 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Sandang | 525 | orang | 206,591,385 | | orang | - | | orang | - | 525 | orang | 205,980,385 | 525 | orang | - | 1,050 | orang | 205,980,385 | 200.00 | 99.70 | 1,050 | orang | 205,980,385 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | 140 | panti | 404,033,920 | | panti | - | 125 | panti | 344,655,520 | 9 | panti | 58,874,400 | 9 | panti | - | 143 | panti | 403,529,920 | 102.14 | 99.88 | 143 | panti | 403,529,920 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 12 | panti | 825,903,000 | | panti | - | 10 | panti | 364,474,900 | 3 | panti | 53,584,756 | 2 | panti | 1,591,600 | 15 | panti | 419,651,256 | 125.00 | 50.81 | 15 | panti | 419,651,256 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | 15=14/9*100 | | | 16=14+8 | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 1 | Tahun | 124,875,000 | | Tahun | - | | Tahun | - | 1 | Tahun | 61,665,000 | 1 | Tahun | 59,205,000 | 2 | Tahun | 120,870,000 | 200.00 | 96.79 | 2 | Tahun | 120,870,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 1 | Tahun | 1,101,374,444 | | Tahun | 101,108,500 | | Tahun | 4,798,000 | 1 | Tahun | 649,450,123 | 1 | Tahun | 340,724,821 | 2 | Tahun | 1,096,081,444 | 200.00 | 99.52 | 2 | Tahun | 1,096,081,444 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 1 | Tahun | 325,285,750 | | Tahun | 6,587,950 | | Tahun | 38,050,000 | 1 | Tahun | 195,115,750 | 1 | Tahun | 79,672,300 | 2 | Tahun | 319,426,000 | 200.00 | 98.20 | 2 | Tahun | 319,426,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,Surat | 1 | Tahun | 80,000,000 | | Tahun | 9,317,950 | | Tahun | 23,489,000 | 1 | Tahun | 16,629,500 | 1 | Tahun | 21,323,500 | 2 | Tahun | 70,759,950 | 200.00 | 88.45 | 2 | Tahun | 70,759,950 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1 | Tahun | 91,745,000 | | Tahun | | | Tahun | 50,490,000 | 1 | Tahun | 40,755,000 | 1 | Tahun | - | 2 | Tahun | 91,245,000 | 200.00 | - | 2 | Tahun | 91,245,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemulangan ke Daerah Asal | 1 | Tahun | 50,000,000 | | Tahun | 1,657,500 | | Tahun | 907,500 | 1 | Tahun | 15,980,000 | 1 | Tahun | 26,975,000 | 2 | Tahun | 45,520,000 | 200.00 | 91.04 | 2 | Tahun | 45,520,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang | 1 | tahun | 2,193,778,000 | | tahun | | | tahun | 499,870,000 | 1 | tahun | 92,596,000 | 1 | tahun | 981,222,000 | 2 | tahun | 1,573,688,000 | 200.00 | 71.73 | 2 | tahun | 1,573,688,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Pelatihan keterampilan berusaha bagi tuna sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 | Orang | 3,528,652,632 | 119.09 | 28.66 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan penyandang penyakit sosial | Terlaksananya Pembinaan Sosial Bagi WPMTS & Eks.Napi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 | Orang | 1,318,643,600 | 135.20 | 36.96 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi pelandangan dan pengemis | Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Gepeng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | Orang | 1,354,070,895 | 227.72 | 44.94 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembinaan dan pemberdayaan penyandang HIV/Aids | Terlaksanannya Pembinaan Sosial Bagi HIV/AIDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373 | Orang | 562,686,000 | 1,243.33 | 56.26 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143.09 | 58.06 | | | | 375.06 | 51.98 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | R | | | | ST | R | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | **28,964,599,502** | | | **353,027,346** | | | **2,280,803,922** | | | **10,899,872,195** | | | **12,851,941,433** | - | - | **26,385,644,896** | **tdr** | **91.10** | - | - | 2,936,940,965,156 | tdr | 931.91 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma** | **%tase Penyandang Disabilitas dan eks Trauma yang mendapat bantuan** | | 15 | **orang tua asuh** | | | **orang tua asuh** | | | **orang tua asuh** | | | | | | | | - | ng tua as | - | **sts** | **tdr** | **sts** | sts | 9,788,157,852 | sts | 699.15 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya** | **Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil (KAT) yangmendapat bantuan** | | 130 / 500/4.500 / 600 | **Jumlah / Jumlah / Jumlah** | | | **Jumlah / Jumlah / Jumlah** | | | **Jumlah / Jumlah / Jumlah** | | | | | | | | - | Jumlah | - | **tdr** | **tdr** | **sts** | sts | 2,839,369,338,463 | sts | 1,589.28 | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo** | **Efektifitas panti dalam melayani penerima manfaat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **tdr** | **tdr** | **sts** | % | 61,397,823,945 | tdr | 45.45 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal** | 15 | **orang tua asuh** | **579,999,771** | | **orang tua asuh** | **170,667,400** | | **orang tua asuh** | 219,676,000 | | | **91,796,700** | | | **82,061,350** | - | ng tua as | 564,201,450 | **-** | **-** | - | ang tua as | 564,201,450 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengangkatan Anak antar WNI | 1 | Tahun | 499,999,971 | | Tahun | 170,667,400 | | Tahun | 177,362,000 | 1 | Tahun | 87,471,400 | 1 | Tahun | 51,253,000 | 2 | Tahun | 486,753,800 | 200.00 | - | 2 | Tahun | 486,753,800 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | 1 | Tahun | 79,999,800 | | Tahun | | | Tahun | 42,314,000 | 1 | Tahun | 4,325,300 | 1 | Tahun | 30,808,350 | 2 | Tahun | 77,447,650 | 200.00 | - | 2 | Tahun | 77,447,650 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi** | 23 | **kab/kota** | **28,384,599,731** | | **kab/kota** | **182,359,946** | | **kab/kota** | **2,061,127,922** | | | **10,808,075,495** | | | **12,769,880,083** | - | kab/kota | 25,821,443,446 | **-** | **-** | - | kab/kota | 25,821,443,446 | tdr | 10.85 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 1,238 | orang | 11,935,006,758 | 103 | orang | 72,247,000 | 41 | orang | 287,744,550 | 500 | orang | 3,778,062,239 | | orang | 6,129,444,446 | 644 | orang | 10,267,498,235 | 52.02 | - | 644 | orang | 10,267,498,235 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengebloan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 700 | orang | 3,384,157,000 | 28 | orang | 57,477,046 | 12 | orang | 81,876,000 | 142 | orang | 1,012,373,428 | | orang | 2,038,261,803 | 182 | orang | 3,189,988,277 | 26.00 | - | 182 | orang | 3,189,988,277 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 600 | orang | 13,065,435,973 | 20 | orang | 52,635,900 | 242 | orang | 1,691,507,372 | 426 | orang | 6,017,639,828 | | orang | 4,602,173,834 | 688 | orang | 12,363,956,934 | 114.67 | - | 688 | orang | 12,363,956,934 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan | Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | Orang | 182,046,000 | 56.07 | 9.06 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan | Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | Orang | 311,628,000 | 55.56 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | Orang | 22,695,619,752 | 187.50 | 80.66 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin | Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | Kab/Kota | 2,764,711,318,267 | 100.00 | 3,742.75 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Terlaksananya Kegiatan Kesesuaian Program Korban Bencana Sosial di Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 254 | orang | 5,229,303,420 | sts | 94.22 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan ketrampilan berusaha komunitas adat terpencil | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan KAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205 | KK | 5,857,697,770 | 102.50 | 80.24 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan ketrampilan bagi Lansia | Terlaksananya Pembinaan Lansia Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 524 | Orang | 743,164,700 | 698.67 | 9.51 | Dinas Sosial Aceh |
| | Sosialasasi program pemberdayaan fakir miskin | Terlaksananya Sosialasasi Program Pemberdayaan Fakir miskin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | Orang | 425,964,000 | 160.00 | 75.21 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) | Terlatih dan terberdayanya para Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,107 | Orang | 10,250,799,285 | 110.70 | 55.01 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | Tersedianya Sarana dan Parasarana Panti Asuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | 3,632,580,000 | sts | 122.93 | Dinas Sosial Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo | Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana panti jompo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Unit | 487,443,000 | 100.00 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo | Tersedianya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana panti jompo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Unit | 2,303,690,210 | 100.00 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Panti Asuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | % | - | 100.00 | tdr | Dinas Sosial Aceh |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | | Alokasi Anggaran (Rp) | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | K Vol | K Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| | Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | Tersedianya sarana prasarana di panti jompo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti Jompo | Penyediaan makanan dan minuman bagi penghuni panti jompo 50 orang (3 RT) dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | Orang | 2,600,162,969 | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti Jompo | Terpenuhinya kebutuhan anak panti asuhan gerbang raja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo | Tersedianya sarana dan prasarana di UPTD Rumah sejahtera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Asuhan Bati/Rumah Sejahtera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 | Orang | 6,808,569,841 | 157.00 | 43.66 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | Terpeliharanya sarana dan prasarana anti asuhan/jompo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | Orang | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan cacat netra | Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi disabilitas netra untuk bisa belajar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 | Anak | 6,122,348,577 | sts | 56.57 | Dinas Sosial Aceh |
| | Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo | Jumlah panti pemerintah yang mendapatkan peningkatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Panti Soc | 1,794,845,400 | 100.00 | 70.70 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah | Kemandirian dan perubahan perilaku remaja putus sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 630 | Orang | 4,828,179,375 | sts | 71.46 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan sarana panti bina remaja | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | Bulan | 9,958,975,860 | sts | 87.18 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan sarana panti bina remaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | UPTD | - | sts | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan | Terselenggaranya tugas, pokok dan fungsi UPTD Rumoh Seujahtera Anaek Nanggroe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | Anak | 6,616,564,876 | 500.00 | 52.34 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan | Terselenggaranya tugas, pokok dan fungsi UPTD Rumoh Seujahtera Anaek Nanggroe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | UPTD | - | 100.00 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya | Terlaksananya Pelayanan Bagi Panti cacat/ Panti karya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | Orang | 9,917,612,957 | 41.67 | 65.63 | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya | Terlaksananya Pelayanan Bagi Panti cacat/ Panti karya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | UPTD | - | 100.00 | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti Jompo | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Lanjut Usia Dalam Panti Jompo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 395 | Orang | 6,326,850,880 | 395.00 | 66.19 | Dinas Sosial Aceh |
| Program Pem | Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Terberdayanya para penyandang disabilitas dan eks. kusta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,770 | Orang | 8,392,540,302 | 708.00 | 164.98 | Dinas Sosial Aceh |
| Program Pem | Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Eks. Psikotik | Meningkatkan Harkat dan Martabat Para Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Orang | 1,395,617,550 | 153.85 | 88.23 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.17 | - | | | | 201.33 | 265.08 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ERR | | | | ST | ST | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | 23 | **kab/kota** | **11,535,610,571** | | **kab/kota** | **169,534,500** | | **kab/kota** | **677,982,750** | | | **3,059,989,957** | | | **5,885,264,675** | - | **kab/kota** | **9,792,771,882** | **-** | **84.89** | **sts** | **sts** | **29,895,137,201** | **tdr** | **tdr** | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi** | 23 | **kab/kota** | **11,535,610,571** | | **kab/kota** | **169,534,500** | | **kab/kota** | **677,982,750** | | | **3,059,989,957** | | | **5,885,264,675** | - | kab/kota | 9,792,771,882 | **-** | **-** | - | kab/kota | 9,792,771,882 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Permakanan | 1 | Tahun | 3,679,509,628 | | Tahun | 35,170,000 | | Tahun | 82,230,000 | | Tahun | 833,509,127 | 1 | Tahun | 1,339,040,300 | 1 | Tahun | 2,289,949,427 | 100.00 | - | 1 | Tahun | 2,289,949,427 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Sandang | 1 | Tahun | 1,795,043,325 | | Tahun | 58,686,000 | | Tahun | 14,200,000 | | Tahun | 1,219,830,810 | 1 | Tahun | 390,716,115 | 1 | Tahun | 1,683,432,925 | 100.00 | - | 1 | Tahun | 1,683,432,925 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 1 | Tahun | 689,592,600 | | Tahun | - | | Tahun | - | | Tahun | 437,673,000 | 1 | Tahun | 248,085,000 | 1 | Tahun | 685,758,000 | 100.00 | - | 1 | Tahun | 685,758,000 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 1 | Tahun | 4,751,524,191 | | Tahun | 70,430,000 | | Tahun | 567,055,100 | | Tahun | 202,416,620 | 1 | Tahun | 3,743,905,680 | 1 | Tahun | 4,583,807,400 | 100.00 | - | 1 | Tahun | 4,583,807,400 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pelayanan Dukungan Psikososial | 1 | Tahun | 619,940,827 | | Tahun | 5,248,500 | | Tahun | 14,497,650 | | Tahun | 366,560,400 | 1 | Tahun | 163,517,580 | 1 | Tahun | 549,824,130 | 100.00 | - | 1 | Tahun | 549,824,130 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga rentan | Keluarga rentan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 200 | KK | 23,049,713,682 | sts | 103.56 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | - | | | | #DIV/0! | 103.56 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ERR | | | | #DIV/0! | ST | Dinas Sosial Aceh |
| | **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan** | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | 1/7 | **TMP/MPN** | **1,552,375,442** | | **TMP/MPN** | **108,119,000** | | **TMP/MPN** | **161,726,480** | | | **313,493,030** | | | **920,975,200** | - | TMP/MPN | **1,504,313,710** | **-** | **96.90** | - | TMP/MPN | 1,504,313,710 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi** | 7 | **TMP/MPN** | **1,552,375,442** | | **TMP/MPN** | **108,119,000** | | **TMP/MPN** | **161,726,480** | | | **313,493,030** | | | **920,975,200** | - | TMP/MPN | 1,504,313,710 | **-** | **96.90** | - | TMP/MPN | 1,504,313,710 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 1 | Tahun | 803,350,099 | | Tahun | - | 1 | Tahun | 2,000,000 | | Tahun | 6,560,000 | 1 | Tahun | 774,297,200 | 2 | Tahun | 782,857,200 | 200.00 | 97.45 | 2 | Tahun | 782,857,200 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pemelliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 12 | Bulan | 499,025,343 | 3 | bulan | 72,179,000 | 3 | bulan | 91,644,300 | 3 | Bulan | 229,214,300 | 3 | Bulan | 19,892,820 | 12 | bulan | 412,930,420 | 100.00 | 82.75 | 12 | bulan | 412,930,420 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | | | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 12 | Bulan | 250,000,000 | 3 | bulan | 35,940,000 | 3 | bulan | 68,082,180 | 3 | Bulan | 77,718,730 | 3 | Bulan | 126,785,180 | 12 | bulan | 308,526,090 | 100.00 | 123.41 | 12 | bulan | 308,526,090 | tdr | tdr | Dinas Sosial Aceh |
| | Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Kepernitsan dan Keseteiakawanan Sosial | Terlaksananya Kegiatan PNKSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tdr | tdr | 1 | Unit | 5,912,083,587 | sts | 63.97 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133.33 | 101.20 | | | | #DIV/0! | 63.97 | Dinas Sosial Aceh |
| | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | #DIV/0! | R | Dinas Sosial Aceh |

**Faktor pendorong keberhasilan kinerja**

**Faktor penghambat pencapaian kinerja**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) RPJMA 2017-2022 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Kepmen 050/2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2022 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2022 (sd TRIWULAN IV) (%) ☐ ☐ | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2022 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I (Januari - Maret) | | | TW II (April - Juni) | | | TW III | | | TW IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | | | K | | | K | | | K | | | K | | | K | | | | | K | | | | | |
| | | | | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran (Rp) | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | Vol | Satuan | Rp | K | Rp | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 = 10+11+12+13 | | | 15=14/9*100 | | 16=14+8 | | | 17 = 16/7 x 100 | | 18 |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PEMERINTAH ACEH

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

**Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA)Tahun 2024**

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

### 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Ekonomi Aceh dengan migas triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,63 persen (yoy), mengalami kontraksi sebesar -7,06 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022. Tanpa migas, ekonomi Aceh triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,78 persen atau mengalami kontraksi sebesar -6,79 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,03 persen. Lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 berikut ini.

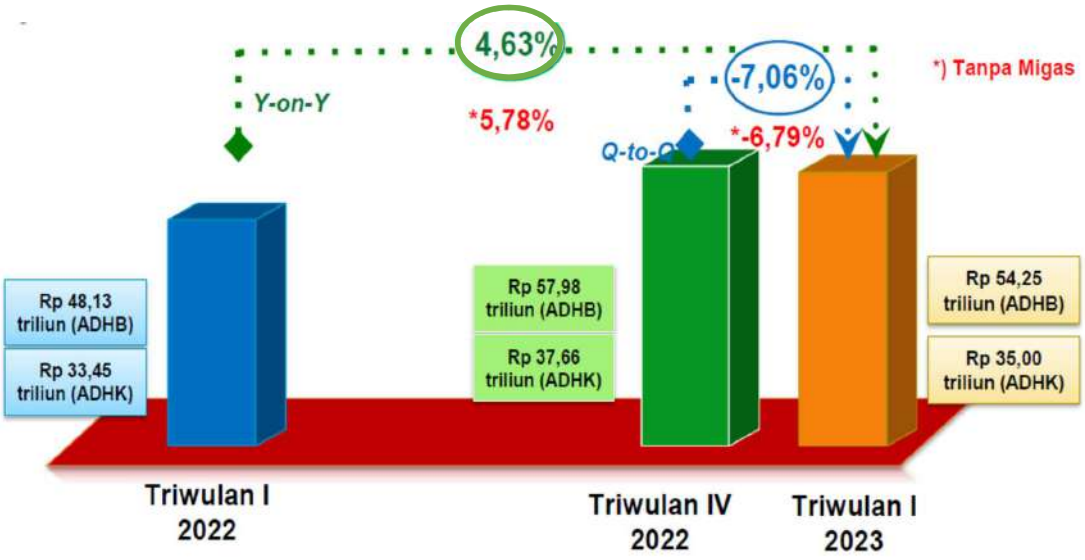


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Mei 2023

**Gambar 3.1**
**Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan I Tahun 2023**

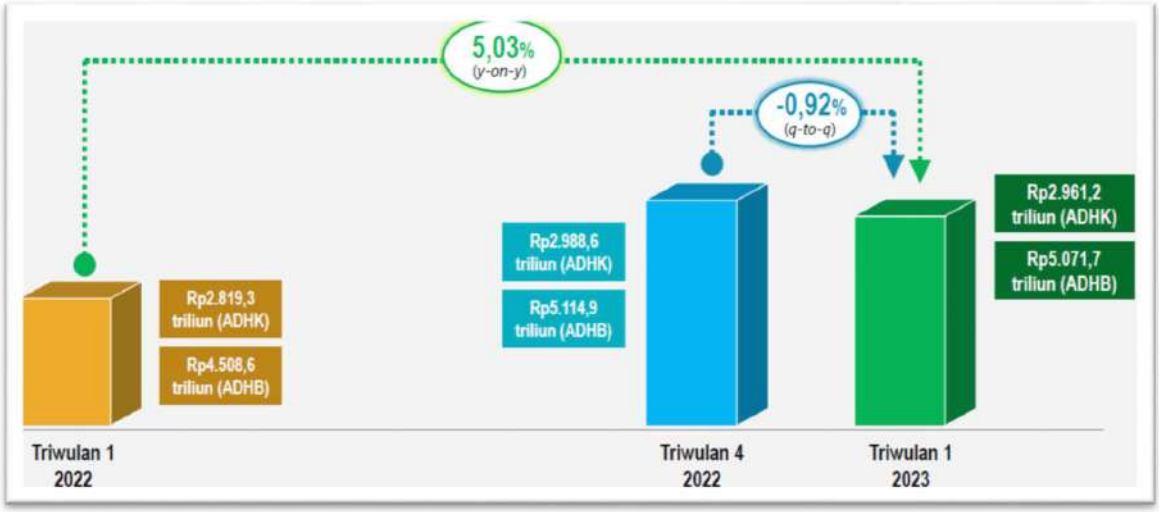


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 05 Mei 2023

**Gambar 3.2**

**Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I Tahun 2023**

Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada triwulan I tahun 2023 (yoy). Pertumbuhan ekonomi Aceh trirwulan I tahun 2023 (yoy) utamanya didorong oleh komsumsi rumah tangga (54,98%), PMTB (31,68%) dan komsumsi komsumsi pemerintah (10,69%). Untuk informasi lebih lanjut mengenai struktur dan sumber pertumbuhan PDRB Aceh triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini.

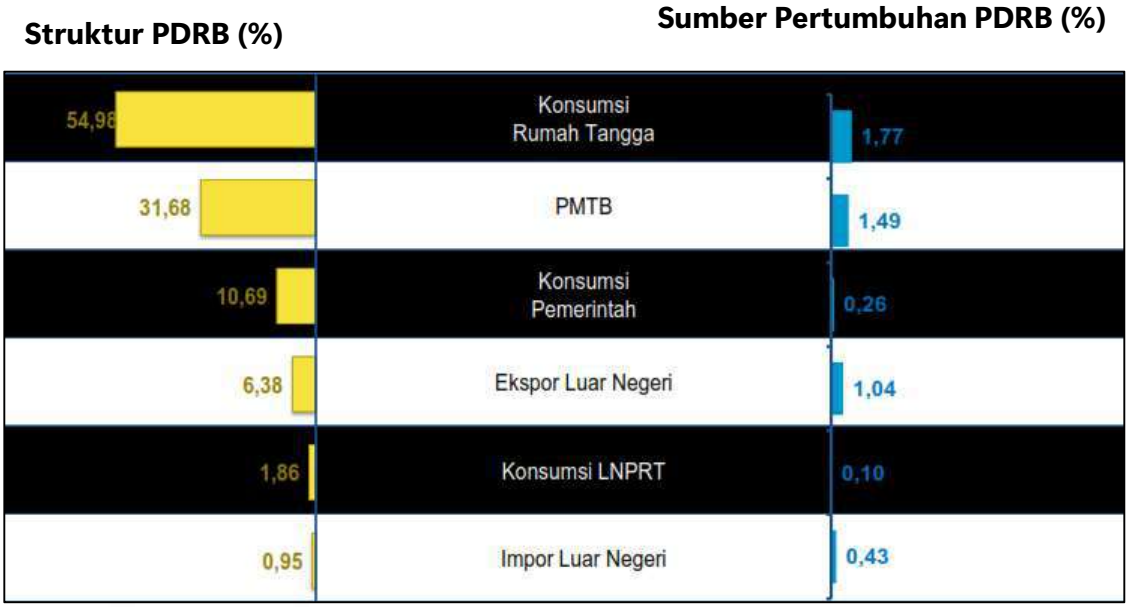


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Mei 2023

**Gambar 3.3**

**Struktur dan Sumber Pertumbuhan PDRB Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2023(yoy)**

Menurut lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I tahun 2023 (yoy) didorong oleh tiga lapangan usaha utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29,61 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,56 persen dan konstruksi sebesar 8,79 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Aceh triwulan I tahun 2023 didorong oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (andil 1,66 %), pertanian, kehutanan dan perikanan (andil 0,92 %) dan informasi dan komunikasi (andil 0,49 %). Lebih jelas struktur PDRB Aceh dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2023 (yoy) dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.

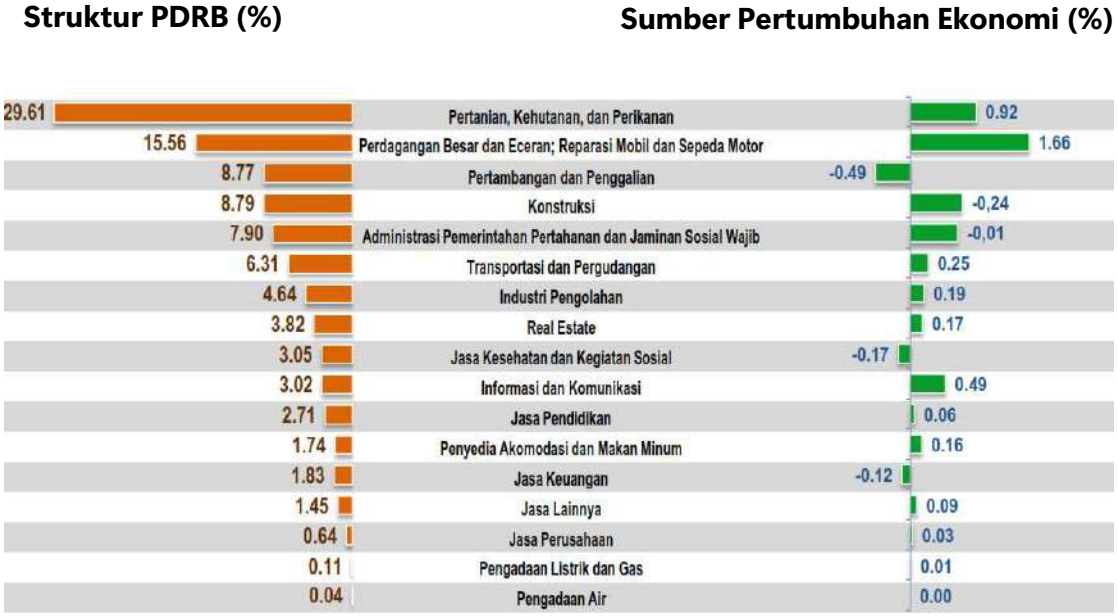


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Mei 2023

**Gambar 3.4**
**Struktur PDRB Aceh dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2023 (yoy)**

### 3.1.2. Inflasi

Inflasi Aceh pada bulan Mei 2023 tercatat sebesar 3,34 persen (yoy) mengalami penurunan sebesar 0,71 persen poin jika dibandingkan dengan bulan April 2023 yang tercatat sebesar 4,05 persen (yoy). Jika dibandingkan dengan periode yang sama inflasi Aceh pada Mei 2023 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,00 persen. Sementara itu jika dilihat dari inflasi bulanan (mtm) pada Mei 2023 tercatat inflasi Aceh sebesar 0,30 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi bulanan (mtm) pada April 2023 yang tercatat sebesar -0,11 persen (deflasi). Lebih jelas

mengenai perkembangan inflasi Aceh periode Januari 2022 s.d Mei 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

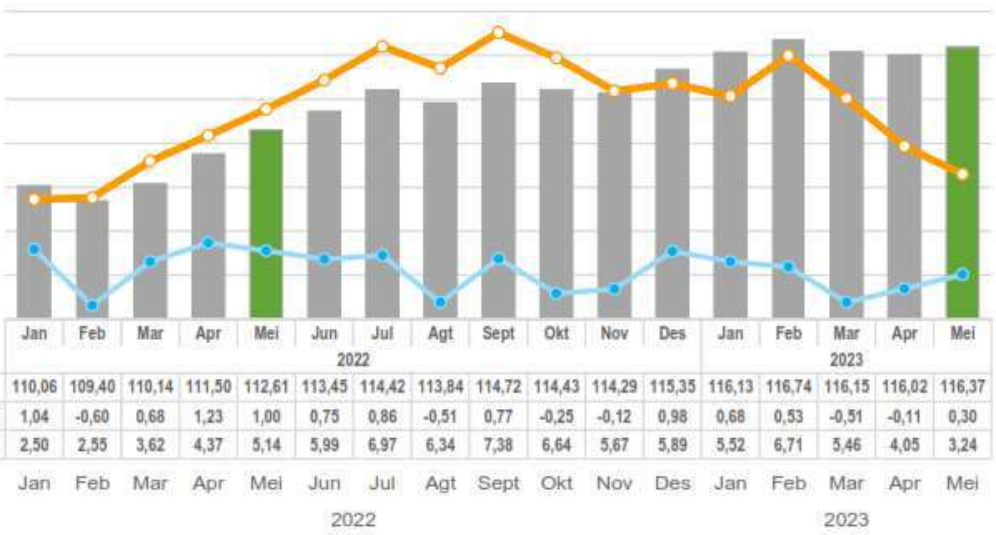


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Juni 2023

**Gambar 3.5**
**Perkembangan Inflasi Aceh Periode Januari 2022 s.d Mei 2023 (yoy)**

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui secara tahunan kelompok utama penyumbang inflasi pada periode Mei 2023 (yoy) adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi sebesar 8,88 persen (andil inflasi 1,10 persen), diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 2,77 persen (andil inflasi sebesar 0,87 persen). Lebih jelas mengenai inflasi berdasarkan kelompok pada periode Mei 2023 (yoy) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**
**Inflasi Berdasarkan Kelompok Periode Mei 2023 (yoy)**

Inflasi berdasarkan kelompok *(y-on-y)*

| | Rincian | Inflasi | Andil Inflasi |
|---|---|---|---|
| | **INFLASI UMUM** | **3,34** | |
| 1. | Makanan, Minuman dan Tembakau | 2,77 | 0,87 |
| 2. | Pakaian dan Alas Kaki | 2,26 | 0,17 |
| 3. | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya | 1,93 | 0,35 |
| 4. | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 2,59 | 0,11 |
| 5. | Kesehatan | 3,88 | 0,08 |
| 6. | Transportasi | 8,88 | 1,10 |
| 7. | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | -0,14 | -0,01 |
| 8. | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 4,06 | 0,05 |
| 9. | Pendidikan | 0,45 | 0,01 |
| 10. | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 4,40 | 0,38 |
| 11. | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 3,05 | 0,21 |

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Juni 2023

Berdasarkan komoditas yang memberikan andil deflasi/inflasi pada Mei 2023 dari kelompok transportasi penyumbang utama inflasi berasal dari komoditas bensin (andil 0,88 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau penyumbang utama inflasi berasal dari komoditas beras (andil 0,40 persen), diikuti rokok kretek filter dengan andil masing-masing sebesar 0,31 persen. Sebaliknya, komoditas penyumbang deflasi utama adalah cabe merah dengan andil deflasi sebesar -0,21 persen. Lebih jelas mengenai komoditas yang memberikan andil dalam deflasi/inflasi periode Mei 2023 (yoy) dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Juni 2023

**Gambar 3.6**
**Komoditas Yang Memberikan Andil Inflasi/Deflasi pada Mei 2023 (yoy)**

Secara regional, inflasi Aceh pada Mei 2023 merupakan terendah ketiga se Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang tercatat sebesar 2,41 persen dan Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat sebesar 2,99 persen. Sementara itu, Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi se Sumatera yang tercatat sebesar 4,31 persen, diikuti Provinsi Lampung sebesar 4,31 persen dan Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 4,19 persen. Lebih jelas mengenai inflasi provinsi se Sumatera pada Mei 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini.

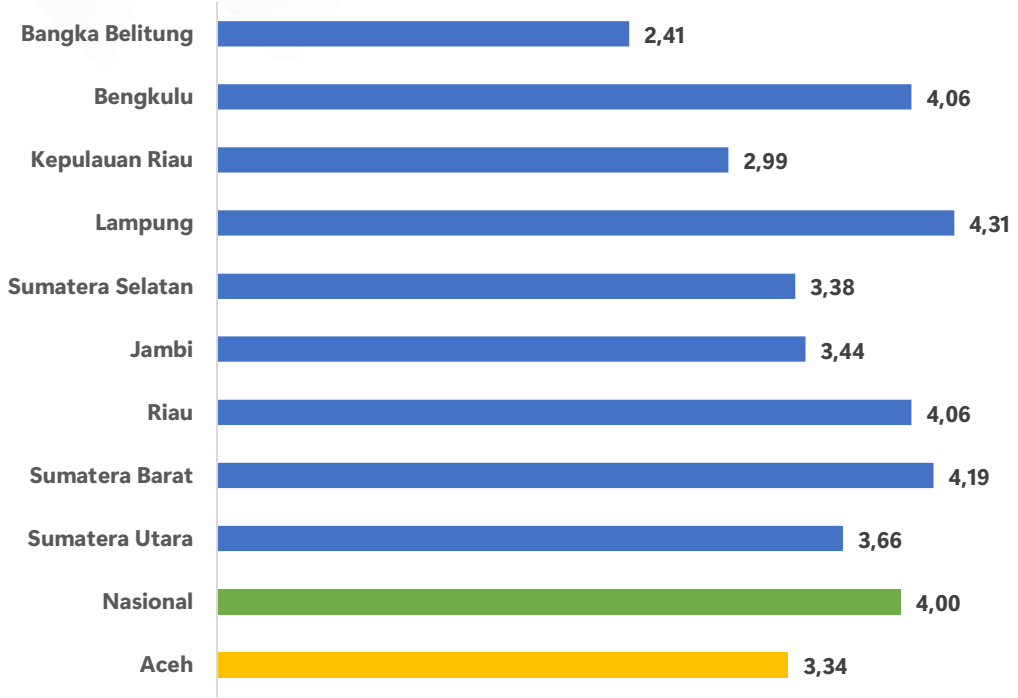


**Gambar 3.7**
**Inflasi Provinsi se Sumatera pada Mei 2023 (yoy)**

### 3.1.3. Gini Ratio

Berdasarkan data September 2022 Gini Ratio Aceh tercatat sebesar 0,291 turun sebesar 0,032 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,323. Gini Ratio perkotaan September 2022 tercatat sebesar 0,327 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 0,357. Sementara itu, Gini Ratio pedesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,252 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 0,282. Lebih jelas mengenai perkembangan Gini ratio Aceh periode Maret 2019 s.d September 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini.

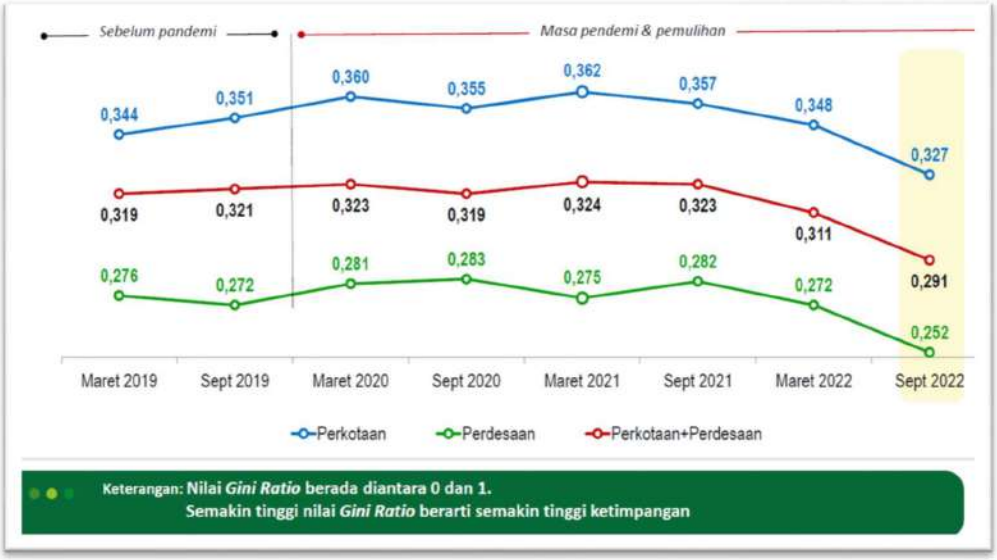


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

**Gambar 3.8**
**Perkembangan Gini Ratio Aceh Maret 2019 – September 2022 (Indeks)**

Secara nasional, gini ratio Aceh September 2022 merupakan gini ratio terendah ke tiga di Indonesia setelah Provinsi Bangka Belitung (0,255) dan Provinsi Kalimantan Utara (0,270). Provinsi dengan gini ratio tertinggi terdapat di Provinsi DI. Yogyakarta yakni mencapai 0,459 diikuti Provinsi Gorontola yang tercatat sebesar 0,423 dan Provinsi Jawa Barat (0,412). Gini ratio per provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut.

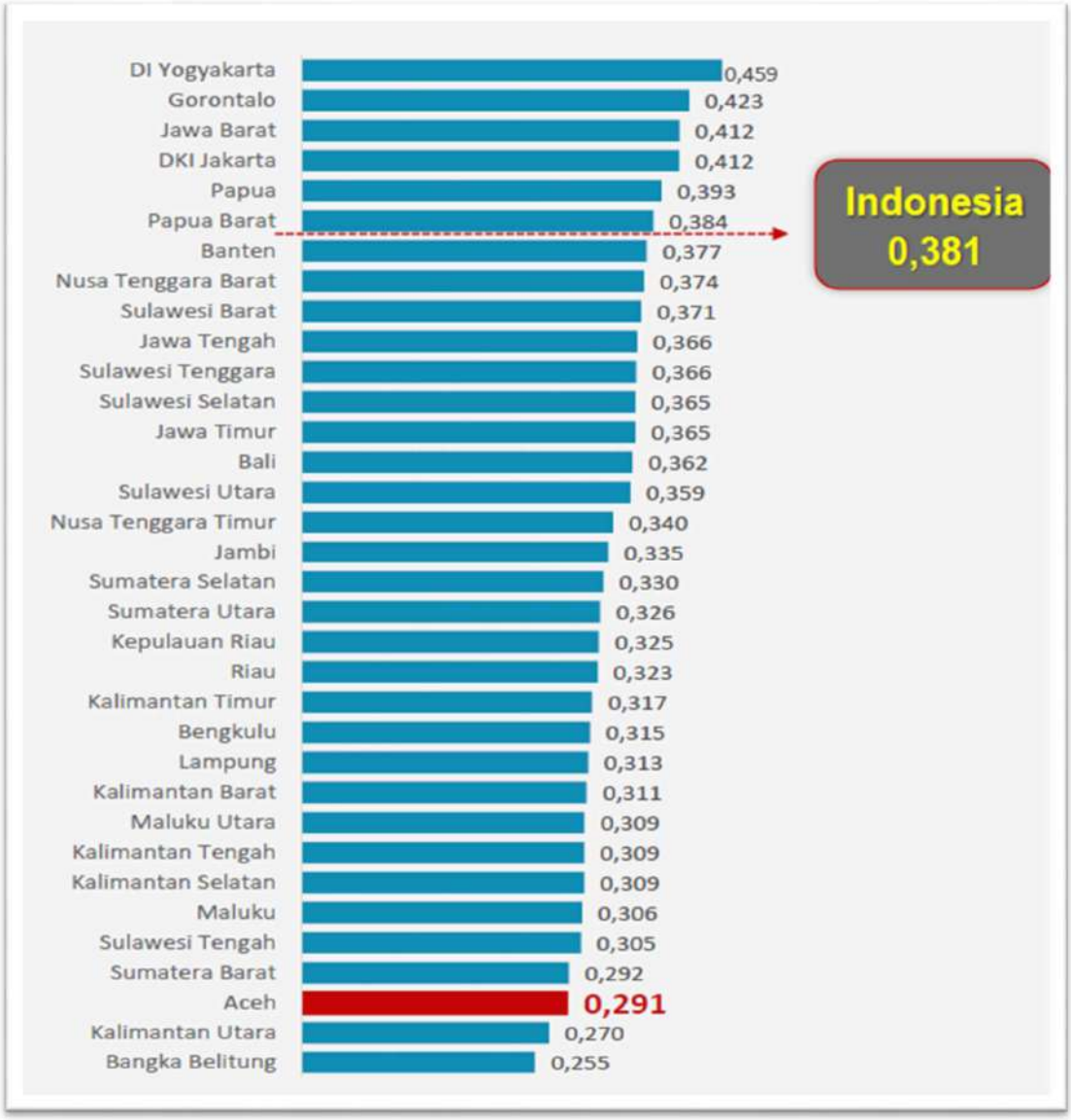


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

**Gambar 3.9**
**Gini Ratio Provinsi di Indonesia September 2022 (Indeks)**

### 3.1.4 Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Persentase kemiskinan Aceh berdasarkan data September 2022 tercatat sebesar 14,75 persen. Capaian persentase kemiskinan Aceh tahun 2022 ini merupakan capaian persentase kemiskinan tertinggi sejak tahun 1998. Selanjutnya, Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya persentase kemiskinan Aceh mengalami penurunan sebesar 0,78 poin. Persentase kemiskinan Aceh September 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,57 persen.

Sementara itu jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 818,47 ribu jiwa mengalami penurunan sebesar 3,74 persen (31,79 ribu jiwa) jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 850,26 ribu jiwa. Lebih jelas mengenai perkembangan kemiskinan Aceh periode Maret 2019 s.d September 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut ini.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

**Gambar 3.10**
**Perkembangan Kemiskinan Aceh Maret 2019 s.d September 2022**

Dari Gambar 3.11 diketahui penurunan persentase penduduk miskin September 2022 didorong oleh menurunnya persentase penduduk miskin baik diperkotaan maupun diperdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada periode September tercatat sebesar 17,06 persen menurun sebesar 0,98 poin jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 18,04 persen. Sementera itu, persentase penduduk miskin di perdesaan September 2022 tercatat sebesar 10,35 persen atau menurun sebesar 0,23 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,58 persen. Lebih jelas mengenai persentase penduduk miskin menurut perkotaan dan perdesaan Maret 2019 s.d September 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut ini.

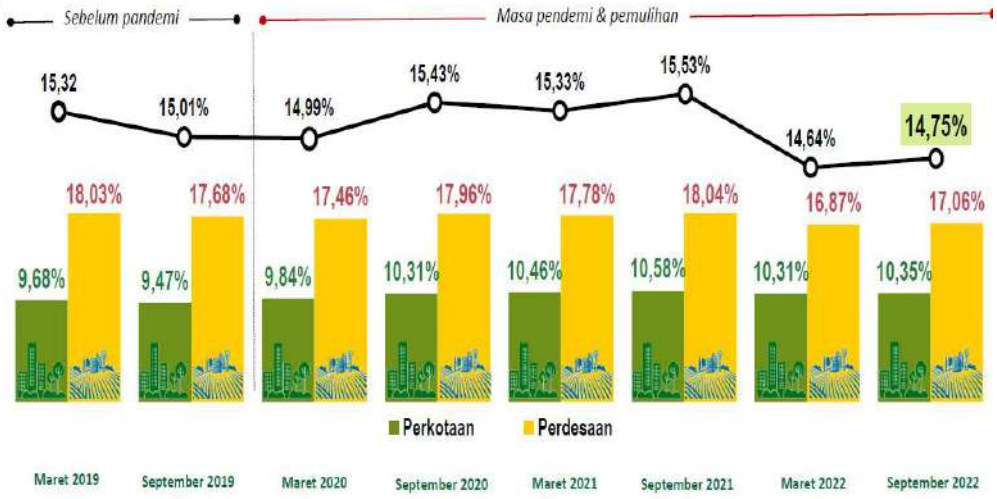


**Gambar 3.11**
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Pedesaan**

Selain permasalahan angka kemiskinan yang masih tinggi, masalah kemiskinan ekstrim juga memerlukan penanganan yang komprehensif. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2021, jumlah kemiskinan ektrim Aceh adalah sebesar 188 ribu jiwa atau 3,47 persen dari total penduduk Aceh, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 162.085 orang atau tercacat sebesar 2,95 persen. Dari Gambar 3.11 diketahui secara keseluruhan kemiskinan ektrim per kabupaten/kota se Aceh tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat siginifikan jika dibandingkan dengan tahun tahun 2021. Kemiskinan ektrim tertinggi di Aceh tercatat di Kabupaten Bener Meriah. Kemiskinan ektrim Kabupaten Bener Meriah tahun 2022 tercatat sebesar 10,16 persen, mengalami penurunan sebesar 3,20 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 6,69 persen. Sementara itu, kemiskinan ektrim terendah tahun 2022 tercatat di Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebesar 0,94 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,08 persen jika dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,02 persen. Lebih jelas mengenai sebaran kemiskinan per kabupaten/kota se-Aceh Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut ini.

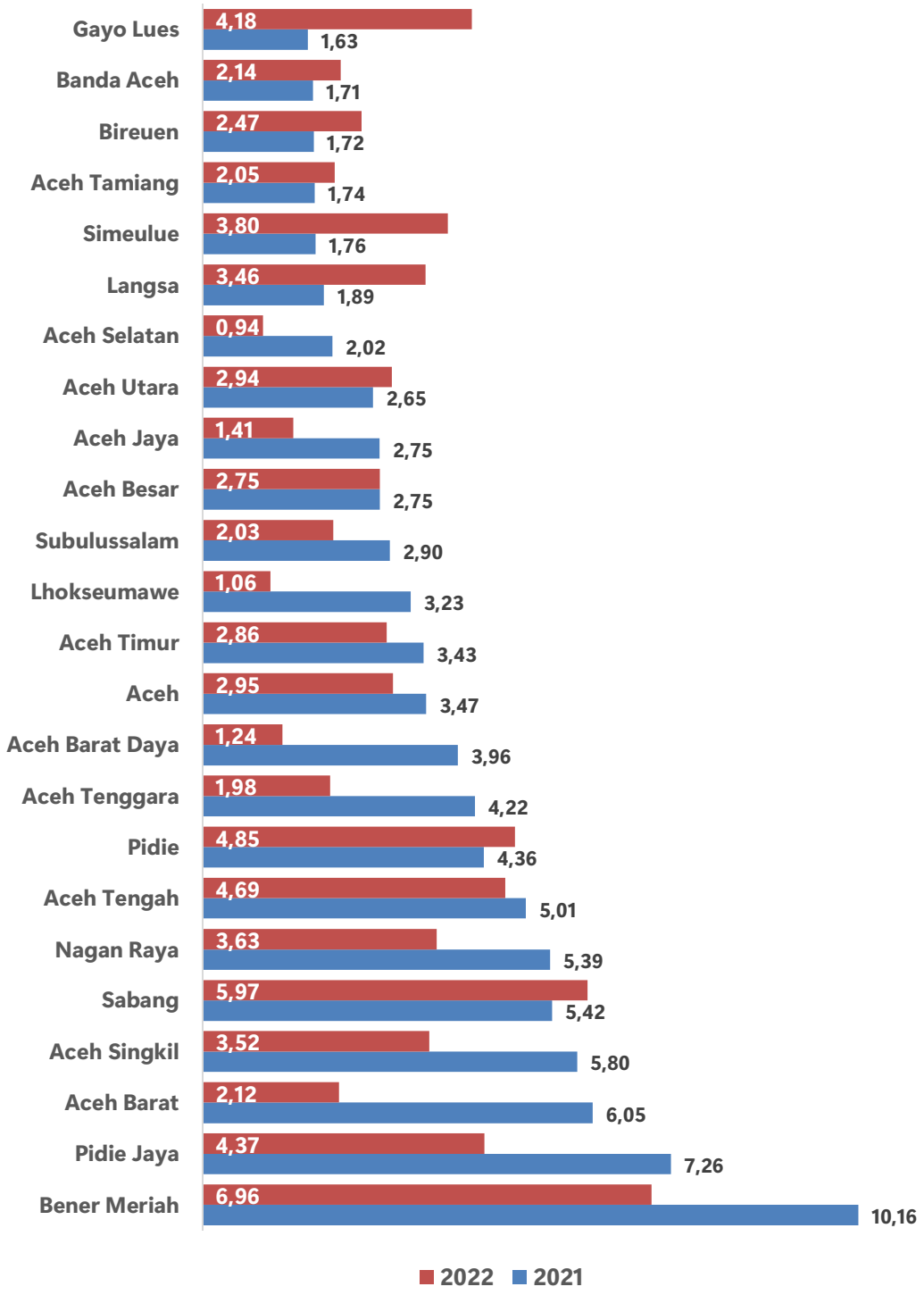


Sumber: TNP2K dan TKP2K Aceh (2023)

**Gambar 3.12**

**Kemiskinan Ektrim Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2021-2022 (Persen)**

### 3.1.5 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2023 tercatat sebesar 5,75 persen, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,97 persen. Penurunan TPT ini disebabkan semakin membaiknya ekonomi sehingga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 72 ribu orang dan berkurangnya pengangguran sekitar 1000 orang. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional, TPT Aceh pada Februari 2023 masih berada diatas rata rata nasional yang tercatat sebesar 5,45 persen. Lebih jelas mengenai perkembangan TPT Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2023 dapat dlihat pada Gambar 3.13 berikut ini.

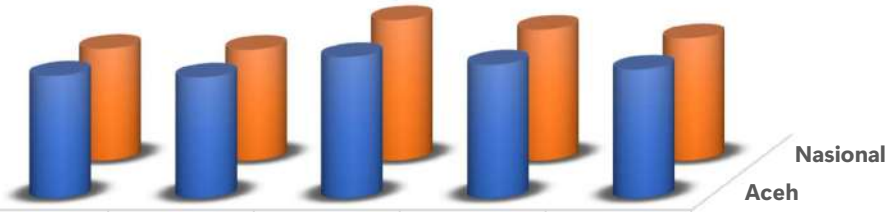


| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 5,48 | 5,40 | 6,30 | 5,97 | 5,75 |
| Nasional | 4,98 | 4,94 | 6,26 | 5,83 | 5,45 |

Aceh Nasional

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh , 05 Mei 2023

**Gambar 3.13**
**Perkembangan TPT Aceh dan Nasional Tahun 2019 s.d 2023**

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Terdapat tiga lapangan pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja paling banyak selama periode Februari 2022 s.d Februari 2023 yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang tercatat sebesar 37,47 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 15,89 persen dan industri pengolahan sebesar 10,03 persen.

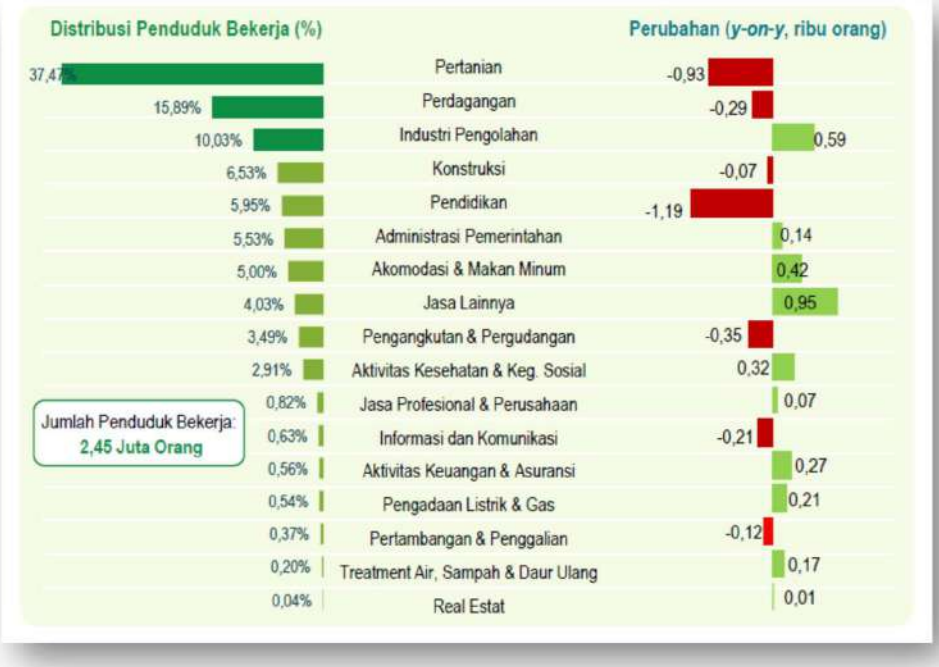


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Mei 2023

**Gambar 3.14**
**Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Februari 2023**

Jumlah penduduk bekerja pada Februari 2023 adalah sebesar 2,45 juta orang dengan status pekerjaan utama paling dominan adalah buruh/karyawan/pegawai, yaitu mencapai sebesar 30,44 persen, diikuti berusaha sendiri sebesar 23,72 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 16,40 persen. Sebaliknya status pekerjaan utama yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 4,05 persen. Sementara itu, berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Februari 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,6 juta orang (65,50%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 845 ribu orang (34,50%). Dibandingkan dengan Februari 2022, persentase

penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 4,62 persen poin (Lihat Gambar 3.14).

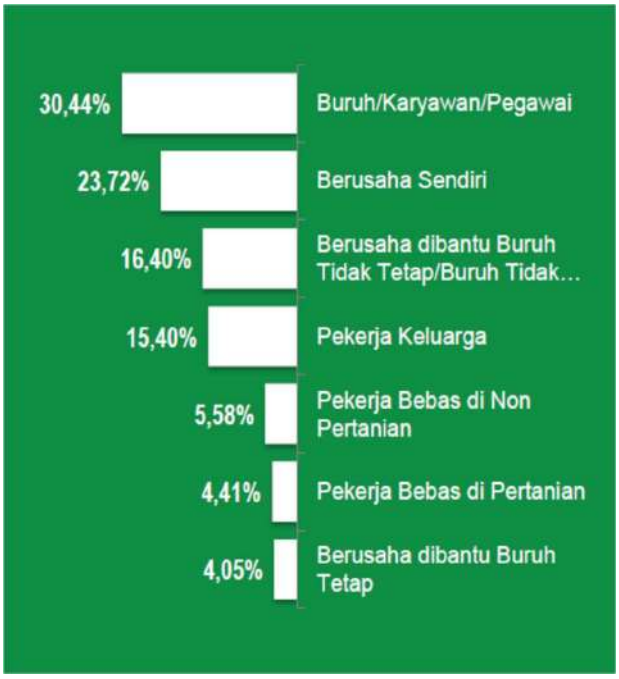


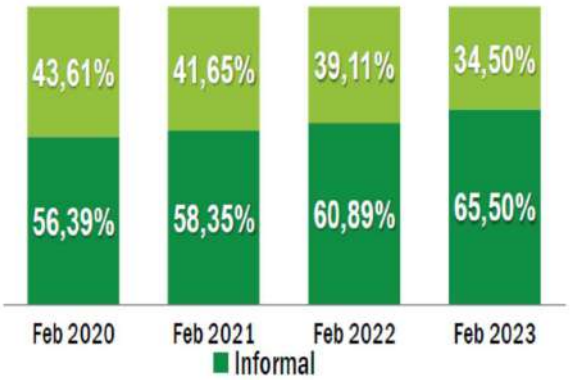


**Penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2022 sebesar 4,62 persen poin**

Keterangan:
Formal : Berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai
Informal : Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja kelurga/tidak dibayar

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 05 Mei 2023

**Gambar 3.15**

**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2020 – Februari 2023**

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Aceh diatas, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian maka arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja melalui sinergitas program/kegiatan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian/Lembaga, Badan Usaha serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh melalui pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau yang mencakup penerapan *good agriculture practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai hilir, dukungan kemitraan dan permodalan, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik

terhadap komoditas unggulan Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala dan karet;

3. Mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan social syariah dan ekonomi pesantren;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
5. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha industri pengolahan dan optimalisasi potensi sector hulu yang memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar;
6. Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program. Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan;
7. Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri. Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi sharing factory yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing.

Selanjutnya, merujuk pada arah kebijakan perekonomian tahun 2024, hasil evaluasi capaian indikator makro Aceh tahun 2022, target indikator makro Aceh dalam RPA Tahun 2023-2024 serta berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan target indikator makro pembangunan tahun 2024 dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Aceh Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2023, maka target pertumbuhan ekonomi makro Aceh dalam RKPA Tahun 2024 adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**

**Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2024**

| | Indikator Makro | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKP | RPA | RKPA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,21 | 3,9 - 4,4 | 3,75 | 4,34 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 14,75 | 12 - 12.50 | 14,53 | 14,53 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 6,17 | 4,8 - 5,5 | 5,36 | 5,36 |
| 4 | Rasio Gini | Indeks | 0,291 | 0,288-0,290 | 0,304 | 0,282 |
| 5 | Indeks Williamson | Indeks | 0,424 | n/a | 0,410 | 0,410 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 72,80 | 73,49 - 73,72 | 72,78 | 73,26 |

Sumber: Ranwal RKP 2024, RPA 2023-2026 dan Hasil Kesepakatan RAKORTEKRENBANG Nasional 2023

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Aceh

Realisasi Pendapatan Aceh periode tahun 2021-2022 menunjukkan hasil yang mengembirakan dimana realisasi pendapatan Aceh mencapai diatas 100 persen dari yang ditargetkan. Tahun 2021 dari pagu sebesar Rp. 13.864.978.453.942,- realisasi mencapai Rp. 13.948.381.469.096,- atau sebesar 100,60 persen. Sementara itu, tahun 2022 realisasi Pendapatan Aceh mencapai 102,24 persen atau sebesar Rp. 13.714.269.633.906,- dari target sebesar Rp. 13.413.980.404.477,-. Sebaliknya, pendapatan Aceh dalam APBA Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 10.186.819.912.074,- atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp. 3.527.449.721.832,- atau sebesar 25,72 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Aceh tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terutama pendapatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang semula sebesar 2 persen dari DAU Nasional, mulai tahun 2023 menjadi 1 persen dari DAU Nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas (2008 s.d 2022) yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh (2023-2027) yang besarnya setara 1% (satu persen) plafon DAU Nasional. Selanjutnya, total pendapatan Aceh untuk tahun 2024 berjumlah sebesar Rp. 10.273.239.031.346,-. Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi/target pendapatan Aceh Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2021-2025**

| Kode | Uraian | 2021 | | | 2022 | | | APBA 2023 | PROYEKSI/TARGET 2024 | PROYEKSI/TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **13.864.978.453.942** | **13.948.381.469.096** | **100,60** | **13.413.980.404.477** | **13.714.269.633.906** | **102,24** | **10.186.819.912.074** | **10.273.239.031.346** | **13.743.744.210.054** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI ACEH** | **2.401.682.455.965** | **2.505.881.104.691** | **104,34** | **2.572.750.100.699** | **2.917.833.097.662** | **113,41** | **2.805.477.191.336** | **2.878.539.415.346** | **2.796.435.377.229** |
| 4.1.01 | Pendapatan Pajak Aceh | 1.374.555.532.889 | 1.529.610.318.108 | 111,28 | 1.574.358.019.378 | 1.717.834.567.620 | 109,11 | 1.720.373.170.814 | 1.798.694.331.748 | 1.797.112.994.591 |
| 4.1.02 | Pendapatan Retribusi Aceh | 12.133.554.700 | 8.307.103.680 | 68,46 | 9.458.309.000 | 14.998.051.792 | 158,57 | 12.942.611.000 | 14.221.210.166 | 10.988.432.821 |
| 4.1.03 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 182.385.550.448 | 152.434.096.229 | 83,58 | 179.862.545.155 | 179.862.545.156 | 100,00 | 252.926.236.000 | 257.740.010.705 | 172.863.283.765 |
| 4.1.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah | 832.607.817.928 | 815.529.586.675 | 97,95 | 809.071.227.166 | 1.005.137.933.094 | 124,23 | 819.235.173.522 | 807.883.862.727 | 815.470.666.052 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **11.435.885.996.400** | **11.431.169.265.498** | **99,96** | **10.821.625.873.000** | **10.775.168.990.686** | **99,57** | **7.377.783.366.738** | **7.392.731.616.000** | **10.564.679.327.108** |
| **4.2.01** | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 11.435.885.996.400 | 11.431.169.265.498 | 99,96 | 10.821.625.873.000 | 10.775.168.990.686 | 99,57 | 7.377.783.366.738 | 7.392.731.616.000 | 10.564.679.327.108 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **27.410.001.577** | **11.331.098.907** | **41,34** | **19.604.430.778** | **21.267.545.558** | **108,48** | **3.559.354.000** | **1.968.000.000** | **382.629.505.717** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 27.410.001.577 | 9.815.653.425 | 35,81 | 19.604.430.778 | 21.161.245.558 | 107,94 | 3.559.354.000 | 1.968.000.000 | 3.514.891.166 |
| 4.3.03 | Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan | - | 1.515.445.482 | - | - | 106.300.000 | - | | - | 377.916.729.422 |
| | Pendapatan Lainnya | | | | | | - | | - | 1.197.885.129 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 (audited), 2022 (unaudited), 2023 (APBA 2023), 2024 (SIPD RI), 2025 (RPA Tahun 2023-2026)

Mengingat kondisi pendapatan Aceh yang terus mengalami penurunan, maka arah kebijakan pendapatan Aceh tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan Aceh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber sumber pendapatan dan aset aset daerah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi sebagai berikut: (1) optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan; peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kapasitas fiscal daerah; mengembangkan inovasi dalam pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan sistem informasi dan telematika dibidang pendapatan (2) meningkatkan dividen BUMD melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme manajemen; (3) optimalisasi pengelolaan aset aset daerah secara profesional; (4) meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana perimbangan melalui insentif fiskal; (5) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) untuk optimalisasi alokasi dana perimbangan sesuai dengan kewenangan (DAK Fisik/Non Fisik, dll).

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Aceh

Realisasi belanja Aceh tahun 2022 mencapai sebesar Rp. 15.772.149.267.459 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.088.575.186.240 (15,26 persen) dari realisasi tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 13.683.574.081.219. Sebaliknya, tahun 2023 belanja Aceh ditargetkan sebesar Rp. 11.093.859.700.979, mengalami penurunan sebesar Rp. 4.678.289.566.480 atau sebesar 29,66 persen. Penurunan belanja ini disebabkan karena menurunnya alokasi Dana Otsus Aceh menjadi 1 persen dari DAU Nasional, sehingga belanja transfer dalam hal ini belanja bantuan keuangan (DOKA) juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp.2.281.665.676.154 pada tahun 2022 menjadi Rp. 950.774.053.151 atau turun sebesar Rp. 1.330.891.623.003 atau sebesar 58,33 persen. Sementara itu toal belanja Aceh tahun 2024 berjumlah sebesar Rp. 10.330.239.031.346. Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi/target belanja Aceh Tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

## Tabel 3.4
## Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2021-2025

| Kode | Uraian | 2021 | | | 2022 | | | APBA 2023 | PROYEKSI/TARGET 2024 | PROYEKSI/TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | **BELANJA** | | | | | | | | | |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | **10.058.436.337.426** | **8.649.309.093.647** | **85,99** | **10.474.623.803.456** | **9.867.602.636.925** | **94,20** | **7.476.810.154.709** | **7.665.553.408.084** | **7.077.867.676.439** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.829.428.312.694 | 2.631.227.115.328 | 93,00 | 2.806.337.723.413 | 2.672.527.008.952 | 95,23 | 3.110.200.922.987 | 3.517.996.396.591 | 2.804.916.122.623 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.936.917.132.917 | 5.125.963.306.105 | 86,34 | 6.191.098.137.082 | 5.977.514.934.131 | 96,55 | 3.424.104.356.955 | 3.542.133.540.912 | 3.700.000.000.000 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | - | - | - | 26.194.608.000 | 13.225.283.500 | 50,49 | 15.041.300.000 | 5.004.200.000 | - |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 907.787.487.926 | 758.581.422.107 | 83,56 | 1.049.661.826.280 | 1.025.274.261.123 | 97,68 | 682.174.430.644 | 588.914.270.580 | 522.951.553.816 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 384.303.403.889 | 133.537.250.107 | 34,75 | 401.331.508.681 | 179.061.149.219 | 44,62 | 245.289.144.123 | 11.505.000.001 | 50.000.000.000 |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | **3.315.459.457.224** | **2.199.333.370.927** | **66,34** | **3.214.492.236.095** | **2.853.569.402.120** | **88,77** | **1.736.334.395.840** | **885.605.122.282** | **1.688.278.675.860** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 98.508.019.284 | 24.732.040.448 | 25,11 | 46.214.892.877 | 45.923.196.963 | 99,37 | 27.517.880.480 | 14.076.900.000 | - |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 366.162.644.235 | 259.171.614.346 | 70,78 | 352.373.976.123 | 345.149.313.315 | 97,95 | 381.901.472.001 | 182.871.067.811 | - |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.053.964.400.810 | 734.555.768.109 | 69,69 | 895.931.886.367 | 827.673.100.586 | 92,38 | 649.261.947.333 | 460.311.169.278 | - |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.595.091.662.803 | 1.055.849.598.983 | 66,19 | 1.779.315.239.792 | 1.519.646.109.587 | 85,41 | 561.864.344.482 | 202.636.390.867 | - |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 201.732.730.092 | 125.024.349.041 | 61,98 | 140.656.240.936 | 115.177.681.669 | 81,89 | 115.788.751.544 | 4.805.594.326 | - |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | 20.904.000.000 | - |
| 5.3 | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **147.985.369.115** | **412.071.890** | **0,28** | **16.828.950.631** | **4.335.030.000** | **25,76** | **67.435.963.704** | **40.000.000.000** | **352.582.490.820** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 147.985.369.115 | 412.071.890 | 0,28 | 16.828.950.631 | 4.335.030.000 | 25,76 | 67.435.963.704 | 40.000.000.000 | |
| 5.4 | **BELANJA TRANSFER** | **2.960.457.145.733** | **2.834.519.544.755** | **95,75** | **3.057.212.526.998** | **3.046.642.198.413** | **99,65** | **1.813.279.186.726** | **1.739.080.500.980** | **1.885.481.713.669** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 811.201.817.610 | 715.264.216.632 | 88,17 | 764.976.522.259 | 764.976.522.259 | 100,00 | 862.505.133.575 | 773.686.840.271 | 660.231.713.669 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.149.255.328.123 | 2.119.255.328.123 | 98,60 | 2.292.236.004.739 | 2.281.665.676.154 | 99,54 | 950.774.053.151 | 965.393.660.709 | 1.225.250.000.000 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **16.482.338.309.498** | **13.683.574.081.219** | **83,02** | **16.763.157.517.180** | **15.772.149.267.459** | **94,09** | **11.093.859.700.979** | **10.330.239.031.346** | **11.004.210.556.788** |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **(2.617.359.855.556)** | **264.807.387.874** | **(10,12)** | **(3.349.177.112.703)** | **(2.057.879.633.553)** | **61,44** | | | |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 (audited), 2022 (unaudited), 2023 (APBA 2023), 2024 (SIPD RI), 2025 (RPA 2023-2026)

Seiring dengan menurunnya pendapatan Aceh yang bersumber dari pendapatan transfer terutama Dana Otonomi Khusus (OTSUS) mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2027, maka arah kebijakan belanja tahun 2024 diarahkan pada upaya penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih terarah, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Aceh. Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja *(performance based)* untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPA 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pengelolaan urusan wajib, Pemerintah Aceh sangat memprioritaskan urusan pemerintahan pelayanan dasar, kesehatan, dan urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). JKA merupakan salah satu prioritas Pemerintah Aceh yang hingga saat ini masih dilakukan, meskipun perlu adanya transisi pengalihan JKA ke JKN sebagai alternatif dalam membiayai pembangunan Kesehatan ditengah terbatasnya kapasitas fiskal Aceh yang terus menyempit;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan. Upaya stimulus belanja tersebut dilakukan guna mengurangi ketimpangan wilayah yang saat ini masih terjadi di Aceh, meskipun ketimpangan tersebut belum menunjukkan gejala ketimpangan yang cukup jauh. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh yakni transfer Pemerintah Aceh ke kabupaten/kota melalui Dana Otonomi Khusus Kab/Kot (DOKA);
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Aceh ditujukan bagi kesejahteraan sosial masyarakat untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim serta fakir miskin;
6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

Realisasi pembiayaan Aceh tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Realisiasi pembiayaan Aceh tahun 2022 berjumlah sebesar Rp. 3.364.256.736.900, mengalami penurunan sebesar Rp. 304.617.729.486 atau sebesar 8,30 persen jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan Aceh tahun 2021 yang berjumlah sebesar Rp. 3.668.874.466.386. Penurunan tersebut dicapai melalui penurunan dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Aceh yang ditargetkan terus menurun seiring dengan meningkatkan realisasi belanja tahun 2022 yang mencapai sebesar 94,20 persen. Upaya dalam pencapaian target tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi dari peranan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dalam mengakses pelayanan tender pekerjaan Pemerintah Aceh di tahun mendatang.

Pada pengeluaran pembiayaan juga diproyeksi adanya penyertaan modal Pemerintah Aceh untuk sektor BUMA seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim serta PEMA sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Aceh. Untuk melihat realisasi dan proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5**

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2021-2025**

| Kode | Uraian | 2021 | | | 2022 | | | APBA 2023 | PROYEKSI/TARGET 2024 | PROYEKSI/TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 6 | **PEMBIAYAAN** | | | | | | | | | |
| 6.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **2.924.359.855.556** | **3.970.103.175.595** | **135,76** | **3.934.177.112.703** | **3.934.684.250.977** | **100,01** | **1.007.039.788.905** | **108.000.000.000** | **1.225.445.488.365** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 2.924.359.855.556 | 3.969.606.675.281 | 135,74 | 3.933.680.612.390 | 3.933.680.612.390 | 100,00 | 1.007.039.788.905 | 108.000.000.000 | 1.225.445.488.365 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | 496.500.313 | - | 496.500.313 | 1.003.638.587 | 202,14 | - | - | - |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **307.000.000.000** | **301.228.709.209** | **98,12** | **585.000.000.000** | **570.427.514.078** | **97,51** | **100.000.000.000** | **51.000.000.000** | **217.462.417.632** |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 65.000.000.000 | 59.791.509.209 | 91,99 | 65.000.000.000 | 50.427.514.078 | 77,58 | 75.000.000.000 | 51.000.000.000 | 40.749.857.632 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh | 242.000.000.000 | 241.437.200.000 | 99,77 | 520.000.000.000 | 520.000.000.000 | 100,00 | 25.000.000.000 | - | 176.712.560.000 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **2.617.359.855.556** | **3.668.874.466.386** | **140,17** | **3.349.177.112.703** | **3.364.256.736.900** | **100,45** | **907.039.788.905** | **57.000.000.000** | **1.007.983.070.733** |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 (audited), 2022 (unaudited), 2023 (APBA 2023), 2024 (SIPD RI), 2025 (RPA 2023-2026)

Lebih rinci alokasi belanja Aceh tahun 2024 per SKPA dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

**Tabel 3.6**
**Proyeksi/Target Belanja Aceh Per SKPA Tahun 2024**

| No | Nama SKPA | Pagu (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH | 24.234.757.612 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 154.075.236.579 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 34.798.037.698 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH | 2.012.527.705.422 |
| 5 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 108.177.976.208 |
| 6 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH | 29.127.759.033 |
| 7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 72.795.523.977 |
| 8 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 6.544.181.265 |
| 9 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | 16.789.184.342 |
| 10 | BIRO HUKUM | 6.198.713.300 |
| 11 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 12.227.813.335 |
| 12 | BIRO ORGANISASI | 2.243.468.541 |
| 13 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 6.299.911.128 |
| 14 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA | 13.774.801.400 |
| 15 | BIRO PEREKONOMIAN | 3.026.260.783 |
| 16 | BIRO UMUM | 161.884.755.888 |
| 17 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN | 893.556.186.390 |
| 18 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 35.027.111.750 |
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 78.308.681.339 |
| 20 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 71.835.180.645 |
| 21 | DINAS KESEHATAN ACEH | 910.331.969.914 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 37.481.686.319 |
| 23 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 71.960.638.178 |
| 24 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 161.047.630.699 |
| 25 | DINAS PANGAN | 30.272.563.741 |
| 26 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 271.250.544.640 |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 20.758.393.184 |
| 28 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 17.038.392.520 |
| 29 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 327.735.961.110 |
| 30 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 28.020.612.757 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN | 2.633.631.725.878 |

| No | Nama SKPA | Pagu (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 32 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 227.356.842.663 |
| 33 | DINAS PENGAIRAN | 178.859.159.490 |
| 34 | DINAS PERHUBUNGAN | 101.629.536.979 |
| 35 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 37.025.515.995 |
| 36 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 52.904.285.494 |
| 37 | DINAS PERTANAHAN | 15.843.127.249 |
| 38 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 145.290.674.432 |
| 39 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 355.918.006.956 |
| 40 | DINAS PETERNAKAN | 67.914.512.255 |
| 41 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN | 14.050.880.522 |
| 42 | DINAS SOSIAL | 69.664.020.297 |
| 43 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH | 53.032.999.662 |
| 44 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK | 57.049.076.370 |
| 45 | INSPEKTORAT | 51.135.107.110 |
| 46 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH | 26.967.098.699 |
| 47 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK | 90.866.566.614 |
| 48 | RUMAH SAKIT JIWA | 109.004.648.035 |
| 49 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 59.034.457.387 |
| 50 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH | 57.081.334.523 |
| 51 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH | 126.296.224.286 |
| 52 | SEKRETARIAT DPR ACEH | 144.547.188.528 |
| 53 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 11.404.791.993 |
| 54 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | 7.716.802.491 |
| 55 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH | 16.662.807.741 |
| **JUMLAH KESELURUHAN** | | **10.330.239.031.346** |

Sumber: Aplikasi SIPD RI

PEMERINTAH ACEH

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

**Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024**

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2005-2025, maka visi pembangunan nasional sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berlandaskan Gotong Royong**". Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah 9 (sembilan) misi yaitu meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini.

**Gambar 4.1**
**Keterkaitan Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024**

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Berdasarkan Gambar 4.1 diketahui sasaran makro pembangunan tahun 2024 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: a)

tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,0 – 7,0 persen, b) tingkat inflasi terjaga pada posisi sebesar 2,7 persen, c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,6 – 4,3 persen, d) pertumbuhan ekspor non migas mencapai 7,4 persen, e) rasio gini berkisar antara 0,360 – 0,374, f) share industri pengolahan mencapai 21 persen, g) pertumbuhan industri pengolahan non migas berkisar antara 6,6-7 persen, h) Indek Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,54, i) defisit transaksi berjakan sekitar 1,7 persen PDB, h) rasio pajak mencapai 10,7-12,3 persen PDB dan i) penurunan emisi GRK mencapai 27,3 persen. Lebih lanjut mengenai sasaran makro pembangunan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

**Gambar 4.2**

**Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024**

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian sasaran makro pembangunan tersebut diatas, maka perlu dilakukan peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

### 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

RKPA Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahapan pembangunan Ke-4 RPJP Aceh Tahun 2005-2025 dan penjabaran tahun kedua RPA Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJP Aceh Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005 – 2025 adalah:

**"ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA"**

Adapun makna Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**Islami** adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki karakter dan akhlak mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

**Maju** adalah kondisi masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadapan tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.

**Damai** adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan baik serta memiliki rasa aman.

**Sejahtera** adalah sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memilki pendidikan, lapangan usaha, dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Aceh tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Merujuk pada RPA Tahun 2023-2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Demokrasi.

   **Sasaran**:

   Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.

2. Tujuan 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional.

   **Sasaran**:

   a. Mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP;
   b. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

c. Meningkatnya tingkat maturitas SPIP;
d. Meningkatnya nilai SAKIP;
e. Meningkatkan profesionalitas ASN;
f. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik.

3. Tujuan 3: Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah.

   **Sasaran**:
   a. Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-qur'an;
   b. Meningkatnya kemandirian dayah;
   c. Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan;
   d. Meningkatnya penyaluran ZIS;
   e. Menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh.

4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan.

   **Sasaran**:
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan;
   b. Peningkatan kualitas hasil belajar siswa;
   c. Keterserapan lulusan SMK dan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK;
   d. Meningkatnya sekolah yang terakreditasi;
   e. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
   f. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga;
   g. Meningkatnya minat baca masyarakat;
   h. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
   i. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

5. Tujuan 5: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi COVID-19.

   **Sasaran**:
   a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan;
   b. Menurunkan beban penduduk miskin;
   c. Pengendalian inflasi;
   d. Meningkatkan kemandirian desa;

e. Pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19;
f. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
g. Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian;
h. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh;
i. Meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh;
j. Meningkatnya sub kontribusi pariwisata;
k. Intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan;
l. Meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan;
m. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

6. Tujuan 6: Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.

   **Sasaran**:

   a. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah;
   b. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW;
   c. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik;
   d. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar;
   e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
   f. Meningkatkan pengelolaan hutan lestari;
   g. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

7. Tujuan 7: Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

   **Sasaran**:

   Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal.

Lebil jelas terkait hubungan tujuan, sasaran beserta indikator kinerja tujuan/sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024**

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Meningkatkan Pembangunan Demokrasi** | **1** | **Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh** | **Indeks** | **74,22** | **Kesbang** |
| 1.1 | Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh, Laki-laki dan Perempuan, serta Peran Lembaga Demokrasi. | 1.1.1 | Skor Aspek Hak-Hak Politik | Skor | 65,50 | Kesbang |
| | | 1.1.2 | Skor Aspek Lembaga Demokrasi | Skor | 75,50 | Kesbang |
| **2** | **Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional** | **2** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **66,00** | **Ro. Organ** |
| 2.1 | Mempertahankan Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan pada level WTP | 2.1 | Opini BKP | WTP/WDP | WTP | BPKA |
| 2.2 | Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2.2 | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Skor | 2,8500/ Tinggi | Ro.Pemotda |
| 2.3 | Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP | 2.3 | Level Maturitas SPIP Terintegrasi | Level | 3 | Inspektorat |
| 2.4 | Meningkatnya Nilai SAKIP | 2.4 | Nilai SAKIP | Nilai | 66,00 | Ro. Organ |
| 2.5 | Meningkatkan Profesionalitas ASN | 2.5 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 79,8 | BKA |
| 2.6 | Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi | 2.6 | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,40 | Kominsa |

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik | | | | | |
| **3** | **Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah** | **3** | **Indeks Pembangunan Syariat Islam** | **Indeks** | **85,00** | **DSI** |
| 3.1 | Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Al-Quran | 3.1 | Angka Melek Alqur'an | % | 85,00 | DSI |
| 3.2 | Meningkatnya Kemandirian Dayah | 3.2 | Persentase Dayah yang Mandiri | % | 41,00 | Dayah |
| 3.3 | Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan | 3.3 | Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal | % | 55,50 | MPU |
| 3.4 | Meningkatnya Penyaluran ZIS | 3.4 | Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama | % | 80,00 | BMA |
| 3.5 | Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh | 3.5 | Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Rasio | 0,063 | MAA |
| **4** | **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan** | **4** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Indeks** | **72,78** | **Bappeda** |
| 4.1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan | 4.1.1 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,52 | Disdik |
| | | 4.1.2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,82 | Disdik |

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 4.2 | Meningkatnya kemampuan literasi peserta didik (SMA/SMK/SLB) | 4.2.1 | Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 56,03 | Disdik |
| | | 4.2.2 | Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 48,94 | Disdik |
| | | 4.2.3 | Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 53,27 | Disdik |
| | | 4.2.4 | Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 47,09 | Disdik |
| | | 4.2.5 | Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,96 | Disdik |
| | | 4.2.6 | Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 44,51 | Disdik |
| | | 4.2.7 | Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 59,6 | Disdik |
| | | 4.2.8 | Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 53,29 | Disdik |
| | | 4.2.9 | Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 57,27 | Disdik |
| | | 4.2.10 | Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 52,41 | Disdik |
| 4.3 | Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi | 4.3 | Persentase Sekolah dengan Akreditasi A | % | 95,81 | Disdik |
| 4.4 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. | 4.4.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,98 | DP3A |
| | | 4.4.2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 66,49 | DP3A |

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 4.5 | Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga | 4.5 | Persentase Pemuda Berpretasi | % | 4,17 | Pora |
| | | | Persentase Atlet Yang Berprestasi | % | 85,00 | Dispora |
| 4.6 | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | 4.6 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 17,51 | Arpus |
| 4.7 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | 4.7.1 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,02 | Dinkes |
| | | 4.7.2 | Persentase Balita Stunting | % | 29,00 | Dinkes |
| | | 4.7.3 | Angka Kematian Bayi | /1000 LH | 9 | Dinkes |
| | | 4.7.4 | Angka Kematian Ibu | /100.000 LH | 183 | Dinkes |
| 4.8 | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan | 4.8.1 | Persentase Rumah Sakit Regional yang Fungsional | % | 20 | Dinkes |
| | | 4.8.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa | Indeks | 85,70 | RSJ |
| | | 4.8.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin | Indeks | 91,77 | RSUZA |
| | | 4.8.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak | Indeks | 83,75 | RSIA |
| **5** | **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan** | **5** | **Persentase Penduduk Miskin** | **%** | **14,53** | **Bappeda** |

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | **Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19** | | | | | |
| 5.1 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan | 5.1.1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | NTP | 101,49 | Tanbun |
| | | 5.1.2 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | NTN | 103 | DKP |
| 5.2 | Menurunkan Beban Penduduk Miskin | 5.2 | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | % | 76,1 | Dinsos |
| 5.3 | Pengendalian Inflasi | 5.3 | Laju Inflasi | % | 2,15 | Indag |
| 5.4 | Meningkatkan Kemandirian Desa | 5.4 | Rerata Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks | 0,65 | DPMG |
| 5.5 | Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Covid-19 | 5.5 | Rasio UMKM Yang Diberdayakan | Rasio | 0,015 | Kop-UKM |
| | | **5** | **Pertumbuhan PDRB** | **%** | **3,75** | **Bappeda** |
| 5.6 | Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | 5.6 | Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | % | 31,23 | Tanbun |
| 5.7 | Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian | 5.7 | Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB | % | 4,30 | ESDM |
| 5.8 | Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian aceh | 5.8.1 | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | % | 5,0 | Indag |

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 5.8.2 | Pertumbuhan Ekspor Non Migas | % | 6 | Indag |
| 5.9 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh | 5.9 | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp.Miliar | 11,13 | DPMPTSP |
| 5.10 | Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata | 5.10 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | % | 1,8 | Budpar |
| 5.11 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan | 5.11.1 | Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM) | % | 10 | Bappeda, BPKA |
| 5.12 | Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan | 5.12 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 75,59 | Pangan |
| | | **5** | **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** | **%** | **5,36** | **Naker** |
| 5.13 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar | 5.13.1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 64,55 | Naker |
| | | 5.13.2 | Rasio Penduduk Yang Bekerja | % | 98,98 | Naker |
| **6** | **Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana** | **6** | **Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)** | **Indeks** | **0,410** | **Bappeda** |
| 6.1 | Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah | 6.1.1 | Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap | % | 89,16 | PUPR |

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 6.1.2 | Rasio Konektivitas Daerah | Rasio | 0,73 | Dishub |
| 6.2 | Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 6.2 | Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA | % | 80 | PUPR |
| 6.3 | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 6.3 | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | % | 56,23 | Pengairan |
| 6.4 | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar | 6.4.1 | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni | % | 46,92 | Perkim |
| | | 6.4.2 | Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak | % | 78,5 | Perkim |
| | | 6.4.3 | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak | % | 88,2 | Perkim |
| 6.5 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 6.5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 76,48 | DLHK |
| 6.6 | Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari | 6.6 | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Indeks | 77,03 | DLHK |
| 6.7 | Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana | 6.7 | Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB) | Indeks | 143/ sedang | BPBA |
| **7** | **Meningkatkan Penguatan Perdamaian** | **7** | **Skor Aspek Kebebasan Sipil** | **Skor** | **85,10** | **Kesbang** |

| Tujuan / Sasaran | | Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit) | | Satuan | Target 2024 | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 7.1 | Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal | 7.1 | Pencegahan dan Mitigasi Konflik | Rasio | 0,857 | BRA |

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4.2 diketahui keterkaitan antara sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 dengan sasaran pada Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**
**Keterkaitan Sasaran Pembangunan Aceh dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024**

| No. | Sasaran Pembangunan Aceh | Indikator Sasaran | PN | Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh, Laki-laki dan Perempuan, serta Peran Lembaga Demokrasi. | Skor Aspek Hak-Hak Politik | **PN7** | Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal. | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Nilai); Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah2) (%) |
| | | Skor Aspek Lembaga Demokrasi | | | |
| 2 | Meningkatkan Profesionalitas ASN | Indeks Profesionalitas ASN | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indek Pelayanan Publik (Nilai) |
| 3 | Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh | Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | **PN4** | Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai) |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | **PN3** | Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan | Harapan lama sekolah (tahun), Rata-rata lama sekolah usia 15 tahun keatas (tahun), Nilai Rata rata hasil PISA (membaca, matematika dan sains) |

| No. | Sasaran Pembangunan Aceh | Indikator Sasaran | PN | Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | | | |
| 5 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda | Indek Perlindungan Anak (IPA) , Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
| 6 | Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga | Persentase Pemuda Berprestasi | | | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) |
| 7 | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | **PN4** | Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif | Nilai Budaya Literasi (NBL) |
| 8 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Persentase Balita Stunting | **PN3** | Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%), Persentase imunisasi dasar lengkap pada anakl usia 12-23 bulan (%), Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus pada balita (%) |
| | | Angka Kematian Bayi | | | Angka Kematian Bayi |
| | | Angka Kematian Ibu | | | Angka Kematian Ibu |

| No. | Sasaran Pembangunan Aceh | Indikator Sasaran | PN | Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Menurunkan Beban Penduduk Miskin | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | | Meningkatnya perlindungan sosial untuk bagi seluruh penduduk | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial , Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah |
| 10 | Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | **PN1** | Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | Rasio kewirausahaan nasional (%), Pertumbuhan PDB pertanian (%), Pertumbuhan PDB perikanan (%), |
| 11 | Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian aceh | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | | | Pertumbuhan PDB industri pengolahan, Kontribusi PDB industri pengolahan |
| | | Pertumbuhan Ekspor Non Migas | | | Pertumbuhan ekspor industri pengolahan, Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa |

| No. | Sasaran Pembangunan Aceh | Indikator Sasaran | PN | Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | | | Pertumbuhan investasi (PMTB) |
| 13 | Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | | | Nilai devisa pariwisata, Kontribusi PDB pariwisata |
| 14 | Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan | Indeks Ketahanan Pangan | | Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai), Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP) |
| 15 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Sesuai dengan Kebutuhan Pasar | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | **PN3** | Meningkatnya produktifitas dan daya saing | Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang), Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%),Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%),Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe), Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk), Jumlah inovasi yang dimanfaatkan |

| No. | Sasaran Pembangunan Aceh | Indikator Sasaran | PN | Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | industri/badan usaha (inovasi), Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI), Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur), Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan |
| 16 | Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah | Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap | **PN5** | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar | Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%),Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km), Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%),Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%),Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara (%) |
| | | Rasio Konektivitas Daerah | | | |
| 17 | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | | | Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif) |

| No. | Sasaran Pembangunan Aceh | Indikator Sasaran | PN | Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni | | | Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau |
| | | | | Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau diperkotaan, Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) |
| 19 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | **PN6** | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
| 20 | Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | | Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline | Persentase penurunan emisi GRK-kumulatif, Persentase penurunan emisi GRK -tahunan dan Persentase penurunan intensitas emisi GRK |
| 21 | Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana | Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB) | | Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim | Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB |

| No. | Sasaran Pembangunan Aceh | Indikator Sasaran | PN | Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal | Pencegahan dan Mitigasi Konflik | **PN4** | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| | | | | Menguatkan moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kerukunan masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama |

Sumber: RPA Tahun 2023-2026, Ranwal RKP Tahun 2024, diolah

## 4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

### 4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2024

Berdasarkan hasil capaian pembangunan tahun 2022 dan merujuk pada RPJMN Tahun 2020-2024, maka tema RKP Tahun 2024 adalah " "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan sasaran sebagai berikut:

**Tabel 4.3**
**Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024**

| No | Indikator Makro | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPJMN | RKP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,31 | 6,2 - 6,5 | 5,3 – 5,7 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 9,57 | 6,0 - 7,0 | 6,5 – 7,5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,86 | 3,6 - 4,3 | 5,0 – 5,7 |
| 4 | Rasio Gini | Indeks | 0,381 | 0,360 - 0,374 | 0,374 – 0,377 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 72,91 | 75,54 | 73,99 – 74,02 |
| 6 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | % | | 27,3 | 27,27 |
| 7 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Nilai | 106,45 | 107 | 107-110 |
| 8 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Nilai | 107,33 | 105 | 105-108 |
| | | | | | |

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan Ranwal RKP 2024

Dari Tabel 4.3 diketahui beberapa target indikator makro pembangunan tahun 2024 mengalami penyesuaian dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi capaian sasaran pembangunan tahun 2022, ketidakpastian perkembangan ekonomi global, terkoreksinya harga beberapa komoditas yang menunjukkan tren penurunan serta tekanan inflasi yang cukup tinggi walaupun pada beberapa negara sudah menunjukkan sinyal penurunan.

Sementara itu, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 tersebut, maka ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitasilisasi industri dan penguatan riset terapan;

4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran dan mendukung kebijakan pembangunan tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 sebagaimana yang disajikan pada infografis berikut ini.

**Gambar 4.3**
**Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024**

Masing masing PN Tahun 2024 memiliki sasaran yang ingin diwujudkan. Rincian sasaran untuk masing-masing PN disajikan sebagai berikut:

PN 1 "**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**". Sasaran PN 1 meliputi:

1. Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong (a) Porsi EBT dalam bauran energi nasional, (b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan (c) Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan.

2. Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha dengan mendorong (a) Rasio kewirausahaan nasional, (b) Pertumbuhan PDB pertanian, (c) Pertumbuhan PDB perikanan, (d) Pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) Kontribusi PDB industri pengolahan, (f) Nilai devisa pariwisata, (g) Kontribusi PDB pariwisata, (h) Penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) Pertumbuhan investasi (PMTB), (j) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan (1) Rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2 "**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**". Sasaran PN 2 meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) IPM KTI, dan (c) Persentase penduduk miskin KTI.
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM KBI, dan (c) Persentase penduduk miskin KBI.

PN 3 "**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**". Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah.
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita, (f) Insidensi tuberkulosis, (g) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (i) Prevalensi obesitas pada

penduduk umur > 18 tahun, (j) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca, (1) Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika, (m) Nilai rata-rata hasil PISA: Sains, (n) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (o) Harapan lama sekolah.

4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan mendorong (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong (a) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing mendorong (a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (c) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 200, (d) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 300, (e) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 500,, dan (f) Peringkat Global Innovation Index.

PN 4" **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**". Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) Indeks Capaian Revolusi Mental dan (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan.
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat.
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong Indeks Kerukunan Umat Beragama
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan.
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi.

PN 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendubuna Pengembangan Ekonomi dan Pelayan Dasar". Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif).
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara.
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, dan (b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan.
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong (a) Rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) Penurunan emisi GRK sektor energi.
5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan mendorongPersentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

PN 6 "**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**". Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan mendorong (a) Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif, (b) Persentase penurunan emisi GRK - tahunan, dan (c) Persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7" **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**". Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan mendorong (a) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong Indeks Pembangunan Hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya.

Disamping itu, jika kita lihat keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 dengan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PN 1 "**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**" memiliki keterkaitan dengan beberapa Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024 yang meliputi a) pengendalian inflasi; b) meningkatkan kemandirian desa; c) meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; d) meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian; e) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh; f) meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh; g) meningkatnya sub kontribusi pariwisata; h) intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan; i) meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan.
2. PN 2" **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 yang mencakup : a) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh, b) menurunkan beban penduduk miskin, c) meningkatnya sub kontribusi pariwisata;
3. PN 3 "**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 yang meliputi: a) meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan; b) meningkatnya sekolah yang terakreditasi; c) meningkatkan

pengarusutamaan gender dalam pembangunan; d) meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga, e) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; f) meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan; g) menurunkan beban penduduk miskin; dan h) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. PN 4 "**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 yang meliputi sebagai berikut: a) menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh; b) meningkatnya minat baca masyarakat; c) memitigasi munculnya potensi konflik horizontal;
5. PN 5 "**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 yakni meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah;
6. PN 6 "**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 yang meliputi: a) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; b) meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan c) meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana;
7. PN 7 "**Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 dengan yang meliputi: a) meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi; b) mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP; c) meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); d) meningkatnya tingkat maturitas SPIP; e) meningkatnya nilai SAKIP; f) meningkatkan profesionalitas ASN; g) meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik.

### 4.2.2 Penelaahan Pokok Pokok Pikiran

Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penelaahan pokok pokok pikiran merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan perti,bangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program/kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPA tahun 2024 pokok pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan riil anggaran oleh Bappeda setelah berkoordinasi dengan SKPA terkait. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam SIPD dengan tahapan sebagai berikut:

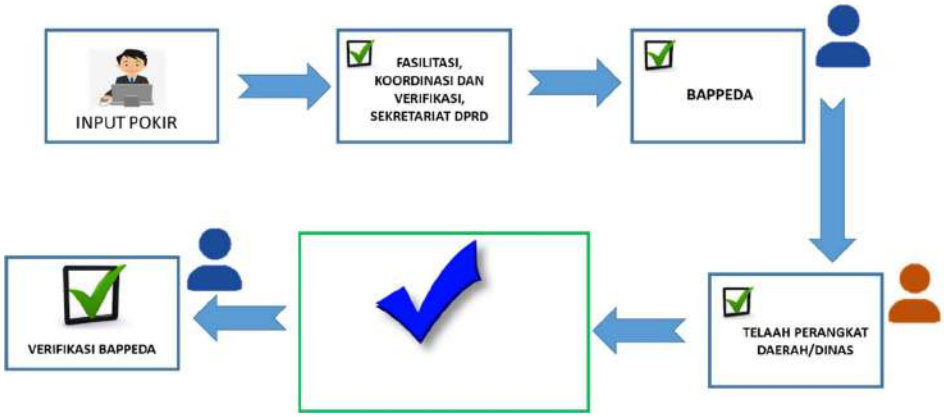


**Gambar 4.4**
**Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRA**

POKIR memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan RKPD. Hal ini disebabkan karena melalui POKIR yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Melalui penyampaian POKIR ini akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah. Selanjutnya, berdasarkan masukan hasil penelaahan POKIR yang dirumuskan dalam bentuk permasalahan akan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan. Adapun permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh
   a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dayah/pesantren;
   b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana ibadah (mesjid, balai pengajian, dll);
   c. Masih lemahnya penguatan pelaksanaan syariat Islam;
   d. Masih terbatasnya pemberdayaan ekonomi bagi korban konflik;
B. Layanan Urusan Wajib
   1) Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
b. Masih terbatasnya upaya dalam mitigasi bencana;
c. Masih minimnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman;
d. Belum meratanya sarana dan prasarana SMU dan SMK;
e. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin;

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar
a. Masih lemahnya daya saing Koperasi dan UMKM;
b. Masih rendahnya ketahanan dan kemandirian pangan;
c. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja;
d. Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat;

3) Layanan Urusan Pilihan
a. Belum optimalnya promosi dan publikasi pariwisata dan kebudayaan Aceh;
b. Masih minimnya pengembangan objek wisata unggulan Aceh;
c. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM pariwisata Aceh;
d. Masih rendahnya produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
e. Belum berkembangnya penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan;
f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
g. Masih terbatasnya sarana penanganan perikanan pada kelompok nelayan;
h. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan;
i. Masih rendahnya peranan perempuan dalam hukum, politik dan social ekonomi;
j. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender;
k. Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMG.

### 4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian target indikator tujuan dan sasaran tahun 2024 sebagaimana yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026, maka disusunlah 61 (enam puluh satu) strategi dan 74 (tujuh puluh empat) arah kebijakan pembangunan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

**Strategi :**

1. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa;
2. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

3. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
4. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
5. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
6. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBA;
7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Pemantapan pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. Peningkatan implementasi MRI, kapabilitas APIP dan IEPK;
10. Pemantapan penataan organisasi;
11. Peningkatan kompetensi kepegawaian daerah;
12. Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik;
13. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang lebih transparan;
14. Aplikasi informatika yang lebih efisien dan *update*;
15. Penyelenggaraan statistik tematik;
16. Meningkatkan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
17. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian;
18. Peningkatan pelaksanaan dan pengawasan syariat Islam Aceh;
19. Peningkatan akreditasi dan mutu pendidikan dayah;
20. Penguatan peran ulama dalam pembangunan;
21. Optimalisasi ZISWAF melalui tersedianya data muzakki dan mustahik seluruh Aceh;
22. Peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat;
23. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap;
24. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan;
25. Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan;
26. Peningkatan karakter pemuda yang berkualitas dan berdaya saing;
27. Pembinaan atlet dan organisasi keolahragaan;
28. Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca;
29. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;

30. Pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);
31. Percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat;
32. Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional;
33. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
34. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian;
35. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin;
36. Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi;
37. Peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa;
38. Peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha;
39. Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional;
40. Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
41. Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian;
42. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
43. Peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemeritah untuk kemudahan akses bagi calon investor;
44. Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan;
45. Peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh;
46. Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal;
47. Peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi;
48. Penciptaan industri digital marketing dikalangan pengusaha pemula;
49. Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi;
50. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan;
51. Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang;
52. Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air (SDA) serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat;
53. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman;
54. Melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
55. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim;
56. Meningkatkan pengelolaan persampahan;
57. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;

58. Pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
59. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
60. Penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
61. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan bagi mantan kombatan, mantan Tapol/Napol dan korban konflik.

**Arah Kebijakan:**

1. Memasyarakatkan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya;
3. Deteksi dan cegah dini serta optimalisasi kinerja forum bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar;
4. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik;
5. Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas);
6. Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui tranparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur;
7. Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
8. Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan;
9. Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan;
10. Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA;
11. Menigkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekruitmen dan uji kompetensi ASN;
12. Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi;
13. Penguatan transpranasi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, dan komunikasi public;
14. Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi public;

15. Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan public;
16. Penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penggangaran;
17. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui singkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional;
18. Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat ;
19. Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah;
20. Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbiatan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama;
21. Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi;
22. Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat;
23. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi;
24. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
25. Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan;
26. Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
27. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga;
28. Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca;
29. Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
30. Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakatan Germas;
31. Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor;
32. Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi;

33. Memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan;
34. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
35. Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan;
36. Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah;
37. Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi;
38. Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM;
39. Meningkatkan promosi produk dan kemitraan UMKM;
40. Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan;
41. Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian;
42. Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri;
43. Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor;
44. Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan;
45. Intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh;
46. Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal;
47. Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan;
48. Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing;
49. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
50. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan;
51. Pembangunan dan pemeliaharaan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan angkutan massal perkotaan;
52. Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan;
53. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
54. Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA;
55. Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian;
56. Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air;
57. Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir;

58. Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
59. Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis;
60. Pembangunan dan peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, sistem drainase ;
61. Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
62. Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan;
63. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim;
64. Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan;
65. Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat;
66. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;
67. Peningkatan tata kelola kehutanan;
68. Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS;
69. Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan;
70. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
71. Pemulihan spesies kunci dan mitigasi satwa liar;
72. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
73. Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini;
74. Peningkatan intervenasi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat.

Berbagai strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2024**

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Pembangunan Demokrasi | 1.1 | Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi. | Penguatan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa | Memasyarakatkan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024 |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya |
| | | | | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Dideteksi dan cegah dini dan optimalisasi kinerja forum Bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar |
| | | | | Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik |
| | | | | Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 2 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional | 2.1 | Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP | Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan APBA | Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui tranparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur |
| | | | | Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah |
| | | 2.2 | Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Pemantapan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan |
| | | 2.3 | Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP | Peningkatan Implementasi MRI, Kapabilitas APIP dan IEPK | Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan |
| | | 2.4 | Meningkatnya Nilai SAKIP | Pemantapan Penataan Organisasi | Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA |
| | | 2.5 | Meningkatkan Profesionalitas ASN | Peningkatan Kompetensi Kepegawaian Daerah | Menigkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekruitmen dan uji kompetensi ASN |
| | | 2.6 | Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta | Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik | Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | layanan publik berbasis elektronik | | |
| | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang lebih transparan | Penguatan transpranasi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, dan komunikasi publik |
| | | | | Aplikasi Informatika yang lebih efisien dan update | Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi publik |
| | | | | Penyelenggaraan Statistik Tematik | Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik |
| | | | | Meningkatkan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran | Penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penggangaran |
| | | | | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui singkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional. |
| 3 | Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah | 3.1 | Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Al-Quran | Peningkatan Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Aceh | Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 3.2 | Meningkatnya Kemandirian Dayah | Peningkatan Akreditasi dan Mutu Pendidikan Dayah | Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah |
| | | 3.3 | Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan | Penguatan Peran Ulama dalam Pembangunan | Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbiatan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama |
| | | 3.4 | Meningkatnya Penyaluran ZIS | Optimalisasi ZISWAF melalui tersedianya data muzakki dan mustahik seluruh Aceh | Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi |
| | | 3.5 | Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh | Peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat | Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat |
| 4 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan | 4.1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap, | Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi |
| | | 4.2 | Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi | Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan | Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
| | | 4.3 | Meningkatkan Pengarusutamaan | Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan | Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | Gender Dalam Pembangunan. | | |
| | | 4.4 | Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga | Peningkatan Karakter Pemuda yang berkualitas dan Berdaya Saing | Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan |
| | | | | Pembinaan Atlet dan Organisasi Keolahragaan | Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga |
| | | 4.5 | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca | Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca |
| | | 4.6 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan | Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan |
| | | | | Pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) | Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakat Germas |
| | | | | Percepatan Penurunan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor |
| | | 4.7 | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan | Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional | Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi |
| | | | | Pemenuhan sarana prasarana Kesehatan | Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 5 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19 | 5.1 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan | Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian | Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan |
| | | 5.2 | Menurunkan Beban Penduduk Miskin | Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin | Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan |
| | | 5.3 | Pengendalian Inflasi | Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi | Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah |
| | | 5.4 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Peningkatan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Desa | Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi |
| | | 5.5 | Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19 | peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha | Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM |
| | | | | Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional | Meningkatkan Promosi produk dan kemitraan UMKM |
| | | 5.6 | Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan | Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 5.7 | Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian | Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian | Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian |
| | | 5.8 | Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh | Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri | Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri |
| | | 5.9 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh | Peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemeritah untuk kemudahan akses bagi calon investor | Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor |
| | | 5.10 | Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata | Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan | Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan |
| | | 5.11 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan | Peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk Pembangunan Aceh | Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh |
| | | 5.12 | Menigkatnya Kemandirian dan Keragamaman Pangan | Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal | Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 5.13 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar | Peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi | Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan |
| | | | | Penciptaan industri digital marketing dikalangan pengusaha pemula | Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing |
| 6 | Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana | 6.1 | Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah | Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi | Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan |
| | | | | | Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan |
| | | | | Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan | Pembangunan dan pemeliaharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan |
| | | | | | Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan |
| | | | | | Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi |
| | | 6.2 | Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang | Pengendalian kesesuaia pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 6.3 | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat. | Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian |
| | | | | | Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mndukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air |
| | | | | | Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir |
| | | | | | Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat |
| | | 6.4 | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar | Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman | Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis. |
| | | | | | Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase |
| | | | | | Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 6.5 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup | Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan |
| | | | | Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim | Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim |
| | | | | Meningkatkan pengelolaan persampahan | Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan |
| | | | | Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. | Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat |
| | | 6.6 | Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari | Pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai | Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS |
| | | | | | Peningkatan tata kelola kehutanan |
| | | | | Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. | Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS |
| | | | | | Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan |
| | | | | | Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan |
| | | | | | Pemulihan spesies kunci dan mitigasi satwa liar |
| | | | | | Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 6.7 | Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana | Penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. | Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini |
| 7 | Meningkatkan Penguatan Perdamaian | 7.1 | Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan bagi mantan kombatan, mantan Tapol/Napol dan korban konflik | Peningkatan intervenasi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat |

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

### 4.2.4 Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024

Seiring dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian nasional dan Aceh, yang ditandai dengan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan mengacu pada arah kebijakan tahun 2024 dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu: meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan pemenuhan hak hak sipil, politik, sosial, ekonomi masyarakat dan mensukseskan agenda politik pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepala daerah secara serentak, serta memperhatikan tema RKP tahun 2024 maka tema pembangunan RKPA Tahun 2024 adalah**" Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Serentak dan PON 2024".** Tema pembangunan tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Aceh Tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang produktif dan kompetitif serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM untuk mensukseskan pelaksanaan agenda politik Pemilu serentak tahun 2024.

Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan indikator (a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (b) Pertumbuhan PDRB, (c) Indeks Gini;
2. Peningkatan kualitas SDM dengan indikator (a) Tingkat Kemiskinan, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

Target indikator sasaran pembangunan Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024**

| No | Indikator Makro | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKP | RPA | RKPA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,21 | 3,9 - 4,4 | 3,75 | 4,34 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 14,75 | 12 - 12.50 | 14,53 | 14,53 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 6,17 | 4,8 - 5,5 | 5,36 | 5,36 |
| 4 | Rasio Gini | Indeks | 0,291 | n/a | 0,304 | 0,282 |
| 5 | Indeks Williamson | Indeks | 0,424 | n/a | 0,410 | 0,410 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 72,80 | n/a | 72,78 | 73,26 |

Sumber: Ranwal RKP 2024, RPA Tahun 2023-2026 dan Hasil RAKORTEKRENBANG Nasional 2023

Dari Tabel 4.5 diketahui terdapat beberapa target indikator sasaran pembangunan Aceh tahun 2024 yang tidak sesuai dengan target yang terdapat dalam RPA Tahun 2203-2026, hal ini disebabkan karena mengalami penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan dalam RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023 seperti pada indikator pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan IPM. Untuk mencapai sasaran pembangunan Aceh sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan RKPA tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
3. Percepatan penurunan stunting;
4. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah;
5. Percepatan pengembangan kawasan strategis;
6. Penguatan penerapan syariat Islam dan nilai adat istiadat Aceh;
7. Penguatan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
8. Pelaksanaan Pemilu serentak dan PON 2024

**Gambar 4.5**
**Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2024**

Sementara itu, untuk pencapaian tema dan mendukung arah kebijakan pembangunan di atas dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Aceh tahun 2024 yang meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh;
5. Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh-Sumut 2024.

Prioritas Pembangunan Aceh tahun 2024 ditampilkan pada infografis dibawah ini.

**Gambar 4.6**
**Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024**

Mengacu pada RPA Tahun 2023-2026, maka sasaran untuk masing-masing Prioritas Aceh (PA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Sasaran PA 1 " Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan dengan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
2. Menurunkan beban penduduk miskin dengan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin melalui intervensi kepada penduduk miskin dengan pemberian bantuan;
3. Pengendalian inflasi dengan mendorong stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah;
4. Meningkatkan kemandirian desa dengan memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi;
5. Pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19 dengan mendorong peningkatan status UMKM melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk UMKM;
6. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan mendorong peningkatan produksi sektor pertanian,

peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan;

7. Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian dengan mendorong peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian melalui pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian;
8. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri;
9. Meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh melalui peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemeritah untuk kemudahan akses bagi calon investor melalui optimalisasi fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor;
10. Meningkatnya sub kontribusi pariwisata dengan mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan;
11. Intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan dengan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh melalui intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) serta LSM/CSO dalam pembangunan Aceh;
12. Meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan dengan mendorong peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan local melalui perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal;
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dengan mendorong peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi melalui melalui pelatihan dan pemagangan.

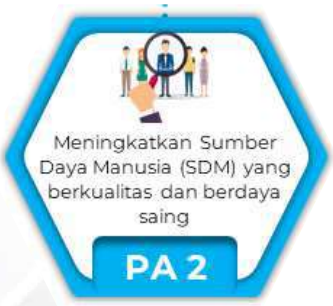


Sasaran PA 2 " Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan dengan mendorong peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi;

2. Meningkatnya sekolah yang terakreditasi dengan mendorong penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan melalui peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan melalui sosialisasi, seminar dan bimbingan;
4. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga dengan mendorong a) peningkatan karakter pemuda yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan b) pembinaan atlet dan organisasi keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan daya saing; penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor; serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
5. Meningkatnya minat baca masyarakat dengan mendorong penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca melalui peningkatan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca;
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mendorong a) peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan melalui peningkatan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan ; b) pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui pelaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakat Germas, c) percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor;
7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan mendorong a) penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional melalui penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi, b) pemenuhan sarana prasarana Kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan Kesehatan.

Sasaran PA3 " Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah dengan mendorong a) peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan, b) peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan melalui pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan angkutan massal perkotaan; pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
2. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dengan mendorong kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang melalui pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA;
3. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan mendorong peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan sumber daya air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat melalui peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian; peningkatan kondisi infrastruktur SDA mndukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air, pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir dan penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar dengan mendorong pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman melalui pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana; peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis; pembangunan dan peningkatan akses sanitasi layak; pengelolaan persampahan, sistem drainase, dan peningkatan/pembangunan pelayanan serta pemenuhan standar kualitas air minum;

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong a) perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan; b) pengembangan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim; c) peningkatan pengelolaan persampahan melalui pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan; dan d) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan local melalui peningkatan edukasi, kualitas data, serta informasi LH kepada masyarakat;
6. Meningkatkan pengelolaan hutan lestari dengan mendorong a) pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai melalui rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS dan peningkatan tata kelola kehutanan; b) konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS, pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemulihan spesies kunci dan mitigasi satwa liar dan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
7. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana dengan mendorong penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran melalui penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini.

Sasaran PA 4 " Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh" adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP dengan mendorong a) peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBA melalui peningkatan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui tranparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur; b) peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui peningkatan pengawasan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

2. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan mendorong pemantapan pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan;
3. Meningkatnya tingkat maturitas SPIP dengan mendorong peningkatan implementasi MRI, kapabilitas APIP dan IEPK melalui peningkatan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan;
4. Meningkatnya nilai SAKIP dengan mendorong pemantapan penataan organisasi melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA;
5. Meningkatkan profesionalitas ASN dengan mendorong peningkatan kompetensi kepegawaian daerah melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekruitmen dan uji kompetensi ASN;
6. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik dengan mendorong a) peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik melalui penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi, b) pengelolaan Informasi dan komunikasi publik yang lebih transparan melalui penguatan transpranasi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, dan komunikasi public, c) aplikasi informatika yang lebih efisien dan update melalui penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi public, d) penyelenggaraan statistik tematik melalui penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan public, e) peningkatan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran melalui penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penggangaran, f) peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui singkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional;
7. Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-qur'an dengan mendorong peningkatan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam Aceh melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat;

8. Meningkatnya kemandirian dayah dengan mendorong peningkatan akreditasi dan mutu pendidikan dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah;
9. Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan dengan mendorong penguatan peran ulama dalam pembangunan melalui peningkatan penerbiatan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama;
10. Meningkatnya penyaluran ZIS dengan mendorong optimalisasi ZISWAF melalui optimalisasi fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi;
11. Menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh dengan mendorong peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat.

Sasaran PA 5 " Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh Sumut Tahun 2024 meliputi:

1. Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh, Laki-laki dan Perempuan, serta Peran Lembaga Demokrasi melalui Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
2. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga melalui Pembinaan Atlet dan Organisasi Keolahragaan;

Prioritas Aceh (PA) tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan konsistensi PA dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi sebagaimana yang terdapat pada Bab II Gambaran Umum Aceh. Lebih jelas keterkaitan antara PA tahun 2024 dengan permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**
**Keterkaitan Prioritas Aceh (PA) dengan Permasalahan dan Isu Strategis**
**Tahun 2024**

| **PA 1:**<br>**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Produktif dan Kompetitif** | |
|---|---|
| **Permasalahan** | **Isu Strategis** |
| Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam mendukung pemanfaatan potensi perikanan | Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Masih Minim |
| Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan | |
| Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan | |
| Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalan Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) | |
| Belum pulihnya kunjungan wisatawan pasca pandemi COVID-19 | |
| Masih rendahnya kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh | |
| Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem |
| Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong | |
| Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain | Optimalisasi Kemandirian Pangan |
| Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman serealia (padi dan jagung), dan komoditi pangan lainnya | |
| Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan | |
| Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik | |
| **PA 2:**<br>**Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing** | |
| **Permasalahan** | **Isu Strategis** |
| Masih rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia |
| Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah | |

| | |
|---|---|
| Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi | |
| Belum optimalnya sarana dan prasarana SLB | |
| Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh | |
| Masih tingginya Angkatan Kerja Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi | |
| Umur Harapan Hidup Aceh masih di bawah rata-rata nasional | |
| Meningkatnya angka kematian ibu | |
| Masih tingginya prevalensi stunting Aceh | |
| Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh | |
| Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi | |
| Indeks pembangunan manusia Aceh masih di bawah rata-rata nasional | |
| **PA 3:**<br>**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan** | |
| **Permasalahan** | **Isu Strategis** |
| Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 84,41 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen | Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis |
| Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman | |
| Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak | |
| Belum optimalnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak | |
| Belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung | |
| Belum optimalnya Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | |
| Penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 37,94 persen dari potensi genangan banjir | |
| Menurunnya debit andalan di beberapa daerah irigasi | |

| | |
|---|---|
| Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal | |
| Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan | |
| Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat | |
| Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah, dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi | Pengembangan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Masih Terhambat |
| Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan | Mitigasi dan Penanganan Bencana |
| Aceh merupakan salah satu provinsi daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 149,1 (Tahun 2022) yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Risiko Tinggi. | |
| Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh | |
| **PA 4:<br>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh** | |
| **Permasalahan** | **Isu Strategis** |
| Implementasi Lembaga keuangan syariah belum dapat berjalan dengan optimal di Aceh | Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam dan Penguatan Perdamaian |
| Masih tingginya pelanggaran syariat Islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah | |
| Masih rendahnya capaian standarisasi dayah | |
| Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan | |
| Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal | |
| Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat | |
| Belum meratanya intervensi pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi mantan kombatan, mantan tapol/napol dan korban konflik | |

| | |
|---|---|
| Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) | Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan |
| Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh | |
| Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP) | |
| Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kepegawaian | Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur |
| Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN | |
| Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan | |
| **PA 5:<br>Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh-Sumut 2024** | |
| **Permasalahan** | **Isu Strategis** |
| Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada | Peningkatan Kualitas Demokrasi |
| Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada | |
| Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia |
| Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga dalam rangka persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 | Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis |

Sumber: Bab II Gambaran Umum Aceh RKPA 2024

Sementara itu, penentuan PA tahun 2024 selain mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pada Bab II Gambaran Umum Aceh juga memperhatikan permasalahan-permasalahan yang diperoleh melalui reses DPRA. Dari Tabel 4.7 diketahui PA tahun 2024 telah memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok pokok pikiran DPRA. Lebih jelas mengenai keterkaitan antara PA tahun 2024 dengan pokok pokok pikiran DPRA dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel 4.7**
**Keterkaitan Prioritas Aceh (PA) dengan Pokok Pokok Pikiran DPRA**

| PA | | Pokok Pokok Pikiran DPRA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **PA 1** | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Produktif dan Kompetitif | Belum optimalnya promosi dan publikasi pariwisata dan kebudayaan Aceh |
| | | Masih minimnya pengembangan objek wisata unggulan Aceh |
| | | Masih rendahnya produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan |
| | | Masih lemahnya daya saing Koperasi dan UMKM |
| | | Masih tingginya angka kemiskinan |
| | | Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan |
| | | Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin |
| | | Peningkatan kapasitas BUMG belum optimal |
| | | Masih terbatasnya sarana penanganan perikanan pada kelompok nelayan |
| **PA 2** | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM pariwisata Aceh |
| | | Belum meratanya sarana dan prasarana SMU dan SMK |
| | | Masih rendahnya daya saing tenaga kerja |
| **PA 3** | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana |
| | | Masih minimnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman |
| | | Belum berkembangnya penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan |

| PA | | Pokok Pokok Pikiran DPRA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Masih terbatasnya upaya dalam mitigasi bencana |
| | | Masih rendahnya ketahanan dan kemandirian pangan |
| | | Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan |
| **PA 4** | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh | Masih terbatasnya sarana dan prasarana dayah |
| | | Masih terbatasnya sarana dan prasarana ibadah (Mesjid, balai pengajian, dll) |
| | | Masih terbatasnya pemberdayaan ekonomi bagi korban konflik; |
| **PA 5** | Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh-Sumut 2024 | Masih rendahnya peranan perempuan dalam hukum, politik dan social ekonomi |

Sumber: SIPD RI

Selanjutnya, dalam perumusan PA tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026. Lebih jelas mengenai keterkaitan PA tahun 2024 dengan arah kebijakan RPA Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.8**
**Keterkaitan Prioritas Aceh (PA) dengan Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026**

| Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 | | Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| **PA 1** | Memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif | 1 | Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan |
| | | 2 | Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan |
| | | 3 | Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah |
| | | 4 | Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi |
| | | 5 | Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM |
| | | 6 | Meningkatkan Promosi produk dan kemitraan UMKM |
| | | 7 | Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan |
| | | 8 | Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian |
| | | 9 | Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri |
| | | 10 | Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor |
| | | 11 | Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan |
| | | 12 | Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh |
| | | 13 | Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal |

| Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 | | Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| | | 14 | Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan |
| | | 15 | Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing |
| | | | |
| **PA 2** | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1 | Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi |
| | | 2 | Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
| | | 3 | Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan |
| | | 4 | Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan |
| | | 5 | Meingkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca |
| | | 6 | Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan |
| | | 7 | Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakat Germas |
| | | 8 | Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor |
| | | 9 | Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi |
| | | 10 | Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan |
| | | | |
| **PA 3** | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan | 1 | Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan |

| Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 | | Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| | | 2 | Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan |
| | | 3 | Pembangunan dan pemeliaharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan |
| | | 4 | Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan |
| | | 5 | Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi |
| | | 6 | Pengendalian kesesuaia pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA |
| | | 7 | Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian |
| | | 8 | Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mndukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air |
| | | 9 | Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir |
| | | 10 | Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat |
| | | 11 | Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis. |
| | | 12 | Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase |
| | | 13 | Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum |
| | | 14 | Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan |
| | | 15 | Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim |

| Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 | | Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| | | 16 | Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan |
| | | 17 | Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat |
| | | 18 | Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS |
| | | 19 | Peningkatan tata kelola kehutanan |
| | | 20 | Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS |
| | | 21 | Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan |
| | | 22 | Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan |
| | | 23 | Pemulihan spesies kunci dan Mitigasi satwa Liar |
| | | 24 | Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan |
| | | 25 | Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini |
| | | | |
| **PA 4** | Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh | 1 | Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui tranparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur |
| | | 2 | Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah |
| | | 3 | Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan |
| | | 4 | Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan |
| | | 5 | Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA |

| Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 | | Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| | | 6 | Menigkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekruitmen dan uji kompetensi ASN |
| | | 7 | Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi |
| | | 8 | Penguatan transpranasi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, dan komunikasi publik |
| | | 9 | Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi publik |
| | | 10 | Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik |
| | | 11 | Penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penggangaran |
| | | 12 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui singkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional. |
| | | 13 | Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat |
| | | 14 | Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah |
| | | 15 | Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbiatan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama |
| | | 16 | Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi |

| Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 | | Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| | | 17 | Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat |
| | | 18 | Peningkatan intervenasi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat |
| | | | |
| **PA 5** | Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh-Sumut 2024 | 1 | Memasyarakatkan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024 |
| | | 2 | Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik |
| | | 3 | Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga |

Sumber: RPA Tahun 2023-2026, Diolah

Untuk mewujudkan PA Tahun 2024 maka perlu didukung oleh berbagai Program Prioritas (PP). PA1 yakni memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompettif didukung melalui 71 (tujuh puluh) program prioritas dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 337.634.337.756,- yang tersebar dibeberapa SKPA sebagai berikut: 1) Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2) Dinas Peternakan, 3) Dinas Kelautan dan Perikanan, 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, 5) Dinas Sosial, 6) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 7) Biro Ekonomi Sekda Aceh, 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 9) Dinas Koperasi dan UKM, 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 11) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 12) Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh, 13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, 14) Dinas Pangan dan 15) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Lebih jelas terkait Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja dan SKPA Program Prioritas (PP) dalam mendukung Prioritas Aceh (PA 1) Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.

**Tabel 4.9**
**Program Prioritas Pendukung PA 1 : "Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif"**

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | **TOTAL** | | | | **337.634.337.756** | |
| 1 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya | Persen | 11,51 | 1.331.640.000 | TANBUN |
| 2 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas Komoditas pangan utama (padi) | Ton/Ha | 5,65 | 27.834.177.195 | TANBUN |
| 3 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Persen | 28,57 | 8.906.327.508 | TANBUN |
| 4 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Keberhasilan Panen | Persen | 95,1 | 9.535.339.800 | TANBUN |
| 5 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Perusahaan Berizin yang dibina | Persen | 73 | 847.600.000 | TANBUN |
| 6 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit, Bakteri dan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak besar | Rasio | 0,17 | 2.076.423.501 | DISNAK |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rasio jumlah ternak yang diasuransikan/polis yang diajukan terhadap populasi ternak besar | Rasio | 0,25 | 9.535.339.800 | DISNAK |
| 8 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase jumlah izin usaha peternakan yang dikeluarkan terhadap total unit pelaku usaha peternakan | Persen | 0,21 | 847.600.000 | DISNAK |
| 9 | Program Penyuluhan Pertanian | Indek Terima Peternak (ItPt) | Indeks | 105,55 | 1.331.640.000 | DISNAK |
| 10 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 248.488,62 | 21.664.767.871 | DKP |
| 11 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | NTPI | 98,04 | 8.258.889.322 | DKP |
| 12 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | - Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. | % | 27 | 1.990.699.725 | DINSOS |
| | | - Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS. | Kab/kota | 23 | | DINSOS |
| 13 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri | % | 68 | 6.649.000.304 | DINSOS |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya. | % | 62 | 21.599.105.566 | DINSOS |
| 15 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat | % | 100 | 864.999.892 | DINSOS |
| 16 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Indeks inflasi daerah | % | 2,15 | 5.961.375.200 | INDAG |
| 17 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh | % | 2 | 400.000.000 | INDAG |
| 18 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan | Dokumen | 2 | 75.000.000 | INDAG |
| 19 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) | % IKK | 43,1 | 1.250.000.000 | INDAG |
| 20 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Pengendalian inflasi daerah | % | 2,15 | 3.026.260.783 | RO EKONOMI |
| 21 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | - Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif; | Rasio | 0,62 | 2.028.966.678 | DPMG |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Rasio gampong yang melakukan kerjasama | Rasio | 0,61 | 149.288.000 | DPMG |
| 23 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rasio desa berkembang | Rasio | 0,05 | 2.092.100.823 | DPMG |
| 24 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) | Rasio Kewirausahaan | Rasio | 1,91 | 31.444.015.491 | KOP-UKM |
| 25 | Program Pengembangan UMKM | Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil | Rasio | 0,015 | 12.000.000.000 | KOP-UKM |
| 26 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rasio | 0,58 | 1.411.680.000 | KOP UKM |
| 27 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat | Rasio | 0,4 | 1.365.000.000 | KOP UKM |
| 28 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM | Rasio | 0,0015 | 3.657.885.000 | KOP UKM |
| 29 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rasio Koperasi Modern | Rasio | 0,025 | 775.204.000 | KOP UKM |
| 30 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas komoditas pangan utama (padi) | **Ton/Ha** | 5,65 | 27.834.177.195 | TANBUN |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas) | % | 16,29 | 27.834.177.195 | DISNAK |
| 32 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh) | % | 24,75 | 8.906.327.508 | DISNAK |
| 33 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%) | % | 50 | 2.027.545.460 | DKP |
| 34 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perudang-udangan yang berlaku (%) | % | 63 | 120.000.000 | DKP |
| 35 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | % | 5,35 | 1.559.765.525 | DKP |
| 36 | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB | % | 4,3 | 1.050.000.000 | ESDM |
| 37 | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Usulan penetapan warisan geologi | % | 25 | 1.460.000.000 | ESDM |
| 38 | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik | % | 0,18 | 5.800.000.000 | ESDM |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Rasio Elektrifikasi | % | 99,54% | 3.140.000.000 | ESDM |
| 40 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB | % | 4 | 6.619.643.026 | INDAG |
| 41 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Tingkat kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin | Kegiatan | 1 | 25.000.000 | INDAG |
| 42 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Indeks Keberdayaan Konsumen | IKK | 43,1 | 500.000.000 | INDAG |
| 43 | Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan ekspor | % | 4 | 700.000.000 | INDAG |
| 44 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Net Ekspor | USD | 285.740.605 | 200.000.000 | INDAG |
| 45 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan | Indeks | 3,25 | 400.002.370 | DPMPTSP |
| 46 | Program Promosi Penanaman Modal | Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi | Perusahaan | 1800 | 1.431.999.430 | DPMPTSP |
| 47 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 87,80 | 1.093.728.145 | DPMPTSP |
| 48 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Perusahaan yang difasilitasi | Perusahaan | 5 | 844.270.150 | DPMPTSP |
| 49 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Indeks SPBE | Indeks | 3,25 | 400.000.000 | DPMPTSP |
| 50 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Lama Kunjungan Wisatawan | Hari | 3 | 700.000.000 | BUDPAR |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | Program Pemasaran Pariwisata | Peningkatan Kunjungan Wisatawan | % | 4 | 7.650.000.000 | BUDPAR |
| 52 | Program Pengembangan Kebudayaan | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 52 | 13.000.000.000 | BUDPAR |
| 53 | Program Pembinaan Sejarah | Literasi sejarah | Dokumen | 3 | 500.000.000 | BUDPAR |
| 54 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Pemugaran Cagar Budaya | Objek | 4 | 4.412.584.200 | BUDPAR |
| 55 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan | Dokumen | 5 | 450.000.000 | BUDPAR |
| 56 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Penyerapan tenaga kerja | Orang | 2000 | 2.350.000.000 | BUDPAR |
| 57 | Program Pengelolaan Permuseuman | Rasio pengunjung museum terhadap jumlah wisatawan | Rasio | 132,6 | 8.300.000.000 | BUDPAR |
| 58 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA | % | 100 | 677.948.948 | BAPPEDA |
| 59 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Utama | Kg/Kapita/Tahun | 154,34 | 2.500.000.000 | PANGAN |
| 60 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | % | 100 | 7.976.826.000 | PANGAN |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | % | 7,61 | 1.770.000.000 | PANGAN |
| 62 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan | % | 100 | 2.650.000.000 | PANGAN |
| 63 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 53,63 | 639.535.144 | NAKER |
| 64 | Program Hubungan Industrial | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah | Perusahaan | 50 | 1.400.000.000 | NAKER |
| 65 | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan | Perusahaan | 1558 | 1.800.481.001 | NAKER |

Sumber: SIPD RI

Sementara itu, dalam mendukung PA 2 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing) terdapat 22 Program Priotas (PP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.138.850.004,- yang tersebar di beberapa SKPA sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan;
2. Majelis Pendidikan Aceh;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga
6. Dinas Kesehatan;
7. RSUD Zainoel Abidin;
8. Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan;
9. Rumah Sakit Jiwa.

Lebih detail mengenai Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja dan SKPA Program Prioritas (PP) dalam mendukung Prioritas Aceh (PA 2) Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

**Tabel 4.10**
**Program Prioritas Pendukung PA 2 : "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing"**

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | SATUAN | 2004 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | **TOTAL** | | | | **1.900.138.850.004** | |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas | % | 78 | 947.250.501.888 | DISDIK |
| 2 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K | % | 53,72 | 64.977.931 | DISDIK |
| 3 | Program Pengembangan Kurikulum | Angka harapan lama sekolah | Tahun | 14,52 | 297.312.602 | DISDIK |
| 4 | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Rasio Kebijakan yang dikeluarkan | Rasio | 0,85 | 861.556.456 | MPA |
| 5 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase Sekolah dengan Akreditasi A | % | 95,81 | 183.452.000 | DISDIK |
| 6 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA | % | 14,02 | 82.896.145 | DP3A |
| 7 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif | % | 100 | 1.222.997.280 | DP3A |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga | % | 64,5 | 237.103.855 | DP3A |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | SATUAN | 2004 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan | % | 28,85 | 136.000.000 | DP3A |
| 10 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA) | % | 30 | 429.999.856 | DP3A |
| 11 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 80 | 1.167.470.000 | DP3A |
| 12 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase gerakan kepramukaan yang aktif | % | 78 | 2.800.000.000 | PORA |
| 13 | Program Pembinaan Perpustakaan | Rasio perpustakaan per satuan penduduk | Rasio | 0,0018 | 17.270.816.972 | ARPUS |
| 14 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 76 | 989.702.989 | ARPUS |
| 15 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan | % | 0,1 | 435.846.209 | ARPUS |
| 16 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Rasio arsip yang dimanfaatkan | Rasio | 0,011 | 315.100.000 | ARPUS |
| 17 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi | % | 100 | 836.162.407.624 | Dinkes |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | SATUAN | 2004 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pesentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | % | 66,00 | 5.193.180.322 | Dinkes |
| 19 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas | % | 72,00 | 2.022.254.266 | Dinkes |
| 20 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit zainal abidin | Indeks | 91,77 | 67.801.189.000 | RSUZA |
| 21 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Ibu dan Anak | Indeks | 83,75 | 2.867.760.000 | RSIA |
| 22 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM yang tersertifikasi | % | 100 | 5.193.180.322 | RSIA |

Sumber: SIPD RI

Program Prioritas Pendukung PA 3: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar didukung oleh yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan didukung oleh 35 PP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 812.493.645.615,- yang tersebar di beberapa OPD sebagai berikut:

1. Dinas PUPR;
2. Dinas Perhubungan;
3. Dinas Pertanahan;
4. Dinas Pengairan;
5. Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
9. Dinas Sosial.

Lebih jelas mengenai Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja serta SKPA Penanggung Jawab Program Prioritas (PP) yang mendukung Prioritas Aceh (PA3) dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini.

**Tabel 4.11**
**Program Prioritas Pendukung PA 3 : "Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan"**

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | **TOTAL** | | | | **812.493.645.615** | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 89,16 | 200.836.687.370 | PUPR |
| 2 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan | Indeks | 85,84 | 38.071.705.470 | DISHUB |
| 3 | Program Pengelolaan Pelayaran | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan | Indeks | 77,36 | 10.385.700.000 | DISHUB |
| 4 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Rasio Regulasi Bidang Transportasi yang Terimplementasi (t-1) | Rasio | 0,67 | 2.114.264.000 | DISHUB |
| 5 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA | % | 80 | 1.021.901.371 | PUPR |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan | Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri | % | 74 | 1.001.128.541 | TANAH |
| 7 | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum | % | 59 | 342.826.000 | TANAH |
| 8 | Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah | Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin | Persil | 1000 | 1.320.393.868 | TANAH |
| 9 | Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan | Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri | % | 75 | 450.000.000 | TANAH |
| 10 | Program Penetapan Tanah Ulayat | Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan | % | 65 | 215.000.000 | TANAH |
| 11 | Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan | Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan | % | 22 | 570.000.000 | TANAH |
| 12 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | % | 56,23 | 136.474.756.146 | PENGAIRAN |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Program Kawasan Permukiman | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani | % | 33,23 | 100.595.200.000 | PERKIM |
| 14 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | **%** | 66,38 | 165.144.227.182 | PERKIM |
| 15 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan | **%** | 48 | 46.000.000.000 | PERKIM |
| 16 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya | **%** | 50 | 4.500.000.000 | PERKIM |
| 17 | Program Pengembangan KawasanTransmigrasi | Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang | Kawasan | 5 | 1.654.335.162 | NAKER |
| 18 | Program Pembangunan KawasanTransmigrasi | Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya | % | 35,71 | 3.000.000.000 | NAKER |
| 19 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase SPAM Regional yang terbangun | **%** | 50 | 1.300.000.000 | PERKIM |
| 20 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | **76,48** | 736.965.410 | DLHK |
| 21 | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | - Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 60,5 | 2.432.977.619 | DLHK |
| 22 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 88,71 | 85.000.000 | DLHK |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Pengelolaan Limbah B3 | % | 68,09 | 93.500.000 | DLHK |
| 24 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup | % | 36,5 | 165.000.000 | DLHK |
| 25 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | Jumlah verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | Dokumen | 2 | 50.000.000 | DLHK |
| 26 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | - Persentase pengurangan sampah<br>- Persentase penanganan sampah | % | - 10,5<br>- 35,5 | 410.000.000 | DLHK |
| 27 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada/Tidak Ada | Ada | 202.242.000 | DLHK |
| 28 | Program Pengelolaan Persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | Indeks | 48 | 6.463.874.893 | DLHK |
| 29 | Program Pengelolaan Hutan | - Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | % | 3,2 | 59.425.593.200 | DLHK |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Penanganan konflik satwa | % | 76,50 | 2.368.592.639 | DLHK |
| 31 | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | Pemberdayaan kelompok tani hutan | % | 14,33 | 1.107.711.174 | DLHK |
| 32 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) | Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan | Rasio | 50,18 | 50.000.000 | DLHK |
| 33 | Program Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,60/ Sedang | 18.586.223.520 | BPBA |
| 34 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 62 | 2.197.840.050 | BPBA |
| 35 | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar | % | 78 | 3.120.000.000 | DINSOS |

Sumber: SIPD RI

Selanjutnya untuk mendukung PA 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh terdapat 32 PP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.395.509.986.464,- yang tersebar di OPD sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh;
2. Biro Pemotda;
3. Inspektorat;
4. Biro Organisasi;
5. Badan Kepegawaian Aceh;
6. Badan Pengembangan SDM;
7. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
8. Biro PBJ;
9. Bappeda;
10. Dinas Registrasi Kependudukan;
11. Biro Administrasi Pemerintahan;
12. Biro Hukum;
13. Badan Penghubung Aceh;
14. Sekretariat DPRA;
15. Dinas Syariat Islam;
16. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
17. Dinas Pendidikan Dayah;
18. MPU;
19. Baitu Mal;
20. MAA;
21. Badan Reintegrasi Aceh;
22. KKW.

Lebih jelas terkait Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja dan SKPA Pengampu Program Prioritas (PP) yang mendukung Prioritas Aceh (PA4) dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini.

**Tabel 4.12**
**Program Prioritas Pendukung PA 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh**

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | **TOTAL** | | | | **2.395.509.986.464** | |
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Penetapan APBA tepat waktu | Sesuai/ Tidak Sesuai | Sesuai | 1.812.766.685.721 | BPKA |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan | % | 62,5 | 11.195.059.288 | BPKA |
| 3 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Persentase bahan kebijakan lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti | % | 100 | 4.856.001.054 | RO PEMOTDA |
| 4 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Aparatur yang memenuhi kompetensi | Level | 3 | 5.671.826.071 | INSPEKTORAT |
| 5 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP | % | 80 | 9.890.027.749 | INSPEKTORAT |
| 6 | Program Penataan Organisasi | Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi | % | 87 | 1.090.262.163 | RO ORGAN |
| 7 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA | % | 80,5 | 5.456.685.406 | BKA |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 0,44 | 74.219.702.334 | BPSDM |
| 9 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | Indeks | 79,7 | 24.080.000 | KOMINSA |
| 10 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh | Indeks | 3,4 | 5.885.000.000 | KOMINSA |
| 11 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Keamanan Siber | % | 95 | 138.552.000 | KOMINSA |
| 12 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah | Data | 60 | 850.000.000 | KOMINSA |
| 13 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase paket yang selesai pemilihan | % | 100 | 8.082.301.400 | RO PBJ |
| 14 | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA | % | 100 | 21.247.350.409 | BAPPEDA |
| 15 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Pertumbuhan ekonomi | % | 3,75 | 677.948.948 | BAPPEDA |
| 16 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 62 | 5.410.689.732 | BAPPEDA |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk | % | 98 | 714.671.110 | DRKA |
| 18 | Program Pendaftaran Penduduk | Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk | % | 98,40 | 500.328.800 | DRKA |
| 19 | Program Pencatatan Sipil | Meningkatkan Kebijakan dibidang Pencatatan Sipil | % | 97,00 | 425.703.000 | DRKA |
| 20 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Profil Perkembangan Kependudukan | Database | 1 | 124.626.000 | DRKA |
| 21 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Indeks pengendalian kegiatan pembangunan | Indeks | 0,9 | 4.441.175.490 | RO ADPEM |
| 22 | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum | Indeks | 0,95 | 4.770.005.353 | RO HUKUM |
| 23 | Program Pelayanan Penghubung | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA | % | 80 % | 4.177.982.600 | BPA |
| 24 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Pembahasan Qanun yang terfasilitasi | % | 80 | 37.828.563.968 | SETWAN |
| 25 | Program Syariat Islam Aceh | Angka Melek Alquran masyarakat Aceh yang beragama Islam | % | 85 | 29.981.678.651 | DSI |
| 26 | Program Kesejahteraan Rakyat | Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat | Indeks | 95 | 9.762.948.754 | RO ISRA |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Program Pendidikan Dayah | Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA) | Indeks | 79,09 | 208.882.085.841 | DAYAH |
| 28 | Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | Rasio Sertifikat Halal yang diterbitkan | Rasio | 0,71 | 7.170.785.577 | **MPU** |
| 29 | Program Baitul Mal Aceh | Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya | % | 80 | 101.837.387.384 | BMA |
| 30 | Program Majelis Adat Aceh (MAA) | Indeks Adat Istiadat Aceh | Indeks | 0,08 | 1.431.308.207 | MAA |
| 31 | Program Reintegrasi Aceh | Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rahabilitasi sosial | % | 23,580 | 6.627.533.532 | BRA |
| 32 | Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh | Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe | Indeks | 85 | 9.371.029.922 | KKW |

Sumber: SIPD RI

Program Prioritas Pendukung PA 5: Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh Sumut Tahun 2024 terdapat 7 PP dengan alokasi sebesar Rp. 186.488.000.272,- yang terdapat di 3 OPD yakni Kesbangpol, Satpol PP dan WH serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Lebih jelas terkait Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja dan SKPA Pengampu Program Prioritas (PP) yang mendukung Prioritas Aceh (PA5) dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini.

**Tabel 4.13**
**Program Prioritas Pendukung PA 5: Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh Sumut Tahun 2024**

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | **TOTAL** | | | | **186.488.000.272** | |
| 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | % | 31,00 | 4.164.700.912 | KESBANG |
| 2 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba | % | 44.98 | 2.311.699.467 | KESBANG |
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Partai Politik yang dibina | % | 53,33 | 129.119.371.518 | KESBANG |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | 2024 | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Pembinaan LSM/ORMAS | % | 22,00 | 1.055.329.540 | KESBANG |
| 5 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban | % | 100 | 37.536.898.835 | POL PP |
| 6 | Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Kepemudaan | Persentase pemuda yang dibina | % | 62 | 5.100.000.000 | PORA |
| 7 | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Persentase pembinaan olahraga | % | 96,77 | 7.200.000.000 | PORA |

Sumber: SIPD RI

Dari Tabel 4.13 diketahui keterkaitan Program Prioritas (PP) dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2024. Secara umum, seluruh Program Prioritas (PP) mendukung sasaran dan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2024. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut.

**Tabel 4.14**

**Keterkaitan Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024**

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.1 | Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi. | Memasyarakatkan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | KESBANGPOL |
| | | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | KESBANGPOL |
| | | | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | KESBANGPOL |
| | | | Dideteksi dan cegah dini dan optimalisasi kinerja forum Bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | KESBANGPOL |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | KESBANGPOL |
| | | | Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas) | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | KESBANGPOL |
| 2 | 2.1 | Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP | Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui tranparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKA |
| | | | Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKA |
| | 2.2 | Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan | | |
| | 2.3 | Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP | Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan | P rogram Penyelenggaraan Pengawasan | INSPEKTORAT |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | 2.4 | Meningkatnya Nilai SAKIP | Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA | Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi | RO. ORGAN |
| | 2.5 | Meningkatkan Profesionalitas ASN | Menigkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekruitmen dan uji kompetensi ASN | Program Kepegawaian Daerah | BKA |
| | 2.6 | Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik | Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | KOMINSA |
| | | | Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, dan komunikasi publik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | KOMINSA |
| | | | Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi publik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | KOMINSA |
| | | | Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | BAPPEDA |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | Penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penggangaran | Program Penyelenggaraan Pengawasan | INSPEKTORAT |
| | | | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui singkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional. | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | BAPPEDA |
| 3 | 3.1 | Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Al-Quran | Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat | Program Syariat Islam Aceh | DSI |
| | 3.2 | Meningkatnya Kemandirian Dayah | Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah | Program Pendidikan Dayah | DAYAH |
| | 3.3 | Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan | Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbiatan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama | Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | MPU |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | 3.4 | Meningkatnya Penyaluran ZIS | Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi | Program Baitul Mal Aceh | BMA |
| | 3.5 | Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh | Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat | Program Majelis Adat Aceh (MAA) | MAA |
| 4 | 4.1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIK |
| | 4.2 | Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi | Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Program Pengelolaan Pendidikan | DISDIK |
| | 4.3 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan | Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | DP3A |
| | 4.4 | Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga | Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | PORA |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | PORA |
| | 4.5 | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | Meingkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca | Program Pembinaan Perpustakaan | ARPUS |
| | 4.6 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | DINKES/RSIA |
| | | | Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakat Germas | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | DINKES |
| | | | Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DINKES |
| | 4.7 | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan | Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan ongkologi | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DINKES |
| | | | Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DINKES/RSIA/RSUZA/RSJ |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5.1 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan | Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan | Program Penyuluhan Pertanian | TANBUN |
| | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | TANBUN |
| | | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | DISNAK |
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | DKP |
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | DKP |
| | 5.2 | Menurunkan Beban Penduduk Miskin | Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan | | |
| | 5.3 | Pengendalian Inflasi | Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | INDAG |
| | 5.4 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | DPMG |
| | 5.5 | Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19 | Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | KOP UKM |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Program Pengembangan UMKM | KOP UKM |
| | | | Meningkatkan Promosi produk dan kemitraan UMKM | | |
| | 5.6 | Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan | Program Penyuluhan Pertanian | TANBUN |
| | 5.7 | Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian | Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | ESDM |
| | 5.8 | Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh | Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | INDAG |
| | 5.9 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh | Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor | Program Promosi Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | 5.10 | Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata | Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | BUDPAR |
| | 5.11 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan | Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | BPKA |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | BAPPEDA |
| | 5.12 | Meningkatnya Kemandirian dan Keragamaman Pangan | Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | PANGAN |
| | 5.13 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar | Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | NAKER |
| | | | Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | NAKER |
| 6 | 6.1 | Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah | Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan | Program Penyelenggaraan Jalan | PUPR |
| | | | Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan | Program Penyelenggaraan Jalan | PUPR |
| | | | Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan | Program Pengelolaan Pelayaran | DISHUB |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan | Program Pengelolaan Pelayaran | DISHUB |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | DISHUB |
| | 6.2 | Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Pengendalian kesesuaia pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | PUPR |
| | 6.3 | Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | PENGAIRAN |
| | | | Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mndukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | PENGAIRAN |
| | | | Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | PENGAIRAN |
| | | | Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | PENGAIRAN |
| | 6.4 | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar | Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis. | Program Kawasan Permukiman | PERKIM |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, | PERKIM |
| | | | Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | PERKIM |
| | 6.5 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | | | Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim | Program Pengendalian Pencemaran an/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | | | Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan | Program Pengelolaan Persampahan | DLHK |
| | | | Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan \dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | DLHK |
| | 6.6 | Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari | Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | DLHK |
| | | | Peningkatan tata kelola kehutanan | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan | DLHK |

| NO | SASARAN | | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | | dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | |
| | | | Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | DLHK |
| | | | Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan | Program Pengelolaan Hutan | DLHK |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | DLHK |
| | | | Pemulihan spesies kunci dan Mitigasi satwa Liar | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | DLHK |
| | | | Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan | Program Pengelolaan Hutan | DLHK |
| | 6.7 | Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana | Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini | Program Penanggulangan Bencana | BPBA |
| 7 | 7.1 | Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal | Peningkatan intervenasi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat | Program Reintegrasi Aceh | BRA |

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

### 4.2.5 Keselaran Prioritas Aceh (PA) terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menjelaskan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu dalam perumusan prioritas pembangunan Aceh tahun 2024 harus memperhatikan/mengacu pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam RKP Tahun 2024. Dari Tabel 4.15 terlihat keselarasan antara prioritas pembangunan Aceh Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. PA1 (memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif) selaras dengan PN1 (memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan), PA2 (meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing) dan PA5 (menyukseskan pemilu serentak dan PON Bersama Aceh-SUMUT 2024) selaras dengan PN3 (meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing), PA3 (memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan) selaras dengan PN2 (mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan), PN5 (memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar), PN6 (membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim), PA4 (penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh) dan selaras dengan PN4 (revolusi mental dan pembangunan kebudayaan), PN7 (memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan publik).

**Tabel 4.15**
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Prioritas Nasional Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 | Prioritas Nasional Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|
| PA 1 | Memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif | PN 1 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan |
| | | | |
| PA 2 | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | PN 3 | Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing |
| PA 5 | Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON Bersama Aceh Sumut Tahun 2024 | | |
| | | | |
| PA 3 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan | PN 2 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan |
| | | PN 5 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar |
| | | PN 6 | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim |
| | | | |
| PA 4 | Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh | PN 4 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan |
| | | PN 7 | Memperkuat stabilitas Polhukanham dan Transformasi pelayanan publik |
| | | | |

Sumber: Bappeda Aceh, diolah

Lebih jelas mengenai keselarasan PA dengan PN Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Program Prioritas (PP) Aceh tahun 2024 yang mendukung masing-masing Kegiatan Prioritas (KP) pada PN tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.16 s.d 4.21 berikut ini.

**Tabel 4.16**
**Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 1 RKP Tahun 2024**
"Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan"

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| PN 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | | | | PA 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | | | **466.169.217.733** | |
| | PP1 | PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI DENGAN MENGUTAMAKAN PENINGKATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) | | Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif; Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (juta kilo liter) | | | | | | |
| | | KP1 | Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan | | | PP | Pengelolaan Energi Terbarukan | Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik | 5.800.000.000 | ESDM |
| | | KP2 | Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik | | | PP | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Rasio Elektrifikasi | 3.140.000.000 | ESDM |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP2 | PENINGKATAN KUANTITAS/KETAHANAN AIR UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI | | Produktivitas air (water productivity) (kg/m3)g) | | | | | | |
| | | KP3 | Pengelolaan hutan berkelanjutan | | | PP | Program Pengelolaan Hutan | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | 59.425.593.200 | DLHK |
| | | KP4 | Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif) | | | PP | Program Konservasi SDA dan Ekosistemnya | Penanganan konflik satwa | 2.368.592.639 | DLHK |
| | | KP5 | Penyediaan air untuk pertanian | | | PP | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | 136.474.756.146 | PENGAIRAN |
| | | KP6 | Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas | | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP7 | Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau | | | | | | | |
| | | KP8 | Pengembangan waduk multiguna | | | | | | | |
| | PP3 | PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KOMSUMSI PANGAN | | Nilai Tukar Petani (NTP); Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari); Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari); Prevalence of Undernourishment (PoU) (%); Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%) | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP9 | Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan | | | PP | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan | 2.650.000.000 | PANGAN |
| | | | | | | PP | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1.770.000.000 | PANGAN |
| | | KP10 | Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok | | | PP | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Utama | 2.500.000.000 | PANGAN |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | PP | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas) | 14.101.200.000 | DISNAK |
| | | KP11 | Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar | | | PP | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya | 11.696.618.625 | TANBUN |
| | | KP12 | Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian | | | PP | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas komoditas pangan utama (padi) | 27.834.177.195 | TANBUN |
| | | KP13 | Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional | | | pp | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan | Penguatan Cadangan Pangan | 7.976.826.000 | PANGAN |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | Pangan Masyarakat | Pemerintah Provinsi | | |
| | PP4 | PENINGKATAN PENGELOLAAN KEMARITIMAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | | Konservasi kawasan kelautan (14.5.1)a) (juta ha); Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1)a) (%); Produksi perikanan (juta ton); Produksi garam (juta ton); Nilai Tukar Nelayan | | | | | | |
| | | KP14 | Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan | | | PP | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | 1.559.765.525 | DKP |
| | | KP15 | Peningkatan fasilitasi usaha, pembiyaan, dan akses perlindungan usaha kelautan | | | PP | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%) | 2.027.545.460 | DKP |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya | | | | | | | |
| | | KP16 | Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan | | | PP | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | 21.664.767.871 | DKP |
| | | | | | | PP | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | 8.258.889.322 | DKP |
| | PP5 | PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN KOPERASI | | Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (%) (8.10.1) c) d); Pertumbuhan wirausaha (%); Kontribusi koperasi terhadap PDB (%) | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP17 | Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar | | | PP | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio Kewirausahaan | 31.444.015.491 | KOP UKM |
| | | KP18 | Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha | | | PP | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam | 1.411.680.000 | KOP UKM |
| | | KP19 | Peningkatan nilai tambah usaha sosial | | | | | | | |
| | | KP20 | Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi | | | PP | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rasio Koperasi Modern | 775.204.000 | KOP UKM |
| | | KP21 | Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha | | | PP | Program Pengembangan UMKM | Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil | 12.000.000.000 | KOP UKM |

| RKP 2024 | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP6 | PENINGKATAN NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA, DAN INVESTASI DI SEKTOR RIIL DAN INDUSTRIAL | Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%); Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%); Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah); Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang); Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2)a) (%); Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2)a) (juta orang); Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang); Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah);Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah); Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%) | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP22 | Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter, kawasan industri terutama di luar Jawa | | | PP | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB | 6.619.643.026 | INDAG |
| | | KP23 | Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok | | | PP | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Lama Kunjungan Wisatawan | 8.024.874.806 | BUDPAR |
| | | KP24 | Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital | | | PP | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Penyerapan tenaga kerja | 2.350.000.000 | BUDPAR |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP25 | Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan | | | PP | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan | 400.002.370 | DPMPTSP |
| | | | | | | PP | Program Promosi Penanaman Modal | Pelaku Usaha/ Perusahaan yang berminat berinvestasi | 1.431.999.430 | DPMPTSP |
| | | | | | | PP | Program Pelayanan Penanaman Modal | Indeks Kepuasan masyarakat | 1.093.728.145 | DPMPTSP |
| | | | | | | PP | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi | 12.625.181.827 | NAKER |
| | | | | | | PP | Program Penempatan Tenaga Kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar | 639.535.144 | NAKER |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | yang ditempatkan | | |
| | | KP26 | Pengembangan industri halal | | | PP | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri | 75.000.000 | INDAG |
| | PP7 | PENINGKATAN EKSPOR BERNILAI TAMBAH TINGGI DAN PENGUATAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN) | | Neraca perdagangan barang (US$ miliar); Pertumbuhan ekspor nonmigas (%);Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1)a) (juta kunjungan); Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)h); Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%) | | | | | | |
| | | KP27 | Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor | | | PP | Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan ekspor | 700.000.000 | INDAG |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP28 | Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif | | | PP | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Net Ekspor | 200.000.000 | INDAG |
| | | | | | | PP | Program Kebijakan dan Pelayanan Penmgadaan Barang dan Jasa | Persentase paket yang selesai pemilihan | 8.082.301.400 | RO. PBJ |
| | | KP29 | Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif | | | PP | Program Pemasaran Pariwisata | Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 7.650.000.000 | BUDPAR |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP8 | PENGUATAN PILAR PERTUMBUHAN DAN DAYA SAIANG EKONOMI | | Tingkat inflasi pangan bergejolak (%); Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%); Rasio Uang Beredar M2/PDB (%); Skor logistic performance index (skor); Peringkat travel and tourism development index (peringkat)j); Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%); Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%); Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat (%); Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (database) | | | | | | |
| | | KP30 | Peningkatan pendalaman sektor keuangan | | | PP | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase kemandirian fiskal Aceh | 33.788.594.502 | BPKA |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP31 | Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga | | | PP | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh | 400.000.000 | INDAG |
| | | | | | | PP | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Indeks inflasi daerah | 5.961.375.200 | INDAG |
| | | KP32 | Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital | | | PP | Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA | 21.247.350.409 | BAPPEDA |
| | | | | | | | | | | |

Sumber: SIPD RI, Diolah

**Tabel 4.17**
**Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 2 RKP Tahun 2024**
"Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan"

| RKP 2024 | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| PN 2 | Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | | | PA 3 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan | | | **2.193.774.794.364** | |
| | PP1 | PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun); IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min–maks); Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%) | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP1 | Pengembangan Kawasan Strategis | | | PP | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB | 6.619.643.026 | INDAG |
| | | KP2 | Pengembangan Sektor Unggulan | | | PP | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya | 11.696.618.625 | TANBUN |
| | | | | | | PP | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Keberhasilan Panen | 9.535.339.800 | TANBUN |
| | | | | | | PP | Program Pengendalian dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas Komoditas pangan utama (padi) | 41.935.377.195 | TANBUN |
| | | | | | | PP | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio Kewirausahaan | 31.444.015.491 | KOP UKM |
| | | | | | | PP | Program Pengembangan UMKM | Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil | 12.000.000.000 | KOP UKM |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | PP | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Lama Kunjungan Wisatawan | 8.024.874.806 | BUDPAR |
| | | | | | | PP | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Penyerapan tenaga kerja | 2.350.000.000 | BUDPAR |
| | | | | | | PP | Program Pemasaran Pariwisata | Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 7.650.000.000 | BUDPAR |
| | | | | | | PP | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | 21.664.767.871 | DKP |
| | | | | | | PP | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | 8.258.889.322 | DKP |
| | | | | | | PP | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | 1.559.765.525 | DKP |
| | | KP3 | Pengembangan Kawasan Perkotaan (khusus penilaian | | | PP | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya | 4.500.000.000 | PERKIM |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | provinsi dan kota) | | | | | | | |
| | | | | | | PP | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan | 46.000.000.000 | PERKIM |
| | | | | | | PP | Program Pengelolaan dan Pengembangan Ssistem Penyediaan Air Minum | Persentase SPAM Regional yang terbangun | 1.800.000.000 | PERKIM |
| | | | | | | PP | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | 165.144.227.182 | PERKIM |
| | | KP4 | Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi | | | PP | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya | 500.000.000 | NAKER |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | (khusus penilaian provinsi dan kabupaten) | | | | | | | |
| | | KP5 | Kelembagaan dan keuangan daerah | | | PP | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Penetapan APBA tepat waktu | 1.813.091.275.521 | BPKA |
| | | | | | | | | | | |

Sumber: SIPD RI, Diolah

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PP : Program Prioritas

KP : Kegiatan Prioritas

PA : Prioritas Aceh

**Tabel 4.18**
**Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 3 RKP Tahun 2024**
"Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing"

| RKP 2024 | | | RKPA 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | Indikator Kinerja | PA/PP | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| PN 3 | Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | PA 2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing | | **2.222.539.550.472** | |

| RKP 2024 | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP1 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGUATAAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN | Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%); Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%); Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%); Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun (%); Persentase | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%) | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP1 | Percepatan cakupan administrasi kependudukan | | | pp | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk | 714.671.110 | DRKA |
| | | KP2 | Integrasi sistem administrasi kependudukan | | | | | | | |
| | | KP3 | Pendampingan dan layanan terpadu | | | | | | | |
| | | KP4 | Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk | | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP2 | PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL | | Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%); Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%); Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%); Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (%); Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (juta pekerja)g) | | | | | | |
| | | KP5 | Sistem jaminan sosial nasional | | | pp | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya. | 21.599.105.566 | DINSOS |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP6 | Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran | | | pp | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. | 1.990.699.725 | DINSOS |
| | | KP7 | Perlindungan sosial adaptif | | | pp | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri | 6.649.000.304 | DINSOS |
| | | KP8 | Kesejahteraan sosial | | | pp | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar | 3.120.000.000 | DINSOS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP3 | PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN | Persentase persalinan di fasyankes (%); Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%); Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%); Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan); Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage); Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV); Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%); Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (kabupaten/kota); Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota); Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kabupaten/kota); DLL | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP9 | Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi | | | pp | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi | 914.834.500.911 | DINKES |
| | | KP10 | Percepatan perbaikan gizi masyarakat | | | | | | | |
| | | KP11 | Peningkatan pengendalian penyakit | | | | | | | |
| | | KP12 | Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | | | pp | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | 2.022.254.266 | DINKES |
| | | KP13 | Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan | | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP4 | PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS | | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK); Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%); Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%); Tingkat penyelesaian pendidikan (%); Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%); Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%) | | | | | | |
| | | KP14 | Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran | | | pp | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas | 949.192.353.888 | DISDIK |
| | | KP15 | Peningkatan pengelolaan dan penempatan | | | pp | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K | 64.977.931 | DISDIK |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | |
| | | KP16 | Penjaminan mutu Pendidikan | | | pp | Program Pengembangan Kurikulum | Angka harapan lama sekolah | 297.312.602 | DISDIK |
| | | KP17 | Peningkatan tata kelola pendidikan | | | pp | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase Sekolah dengan Akreditasi A | 183.452.000 | DISDIK |
| | PP5 | PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA | | Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%); Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%); Indeks Pemberdayaan Gender (IPG); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; DLL | | | | | | |
| | | KP18 | Pemenuhan hak dan perlindungan anak | | | pp | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA) | 429.999.856 | DP3A |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | pp | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 1.167.470.000 | DP3A |
| | | KP19 | Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan | | | pp | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA | 82.896.145 | DP3A |
| | | | | | | pp | Program Perlindungan Perempuan | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif | 1.222.997.280 | DP3A |
| | | | | | | pp | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 | 237.103.855 | DP3A |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | dimensi penguatan kualitas keluarga | | |
| | | KP20 | Kualitas pemuda | | | pp | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase pemuda yang dibina | 5.100.000.000 | DISPORA |
| | PP6 | PENGENTASAN KEMISKINAN | | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%); Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga) | | | | | | |
| | | KP21 | Akselerasi penguatan ekonomi keluarga | | | pp | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rasio Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Adat yang Aktif | 3.661.932.678 | DPMG |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP22 | Keperantaraan usaha dan dampak sosial | | | pp | Progeam Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi | 1.990.699.725 | TANBUN |
| | | KP23 | Reformasi agraria | | | pp | Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah | Jumlah Data aset Tanah Pemerintah | 1.320.393.868 | TANAH |
| | | KP24 | Perhutanan sosial | | | pp | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 1.107.711.174 | DLHK |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP7 | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING | | Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang); Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%); Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%); Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe); Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk); DLL | | | | | | |
| | | KP25 | Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri | | | pp | Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi | 12.625.181.827 | DISNAKER |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP26 | Prestasi Olahraga | | | pp | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Persentase pembinaan olahraga | 292.924.835.761 | DISPORA |
| | | | | | | | | | | |

Sumber: SIPD RI, Diolah

Keterangan:
PN : Prioritas Nasional
PP : Program Prioritas
KP : Kegiatan Prioritas
PA : Prioritas Aceh

**Tabel 4.19**
**Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 4 RKP Tahun 2024**
"Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan"

| RKP 2024 | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| PN 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | | PA 4 | Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh | | | 454.022.250.108 | |
| | PP1 | Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai); Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai); Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai); Nilai Dimensi Persatuan Indonesia (nilai); DLL | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP1 | Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti | | | PP | Program Pendidikan Dayah | Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA) | 208.882.085.841 | DAYAH |
| | | | | | | PP | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Jumlah Standar Pendidikan Aceh yang Ditetapkan | 861.556.456 | MPA |
| | | KP2 | Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif | | | PP | Program Kepegawaian Daerah | Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA | 5.456.685.406 | BKA |
| | | KP3 | Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, | | | PP | Program Syariat Islam Aceh | Angka Melek Alquran masyarakat Aceh yang beragama Islam | 31.260.130.652 | DSI |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter | | | | | | | |
| | | KP4 | Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila | | | PP | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba | 2.311.699.467 | KESBANGPOL |
| | | | | | | pp | Program Baitul Mal Aceh | Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya | 112.441.573.812 | BAITUL MAL |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP5 | Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme | | | PP | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karaktek Kebangsaan | Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | 4.164.700.912 | KESBANGPOL |
| | | | | | | pp | Program Reintegrasi Aceh | Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rahabilitasi sosial | 46.430.789.701 | BRA |
| | | KP6 | Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal | | | PP | Program Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh | Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe | 9.371.029.922 | KKW |
| | | | | | | pp | Program Majelis Adat Aceh | Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat | 1.431.308.207 | MAA |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP8 | Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif | | | PP | Program Pengembangan Kebudayaan | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 13.000.000.000 | BUDPAR |
| | | KP9 | Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan | | | | | | | |
| | | KP10 | Peningkatan Budaya Literasi | | | PP | Program Pembinaan Perpustakaan | Rasio perpustakaan per satuan penduduk | 13.000.000.000 | ARPUS |
| | | KP13 | Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi | | | | | | | |
| | | KP11 | Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra | | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | SKPA |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP12 | Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta | | | PP | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan | 5.410.689.732 | BAPPEDA |
| | | | | | | | | | | |

Sumber: SIPD RI, Diolah

Keterangan:
PN : Prioritas Nasional
PP : Program Prioritas
KP : Kegiatan Prioritas
PA : Prioritas Aceh

**Tabel 4.20**
**Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 5 RKP Tahun 2024**
"Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan"

| RKP 2024 | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| PN 5 | Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | | | PA 3 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | | | 801.835.611.204 | |
| | PP1 | Infrastruktur pelayanan dasar | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%); Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%); Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum amanf) (%); Persentase rumah | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%); DLL | | | | | | |
| | | KP1 | Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau | | | pp | Program Kawasan Permukiman | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani | 100.595.200.000 | PERKIM |
| | | KP2 | Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman | | | PP | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase SPAM Regional yang terbangun | 1.800.000.000 | PERKIM |
| | | | | | | PP | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | 165.144.227.182 | PERKIM |
| | | KP3 | Keselamatan dan keamanan transportasi | | | PP | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan | 38.071.705.470 | DISHUB |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP2 | Infrastruktur ekonomi | | Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%); Panjang jalan baru yang terbangun (km); Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km); Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi); Jumlah rute subsidi tol laut (rute); DLL | | | | | | |
| | | KP5 | Konektivitas jalan | | | pp | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap | 200.836.687.370 | PUPR |
| | | KP6 | Konektivitas Laut | | | PP | Program Pengelolaan Pelayaran | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan | 10.385.700.000 | DISHUB |
| | | KP8 | Konektivitas darat | | | PP | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Rasio Regulasi Bidang Transportasi yang Terimplementasi (t-1) | 2.114.264.000 | DISHUB |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | PP3 | Infrastruktur perkotaan | | Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass (kumulatif)(kota); Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota); Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan) | | | | | | |
| | | KP9 | Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan | | | PP | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | 6.104.200.000 | KOMINSA |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP10 | Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan | | | PP | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase SPAM Regional yang terbangun | 1.800.000.000 | PERKIM |
| | | | | | | PP | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | 165.144.227.182 | PERKIM |
| | | KP11 | Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan | | | pp | Program Kawasan Permukiman | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani | 100.595.200.000 | PERKIM |
| | PP4 | Energi dan ketenagalistrikan | | Jumlah produksi tenaga listrik (GWh); Penurunan emisi CO2 pembangkit (juta ton); Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif); Jumlah sambungan rumah | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | jaringan gas kota (kumulatif, sambungan rumah); Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD) | | | | | | |
| | | KP12 | Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan | | | PP | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Rasio Elektrifikasi | 3.140.000.000 | ESDM |
| | | KP13 | Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan | | | | | | | |
| | | KP14 | Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik | | | | | | | |
| | PP5 | Transformasi digital | | Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%); Persentase pengguna internet (%); Proporsi individu yang menguasai/memiliki | | | | | | |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | telepon genggam (%) | | | | | | |
| | | KP15 | Penuntasan infrastruktur TIK | | | PP | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | 6.104.200.000 | KOMINSA |
| | | KP16 | Pemanfaatan infrastruktur TIK | | | | | | | |
| | | KP17 | Fasilitas pendukung transformasi digital | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Sumber:SIPD RI, Diolah

Keterangan:
PN : Prioritas Nasional
PP : Program Prioritas
KP : Kegiatan Prioritas
PA : Prioritas Aceh

**Tabel 4.21**
**Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas PN 6 RKP Tahun 2024**
"Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim"

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| PN 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | | | | PA 3 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | | | 93.956.657.389 | |
| | PP1 | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai); Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai); Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai); Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai) | | | | | | |
| | | KP1 | Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber | | | PP | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | 2.432.977.619 | DLHK |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | daya alam dan lingkungan hidup | | | | | | | |
| | | KP2 | Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup | | | PP | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup | 165.000.000 | DLHK |
| | | KP3 | Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup | | | PP | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase pengurangan sampah | 410.000.000 | DLHK |
| | | KP4 | Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup | | | PP | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup | 202.242.000 | DLHK |
| | | | | | | PP | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA | Jumlah verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | 50.000.000 | DLHK |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | Yang Terkait dengan PPLH | | | |
| | PP2 | PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM | | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%); Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%); Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit) | | | | | | |
| | | KP5 | Penanggulangan bencana | | | PP | Program Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 20.275.831.578 | BPBA |
| | | KP6 | Peningkatan ketahanan iklim | | | PP | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Penanganan konflik satwa | 2.368.592.639 | DLHK |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | PP3 | PEMBANGUNAN RENDAH KARBON | | Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%); Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%); Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%); Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%); Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%) | | | | | | |
| | | KP7 | Pembangunan energi berkelanjutan | | | PP | Program Pengelolaan Hutan | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | 59.425.593.200 | DLHK |
| | | KP8 | Pemulihan lahan berkelanjutan | | | PP | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan | 50.000.000 | DLHK |

| RKP 2024 | | | | | RKPA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN/PP/KP | | | | Indikator Kinerja | PA/PP | | | Indikator Kinerja | Pagu (Rp.) | OPD |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | KP9 | Pengelolaan limbah | | | PP | Program Pengelolaan Sampah | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | 6.463.874.893 | DLHK |
| | | KP10 | Pengembangan industri hijau | | | PP | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Indeks Kualitas Udara | 85.000.000 | DLHK |
| | | KP11 | Rendah karbon pesisir dan laut | | | PP | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%) | 2.027.545.460 | DKP |
| | | | | | | | | | | |

Sumber: SIPD RI, Diolah

Keterangan:
PN : Prioritas Nasional
PP : Program Prioritas
KP : Kegiatan Prioritas
PA : Prioritas Aceh

### 4.3 Pemenuhan SPM

SPM merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Penetapan substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas (jenis SPM):

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
6. Sosial.

Prinsip penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib yang berakitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoodinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Jenis pelayanan dasar SPM provinsi terdiri atas:

1. Pendidikan menengah;
2. Pendidikan khusus;

3. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
9. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Selanjutnya, target dan indikator SPM Tahun 2024 dapat dlihat pada Tabel 4.22 s.d Tabel 4.27 berikut ini.

**Tabel 4.22**
**Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024**

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | 1 Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | % | 100 |
| | | 2 Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | % | 100 |
| | | 3 Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 62,14 |
| | | 4 Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 52,85 |
| | | 5 Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 59,04 |

| No | Kinerja | Indikator | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 6 | Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 50,83 |
| | | 7 | Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 64,87 |
| | | 8 | Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 48,24 |
| | | 9 | Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 65,76 |
| | | 10 | Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 57,55 |
| | | 11 | Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 62,86 |
| | | 12 | Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 56,3 |
| | | 13 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | % | 84,72 |
| | | 14 | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | % | 81,1 |
| | | 15 | Indeks Iklim Keamanan SMA | Nilai | 86,59 |
| | | 16 | Indeks Iklim Kebinekaan SMA | Nilai | 76,27 |
| | | 17 | Indeks Inklusivitas SMA | Nilai | 78,85 |
| | | 18 | Indeks Iklim Keamanan SMK | Nilai | 84,04 |
| | | 19 | Indeks Iklim Kebinekaan SMK | Nilai | 74,6 |
| | | 20 | Indeks Inklusivitas SMK | Nilai | 77,51 |
| | | 21 | Indeks Iklim Keamanan SDLB | Nilai | 91,02 |
| | | 22 | Indeks Iklim Kebinekaan SDLB | Nilai | 93,36 |
| | | 23 | Indeks Inklusivitas SDLB | Nilai | 87,74 |
| | | 24 | Indeks Iklim Keamanan SMPLB | Nilai | 83,9 |
| | | 25 | Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB | Nilai | 77,84 |
| | | 26 | Indeks Inklusivitas SMPLB | Nilai | 87,23 |
| | | 27 | Indeks Iklim Keamanan SMALB | Nilai | 88,8 |
| | | 28 | Indeks Iklim Kebinekaan SMALB | Nilai | 78,51 |
| | | 29 | Indeks Inklusivitas SMALB | Nilai | 93,6 |

Sumber: Hasil Desk RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023

**Tabel 4.23**
**Target dan Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024**

| No | Kinerja | | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | 1 | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | % | 100 |
| | | 2 | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | % | 100 |

Sumber: Hasil Desk RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023

**Tabel 4.24**
**Target dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024**

| No | Kinerja | | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum | 1 | Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Persen | 78,5 |
| | | 2 | Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Persen | 88,3 |

Sumber: Hasil Desk RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023

**Tabel 4.25**
**Target dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024**

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat | 1 Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 100 |
| | | 2 Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni | Persen | 100 |

Sumber: Hasil Desk RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023

**Tabel 4.26**
**Target dan Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2024**

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar | 1 Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan | % | 25 |
| | | 2 Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana | % | 100 |
| | | 3 Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur | Orang | 78 |

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4 Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan | Perda/ Perkada | 8 |
| | | 5 Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | % | 100 |
| | | 6 Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP | % | 100 |
| | | 7 Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional | % | 100 |
| | | 8 Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota | % | 100 |
| | | 9 Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat | % | 100 |
| | | 12 Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat) | % | 100 |
| | | 13 Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani | % | 100 |

| No | Kinerja | Indikator | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 14 | Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota | % | 100 |
| | | 15 | Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan | Dokumen | 23 |
| | | 16 | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS | Orang | 16 |
| | | 17 | Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya | % | 100 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar | 1 | Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah | % | n/a |
| | | 2 | Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan | % | n/a |
| | | 3 | Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | % | 100 |
| | | 4 | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | % | n/a |
| | | 5 | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | % | n/a |
| | | 6 | Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya | % | n/a |
| 3 | Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana | 1 | Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan | % | 20 |

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2 Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana | % | 95 |
| | | 3 Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota | % | n/a |
| | | 4 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana | % | n/a |
| | | 5 Persentase pendampingan penanganan pasca bencana | % | 97 |
| | | 6 Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial | % | 60 |
| | | 7 Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota | % | 90 |

Sumber: Hasil Desk RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023

**Tabel 4.27**
**Target dan Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2024**

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | 1 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 50 |
| | | 2 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan | Orang | n/a |

| No | Kinerja | Indikator | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | kesehatan di rumah singgah/shelter | | |
| | | 3 | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter | Paket | n/a |
| | | 4 | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | Paket | n/a |
| | | 5 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar | Orang | 35 |
| | | 6 | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti | Orang | 50 |
| | | 7 | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan | Orang | n/a |
| | | 8 | Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme | Kelompok Masyarakat | n/a |
| | | 9 | Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti | Orang | 5 |
| | | 10 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 |
| | | 11 | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 128 |
| | | 12 | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti | Orang | 35 |
| | | 13 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar | Orang | 35 |

| No | Kinerja | Indikator | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 14 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 72 |
| | | 15 | Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti | Orang | 5 |
| | | 16 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 50 |
| | | 17 | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 128 |
| | | 18 | Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | Orang | 128 |
| | | 19 | Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar | Orang | 128 |
| | | 20 | Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 128 |
| | | 21 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 72 |
| | | 22 | Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses | Unit | 72 |
| | | 23 | Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti | Orang | 60 |
| | | 24 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar | Orang | 60 |
| | | 25 | Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan | Orang | 2 |

| No | Kinerja | Indikator | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | sosial yang disediakan di dalam panti | | |
| | | 26 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 50 |
| | | 27 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 |
| | | 28 | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 |
| | | 29 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | Orang | 35 |
| | | 30 | Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti | Orang | 5 |
| | | 31 | Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | Orang | 15 |
| | | 32 | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | Jiwa | 120.000 |
| | | 33 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 35 |
| | | 34 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 8 |
| | | 35 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan | Orang | 4 |

| No | Kinerja | Indikator | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | 36 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 35 |
| | | 37 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 |
| | | 38 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 35 |
| | | 39 | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | Orang | 50 |
| | | 40 | Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | % | 100 |
| | | 41 | Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | % | 35 |
| | | 42 | Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | % | 100 |
| | | 43 | Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | % | 100 |
| | | 44 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 50 |
| | | 45 | Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta | Orang | 5 |

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti | | |

Sumber: Hasil Desk RAKORTEKRENBANG Nasional tahun 2023

## 4.4 Inovasi

### 4.4.1 Strategi Inovasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktikpraktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Pemerintah Aceh terus berupaya mewujudkan iklim inovasi dalam mencapai indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, baik yang berkaitan langsung dengan aspek tata kelola Pemerintahan, aspek Pelayanan Publik, maupun aspek lainnya yang mendukung proses percepatan pelaksanaan pembangunan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan mengingat pesatnya perubahan global yang menuntut segala hal dilakukan dengan cepat, terukur, dan memberi dampak yang signifikan.

Melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Aceh bersama dengan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh Tahun 2022 yang dibentuk oleh Gubernur Aceh telah melakukan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, pendampingan, serta menggunakan SKPA inovatif sebagai pengampu bagi SKPA yang lain guna meningkatkan semangat berinovasi secara bersama bagi perangkat Pemerintah Aceh.

Hasil dari berbagai kegiatan tersebut selanjutnya dapat dilihat bahwa dari 56 SKPA yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2022 ada 46 SKPA yang telah menginput data inovasinya ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2022. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 114 dengan rincian 28 inovasi yang memiliki skor kematangan maksimal yaitu 111, 12 inovasi memiliki skor kematangan antara 100 – 110 dan 51 inovasi memiliki nilai kematangan antara 1 – 99 serta ada 23 inovasi yang belum memiliki nilai kematangan.

Rumah Sakit Zainoel Abidin merupakan SKPA yang memberikan sumbangan inovasi terbanyak yaitu 8 inovasi dengan skor kematangan masing-masing inovasi sebesar 111 (maksimal). Disusul oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh 6 inovasi dengan skor kematangan 111. Selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh masing-masing ikut memperlombakan 3 inovasi yang memiliki skor kematangan 111. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 111. Sementara itu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BKA) mengikutkan 1 inovasi dengan skor kematangan 111, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 111 dan 107, Dinas Kesehatan Aceh mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 111 dan 107, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyertakan 1 inovasi dengan skor kematangan 111, Dinas Pendidikan Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 111, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 111.

Beberapa SKPA dengan skor kematangan antara 100 - 110 ikut memperlombakan inovasinya pada IGA 2022 yaitu Badan Kepegawaian Aceh (BKA) 1 inovasi dengan skor kematangan 102, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 103, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 107, Dinas Perhubungan Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 100, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 106 dan 102, Dinas Sosial Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 106, Inspektorat Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 103, Rumah Sakit Jiwa Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 109, dan Sekretariat Daerah Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 103 (Gambar 1). Dengan demikian ada 20 SKPA yang mengikutkan inovasinya pada IGA 2022

serta 29 SKPA yang tidak mengikutkan inovasinya pada IGA 2022 karena skor kematangannya yang belum mencapai nilai batas minimal yaitu 100. Lebih jelas mengenai skor Inovasi SKPA diatas 100 dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini.

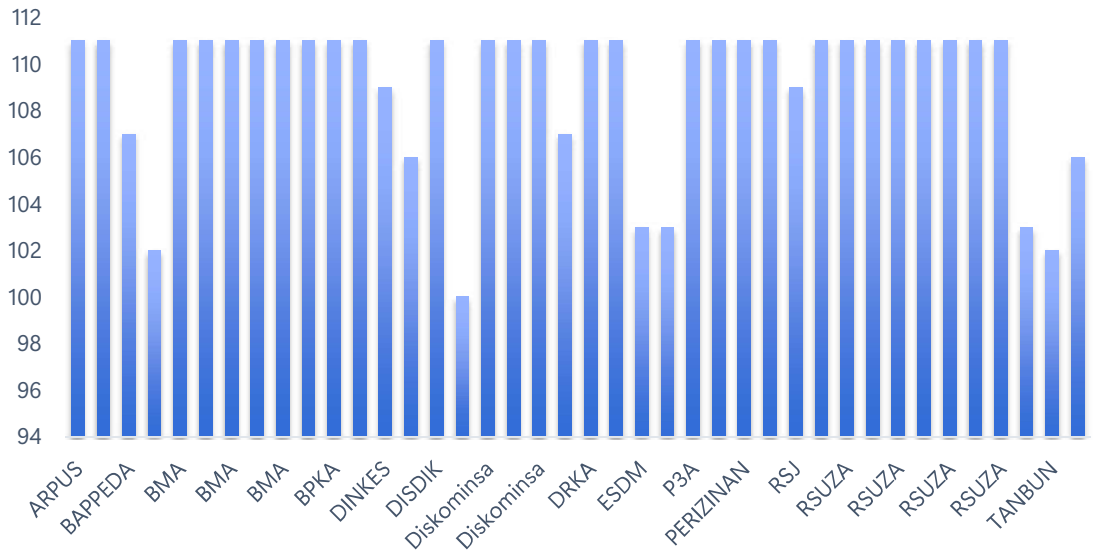


Sumber: Bappeda Aceh, Diolah 2022

**Gambar 4.7**
**Skor Inovasi SKPA > 100**

### 4.4.2 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh

IID Pemerintah Aceh pada tahun 2022 sebesar 51,67 yang membuat Pemerintah Aceh berada pada peringkat ke 15 di Indonesia. Nilai IID ini tergolong kedalam kelompok pemerintah daerah yang inovatif. IID tahun 2022 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang pada saat itu IID Pemerintah Aceh sebesar 46,6 dan berada pada peringkat ke 19 di Indonesia. Namun demikian IID tahun 2022 ini masih dibawah nilai target RPJPA 2005-2025 yang menetapkan nilai IID sebesar 60,00 pada 2025. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang lebih keras agar target tersebut dapat dicapai bahkan terlampaui.

### 4.4.3 Capaian Pemerintah Aceh dalam Indeks Inonvasi Daerah Tahun 2022

Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh dari tahun 2020 – 2022 dengan catatan bahwa ada perbedaan cara penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan nilai IID pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun 2021 dan 2022. Gambar 4.8 menampilkan capaian Provinsi Aceh dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2020-2022.

*)Penilai pada tahun 2020 menggunakan formula yang berbeda

**Gambar 4.8**
**Capaian Provinsi AcehDalam Pengukuran Indeks Inovasi daerah**
**Tahun 2020-2022**

Selanjutnya, berikut ini merupakan posisi peringkat IID Provinsi Aceh tahun 2022 untuk seluruh Indonesia (Gambar 4.9).

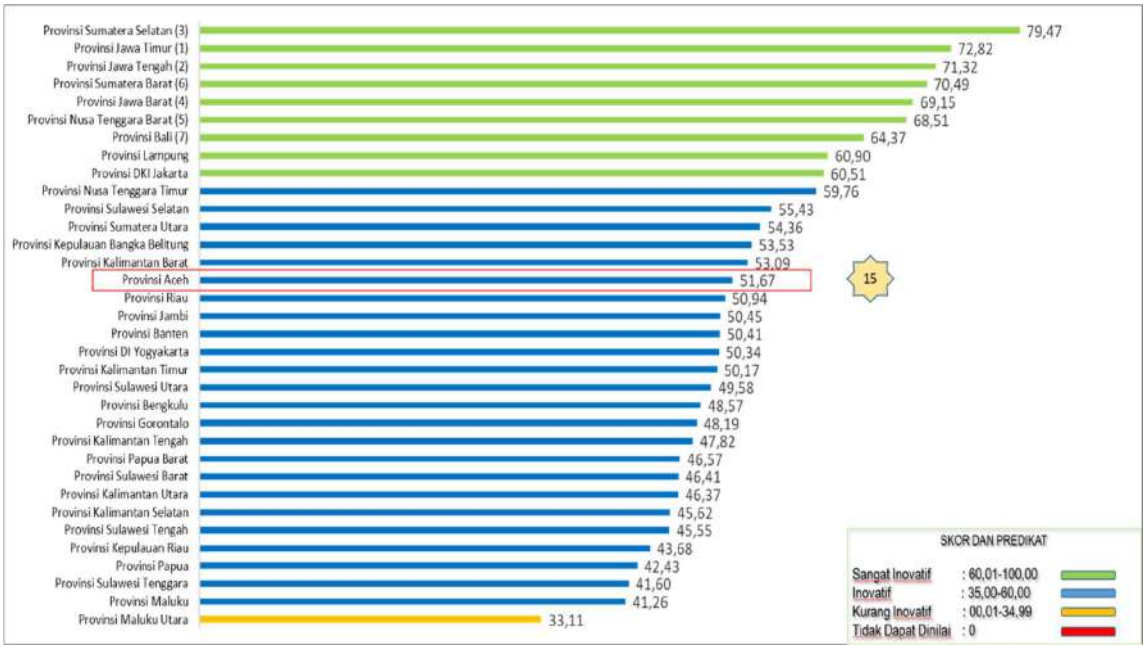


Sumber BSKDN tahun 2023

**Gambar 4.9**
**Posisi Capaian IID Provinsi Aceh Tahun 2022**

Inovasi daerah Pemerintah Aceh yang diinput dalam IID tahun pelaporan 2022 berdasarkan tahapan disajikan pada Gambar 4.10 berikut ini.

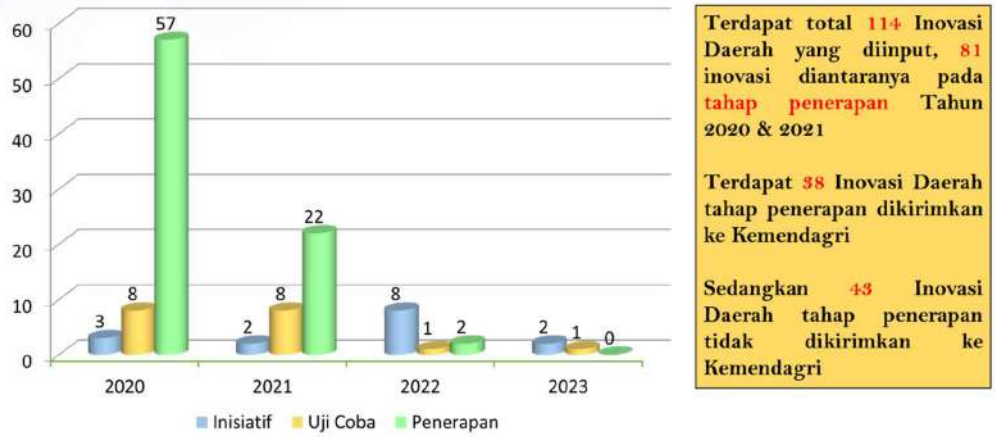


Sumber BSKDN tahun 2023

**Gambar 4.10**
**Rekapitulasi Pelaporan IID Pemerintah Aceh Tahun 2022**

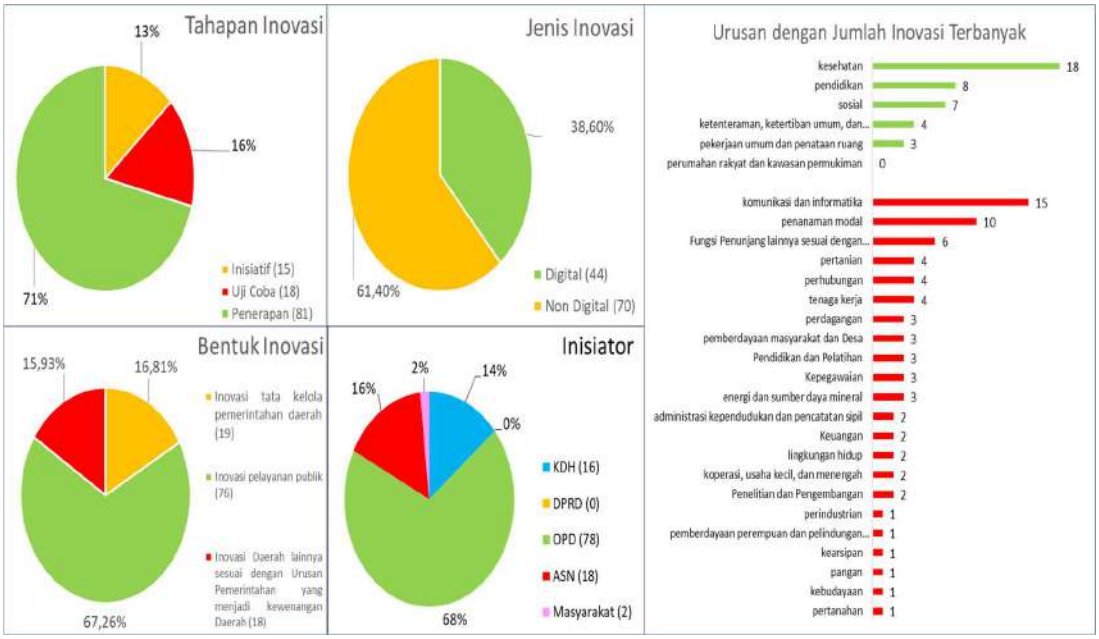


Sumber: BSKDN tahun 2023

**Gambar 4.11**
**Rekapitulasi Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 Provinsi Aceh**

Dari Gambar 4.11 diketahui bahwa IID Provinsi Aceh tahun 2022 berdasarkan dari tahapan inovasi sebagian besar merupakan tahap penerapan atau sebesar 71 persen (81 inovasi), uji coba 16 persen (18 inovasi) dan inisiatif 13 persen (15 inovasi). Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan jenis inovasi sebagian besar inovasi tahun 2022 merupakan jenis non digital (61,40% atau 70 inovasi). Berdasarkan bentuk inovasi dan inisiator sebagian

besar adalah inovasi pelayanan publik (67,26% atau 76 inovasi) dan diinisiasi oleh SKPA (68% atau 78 inovasi).

Selanjutnya, berikut ini merupakan bagan jaring laba-laba terkait capaian indeks inovasi Provinsi Aceh masing-masing variabel. Bagan tersebut menunjukkan bahwa capaian tertinggi Pemerintah Aceh ada pada variabel ekosistem inovasi dan kajian, yang memuat jumlah penelitian/kajian inovasi dan ketersediaan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh.

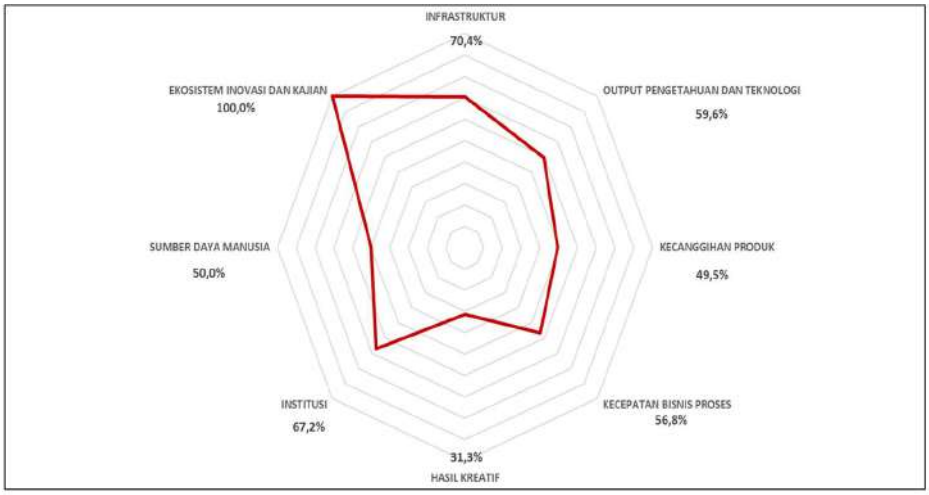


Sumber BSKDN tahun 2023

**Gambar 4.12**
**Performa Pemerintah Aceh dalam IID tahun 2022**

Berdasarkan Gambar 4.12 di atas, terlihat bahwa inovasi Aceh masih lemah pada variabel sumberdaya manusia dan hasil kreatif, serta kecanggihan produk. Sedangkan variabel lainnya sudah menunjukkan nilai yang cukup baik.

PEMERINTAH ACEH

# BAB V

# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

**Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024**

# BAB V
# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Aceh, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota menjadi panduan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan program dan kegiatan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Pemerintah Aceh Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota terdiri atas arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RKPA Tahun 2024, arah kebijakan kewilayahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dan arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

## 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota

### 5.1.1 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2024.

#### 5.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan pada periode 2010 hingga 2022. Selama 2010-2021 IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun, dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 72,80 pada tahun 2022. Pada periode 2021-2022, IPM Provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2020-2021 yang tumbuh sebesar 0,26 persen. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Provinsi Aceh meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, peningkatan IPM Provinsi Aceh sudah kembali membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan)

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh cukup bervariasi. IPM pada kabupaten/kota berkisar antara 66,20 (Kota Subulussalam) hingga 86,28 (Kota Banda Aceh). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH berkisar antara 64,30 tahun (Kota Subulussalam) hingga 71,87 tahun (Kota Lhokseumawe). Sementara pada dimensi pengetahuan, HLS berkisar antara 13,06 tahun (Kabupaten Aceh Timur) hingga 17,81 tahun (Kota Banda Aceh), dan RLS berkisar antara 8,22 tahun (Kota Subulussalam) hingga 13,03 tahun (Kota Banda Aceh). Sedangkan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara Rp7.371 juta per tahun (Kabupaten Simeulue) hingga Rp17.228 juta per tahun (Kota Banda Aceh).

Status capaian pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2022 terdapat perubahan 5 kabupaten yang berstatus 'tinggi" dari tahun sebelumnya berstatus "sedang." Jumlah kabupaten/kota yang berstatus "sedang" pada tahun 2022 sebanyak 7 kabupaten/kota, dan terdapat 15 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia "tinggi", yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Aceh berstatus "sangat tinggi" adalah Kota Banda Aceh.

.

**Gambar. 5. 1**
**IPM Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022**

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada kabupaten/kota. Pada periode 2021 hingga 2022, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat lima kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kota Subulussalam (1,42 persen), Kabupaten Aceh Tamiang (1,37 persen), Kabupaten Aceh Timur (1,31), Kabupaten Simeulue (1,29 persen), dan Kabupaten Aceh Tenggara (1,27 persen).

#### 5.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran

masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah.

Perekonomian Aceh Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp211,75 triliun dengan migas dan tanpa migas adalah sebesar Rp198,44 triliun. Sementara itu PDRB atas harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp140,95 triliun dan tanpa migas adalah sebesar Rp134,38 triliun. PDRB per kapita Aceh mencapai Rp39,16 juta.

Ekonomi Aceh tahun 2022 tumbuh sebesar 4,21 persen dengan migas, sementara tanpa migas tumbuh sebesar 3,80 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum sebesar 32,40 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen ekspor barang dan jasa luar negeri yaitu sebesar 20,83 persen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan pencapaian dari kabupaten dan kota.

**Tabel 5.1**

**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2021**

| No. | Kabupaten/Kota | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Simeulue | 3,62 |
| 2 | Kab. Aceh Singkil | 3,61 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 3,11 |
| 4 | Kab. Aceh Tenggara | 2,78 |
| 5 | Kab. Aceh Timur | 3,73 |
| 6 | Kab. Aceh Tengah | 4,90 |
| 7 | Kab. Aceh Barat | 3,32 |
| 8 | Kab. Aceh Besar | 3,87 |
| 9 | Kab. Pidie | 3,98 |
| 10 | Kab. Bireuen | 4,31 |
| 11 | Kab. Aceh Utara | 4,63 |
| 12 | Kab. Aceh Barat Daya | 3,87 |
| 13 | Kab. Gayo Lues | 3,51 |
| 14 | Kab. Aceh Tamiang | 3,32 |
| 15 | Kab. Nagan Raya | 2,37 |
| 16 | Kab. Aceh Jaya | 3,68 |
| 17 | Kab. Bener Meriah | 3,69 |
| 18 | Kab. Pidie Jaya | 3,57 |

| No. | Kabupaten/Kota | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|
| 19 | Kota Banda Aceh | 5,23 |
| 20 | Kota Sabang | 2,52 |
| 21 | Kota Langsa | 4,78 |
| 22 | Kota Lhokseumawe | 4,01 |
| 23 | Kota Subulussalam | 4,12 |
| **Aceh** | | **4,21** |

**Sumber: BPS Aceh, 2023**

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota se-Aceh menunjukkan adanya pertumbuhan pada Laju PDRB. Laju pertumbuhan yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Aceh Barat dengan pertumbuhan mencapai 5,23 persen dan terendah di capai kabupaten Nagan Raya yang mencapai 2,37 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh yang merupakan akumulasi dari pertumbuhan kabupaten/kota di Aceh memerlukan upaya pemerataan shingga pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat merata yang pada akhirnya merupakan sebuah upaya dalam rangka pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota dimana dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Aceh maka telah disusun pola pengembangan wilayah dengan menetapkan daerah pengembangan sesuai keunggulan yang ada di daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2023

#### 5.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui Tingkat Pengggangguran Terbuka (TPT) di Aceh mencapai 6,17 persen, dengan Kota Lhokseumawe dengan TPT tertinggi sebesar 9, 1 % dan Kabupaten Bener Meriah dengan TPT terendah sebesar 2,61 persen. Upaya-upaya penanganan pengggangguran ini merupakan upaya bersama di dalam upaya peningkatan kesejahteraaan masyarakat dengan mewujudkan pola pengembangan kawasan berdasarkan sektor usaha unggulan

yag ada di daerah. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Aceh sebagai provinsi berdaya saing tinggi.

**Tabel 5.2**
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten 2022**

| No. | Kabupaten/Kota | TPT (%) |
|---|---|---|
| 1 | Simeulue | 6,00 |
| 2 | Aceh Singkil | 6,88 |
| 3 | Aceh Selatan | 4,82 |
| 4 | Aceh Tenggara | 5,09 |
| 5 | Aceh Timur | 8,07 |
| 6 | Aceh Tengah | 4,44 |
| 7 | Aceh Barat | 6,09 |
| 8 | Aceh Besar | 8,28 |
| 9 | Pidie | 5,94 |
| 10 | Bireuen | 4,20 |
| 11 | Aceh Utara | 7,08 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 4,12 |
| 13 | Gayo Lues | 2,70 |
| 14 | Aceh Tamiang | 7,38 |
| 15 | Nagan Raya | 5,84 |
| 16 | Aceh Jaya | 3,12 |
| 17 | Bener Meriah | 2,61 |
| 18 | Pidie Jaya | 4,40 |
| 19 | Banda Aceh | 8,62 |
| 20 | Sabang | 4,01 |
| 21 | Langsa | 7,85 |
| 22 | Lhokseumawe | 9,15 |
| 23 | Subulussalam | 5,75 |
| **Aceh** | | **6,17** |

**Sumber BPS Aceh, 2022**

#### 5.1.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Secara perkembangan tahunan pada tahun 2022 Persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun dimana pada tahun pada Maret 2021, persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 15,33 persen kemudian pada September 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 15,53 persen yang merupakan kenaikan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,64 persen. KondisiSeptember 2022, persentase penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 14,75 persen

Persentase persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022. Di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen (0,19 poin). Sedangkan di perkotaan, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen (0,04 poin).

Pada Bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 818,47 ribu orang (14,75 persen), mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2022 yang jumlahnya 806,82 ribu orang (14,64 persen).

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,489 pada Maret 2022 menjadi pada 2,897 pada September 2022. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,613 pada Maret 2022 menjadi 0,780 pada September 2022. Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyakarat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan

Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Aceh fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Aceh terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu.

**Tabel 5.3**

**Tingkat Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2022**

| No. | Kabupaten/Kota | (%) |
|---|---|---|
| 1 | Simeulue | 18,37 |
| 2 | Aceh Singkil | 19,18 |
| 3 | Aceh Selatan | 12,43 |
| 4 | Aceh Tenggara | 12,83 |
| 5 | Aceh Timur | 13,91 |
| 6 | Aceh Tengah | 14,5 |
| 7 | Aceh Barat | 17,93 |
| 8 | Aceh Besar | 13,38 |
| 9 | Pidie | 18,79 |
| 10 | Bireuen | 12,51 |
| 11 | Aceh Utara | 16,86 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 15,44 |
| 13 | Gayo Lues | 18,87 |
| 14 | Aceh Tamiang | 12,61 |
| 15 | Nagan Raya | 17,38 |
| 16 | Aceh Jaya | 12,51 |
| 17 | Bener Meriah | 18,39 |
| 18 | Pidie Jaya | 18,45 |
| 19 | Banda Aceh | 7,13 |
| 20 | Sabang | 14,66 |
| 21 | Langsa | 10,62 |
| 22 | Lhokseumawe | 10,84 |
| 23 | Subulussalam | 16,94 |
| **Aceh** | | 15,53 |

**Sumber: BPS Aceh, 2022**

### 5.1.2 Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Aceh

Target keberhasilan pembangunan Aceh merupakan agregat dari kondisi kinerja makro Kabupaten dan kota. Tolak ukur keberhasilan tersebut tergambar dari beberapa indikator kinerja serta merupakan dampak dari segala pencapaian program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu merupakan amanah bagi Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan arah kebijakan pembangunan yang tepat bagi kabupaten dan kota. Pemerintah Aceh akan terus mendorong terutama bagi kabupaten/Kota dengan indikator makro berkinerja lemah untuk dapat ditingkatkan.

Sebagaimana sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 pada beberapa indikator makro pada tahun 2024 antara lain; Pertumbuhan PDRB yang ditargetkan mencapai 3,75 %; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,28; Persentase Penduduk Miskin menjadi 14,53 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menjadi 5,36; PDRB per Kapita (ADHK) Rp. 26,20 juta; dan Indeks Gini menjadi 0,304 persen. Target capaian tersebut merupakan hasil dari capaian indikator pembangunan Pemerintah Aceh tersebut yang merupakan target bersama dari seluruh capaian Kabupaten dan Kota sehingga diperlukan sinkronisasi dalam upaya pencapaian target tersebut.

Realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Perekonomian Aceh Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp211,75 triliun dengan migas dan tanpa migas adalah sebesar Rp198,44 triliun. Sementara itu PDRB atas harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp140,95 triliun dan tanpa migas adalah sebesar Rp134,38 triliun. PDRB per kapita Aceh mencapai Rp39,16 juta

Ekonomi Aceh tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 tumbuh sebesar 4,21 persen dengan migas, sementara tanpa migas tumbuh sebesar 3,80 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum sebesar 32,40 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen ekspor barang dan jasa luar negeri yaitu sebesar 20,83 persen

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada beberapa indikator makro pembangunan Pemerintah Aceh antara lain pada Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami peningkatan 2022 mencapai 72,80, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,18).Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada capaian pengangguran juga menunjukkan peningkatan dimana persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 6,17 persen, turun sebesar 0,13 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Pada indikator kemiskinan persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 persentase

penduduk miskin di Aceh menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Maret 2019, persentase penduduk miskinAceh sebesar 15,32 persen. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 15,01persen pada September 2019. Pada awal tahun 2020, wabah covid-19 melanda Indonesia dan menyebabkan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak dari wabah tersebut mulai terasa di Aceh pada April 2020. Sehingga pada Maret 2020, persentase penduduk miskin di Aceh masih mengalami penurunan menjadi 14,99 persen sedangkan pada September 2020 mulai terasa dampak wabah covid-19, yang terlihat dari persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 15,43 persen. Selanjutnya, pada Maret 2021, persentase penduduk miskinkembali turun menjadi 15,33 persen kemudian pada September 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 15,53 persen yang merupakan kenaikan tertinggi selama 3 tahun terakhir.

Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,64 persen. Kondisi September 2022, persentase penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 14,75 persen. Kenaikan angka kemiskinan pada September 2022 terjadi secara nasional dan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Jika kita lihat dari segi jumlah, penduduk miskin di Aceh juga sedikit berfluktuasi. Pada Maret 2019 jumlah penduduk miskinnya berjumlah 819,44 ribu orang. Kemudian terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 809,76 ribu orang pada September 2019. Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan menjadi 814,91 ribu orang pada Maret 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 833,91 ribu orang pada September 2020. Pada Maret 2020, penambahan jumlah penduduk lebih cepat dibandingkan dengan penurunan kemiskinan. Hal ini menyebabkan penurunan persentase kemiskinan tidak sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Kenaikan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada Maret 2021 (menjadi 834,24 ribu orang) dan September 2021 (menjadi 850,26 ribu orang). Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 806,82 ribu orang. Kondisi September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh kembali mengalami kenaikan menjadi 818,47 ribu

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan HakHak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak" maka perencanaan yang disusun untuk tahun 2024 telah disesuaikkan dengan arah pembangunan yamg sudah diaraahkan pada kebijakan pembangunan tersebut.

Secara makro sasaran pembangunan dalam RKPA 2024 diarahkan kepada percepatan pembangunan untuk mengurangi angkakemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dengan tetap menjagakelestarian lingkungan hidup dan sumber

daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM.

Aceh juga terus mengupayakan untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Ketimpangan antarwilayah di Aceh masih tinggi disebabkan oleh akses infrastruktur yang belummemadai dan tidak terintegrasi, terutama infrastruktur transportasi,telekomunikasi dan infrastruktur produksi (irigasi, listrik, pabrikpengolahan, dll) wilayah tengah tenggara dan barat selatan. Proyek Multi Years Contract (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikankeberlanjutannya. Dismping itu proyek MYC yang sedang berjalan,Pemerintah Aceh perlu terus memperjuangkan peningkatan dan pelurusanjalan lintas tengah, peningkatan jalan lintas Barat Selatan, serta infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian adalahpembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan airminum, pembangunan instalasi air minum, penataan sanitasi serta penyediaan listrik untuk kebutuhan pengembangan industri.

Pada tahun 2024, pemerintah Aceh optimis dalam menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM, penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan dengan beberapa program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari program dan kegiatan tersebut pda tahun sebelumnya. Kinerja dari Pemerintah Aceh terkait peningkatan beberapa indikator Makro Pembangunan tersebut diharapkan juga dapat disinergikan dengan berbagai kebijakan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan pada Kabupaten/Kota.

Berikut pada tabel dapat dilihat target indikator kinerja Makro yang tersebar pada 23 Kabupaten/ Kota.

**Tabel 5.4**

**Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten/ Kota se-Aceh Tahun 2024**

| No | Kabupaten | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | Tingkat Kemiskinan (%) | | TPT (%) | | IPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perkiraan 2023 | Target 2024 | Perkiraan 2023 | Target 2024 | Perkiraan 2023 | Target 2024 | Perkiraan 2023 | Target 2024 |
| 1 | Simeulue | 2.95 | 3,2 | 18.48 | 17,99 | 5.22 | 4,99 | 66.79 | 67,18 |
| 2 | Aceh Singkil | 4,0 | 4,25 | 18,00 | 17,50 | 6,80 | 4,2 | 70,55 | 69,00 |
| 3 | Aceh Selatan | 3,85 | 3,40 | 11,8 | 11,90 | 6,15 | 4,00 | 70,59 | 69,00 |
| 4 | Aceh Tenggara | 2 | 3 | 13,39 | 13,37 | 5 | 5,8 | 69,46 | 69,47 |
| 5 | Subulussalam | 4,47 | 4,48 | 16,3 | 15,9 | 5,12 | 5,83 | 75,14 | 75,96 |
| 6 | Pidie Jaya | 4,5 - 5 | 5,60 | 18,79 | 17,09 | 3,5 | 4,80 | 73,6 | 72,13 |
| 7 | Banda Aceh | 4 | 4,4 | 7,25 | 7,07 | 8,15 | 8,14 | 86,59 | 87,03 |
| 8 | Aceh Timur | 3,34 | 3,4 | 14,02 | 13,60 | 6,77 | 6,43 | 68,17 | 68,51 |
| 9 | Aceh Tengah | 3,47 | 3,50 | 15 | 13,75 | 2,5 | 2,25 | 73,5 | 73,78 |
| 10 | Aceh Barat | 2,0-2,7 | 2,8-3,5 | 18,31 | 17,81 | 7,04 | 6,74 | 71,99 | 72,09 |
| 11 | Aceh Besar | 3,90 | 4 | 13,55 | 13,05 | 7,07 | 6,52 | 73,88 | 74,18 |
| 12 | Pidie | 2,41 | 3,42 | 18,56 | 18,07 | 6,25 | 6,15 | 71 | 71,21 |
| 13 | Bireuen | 4,5 | 4,6 | 12,25 | 11,75 | 3,8 | 3,65 | 72,7 | 73,1 |
| 14 | Aceh Utara | 3,5 | 3,62 | 17 | 16 | 7,5 | 7,1 | 70 | 71 |
| 15 | Aceh Barat Daya | 3,38 | 4 | 16,13 | 16,00 | 3,69 | 3,51 | 67,81 | 68,00 |
| 16 | GayoLues | 2,74 | 3,23 | 18,98 | 18,48 | 1,47 | 1,29 | 68,82 | 68,99 |

| No | Kabupaten | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | Tingkat Kemiskinan (%) | | TPT (%) | | IPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perkiraan 2023 | Target 2024 | Perkiraan 2023 | Target 2024 | Perkiraan 2023 | Target 2024 | Perkiraan 2023 | Target 2024 |
| 17 | Aceh Tamiang | 2,41 | 2,5 | 18,56 | 12,08 | 6,25 | 5,2 | 71 | 69,74 |
| 18 | Nagan Raya | 4,2 | 4,3 | 16,50 | 17,8 | 4,08 | 4,2 | 70,20 | 71,2 |
| 19 | Aceh Jaya | 2,84 | 3,09 | 12,93 | 12,63 | 3,42 | 3,37 | 69,98 | 70,05 |
| 20 | Bener Meriah | 3,24 | 3,3 | 19,02 | 18,96 | 1,38 | 1,36 | 73,56 | 73,82 |
| 21 | Sabang | 2,80 | 3,0 | 14,96 | 13,42 | 3,50 | 3,40 | 76,73 | 77,02 |
| 22 | Langsa | 4,37 | 4,38 | 10,29 | 9 | 7,17 | 7,3 | 77,44 | 78 |
| 23 | Lhokseumawe | 3,50 | 4 | 11,10 | 11,07 | 11,12 | 11,08 | 77,62 | 77,70 |

**Sumber: RPK Kabupaten Kota 2023-2026 dan RPJMD Kab/Kota 2019-2024**

## 5.2 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Perkembangan ketimpangan pembangunan di Kabupate/Kota terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 0,408 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01 poin, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 0.419. Penurunan ini diperkirakan akibat dari adanya percepatan pembangunan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi pendanaan Otonomi Khusus. Pada tahun 2021 indeks williamson mengalami peningkatan yang relative diakibatkan oleh tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota karena dampak covid 19 dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan meningkatnya harga komoditi non migas seperti batubara dan Sawit.

Pada tahun 2022 indeks williamson mengalami peningkatan menjadi 4,29 atau meningkat sebanyak 0,10 poin. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi di beberapa daerah di Kabupaten/Kota yang masih mengalami ketimpangan yang tinggi karena pada tujuannya dari pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan peluang kerja untuk masyarakat daerah. Apabila pemerataan pembangunan daerah dapat diwujudkan maka akan mempertinggi pendapatan masyarakat yang penghasilannya rendah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat merangsang perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Aceh mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi di Aceh mengalami penurunan akibat berbagai hal diantaranya pengurangan jam kerja, pelarangan mudik, pelarangan mengadakan pesta, pembatasan berkunjung di warung makan dan kopi, berkurangnya kegiatan ekspor akibat adanya lockdown di semua negara tujuan ekspor, berkurangnya wisatawan yang berkunjung dan lainnya. Namun pada tahun 2022 beberapa capaian indikator pembangunan sudah menunjukkan perkembangan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah.

Capaian indikator makro pembangunan Aceh, yang digambarkan dari capaian kabupaten/kota pada umumnya masih belum tercapai secara sempurna maka diperlukan suatu upaya bersama dalam pencapaaian dari indikator tersebut .

Berdasarkan hal tersebut itu Pemerintah Aceh perlu memberi masukan arah dan kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2024 dalam rangka melaksanakan beberapa tujuan pembangunan pemerintah Aceh Meningkatkan Pembangunan Demokrasi; Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional;

Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19; Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana; Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Perumusan tema pembangunan RKPA Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan tema RKP Tahun 2024, arah kebijakan RPA Tahun 2023-2026, hasil evaluasi pembangunan Aceh Tahun 2022 dan serta isu strategis yang menjadi perhatian tahun 2024. Tema RKPA Tahun 2024 juga merupakan suatu proses Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh pada Tahapan ke-4 untukmenjaga konsistensi, sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunanyang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh, terutama penyesuaian targetindikator makro pembangunan RPA dengan target prioritas nasional dan RPJP Aceh. Arah kebijakan tahun 2024 dalam RPA Tahun 2023-2026 adalah Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan HakHak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan RKPA Tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan menyukseskan pemilihan umum legislatif dan kepala daerah secara serentak. Perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman. Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, DitjenPenataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

1. Sebagai *growthcenter*dimana pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spredeffect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional;
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah;
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Aceh meliputi:

1. Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh;
2. Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional, dan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.

Menurut posisi geografis, wilayah pengembangan (WP) Aceh secara garis besar dikelompokkan menjadi: a) Banda Aceh dan Sekitarnya, b) Pesisir Timur, c) Pegunungan Tengah dan d) Pesisir Barat, Lebih jelas disajikan dalam Tabel 5.5 dibawah ini.

**Tabel 5.5**

**Wilayah Pengembangan di Provinsi Aceh**

| No | Wilayah Pengembangan | Pusat Kegiatan | Sektor Unggulan | Fokus Pengembangan |
|---|---|---|---|---|
| **Banda Aceh dan Sekitarnya** | | | | |
| 1. | **WP Basajan** (Banda Aceh-Sabang-Jantho) | ▪ PKNp Banda Aceh<br>▪ PKSN/PKN Sabang<br>▪ PKL Jantho | Pertanian, pariwisata, jasa, perdagangan, industri, perikanan | ▪ PKN Banda Aceh, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai a) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, b) pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan/atau c) simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.<br>▪ PKSN/PKN Sabang, diarahkan sebagai kawsan perkotaan sedang yang berpotensi sebagai: a) pos pemeriksanaan lintas batas dengan negara tetangga, b) pintu gerbang internasional yang menghubungkan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dengan negara tetangga serta simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, c) pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya, d) simpul utama kegiatan ekpor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, e) pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan/atau f) simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;<br>▪ Pelabuhan Sabang yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas Sabang merupakan prasarana pendukung terkait fungsi PKSN/PKW Sabang.<br>▪ Pelabuhan Balohan di Kota Sabang ditetapkan dalam rencana dengan fungsi sebagai pelabuhan utama yang melayani angkutan penyeberangan internasional dan dalam negeri provinsi.<br>▪ PKL Jantho, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai a) pusat kegiatan industri dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan/atau b) simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. |
| **Pesisir Timur** | | | | |
| 2. | **WP Timur 1** (Langsa-Kuala Simpang-IdieRayeuk) | ▪ PKW Langsa<br>▪ PKL Kuala Simpang-Karang Baru<br>▪ PKL Idi Rayeuk | Perkebunan, pertanian, industri, jasa, perikanan, pertambangan | ▪ PKW Langsa, diarah sebagai kawasan perkotaan sedang yang berpotensi sebagai: a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.<br>▪ PKL Kuala Simpang-Karang Baru, diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berfungsi/berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan/atau sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.<br>▪ PKL Idi Rayeuk, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Disamping sebagai sentra pengembangan industri perikanan tangkap dengan pelabuhan perikanan nusantaranya. |
| 3. | **WP Timur 2** (Lhokseumawe-Bireuen-LhokSukon) | ▪ PKN Lhokseumawe<br>▪ PKL LhokSukon<br>▪ PKW Bireuen | Pertanian, perkebunan, industri, perikanan, agro industri, petrokimia, , perdagangan, pertambangan | ▪ PKN Lhokseumawe, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai a) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, b) pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional, c) simpul utama transportasi skala nasional.<br>▪ KEK Arun Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dengan fokus pada beberapa sektor yaitu industri, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, industri serta industri penghasil kertas kraft. Dari sektor industri (minyak dan gas) akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG Hub/ Trading, LPG Hub/ Trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *cleanenergy*solutionprovider. Infrastruktur industri juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional.<br>▪ Selain itu, KEK Arun Lhokseumawe berpotensi menjadi salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif dan memungkinkan menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri dan lain-lain.<br>▪ PKL Lhoksukon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.<br>▪ PKW Bireuen, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berpotensi sebagai: a) simpul kedua |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKL Matang Geulumpang Dua ibukota Kecamatan Peusangan merupakan pusat kegiatan pendukung dari PKW Bandar Bireuen sebagai pengembangan dengan fungsi utama dalam bidang pendidikan, perdagangan, perindustrian, simpul transportasi bagian timur, pertanian lahan basah, perikanan, pertahanan keamanan, pertambangan dan pemukiman dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). |
| 4. | **WP Timur 3** (Sigli-Meureudu) | ▪ PKL Sigli<br>▪ PKL Meureudu | Pertanian, perkebunan, industri, perikanan, pertambangan | • PKL Sigli, diarahkan sebagai diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan<br>• PKL Meureudu, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan |
| **Pegunungan Tengah** | | | | |
| 5. | **WP Tengah 1** (Takengon-Sp. Redelong) | ▪ PKW Takengon<br>▪ PKL Sp. Tiga Redelong | Perkebunan, pariwisata, perikanan | • PKW Takengon diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berpotensi sebagai a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.<br>• Selain sebagai sentra kopi, PKW Takengon juga diharapkan dapat menjadi sentra produksi sayur-sayuran dan perikanan darat.<br>• PKL Simpang Tiga Redelong diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.<br>• Selain itu, PKL Simpang Tiga Redelong diharapkan dapat menjadi sentra produksi sayur sayuran untuk wilayah Aceh. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | **WP Tengah 2** (Kutacane-Blangkejeren) | ▪ PKL Kutacane<br>▪ PKL Blangkejeren | Perkebunan, pariwisata, pertanian | ▪ PKL Kutacane diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dengan kawasan ekosistem Leuser yang dimiliki PKL Kotacanememiliki potensi wisata alam yang sangat potensial dan sentra produksi perkebunan.<br>▪ PKL Blangkejeren diarahkan sebagai kawasan kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. |
| **Pesisir Barat** | | | | |
| 7. | **WP Barat 1** (Meulaboh-Calang-Suka Makmue) | ▪ PKW Meulaboh<br>▪ PKL Calang<br>▪ PKL Jeuram-Suka Makmue | Perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan | ▪ PKW Meulaboh diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berfungsi sebagai a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.<br>▪ PKL Calang diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.<br>▪ PKL Jeuram-Suka Makmue diarah sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. |
| 8. | **WP Barat 2** (Tapaktuan-Blangpidie) | ▪ PKL Tapaktuan<br>▪ PKWp Blangpidie | Perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata | ▪ PKL Tapaktuan diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.<br>▪ PKW Blangpidie diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. |
| 9. | **WP Barat 3** (Subulussalam-Singkil) | ▪ PKWp Subulussalam<br>▪ PKL Singkil | Perkebunan, perikanan, pariwisata | ▪ PKW Subulussalam, diarahkan sebagai kawasan perkotaan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai a) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.<br>▪ PKL Singkil, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. |
| 10. | **WP Barat 4** (Sinabang) | ▪ PKL Sinabang | Perkebunan, perikanan, pariwisata | ▪ PKL Sinabang, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. |

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013 – 2033*

Dalam rangka mendorong efektivitas pengembangan wilayah di WP dan antar WP Aceh, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pengembangan masing-masing kawasan sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 5.6 berikut.

**Tabel 5.6**
**Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Wilayah Pengembangan Aceh Tahun 2024**

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| **Infrastruktur Jalan** | | |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| 1. Pengembangan Jaringan Jalan dan Penanganan Jalan sebagai penghubungan antara pusat-pusat kegiatan, baik antar PKN, PKN ke PKL maupun antar kawasan strategis nasional dan provinsi | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ **Pembangunan Jalan** yang terdiri dari Lanjutan Pembebasan Tanah Terusan T. Nyak Makam - Elak II, Lanjutan Pembebasan Tanah Terusan Mr. Mohd. Hasan, Pembangunan Jalan Trienggadeng - Batas Bireuen, Pembangunan Jalan Bts. Pidie Jaya – Samalanga, Pembangunan Jalan Lingkar Kota Langsa, Pembangunan Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jalan Nasrehe - Lewak – Sibigo |
| | WP Basajan, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4WP Timur 1, WP Timur 3, WP Tengah 1, WP Tengah 2 | ▪ **Peningkatan Jalan** yang terdiri dari Peningkatan Jalan Sp. Tujuh - Sp. Limpok, Peningkatan Jalan Jantho - Bts. Aceh Jaya, Peningkatan Jalan Batas Kota Banda Aceh - Sp. Lam Ateuk, Peningkatan Jalan Keutapang Dua - Mata Ie, Peningkatan Jalan Blang Bintang - Krueng Raya, Peningkatan Jalan Peukan Pidie - Jabal Ghafur - Ujung Rimba - Bili Aron Kab. Pidie, Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues, Peningkatan Jalan Bts. Aceh Timur - Kota Karang Baru, Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong - Pondok Baru - Samar Kilang, Peningkatan Jalan Bts. Bener Meriah - Sp. Kebayakan, Peningkatan Jalan Takengon – Bintang, Peningkatan Jalan Bts. Aceh Timur - Pining – Blangkejeren, Peningkatan Jalan Blangkejeren - Tongra - Bts. Aceh Barat Daya, Peningkatan Jalan Sp. Lawe Deski - Muara Situlen - Bts. Kota |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | Subulussalam, Peningkatan Jalan Sp. Lawe Deski - Muara Situlen - Bts. Kota Subulussalam, Peningkatan Jalan Pribue - Kuala Bhee - Suak Timah, Peningkatan Jalan Batas Pidie – Meulaboh, Peningkatan Jalan BabahRoet - Bts. Gayo Lues, Peningkatan Jalan Batas Aceh Tenggara – Gelombang, Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti, Peningkatan Jalan Pulau Balai - Pulau Ujung Batu, Peningkatan Jalan Pulau Ujung Batu - Teluk Nibung, Peningkatan Jalan Sinabang – Sibigo, |
| | WP Basajan | ▪ **Pelebaran Jalan** yang terdiri dari Pelebaran Jalan Lingkar Darussalam yang merupakan kawasan strategis provinsi untuk sektor pendidikan |
| | WP Basajan, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4, WP Timur 1, WP Timur 3, WP Tengah 1, WP Tengah 2, | ▪ **Pembangunan Jembatan** yang terdiri dari Pembangunan Jembatan KruengCumcum III Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan Krueng Tuah Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan KeumTharek Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan Blang Rheu Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan Leupu Ruas Jalan Sp. Turu Lutung – Geumpang, Pembangunan Jembatan Cerucuk Ruas Jalan Sigli - Kembang Tanjong - Teupin Raya, Pembangunan Jembatan Meunasah Mee Ruas Jalan TriengGadeng - Batas |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | Bireuen, Pembangunan Jembatan Krueng Kiran Ruas Jalan TriengGadeng - Batas Bireuen, Pembangunan Jembatan Alur Drein Jalan Lingkar Utara Kota Langsa, Pembangunan Jembatan Alur Hitam I Jalan Lingkar Utara Kota Langsa, Pembangunan Jembatan Alur Tanjung I Jalan Lingkar Utara Kota Langsa, Pembangunan Jembatan Alur Jambu I Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, Pembangunan Jembatan Alur Jambu II Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, Pembangunan Jembatan Gp. Serba I Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, Pembangunan Jembatan Samarkilang Ruas Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang, Pembangunan Jembatan Pregent Alur Hitam Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Kampung Tengah Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Kampung Tengah Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Dusun Mas Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Gantung Arul Putih - Serempingen Kec. Silih Nara / Ketol Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Gantung AntusKp. Pameu Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Gantung |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | Pelipen Gajah Kp. Waq Kec. Linge Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Gantung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Pintu Rime Ruas Jalan Bts. Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Pembangunan Jembatan Uring Ruas Jalan Bts. Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Pembangunan Jembatan Pining III Ruas Jalan Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya, Pembangunan Jembatan Gajah Geujuet Ruas Jalan Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya, Pembangunan Jembatan Gantung Seurandek - Tanoh Mirah Kec. Woyla Timur - Sungai Mas Kab. Aceh Barat, Pembangunan Jembatan Gantung Kabel Baro - Sipot Kec. Woyla Timur - Sungai Mas Kab. Aceh Barat, Pembangunan Jembatan Gantung Pulo Teungoh - Dsn. Sengkadeh Kec. PanteCeureumen Kab. Aceh Barat, Pembangunan Jembatan Suak Leubee Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Bulu Seuma III Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Buluh Seuma IV Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Buluh Seuma V Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Siboyok Ruas Jalan Trumon - Bts. Singkil, Pembangunan Jembatan Mandilan Ruas Jalan Bts. Aceh Selatan - Rundeng –Subulussalam, Pembangunan |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | Jembatan Kilangan, Pembangunan Jembatan Luan Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lewak-Sibigo, Pembangunan Jembatan Suak Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lewak-Sibigo |
| | WP Basajan, WP Timur 2, WP Barat Barat 2, WP Barat 3, | ▪ **Pemeliharaan Berkala** yang terdiri dari Pemeliharaan Berkala Jalan AneukLaot – Balohan, Pemeliharaan Berkala Jalan Ir. M. Thaher Kota Banda Aceh, Pemeliharaan Berkala Jalan Krueng Raya - Batas Pidie, Pemeliharan Berkala Jalan Sp. Bili Aron - Teupin Raya, Pemeliharaan Berkala Jalan Samudera, Pemeliharaan Berkala Jalan Lhoksukon-Cot Girek, Pemeliharaan Berkala Jalan KruengGeukueh - Bts. Bener Meriah, Pemeliharaan Berkala Jalan Cunda – Lhoseumawe, Pemeliharaan Berkala Jalan Kuala Tuha – Lamie, Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Kapur – Trumon, Pemeliharaan Berkala Jalan Trumon - Pulo Paya, Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Selatan – Rundeng, Pemeliharaan Berkala Subulussalam-Rundeng |
| **Infrastruktur Perhubungan** | | |
| 1. Pengembangan terminal regional tipe B | WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3 | ▪ Pengembangan terminal type B Bireuen sebagai CentralBussinesPoint<br>▪ Pengadaan alat CCTV + Monitor Terminal Type B Provinsi Aceh<br>▪ Revitalisasi Terminal Type B Aceh Barat Daya<br>▪ Revitalisasi Terminal Type B Subulussalam<br>▪ Revitalisasi Terminal Type B Tamiang |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Revitalisasi Terminal Type B Pidie Jaya<br>▪ Pengadaan lampu penerangan jalan pada terminal tipe b provinsi aceh (Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdya, Subulussalam, Singkil dan Bireuen) |
| 2. Pengembangan angkutan massal perkotaan | WP Basajan | ▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Bus Trans Koetaradja Koridor 1<br>▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja Koridor 2<br>▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja Koridor 3<br>▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Bus Trans Koetaradja Koridor 5<br>▪ Pengadaan Sarana Angkutan Massal (Bus Sedang 17 Unit)<br>▪ Pengadaan Bus Pelajar dan Mahasiswa Bersarana AC dan Internet (Wi-Fi) Rute Jantho - Seulimeum – Lambaro<br>▪ Rehab Halte Transkoetaradja Koridor 2 |
| 3. Pengembangan Pelabuhan dan Pengembangan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan | WP Basajan, WP barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4, | ▪ Pembangunan prasarana sisi darat pelabuhan penyeberangan Sinabang<br>▪ Penanganan Darurat Fasilitas Sandar di Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak<br>▪ Pengadaan Dan Pemasangan Lampu LED Jalan Akses Dan Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Kota Banda Aceh<br>▪ Pembangunan Kontruksi Pengaman Pelabuhan Penyeberangan Singkil Tahap II<br>▪ Pembangunan Kapal Penyeberangan Lintas Balohan – Sabang<br>▪ Pembangunan Kapal Penyeberangan Lintas Simeulue - Pantai Barat |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Rehab Breakwater di Alur Pelayaran Lintasan UleeLheue – Balohan<br>▪ Pembangunan SBNP 2 lokasi di perairan Aceh<br>▪ RDTR Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai kawasan industri dan pelabuhan laut Aceh |
| 4. Pengembangan jaringan jalur kereta api | WP Basajan | ▪ Studi Kelayakan Kereta Api Banda Aceh |
| 5. Pengembangan Bandara | WP Basajan | ▪ Pengadaan dan pemasangan Genset di Gedung VIP Pemerintah Aceh Bandara Sultan Iskandar Muda<br>▪ Pengadaan VCP untuk pengawasan Bandara/Air Strip di Aceh<br>▪ Pemeliharaan Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda<br>▪ Penyusunan RDTR Kawasan Blang Bintang dan sekitarnya sebagai kawasan bandara internasional |
| 6. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ Pengadaan rambu-Rambu Lalu Lintas<br>▪ Pengadaan Marka Jalan<br>▪ Pengadaan Pagar Pengaman Jalan<br>▪ Pengadaan Delineator<br>▪ Pengadaan Traffic Light<br>▪ Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas Jalan<br>▪ Pengadaan Cermin Tikungan<br>▪ Pengadaan lampu penerangan jalan pada daerah rawan kecelakaan |
| **Infrastruktur Energi dan Kelistrikan** | | |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| 1. Pengembangan jaringan energi | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik<br>▪ Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana<br>▪ Survey Energi Baru Terbarukan<br>▪ Revitalisasi PLTMH<br>▪ Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan<br>▪ Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) |
| **Infrastruktur Sumber Daya Air** | | |
| 1. Pengembangan Jaringan Irigasi | WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 4 | ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. CuboTrienggadeng Kab. Pidie Jaya<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. UleeGlee Kab. Pidie Jaya<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Samalanga Kab. Bireuen/Pidie Jaya<br>▪ Peningkatan Saluran Suplesi D.I. Nalan Kab. Bireuen<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kiri Kab. Bireuen<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kanan Kab. Bireuen<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Peudada Kab. Bireuen<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pandrah Kab. Bireuen<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. JamboReuhat Kab. Aceh Timur<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Peunaron Kab. Aceh Timur |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mbang Kab. Aceh Utara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. PanteKuyun Kab. Aceh Jaya<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Keteungga Kab. Aceh Timur/Langsa/Aceh Tamiang<br>▪ Peningakatan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lambesoi Kab. Aceh Jaya<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tanoh Ano Kab. Aceh Jaya<br>▪ Normalisasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara<br>▪ Normalisasi saluran pembuang D.I Krueng Tuan Kab. Aceh Utara<br>▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lhok Naga Kab. Pidie<br>▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureuteut Kab. Bireuen<br>▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Sigulai Kab. Simeulue<br>▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Mon SeukePulot Kab. Bireuen<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. UleeGle Kab. Pidie Jaya<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Samalanga Kab. Bireuen<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Peudada Kab. Bireuen<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kiri Kab. Bireuen<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kanan Kab. Bireuen<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mbang Kab. Aceh Utara<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JamboReuhat Kab. Aceh Timur<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Peunaron Kab. Aceh Timur<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Keutengga Kab. Aceh Timur/Langsa/Aceh Tamiang<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WeihTilis Kab. Gayo Lues<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PanteKuyun Kab. Aceh Jaya<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. ManggengKabupatan Aceh Barat Daya<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Dalem Kabupatan Aceh Selatan<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pandrah Kab. Bireuen<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambesoi Kab. Aceh Jaya<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara<br>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara<br>▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara |
| 2. Pengembangan Pengendalian Banjir | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 4, WP Barat 1, WP Barat 2 | ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Lhoong Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Ligan Kab. Aceh Jaya<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Caleh Kab. Aceh Jaya<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Jeunieb Kab. Bireuen<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Peusangan Kab. Bireuen<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Leubeu Kab. Bireuen<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Meuh Kab. Bireuen<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Peuto Kab. Aceh Utara<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Mane Kab. Aceh Utara<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Cangkoi Kab. Aceh Utara<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh Tamiang<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Baru Kab. Aceh Barat Daya<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Kluet Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Meukek Kab. Aceh Selatan |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Bakongan Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Samadua Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Keumumu, Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Sawang Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Trumon Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Alue Paku Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Sarap Gp. Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Teunom Kab. Aceh Jaya<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Lamno Kab. Aceh Jaya<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Pandrah Kab. Bireuen<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Peudada Kab. Bireuen<br>▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Buloh Kab. Aceh Utara |
| 3. Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | WP Timur 2, WP Timur 3 | ▪ Peningkatan Embung Paya Seupat Kab. Pidie Jaya<br>▪ Peningkatan Embung Paya Reulet Kab. Pidie Jaya<br>▪ Peningkatan Embung Paya Punjeuet Kab. Aceh Utara<br>▪ Peningkatan Embung Meudang Ara Kab. Aceh Utara |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | ▪ Normalisasi Embung Paya Nie Kab. Bireuen |
| **Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan** | | |
| 1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 6.000 unit tersebar di seluruh wilayah Aceh |
| **Infrastruktur Perikanan** | | |
| 1. Pengembangan budidaya perikanan | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ Pengembangan bibit ikan unggul di Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue.<br>▪ Pengembangan perbenihan perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana UPT Daerah Balai Benih Air Tawar di Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Bener Meriah, Kab. Bireuen, Kab. Simeulue, Kab.Aceh Besar, Kota Subulusslam.<br>▪ Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar di Kota Jantho (Kab. Aceh Besar).<br>▪ Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau di Kluet Selatan dan Pasi Raja (Kab. Aceh Selatan). |
| 2. Pengembangan perikanan tangkap | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP | ▪ Pembangunan tempat pelelangan ikan di Kab. Simeulue, Kab. Aceh Singkil, KruengSabee (Kab. Aceh Jaya). |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ Pembangunan pangkalan pendaratan ikan di Labuhan Hj. Timur, Meukek, Tapaktuan (Kab. Aceh Selatan), Idi Timur, Simpang Ulim (Kab. Aceh Timur), Batee, Pidie, Simpang Tiga (Kab. Pidie).<br>▪ Pengembangan pelabuhan perikanan di Kuala Pesisir (Kab. Nagan Raya), Jangka (Kab. Bireuen), Muara Batu (Kab. Aceh Utara), Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Selatan. |
| **Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan** | | |
| 1. Pengembangan destinasi pariwisata | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ Pengembangan objek pariwisata unggulan di Sukakarya (Kota Sabang), Kota Jantho, Lhokgha, Pulau Aceh (Kab. Aceh Besar), Meuraxa (Kota Banda Aceh), Penanggalan (Kota Subulussalam).<br>▪ Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Blang Kejeren, Putri Betung, Tripe Jaya (Kab. Gayo Lues), Tapaktuan (Kab. Aceh Selatan), Meuraxa (Kota Banda Aceh), Ketambe (Kab. Aceh Tenggara), Kota Baharu, Pulau Banyak (Kab. Aceh Singkil), Kota Langsa, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bener Meriah, Kab. Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kab. Pidie, Kota Sabang, Kab. Simeulue.<br>▪ Peningkatan daerah tujuan wisata melalui pembangunan titik nol Kota |

| Rencana Pengembangan | Wilayah Pengembangan | Arahan Pengembangan |
|---|---|---|
| | | Banda Aceh di Kuta Raja (Kota Banda Aceh). |
| 2. Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 | ▪ Pengembangan sarana dan prasarana museum Tsunami di Kota Banda Aceh.<br>▪ Pengembangan sarana dan prasarana Taman Ratu Safiatudin di Kota Banda Aceh.<br>▪ Pengembangan sarana dan prasarana Taman Budaya di Kota Banda Aceh.<br>▪ Pengelolaan, pemugaran situs sejarah dan cagar budaya di Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Biruen, Kab. Bener Meriah dan wilayah lain di Aceh. |
| **Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika** | | |
| 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika | WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 4 | ▪ Pengadaan alat jaringan komunikasi di Kota Lhokseumawe, Kab. Bener Meriah, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Barat.<br>▪ Pengadaan perangkat keras pengelolaan sistem informasi manajemen daerah terintegrasi di Kab. Aceh Tenggara dan Kota Banda Aceh.<br>▪ Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda di Kota Banda Aceh. |

**Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013 - 2033**

PEMERINTAH ACEH

# BAB VI
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

**Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024**

# BAB VI
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah yang dirumuskan melalui konsep THIS (tematik, holistik, integrative dan spasial. Pendekatan tematik-holistik mengutamakan kegiatan kegiatan yang mendukung prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh K/L dan antar SKPD di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Disamping itu, pendekatan integrative-spasial mengarah pada pengintegrasian program/kegiatan/sub kegiatan dan pertimbangan dimensi ruang antar SKPD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

## 6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun 2024

Mengingat tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, maka dalam Rencana Kerja dan Pendanaan RKP tahun 2024 penekanan dalam penentuan kegiatan/proyek memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian *mayor project* dan proyek proyek yang bersifat strategis lainnya yang sejalan dengan tema dan arah kebijakan serta mendukung 14 *highlight* mayor project RKP tahun 2024 ;
2. Proyek prioritas yang mempunyai dampak dan daya ungkit langsung;
3. Penyelesaian target RPJMN Tahun 2020-2024;
4. Kegiatan pentingg tahun 2024 (Pemilu dan IKN).

Adapun 14 (empat belas) *highlight mayor project* di RKP tahun 2024 meliputi :

1. Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
2. Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM;
3. Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
4. Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas;
5. Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
6. Major Project di Wilayah Papua; Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
7. Major Project Pembangunan Ibu Kota Negara;
8. Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
9. Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
10. Major Project Reformasi Pendidikan Keterampilan;
11. Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
12. Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
13. Major Project Transformasi Digital;

14. Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B300.

Sesuai dengan Pasal 258 Ayat 3 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional maka kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmoninasi antara pusat dan daerah dalam bentuk koordinasi teknis pembangunan. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKP tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerahmelaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS). Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan RAKORTEKRENBANGNAS adalah kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk pencapaian target pembangunan nasional dan sebagai bahan penyempurnaan RKPD. Berdasarkan hasil pembahasan Desk Kewilayahan Aceh pada RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 07 Maret 2023, dari 20 (dua puluh) usulan kegiatan/proyek prioritas Aceh terdapat 4 (empat) usulan yang diakomodir, 9 (sembilan) dibahas lebih lanjut pada Musrenbangnas tahun 2023 dan 7 (tujuh) usulan tidak terbahas mengingat waktu pembahasan yang sangat terbatas. Lebih detail mengenai hasil desk kewilayahan Aceh pada RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1**

**Hasil Desk Kewilayahan Aceh pada RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2023**

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional | 5 | Paket | 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN | Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Tengah, Kab. Biruen dan Kota Langsa | Data dukung lengkap | Diarahkan ke DAK Fisik 2024 dan daerah harus memastikan kesiapan tenaga kesehatan dan alkes | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |
| 2 | Dermaga Tambat PPS Kutaraja | 400 | Meter | 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Kota Banda Aceh | Data dukung lengkap, Lahan tersedia | Diarahkan ke DAK Fisik 2024, Hal yang paling urgent diperlukan PPS Kutaraja adalah pengerukan kolam pelabuhan (tapi belum diusulkan) | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |
| 3 | Pengadaan Cool Storage Udang | 2 | Unit | 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Timur | Lahan dan DED tersedia | Kegiatan prioritas KKP 2024 hanya pengadaan cool storage portable kapasitas 5 s.d 50 Ton | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Pengembangan Kawasan Padi | 54250 | Hektar | 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN | Provinsi Aceh, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Tamiang | Perda/Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang LP2B | Volume mengacu pada hasil kesepakatan Rakortek Kementan | H | | | Diakomodir |
| 5 | Pengembangan Kawasan Jagung | 16500 | Ha | 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN | Provinsi Aceh | Lahan | Perlu penyesuaian volume dengan hasil kesepakatan Rakortek Kementan | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |
| 6 | Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian | 337 | Unit | 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN | Provinsi Aceh | | Menyesuaikan dengan hasil kesepakatan Rakortek Kementan | H | | | Diakomodir |
| 7 | Duplikasi Jembatan Kr. Baro (01.003.023.0.11) | 42,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Pidie | DED : Ada/2012 Dokling : Ada/2019 | Lahan harus diselesaikan, Reviu DED (2012) | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |
| 8 | Duplikasi Jembatan Kr. Jreu (01.002.015.0) | 172,4 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Besar | DED : Ada/2017 Dokling : Ada/2019 | Lahan selessai (2023) dan merupakan kegiatan wajib konreg | H | | | Diakomodir |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh | 1 | Unit | 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kota Banda Aceh | SID : Ada/2020<br>Dokling : Ada/2021<br>Lahan : Siap | Kewenangan provinsi, Diarahkan ke DAK Fisik 2024 | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |
| 10 | Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh (Desa Kampung Pasir) di Kab. Aceh Barat | 0,5 | Km | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Barat | DED : Siap / 2017<br>Dokling : Siap / 2019<br>Tanah : Siap | Telah diusulkan 2024 melalui SBSN | H | | | Diakomodir |
| 11 | Pengerukan Kolam Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa | 1 | Unit | 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kota Langsa | SID dan DED sudah tersedia (Kemenhub) | Tidak dapat diintervensi karena kewenangan PT. Pelindo, tapi SID dan DED sudah disiapkan oleh pusat | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |
| 12 | Pembangunan Rumah melalui mekanisme Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | 25000 | Unit | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Provinsi Aceh | | Usulan diinput kedalam Aplikasi SIBARU | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Pengendalian Banjir Krueng Singkil Kab. Aceh Singkil | 2 | Km | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Singkil | DED : Siap / 2014<br>Dokling : Siap / 2017<br>Tanah : Siap / 2014 | Kegiatan merupakan lanjutan 2023 | | K | | Dibahas Lebih Lanjut pada Musrenbangnas 2023 |
| 14 | Penggantian Jembatan Kr. Peudawa Rayeuk (01.010.038.0.2) | 53,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Timur | DED : Ada/2012<br>Dokling : Ada/2019 | | | | M | Tidak Terbahas |
| 15 | Penggantian Jembatan A. Asam Kumbang (01.009.043.0.4) | 40,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Utara | DED : Ada/2012<br>Dokling : Ada/2019 | | | | M | Tidak Terbahas |
| 16 | Penggantian Jembatan Kr. Pandrah (01.006.012.0) | 33,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Bireuen | DED : Ada/2012<br>Dokling : Ada/2019 | | | | M | Tidak Terbahas |
| 17 | Penggantian Jembatan Paya Mamplam (01.005.007.0.1) | 33,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Bireuen | DED : Ada/2012<br>Dokling : Ada/2019 | | | | M | Tidak Terbahas |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Pengendalian Banjir Krueng Meureubo Aceh Barat | 1 | Paket | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Barat | | | | | M | Tidak Terbahas |
| 19 | Pembangunan Breakwater Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Kab. Aceh Barat | 1 | Unit | 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kab. Aceh Barat | DED : Ada/2018 | | | | M | Tidak Terbahas |
| 20 | Pembangunan Rumah Susun (Ponpes, TNI , POLRI, Universitas, MBR/kebutuhan Khusus | 8 | Unit | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Provinsi Aceh | | | | | M | Tidak Terbahas |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan RAKORTEKRENBANG Nasional 2023

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2024, melalui Kementerian PPN/Bappenas RI dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional tahun 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pelaksanaan Musrenbang Nasional tahun 2023 bertujuan menyempurnakan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 menjadi Peraturan Menteri (Permen) tentang Rancangan RKP tahun 2024, mengintegrasikan dan menyempurnakan Rancangan Renja K/L Tahun 2024 melalui penyelarasan program/kegiatan, indikator serta lokasi program/kegiatan yang disusun oleh K/L dan pemerintah daerah sesuai dengan sasaran 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dan menyediakan arahan bagi penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Tahun 2023 diketahui terdapat 18 (delapan belas) usulan program/kegiatan yang diakomodir untuk didanai oleh APBN Tahun 2024. Lebih jelas mengenai hasil pembahasan desk Musrenbang Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut.

**Tabel 6.2**

**Hasil Pembahasan Desk Aceh pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023**

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional | 5 | Paket | 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN | Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Tengah, Kab. Biruen dan Kota Langsa | Data dukung lengkap | DAK masih dalam tahap pembahasan di Bappenas | H | | |
| 2 | Dermaga Tambat PPS Kutaraja | 400 | Meter | 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Kota Banda Aceh | Data dukung lengkap, Lahan tersedia | Perlu asistensi dengan Kementerian KP | | | M |
| 3 | Pengadaan Cool Storage Udang | 2 | Unit | 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Timur | Lahan dan DED tersedia | Kegiatan prioritas KKP 2024 hanya pengadaan cool storage portable | H | | |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | kapasitas 5 s.d 50 Ton | | | |
| 4 | Pengembangan Kawasan Padi | 54250 | Hektar | 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN | Provinsi Aceh, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Tamiang | Perda/Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang LP2B | Volume mengacu pada hasil kesepakatan Rakortek Kementan | H | | |
| 5 | Pengembangan Kawasan Jagung | 16500 | Ha | 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN | Provinsi Aceh | Lahan | Perlu penyesuaian volume dengan hasil kesepakatan Rakortek Kementan | H | | |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian | 337 | Unit | 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN | Provinsi Aceh | | Menyesuaikan dengan hasil kesepakatan Rakortek Kementan | H | | |
| 7 | Duplikasi Jembatan Kr. Baro (01.003.023.0.11) | 42,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Pidie | DED : Ada/2012 Dokling : Ada/2019 | Lahan belum bebas | | | M |
| 8 | Duplikasi Jembatan Kr. Jreu (01.002.015.0) | 172,4 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Besar | DED : Ada/2017 Dokling : Ada/2019 | Lahan selessai (2023) dan merupakan kegiatan wajib konreg | H | | |
| 9 | Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh | 1 | Unit | 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kota Banda Aceh | SID : Ada/2020 Dokling : Ada/2021 Lahan : Siap | Aset milik Pemda, Belum ada rencana untuk pembangunan dermaga | | | M |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh (Desa Kampung Pasir) di Kab. Aceh Barat | 0,5 | Km | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Barat | DED : Siap / 2017<br>Dokling : Siap / 2019<br>Tanah : Siap | Telah diusulkan 2024 melalui SBSN | H | | |
| 11 | Pengerukan Kolam Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa | 1 | Unit | 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kota Langsa | SID (2021) dan DED sudah tersedia (Kemenhub) | Studi SID harus diserahkan dari Kemenhub ke Pelindo | H | | |
| 12 | Pembangunan Rumah melalui mekanisme Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | 25000 | Unit | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Provinsi Aceh | | Butuh direktif presiden | | | M |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Pengendalian Banjir Krueng Singkil Kab. Aceh Singkil | 2 | Km | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Singkil | DED : Siap / 2014<br>Dokling : Siap / 2017<br>Tanah : Siap / 2014 | Sudah direncanakan untuk tahun 2024 | H | | |
| 14 | Penggantian Jembatan Kr. Peudawa Rayeuk (01.010.038.0.2) | 53,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Timur | DED : Ada/2012<br>Dokling : Ada/2019 | Menunggu pendanaan untuk duplikasi jembatan | H | | |
| 15 | Penggantian Jembatan A. Asam Kumbang (01.009.043.0.4) | 40,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Utara | DED : Ada/2012<br>Dokling : Ada/2019 | Menunggu pendanaan untuk duplikasi jembatan | H | | |
| 16 | Penggantian Jembatan Kr. Pandrah (01.006.012.0) | 33,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Bireuen | DED : Ada/2012<br>Dokling : Ada/2019 | Menunggu pendanaan untuk duplikasi jembatan | H | | |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Penggantian Jembatan Paya Mamplam (01.005.007.0.1) | 33,6 | Meter | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Bireuen | DED : Ada/2012 Dokling : Ada/2019 | Menunggu pendanaan untuk duplikasi jembatan | H | | |
| 18 | Pengendalian Banjir Krueng Meureubo Aceh Barat | 1 | Paket | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Barat | SID/2024 | RC belum lengkap | | | M |
| 19 | Pembangunan Breakwater Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Kab. Aceh Barat | 1 | Unit | 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kab. Aceh Barat | DED : Ada/2018, Izin lingkungan/2020 | Aset milik Pemda dan Pagu indikatif Kemenhub belum tersedia | | | M |
| 20 | Pembangunan Rumah Susun (Ponpes, TNI , POLRI, Universitas, | 8 | Unit | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Provinsi Aceh | | Butuh direktif presiden | | | M |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | MBR/kebutuhan Khusus | | | | | | | | | |
| 21 | Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Banda Aceh - Aceh Besar (SPAM Regional Banda Aceh - Aceh Besar) | 1 | Paket | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Besar | DED 2015, Dokling 2016, Pembebasan Lahan 2023 | Pembiayaan dilakukan dengan blended finance | H | | |
| 22 | Pembangunan jaringan irigasi di. Alue Ubay (irigasi premium, sumber air dari bendungan Keureuto), Kab. Aceh Utara | 4.144 | Ha | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Utara | DED (2017), Dokling (2018), Lahan (2023) | Pembebasan lahan dapat diselesaikan 2023 | H | | |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Pembangunan Factory Sharing Nilam | 1 | Paket | 044 - KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM | Kab. Aceh Besar | | Sudah masuk dalam renja K/L | H | | |
| 24 | Pembangunan Embung Air Baku Krueng Raya | 63,8 | Km | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Besar | DED (2013), Model Tes (2014), Larap dan Dokling (2016), Pembebasan Lahan (2022) | Perlu review design embung | | | M |
| 25 | Pembangunan WTP dan kelengkapan bangunan lainnya serta Pipa Transmisi Air Bersih | 1 | Paket | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Besar | RI SPAM dan DED SPAM (2021), FS (2021), Lahan 6 Ha (2023), UPTD SPAM masih dalam proses | Pembiayaan dilakukan dengan *blended finance* | H | | |
| 26 | Operasional Pemilu dan Pemilukada Serentak | 1 | Paket | 010 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Aceh | | Perlunya asistensi dengan Dirjen Polpum dan Keuda | | | M |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | Kemendagri RI | | | |
| 27 | Dukungan Pelaksanaan PON XXI | 1 | Paket | 092 - KEMENTERIANPEMUDA DAN OLAHRAGA | Aceh | | Kepmen PON telah selesai | H | | |
| 28 | Pembangunan Jalan Jantho Keumala (Missing Link) | 38,9 | Km | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Besar dan Kab. Pidie | DED (2014), Larap (2020), Amdal (2020), IPPKH (2019) | Tahun 2024 Kementerian PUPR masih fokus pada Jalan Geumpang Pamue | | | M |
| 29 | Pelebaran dan pembebasan Lahan Jalan Penambah Lajur Batas Banda Aceh - Krung Raya Kab Aceh Besar | 5,08 | Km | 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh | DED (2019) | Fokus pada kemantapan jalan | | | M |

| No | Usulan | Vol | Satuan | K/L | Lokasi | Kesiapan Daerah | Catatan Penting | Status Pembahasan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | H | K | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Pembangunan Break Water Pelabuhan Calang | 1 | Keg | 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kab. Aceh Jaya | | Optimalisasi pelabuhan dimulai tahun 2025 | | | M |

Sumber: Berita Kesepakatan Musrenbang Nasional Tahun 2023

## 6.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun 2024

Lebih detail terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 disajikan pada Tabel 6.3. yang dapat dilihat pada Buku 2 (dua) RKPA Tahun 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran ini.

PEMERINTAH ACEH

# BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

**Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024**

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian capaian strategis yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan dapat dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah maka indikator kinerja mempunyai peranan yang sangat penting. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran dan program/kegiatan. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam periode tertentu, sehingga setiap program dan kegiatan harus mempunyai indikator kinerja yang terukur dan konkrit untuk mengatasi permasalahan, isu strategis dan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi target capaian indikator kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan RPA Tahun 2023-2026.

Selanjutnya berdasarkan Rencana Pemerintah Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan hasil kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian PPN/Bappenas RI dalam Desk Kewilayahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS) Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2023 secara *online* disepakati target indikator makro pembangunan Aceh Tahun 2024 yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Penangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan.

**Tabel 7.1**
**Target Indikator Makro Pembangunan Aceh Tahun 2024**

| No | Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target RPA | Target RKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,21 | 3,75 | 4,34 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 6,17 | 5,36 | 5,36 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Index | 72,80 | 72,78 | 73,26 |
| 4. | Indeks Gini | % | 0,291 | 0,304 | 0,282 |
| 5. | Tingkat Kemiskinan | % | 14,75 | 14,53 | 14,53 |

**Sumber: BPS, 2022; RPA Tahun 2023-2026**

Dari Tabel 7.1 diketahui untuk target indikator makro Aceh tahun 2024 mengalami penyesuaian pada beberapa target indikator jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026. Hal ini disebabkan karena beberapa target indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, dan indeks gini capaian kinerja tahun 2022 sudah diatas target yang ditetapkan. Sementara itu, untuk indikator IPM dan tingkat kemiskinan capaian kinerja tahun 2022 sudah mendekati target tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perhitungan kembali target yang telah ditetapkan dalam RPA Tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPA Tahun 2023-2026. Target capaian IKU Pemerintah Aceh Tahun 2024 secara rinci terdapat pada Tabel 7.2.

**Tabel 7.2**
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2024**

| No. | Bidang Urusan/ Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA PENGAMPU | SUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 64,09 | 66 | Ro. Organ | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/ Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA PENGAMPU | SUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh | Indeks | 80,92 | 74,22 | Kesbang | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3 | Indeks Resiko Bencana Aceh | Indeks | 149,1/ sedang | 143/ Sedang | BPBA | RPA 2023-2026 |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 78,29 | 76,48 | DLHK | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 5 | Rasio Konektivitas Daerah | Rasio | 0,73 | 0,73 | Dishub | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 6 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,37 | 14,52 | Disdik | RPA 2023-2026 |
| 7 | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,76 | 3,4 | Kominsa | RPA 2023-2026 |
| 8 | Opini BPK | WTP/WDP | WTP | WTP | BPKA | RPA 2023-2026 |
| 9 | Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS) | Indeks | 81,84 | 85 | DSI | RPA 2023-2026 |
| 10 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 70,16 | 75,59 | Pangan | RPA 2023-2026 |
| 11 | Nilai LPPD Pemerintah Aceh | Skor | 3,2363/ tinggi | 2,8500/ tinggi | Ro Pemotda | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/ Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA PENGAMPU | SUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak | % | 77,55 | 78,5 | Perkim | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 13 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak | % | 88,79 | 88,2 | Perkim | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 14 | Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap | % | 84,41 | 89,16 | PUPR | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 15 | Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik | % | 60,38 | 56,23 | Pengairan | RPA 2023-2026 |
| 16 | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | % | 68,18 | 76,1 | Dinsos | RPA 2023-2026 |
| 17 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 58,56 | 17,51 | Arpus | RPA 2023-2026 |
| 18 | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp.Miliar | 6.266 (Milliar) | 11,13 | DPMPTSP | RPA 2023-2026 |

Sumber: RPA Tahun 2023-2026 dan Hasil Rakortekrenbangnas Tahun 2023

Sementara itu, penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. IKD meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** merupakan semua indikator yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. IKD yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari: laju inflasi, indeks ketimpangan Williamson, angka usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, indeks gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka melek huruf, persentase prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang, cakupan desa siaga aktif, tingkat pengangguran terbuka dan lain-lain.
2. **Aspek Daya Saing Daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, seperti: distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran per kapita, nilai tukar petani, rasio Ekspor + Impor terhadap PDB, rasio ketergantungan, produktivitas total daerah, dan lain lain.
3. **Aspek Pelayanan Umum** menjelaskan kondisi dan perkembangan tentang urusan layanan wajib dan layanan pilihan yang meliputi berbagai indikator seperti angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran, proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 km/jam), pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan dan lain lain.

Penetapan IKD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.3.

**Tabel 7.3**
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2024**

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | **I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1 | Laju Inflasi | % | 5,89 | 2,5 | Ro Ekonomi/ Indag | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 2 | Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | Indeks | 0,404 | 0,41 | Bappeda | RPA 2023-2026 |
| 3 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 70 | 70,02 | Dinkes | RPA 2023-2026 |
| 4 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 9,44 | 9,82 | Disdik | RPA 2023-2026 |
| 5 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.37 | 14,52 | Disdik | RPA 2023-2026 |
| 6 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 63,5 | 64,55 | Naker | RPA 2023-2026 |
| 7 | Kontribusi sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB | % | 27,1 | 31,23 | Tanbun | RPA 2023-2026 |
| 8 | Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB | % | n/a | 6,15 | Tanbun | RPA 2023-2026 |
| 9 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB | % | n/a | 7,96 | Tanbun | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB | % | 3,17 | 4,3 | ESDM | RPA 2023-2026 |
| 11 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | % | 1,83 | 1,8 | Budpar | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 12 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | % | 4,83 | 5,35 | DKP | RPA 2023-2026 |
| 13 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | 13,87 | 15,06 | Indag | RPA 2023-2026 |
| 14 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 4,59 | 5 | Indag | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 15 | Pertumbuhan Industri | % | 4,19 | 2,5 | Indag | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 16 | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa (Ribu) | 818,47 (september 2022) | 823,52 | Bappeda | RPA 2023-2026 |
| | **II. ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | % | 54,05 | 62,45 | Pangan | RPA 2023-2026 |
| 2 | Pengeluaran Per Kapita | Rp (Ribu) | 9.963 | 9.958 | Bappeda | RPA 2023-2026 |
| 3 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Indeks | 111,25 | 101,49 | Tanbun | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) | Ratio | 4,96 | 3,05 | Indag | RPA 2023-2026 |
| 5 | Rasio ketergantungan | Indeks | 49,19 | 47,6 | Naker | RPA 2023-2026 |
| | **III. ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| | **3.1. LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR** | | | | | |
| **3.1.1.** | **Pendidikan** | | | | **Disdik** | |
| 3.1.1.1 | Persentase Anak usia 16 s.d 18 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan menengah | % | 83,09 | 100 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.2 | Persentase anak usia 4 s,d 18 tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | % | 37,03 | 100 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.3 | Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | % | 83,09 | 100 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.4 | Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | % | 37,03 | 100 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.5 | Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 56,03 | 62,14 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1.6 | Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 48,94 | 52,85 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.7 | Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 53,27 | 59,04 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.8 | Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 47,09 | 50,83 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.9 | Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,96 | 64,87 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.10 | Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 44,51 | 48,24 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.11 | Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 59,6 | 65,76 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.12 | Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 53,29 | 57,55 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.13 | Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 57,27 | 62,86 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1.14 | Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 52,41 | 56,3 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.15 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | % | 80,69 | 84,72 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.16 | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | % | 70,3 | 81,1 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.17 | Indeks Iklim Keamanan SMA | Nilai | 79,81 | 86,59 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.18 | Indeks Iklim Kebinekaan SMA | Nilai | 71,53 | 76,27 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.19 | Indeks Inklusivitas SMA | Nilai | 72,49 | 78,85 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.20 | Indeks Iklim Keamanan SMK | Nilai | 77,22 | 84,04 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.21 | Indeks Iklim Kebinekaan SMK | Nilai | 69,8 | 74,6 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.22 | Indeks Inklusivitas SMK | Nilai | 71,19 | 77,51 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1.23 | Indeks Iklim Keamanan SDLB | Nilai | 84 | 91,02 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.24 | Indeks Iklim Kebinekaan SDLB | Nilai | 88,24 | 93,36 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.25 | Indeks Inklusivitas SDLB | Nilai | 81,22 | 87,74 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.26 | Indeks Iklim Keamanan SMPLB | Nilai | 77,04 | 83,9 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.27 | Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB | Nilai | 73,38 | 77,84 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.28 | Indeks Inklusivitas SMPLB | Nilai | 80,47 | 87,23 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.29 | Indeks Iklim Keamanan SMALB | Nilai | 82,06 | 88,8 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.30 | Indeks Iklim Kebinekaan SMALB | Nilai | 74,15 | 78,51 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.1.1.31 | Indeks Inklusivitas SMALB | Nilai | 86,88 | 93,6 | Disdik | Rakortekrenbangnas 2023 |
| **3.1.2.** | **Kesehatan** | | | | **Dinkes** | |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup | /1000 Kelahiran Hidup | 10 | 9 | Dinkes | RPA 2023-2026 |
| 3.1.2.2 | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | /100.000 Kelahiran Hidup | 141 | 183 | Dinkes | RPA 2023-2026 |
| 3.1.2.3 | Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana | % | 100 | 100 | Dinkes | RPA 2023-2026 |
| 3.1.2.4 | Persentase palayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa | % | 100 | 100 | Dinkes | RPA 2023-2026 |
| 3.1.2.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa | Indeks | 94.72 | 85,7 | RSJ | RPA 2023-2026 |
| 3.1.2.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin | Indeks | 95.00 | 91,77 | RSUZA | RPA 2023-2026 |
| 3.1.2.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak | Indeks | 53.00 | 83,75 | RSIA | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.2.8 | Persentase Balita Stunting | % | 31,2 | 29 | Dinkes | Rakortekrenbangnas 2023 |
| **3.1.3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | **PUPR** | |
| A. | Pekerjaan Umum | | | | PUPR | |
| 3.1.3.1 | Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama | % | 38,21 | 39,81 | Pengairan | RPA 2023-2026 |
| 3.1.3.2 | Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik | % | 82,56 | 72,65 | Pengairan | RPA 2023-2026 |
| B. | Penataan Ruang | | | | PUPR | |
| 3.1.3.3 | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA | % | 98,4 | 80 | PUPR | RPA 2023-2026 |
| **3.1.4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | **PUPR** | |
| 3.1.4.1 | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni | % | n/a | 46,92 | Perkim | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.1.5** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | **Satpol PP** | |
| 3.1.5.1 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 100 | Satpol PP | RPA 2023-2026 |
| 3.1.5.2 | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,55/Sedang | 0,60/Sedang | BPBA | RPA 2023-2026 |
| **3.1.6** | **Sosial** | | | | **Dinsos** | |
| 3.1.6.1 | Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan | % | 48.51 | 100 | Dinsos | RPA 2023-2026 |
| | **3.2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | |
| **3.2.1** | **Naker** | | | | **Naker** | |
| 3.2.1.1 | Persentase penduduk yang bekerja | % | 94 | 98,98 | Naker | RPA 2023-2026 |
| **3.2.2** | **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil** | | | | **DRKA** | |
| 3.2.2.1 | Persentase Cakupan Masyarakat yang terlayani Adminduk | % | 99,5 | 98,4 | DRKA | Rakortekrenbangnas 2023 |
| **3.2.3** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | **DP3A** | |
| 3.2.3.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,24 | 92,98 | DP3A | Rakortekrenbangnas 2023 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.3.2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 63,92 | 66,49 | DP3A | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.2.3.3 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 76,3 | 77,1 | DP3A | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.2.3.4 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 | 100 | DP3A | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.2.3.5 | Persentase perempua n korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 100 | 100 | DP3A | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.2.3.6 | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 79 | 80 | DP3A | Rakortekrenbangnas 2023 |
| **3.2.4** | **Pangan** | | | | **Pangan** | |
| 3.2.4.1 | Ketersediaan energi | kkal/kapita/hari | 3804 | 3833 | Pangan | RPA 2023-2026 |
| 3.2.4.2 | Ketersediaan protein perkapita | gram/kapita/hari | 95,74 | 86,44 | Pangan | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.4.3 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 75,5 | 74,78 | Pangan | Rakortekrenbangnas 2023 |
| **3.2.5** | **Tanah** | | | | **Tanah** | |
| 13.2.5.1 | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 0 | 50 | Tanah | RPA 2023-2026 |
| **3.2.6** | **Lingkungan Hidup** | | | | **DLHK** | |
| 3.2.6.1 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 60,41 | 60,5 | DLHK | RPA 2023-2026 |
| 3.2.6.2 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 90,62 | 88,71 | DLHK | RPA 2023-2026 |
| **3.2.7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | **DPMG** | |
| 3.2.7.1 | Rerata Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks | 0,648 | 0,65 | DPMG | RPA 2023-2026 |
| **3.2.8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | **DP3A** | |
| 3.2.8.1 | Total Fertility Rate (TFR) | Rate | 2,42 | 2,13 | DP3A | RPA 2023-2026 |
| **3.2.9** | **Perhubungan** | | | | **Dishub** | |
| 3.2.9.1 | Rasio ijin trayek | Rasio | 0,747222222 | 1,079166667 | Dishub | RPA 2023-2026 |
| 3.2.9.2 | Persentase layanan angkutan darat | % | 71,43 | 29,4 | Dishub | RPA 2023-2026 |
| 3.2.9.3 | Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi | % | 55,03 | 51,01 | Dishub | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.2.10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | **Kominsa** | |
| 3.2.10.1 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | Indeks | 79,13 | 79,7 | Kominsa | RPA 2023-2026 |
| **3.2.11** | **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah** | | | | **Kop-Ukm** | |
| 3.2.11.1 | Persentase koperasi aktif Lintas Daerah | % | 57 | 64 | Kop-Ukm | RPA 2023-2026 |
| 3.2.11.2 | Usaha Mikro dan Kecil | % | 0,7 | 0,015 | Kop-Ukm | RPA 2023-2026 |
| **3.2.12** | **Penanaman Modal** | | | | **DPMPTSP** | |
| 3.2.12.1 | Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp (Triliun) | 6.266 (Milliar) | 11,13 | DPMPTSP | RPA 2023-2026 |
| **3.2.13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | **Dispora** | |
| 3.2.13.1 | Persentase organisasi pemuda yang dibina | % | 50 | 62 | Dispora | RPA 2023-2026 |
| 3.2.13.2 | Persentase atlet yang berprestasi | % | 60 | 85 | Dispora | RPA 2023-2026 |
| 3.2.13.3 | Persentase gerakan kepramukaan yang aktif | % | 70 | 78 | Dispora | RPA 2023-2026 |
| **3.2.14** | **Statistik** | | | | **Kominsa** | |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.14.1 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 54,54 | 80 | Kominsa | Rakortekrenbangnas 2023 |
| 3.2.14.2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 54,54 | 40 | Kominsa | Rakortekrenbangnas 2023 |
| **3.2.15** | **Persandian** | | | | **Kominsa** | |
| 3.2.15.1 | Keamanan Siber Pemerintah Aceh | % | 94 | 95 | Kominsa | RPA 2023-2026 |
| **3.2.16** | **Kebudayaan** | | | | **Budpar** | |
| 3.2.16.1 | Terlestarikannya cagar budaya | % | 4,9 | 27,94 | Budpar | RPA 2023-2026 |
| 3.2.16.2 | Rasio jumlah pengunjung museum | Rasio Pengunjung/1000 | 0,000178 | 131 | Budpar | RPA 2023-2026 |
| **3.2.17** | **Perpustakaan** | | | | **Arpus** | |
| 3.2.17.1 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Rasio | 0,0007 | 0,0018 | Arpus | RPA 2023-2026 |
| **3.2.18** | **Kearsipan** | | | | **Arpus** | |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.18.1 | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 38,89 | 76 | Arpus | RPA 2023-2026 |
| | **3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | |
| **3.3.1** | **Pariwisata** | | | | **Budpar** | |
| 3.3.1.1 | Kunjungan wisata | Orang | 1.033.855 | 2.652.354 | Budpar | RPA 2023-2026 |
| 3.3.1.2 | Lama kunjungan wisata | Hari | 1,6 | 3 | Budpar | RPA 2023-2026 |
| 3.3.1.3 | Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata | Orang | 10.290 | 108.007 | Budpar | RPA 2023-2026 |
| 3.3.1.4 | Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional | Indeks | 13 | 13 | Budpar | SKPA |
| 3.3.1.5 | Jumlah perjalanan wisata (Wisnus) | Orang | 7.483.957 | 7.859.169 | Budpar | SKPA |
| 3.3.1.6 | Jumlah Perjalananan Wisman | Orang | 1.886 | 21.458 | Budpar | SKPA |
| **3.3.2** | **Pertanian** | | | | **Tanbun** | |
| 3.3.2.1 | Produksi komoditi pangan utama (padi) | Ton | 1.533.138 | 1.729.000 | Tanbun | RPA 2023-2026 |
| 3.3.2.2 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Ton/Ha | 5,55 | 5,65 | Tanbun | RPA 2023-2026 |
| 3.3.2.3 | Produksi sektor perkebunan | Ton | 767.541 | 767.153 | Tanbun | RPA 2023-2026 |
| 3.3.2.4 | Nilai Tukar Peternak (NTPt) | Indeks | 96,83* | 101,07 | Disnak | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3.2.5 | Peningkatan produksi daging ternak besar | Ton | 17.350 | 22.307 | Disnak | RPA 2023-2026 |
| **3.3.3** | **Kehutanan** | | | | **DLHK** | |
| 3.3.3.1 | Indeks kualitas lahan | Indeks | 76,24 | 77,03 | DLHK | RPA 2023-2026 |
| 3.3.3.2 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | 19,48 | 3,2 | DLHK | RPA 2023-2026 |
| 3.3.3.3 | Kerusakan kawasan hutan | % | 0,012 | 0,03 | DLHK | RPA 2023-2026 |
| **3.3.4** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | **ESDM** | |
| 3.3.4.1 | Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik | % | 5,57 | 17,99 | **ESDM** | RPA 2023-2026 |
| **3.3.5** | **Perdagangan** | | | | **Indag** | |
| 3.3.5.1 | Ekspor bersih perdagangan | $ | 481.768.321 | 285.740.605 | Indag | RPA 2023-2026 |
| **3.3.6** | **Perindustrian** | | | | **Indag** | |
| 3.3.6.1 | Pertumbuhan kawasan industri dan SIKIM | KI/Sentra | Mar-14 | 02-Oct | Indag | RPA 2023-2026 |
| **3.3.7** | **Transmigrasi** | | | | **Naker** | |
| 3.3.7.1 | Besaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi | % | 3 (Kawasan) | 35,71 | Naker | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.3.8** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | **DKP** | |
| 3.3.8.1 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | NTN | 111,1 | 103 | DKP | RPA 2023-2026 |
| 3.3.8.2 | Nilai Ekspor Perikanan (USD) | USD | 1.451.755 | 2.256.368,00 | DKP | RPA 2023-2026 |
| 3.3.8.3 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) | NTPi | 103 | 98,04 | DKP | RPA 2023-2026 |
| 3.3.8.4 | Produksi perikanan | Ton | 261.673,26 | 469.668,63 | DKP | RPA 2023-2026 |
| | **3.4. PENUNJANG URUSAN** | | | | | |
| **3.4.1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | **Bappeda** | |
| 13.4.1.1 | Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD | % | 100 | 100 | Bappeda | RPA 2023-2026 |
| 13.4.1.2 | Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD | % | 100 | 100 | Bappeda | RPA 2023-2026 |
| **3.4.2** | **Keuangan** | | | | **BPKA** | |
| 3.4.2.1 | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 13,34 | 5% | BPKA | RPA 2023-2026 |
| 3.4.2.2 | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 21 | 20 | MPA | RPA 2023-2026 |
| 3.4.2.3 | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 12,9 | 10 | BPKA | RPA 2023-2026 |
| 3.4.2.4 | Penetapan APBD tepat waktu | Ya / Tidak | Ya | Ya | BPKA | RPA 2023-2026 |
| 3.4.2.5 | Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM) | % | 38,31 | 10 | Bappeda, BPKA | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.2.6 | Persentase PAA terhadap pendapatan | % | 20,36 | 30 | BPKA | RPA 2023-2026 |
| **3.4.3** | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | **BKA/BPSDM** | |
| 3.4.3.1 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 31,6 | 79,8 | BKA | RPA 2023-2026 |
| 3.4.3.2 | ASN yang mengikuti pendidikan formal | % | 71 | 0,21 | BPSDM | RPA 2023-2026 |
| 3.4.3.3 | ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis | % | 61 | 25,53 | BPSDM | RPA 2023-2026 |
| 3.4.3.4 | Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | % | 60,72 | 61,66 | BPSDM | RPA 2023-2026 |
| **3.4.4** | **Penelitian dan pengembangan** | | | | **Bappeda** | |
| 3.4.4.1 | Penerapan SIDa: | | | | Bappeda | |
| | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | % | 100 | 89 | Bappeda | RPA 2023-2026 |
| 3.4.4.2 | Indeks inovasi daerah Aceh | Indeks | 51,67 | 55 | Bappeda | RPA 2023-2026 |
| **3.4.5** | **Pengawasan** | | | | **Inspektorat** | |
| 3.4.5.1 | Meningkatnya level maturitas SPIP terintegrasi | Level | 3 | 3 | Inspektorat | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.4.6** | **Sekretariat DPRA** | | | | **Setwan** | |
| 3.4.6.1 | Persentase qanun yang ditetapkan | % | 42 | 72 | Setwan | RPA 2023-2026 |
| | **3.5. PENDUKUNG** | | | | | |
| **3.5.1** | **Sekretariat Daerah** | | | | **Setda** | |
| **A** | **Pemerintahan dan Otonomi Daerah** | | | | Ro Pemotda | |
| 3.5.1.1 | Pesentase penyelesaian pemasangan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah | % | 75 | 2,45 | Ro Pemotda | RPA 2023-2026 |
| 3.5.1.2 | Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti | % | n/a | 81 | Ro Pemotda | RPA 2023-2026 |
| **B** | **Ekonomi** | | | | Ro Ekonomi | RPA 2023-2026 |
| 3.5.1.3 | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | % | 43,36 | 38,08 | Ro Ekonomi | RPA 2023-2026 |
| 3.5.1.4 | Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum | Rasio | 92,28 | 91 | Ro Ekonomi | RPA 2023-2026 |
| 3.5.1.5 | Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA) | % | 153,33 | 1,5 | Ro Ekonomi | RPA 2023-2026 |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5.1.6 | Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR | Rasio | 90,47 | 96 | Ro Ekonomi | RPA 2023-2026 |
| **C** | **Organisasi** | | | | Ro Organ | |
| 3.5.1.7 | Nilai SAKIP | Nilai | 64.80 | 66 | Ro Organ | |
| **3.5.2** | **Kesatuan Bangsa** | | | | **Kesbang** | |
| | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | Kesbang | |
| 3.5.2.1 | Skor aspek hak-hak politik | Skor | Data BPS belum keluar | 65,5 | Kesbang | RPA 2023-2026 |
| 3.5.2.2 | Skor aspek lembaga demokrasi | Skor | Data BPS belum keluar | 75,5 | Kesbang | RPA 2023-2026 |
| 3.5.2.3 | Skor aspek kebebasan sipil | Skor | Data BPS belum keluar | 85,1 | Kesbang | RPA 2023-2026 |
| | **3.6. KEISTIMEWAAN ACEH** | | | | | |
| **3.6.1** | **Syariat Islam** | | | | DSI | |
| 3.6.1.1 | Angka melek alquran | % | 82 | 85 | DSI | RPA 2023-2026 |
| **3.6.2** | **Perdamaian Aceh** | | | | BRA | |
| 3.6.2.1 | Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial | % | 90.12 | 23,58 | BRA | RPA 2023-2026 |
| 3.6.2.2 | Pencegahan dan mitigasi konflik | Rasio | 1 | 0,857 | BRA | RPA 2023-2026 |
| **3.6.3** | **Adat Istiadat Aceh** | | | | MAA | |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6.3.1 | Rasio pelestarian dan pembinaan adat istiadat | Rasio | 0.24 | 0,0063 | MAA | RPA 2023-2026 |
| **3.6.4** | **Peran Ulama Aceh** | | | | MPU | |
| 3.6.4.1 | Jumlah fatwa,taushiah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan Syariat Islam | Dokumen | 12 | 7 | MPU | RPA 2023-2026 |
| 3.6.4.2 | Jumlah Sertifikasi produk halal yang dihasilkan | Rasio | 148 | 250 | MPU | RPA 2023-2026 |
| 3.6.4.3 | Jumlah Kader Ulama yang ditingkatkan kompetensinya | orang | 48 | 48 | MPU | RPA 2023-2026 |
| **3.6.5** | **Pendidikan Khusus Aceh** | | | | MPA | |
| 3.6.5.1 | Rasio kebijakan/pertimbangan yang diterbitkan | Rasio | 1,08 | 1,33 | MPA | RPA 2023-2026 |
| **3.6.6** | **Zakat dan Infaq Aceh** | | | | BMA | |
| 3.6.6.1 | Persentase pendapatan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama | % | 1,35 | 80 | BMA | RPA 2023-2026 |
| **3.6.7** | **Peran Lembaga Wali Nanggroe** | | | | KKW | |

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Capaian Indikator 2022 | Target Indikator | SKPA Pengampu | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6.7.1 | Indeks pemberdayaan lembaga wali nanggroe | Indeks | 75 | 85 | KKW | RPA 2023-2026 |
| **3.6.8** | **Pendidikan Dayah** | | | | Dayah | |
| 3.6.8.1 | Persentase dayah yang mandiri | % | 27,8 | 41 | Dayah | RPA 2023-2026 |

Sumber: RPA Tahun 2023-2026 dan Hasil Desk Urusan RAKORTEKRENBANG Nasional Tahun 2023

# BAB VIII
# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun kedua Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. RKPA Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2024. RKPA Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026 dan RKP Tahun 2024 akan menjadi dokumen operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA Tahun 2024, pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPA Tahun 2024; pedoman penyelarasan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagai dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) Tahun 2024 serta menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh Tahun 2024.

Selanjutnya, kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mendukung dan mensukseskan terlaksananya RKPA Tahun 2024 demi terwujudnya Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera.

**Pj. GUBERNUR ACEH**

**ACHMAD MARZUKI**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureu-Eh No 26
Telp (06451) 21440 (hunting). Fax. 33654
email : bappeda@acehprov.go.id

BUKU

2

GUBERNUR ACEH

# PERATURAN GUBERNUR ACEH
# NOMOR 17 TAHUN 2023
# TENTANG
# RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH
# TAHUN 2024

## LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI ACEH
TAHUN 2023

# RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
# ACEH
# TAHUN 2024

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN** | | | | | | **2.633.631.725.878,00** | | | | | | | **2.552.254.966.318,30** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.633.631.725.878,00** | | | | | | | **2.552.254.966.318,30** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **2.633.631.725.878,00** | | | | | | | **2.552.254.966.318,30** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **1.683.893.629.457,00** | | | | | | **-** | **1.682.346.336.358,30** | |
| | 1.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.214.332.537,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.019.036.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Tahun Dokumen | 892.352.241,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 740.912.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Tahun Laporan | 321.980.296,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 278.124.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 7 Kegiatan | 1.639.813.475.080,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.639.707.743.080,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16907 Orang Orang/ Bulan | 1.639.617.949.778,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.639.617.949.778,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Tahun Dokumen | 195.525.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 89.793.302,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 585.263.500,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 354.055.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Tahun Laporan | 585.263.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 354.055.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai yang dilayani dengan jumlah pegawai* | - | | | 11 Kegiatan | 278.880.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 303.912.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Tahun Orang | 278.880.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 303.912.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.396.022.139,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 13.308.791.357,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Paket | 454.485.713,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 454.501.763,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Paket | 590.266.288,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 594.659.788,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Paket | 3.744.260.680,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.765.573.466,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Paket | 829.875.690,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 843.112.340,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Dokumen | 274.580.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 117.972.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Tahun Laporan | 8.323.205.768,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 7.468.472.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Tahun Dokumen | 37.500.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 37.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Tahun Dokumen | 141.848.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 27.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 683.945.008,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 378.235.008,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Paket | 124.235.008,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 124.235.008,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Unit | 558.710.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 253.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 21.496.633.824,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 22.049.532.744,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Tahun Laporan | 45.494.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 52.592.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Tahun Laporan | 3.210.528.824,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.444.809.744,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 509 Orang Laporan | 18.240.611.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 18.552.131.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.425.077.369,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.225.030.669,30 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Tahun Unit | 1.445.010.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.442.260.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Tahun Unit | 1.387.697.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.454.647.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Tahun Unit | 991.790.548,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 994.760.548,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Tahun Unit | 1.464.975.021,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.197.758.321,30 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Tahun Unit | 135.604.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 135.604.800,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **949.192.353.888,00** | | | | | | **-** | **869.483.856.658,00** | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | | | - | 598.141.647.316,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 531.658.531.866,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 3.866.019.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.866.019.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 3.639.750.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.639.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0013 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 825.460.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 825.460.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 9.763.558.896,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 9.066.792.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 705.503.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0016 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Tahun Ruang | 33.569.960.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 33.335.126.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 9.307.602.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 9.307.602.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 3.103.308.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.103.308.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 1.810.263.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.810.263.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 1.941.852.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 1.941.852.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0025 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 647.284.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 647.284.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0026 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 151.068.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 151.068.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 2.312.376.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.312.376.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0029 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 87.546.450,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 87.291.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 1 Tahun Peserta didik | 157.555.783.750,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 157.476.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 3.557.956.436,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 1 kegiatan Peserta Didik | 7.174.291.080,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas* | | | | 1 Tahun Orang | 111.938.108.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 56.276.802.511,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 1 kegiatan Orang | 3.245.441.771,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.039.862.855,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 1 kegiatan Satuan Pendidikan | 149.552.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS* | | | | 1 Tahun Satuan Pendidikan | 216.629.481.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 216.629.481.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0054 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas* | | | | 1 kegiatan Orang | 78.338.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 49.640.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 2 kegiatan Dokumen | 29.943.931,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 97.572.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0067 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 399.412.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 399.412.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Unit | 2.563.627.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.328.793.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0069 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 3.873.150.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.873.150.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 3.836.700.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.836.700.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 1.202.040.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.202.040.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 4.363.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.363.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Ruang | 3.103.308.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.103.308.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 1 Paket Ruang | 5.941.385.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.941.385.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0073 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Unit | 623.085.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 623.085.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.1.01.0074 | Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 1 kegiatan Satuan Pendidikan | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | | | - | 295.179.198.021,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 288.250.737.556,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 6.831.019.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 6.831.019.200,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun* | | | | 1 Tahun Ruang | 25.054.953.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 25.054.953.400,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 8.453.821.900,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 8.453.821.900,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 4.514.667.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.514.667.600,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 2.857.505.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.857.505.400,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0008 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 5.830.227.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.830.227.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 472.061.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0012 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi* | | | | 1 Paket Ruang | 1.894.265.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.894.265.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi* | | | | 1 Paket Ruang | 1.092.225.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.092.225.600,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 86.685.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 845.879.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 1 Tahun Peserta didik | 10.761.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 10.761.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0038 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 2 Paket Paket | 47.785.685.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 46.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 2 kegiatan Peserta Didik | 3.991.727.433,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 99.837.302,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan* | | | | 1 Tahun Orang | 62.577.754.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 62.577.754.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 1 Tahun Orang | 75.952.276,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 47.572.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 1 kegiatan Satuan Pendidikan | 918.983.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 49.096.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS* | | | | 1 Tahun Satuan Pendidikan | 92.934.569.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 92.934.569.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0047 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan* | | | | 1 kegiatan Orang | 49.816.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 49.816.302,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 kegiatan Dokumen | 19.856.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 47.572.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Unit | 282.545.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 282.545.400,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0063 | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi* | | | | 1 Paket Ruang | 3.536.005.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.536.005.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 1 Paket Ruang | 6.705.437.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 6.705.437.600,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0066 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Ruang | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Ruang | 6.779.545.100,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 6.779.545.100,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0071 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 1 kegiatan Satuan Pendidikan | 77.707.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 49.999.952,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0074 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0075 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Ruang | 743.302.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 743.302.800,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | | | - | 55.871.508.551,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 49.574.587.236,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 9.832.790.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 9.832.790.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.1.03.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 246.546.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 246.546.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 382.796.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 382.796.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0006 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 200.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0007 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 717.375.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 523.548.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0009 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0010 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 947.580.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 947.580.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0014 | Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 191.398.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 191.398.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0016 | Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Ruang | 191.398.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 191.398.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0035 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 47.121.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0037 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 53.917.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 1 Tahun Peserta Didik | 6.407.660.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 6.337.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 1 Paket Paket | 498.552.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.445.635.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 1 kegiatan Peserta Didik | 200.055.828,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.007.190,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus* | | | | 1 Tahun Orang | 12.877.800.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.314.925.360,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 1 Tahun Orang | 215.626.931,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 47.572.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 1 kegiatan Satuan Pendidikan | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS* | | | | 1 Tahun Satuan Pendidikan | 18.446.449.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 18.446.449.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0067 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Ruang | 134.194.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 134.194.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0068 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Unit | 126.496.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 126.496.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah* | | | | 1 Paket Ruang | 2.357.849.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.357.849.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 1 kegiatan Satuan Pendidikan | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0075 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Unit | 1.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0076 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Paket Unit | 125.551.186,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 125.551.186,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0077 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Ruang | 159.166.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 159.166.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat* | | | | 1 Paket Ruang | 939.358.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 939.358.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0080 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Paket Ruang | 268.828.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 268.828.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **-** | **-** | | | **-** | **297.312.602,00** | | | | | | **-** | **195.977.302,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.03.1.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | - | - | | | - | 297.312.602,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 195.977.302,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.03.1.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 1 kegiatan Orang | 146.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 146.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.03.1.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun* | | | | 1 kegiatan Dokumen | 151.312.602,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 49.977.302,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **64.977.931,00** | | | | | | **-** | **95.144.000,00** | |
| | 1.01.04.1.01 | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | - | - | | | - | 64.977.931,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 95.144.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.1.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus* | | | | 1 kegiatan Dokumen | 54.604.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 47.572.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.1.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus* | | | | 1 kegiatan Laporan | 10.373.931,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 47.572.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 5. | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **183.452.000,00** | | | | | | **-** | **133.652.000,00** | |
| | 1.01.05.1.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | | | - | 149.472.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 99.672.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.1.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 2 kegiatan Dokumen | 149.472.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 99.672.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.05.1.02 | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | | | - | 33.980.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 33.980.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.1.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 kegiatan Dokumen | 33.980.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 33.980.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAYAH** | | | | | | **227.356.842.663,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **227.356.842.663,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **227.356.842.663,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **18.474.756.822,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 634.628.862,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 54.441.549,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 243.677.302,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 64.504.080,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 272.005.931,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 11.090.359.999,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 67 Orang/ Bulan | 10.086.527.999,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 814.182.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 189.650.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 482.314.778,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 290.042.778,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 67 Orang | 192.272.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.382.470.375,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.962.048,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.550.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 392.157.542,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 147.065.565,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 74.282.220,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 733.453.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 144.300.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 66.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 77.700.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.961.591.116,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 5 Laporan | 23.573.338,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 820.652.346,00 | - Kab. Aceh Besar, Ingin Jaya, Bineh Blang<br>- Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 3.117.365.432,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 779.091.692,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 22 Unit | 506.270.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 93.555.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 179.266.692,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| 2. | **1.01.07** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH** | **-** | **-** | | | **-** | **208.882.085.841,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.01.07.7.01 | Pengelolaan Pendidikan Dayah | - | - | | | - | 208.882.085.841,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0001 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun* | | | | 180 Unit | 156.546.484.135,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0002 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0003 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya* | | | | 1260 Orang | 20.536.294.469,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0004 | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan* | | | | 370 Peserta Didik | 2.500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0005 | Pembinaan Manajemen Dayah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan* | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1.025.400.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0006 | Penelitian dan Pengembangan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan* | | | | 1260 Satuan Pendidikan | 504.933.697,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0007 | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya* | | | | 5 Satuan Pendidikan | 12.916.105.489,00 | - Kab. Aceh Besar, Ingin Jaya, Bineh Blang<br>- Kab. Aceh Singkil, Danau Paris, Biskang<br>- Kab. Aceh Tenggara, Babul Makmur, Tanoh Alas<br>- Kab. Aceh Tamiang, Kejuruan Muda, Seumadam<br>- Kota Subulussalam, Penanggalan, Kampung Baru | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0008 | Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia* | | | | 0 Buku | 484.696.488,00 | - Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U<br>- Kab. Pidie Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0009 | Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi* | | | | 21 Unit | 10.875.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0010 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah* | | | | 13 Dokumen | 1.769.780.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0011 | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi* | | | | 0 Satuan Pendidikan | 899.999.781,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0012 | Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma''had Aly | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Tinggi/Ma''had Aly yang Berdiri* | | | | 6 Satuan Pendidikan Tinggi | 373.391.830,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1.01.07.7.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 149.999.952,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| | | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH** | | | | | | **7.716.802.491,00** | | | | | | | **10.260.558.777,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.716.802.491,00** | | | | | | | **10.260.558.777,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **7.716.802.491,00** | | | | | | | **10.260.558.777,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik*** | **-** | | | **95 %** | **6.855.246.035,00** | | | | | | **-** | **8.479.643.777,00** | |
| | 1.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen rencana tahunan dan rencana kerja jangka menengah* | - | | | 2 dok | 90.428.302,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 90.428.302,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya gaji dan tunjangan ASN* | - | | | 12 bln | 3.939.942.662,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 4.152.252.377,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/ Bulan | 3.688.250.662,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.956.912.948,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 6 Dokumen | 251.692.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 195.339.429,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya anggaran Administrasi Umum Sekretariat MPA* | - | | | 12 bln | 493.675.671,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 790.551.400,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 bulan Paket | 15.039.036,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 28.009.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 bulan Paket | 158.776.672,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 251.080.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 bulan Paket | 32.443.963,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 90.196.400,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 bulan Dokumen | 7.692.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 17.356.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 bulan Laporan | 279.724.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 403.910.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 tahun | 80.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 paket Unit | 80.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *tersedianya jasa pelayanan umum* | - | | | 12 bln | 2.001.062.400,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.230.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 bulan Laporan | 180.542.400,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 230.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 bulan Laporan | 1.820.520.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah* | - | | | 1 tahun | 250.137.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 956.840.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 207.232.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 298.840.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 42.905.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 658.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| 2. | **1.01.08** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH** | ***Rasio Kebijakan yang dikeluarkan*** | **-** | | | **0,85 Rasio** | **861.556.456,00** | | | | | | **-** | **1.780.915.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.08.7.01 | Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh | *Rasio Kebijakan/pertimbangan yang dikeluarkan dengan target* | - | | | 2 dok | 440.544.604,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pemerintah dan Masyarakat | - | 945.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.01.0001 | Penetapan Standar Pendidikan Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Pendidikan Aceh yang Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 84.037.302,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pemerintah dan Masyarakat | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.01.0002 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh* | | | | 4 Dok Satuan Pendidikan | 356.507.302,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pemerintah dan Masyarakat | | 745.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.02 | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh | *Persentase dana pendidikan dalam APBA* | - | | | 20 % | 94.327.302,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pemerintah dan Masyarakat | - | 176.040.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.02.0003 | Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh* | | | | 1 Dokumen Satuan Pendidikan | 94.327.302,00 | - Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Bener Meriah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pemerintah dan Masyarakat | | 176.040.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.04 | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh | *Jumlah guru dayah yang dapat meningkatkan kompetensi ke-ilmuan guru* | - | | | 120 orang | 232.357.248,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengelola dan guru dayah | - | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.04.0001 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 120 Orang | 232.357.248,00 | - Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengelola dan guru dayah | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.05 | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | *Persentase regulasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pendidikan* | - | | | 50 % | 94.327.302,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pemerintah dan Masyarakat | - | 409.875.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | 1.01.08.7.05.0003 | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya* | | | | 2 Satuan Pendidikan | 94.327.302,00 | - Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tamiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Pemerintah dan Masyarakat | | 409.875.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH |
| | | **DINAS KESEHATAN ACEH** | | | | | | **910.331.969.914,00** | | | | | | | **1.469.497.651.087,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **910.331.969.914,00** | | | | | | | **1.469.497.651.087,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **7.030.711.738,00** | | | | | | | **20.269.963.671,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan*** | **-** | | | **100 % 1,85 /1000 Penduduk** | **7.030.711.738,00** | | | | | | **-** | **20.269.963.671,00** | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk* | - | | | 1.85 /1.000 Penduduk | 6.050.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | ASN | - | 19.519.963.671,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.01.0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 10 Unit | 1.550.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | ASN | | 9.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 63 Unit | 4.500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Beurawe | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | ASN | | 10.519.963.671,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan* | - | | | 1 Dokumen | 130.711.738,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 4 Dokumen | 130.711.738,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | *1. Persentase rumah sakit terakreditasi, 2. Persentase fasilitas kesehatan puskesmas yang terakreditasi* | - | | | 100 % | 850.000.000,00 | | | - | - | - | - | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar* | | | | 50 Unit | 850.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | - | - | | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | **-** | **-** | | | | | | **903.301.258.176,00** | | | | | | | **1.449.227.687.416,00** | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk* | - | | | 1.85 /1.000 Penduduk | 61.144.448.282,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 336.142.506.779,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 5 Unit | 50.239.760.282,00 | - Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Langsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 310.237.818.900,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.01.0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara* | | | | 70 Unit | 500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Beurawe | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 597.386.100,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 720 Unit | 500.000.000,00 | - Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | Semua Kel/Desa - Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Langsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tamiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bener Meriah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pidie Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | | | | |
| | 1.02.02.1.01.0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 4050 Dokumen | 1.385.269.140,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.222.422.866,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 10 Unit | 2.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 20.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan* | | | | 50 Paket | 6.519.418.860,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.484.878.913,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 767.837.247.604,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.034.123.365.371,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar* | | | | 125147 Orang | 350.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 0 Orang | 300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak* | | | | 3 Dokumen | 1.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif* | | | | 2 Dokumen | 550.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut* | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 10 Dokumen | 4.770.104.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 10 Dokumen | 900.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 0 Dokumen | 2.100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 7.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 2.750.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 9.916.760.407,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 556.720.048,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)* | | | | 7 Dokumen | 400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.007.256.882,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 750.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.064.347.295,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan* | | | | 5 Dokumen | 777.758.604,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.778.280.739,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.02.0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | | | | 23 Unit | 839.385.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | *1. Persentase rumah sakit terakreditasi, 2. Persentase fasilitas kesehatan puskesmas yang terakreditasi* | - | | | 100 % | 1.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan* | | | | 445 Unit | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **-** | **-** | | | **-** | **5.193.180.322,00** | | | | | | **-** | **8.100.564.141,00** | |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | - | - | | | - | 1.768.570.281,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.650.564.141,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 2907 Orang | 1.768.570.281,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.650.564.141,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 3.424.610.041,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat* | | | | 2400 Orang | 3.073.742.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 9 Dokumen | 350.868.041,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | **-** | | | **-** | **2.022.254.266,00** | | | | | | **-** | **1.330.000.000,00** | |
| | 1.02.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 891.674.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.05.1.01.0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi* | | | | 0 Dokumen | 891.674.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.05.1.02 | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 1.030.580.266,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.05.1.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 0 Dokumen | 1.030.580.266,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.05.1.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | 1.02.05.1.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM* | | | | 0 Dokumen | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| 3. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **66.104.127.702,00** | | | | | | **-** | **68.931.251.125,00** | |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 47.162.304.459,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 48.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 139.924.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.199.925.057,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.361.251.125,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 242.612.992,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 272.946.563,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.199.925.057,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.361.251.125,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 684.365.502,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 711.251.125,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 47.162.304.459,00 | | | - | - | - | - | 48.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 400 Orang/ Bulan | 47.022.380.157,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 48.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.857.311.571,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 9.360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 51.380.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.546.220.615,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.910.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 10 Laporan | 1.684.298.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.857.311.571,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 9.360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 3.346.690.371,00 | - Kab. Aceh Besar, Kota Jantho, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.546.220.615,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.910.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 238.735.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.857.311.571,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 9.360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 5.459.241.200,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 60 Unit | 3.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.546.220.615,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.910.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 232.437.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 1.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.546.220.615,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.910.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 955.660.260,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 327.312.560,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 107.777.795,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 338.366.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 338.366.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN ACEH |
| | | **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN** | | | | | | **893.556.186.390,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **893.556.186.390,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **893.556.186.390,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat*** | **-** | | | **91,77 %** | **825.754.997.390,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 2387 Orang/Bulan | 232.035.145.407,00 | | | - | - | Pegawai | - | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2387 Orang/ Bulan | 231.763.945.407,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Pegawai | | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 271.200.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Pegawai | | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Meningkatnya CRR* | - | | | 100 Persen | 593.719.851.983,00 | | | - | - | Masyarakat | - | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 593.719.851.983,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | Masyarakat | | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***Meningktanya Indeks Kepuasan Masyarakat*** | **-** | | | **91,77 Indeks** | **67.801.189.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Bagi Masyarakat* | - | | | 90 Persen | 67.801.189.000,00 | | | - | - | Masyarakat | - | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| | 1.02.02.1.01.0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 31.500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Masyarakat | | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 36.301.189.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | Masyarakat | | 0,00 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN |
| | | **RUMAH SAKIT JIWA** | | | | | | **109.004.648.035,00** | | | | | | | **105.083.070.089,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **109.004.648.035,00** | | | | | | | **105.083.070.089,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **107.469.648.035,00** | | | | | | | **103.024.154.089,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **100.316.503.748,00** | | | | | | **-** | **90.935.615.689,00** | |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tingkat Ketersedian Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 100 % | 56.685.873.741,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 57.049.116.478,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 470 Orang/ Bulan | 56.685.873.741,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 57.049.116.478,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Rumah Sakit* | - | | | 100 % | 3.747.803.583,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 4.627.355.387,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 3.747.803.583,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 4.627.355.387,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Fungsional* | - | | | 100 % | 118.924.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.008.830.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 118.924.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.008.830.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Kemandirian Rumah Sakit* | - | | | 31,5 % | 39.763.902.424,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 28.250.313.824,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 39.763.902.424,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 28.250.313.824,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Rumah Sakit Jiwa*** | **-** | | | **85,7 Indeks** | **7.153.144.287,00** | | | | | | **-** | **12.088.538.400,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase pasien dengan gangguan jiwa berat mendapatkan rawatan*<br>*Persentase pasien yang dirawat ulang (Readmision) dalam waktu kurang satu bulan* | - | | | 100 %<br>6,5 % | 5.116.279.700,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 9.965.412.500,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 2 Paket | 5.116.279.700,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 9.965.412.500,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase pasien dengan gangguan jiwa berat mendapatkan rawatan*<br>*Persentase Penanganan Pasien Pasung Terlayani* | - | | | 100 %<br>100 % | 2.036.864.587,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 2.123.125.900,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.02.1.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)* | | | | 12 Dokumen | 675.344.587,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 761.605.900,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 12 Dokumen | 1.361.520.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.361.520.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | **-** | **-** | | | | | | **1.535.000.000,00** | | | | | | | **2.058.916.000,00** | |
| 1. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **1.535.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.058.916.000,00** | |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Rumah Sakit* | - | | | 100 % | 1.535.000.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 2.058.916.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.535.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.058.916.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | **RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK** | | | | | | **90.866.566.614,00** | | | | | | | **40.100.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **90.866.566.614,00** | | | | | | | **40.100.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **90.866.566.614,00** | | | | | | | **40.100.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **87.998.806.614,00** | | | | | | **-** | **36.800.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 49.649.752.640,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 0,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 538 Orang/ Bulan | 49.649.752.640,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 0,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.009.254.557,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 4.400.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 1.809.254.557,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.200.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.400.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.932.240.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.900.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 400.470.000,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 450.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 31.770.000,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 450.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1.500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 32.407.559.417,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 30.500.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 21 Unit Kerja | 32.407.559.417,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 30.500.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | **-** | | | **-** | **2.867.760.000,00** | | | | | | **-** | **3.300.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 2.867.760.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 3.300.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak* | | | | 4 Dokumen | 2.867.760.000,00 | - Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 3.300.000.000,00 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **271.250.544.640,00** | | | | | | | **607.797.368.979,91** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **271.250.544.640,00** | | | | | | | **607.797.368.979,91** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **160.356.365.841,00** | | | | | | | **440.979.586.957,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **857.693.554,00** | | | | | | **-** | **3.455.576.680,00** | |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 857.693.554,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 3.455.576.680,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 13 Unit | 857.693.554,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 3.455.576.680,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | ***Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap*** | **-** | | | **89,16 %** | **158.881.200.187,00** | | | | | | **-** | **437.374.010.277,00** | |
| | 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | *Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap* | - | | | 89.16 % | 158.881.200.187,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 437.374.010.277,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0024 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi* | | | | 20 KM | 9.784.634.105,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 34.989.010.277,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan* | | | | 13.16 KM | 95.197.246.807,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 226.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 3.5 KM | 7.978.159.015,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 10.785.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala* | | | | 11 KM | 35.921.160.260,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 135.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0042 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 9000 KM | 10.000.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 30.600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **-** | **-** | | | **-** | **617.472.100,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | 1.03.12.1.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | - | - | | | - | 529.574.974,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.01.0007 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 529.574.974,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | *Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan Gubernur* | - | | | 4 % | 87.897.126,00 | | | - | - | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.03.0003 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku* | | | | 1 Layanan | 87.897.126,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | **-** | **-** | | | | | | **110.894.178.799,00** | | | | | | | **166.817.782.022,91** | |
| 1. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | ***Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap*** | **-** | | | **89,16 %** | **41.955.487.183,00** | | | | | | **-** | **100.231.980.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | *Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap* | - | | | 89.16 % | 41.955.487.183,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 100.231.980.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin* | | | | 300 M | 1.250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 6.496.780.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0028 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan* | | | | 1 Dokumen | 257.584.938,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0032 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jembatan yang Dibangun* | | | | 25 M | 19.900.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 68.850.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.10.1.01.0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin* | | | | 510.55 KM | 15.364.073.185,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 16.385.200.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian* | | | | 7 Dokumen | 4.082.952.050,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan* | | | | 1 Dokumen | 1.100.877.010,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **-** | **-** | | | **-** | **492.326.397,00** | | | | | | **-** | **750.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.12.1.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | - | - | | | - | 137.223.836,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 240.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.01.0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang* | | | | 1 Dokumen | 137.223.836,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 240.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | - | - | | | - | 211.834.225,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 285.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.02.0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 158.503.779,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 210.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.02.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 53.330.446,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | - | - | | | - | 143.268.336,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 225.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.1.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 1 Dokumen | 143.268.336,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 225.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **68.446.365.219,00** | | | | | | **-** | **65.835.802.022,91** | |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.060.650.594,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.558.218.836,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 280.184.520,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 273.922.343,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.327.541.777,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 911.696.170,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 102.692.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 90.901.275,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 961.570.015,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 590.021.335,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 712.400.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 742.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 415 Paket | 365.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 375.200.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 62.639.148.444,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 61.452.422.166,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 14.637.540.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 13.419.371.690,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.327.541.777,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 911.696.170,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 216 Dokumen | 13.320.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 14.209.915,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 62.639.148.444,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 61.452.422.166,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 422 Orang/ Bulan | 48.001.608.444,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 48.033.050.476,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.327.541.777,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 911.696.170,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 73 Paket | 240.915.568,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 203.791.106,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 373.225.404,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 451.101.102,91 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 78.517.007,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 80.117.007,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 243.516.657,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 322.235.485,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.327.541.777,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 911.696.170,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 9.043.694,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 12.772.539,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.060.650.594,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.558.218.836,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 6.429.825,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 373.225.404,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 451.101.102,91 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 51.191.740,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 48.748.610,91 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyedaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.060.650.594,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.558.218.836,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.161.614.734,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 949.786.830,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.333.399.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 719.963.748,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 58 Unit | 1.333.399.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 719.963.748,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.060.650.594,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.558.218.836,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 612.851.340,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 328.079.838,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 712.400.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 742.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 25 Orang | 347.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 367.200.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PENGAIRAN** | | | | | | **178.859.159.490,00** | | | | | | | **290.578.508.124,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **178.859.159.490,00** | | | | | | | **290.578.508.124,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **178.859.159.490,00** | | | | | | | **290.578.508.124,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **42.384.403.344,00** | | | | | | **-** | **47.338.714.278,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja* | - | | | 100 % | 600.130.842,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 708.597.057,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 600.130.842,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 708.597.057,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan* | - | | | 100 % | 34.406.453.400,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 36.327.728.903,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 267 Orang/ Bulan | 31.575.399.400,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 35.616.417.953,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 2.831.054.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 711.310.950,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor* | - | | | 100 % | 296.701.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 1.509.647.190,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 5 Laporan | 296.701.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.509.647.190,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi* | - | | | 100 % | 1.540.999.160,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 712.550.250,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 300 Paket | 789.962.880,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 23 Orang | 122.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 135.050.250,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 200 Orang | 628.536.280,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 577.500.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor* | - | | | 100 % | 1.452.590.554,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 2.242.400.871,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 15.225.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 63.739.600,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 424.924.030,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 383.598.300,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 181.653.324,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 279.693.996,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 95.605.200,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 160.006.190,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 15.213.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 16.758.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 719.970.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.338.604.785,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur* | - | | | 100 % | 100.000.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 220.500.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 220.500.000,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas* | - | | | 100 % | 2.063.179.388,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 2.963.569.199,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 9.700.300,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 10.757.975,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 893.037.272,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.248.094.117,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 221.519.296,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 958.692.820,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 938.922.520,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 746.024.287,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara* | - | | | 100 % | 1.924.349.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 2.653.720.808,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 458.378.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 507.798.270,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 80 Unit | 1.089.071.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.124.015.288,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 376.900.000,00 | - Kab. Bireuen, Kota Juang, Cot Gapu<br>- Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata<br>- Kota Langsa, Langsa Baro, Paya Bujok Seuleumak<br>- Kab. Aceh Barat Daya, Blang Pidie, Baharu | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.021.907.250,00 | DINAS PENGAIRAN |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | ***Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik*** | **-** | | | **56,23 %** | **136.474.756.146,00** | | | | | | **-** | **243.239.793.846,00** | |
| | 1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama* | - | | | 39.81 % | 62.684.002.868,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | - | 145.994.280.082,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0009 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun* | | | | 2.21 KM | 20.905.169.536,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 40.620.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0073 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi* | | | | 0.45 KM | 2.100.000.000,00 | - Kab. Aceh Utara, Samudera, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 9.000.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0075 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi* | | | | 6 Lembaga | 2.469.518.018,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 2.521.069.895,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 6.8 KM | 4.699.202.169,00 | - Kab. Aceh Utara, Pirak Timur, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Barat Daya, Tangan-Tangan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 2.360.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0087 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Dokumen | 203.278.854,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 330.750.000,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.02.1.01.0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan* | | | | 39 Lembaga | 124.804.954,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 248.525.550,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0095 | Rehabilitasi Unit Air Baku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 2.160.000.000,00 | - Kab. Aceh Utara, Kuta Makmur, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Jaya, Teunom, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 750.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0096 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun* | | | | 0.32 KM | 12.820.190.008,00 | - Kab. Aceh Jaya, Sampoiniet, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 45.330.200.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0101 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 4 KM | 1.019.700.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 3.337.157.250,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi* | | | | 4 Dokumen | 2.256.045.018,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.638.252.387,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0105 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 25 Unit | 442.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.378.125.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun* | | | | 1.59 KM | 9.212.688.403,00 | - Kab. Aceh Besar, Lhoong, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Tengah, Kebayakan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Timur, Birem Bayeun, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Jaya, Indra Jaya, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Tamiang, Tamiang Hulu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 35.330.200.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 1.000.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Lhoknga, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Timur, Birem Bayeun, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.575.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.01.0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun* | | | | 5 Dokumen | 3.271.405.908,00 | - Kab. Aceh Utara, Lhoksukon, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Utara, Samudera, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Jaya, Panga, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Tamiang, Kejuruan Muda, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.575.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik* | - | | | 72.65 % | 73.790.753.278,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | - | 97.245.513.764,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun* | | | | 0.74 KM | 7.941.429.270,00 | - Kab. Simeulue, Simeulue Barat, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 62.377.597.672,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0003 | Pembangunan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun* | | | | 2 Bendung | 26.900.000.000,00 | - Kab. Aceh Timur, Peunaron, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simeulue, Simeulue Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 11.846.548.592,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* | | | | 5.62 KM | 20.644.798.000,00 | - Kab. Aceh Barat Daya, Babah Rot, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Barat Daya, Manggeng, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pidie Jaya, Meureudu, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pidie Jaya, Bandar Dua, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 606.375.000,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.02.1.02.0009 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan* | | | | 1 Bendung | 1.100.000.000,00 | - Kab. Aceh Timur, Banda Alam, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | | | | 0.48 KM | 1.080.700.000,00 | - Kab. Aceh Timur, Banda Alam, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 606.375.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi* | | | | 1 Bendung | 630.000.000,00 | - Kab. Aceh Tamiang, Manyak Payed, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.819.125.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 515.61 KM | 9.364.849.608,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 14.512.302.050,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara* | | | | 24 Bendung | 2.300.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.530.931.500,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 41.79 KM | 1.089.700.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.174.508.950,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1.381.600.000,00 | - Kab. Bireuen, Peusangan Siblah Krueng, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.02.1.02.0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi* | | | | 5 Lembaga | 957.476.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 330.750.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | 1.03.02.1.02.0037 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya* | | | | 27 DI | 400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 441.000.000,00 | DINAS PENGAIRAN |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **355.918.006.956,00** | | | | | | | **396.073.905.455,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **355.918.006.956,00** | | | | | | | **396.073.905.455,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **52.300.000.000,00** | | | | | | | **62.100.000.000,00** | |
| 1. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | ***Persentase SPAM Regional yang Terbangun*** | **-** | | | **50 %** | **1.800.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.100.000.000,00** | |
| | 1.03.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | *Jumlah SPAM* | - | | | 2 SPAM | 1.800.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | - | 2.100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.03.1.01.0013 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 1 Lembaga | 400.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.1.01.0014 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* | | | | 2 Kabupaten/ Kota | 400.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | Masyarakat | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.1.01.0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* | | | | 2 Kabupaten/ Kota | 500.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | ***Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan*** | **-** | | | **48 %** | **46.000.000.000,00** | | | | | | **-** | **55.000.000.000,00** | |
| | 1.03.08.1.01 | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | *Jumlah Gedung Strategis* | - | | | 17 Gedung | 46.000.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | - | 55.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.08.1.01.0016 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan* | | | | 2 Bangunan Gedung | 3.500.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lamcot - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.08.1.01.0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi* | | | | 15 Dokumen | 42.500.000.000,00 | - | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 50.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | ***Persentase terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya*** | **-** | | | **50 %** | **4.500.000.000,00** | | | | | | **-** | **5.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kawasan* | - | | | 1 Kawasan | 4.500.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | - | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.09.1.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata* | | | | 1 Kawasan | 4.500.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **303.618.006.956,00** | | | | | | | **333.973.905.455,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **37.878.579.774,00** | | | | | | **-** | **41.644.535.555,00** | |
| | 1.04.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi* | - | | | 13 Dokumen | 1.700.000.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 1.850.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 220.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 700.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 750.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 800.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 880.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlan ASN yang Mendapat Honorarium* | - | | | 351 ASN | 27.590.279.774,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 30.349.307.751,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 140 Orang/ Bulan | 18.381.279.774,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 20.219.407.751,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 9.209.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 10.129.900.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah ASN, Diklat dan Bimtek* | - | | | 351 ASN | 200.000.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 220.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 50 Orang | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah ASN terlayani* | - | | | 351 ASN | 2.012.488.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 2.211.834.604,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 421.213.276,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 463.334.604,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 456.274.724,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 200.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 220.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 38.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 800.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 880.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis Barang* | - | | | 2 Jenis | 2.000.000.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 2.200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 250.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 275.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 1.750.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.925.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Penyediaan Jasa* | - | | | 3 Jenis | 2.225.812.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 2.448.393.200,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 33.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 891.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 980.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.304.812.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.435.293.200,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Pemeliharaan* | - | | | 3 Jenis | 2.150.000.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | - | 2.365.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 104 Unit | 1.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 150.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 165.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 1.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | ***Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani*** | **-** | | | **33,23 %** | **100.595.200.000,00** | | | | | | **-** | **110.654.720.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.03.1.02 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | *Jumlah Rumah* | - | | | 934 Unit | 100.595.200.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Miskin | - | 110.654.720.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.1.02.0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki* | | | | 934 Unit Rumah | 100.595.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Miskin | | 110.654.720.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | ***Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU*** | **-** | | | **66,38 %** | **165.144.227.182,00** | | | | | | **-** | **181.674.649.900,00** | |
| | 1.04.05.1.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | *Jumlah Kawasan Terselenggarakan PSU* | - | | | 165 Kawasan | 165.144.227.182,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | - | 181.674.649.900,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman* | | | | 165 Lokasi | 164.704.227.182,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 181.174.649.900,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman* | | | | 1 Laporan | 440.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** | | | | | | **59.034.457.387,00** | | | | | | | **64.937.903.119,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **59.034.457.387,00** | | | | | | | **64.937.903.119,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **59.034.457.387,00** | | | | | | | **64.937.903.119,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **21.497.558.552,00** | | | | | | **-** | **23.647.925.955,00** | |
| | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*<br>*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | - | | | 1 Dokumen<br>10 Dokumen | 153.615.850,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 168.977.042,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 82.437.472,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 90.681.219,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 71.178.378,00 | - Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Simeulue, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 78.295.823,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.972.255.686,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 14.269.481.254,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 76 Orang/ Bulan | 12.917.408.043,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 14.209.148.847,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 4 Laporan | 54.847.643,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 60.332.407,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 307.633.064,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 338.396.370,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 15 kali Orang | 146.387.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 161.025.700,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 40 Orang | 161.246.064,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 177.370.670,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 782.835.763,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 861.119.735,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.094.884,00 | - | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 18.804.372,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 340.027.049,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 374.030.150,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 69.918.830,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 76.910.713,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 40 Dokumen | 12.640.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 13.904.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 47 Laporan | 343.155.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 377.470.500,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.652.537.583,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.818.009.276,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 1.652.537.583,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.818.009.276,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.548.545.746,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 5.003.793.932,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 10.438.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 11.481.800,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 492.292.996,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 541.522.295,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 502.609.220,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 553.263.754,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 3.543.205.530,00 | - | PAJAK ROKOK, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.897.526.083,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.080.134.860,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.188.148.346,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 21 Unit | 295.620.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 325.182.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 33 Unit | 519.190.000,00 | - | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 571.109.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 162.123.420,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 178.335.762,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 103.201.440,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 113.521.584,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **37.536.898.835,00** | | | | | | **-** | **41.289.977.164,00** | |
| | 1.05.02.1.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 36.612.398.835,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 40.273.027.165,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0006 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | | | | 1 Dokumen | 51.160.124,00 | - | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 56.276.136,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan* | | | | 1 Dokumen | 19.978.124,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 22.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia* | | | | 24 Unit | 28.800.000,00 | - | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 31.680.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 65.720.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 72.050.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada* | | | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 49.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 6 Laporan | 15.145.357.827,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 16.659.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan* | | | | 24 laporan | 21.036.382.760,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK, DANA OTONOMI KHUSUS, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 23.140.021.029,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja* | | | | 500 Orang | 140.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 154.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.01.0019 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 19 Laporan | 80.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 88.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.02 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | - | - | | | - | 277.500.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 305.249.999,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.02.1.02.0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur* | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 65.999.999,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.02.0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur* | | | | 11 Laporan | 52.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 57.200.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.02.0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | - | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 44.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda* | | | | 11 Dokuman | 125.500.000,00 | - | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 138.050.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 66.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda* | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 66.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04 | Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh | - | - | | | - | 587.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 645.700.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.02.7.04.0001 | Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 36.300.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0002 | Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam* | | | | 1 Laporan | 95.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0003 | Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam* | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 48.400.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0004 | Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 55.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0005 | Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 55.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0006 | Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 66.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0007 | Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 44.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0008 | Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | - | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 44.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0009 | Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 44.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0010 | Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi* | | | | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1.05.02.7.04.0011 | Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 44.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **34.798.037.698,00** | | | | | | | **41.456.677.976,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **34.798.037.698,00** | | | | | | | **41.456.677.976,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **34.798.037.698,00** | | | | | | | **41.456.677.976,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **12.324.366.070,00** | | | | | | **-** | **14.039.467.587,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 373.384.822,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 410.722.204,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 373.384.822,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 410.722.204,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.796.156.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 7.800.661.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 46 Orang/ Bulan | 6.640.356.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 7.640.325.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 155.800.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 160.336.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.093.989.248,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.358.084.383,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 53.718.810,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 76.020.339,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 258.078.222,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 283.886.044,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 165.649.488,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 163.946.259,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 18.102.750,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 434.493.719,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 578.178.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 323.354.544,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 323.354.544,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.258.260.956,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 2.420.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 10 Laporan | 17.592.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 378.952.656,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 400.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.861.716.300,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.479.220.500,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.850.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 50 Unit | 1.024.242.900,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 120 Unit | 454.977.600,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 650.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **-** | **-** | | | **-** | **20.275.831.578,00** | | | | | | **-** | **24.817.210.389,00** | |
| | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | - | - | | | - | 3.311.559.843,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.900.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.01.0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota* | | | | 60 Orang | 1.350.534.458,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.900.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan* | | | | 4 Dokumen | 1.961.025.385,00 | - Kab. Aceh Singkil, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam<br>- Kota Langsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - | - | | | - | 8.102.299.535,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 9.807.944.529,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0012 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan* | | | | 4 Dokumen | 1.132.467.756,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana* | | | | 5 Kawasan | 817.930.715,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0014 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana* | | | | 5 Dokumen | 427.306.400,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.03.1.02.0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 60 Orang | 187.395.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 387.385.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 120 Orang | 425.029.579,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 500.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana* | | | | 1 Orang | 309.077.045,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 509.077.045,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0020 | Pengelolaan Risiko Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani* | | | | 1 Kegiatan | 411.482.484,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 711.482.484,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0021 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana* | | | | 6 Unit | 4.391.610.556,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 4.500.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | - | | | - | 4.822.598.600,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 5.112.200.860,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03.0002 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana* | | | | 5 Laporan | 1.212.200.860,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.312.200.860,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03.0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 23 Orang | 3.610.397.740,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 3.800.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | - | | | - | 4.039.373.600,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 5.997.065.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun* | | | | 20 Dokumen | 2.717.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 4.217.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0016 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah* | | | | 1 Dokumen | 190.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 210.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0017 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* | | | | 1 Dokumen | 339.073.600,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | - | - | | 556.765.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang dilegalkan* | | | | 1 Dokumen | 612.800.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 812.800.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0019 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)* | | | | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 3. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **-** | **-** | | | **-** | **2.197.840.050,00** | | | | | | **-** | **2.600.000.000,00** | |
| | 1.05.04.1.01 | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | - | - | | | - | 2.197.840.050,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 2.600.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.1.01.0009 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)* | | | | 60 Orang | 190.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 390.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.1.01.0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal* | | | | 1 Dokumen | 190.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 210.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.1.01.0027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 2 Unit | 1.817.840.050,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam<br>- Kab. Aceh Tamiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | **69.664.020.297,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **69.664.020.297,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **69.664.020.297,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Terlaksana*** | **-** | | | **100 %** | **35.025.214.810,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *"Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"* | - | | | 7 Dokumen | 971.424.838,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 13 Dokumen | 400.592.514,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 13 Dokumen | 406.357.280,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 13 Laporan | 164.475.044,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 144 Orang | 28.787.953.826,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 135 Orang/ Bulan | 20.132.449.432,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 8.388.558.000,00 | - | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 266.946.394,00 | - | DANA OTONOMI KHUSUS, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 144 Orang | 232.968.536,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 0 Dokumen | 61.735.280,00 | - | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 25 Orang | 39.515.954,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 25 Orang | 131.717.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 144 Orang | 2.012.081.101,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 49.774.000,00 | - | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 102.343.750,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 202.263.809,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 144.686.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 108.441.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 38.628.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 239.789.148,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 0 Laporan | 94.500.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 636.050.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 0 Dokumen | 141.604.254,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 80 Dokumen | 254.000.640,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 464.938.727,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 336.733.727,00 | - | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 128.205.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 1.073.681.382,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 45.900.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 644.533.520,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 104.850.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 278.397.862,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 1.482.166.400,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 0 Unit | 1.206.045.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 0 Unit | 81.050.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 195.071.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **-** | **-** | | | **-** | **6.649.000.304,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.06.02.1.01 | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 23.505.216,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang* | | | | 0 Dokumen | 23.505.216,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02 | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | *Meningkatnya kualitas PSKS yang mendapatkan penguatan* | - | | | 608 PSKS | 6.625.495.088,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pilar-Pilar Sosial, PSM, Organisosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga Perintis | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 68.509.291,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pilar-Pilar Sosial, PSM, Organisosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga Perintis | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 0 Orang | 6.367.104.904,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pilar-Pilar Sosial, PSM, Organisosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga Perintis | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Keluarga | 63.385.818,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pilar-Pilar Sosial, PSM, Organisosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga Perintis | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Lembaga | 126.495.075,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pilar-Pilar Sosial, PSM, Organisosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga Perintis | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | ***Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan Terselenggaranya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan*** | **-** | | | **98 %<br>100 %** | **415.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.06.03.1.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | *Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 80 Orang | 415.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Warga Negara Migran dan Orang Terlantar | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.03.1.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 415.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Warga Negara Migran dan Orang Terlantar | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | ***Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya*** <br> ***Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti*** | **-** | | | **62 %** <br> **100 %** | **21.599.105.566,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.06.04.1.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | *Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti* | - | | | 52 Orang | 2.422.498.487,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 962.500.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 94.682.900,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 833.892.121,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 13.040.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 53.469.316,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 33.122.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 213.999.850,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi* | | | | 20 Orang | 5.881.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 19.400.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 95.069.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 64.018.300,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar* | | | | 50 Dokumen | 33.424.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Disabilitas Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | *Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti* | - | | | 134 Anak | 5.824.962.214,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0001 | Pengasuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 59.720.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0002 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 1.763.590.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 263.434.982,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 1.640.264.300,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 72.875.645,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 394.720.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 1.075.310.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 12.782.950,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 120.705.068,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 20.388.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 27.250.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0012 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 525.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti* | | | | 0 Dokumen | 373.396.269,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | *Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti* | - | | | 70 Orang | 2.879.437.318,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 60 Orang | 1.252.900.000,00 | - Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Lamglumpang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.1.03.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi* | | | | 60 Orang | 80.235.000,00 | - Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi* | | | | 60 Orang | 832.968.130,00 | - Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Lamglumpang | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi* | | | | 60 Orang | 5.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Lamglumpang | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 60 Orang | 200.070.085,00 | - Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Lamglumpang | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 108.540.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 129.224.244,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 5.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 6.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 104.412.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 135.491.359,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0012 | Pemulasaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 19.096.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | *Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar Dalam Panti* | - | | | 45 Orang | 1.629.499.709,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 255.270.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.1.04.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 56.245.330,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 841.070.369,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 37.958.510,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 64.800.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 44.587.500,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 151.500.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 10.700.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 17.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 150.368.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Mesjid Raya, Ladong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Tuna Sosial dan Gelandangan Pengemis da Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05 | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | - | - | | | - | 8.842.707.838,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 4200 Orang | 5.831.831.908,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 70.392.002,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi* | | | | 100 Orang | 656.496.555,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.1.05.0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 234 Orang | 1.647.871.407,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 60 Orang | 80.277.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi* | | | | 39 Orang | 87.992.202,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 16 Orang | 182.617.604,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi* | | | | 72 Orang | 62.277.202,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 16 Orang | 85.897.552,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal* | | | | 17 Orang | 29.777.052,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA* | | | | 98 Dokumen | 107.277.052,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | ***Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial*** | **-** | | | **27 % 23 Kab/kota 100 %** | **1.990.699.725,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.05.1.01 | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | *Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial untuk pengangkatan anak (Adopsi)* | - | | | 12 Orang | 214.999.715,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak WNI dan Calon Orang Tua Tunggal | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.01.0001 | Pengangkatan Anak antar WNI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi* | | | | 25 Orang | 178.219.715,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak WNI dan Calon Orang Tua Tunggal | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.01.0002 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Orang | 36.780.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Anak WNI dan Calon Orang Tua Tunggal | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | *Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin kewenangan provinsi* | - | | | 23 Kab/Kota | 1.775.700.010,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga/perorangan Miskin, Keluarga Rentan, WRSE | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.02.0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Keluarga | 507.350.010,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga/perorangan Miskin, Keluarga Rentan, WRSE | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.05.1.02.0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota* | | | | 50 Keluarga | 866.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga/perorangan Miskin, Keluarga Rentan, WRSE | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi* | | | | 500 Orang | 402.350.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga/perorangan Miskin, Keluarga Rentan, WRSE | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | ***Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar*** | **-** | | | **100 %** | **3.120.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 1.06.06.1.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | *Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial* | - | | | 100 % | 3.120.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Korban Bencana Alam dan Sosial | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi* | | | | 120000 Orang | 1.592.601.240,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Korban Bencana Alam dan Sosial | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi* | | | | 120000 Orang | 656.570.085,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Korban Bencana Alam dan Sosial | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi* | | | | 200 Unit | 78.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Korban Bencana Alam dan Sosial | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi* | | | | 120000 Orang | 265.079.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Korban Bencana Alam dan Sosial | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi* | | | | 757 Orang | 527.749.675,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Korban Bencana Alam dan Sosial | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| 7. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | ***Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat***<br>***Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional*** | **-** | | | **100 %**<br>**100 %** | **864.999.892,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.07.1.01 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | *Terkelolanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi* | - | | | 0.143 TMP/MPN | 864.999.892,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional | - | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.1.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi* | | | | 12 Dokumen | 370.099.402,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.1.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi* | | | | 0 Makam | 321.328.490,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.1.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi* | | | | 0 Laporan | 173.572.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK** | | | | | | **57.049.076.370,00** | | | | | | | **114.980.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **50.049.076.370,00** | | | | | | | **55.930.000.000,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **50.049.076.370,00** | | | | | | | **55.930.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **33.583.878.398,00** | | | | | | **-** | **37.305.000.000,00** | |
| | 2.07.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Tersedia* | - | | | 8 Dokumen | 2.100.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 23 Kab/Kota | - | 2.450.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 425.484.114,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 23 Kab/Kota | | 500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 70 Dokumen | 632.054.026,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 23 Kab/Kota | | 750.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 742.308.372,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 23 Kab/Kota | | 800.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 6 Laporan | 300.153.488,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 23 Kab/Kota | | 400.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 1 Tahun | 23.385.251.752,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 168 ASN | - | 26.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 168 Orang/ Bulan | 23.385.251.752,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 168 ASN | | 26.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | - | | | 6 Orang | 485.812.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur | - | 550.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 485.812.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur | | 550.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran* | - | | | 90 % | 1.004.187.120,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 1.265.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 41.700.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 55.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 276.063.120,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 75.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 65 Dokumen | 72.336.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 85.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 564.088.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 750.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | - | | | 100 % | 5.230.415.684,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | - | 5.180.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 100 Laporan | 21.420.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 590.064.984,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 650.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Laporan | 580.100.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 700.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 4.038.830.700,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | | 3.800.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara* | - | | | 100 % | 1.378.211.842,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Asset Daerah | - | 1.860.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 60 Unit | 843.933.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Asset Daerah | | 860.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 534.278.842,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Asset Daerah | | 1.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| 2. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | ***Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi*** | **-** | | | **85,11 %** | **12.625.181.827,00** | | | | | | **-** | **13.500.000.000,00** | |
| | 2.07.03.1.01 | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | *Jumlah pencari kerja yang dilatih melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi* | - | | | 1100 Orang | 12.625.181.827,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pencari Kerja | - | 13.500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n* | | | | 590 Orang | 10.270.363.676,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pencari Kerja | | 10.500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.03.1.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n* | | | | 30 Lembaga | 2.354.818.151,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pencari Kerja | | 3.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| 3. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **-** | **-** | | | **-** | **639.535.144,00** | | | | | | **-** | **725.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.04.1.01 | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 639.535.144,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 725.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.04.1.01.0002 | Pelayanan Antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD* | | | | 50 Orang | 639.535.144,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 725.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| 4. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | ***Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah*** | **-** | | | **50 Perusahaan** | **1.400.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.200.000.000,00** | |
| | 2.07.05.1.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengesahan Peraturan Pemerintah* | - | | | 50 Perusahaan | 413.547.725,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | - | 550.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online* | | | | 10 Perusahaan | 291.289.702,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | | 350.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek* | | | | 5 Laporan | 122.258.023,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial* | - | | | 25 Perkara | 578.593.495,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | - | 850.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 25 Perkara | 297.562.651,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | | 350.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi* | | | | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 203.757.844,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 5 Lembaga | 77.273.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.05.1.03 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | *Jumlah Penetapan UMP dan UMK* | - | | | 3 Surat Keputusan | 407.858.780,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | - | 800.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.03.0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penetapan UMP* | | | | 1 Surat Keputusan | 304.533.954,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | | 500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.05.1.03.0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penetapan UMK* | | | | 2 Surat Keputusan | 103.324.826,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| 5. | **2.07.06** | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | ***Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan*** | **-** | | | **1558 Perusahaan** | **1.800.481.001,00** | | | | | | **-** | **2.200.000.000,00** | |
| | 2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | *Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan* | - | | | 1558 Perusahaan | 1.800.481.001,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Perusahaan, Aparatur dan Tenaga Kerja | - | 2.200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)* | | | | 1068 Perusahaan | 1.322.870.419,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Perusahaan, Aparatur dan Tenaga Kerja | | 1.500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan* | | | | 4 Kasus | 150.380.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Perusahaan, Aparatur dan Tenaga Kerja | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3* | | | | 333 Perusahaan | 327.230.280,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Perusahaan, Aparatur dan Tenaga Kerja | | 500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **7.000.000.000,00** | | | | | | | **59.050.000.000,00** | |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | **7.000.000.000,00** | | | | | | | **59.050.000.000,00** | |
| 1. | **3.32.02** | **PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI** | ***Jumlah Kawasan yang direncanakan untuk pembangunan dan pengembangan*** | **-** | | | **35,71 %** | **500.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.050.000.000,00** | |
| | 3.32.02.1.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | *Luasan Tanah yang Memenuhi Kriteria Clear and Clean di Kawasan Transmigrasi* | - | | | 750 Hektar | 500.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Masyarakat Calon Lokasi Transmigrasi | - | 1.050.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 3.32.02.1.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain* | | | | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | - Kab. Bener Meriah, Syiah Utama, Wehni Durin | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Masyarakat Calon Lokasi Transmigrasi | | 250.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 3.32.02.1.01.0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi* | | | | 200 Hektar | 170.000.000,00 | - Kab. Aceh Timur, Rantau Peureulak, Punti Payong | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Masyarakat Calon Lokasi Transmigrasi | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 3.32.02.1.01.0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | - Kota Subulussalam, Sultan Daulat, Darul Makmur | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Masyarakat Calon Lokasi Transmigrasi | | 500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| 2. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | ***Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya*** | **-** | | | **35,71 %** | **3.500.000.000,00** | | | | | | **-** | **21.000.000.000,00** | |
| | 3.32.03.1.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Jumlah hunian yang layak dan terlaksananya penataan dan persebaran penduduk* | - | | | 5 Kawasan | 3.500.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kaum Dhuafa dan Fakir Miskin, Petani penggarap atau nelayan miskin, masyarakat terkena bencana alam/Daerah terpencil, Masyarakat di Kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai), Masyarakat Daerah yang terkena Proyek Pembangunan, Tenaga Kerja Produktif/Putus Sekolah, Pecahan KK yang belum memiliki Rumah, Perambah Hutan, Korban Konflik | - | 21.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.32.03.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kaum Dhuafa dan Fakir Miskin, Petani penggarap atau nelayan miskin, masyarakat terkena bencana alam/Daerah terpencil, Masyarakat di Kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai), Masyarakat Daerah yang terkena Proyek Pembangunan, Tenaga Kerja Produktif/Putus Sekolah, Pecahan KK yang belum memiliki Rumah, Perambah Hutan, Korban Konflik | | 1.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 3.32.03.1.01.0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)* | | | | 10 Dokumen | 3.000.000.000,00 | - Kab. Bener Meriah, Syiah Utama, Wehni Durin | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kaum Dhuafa dan Fakir Miskin, Petani penggarap atau nelayan miskin, masyarakat terkena bencana alam/Daerah terpencil, Masyarakat di Kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai), Masyarakat Daerah yang terkena Proyek Pembangunan, Tenaga Kerja Produktif/Putus Sekolah, Pecahan KK yang belum memiliki Rumah, Perambah Hutan, Korban Konflik | | 20.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| 3. | **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | ***Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang*** | **-** | | | **5 Kawasan** | **3.000.000.000,00** | | | | | | **-** | **37.000.000.000,00** | |
| | 3.32.04.1.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | *Jumlah satuan permukiman yang mandiri* | - | | | 5 Kawasan | 3.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Warga Transmigran dan Masyarakat Sekitar Kawasan Transmigrasi | - | 37.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 3.32.04.1.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina* | | | | 23 Kepala Keluarga | 1.345.664.838,00 | - Kab. Aceh Barat, Sungai Mas, Drien Sibak<br>- Kab. Aceh Utara, Langkahan, Lubok Pusaka<br>- Kab. Bireuen, Peudada, Cot Kruet<br>- Kab. Pidie, Tangse, Paya Guci<br>- Kab. Simeulue, Teupah Selatan, Lataling<br>- Kab. Bener Meriah, Syiah Utama, Wehni Durin<br>- Kab. Pidie Jaya, Bandar Dua, Kumba | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Warga Transmigran dan Masyarakat Sekitar Kawasan Transmigrasi | | 12.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | 3.32.04.1.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan* | | | | 4 Satuan Permukiman | 1.654.335.162,00 | - Kab. Aceh Timur, Rantau Peureulak, Punti Payong<br>- Kab. Pidie, Tangse, Paya Guci<br>- Kab. Bener Meriah, Syiah Utama, Wehni Durin<br>- Kab. Pidie Jaya, Bandar Dua, Kumba | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Warga Transmigran dan Masyarakat Sekitar Kawasan Transmigrasi | | 25.000.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **17.038.392.520,00** | | | | | | | **19.651.081.601,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **17.038.392.520,00** | | | | | | | **19.651.081.601,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **17.038.392.520,00** | | | | | | | **19.651.081.601,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **13.761.925.384,00** | | | | | | **-** | **14.283.581.601,00** | |
| | 2.08.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase penyampaian laporan kinerja Pemerintah tepat waktu* | - | | | 100 % | 227.258.783,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | - | 281.962.531,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 58.130.481,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 82.501.529,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 169.128.302,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 199.461.002,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Peresentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan* | - | | | 100 % | 8.861.378.832,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | - | 9.020.619.070,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 59 Orang/ Bulan | 8.861.378.832,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 9.020.619.070,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Tingkat Kepatuhan Displin ASN* | - | | | 100 % | 47.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | - | 48.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 47.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 48.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pengadaan barang/jasa yang terealisasi* | - | | | 100 % | 1.201.336.925,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | - | 1.398.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 45.392.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 48.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 237.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 410.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 90.630.820,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 92.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 267.592.485,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 280.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 52.387.620,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 48.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 13.104.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 24 Laporan | 494.730.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik* | - | | | 100 % | 98.861.880,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | - | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 98.861.880,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah* | - | | | 100 % | 2.273.936.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | - | 2.313.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 20.780.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 22.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 331.072.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.922.084.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 1.941.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur* | - | | | 100 % | 1.052.152.964,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | - | 1.102.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 24 Unit | 569.480.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 587.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 161 Unit | 120.860.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 115.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 361.812.964,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh | | 400.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | ***Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA*** | **-** | | | **14,02 %** | **82.896.145,00** | | | | | | **-** | **320.000.000,00** | |
| | 2.08.02.1.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | *Persentase SKPA yang menyusun GAP/GBS* | - | | | 80 % | 47.396.145,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Pokja PUG dan Tim Teknis PPRG, Perencana SKPA, Fokal Point PUG, SKPA/Lembaga Masyarakat, SKPK Penggerak PUG | - | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.01.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi* | | | | 2 Laporan | 47.396.145,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Pokja PUG dan Tim Teknis PPRG, Perencana SKPA, Fokal Point PUG, SKPA/Lembaga Masyarakat, SKPK Penggerak PUG | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.02.1.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | *Persentase Kab/Kota yang difasilitasi pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan* | - | | | 82.5 % | 35.500.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Tokoh masyarakat, Organisasi, Aktivis dan Kader Partai | - | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.02.0003 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi* | | | | 50 Orang | 35.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Tokoh masyarakat, Organisasi, Aktivis dan Kader Partai | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | ***Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif*** | **-** | | | **100 %** | **1.222.997.280,00** | | | | | | **-** | **1.767.500.000,00** | |
| | 2.08.03.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kab/Kota yang direkomendasikan untuk penguatan kebijakan perlindungan perempuan* | - | | | 8 Kab/Kota | 57.515.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | - | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 57.515.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapat layanan penanganan kasus se Aceh* | - | | | 100 % | 1.005.967.280,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas PPPA PP kab/kota dan lembaga pemberi layanan | - | 1.217.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat* | | | | 120 Orang | 788.467.280,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas PPPA PP kab/kota dan lembaga pemberi layanan | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Layanan | 217.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas PPPA PP kab/kota dan lembaga pemberi layanan | | 217.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | *Arah kebijakan Kab/Kota untuk penguatan lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan* | - | | | 10 Kab/Kota | 159.515.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | - | 400.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 50 Orang | 36.235.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.03.0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 123.280.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | ***Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga*** | **-** | | | **64,5 %** | **237.103.855,00** | | | | | | **-** | **600.000.000,00** | |
| | 2.08.04.1.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | *Persentase kab/kota yang difasilitasi pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan* | - | | | 91.30 % | 107.700.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Perempuan korban konflik sosial/pelaku industri rumahan | - | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.1.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 2 Dokumen | 107.700.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Perempuan korban konflik sosial/pelaku industri rumahan | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.04.1.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | *Persentase kab/Kota yang di advokasi lembaga layanan PUSPAGA* | - | | | 32.04 % | 129.403.855,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur, SDM Penyedia Layanan, Masyarakat/Organisasi/Lembaga/Forum yang Fokus pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.1.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 320 Orang | 129.403.855,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur, SDM Penyedia Layanan, Masyarakat/Organisasi/Lembaga/Forum yang Fokus pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | ***Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan*** | **-** | | | **28,85 %** | **136.000.000,00** | | | | | | **-** | **400.000.000,00** | |
| | 2.08.05.1.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase SKPA/lembaga yang melaksanakan rekomendasi statistik gender dan anak* | - | | | 48.08 % | 136.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Pengelola Data SKPA/SKPA/Lembaga/Kab/Kota | - | 400.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia* | | | | 2 Dokumen | 40.700.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Pengelola Data SKPA/SKPA/Lembaga/Kab/Kota | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.1.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 95.300.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Pengelola Data SKPA/SKPA/Lembaga/Kab/Kota | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | ***Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA)*** | **-** | | | **30 %** | **429.999.856,00** | | | | | | **-** | **1.030.000.000,00** | |
| | 2.08.06.1.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | *Persentase keberfungsian kelembagaan PHA* | - | | | 13 % | 115.167.502,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Terkait Tokoh Masyrakat | - | 680.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 61.665.502,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Terkait Tokoh Masyrakat | | 280.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.01.0003 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi* | | | | 1 perangkat daerah | 53.502.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Terkait Tokoh Masyrakat | | 400.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | *Jumlah lembaga layanan kualitas hidup anak yang terakreditasi* | - | | | 55 Lembaga/ Layanan | 314.832.354,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Terkait Forum Anak/Kab/kota | - | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi* | | | | 300 Orang | 304.832.354,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bener Meriah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Terkait Forum Anak/Kab/kota | | 290.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02.0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak* | | | | 1 Kegiatan | 10.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Dinas Terkait Forum Anak/Kab/kota | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | ***Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif*** | **-** | | | **80 %** | **1.167.470.000,00** | | | | | | **-** | **1.250.000.000,00** | |
| | 2.08.07.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kab/ Kota yang direkomendasikan untuk membentuk PATBM* | - | | | 7 Kab/Kota | 83.720.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | - | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.01.0003 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi* | | | | 1 Orang | 83.720.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kab/ kota yang membentuk kelompok Layanan untuk AMPK* | - | | | 4 Kel | 1.083.750.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | - | 1.100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 63.750.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.03.0006 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi* | | | | 8 Dokumen | 1.020.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas/Intansi terkait, Dinas PPPA Kab/Kota, APH, Akademisi, TOMA, TOGA, Perangkat Desa, Karang Taruna Desa Pilot Project | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **DINAS PANGAN** | | | | | | **30.272.563.741,00** | | | | | | | **35.093.062.164,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **30.272.563.741,00** | | | | | | | **35.093.062.164,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **30.272.563.741,00** | | | | | | | **35.093.062.164,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **15.375.737.741,00** | | | | | | **-** | **16.416.062.164,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu* | - | | | 100 % | 1.280.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 1.408.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 370.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 407.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 430.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 473.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 480.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 528.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik* | - | | | 100 % | 10.530.101.204,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 11.056.606.264,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 69 Orang/ Bulan | 10.530.101.204,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 11.056.606.264,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase rerata kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah* | - | | | 100 % | 63.420.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 8 Orang | 63.420.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase rerata kinerja administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 671.168.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 753.684.800,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 20.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 22.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 86.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 110.000.000,00 | DINAS PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 37 Paket | 120.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 132.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 55.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 22.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 375.168.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 412.684.800,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase rerata kinerja jasa penunjang urusan perangkat daerah* | - | | | 100 % | 1.886.787.193,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 2.057.771.100,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 33.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 480.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 528.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.376.787.193,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 1.496.771.100,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Pesentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang ter pelihara dengan baik* | - | | | 100 % | 944.261.344,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 1.140.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 58 Unit | 639.430.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 730.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 204.831.344,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 300.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 83 Unit | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 110.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| 2. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | ***Ketersediaan Pangan Utama*** ***Ketersediaan Pangan Utama*** | **-** | | | **154,34 ahun Kg/Kapita/Tahun 154,34 Kg/Kapita/Tahun** | **2.500.000.000,00** | | | | | | **-** | **3.800.000.000,00** | |
| | 2.09.02.1.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | *Persentase infrastruktur pangan dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya yang disediakan pada tahun n* | - | | | 100 % | 2.500.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani dan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota | - | 3.800.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia* | | | | 4 Unit | 1.350.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani dan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota | | 1.800.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.02.1.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia* | | | | 4 Unit | 250.000.000,00 | - Kab. Aceh Singkil, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gayo Lues, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani dan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota | | 500.000.000,00 | DINAS PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia* | | | | 4 Unit | 900.000.000,00 | - Kab. Aceh Singkil, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Gayo Lues, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pidie Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani dan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota | | 1.500.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| 3. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | ***Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*** | **-** | | | **100 %** | **7.976.826.000,00** | | | | | | **-** | **9.310.000.000,00** | |
| | 2.09.03.1.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Utama* | - | | | <5 % | 3.250.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 3.860.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 110.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis* | | | | 1 Laporan | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 1.100.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.0011 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | | | | 22 Unit | 2.100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 2.500.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 150.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | *Jumlah Total Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelolah sampai pada tahun n* | - | | | 433 Ton | 850.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 1.100.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.02.0007 | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi* | | | | 20 Ton | 850.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 1.100.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.04 | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | *Angka kecukupan konsumsi energi*<br>*Angka kecukupan konsumsi protein* | - | | | 2115 Kkal/kap/hr<br>61,03 Gram/Kap/hr | 3.876.826.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani | - | 4.350.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.04.0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Dokumen | 950.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani | | 1.500.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)* | | | | 1 Laporan | 2.626.826.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani | | 2.500.000.000,00 | DINAS PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.03.1.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | | | | 3 Laporan | 300.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Kelompok Tani | | 350.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| 4. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | ***Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan*** | **-** | | | **7,61 %** | **1.770.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.017.000.000,00** | |
| | 2.09.04.1.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | *Persentase dukungan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi yang disusun* | - | | | 100 % | 350.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 385.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.04.1.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan* | | | | 2 Dokumen | 350.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 385.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.04.1.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | *Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani* | - | | | 4 Kecamatan | 1.420.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | - | 1.632.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.04.1.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 1.500.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi* | | | | 1 Laporan | 120.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | SKPA | | 132.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| 5. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | ***Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan*** | **-** | | | **100 %** | **2.650.000.000,00** | | | | | | **-** | **3.550.000.000,00** | |
| | 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan pengawasan keamanan pangan segar distribusi antar daerah kab/kota yang disusun Jumlah pelaku pangan segar asal tumbuhan yang diregistrasi, disertifikasi dan direkomendasi* | - | | | 1 Laporan 35 Pelaku Usaha | 2.650.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | - | 3.550.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 15 Sertifikat | 300.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | | 350.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.0007 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan* | | | | 10 Dokumen | 200.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | | 250.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan* | | | | 10 Dokumen | 200.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | | 250.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Dokumen | 950.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | | 1.200.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | | 1.500.000.000,00 | DINAS PANGAN |
| | | **DINAS PERTANAHAN** | | | | | | **15.843.127.249,00** | | | | | | | **19.483.097.773,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **15.843.127.249,00** | | | | | | | **19.483.097.773,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **15.843.127.249,00** | | | | | | | **19.483.097.773,00** | |
| 1. | **2.10.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **11.693.778.840,00** | | | | | | **-** | **12.611.990.490,00** | |
| | 2.10.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen DPA 2023,Tersedianya Dokumen RKA 2023 Tersedianyan Dokumen Perubahan DPA 2022 ,Tersedianya Dokumen Perubahan RKA 2022* | - | | | 8 dokumen | 901.666.950,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 940.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 242.800.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 368.391.950,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 380.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 290.475.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 310.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang tersusun tepat waktu (LAKIP,Renja, Lap.Keuangan, Lap Realisasi dll)* | - | | | 1 Tahun | 7.488.507.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 7.700.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 45 Orang/ Bulan | 6.406.567.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 6.500.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1.081.940.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Teselenggaranya Tertib Laporan Aset* | - | | | 1 Dokumen | 71.893.953,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 85.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 71.893.953,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 85.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian* | - | | | 69 ASN/Non ASN | 327.373.233,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 425.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 5 Unit | 109.377.430,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 61.602.090,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 85.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 45 Orang | 120.954.000,00 | - Kab. Aceh Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 56 Orang | 35.439.713,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Kegiatan Administrasi Umum yang terlaksana* | - | | | 12 Bulan | 722.961.531,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 895.500.490,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 31.170.450,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 45.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 120.250.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 130.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 23.000.000,00 | - Kab. Aceh Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 45.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 132.671.490,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 150.000.490,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 58.705.591,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 83.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12.600.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 13.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 35.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 39.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 309.564.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 389.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Kebutuhan Barang* | - | | | 1 Tahun | 16.727.030,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 17.890.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 16.727.030,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 17.890.000,00 | DINAS PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksannya Penunjang Pemerintah Daerah* | - | | | 12 Bulan | 721.039.554,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 919.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 12.345.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 274.387.454,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 294.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 434.307.100,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 610.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah* | - | | | 12 Bulan | 1.443.609.589,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.629.100.000,00 | DINAS PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 15 Unit | 341.920.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 389.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 1.017.714.424,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.150.100.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 83.975.165,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 89.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 2. | **2.10.03** | **PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | ***Persentase meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum*** | **-** | | | **59 %** | **342.826.000,00** | | | | | | **-** | **354.000.000,00** | |
| | 2.10.03.7.02 | Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi | *Jumlah data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPMJD, Renstra, RKPD, DIPA)* | - | | | 1 dokumen | 342.826.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 354.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.03.7.02.0001 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)* | | | | 1 Dokumen | 342.826.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 354.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 3. | **2.10.07** | **PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT** | ***Persentase sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan*** | **-** | | | **65 %** | **215.000.000,00** | | | | | | **-** | **280.000.000,00** | |
| | 2.10.07.1.01 | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *jumlah laporan survei dan pemetaan batas Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* | - | | | 65 persen | 215.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 280.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.07.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 215.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 280.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 4. | **2.10.12** | **PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH** | ***Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin*** | **-** | | | **1000 Persil** | **1.320.393.868,00** | | | | | | **-** | **3.381.120.000,00** | |
| | 2.10.12.7.01 | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah | *tersediannya dokumen kepemilikan tanah aset pemerintah* | - | | | 1 dokumen | 1.090.393.868,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.131.120.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.12.7.01.0001 | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data aset Tanah Pemerintah* | | | | 1 Laporan | 1.090.393.868,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.131.120.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.12.7.02 | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin | *tersediannya dokumen kepemilikan tanah masyarakat miskin* | - | | | 1 dokumen | 230.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 250.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.12.7.02.0001 | Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin* | | | | 1 Laporan | 230.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 5. | **2.10.13** | **PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN** | ***Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan*** | **-** | | | **22 %** | **570.000.000,00** | | | | | | **-** | **600.000.000,00** | |
| | 2.10.13.7.01 | Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | *Jumlah Dokumen Survei ,Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat* | - | | | 22 persen | 570.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 600.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.13.7.01.0001 | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda* | | | | 1 Dokumen | 570.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 600.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 6. | **2.10.14** | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN** | ***Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri*** | **-** | | | **75 %** | **450.000.000,00** | | | | | | **-** | **515.000.000,00** | |
| | 2.10.14.7.01 | Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi | *Meningkatnya Kualitas Layanan Kelembagaan Pertanahan Kabupaten/Kota* | - | | | 1 dokumen | 200.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 215.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.14.7.01.0001 | Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 215.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.14.7.02 | Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan | *Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pertanahan* | - | | | 1 dokumen | 250.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 300.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.14.7.02.0001 | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti kegiatan Pembinaan Pertanahan* | | | | 300 Orang | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 7. | **2.10.16** | **PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN** | ***Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri*** | **-** | | | **74 %** | **1.001.128.541,00** | | | | | | **-** | **1.440.987.283,00** | |
| | 2.10.16.7.01 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | *jumlah dokumen peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIM TANAH)* | - | | | 74 persen | 1.001.128.541,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.440.987.283,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.16.7.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)* | | | | 1 Dokumen | 504.997.280,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 605.987.283,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.16.7.01.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 650.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.16.7.01.0003 | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)* | | | | 1 Dokumen | 296.131.261,00 | - Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 185.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 8. | **2.10.17** | **PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN** | ***Terfasilitasinya Mediasi Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan*** | **-** | | | **53 %** | **250.000.000,00** | | | | | | **-** | **300.000.000,00** | |
| | 2.10.17.7.01 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan | *terfasilitasinya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan* | - | | | 1 dokumen | 250.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 300.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.17.7.01.0001 | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN** | | | | | | **161.047.630.699,00** | | | | | | | **176.276.945.457,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **98.095.733.686,00** | | | | | | | **109.114.577.957,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **98.095.733.686,00** | | | | | | | **109.114.577.957,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **87.370.786.764,00** | | | | | | **-** | **94.772.694.832,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi* | - | | | 7 Dokumen | 1.091.616.591,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Stakeholder | - | 1.294.883.639,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 350.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Stakeholder | | 423.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 741.616.591,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Stakeholder | | 871.383.639,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Keuanga* | - | | | 26 Dokumen | 82.192.466.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara (ASN dan Non ASN | - | 85.263.183.181,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 601 Orang/ Bulan | 78.992.177.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara (ASN dan Non ASN | | 82.029.536.633,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 3.030.610.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara (ASN dan Non ASN | | 3.030.610.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 6 Dokumen | 40.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara (ASN dan Non ASN | | 48.400.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 19 Laporan | 129.679.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Sipil Negara (ASN dan Non ASN | | 154.636.548,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah laporan penataausahaan barang milik daerah* | - | | | 19 Laporan | 200.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | Barang Milik Negara | - | 423.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 19 Laporan | 200.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | Barang Milik Negara | | 423.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan* | - | | | 13 Orang | 75.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur | - | 96.800.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 13 Orang | 75.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur | | 96.800.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor* | - | | | 1 Paket | 1.013.824.138,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | - | 2.990.550.322,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 41.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | | 65.523.149,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | | 982.954.148,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 280.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | | 478.164.618,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | | 157.841.667,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 180.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | | 164.129.240,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 332.824.138,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | | 1.028.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Sarpras Perkantoran | | 113.437.500,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah BMD yang tersedia* | - | | | 1 Paket | 46.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Barang Milik Negara | - | 797.391.452,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 46.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Barang Milik Negara | | 797.391.452,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa penunjang pelaksanaan tugas* | - | | | 5 Laporan | 1.721.517.904,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Tagihan Listrik, Air, telepon, dll | - | 2.111.895.500,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 56.571.904,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Tagihan Listrik, Air, telepon, dll | | 62.012.500,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 600.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Tagihan Listrik, Air, telepon, dll | | 983.125.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.064.946.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Tagihan Listrik, Air, telepon, dll | | 1.066.758.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang dipelihara* | - | | | 370 unit | 1.030.362.131,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Barang Milik Negara | - | 1.794.490.738,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 242.340.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Barang Milik Negara | | 293.231.400,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 36 Unit | 380.820.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Barang Milik Negara | | 460.792.200,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 322 Unit | 251.010.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Barang Milik Negara | | 303.722.100,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 156.192.131,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Barang Milik Negara | | 736.745.038,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP** | ***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*** | **-** | | | **76.48 Indeks** | **736.965.410,00** | | | | | | **-** | **1.208.633.838,00** | |
| | 2.11.02.1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | *Dokumen RPLLH* | - | | | 3 Dokumen | 436.965.410,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Masyarakat | - | 708.633.838,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.02.1.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi* | | | | 3 Dokumen | 436.965.410,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan Masyarakat | | 708.633.838,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.02.1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | *Dokumen KLHS Provinsi* | - | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Stakeholder dan Masyarakat | - | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.02.1.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Stakeholder dan Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air (IKA)*** | **-** | | | **73,52 Indeks 60,5 Indeks** | **2.432.977.619,00** | | | | | | **-** | **2.904.278.044,00** | |
| | 2.11.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | *Laporan Inventarisasi GRK dan Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim* | - | | | 2 Laporan | 2.432.977.619,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Air sungai, Danau, Laut dan Gampong Iklim | - | 2.904.278.044,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 10 Dokumen | 255.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Air sungai, Danau, Laut dan Gampong Iklim | | 400.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan* | | | | 3 Dokumen | 450.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Air sungai, Danau, Laut dan Gampong Iklim | | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.03.1.01.0010 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | | | | 17 Kegiatan | 140.899.130,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Air sungai, Danau, Laut dan Gampong Iklim | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.03.1.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 3 Dokumen | 1.587.078.489,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Tibang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Air sungai, Danau, Laut dan Gampong Iklim | | 2.183.278.044,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | ***Indeks Kualitas Udara*** | **-** | | | **88,71 Indeks** | **85.000.000,00** | | | | | | **-** | **100.000.000,00** | |
| | 2.11.04.1.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | *Laporan capaian ruang terbuka hijau* | - | | | 1 Laporan | 85.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten/Kota | - | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.04.1.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Ha | 85.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten/Kota | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | ***Persentase Pengelolaan Limbah B3*** | **-** | | | **68,09 %** | **93.500.000,00** | | | | | | **-** | **121.000.000,00** | |
| | 2.11.05.1.01 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Laporan penanganan limbah B3* | - | | | 1 Dokumen | 93.500.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Limbah B3 | - | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya* | | | | 1 Dokumen | 93.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Limbah B3 | | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | ***Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup*** | **-** | | | **36,50 %** | **165.000.000,00** | | | | | | **-** | **225.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | *Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan* | - | | | 20 Laporan | 165.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Izin Usaha Lingkungan | - | 225.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan* | | | | 15 Dokumen | 165.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Izin Usaha Lingkungan | | 225.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 7. | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | ***Jumlah verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional*** | **-** | | | **2 Dokumen** | **50.000.000,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | 2.11.07.1.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | *Jumlah dokumen kelembagaan MHA yang telah terverifikasi* | - | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Hukum Adat | - | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.07.1.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan* | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Hukum Adat | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 8. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Persentase penanganan sampah*** | **-** | | | **35,5 %** | **410.000.000,00** | | | | | | **-** | **677.600.000,00** | |
| | 2.11.08.1.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah pelatihan pengelolaan sampah dan Jumlah data dan informasi penangan sampah di Aceh* | - | | | 6 Dokumen | 410.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Stakeholder dan Masyarakat | - | 677.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.08.1.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 6 Dokumen | 410.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Stakeholder dan Masyarakat | | 677.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 9. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Pemberian penghargaan lingkungan hidup*** | **-** | | | **Ada Ada/Tidak Ada** | **202.242.000,00** | | | | | | **-** | **268.912.820,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.09.1.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | - | | | 16 Kelompok | 202.242.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kabupaten/kota | - | 268.912.820,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.09.1.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 16 Entitas | 202.242.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kabupaten/kota | | 268.912.820,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 10. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup*** | **-** | | | **1 Tahun** | **85.387.000,00** | | | | | | **-** | **100.000.000,00** | |
| | 2.11.10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | *Jumlah pengaduan masyarakat* | - | | | 3 Kasus | 85.387.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat dan pemilik izin usaha | - | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.10.1.01.0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 3 Pengaduan | 85.387.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Masyarakat dan pemilik izin usaha | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 11. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | ***Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*** | **-** | | | **48 Indeks** | **6.463.874.893,00** | | | | | | **-** | **8.586.458.423,00** | |
| | 2.11.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | *Jumlah sampah yang terkelola di TPA/TPST Regional* | - | | | 108000 Ton | 6.463.874.893,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Stakeholder dan Masyarakat | - | 8.586.458.423,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.11.1.01.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik* | | | | 1 Unit | 3.487.114.727,00 | - Kab. Aceh Besar, Blang Bintang, Data Makmur | DANA OTONOMI KHUSUS | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Stakeholder dan Masyarakat | | 5.082.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 2.11.11.1.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 2.976.760.166,00 | - Kab. Aceh Besar, Blang Bintang, Data Makmur | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur Stakeholder dan Masyarakat | | 3.504.458.423,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **62.951.897.013,00** | | | | | | | **67.162.367.500,00** | |
| | **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **62.951.897.013,00** | | | | | | | **67.162.367.500,00** | |
| 1. | **3.28.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | ***Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis*** | **-** | | | **0,03 %<br>3,2 %** | **59.425.593.200,00** | | | | | | **-** | **60.868.284.037,00** | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | *Tersedianya operasonal dan sapras kantor KPH serta adanya kepastian peruntukan dan fungsi kawasan hutan* | - | | | 1 Kegiatan | 2.515.365.265,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | UPTD KPH I - VI | - | 4.093.721.217,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.01.0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 2.215.365.265,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | UPTD KPH I - VI | | 3.700.471.217,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi* | | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | UPTD KPH I - VI | | 393.250.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | *Dokumen data dukung pemanfaatan kawasan hutan* | - | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kawasan Hutan | - | 522.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.03.0002 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kawasan Hutan | | 522.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | *Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat dan penghijauan lingkungan* | - | | | 3000 Hektar | 7.688.261.200,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Lahan Kritis dan Kelompom Tani Hutan | - | 4.019.554.640,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara* | | | | 2500 Ha | 7.275.538.800,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Lahan Kritis dan Kelompom Tani Hutan | | 3.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara* | | | | 500 Ha | 312.722.400,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Lahan Kritis dan Kelompom Tani Hutan | | 398.554.640,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Lahan Kritis dan Kelompom Tani Hutan | | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | *Terlasananya Sapras pengamanan hutan, honor pamhut, tindak pidana kehutanan* | - | | | 5 Dokumen | 48.621.966.735,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan pamhut | - | 51.946.508.180,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan* | | | | 600000 Ha | 1.208.966.735,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA OTONOMI KHUSUS | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan pamhut | | 4.001.408.870,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan* | | | | 4 Dokumen | 47.013.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan pamhut | | 47.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun* | | | | 1 Laporan | 400.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Aparatur dan pamhut | | 445.099.310,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | *Terlaksananya monev pembinaan peredaran hasil hutan* | - | | | 50 Dokumen | 250.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Industri Hasil Hutan | - | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Dokumen | 250.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Industri Hasil Hutan | | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | *Terlaksananya monev tata usaha perbenihan tanaman hutan* | - | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Usaha Perbenihan Tanaman Kehutanan | - | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.09.0001 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi* | | | | 50 Unit Usaha | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Usaha Perbenihan Tanaman Kehutanan | | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 2. | **3.28.04** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | ***Penanganan konflik satwa*** | **-** | | | **76,50 %** | **2.368.592.639,00** | | | | | | **-** | **4.947.141.713,00** | |
| | 3.28.04.1.01 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | *Terlaksananya pengamanan dan pemanfaatan jasa lingkungan tahura* | - | | | 2 Dokumen | 843.592.639,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Tahura Poucut Meurah Intan | - | 1.856.079.887,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.04.1.01.0002 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi* | | | | 30 Operasi | 633.927.855,00 | - Kab. Aceh Besar, Lembah Seulawah, Saree Aceh | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Tahura Poucut Meurah Intan | | 450.257.940,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.04.1.01.0006 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti* | | | | 3 Permohonan | 209.664.784,00 | - Kab. Aceh Besar, Lembah Seulawah, Saree Aceh | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Tahura Poucut Meurah Intan | | 1.405.821.947,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.04.1.03 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | *terlakananya pengelolaan kawasan gambut dan operasional CRU* | - | | | 5 Unit | 1.525.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kawasan Gambut dan CRU | - | 3.091.061.826,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.04.1.03.0004 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani* | | | | 50 Ha | 125.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kawasan Gambut dan CRU | | 504.570.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.04.1.03.0006 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola* | | | | 322990 Ha | 1.400.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Kawasan Gambut dan CRU | | 2.586.491.826,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 3. | **3.28.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | ***Pemberdayaan kelompok tani hutan*** | **-** | | | **14,33 %** | **1.107.711.174,00** | | | | | | **-** | **1.225.941.750,00** | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | *Terlaksananya penyuluhan kehutanan yang responsif gender, KTH, PS* | - | | | 3 Dokumen | 1.107.711.174,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Penyuluh dan kelompok Tani Hutan | - | 1.225.941.750,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas* | | | | 56 Orang | 327.700.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Penyuluh dan kelompok Tani Hutan | | 387.200.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial* | | | | 20000 Ha | 780.011.174,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Penyuluh dan kelompok Tani Hutan | | 838.741.750,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **3.28.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | ***Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan*** | **-** | | | **50,18 Rasio** | **50.000.000,00** | | | | | | **-** | **121.000.000,00** | |
| | 3.28.06.1.01 | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Terlaksananya sapras pengelolaan KTH dalam pengelolaan DAS* | - | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Wilayah daerah Aliran Sungai | - | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.06.1.01.0002 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Wilayah daerah Aliran Sungai | | 121.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | **DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | **14.050.880.522,00** | | | | | | | **14.652.966.015,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **14.050.880.522,00** | | | | | | | **14.652.966.015,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **14.050.880.522,00** | | | | | | | **14.652.966.015,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **12.285.551.612,00** | | | | | | **-** | **11.796.966.015,00** | |
| | 2.12.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)* | - | | | 100 % | 427.759.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 607.842.015,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 20 Dokumen | 254.750.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 286.425.015,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 55.894.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 18.400.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 52.199.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 154.609.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 213.324.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi* | - | | | 100 % | 7.043.116.233,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 7.490.500.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 50 Orang/ Bulan | 6.954.116.233,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 7.490.500.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 89.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai* | - | | | 100 % | 46.428.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 60.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 46.428.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 60.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.664.932.030,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 964.939.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 200 Paket | 9.030.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 9.939.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 17 Paket | 1.079.786.945,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 305.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3432 Paket | 71.833.735,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 72.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 70.250.350,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 78.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 434.031.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 500.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur* | - | | | 100 % | 2.200.385.912,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.727.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 56.953.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 72.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 314.879.912,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.828.553.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.355.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 902.930.437,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 946.685.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 247.275.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 368.685.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 510.378.053,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 403.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 145.277.384,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 175.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | ***Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk*** | **-** | | | **98,40 %** | **500.328.800,00** | | | | | | **-** | **760.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.02.1.01 | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | *Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk* | - | | | 75 % | 158.188.800,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 215.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.02.1.01.0002 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 52.746.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 85.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 105.442.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 130.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.02.1.02 | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | *Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk* | - | | | 75 % | 242.140.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 425.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.02.1.02.0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk* | | | | 5 Laporan | 224.415.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 358.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.02.1.02.0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Laporan | 17.725.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 67.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.02.1.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | *Presentase Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan* | - | | | 75 % | 100.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 120.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.02.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 120.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | ***Meningkatkan Kebijakan dibidang Pencatatan Sipil*** | **-** | | | **97 %** | **425.703.000,00** | | | | | | **-** | **698.000.000,00** | |
| | 2.12.03.1.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil* | - | | | 75 % | 107.535.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 206.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.03.1.01.0001 | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 107.535.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 206.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.03.1.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | *Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil* | - | | | 75 % | 18.620.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 72.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.03.1.02.0002 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil* | | | | 1 Laporan | 18.620.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 72.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.03.1.03 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *Presentase Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan* | - | | | 75 % | 299.548.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 420.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.03.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 120.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.03.1.03.0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 4 Laporan | 199.548.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | ***Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk*** | **-** | | | **98,4 %** | **714.671.110,00** | | | | | | **-** | **1.216.000.000,00** | |
| | 2.12.04.1.02 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | *Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan urusan adminduk skala provinsi* | - | | | 75 % | 380.446.110,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 796.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.04.1.02.0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 154.771.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 250.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.04.1.02.0004 | Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 39.149.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 197.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.04.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 86.893.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 199.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.04.1.02.0006 | Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi* | | | | 1 Dokumen | 99.632.710,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 150.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.04.1.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | *Presentase Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan* | - | | | 75 % | 334.225.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 420.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.04.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 120.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.04.1.03.0002 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan* | | | | 50 Orang | 234.225.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | ***Profil Perkembangan Kependudukan*** | **-** | | | **1 Database** | **124.626.000,00** | | | | | | **-** | **182.000.000,00** | |
| | 2.12.05.1.01 | Penyediaan Profil Kependudukan | *Buku Pelaporan Penyelenggaraan adminduk Serta Buku Profil Kependudukan* | - | | | 100 % | 124.626.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 182.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | 2.12.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia* | | | | 2 Dokumen | 124.626.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 182.000.000,00 | DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** | | | | | | **20.758.393.184,00** | | | | | | | **23.747.396.854,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **20.758.393.184,00** | | | | | | | **23.747.396.854,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **20.758.393.184,00** | | | | | | | **23.747.396.854,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **14.810.687.283,00** | | | | | | **-** | **15.089.860.509,00** | |
| | 2.13.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tersusun tepat waktu* | - | | | 95 Persen | 682.018.831,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | - | 700.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 237.954.831,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 444.064.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase administrasi keuangan tepat waktu* | - | | | 95 Persen | 9.755.685.645,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | - | 9.930.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 68 Orang/ Bulan | 9.538.871.413,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 9.700.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 216.814.232,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 230.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi kepegawaian* | - | | | 95 Persen | 130.396.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | - | 76.744.066,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 68 Orang | 130.396.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 76.744.066,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum* | - | | | 95 Persen | 886.266.749,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | - | 1.095.264.585,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 10.156.200,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 10.580.903,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 21.885.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 260.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 365.188.069,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 318.795.991,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 47.930.280,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 52.418.825,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 12.121.200,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 15.293.880,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 428.986.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 438.074.986,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan barang milik daerah berkualitas* | - | | | 95 Persen | 6.660.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | - | 645.339.312,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 6.660.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 645.339.312,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang pelayanan perkantoran* | - | | | 95 Persen | 2.240.840.058,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | - | 1.566.156.984,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 30.850.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 22.732.740,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 364.770.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 321.713.757,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 161.042.576,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 180.509.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.684.177.482,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 1.041.201.087,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan pemeliharaan barang milik daerah* | - | | | 95 Persen | 1.108.820.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | - | 1.076.355.562,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 29 Unit | 655.820.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 583.829.351,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 453.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur DPMG Aceh | | 492.526.211,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| 2. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | ***Rasio gampong yang melakukan kerjasama*** | **-** | | | **0,61 Rasio** | **193.672.400,00** | | | | | | **-** | **390.327.528,00** | |
| | 2.13.03.1.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | *Jumlah desa yang melakukan kerjasama dan jumlah kawasan yang produktif* | - | | | 40 Desa | 193.672.400,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Kawasan Perdesaan, Pemerintah Kab/Kota | - | 390.327.528,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.03.1.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota* | | | | 27 Dokumen | 44.384.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Kawasan Perdesaan, Pemerintah Kab/Kota | | 90.327.528,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.03.1.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | | | | 3 Dokumen | 149.288.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur Gampong, Kawasan Perdesaan, Pemerintah Kab/Kota | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| 3. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | ***Rasio desa mandiri*** | **-** | | | **1,1 Rasio** | **2.092.100.823,00** | | | | | | **-** | **2.862.475.030,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.04.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | *Jumlah gampong yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi* | - | | | 440 Gampong | 2.092.100.823,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Pemerintah Gampong, Operator Gampong, Pemerintah Kab/Kota, Pendamping Desa, Kecamatan | - | 2.862.475.030,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.04.1.01.0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 3 Dokumen | 274.290.262,00 | - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Pemerintah Gampong, Operator Gampong, Pemerintah Kab/Kota, Pendamping Desa, Kecamatan | | 234.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.04.1.01.0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 17 Dokumen | 790.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Pemerintah Gampong, Operator Gampong, Pemerintah Kab/Kota, Pendamping Desa, Kecamatan | | 1.092.420.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.04.1.01.0009 | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan* | | | | 200 Dokumen | 280.815.854,00 | - Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Langsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Pemerintah Gampong, Operator Gampong, Pemerintah Kab/Kota, Pendamping Desa, Kecamatan | | 235.349.199,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.04.1.01.0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina* | | | | 20 Orang | 80.864.799,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Pemerintah Gampong, Operator Gampong, Pemerintah Kab/Kota, Pendamping Desa, Kecamatan | | 421.638.489,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.04.1.01.0012 | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis* | | | | 6488 Dokumen | 516.868.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Pemerintah Gampong, Operator Gampong, Pemerintah Kab/Kota, Pendamping Desa, Kecamatan | | 578.467.342,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.04.1.01.0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 200 Dokumen | 149.261.908,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Gampong, Pemerintah Gampong, Operator Gampong, Pemerintah Kab/Kota, Pendamping Desa, Kecamatan | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| 4. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | ***Rasio BUMG yang berkembang***<br>***Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif*** | **-** | | | **0,11 Rasio**<br>**0,62 Rasio** | **3.661.932.678,00** | | | | | | **-** | **5.404.733.787,00** | |
| | 2.13.05.1.01 | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah BUMG yang berkembang*<br>*Jumlah lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif* | - | | | 45 BUMG<br>76 Lembaga | 3.661.932.678,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Gampong, BUMG, Pelaku TTG | - | 5.404.733.787,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 23 Dokumen | 423.110.000,00 | - Kab. Aceh Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Subulussalam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Gampong, BUMG, Pelaku TTG | | 553.561.531,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.05.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya* | | | | 36 Lembaga | 209.856.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bener Meriah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Gampong, BUMG, Pelaku TTG | | 689.341.532,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.05.1.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 45 Dokumen | 1.099.328.519,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Gampong, BUMG, Pelaku TTG | | 2.126.572.658,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.05.1.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 5 Laporan | 929.638.159,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Gampong, BUMG, Pelaku TTG | | 1.093.478.087,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2.13.05.1.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 23 Laporan | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Gampong, BUMG, Pelaku TTG | | 941.779.979,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | **101.629.536.979,00** | | | | | | | **120.943.796.860,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **101.629.536.979,00** | | | | | | | **120.943.796.860,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **101.629.536.979,00** | | | | | | | **120.943.796.860,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **51.057.867.509,00** | | | | | | **-** | **54.015.976.860,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun* | - | | | 78 Persentase | 633.782.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 633.782.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan ASN* | - | | | 96.3 % | 28.951.105.042,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 29.840.933.860,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 217 Orang/ Bulan | 26.605.577.042,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 27.341.653.860,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 2.345.528.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.499.280.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai yang dilayani dengan jumlah pegawai*<br>*Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat* | - | | | 0.30 Rasio<br>30 % | 523.264.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 550.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 40 Orang | 523.264.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 550.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 93.2 % | 5.533.235.891,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.330.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 170.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 180.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 1.227.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1.392.451.233,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 442.960.858,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 280.998.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2.019.325.800,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 94.1 % | 6.732.860.576,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.995.043.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 2.551.472.576,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 4.137.388.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.145.043.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Aceh* | - | | | 97.8 % | 8.683.620.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 9.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 32 Unit | 836.850.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 1.540.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 5.275.170.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 5.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 1.031.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | ***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan*** | **-** | | | **85,84 Indeks** | **38.071.705.470,00** | | | | | | **-** | **46.427.820.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | *Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di ruas Jalan Provinsi* | - | | | 59.33 % | 4.911.994.406,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 8.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia* | | | | 3 Unit | 4.475.601.406,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 2 Unit | 436.393.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | *Persentase Prasarana Terminal Penumpang Tipe B sesuai SPM* | - | | | 71 % | 11.195.080.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 15.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 2 Unit | 11.195.080.000,00 | - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 15.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | *Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Terlaksana* | - | | | 100 % | 2.205.549.722,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 3.565.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi* | | | | 1 Laporan | 896.306.360,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi* | | | | 3 Dokumen | 687.052.362,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi* | | | | 3 Laporan | 357.864.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi* | | | | 1 Laporan | 264.327.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 265.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.06 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | *Persentase Pengajuan Andalalin yang Disetujui* | - | | | 100 % | 97.690.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 97.820.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.06.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi* | | | | 2 Laporan | 97.690.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 97.820.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | *Persentase Kegiatan Audit LLAJ yang Terlaksana* | - | | | 30 % | 345.465.954,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 265.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum* | | | | 1 Laporan | 345.465.954,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 265.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Tingkat Keterisian Angkutan Massal Trans Kutaraja* | - | | | 71.8 % | 19.315.925.388,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 19.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.08.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi* | | | | 1 Laporan | 1.260.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 2 Unit | 18.055.925.388,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 18.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | ***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan*** | **-** | | | **77,36 Indeks** | **10.385.700.000,00** | | | | | | **-** | **18.000.000.000,00** | |
| | 2.15.03.1.08 | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | *Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memiliki Dokumen Lingkungan* | - | | | 2 Pelabuhan | 1.961.400.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 2.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.08.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional* | | | | 2 Dokumen | 1.961.400.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.09 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | *Persentase Prasarana Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM* | - | | | 72 % | 8.424.300.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 16.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.03.1.09.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara* | | | | 7 Unit | 6.108.220.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 10.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.09.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional* | | | | 1 Laporan | 2.316.080.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 6.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 4. | **2.15.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | ***Rasio Regulasi dan Dokumen Penelitian Bidang Transportasi yang Terimplementasi / Tersusun*** | **-** | | | **0.67 Rasio** | **2.114.264.000,00** | | | | | | **-** | **2.500.000.000,00** | |
| | 2.15.05.1.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | *Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Transportasi Tersusun* | - | | | 3 Dokumen | 2.114.264.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 2.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.05.1.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian* | | | | 2 Dokumen | 2.114.264.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** | | | | | | **37.481.686.319,00** | | | | | | | **42.650.556.529,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **37.481.686.319,00** | | | | | | | **42.650.556.529,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **35.781.686.319,00** | | | | | | | **41.050.556.529,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **21.537.486.319,00** | | | | | | **-** | **23.847.094.529,00** | |
| | 2.16.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)* | - | | | 100 % | 415.760.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 457.336.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 8 Dokumen | 415.760.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 457.336.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 100 % | 13.865.899.362,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 15.030.872.881,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 98 Orang/ Bulan | 13.865.899.362,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 15.030.872.881,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran* | - | | | 100 % | 1.672.296.226,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.745.545.644,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Paket | 45.327.930,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 54.490.730,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Paket | 922.710.670,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 960.443.776,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Paket | 98.580.508,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.237.538,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Dokumen | 23.976.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 26.373.600,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Bulan Laporan | 581.701.118,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 600.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran* | - | | | 100 % | 4.122.639.744,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.458.340.004,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Bulan Laporan | 22.212.104,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 24.431.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Laporan | 1.303.553.640,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.433.909.004,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Laporan | 2.796.874.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran* | - | | | 100 % | 1.460.890.987,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.155.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Bulan Unit | 479.089.771,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 950.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Bulan Unit | 161.195.532,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 205.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 820.605.684,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | ***Nilai (IKIP)***<br>***Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)*** | **-** | | | **79,70 Indeks**<br>**79,70 Indeks** | **6.104.200.000,00** | | | | | | **-** | **8.665.962.000,00** | |
| | 2.16.02.1.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | *Jumlah akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik* | - | | | 5030 Informasi | 6.104.200.000,00 | | | - | - | - | - | 8.665.962.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik* | | | | 12 Dokumen | 450.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 550.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik* | | | | 8 Dokumen | 24.080.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik* | | | | 3 Dokumen | 389.832.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 704.150.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik* | | | | 3 Dokumen | 1.400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.600.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0007 | Layanan Hubungan Media | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Hubungan Media* | | | | 15 Layanan | 401.500.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 933.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan* | | | | 1 Dokumen | 84.092.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 254.116.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0009 | Manajemen Komunikasi Krisis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 0 Orang | 54.336.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 429.336.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah* | | | | 40 Dokumen | 2.800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan* | | | | 10 dokumen Dokumen | 348.860.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 645.060.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.1.01.0013 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi* | | | | 0 Unit | 1.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | ***Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh*** | **-** | | | **3,40 Indeks** | **8.140.000.000,00** | | | | | | **-** | **8.537.500.000,00** | |
| | 2.16.03.1.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | *Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah* | - | | | 10 Domain | 477.940.317,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 197.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.1.01.0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi* | | | | 7 Domain | 5.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 7.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.1.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi* | | | | 6 Dokumen | 170.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 190.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.1.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah* | | | | 0 Unit | 302.940.317,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.1.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | *Jumlah Layanan Penggunaan Sistem Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* | - | | | 18 Layanan | 7.662.059.683,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 8.340.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.1.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi* | | | | 4 Dokumen | 80.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.03.1.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola* | | | | 0 Unit | 5.582.059.683,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 6.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.1.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan* | | | | 7 Unit | 1.800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.1.02.0011 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)* | | | | 7 Dokumen | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 240.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **850.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | ***Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah*** | **-** | | | **60 Data** | **850.000.000,00** | | | | | | **-** | **400.000.000,00** | |
| | 2.20.02.1.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | *Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Aceh* | - | | | 60 Data | 850.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral* | | | | 2 Dokumen | 261.910.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.1.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi* | | | | 15 Orang | 90.315.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.1.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun* | | | | 2 Dokumen | 140.551.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS* | | | | 15 Orang | 266.100.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.1.01.0006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun* | | | | 2 Dokumen | 91.124.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **850.000.000,00** | | | | | | | **1.200.000.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | ***Persentase Keamanan Siber*** | **-** | | | **95 %** | **850.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.200.000.000,00** | |
| | 2.21.02.1.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | *Persentase Keamanan Siber dan Sandi di Pemerintah Daerah* | - | | | 95 % | 747.250.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.050.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.1.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan* | | | | 12 Dokumen | 171.521.010,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.1.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi* | | | | 4 Laporan | 80.047.990,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 3 Laporan | 138.552.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.1.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi* | | | | 1 Perangkat Daerah | 357.129.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.1.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | *Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi* | - | | | 47 SKPA | 102.750.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.1.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi* | | | | 47 Perangkat Daerah | 102.750.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | | **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | **71.960.638.178,00** | | | | | | | **81.251.129.060,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **71.960.638.178,00** | | | | | | | **81.251.129.060,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **71.960.638.178,00** | | | | | | | **81.251.129.060,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh*** | **-** | | | **A Indeks** | **21.306.853.687,00** | | | | | | **-** | **23.091.129.060,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan* | - | | | 8 Dokumen | 710.541.069,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 869.969.024,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 271.197.280,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 292.969.024,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 267.144.509,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 325.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 172.199.280,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 252.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai* | - | | | 12 bulan | 13.755.369.511,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 14.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 89 Orang/ Bulan | 13.755.369.511,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 14.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Apartur* | - | | | 12 Bulan | 24.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 24.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai* | - | | | 12 Bulan | 96.624.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 118.168.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 40.900.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 42.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 55.724.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 76.168.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Kantor* | - | | | 12 Bulan | 1.463.129.478,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 1.939.500.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 14.399.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 15.500.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 12.697.825,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 355.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 795.085.803,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 850.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 197.159.250,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 216.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 144.147.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 154.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 299.640.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 349.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Apartur* | - | | | 12 Bulan | 90.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 430.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 90.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 430.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Kantor* | - | | | 12 Bulan | 3.551.377.112,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 3.842.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 33.900.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 42.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 594.552.112,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 654.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 151.854.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 166.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 2.771.071.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 2.980.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Kantor* | - | | | 12 Bulan | 1.615.812.517,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | - | 1.866.492.036,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 23 Unit | 511.476.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 531.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 1.104.336.517,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Aparatur | | 1.335.492.036,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | ***Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam*** | **-** | | | **0,579 Persen** | **1.411.680.000,00** | | | | | | **-** | **3.500.000.000,00** | |
| | 2.17.02.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan* | - | | | 58 Persen | 1.411.680.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | - | 3.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.1.01.0002 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam* | | | | 9 Unit Usaha | 1.411.680.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | | 3.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | ***Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat*** | **-** | | | **0,40 Persen** | **1.365.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.500.000.000,00** | |
| | 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase Koperasi Non Simpan Pinjam yang sehat dan cukup sehat* | - | | | 43 Persen | 650.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | - | 1.250.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 15 Unit Usaha | 650.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | | 1.250.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.03.1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat* | - | | | 62 Persen | 715.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | - | 1.250.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 16 Unit Usaha | 715.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | | 1.250.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | ***Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM*** | **-** | | | **0,0015 Persen** | **3.657.885.000,00** | | | | | | **-** | **3.860.000.000,00** | |
| | 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase pengelola Koperasi memiliki Sertifikat Pelatihan* | - | | | 8 Persen | 3.657.885.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi dan UMKM | - | 3.860.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 390 Orang | 3.657.885.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi dan UMKM | | 3.860.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | ***Rasio Koperasi Modern*** | **-** | | | **0,025 Persen** | **775.204.000,00** | | | | | | **-** | **4.300.000.000,00** | |
| | 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase Peningkatan Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi* | - | | | 10 Persen | 775.204.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | - | 4.300.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.1.01.0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | | | | 5 Unit Usaha | 775.204.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Gerakan Koperasi | | 4.300.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | **2.17.07** | **PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | ***Rasio Kewirausahaan*** | **-** | | | **1,91 Persen** | **31.444.015.491,00** | | | | | | **-** | **34.500.000.000,00** | |
| | 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | *Persentase UMKM yang meningkat Volume Usaha* | - | | | 0,4 Persen | 31.444.015.491,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku UMKM | - | 34.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.1.01.0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan* | | | | 100 Unit Usaha | 31.444.015.491,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku UMKM | | 34.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | ***Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil*** | **-** | | | **0,015 Persen** | **12.000.000.000,00** | | | | | | **-** | **9.500.000.000,00** | |
| | 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | *Persentase UMKM yang meningkat produktifitas dan daya saing produk* | - | | | 21,1 Persen | 12.000.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku UMKM | - | 9.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 350 Unit Usaha | 12.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Pelaku UMKM | | 9.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | **28.020.612.757,00** | | | | | | | **30.283.563.273,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **28.020.612.757,00** | | | | | | | **30.283.563.273,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **28.020.612.757,00** | | | | | | | **30.283.563.273,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **23.850.612.662,00** | | | | | | **-** | **25.718.331.241,00** | |
| | 2.18.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 206.946.996,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 280.164.047,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 97.555.920,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 159.833.872,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 98.950.280,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 108.845.308,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 10.440.796,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 11.484.867,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 21.100.329.224,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 22.407.865.450,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 95 Orang/ Bulan | 18.785.222.324,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 19.861.247.860,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 2.089.875.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 2.298.862.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 184.130.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 202.543.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 3 Laporan | 41.101.900,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 45.212.090,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 141.444.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 155.588.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 0,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 100 Orang | 141.444.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 155.588.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 725.554.731,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 769.632.673,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 32.215.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 35.436.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 0,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 250.909.801,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 275.527.215,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 215.412.430,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 208.949.158,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 37.919.500,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 41.712.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 189.098.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 208.007.800,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.063.010.600,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.169.311.660,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 51.440.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 56.584.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 582.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 640.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 429.570.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 472.527.660,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 613.327.111,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 935.769.011,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 35 Unit | 434.977.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 739.418.900,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 178.350.111,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 196.350.111,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **400.002.370,00** | | | | | | **-** | **500.000.000,00** | |
| | 2.18.02.1.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | - | - | | | - | 400.002.370,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.1.02.0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi* | | | | 2 Dokumen | 400.002.370,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **1.431.999.430,00** | | | | | | **-** | **1.575.199.373,00** | |
| | 2.18.03.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | - | - | | | - | 1.431.999.430,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.575.199.373,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi* | | | | 6 Dokumen | 1.224.821.444,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.347.303.588,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.1.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi* | | | | 2 Dokumen | 207.177.986,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 227.895.785,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **1.093.728.145,00** | | | | | | **-** | **1.200.032.659,00** | |
| | 2.18.04.1.01 | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 563.045.145,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 619.349.659,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.1.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 12 Pelaku Usaha | 282.614.095,00 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Blang Pulo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 310.875.504,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.1.01.0008 | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 200 Pelaku Usaha | 280.431.050,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 308.474.155,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.04.1.02 | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | - | - | | | - | 530.683.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 580.683.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.1.02.0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 2428 Pelaku Usaha | 530.683.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 580.683.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **844.270.150,00** | | | | | | **-** | **850.000.000,00** | |
| | 2.18.05.1.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | - | - | | | - | 844.270.150,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 850.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.1.01.0004 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 12 Kegiatan usaha | 844.270.150,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 850.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **-** | **-** | | | **-** | **400.000.000,00** | | | | | | **-** | **440.000.000,00** | |
| | 2.18.06.1.01 | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 400.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 440.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.1.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 3 Dokumen | 400.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 440.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | | | | **327.735.961.110,00** | | | | | | | **678.870.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **327.735.961.110,00** | | | | | | | **678.870.000.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **327.735.961.110,00** | | | | | | | **678.870.000.000,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **26.911.125.349,00** | | | | | | **-** | **31.470.000.000,00** | |
| | 2.19.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.839.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 639.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 1.200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.817.325.349,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 16.300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 109 Orang/ Bulan | 14.557.325.349,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 16.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 260.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 330.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 400.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 155 Paket | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 80.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.161.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.730.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 61.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 120.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 950.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 110.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.913.800.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.740.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 35.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 40.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.900.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 1.878.800.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.850.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.800.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 550.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 800.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | ***Persentase pemuda yang dibina***<br>***Persentase pemuda yang dibina*** | **-** | | | **62 %**<br>**62 %** | **5.100.000.000,00** | | | | | | **-** | **8.600.000.000,00** | |
| | 2.19.02.1.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | *Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi* | - | | | 350 orang | 4.800.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 7.600.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 0 Orang | 900.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | | *Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 0 Orang | 1.700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0005 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan* | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 0 Orang | 300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 800.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 50 Orang | 400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 800.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 0 Orang | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 300.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.02.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda* | | | | 0 Persentase | 300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **292.924.835.761,00** | | | | | | **-** | **635.300.000.000,00** | |
| | 2.19.03.1.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | - | - | | | - | 30.122.439.941,00 | | | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | - | 67.300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan* | | | | 1 Unit | 400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 800.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia* | | | | 5 Unit | 29.422.439.941,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 65.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | - | - | | | - | 29.700.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 50.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.03.1.02.0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga* | | | | 150 Orang | 5.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 8.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi* | | | | 2 Kegiatan | 12.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 12.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.02.0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara* | | | | 50 Kegiatan | 12.700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 30.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | - | - | | | - | 12.202.395.820,00 | | | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | - | 15.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi* | | | | 0 Orang | 1.002.395.820,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03.0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerima Penghargaan olahraga* | | | | 20 Orang | 700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03.0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi* | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 180 Orang | 10.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 12.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | - | - | | | - | 220.900.000.000,00 | | | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | - | 503.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait* | | | | 5 Dokumen | 1.400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 1.800.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait* | | | | 50 Dokumen | 218.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | - | | 500.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi* | | | | 5 Dokumen | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **2.800.000.000,00** | | | | | | **-** | **3.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.04.1.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | - | | | - | 2.800.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.1.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 2.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.1.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan* | | | | 1 Organiasasi | 300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** | | | | | | **11.404.791.993,00** | | | | | | | **11.691.869.183,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **11.404.791.993,00** | | | | | | | **11.691.869.183,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **4.035.524.007,00** | | | | | | | **4.050.160.367,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **3.467.621.558,00** | | | | | | **-** | **3.621.805.678,00** | |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 12 Bulan | 2.917.996.174,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jasa Komunikasi, Air, Listrik, Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran | - | 3.041.110.294,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 22.090.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jasa Komunikasi, Air, Listrik, Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran | | 37.558.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 226.526.174,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jasa Komunikasi, Air, Listrik, Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran | | 251.312.294,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.669.380.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jasa Komunikasi, Air, Listrik, Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran | | 2.752.240.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Kendaraan dinas dan peralatan lainya yang dipeliharan* | - | | | 12 Bulan | 549.625.384,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 580.695.384,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 337.106.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 348.176.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 162 Unit | 127.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 137.600.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 84.919.384,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 94.919.384,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| 2. | **2.22.07** | **PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)** | **-** | **-** | | | **-** | **567.902.449,00** | | | | | | **-** | **428.354.689,00** | |
| | 2.22.07.7.01 | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 210.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.01.0001 | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional* | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | - Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 210.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.03 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | - | - | | | - | 367.902.449,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 218.354.689,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.03.0001 | Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan* | | | | 40 Orang | 205.438.710,00 | - Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 64.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.03.0006 | Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus Sengketa Adat yang terdata dan Terdokumentasi* | | | | 10 Kasus | 162.463.739,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 154.354.689,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | **-** | **-** | | | | | | **7.369.267.986,00** | | | | | | | **7.641.708.816,00** | |
| | 2.22.07.7.02 | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat | - | - | | | - | 299.804.090,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 321.946.664,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.07.7.02.0001 | Pelatihan Peradilan Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat* | | | | 46 Orang | 248.355.210,00 | - Kab. Simeulue, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 257.946.664,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.02.0002 | Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)* | | | | 1 Dokumen | 51.448.880,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 64.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.03 | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | - | - | | | - | 563.601.668,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 611.187.714,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.03.0002 | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat* | | | | 69 Orang | 264.155.834,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 270.486.834,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2.22.07.7.03.0003 | Rapat Kerja MAA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA* | | | | 1 Dokumen | 299.445.834,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 340.700.880,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| 1. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **6.505.862.228,00** | | | | | | **-** | **6.708.574.438,00** | |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.170.409.600,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.247.566.370,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 440.772.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 462.520.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 16.380.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 26.380.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.077.258.628,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.182.340.068,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 32 Orang/ Bulan | 5.077.258.628,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.182.340.068,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 139.510.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 149.984.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 139.510.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 149.984.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 118.684.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 128.684.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 118.684.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 128.684.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.170.409.600,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.247.566.370,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 110.736.800,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 121.736.800,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 95.476.250,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 100.476.250,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 319.714.048,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 329.714.048,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 187.330.502,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 206.739.272,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | | | | | | **78.308.681.339,00** | | | | | | | **72.879.499.799,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **59.042.487.722,00** | | | | | | | **56.058.256.218,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **14.476.584.200,00** | | | | | | | **11.256.691.398,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **6.500.000.000,00** | | | | | | **-** | **7.615.291.398,00** | |
| | 2.22.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 273.893.750,00 | | | - | - | - | - | 374.804.100,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 193.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - | - | | 208.080.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 252 Orang | 80.293.750,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 166.724.100,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 770.800.991,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.030.467.582,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.325.415,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 20.115.756,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 238.792.412,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 213.560.446,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 66.471.164,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 111.400.830,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 446.212.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 685.390.550,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 414.965.479,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.329.387.335,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 414.965.479,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.329.387.335,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.222.945.620,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 3.237.451.487,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 65.718.500,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 135.340.954,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.924.872.370,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.920.174.517,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.232.354.750,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.181.936.016,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 817.394.160,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.643.180.894,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 29 Unit | 621.300.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 742.377.420,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 196.094.160,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 900.803.474,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **3.564.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.601.000.000,00** | |
| | 2.22.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 3.564.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.601.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.02.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan* | | | | 1 Objek | 3.564.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.601.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **-** | **-** | | | **-** | **4.412.584.200,00** | | | | | | **-** | **1.040.400.000,00** | |
| | 2.22.05.1.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | - | - | | | - | 4.412.584.200,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.040.400.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.05.1.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan* | | | | 5 Objek | 4.412.584.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.040.400.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **19.266.193.617,00** | | | | | | | **16.821.243.581,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **19.266.193.617,00** | | | | | | | **16.821.243.581,00** | |
| 1. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **-** | **-** | | | **-** | **791.318.811,00** | | | | | | **-** | **1.132.196.477,00** | |
| | 2.22.04.1.01 | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | - | - | | | - | 791.318.811,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.132.196.477,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.04.1.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat* | | | | 2 Dokumen | 791.318.811,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.132.196.477,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.024.874.806,00** | | | | | | **-** | **9.626.861.030,00** | |
| | 3.26.02.1.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | - | - | | | - | 5.260.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.926.716.188,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.01.0001 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi* | | | | 3 Lokasi | 5.260.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.926.716.188,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | - | - | | | - | 2.064.874.806,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.194.425.942,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi* | | | | 5 Dokumen | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 520.200.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 6 Unit | 1.064.874.806,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.154.025.942,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan* | | | | 2 Orang | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 520.200.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 700.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.505.718.900,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.04.0010 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi* | | | | 5 Laporan | 700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.505.718.900,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **-** | **-** | | | **-** | **7.650.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.293.076.974,00** | |
| | 3.26.03.1.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | - | - | | | - | 7.650.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.293.076.974,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 3 Dokumen | 6.650.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.197.889.510,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata* | | | | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 844.378.236,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Kegiatan | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 250.809.228,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 4. | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **-** | **-** | | | **-** | **450.000.000,00** | | | | | | **-** | **977.976.000,00** | |
| | 3.26.04.1.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | - | - | | | - | 450.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 977.976.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif* | | | | 3 Laporan | 450.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 977.976.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 5. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **-** | **-** | | | **-** | **2.350.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.791.133.100,00** | |
| | 3.26.05.1.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | - | - | | | - | 2.350.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.791.133.100,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata* | | | | 250 Orang | 1.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.303.361.100,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | | | | 250 Orang | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 520.200.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif* | | | | 250 Orang | 350.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 967.572.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **59.042.487.722,00** | | | | | | | **56.058.256.218,00** | |
| | **-** | **-** | | | | | | **44.565.903.522,00** | | | | | | | **44.801.564.820,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **9.436.000.000,00** | | | | | | **-** | **9.919.190.963,00** | |
| | 2.22.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 2.436.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.109.185.413,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 100 Orang | 1.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 588.985.413,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.02.1.01.0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara* | | | | 2 Unit | 936.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 520.200.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.02.1.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 7.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 8.810.005.550,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.02.1.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 5 Objek | 6.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 8.246.433.355,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.02.1.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional* | | | | 1 Laporan | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 563.572.195,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **-** | **-** | | | **-** | **5.500.000.000,00** | | | | | | **-** | **3.731.434.693,00** | |
| | 2.22.03.1.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 5.500.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.731.434.693,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.03.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 5 Lembaga | 5.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.731.434.693,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **-** | **-** | | | **-** | **500.000.000,00** | | | | | | **-** | **520.200.000,00** | |
| | 2.22.04.1.01 | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 520.200.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.04.1.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan* | | | | 100 Orang | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 520.200.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 4. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **-** | **-** | | | **-** | **8.300.000.000,00** | | | | | | **-** | **6.242.400.000,00** | |
| | 2.22.06.1.01 | Pengelolaan Museum Provinsi | - | - | | | - | 8.300.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.242.400.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.06.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan* | | | | 6800 Unit | 1.700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 930.151.434,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum* | | | | 2 Unit | 3.400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.064.984.566,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | 2.22.06.1.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia* | | | | 2 Unit | 3.200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.247.264.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 5. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **20.829.903.522,00** | | | | | | **-** | **24.388.339.164,00** | |
| | - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 710.175.724,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.409.065.242,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 66.831.908,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 147.007.359,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 9 Laporan | 446.051.908,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 888.569.598,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 20.119.727.798,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 22.979.273.922,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.040.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 710.175.724,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.409.065.242,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 197.291.908,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 373.488.285,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 20.119.727.798,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 22.979.273.922,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 152 Orang/ Bulan | 19.969.727.798,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 22.875.233.922,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | **52.904.285.494,00** | | | | | | | **48.933.268.556,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **52.904.285.494,00** | | | | | | | **48.933.268.556,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **51.163.636.296,00** | | | | | | | **47.192.619.358,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **33.892.819.324,00** | | | | | | **-** | **33.392.819.324,00** | |
| | 2.23.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 767.142.691,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 767.142.691,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 12 Dokumen | 556.142.691,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 556.142.691,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 10 Laporan | 211.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 211.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 17.744.249.010,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 17.744.249.010,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 112 Orang/ Bulan | 17.744.249.010,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 17.744.249.010,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 489.583.654,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 489.583.654,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 118.247.484,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 118.247.484,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 171.336.170,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 171.336.170,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.593.829.752,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.593.829.752,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 84.237.537,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 84.237.537,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 4.665.586.256,00 | - | DANA OTONOMI KHUSUS | - | - | - | | 4.665.586.256,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 299.062.959,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 299.062.959,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 104.112.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 104.112.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 290.831.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 290.831.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 7.490.370.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.990.370.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 10 Laporan | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 1.850.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.850.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 5.590.370.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.090.370.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.807.644.217,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.807.644.217,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 23 Unit | 921.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 921.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 390.484.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 390.484.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 100 Unit | 495.960.217,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 495.960.217,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **17.270.816.972,00** | | | | | | **-** | **13.799.800.034,00** | |
| | 2.23.02.1.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 5.772.323.227,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.301.306.289,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya* | | | | 15 Perpustakaan | 503.791.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 503.791.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan* | | | | 100 Eksemplar | 264.000.009,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 264.000.009,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 15 Perpustakaan | 98.737.572,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 98.737.572,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan* | | | | 2 Perpustakaan | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi* | | | | 50 Orang | 125.045.850,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 125.045.850,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan* | | | | 5 Perpustakaan | 600.003.422,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 600.003.422,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 2000 Eksemplar | 3.100.006.666,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.006.666,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK* | | | | 10 Perpustakaan | 831.325.858,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 160.308.920,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.01.0016 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 10 Dokumen | 49.412.850,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 49.412.850,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 11.498.493.745,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 11.498.493.745,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus* | | | | 4 Lokus | 408.701.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 408.701.300,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.02.1.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi* | | | | 2 Perpustakaan | 10.645.863.145,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 10.645.863.145,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca* | | | | 20 Orang | 246.615.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 246.615.300,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan* | | | | 10 Perpustakaan | 197.314.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 197.314.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **1.740.649.198,00** | | | | | | | **1.740.649.198,00** | |
| 1. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **-** | **-** | | | **-** | **989.702.989,00** | | | | | | **-** | **989.702.989,00** | |
| | 2.24.02.1.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | - | - | | | - | 558.876.040,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 558.876.040,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.1.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi* | | | | 10 Laporan | 119.681.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 119.681.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.02.1.01.0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip Dinamis* | | | | 200 Arsip | 439.195.040,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 439.195.040,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.1.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | - | - | | | - | 154.607.534,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 154.607.534,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.1.02.0005 | Akuisisi Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi* | | | | 800 Arsip | 154.607.534,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 154.607.534,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.1.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | - | - | | | - | 276.219.415,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 276.219.415,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN* | | | | 40000 Pengguna | 276.219.415,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 276.219.415,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **-** | **-** | | | **-** | **435.846.209,00** | | | | | | **-** | **435.846.209,00** | |
| | 2.24.03.1.01 | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | - | - | | | - | 145.789.380,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 145.789.380,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.1.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun* | | | | 100 Arsip | 145.789.380,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 145.789.380,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.1.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 240.064.334,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 240.064.334,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.1.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi* | | | | 100 Arsip | 114.964.334,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 114.964.334,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.1.03.0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota* | | | | 5 Arsip | 125.100.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 125.100.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.1.04 | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | - | - | | | - | 49.992.495,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 49.992.495,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.1.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip* | | | | 4000 Arsip | 49.992.495,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 49.992.495,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3. | **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **-** | **-** | | | **-** | **315.100.000,00** | | | | | | **-** | **315.100.000,00** | |
| | 2.24.04.1.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi | - | - | | | - | 315.100.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 315.100.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.04.1.01.0002 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup* | | | | 2 Arsip | 315.100.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 315.100.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **71.835.180.645,00** | | | | | | | **130.690.160.678,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **71.835.180.645,00** | | | | | | | **130.690.160.678,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **71.185.180.645,00** | | | | | | | **129.815.160.678,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **37.554.212.467,00** | | | | | | **-** | **39.271.500.000,00** | |
| | 3.25.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh* | - | | | 100 % | 432.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 10 Dokumen Dokumen | 432.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya Kinerja ASN* | - | | | 250 Orang | 34.677.212.467,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 33.789.500.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 230 Orang/ Bulan | 31.677.212.467,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 33.600.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 3.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 189.500.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 630.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.295.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 65.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 350.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 365.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 215.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 500.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.815.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.987.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 17.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 856.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 860.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 530.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 944.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.580.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2. | **3.25.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | **-** | **-** | | | **-** | **2.027.545.460,00** | | | | | | **-** | **3.468.000.000,00** | |
| | 3.25.02.1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | - | - | | | - | 649.200.307,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.190.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K* | | | | 4 Dokumen | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 378.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.01.0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola* | | | | 2 Ha | 40.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.260.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.01.0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi* | | | | 4 Ha | 559.200.307,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 552.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | - | - | | | - | 1.378.345.153,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.278.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 50 Orang | 1.378.345.153,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.278.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **-** | **-** | | | **-** | **21.664.767.871,00** | | | | | | **-** | **45.694.660.678,00** | |
| | 3.25.03.1.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | - | - | | | - | 2.512.006.528,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 4.331.650.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil* | | | | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 478.150.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil* | | | | 200 Unit | 2.487.006.528,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 3.853.500.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.02 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 333.900.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.02.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat* | | | | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 333.900.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.06 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | - | - | | | - | 19.127.761.343,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 41.029.110.678,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia* | | | | 8 Unit | 4.081.239.230,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 39.199.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana* | | | | 12 Layanan | 15.046.522.113,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.830.110.678,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **-** | **-** | | | **-** | **8.258.889.322,00** | | | | | | **-** | **36.150.000.000,00** | |
| | 3.25.04.1.05 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | - | - | | | - | 135.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 3.650.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 350.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut* | | | | 4 Unit | 110.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 3.300.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.06 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | - | - | | | - | 8.123.889.322,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 32.500.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.06.0001 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 37 Unit | 5.823.889.322,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 23.000.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.06.0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 37 Unit | 2.300.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 9.500.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 5. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **-** | **-** | | | **-** | **120.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.094.500.000,00** | |
| | 3.25.05.1.01 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | - | - | | | - | 80.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.000.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil* | | | | 40 Dokumen | 40.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 600.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil* | | | | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 400.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.02 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 94.500.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.02.0003 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 10 Dokumen | 40.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 94.500.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 6. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **-** | **-** | | | **-** | **1.559.765.525,00** | | | | | | **-** | **4.136.500.000,00** | |
| | 3.25.06.1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | - | - | | | - | 128.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.380.500.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.02.0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing* | | | | 12 Unit Usaha | 128.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.380.500.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 1.431.765.525,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.756.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.03.0001 | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 35 Dokumen | 1.431.765.525,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 2.756.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | **-** | **-** | | | | | | **650.000.000,00** | | | | | | | **875.000.000,00** | |
| 1. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **650.000.000,00** | | | | | | **-** | **875.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 650.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 875.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 42 Unit | 650.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 875.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN** | | | | | | **145.290.674.432,00** | | | | | | | **138.519.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **145.290.674.432,00** | | | | | | | **138.519.000.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **26.180.562.541,00** | | | | | | | **20.527.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **2.245.600.000,00** | | | | | | **-** | **4.850.000.000,00** | |
| | 3.27.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.545.600.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 3.100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 900.800.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 321.200.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 323.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana* | - | | | 12 Bulan | 700.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas, UPTD dan SMK | - | 1.750.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 700.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas, UPTD dan SMK | | 1.750.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **15.424.679.995,00** | | | | | | **-** | **6.987.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | - | - | | | - | 8.256.843.280,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 530.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 8.256.843.280,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 530.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | - | - | | | - | 7.167.836.715,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 6.457.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga* | | | | 1 laporan | 7.167.836.715,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 6.457.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | ***Produktivitas Komoditas pangan utama (padi)*** | **-** | | | **5,65 Ton/Ha** | **8.510.282.546,00** | | | | | | **-** | **8.690.000.000,00** | |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | *Indeks Harga yang diterima oleh Petani* | - | | | 113 Indeks | 8.510.282.546,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Petani dan kelompok tani | - | 8.690.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian* | | | | 1 Dokumen | 3.000.800.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Petani dan kelompok tani | | 5.480.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.1.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan* | | | | 1 Ha | 5.509.482.546,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Petani dan kelompok tani | | 3.210.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | **-** | **-** | | | | | | **119.110.111.891,00** | | | | | | | **117.992.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **12.409.497.200,00** | | | | | | **-** | **4.750.000.000,00** | |
| | 3.27.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | - | - | | | - | 1.205.240.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian* | | | | 1 Dokumen | 1.205.240.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 2.250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | - | - | | | - | 9.524.537.200,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sertifikat Benih* | | | | 545 Sertifikat | 9.524.537.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.03 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | - | - | | | - | 1.679.720.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.03.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme* | | | | 1 Laporan | 1.679.720.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | ***Produktivitas Komoditas pangan utama (padi)*** | **-** | | | **5,65 Ton/Ha** | **396.044.962,00** | | | | | | **-** | **790.000.000,00** | |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | *Indeks Harga yang diterima oleh Petani* | - | | | 113 Indeks | 396.044.962,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 790.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.03.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani* | | | | 1 Dokumen | 196.044.962,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 260.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.1.01.0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 330.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 3. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **9.535.339.800,00** | | | | | | **-** | **670.000.000,00** | |
| | 3.27.05.1.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | - | - | | | - | 9.535.339.800,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 670.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 25855 Ha | 9.535.339.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS, DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 670.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 4. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **847.600.000,00** | | | | | | **-** | **1.200.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 847.600.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.06.1.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi* | | | | 1 Laporan | 847.600.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 5. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **-** | **-** | | | **-** | **9.195.418.625,00** | | | | | | **-** | **9.516.000.000,00** | |
| | 3.27.07.1.01 | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | - | - | | | - | 342.600.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 648.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.01.0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi* | | | | 80 Orang | 342.600.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 648.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.02 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | - | - | | | - | 8.184.978.625,00 | | | - | - | - | - | 8.292.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi* | | | | 3 Unit | 7.863.778.625,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | - | - | | 7.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan* | | | | 12 Kelompok | 321.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 792.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.03 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | - | - | | | - | 667.840.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 576.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.03.0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi* | | | | 4 Unit | 667.840.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 576.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 6. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **86.726.211.304,00** | | | | | | **-** | **101.066.000.000,00** | |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.598.351.015,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.065.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 200.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 220.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.186.608.295,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 9.884.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.100.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 2.346.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 21.595.136,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 41.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.598.351.015,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.065.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 425.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 800.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.186.608.295,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 9.884.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 5.515.013.159,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 6.885.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana* | - | | | 12 Bulan | 2.250.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 4.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 437 Unit | 2.250.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 4.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.598.351.015,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.065.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 20.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 145.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 400.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.000.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 400.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 15 Orang | 15.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 25.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 650 Paket | 0,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.186.608.295,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 9.884.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 550.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 612.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 282.750.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.750.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 232.750.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 750.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.598.351.015,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.065.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 853.351.015,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 750.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 73.968.501.994,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 81.917.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 645 Orang/ Bulan | 73.968.501.994,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 81.917.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | | **DINAS PETERNAKAN** | | | | | | **67.914.512.255,00** | | | | | | | **50.821.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **67.914.512.255,00** | | | | | | | **50.821.000.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **67.914.512.255,00** | | | | | | | **50.821.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **48.410.088.754,00** | | | | | | **-** | **47.826.000.000,00** | |
| | 3.27.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah* | - | | | 8 Dokumen | 2.346.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas dan Aparatur | - | 2.485.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1.020.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas dan Aparatur | | 1.025.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 153.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas dan Aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 204.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas dan Aparatur | | 210.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 153.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas dan Aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 816.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas dan Aparatur | | 900.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN* | - | | | 151 Orang | 22.065.863.852,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 22.090.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 151 Orang/ Bulan | 21.995.683.852,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 22.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 20.180.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 30.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 60.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah laporan dan dokumen Barang Milik Negara yang diinventarisir* | - | | | 1 Laporan | 102.984.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 120.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 102.984.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 120.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah aparatur yang ditingkatkan kempetensi dan disiplin* | - | | | 25 Orang | 288.040.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 320.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 112.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 120.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 176.040.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan* | - | | | 9 Paket | 1.552.467.902,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.580.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 74.150.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 80.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 120.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 609.202.942,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 600.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 203.650.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 18.975.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 20.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 526.489.960,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 530.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan* | - | | | 4 Unit | 318.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 400.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 318.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 400.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jenis penunjang yang dibayarkan* | - | | | 4 Jenis Jasa | 6.896.483.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 6.471.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 70.350.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 71.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.248.750.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 5.427.383.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | Unit | 2.340.250.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.360.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 56.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 60.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 60 Unit | 1.497.250.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 786.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 800.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | - | | | 1 Unit Kerja | 12.500.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 12.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 12.500.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Montasik, Peurumping | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 12.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | ***Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)*** | **-** | | | **16,29 %** | **14.101.200.000,00** | | | | | | **-** | **915.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.1.04 | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | *Jumlah Pengawas Mutu Bibit dan Pengawas Mutu Pakan yang dilatih* | - | | | 69 Orang | 400.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 450.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.02.1.04.0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 450.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.02.1.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | *Jumlah kelahiran ternak hasil IB* | - | | | 19500 Ekor | 295.576.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 300.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.02.1.05.0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi* | | | | 1 laporan | 295.576.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 300.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.02.1.07 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | *Jumlah Benih/Bibit Ternak/Hijauan Pakan Ternak yang tersedia* | - | | | 1310 Ekor | 13.405.624.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 165.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.02.1.07.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain* | | | | 1 Ton | 525.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 130.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.1.07.0004 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain* | | | | 20 Ekor | 12.880.024.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 35.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | ***Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)*** | **-** | | | **24,75 %** | **825.600.000,00** | | | | | | **-** | **900.000.000,00** | |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | *Jumlah Unit Rumah Sakit Hewan, Puskeswan, Laboratorium Pakan dan UPTD Layanan kesehatan Hewan yang terbangun/terpelihara* | - | | | 11 Unit | 825.600.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 900.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.03.1.01.0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 825.600.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Lembah Seulawah, Saree Aceh<br>- Kab. Aceh Besar, Montasik, Peurumping | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 900.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| 4. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | ***Penurunan Morbiditas terhadap agen penyakit dari Parasit, Bakteri dan Virus (angka kesakitan ternak)*** | **-** | | | **17,42 %** | **2.076.423.501,00** | | | | | | **-** | **400.000.000,00** | |
| | 3.27.04.1.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah penegakan diagnosis dan penangan terhadap kasus penyakit hewan* | - | | | 15211 Ekor | 875.600.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.04.1.01.0004 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan* | | | | 1 Wilayah | 875.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.04.1.03 | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | *Jumlah sampel yang diuji* | - | | | 10000 Sampel | 1.200.823.501,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 250.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.04.1.03.0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | 1 Dokumen | 1.200.823.501,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 250.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| 5. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | ***Indek Terima Peternak (ItPt)*** | **-** | | | **105,55 Indeks** | **2.501.200.000,00** | | | | | | **-** | **780.000.000,00** | |
| | 3.27.07.1.02 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | *Jumlah peternak/peserta pelatihan yang ditingkatkan Kapasitas* | - | | | 500 Orang | 1.375.600.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 650.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan* | | | | 2 Kelompok | 1.375.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 650.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.07.1.03 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | *Jumlah Koperasi Peternak yang dibentuk dan Sekolah Lapang Peternak yang Terbina* | - | | | 3 Kelompok | 1.125.600.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 130.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | 3.27.07.1.03.0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi* | | | | 1 Unit | 1.125.600.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Lembah Seulawah, Saree Aceh | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 130.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN |
| | | **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | **35.027.111.750,00** | | | | | | | **43.253.500.090,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **35.027.111.750,00** | | | | | | | **43.253.500.090,00** | |
| | **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | **35.027.111.750,00** | | | | | | | **43.253.500.090,00** | |
| 1. | **3.29.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **23.577.111.750,00** | | | | | | **-** | **24.173.500.000,00** | |
| | 3.29.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu* | - | | | 100 % | 1.270.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | - | 1.700.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | | 50.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | | 550.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 130.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | | 150.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 600.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | | 950.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi* | - | | | 100 % | 16.558.374.980,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | - | 16.540.250.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 116 Orang/ Bulan | 14.720.736.980,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | | 14.720.250.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1.837.638.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | | 1.820.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 91.481.292,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 95.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.29.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 91.481.292,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 95.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 290.776.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 300.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 290.776.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 300.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.109.680.428,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.918.250.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 42.600.328,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 30.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 509.693.400,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 400.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 366.417.930,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 350.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 107.313.770,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 120.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 18.250.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 18.250.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 1.065.405.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.29.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.239.257.466,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.250.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 85.618.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 75.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 361.264.466,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 375.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 792.375.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 800.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.017.541.584,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 2.370.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 23 Unit | 406.825.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 450.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 1.272.950.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 60 Unit | 337.766.584,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 420.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 2. | **3.29.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | ***Usulan penetapan warisan geologi***<br>***Usulan penetapan warisan geologi*** | **-** | | | **25 %**<br>**25 %** | **1.460.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.725.000.000,00** | |
| | 3.29.02.1.01 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | *Jumlah Laporan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah* | - | | | 1 Laporan | 1.210.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.425.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.01.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 1.050.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.250.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.29.02.1.01.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 160.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 175.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 250.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 300.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.03.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul* | | | | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.03.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 130.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 3. | **3.29.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.050.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.050.000.090,00** | |
| | 3.29.03.1.03 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - | - | | | - | 450.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 450.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.03.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut* | | | | 1 Laporan | 450.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 450.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.07 | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | - | - | | | - | 90.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.07.0002 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 100.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.12 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | - | - | | | - | 60.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 90,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.12.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut* | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 90,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.29.03.1.24 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | - | - | | | - | 450.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 500.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.24.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan* | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 250.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.24.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan* | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 250.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 4. | **3.29.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **5.800.000.000,00** | | | | | | **-** | **8.000.000.000,00** | |
| | 3.29.05.1.07 | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | - | - | | | - | 5.800.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 8.000.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.05.1.07.0007 | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT* | | | | 1 unit | 5.800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH [SPESIFIC GRANT] | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 8.000.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 5. | **3.29.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | **-** | **-** | | | **-** | **3.140.000.000,00** | | | | | | **-** | **8.305.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.29.06.1.01 | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 125.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 150.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.01.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 125.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.02 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | - | - | | | - | 115.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 120.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.02.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 115.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 120.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.05 | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 110.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.05.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 110.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.29.06.1.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | - | - | | | - | 2.800.000.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 7.925.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.06.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 250.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.06.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 175.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.06.0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan* | | | | 3500 Unit | 2.500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA PERIMBANGAN, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 7.500.000.000,00 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | | | | | | **37.025.515.995,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **37.025.515.995,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **29.555.872.969,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **20.964.497.769,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan* | - | | | 100 % | 888.239.085,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 362.200.436,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 289.448.849,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 0 Laporan | 56.837.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 179.752.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 16.035.076.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 110 Orang/ Bulan | 15.740.006.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 160.070.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 8.100.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 8.100.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 30 Orang | 30.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 569.062.684,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 28.909.542,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 175.273.142,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 150.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 20.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 22.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 172.880.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.014.864.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 600.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.404.864.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.419.156.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 44 Unit | 669.156.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 250.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **-** | **-** | | | **-** | **150.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.1.01.0003 | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi* | | | | 30 Orang | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING** | **-** | **-** | | | **-** | **5.961.375.200,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | - | - | | | - | 5.861.375.200,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota* | | | | 0 Laporan | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.1.02.0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 23 Laporan | 5.361.375.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | *Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Provinsi* | - | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida* | | | | 23 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **-** | **-** | | | **-** | **700.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | - | - | | | - | 700.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 10 Pelaku Usaha | 700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **-** | **-** | | | **-** | **1.580.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 550.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif* | | | | 2 BPSK | 550.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 830.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.02.0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan* | | | | 5 Sertifikat | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.02.0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan* | | | | 10 laporan | 330.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.02.0006 | Pemantauan Mutu Produk | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah produk potensial yang dipantau* | | | | 20 Produk | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.02.0007 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan* | | | | 100 Sertifikat | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.03.0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi* | | | | 23 Laporan | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **-** | **-** | | | **-** | **200.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.1.03.0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **6.719.643.026,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **-** | **-** | | | **-** | **6.619.643.026,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | - | - | | | - | 6.619.643.026,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 1 Dokumen | 440.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | | | | 1 Dokumen | 425.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 1 Dokumen | 3.279.643.026,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 2.350.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.1.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **-** | **-** | | | **-** | **25.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.1.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **-** | **-** | | | **-** | **75.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.1.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.1.01.0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | **-** | **-** | | | | | | **750.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **-** | **-** | | | **-** | **500.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.02.1.02 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 250.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.1.02.0001 | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | - | - | | | - | 250.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal* | | | | 900 Dokumen | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **-** | **-** | | | **-** | **250.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | - | - | | | - | 250.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.1.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi* | | | | 0.1 Unit | 250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **BIRO UMUM** | | | | | | **161.884.755.888,00** | | | | | | | **180.416.258.827,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **161.884.755.888,00** | | | | | | | **180.416.258.827,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **161.884.755.888,00** | | | | | | | **180.416.258.827,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **161.884.755.888,00** | | | | | | **-** | **180.416.258.827,00** | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun*<br>*persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu*<br>*Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah* | - | | | 95 %<br>100 %<br>100 % | 80.674.307.302,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 88.741.738.032,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 573 Orang/ Bulan | 71.694.297.338,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 78.863.727.072,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 95% Dokumen | 8.098.802.964,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 8.908.683.260,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 95% Dokumen | 881.207.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 969.327.700,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 8.685.782.426,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 9.515.550.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 95% Paket | 1.035.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.140.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 95% Paket | 3.378.090.322,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.700.500.000,00 | BIRO UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 95% Paket | 4.272.692.104,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.675.050.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 4.323.850.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 7.990.425.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 700.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.000.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 95% Paket | 819.850.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 890.425.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 2.804.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.100.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 33.544.765.874,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 36.753.086.920,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 7 Laporan | 2.440.003.823,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.507.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 5.500.246.620,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 6.503.400.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 344.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 378.340.000,00 | BIRO UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 25.260.515.431,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 27.364.346.920,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 21.154.574.235,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 22.420.235.125,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 173 Unit | 8.224.852.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 9.320.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 16 Unit | 12.929.722.235,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 13.100.235.125,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | | | - | 11.235.223.750,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 11.945.223.750,00 | BIRO UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 1 Orang/Bulan | 4.745.223.750,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.945.223.750,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 1 Orang/ Bulan | 6.490.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 7.000.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | - | | | - | 2.266.252.301,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 3.050.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.266.252.301,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.050.000.000,00 | BIRO UMUM |
| | | **BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | | | | | | **6.299.911.128,00** | | | | | | | **5.367.583.262,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **6.299.911.128,00** | | | | | | | **5.367.583.262,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **6.299.911.128,00** | | | | | | | **5.367.583.262,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **1.443.910.074,00** | | | | | | **-** | **1.625.172.922,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 72.340.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 103.786.800,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 72.340.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 103.786.800,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 154.149.826,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 226.943.224,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 90.006.570,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 122.023.705,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 64.143.256,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.919.519,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 788.734.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 909.898.280,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 52.494.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 103.543.880,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 736.240.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 806.354.400,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 428.686.248,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 384.544.618,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 9 Unit | 199.090.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 248.071.800,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 229.596.248,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 136.472.818,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| 2. | **4.01.03** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **4.856.001.054,00** | | | | | | **-** | **3.742.410.340,00** | |
| | 4.01.03.1.01 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | - | - | | | - | 1.618.465.859,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.960.175.458,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.01.0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan* | | | | 4 Dokumen | 183.334.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.040.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan* | | | | 3 Dokumen | 83.334.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.040.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.1.01.0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah* | | | | 3 Dokumen | 1.351.797.859,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.752.095.458,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02 | Pelaksanaan Otonomi Daerah | - | - | | | - | 2.299.195.195,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 741.834.882,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02.0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD* | | | | 6 Dokumen | 1.216.502.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 312.120.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02.0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan* | | | | 5 Dokumen | 710.168.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.080.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02.0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan* | | | | 3 Laporan | 372.525.195,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 221.634.882,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | - | - | | | - | 938.340.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.040.400.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi* | | | | 6 Dokumen | 466.670.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 520.200.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.1.03.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi* | | | | 2 Dokumen | 216.668.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.080.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi* | | | | 3 Laporan | 255.002.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 312.120.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | | **BIRO PEREKONOMIAN** | | | | | | **3.026.260.783,00** | | | | | | | **3.589.132.836,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **3.026.260.783,00** | | | | | | | **3.589.132.836,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **3.026.260.783,00** | | | | | | | **3.589.132.836,00** | |
| 1. | **4.01.06** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **-** | **-** | | | **-** | **3.026.260.783,00** | | | | | | **-** | **3.589.132.836,00** | |
| | 4.01.06.1.01 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | - | - | | | - | 1.596.739.313,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.862.874.106,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro* | | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 364.816.260,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro* | | | | 10 Dokumen | 1.396.739.313,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.498.057.846,00 | BIRO PEREKONOMIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.06.1.02 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | - | - | | | - | 809.226.000,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 841.918.730,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan* | | | | 14 Dokumen | 427.395.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 444.661.758,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup* | | | | 2 Dokumen | 186.430.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 198.644.612,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air* | | | | 3 Dokumen | 195.401.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 198.612.360,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | - | - | | | - | 620.295.470,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 884.340.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha* | | | | 1 Dokumen | 232.795.470,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 364.140.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi* | | | | 1 Dokumen | 177.500.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 260.100.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah* | | | | 1 Dokumen | 210.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 260.100.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | **BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **12.227.813.335,00** | | | | | | | **16.494.387.581,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **12.227.813.335,00** | | | | | | | **16.494.387.581,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **12.227.813.335,00** | | | | | | | **16.494.387.581,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **2.464.864.581,00** | | | | | | **-** | **3.188.240.828,00** | |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.131.822.681,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.388.215.728,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 767.098.258,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 999.000.000,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 41.733.023,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 40.994.720,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 322.991.400,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 348.221.008,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.099.620.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Sipil Negara (ASN) | - | 1.393.780.000,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 bulan Laporan | 1.099.620.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 1.393.780.000,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 233.421.900,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 406.245.100,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 121.445.100,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 221.445.100,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 58 Unit | 111.976.800,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 184.800.000,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 2. | **4.01.04** | **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **-** | **-** | | | **-** | **9.762.948.754,00** | | | | | | **-** | **13.306.146.753,00** | |
| | 4.01.04.1.01 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | - | - | | | - | 6.173.815.385,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 6.773.815.385,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.01.0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola* | | | | 36 Unit | 4.705.534.974,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 4.905.534.974,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi* | | | | 6 Lembaga | 1.468.280.411,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.868.280.411,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | - | - | | | - | 2.318.982.969,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.338.982.969,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan* | | | | 5 Dokumen | 537.109.736,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 907.109.736,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan* | | | | 5 Dokumen | 400.199.143,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.850.199.143,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial* | | | | 5 Dokumen | 1.381.674.090,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.581.674.090,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | - | - | | | - | 1.270.150.400,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.193.348.399,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata* | | | | 2 Dokumen | 552.878.311,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 876.076.311,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja* | | | | 3 Dokumen | 506.589.080,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 906.589.080,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan* | | | | 3 Dokumen | 210.683.009,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 410.683.008,00 | BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | **BIRO ORGANISASI** | | | | | | **2.243.468.541,00** | | | | | | | **3.397.689.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **2.243.468.541,00** | | | | | | | **3.397.689.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **2.243.468.541,00** | | | | | | | **3.397.689.000,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **1.153.206.378,00** | | | | | | **-** | **1.500.000.000,00** | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.153.206.378,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.500.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 100 % Dokumen | 1.153.206.378,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.500.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | **-** | **-** | | | **-** | **1.090.262.163,00** | | | | | | **-** | **1.897.689.000,00** | |
| | 4.01.02.1.01 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | - | - | | | - | 318.007.615,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 700.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota* | | | | 100% Dokumen | 108.943.386,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota* | | | | 100% Dokumen | 84.502.386,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan* | | | | 100% Dokumen | 124.561.843,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | - | - | | | - | 772.254.548,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.197.689.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi* | | | | 100 Persen Dokumen | 157.641.880,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja* | | | | 55 Dokumen | 312.558.559,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 390.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja* | | | | 100 persen Laporan | 56.689.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 67.689.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan* | | | | 100 % Dokumen | 99.565.109,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik* | | | | 100 % Dokumen | 145.800.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 340.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | | **BIRO HUKUM** | | | | | | **6.198.713.300,00** | | | | | | | **8.325.287.253,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **6.198.713.300,00** | | | | | | | **8.325.287.253,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **6.198.713.300,00** | | | | | | | **8.325.287.253,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **1.428.707.947,00** | | | | | | **-** | **2.021.023.000,00** | |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 40.453.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 59.453.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 24.100.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 34.100.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 16.353.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 25.353.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 827.189.510,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.350.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 827.189.510,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.350.000.000,00 | BIRO HUKUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 401.385.437,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 415.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 5.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 15.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 396.385.437,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 400.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 26.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 36.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 26.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 36.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 14.200.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 30.570.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 14.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 30.570.000,00 | BIRO HUKUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 119.480.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 130.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 119.480.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 130.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| 2. | **4.01.05** | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | **-** | **-** | | | **-** | **4.770.005.353,00** | | | | | | **-** | **6.304.264.253,00** | |
| | 4.01.05.1.01 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | - | - | | | - | 2.603.614.563,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 3.603.614.563,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun* | | | | 46 Dokumen | 696.374.455,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 996.374.455,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun* | | | | 1569 Dokumen | 322.820.463,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 522.820.463,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya* | | | | 94 Dokumen | 684.419.645,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 884.419.645,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi* | | | | 600 Dokumen | 900.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.200.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | - | - | | | - | 2.166.390.790,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.700.649.690,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan* | | | | 6 Kasus | 1.313.794.740,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.600.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan* | | | | 50 Kasus | 852.596.050,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.100.649.690,00 | BIRO HUKUM |
| | | **BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | | **6.544.181.265,00** | | | | | | | **7.203.639.789,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **6.544.181.265,00** | | | | | | | **7.203.639.789,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **6.544.181.265,00** | | | | | | | **7.203.639.789,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **2.103.005.775,00** | | | | | | **-** | **2.318.346.742,00** | |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 340.838.761,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 374.922.636,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 189.644.632,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 208.609.095,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 151.194.129,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 166.313.541,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 189.435.996,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 208.379.595,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 40 Orang | 189.435.996,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 208.379.595,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.056.082.000,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.161.690.200,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 584.582.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 643.040.200,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 471.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 518.650.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 154.196.518,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 174.656.561,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 11.781.463,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 18.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 142.415.055,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 156.656.561,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 362.452.500,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 398.697.750,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 17 Unit | 270.877.500,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 297.965.250,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 100 Unit | 91.575.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 100.732.500,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 2. | **4.01.08** | **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | **-** | **-** | | | **-** | **4.441.175.490,00** | | | | | | **-** | **4.885.293.047,00** | |
| | 4.01.08.1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 2.980.816.360,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 3.341.818.004,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.01.0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD* | | | | 1 Laporan | 501.316.440,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 551.448.084,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.01.0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN* | | | | 1 Laporan | 1.019.386.560,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.121.325.220,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.01.0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah* | | | | 1 Laporan | 1.460.113.360,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 1.669.044.700,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 1.460.359.130,00 | | | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 1.543.475.043,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 380.581.130,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 418.639.243,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah* | | | | 1 Laporan | 699.668.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 706.714.800,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 380.110.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | | 418.121.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | **BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN** | | | | | | **16.789.184.342,00** | | | | | | | **17.368.102.777,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **16.789.184.342,00** | | | | | | | **17.368.102.777,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **16.789.184.342,00** | | | | | | | **17.368.102.777,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **16.789.184.342,00** | | | | | | **-** | **17.368.102.777,00** | |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 172.400.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 189.640.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 172.400.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 189.640.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 832.785.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 916.063.500,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 5 Dokumen | 466.741.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 513.415.100,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 366.044.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 402.648.400,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 92.130.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 101.343.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 92.130.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 101.343.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.947.934.366,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.142.727.803,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.947.934.366,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.142.727.803,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13 | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | - | - | | | - | 11.151.441.360,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 11.166.585.496,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13.0001 | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan* | | | | 800 Dokumen | 2.236.700.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.910.370.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 1 Laporan | 7.802.720.200,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 8.032.992.220,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan* | | | | 1 Laporan | 1.112.021.160,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.223.223.276,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | - | - | | | - | 2.592.493.616,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.851.742.978,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara* | | | | 1 Laporan | 1.676.768.616,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.844.445.478,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 1 Laporan | 861.675.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 947.842.500,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan* | | | | 1 Laporan | 54.050.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 59.455.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | | **BIRO PENGADAAN BARANG/JASA** | | | | | | **13.774.801.400,00** | | | | | | | **14.445.276.650,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **13.774.801.400,00** | | | | | | | **14.445.276.650,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **13.774.801.400,00** | | | | | | | **14.445.276.650,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **5.692.500.000,00** | | | | | | **-** | **5.692.500.000,00** | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun*<br>*persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu*<br>*Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah* | - | | | 95 %<br>100 %<br>100 % | 5.692.500.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 5.692.500.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 82 Orang/ Bulan | 5.692.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 5.692.500.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| 2. | **4.01.07** | **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | ***Persentase paket yang selesai pemilihan*** | **-** | | | **100 %** | **8.082.301.400,00** | | | | | | **-** | **8.752.776.650,00** | |
| | 4.01.07.1.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan RUP* | - | | | 85 % | 5.542.401.387,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 6.078.493.600,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.01.0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Laporan | 166.260.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.01.0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Laporan | 5.047.647.787,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 5.500.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 3 Laporan | 328.493.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 328.493.600,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | *Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik* | - | | | 85 % | 1.063.993.950,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 809.229.750,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.02.0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 1 Laporan | 251.855.950,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 259.229.750,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.02.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Laporan | 622.373.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.02.0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 4 Laporan | 189.765.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | *Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan, SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa* | - | | | 85 % | 1.475.906.063,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.865.053.300,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.03.0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 15 Orang | 178.468.290,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.03.0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Dokumen | 354.161.300,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 400.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |
| | 4.01.07.1.03.0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Dokumen | 943.276.473,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.215.053.300,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **SEKRETARIAT DPR ACEH** | | | | | | **144.547.188.528,00** | | | | | | | **166.535.233.647,57** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **144.547.188.528,00** | | | | | | | **166.535.233.647,57** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **144.547.188.528,00** | | | | | | | **166.535.233.647,57** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **106.718.624.560,00** | | | | | | **-** | **121.085.402.213,57** | |
| | 4.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 466.301.532,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 527.818.683,60 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 181.202.294,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.382.730,10 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 216.576.038,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 249.062.681,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 34.377.850,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 32.135.772,50 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 8 Laporan | 34.145.350,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 38.237.500,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja* | - | | | 95 % | 21.104.806.531,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | - | 24.281.401.873,77 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 136 Orang/ Bulan | 17.564.496.030,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 20.199.170.433,87 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 3.216.615.564,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 3.699.107.898,60 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 10500 Dokumen | 210.072.507,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 254.610.676,20 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 13 Dokumen | 54.101.250,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 62.216.741,10 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 16.447.030,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 18.914.449,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 4 Dokumen | 43.074.150,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 47.381.675,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana* | - | | | 95 % | 256.489.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | - | 282.137.900,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 256.489.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 282.137.900,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana dengan baik* | - | | | 95 % | 1.409.770.086,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | - | 1.491.218.590,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 219.200.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 241.120.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 314.418.086,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 330.138.990,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 9 Orang | 476.152.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 499.959.600,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 300 Orang | 400.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 420.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Kegiatan Administrasi Umum yang terlaksana* | - | | | 95 % | 2.847.797.058,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | - | 3.115.499.563,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 1.711.544.602,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 1.882.699.062,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 206.610.634,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 227.271.697,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 7 Dokumen | 288.252.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 32 Laporan | 432.280.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 475.508.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 5 Laporan | 209.109.822,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 230.020.804,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana* | - | | | 95 % | 765.076.720,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | - | 841.584.392,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 702.970.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 773.267.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 62.106.720,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 68.317.392,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia* | - | | | 95 % | 15.378.130.389,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | - | 16.915.943.428,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 4.470.427.166,00 | - Kab. Aceh Besar, Krueng Barona Jaya, Meunasah Papeun<br>- Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam<br>- Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 4.917.469.883,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 278.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 306.350.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 10.629.203.223,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 11.692.123.545,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Kegiatan pemeliharaan barang pada yang terlaksana* | - | | | 95 % | 4.208.597.476,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | - | 4.629.457.224,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 309.340.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 340.274.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 79 Unit | 2.580.401.420,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 2.838.441.562,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 378.320.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 416.152.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 15 Unit | 940.536.056,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat DPRA | | 1.034.589.662,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terlaksana* | - | | | 95 % | 54.283.009.623,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 62.404.301.202,20 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 81 Orang/ Bulan | 53.859.812.328,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 61.938.784.177,20 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.1.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 387.089.135,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 425.798.049,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 81 Orang | 36.108.160,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 39.718.976,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.16 | Layanan Administrasi DPRD | - | - | | | - | 5.998.646.145,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 6.596.039.357,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD* | | | | 12 Laporan | 48.480.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 53.328.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 20 Laporan | 49.428.032,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 51.899.433,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.01.1.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 21 Paket | 5.900.738.113,00 | - Kab. Aceh Besar, Krueng Barona Jaya, Meunasah Papeun<br>- Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 6.490.811.924,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | ***Persentase Pembahasan Qanun yang terfasilitasi*** | **-** | | | **80 %** | **37.828.563.968,00** | | | | | | **-** | **45.449.831.434,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.1.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | *Persentase Pembahasan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi* | - | | | 80 % | 8.519.331.343,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 9.024.050.900,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 403.858.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 424.050.900,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda* | | | | 5 Dokumen | 6.650.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 7.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 1 Dokumen | 765.473.343,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 3 Dokumen | 350.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Persentase pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana* | - | | | 80 % | 640.785.100,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 672.824.355,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 2 Dokumen | 50.767.300,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 53.305.665,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 2 Dokumen | 43.767.300,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 45.955.665,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 395.178.600,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 414.937.530,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.02.0004 | Pembahasan Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD* | | | | 1 Dokumen | 49.367.300,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 51.835.665,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester* | | | | 1 Dokumen | 36.337.300,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 38.154.165,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 65.367.300,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 68.635.665,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.1.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi* | - | | | 80 % | 5.987.425.500,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 6.286.796.775,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 1 Laporan | 325.383.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 341.652.465,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 351.939.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 369.536.265,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 1 Laporan | 514.594.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 540.324.330,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 312.105.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 327.710.565,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam* | | | | 1 Laporan | 285.549.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 299.826.765,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan* | | | | 1 Dokumen | 1.712.627.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 1.798.259.190,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1.968.427.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 2.066.848.665,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 516.798.600,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 542.638.530,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Persentase kegiatan peningakatan kapasitas DPRA yang terlaksana* | - | | | 80 % | 7.190.588.121,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 12.618.913.800,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD* | | | | 6 Dokumen | 174.528.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 2.748.212.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 10 Dokumen | 1.179.716.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 1.238.701.800,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 44 Orang | 176.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 2.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.1.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 9 Orang | 36.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 432.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 1.151.742.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 1.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | | | | 3 Dokumen | 1.504.601.721,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 1.600.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 200 Dokumen | 2.968.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 3.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana* | - | | | 80 % | 10.873.205.248,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 11.898.340.252,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 8 Laporan | 1.186.856.380,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.246.199.199,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 56.854.026,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 59.696.727,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 1 Dokumen | 9.629.494.842,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 10.592.444.326,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | *Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD* | - | | | 80 % | 768.417.036,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 841.816.099,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD* | | | | 1 Dokumen | 204.782.656,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 2 Laporan | 563.634.380,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 591.816.099,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | *Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi* | - | | | 80 % | 54.562.600,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 59.582.156,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah* | | | | 2 Dokumen | 54.562.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 59.582.156,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.1.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Persentase Fasilitasi Tugas DPRA yang terlaksana* | - | | | 80 % | 3.794.249.020,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | - | 4.047.507.097,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 4 Dokumen | 983.457.460,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 1.032.630.333,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun* | | | | 1 Laporan | 123.649.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 125.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | | | | 40 Dokumen | 1.839.640.380,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 2 Dokumen | 203.054.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 213.206.700,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | 4.02.02.1.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus* | | | | 1 Dokumen | 644.447.680,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | DPRA | | 676.670.064,00 | SEKRETARIAT DPR ACEH |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **72.795.523.977,00** | | | | | | | **78.730.422.039,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **72.795.523.977,00** | | | | | | | **78.730.422.039,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **50.791.439.889,00** | | | | | | | **56.268.422.039,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **33.272.550.577,00** | | | | | | **-** | **36.945.536.000,00** | |
| | 5.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun* | - | | | 5 Dokumen | 432.075.642,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 494.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 254.798.906,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 177.276.736,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 194.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.356.941.026,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 27.863.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 140 Orang/ Bulan | 25.026.941.026,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 27.500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 190.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 209.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 140.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 154.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 456.576.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 511.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 paket Paket | 277.150.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 25 Orang | 179.426.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 211.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.162.966.115,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.683.536.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 27.997.904,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 30.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 362.084.600,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 905.856.585,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.203.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 222.789.026,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 343.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 51.336.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 56.336.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 24 Laporan | 592.902.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 650.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.052.755.856,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 3.322.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 22.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 853.103.856,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 900.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.179.652.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.811.235.938,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.072.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 40 Unit | 907.721.200,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 997.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 80 Unit | 476.587.738,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 574.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 426.927.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 501.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **4.653.956.053,00** | | | | | | **-** | **4.861.000.000,00** | |
| | 5.01.02.1.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | - | | | - | 2.688.356.117,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.700.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah* | | | | 3 Dokumen | 2.688.356.117,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.700.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 1.965.599.936,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.161.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 5 Laporan | 1.200.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.320.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi* | | | | 5 Dokumen | 765.599.936,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 841.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **12.864.933.259,00** | | | | | | **-** | **14.461.886.039,00** | |
| | 5.01.03.1.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | | | - | 4.288.311.087,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.717.142.196,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 900.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 990.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 1.349.945.087,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.484.939.596,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 3 Laporan | 2.038.366.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.242.202.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | | | - | 4.288.311.084,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 4.995.743.843,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 677.948.948,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 745.743.843,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1.812.499.895,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.000.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 964.842.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 833.019.941,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 950.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | | | - | 4.288.311.088,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.749.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 0 Dokumen | 590.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 649.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 4 Dokumen | 590.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 649.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 5 Laporan | 2.846.311.088,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 10 Dokumen | 852.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 900.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **5.410.689.732,00** | | | | | | | **2.150.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **5.410.689.732,00** | | | | | | **-** | **2.150.000.000,00** | |
| | 5.05.02.1.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | - | | | - | 476.310.536,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola* | | | | 1 Dokumen | 476.310.536,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | - | - | | | - | 1.047.520.265,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | | | | 2 Dokumen | 1.047.520.265,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | - | - | | | - | 2.143.858.931,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* | | | | 1 Dokumen | 1.351.458.931,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan* | | | | 1 Dokumen | 351.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman* | | | | 1 Dokumen | 441.400.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | - | | | - | 1.743.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | | | | 5 Dokumen | 1.145.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | 3 Laporan | 598.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **-** | **-** | | | | | | **16.593.394.356,00** | | | | | | | **20.312.000.000,00** | |
| 1. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **16.593.394.356,00** | | | | | | **-** | **20.312.000.000,00** | |
| | 5.01.02.1.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | - | | | - | 7.476.994.358,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 7.870.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi* | | | | 1 Berita Acara | 2.900.533.764,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.800.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 4.576.460.594,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 5.070.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 2.316.399.998,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 5.072.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 8 Dokumen | 2.316.399.998,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 5.072.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 6.800.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 7.370.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 2 Laporan | 6.800.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 7.370.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH** | | | | | | **2.012.527.705.422,00** | | | | | | | **2.237.706.334.837,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **2.012.527.705.422,00** | | | | | | | **2.237.706.334.837,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **2.011.508.307.322,00** | | | | | | | **2.235.896.751.837,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **154.655.458.561,00** | | | | | | **-** | **151.792.563.425,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tingkat Konsistensi antara Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja* | - | | | 100 % | 3.155.305.407,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA | - | 3.470.835.945,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 1.387.744.600,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA | | 1.526.519.060,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 1.767.560.807,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA | | 1.944.316.885,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertibnya Administrasi Keuangan* | - | | | 100 % | 91.041.968.427,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 99.201.535.427,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 363 Orang/ Bulan | 89.343.617.058,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 96.873.264.058,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 5 Laporan | 666.472.825,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.171.392.825,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 5 Laporan | 1.031.878.544,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.156.878.544,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPA* | - | | | 1 Laporan | 1.874.688.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.995.385.050,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 5 Laporan | 1.874.688.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.995.385.050,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik* | - | | | 100 % | 851.988.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.344.401.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 545.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 86 Orang | 801.988.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 799.401.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana* | - | | | 12 Bulan | 18.074.457.355,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 16.023.786.902,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.652.054.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.709.990.278,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 7.738.208.915,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.523.900.400,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 4.870.811.440,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.968.000.591,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 893.673.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 901.278.633,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.820.110.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.500.367.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 99.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.360.250.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Kendaraan dan Gedung Kantor Penunjang SKPA* | - | | | 11 Unit | 5.707.230.444,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.502.027.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 1.419.600.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 700.378.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 4.287.630.444,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 801.649.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Jasa Penunjang SKPA* | - | | | 4 Laporan | 26.930.687.960,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 23.954.441.079,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 429.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 390.530.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 6.825.445.020,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 6.970.002.499,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.622.004.220,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.526.020.080,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 17.054.238.720,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 14.067.888.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah* | - | | | 257 Unit | 7.019.132.968,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 4.300.151.022,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 250 Unit | 2.995.032.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.025.111.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 4.024.100.968,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.275.040.022,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | ***Tercapainya WTP Pemerintah Daerah*** | **-** | | | **Sesuai Sesuai/ Tidak Sesuai** | **1.811.869.194.971,00** | | | | | | **-** | **2.037.987.135.071,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Penetapan APBA Tepat Waktu* | - | | | 209 Dokumen | 5.597.914.301,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | - | 9.720.449.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 418.575.100,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 598.949.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 0 Dokumen | 202.682.450,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 503.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 47 Dokumen | 202.682.450,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 503.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 47 Dokumen | 217.545.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 700.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.1.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 47 Dokumen | 228.406.830,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 863.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 47 Dokumen | 206.930.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 280.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 1.727.494.350,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 2.350.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 3 Dokumen | 324.589.800,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | BPKA Aceh | | 450.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 6 Dokumen | 1.548.161.500,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi* | | | | 141 Orang | 723.529.271,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.975.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | *Tercapainya WTP Pemerintah Kabupaten/Kota* | - | | | 926 Dokumen | 6.399.491.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | - | 7.556.196.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.02.0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota* | | | | 23 Laporan | 1.195.486.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.195.486.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.02.0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 23 Laporan | 919.833.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.304.167.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.02.0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 23 Laporan | 929.436.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.013.931.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.1.02.0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi* | | | | 600 Dokumen | 1.167.132.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.647.635.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.02.0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan* | | | | 5 Laporan | 1.252.604.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.366.477.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.02.0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 935.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.028.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Terlaksananya Tertib Administrasi Perbendaharaan* | - | | | 21 Dokumen | 9.327.521.632,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | - | 10.260.273.796,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.03.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 40.728 Dokumen | 3.227.071.167,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 3.549.778.284,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.03.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | | | | 5 Dokumen | 1.927.083.070,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 2.119.791.377,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.03.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 754 Dokumen | 2.096.029.595,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 2.305.632.555,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.03.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | | | | 40.868 Dokumen | 2.077.337.800,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 2.285.071.580,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu* | - | | | 4 Laporan | 11.463.767.058,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | - | 40.493.258.863,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.1.04.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 2 Laporan | 1.100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 12.100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 4 Dokumen | 1.100.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 12.100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 1 Laporan | 1.711.200.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 3.699.218.764,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 1 Laporan | 2.750.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 3.617.117.547,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* | | | | 4 Dokumen | 550.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 6.050.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi* | | | | 600 Orang | 1.752.567.058,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.926.922.552,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.04.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina* | | | | 8 Lembaga | 2.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Terlaksananya Analisis, Pengelolaan dan perencanaan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Aceh* | - | | | 3 Laporan | 1.779.080.500.980,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | - | 1.969.956.956.912,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.1.05.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 1 Laporan | 965.393.660.709,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 675.121.020.853,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.05.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 40.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH, PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 519.604.222.390,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.05.0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi* | | | | 1 Laporan | 773.686.840.271,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 775.231.713.669,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | ***Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan*** | **-** | | | **62,5 %** | **11.195.059.288,00** | | | | | | **-** | **10.942.791.503,00** | |
| | 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Tersusunnya Laporan Barang Milik Pemerintah Aceh* | - | | | 12 Dokumen | 11.195.059.288,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | - | 10.942.791.503,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.03.1.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 986.059.036,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.133.659.339,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.03.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.450.297.937,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.450.298.540,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.03.1.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2.112.839.284,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.622.935.578,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.03.1.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 3.546.230.913,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 3.546.231.002,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.03.1.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1.165.477.452,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.165.512.135,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.03.1.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 5 Dokumen | 1.934.154.666,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 2.024.154.909,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| 4. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | ***Persentase kemandirian fiskal Aceh*** | **-** | | | **21,42 %** | **33.788.594.502,00** | | | | | | **-** | **35.174.261.838,00** | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap Total Pendapatan Aceh* | - | | | 30 % | 33.788.594.502,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | - | 35.174.261.838,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 2 Dokumen | 793.099.700,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 816.893.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 4 Laporan | 592.221.500,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 610.017.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 23 Laporan | 3.399.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 3.500.970.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 2 Unit Server, 5 Sam Sarana dan Prasarana | 5.356.000.210,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 5.516.680.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 23 Laporan | 1.257.115.574,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | BPKA Aceh | | 15.714.829.041,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 2 Laporan | 1.618.934.018,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 1.667.502.039,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 888000 Dokumen Ketetapan | 236.900.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 244.007.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 23 Laporan | 10.552.772.900,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 530.430.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah* | | | | 64 Dokumen | 540.750.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 556.972.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 100000 Dokumen SSPD | 4.092.372.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 530.450.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti* | | | | 4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan | 257.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 265.225.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 92 Laporan | 4.061.928.600,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 4.159.385.758,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 2 Laporan | 515.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 530.450.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.04.1.01.0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 515.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | BPKA Aceh | | 530.450.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | **-** | **-** | | | | | | **1.019.398.100,00** | | | | | | | **1.809.583.000,00** | |
| 1. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | ***Tercapainya WTP Pemerintah Daerah*** | **-** | | | **Sesuai Sesuai/ Tidak Sesuai** | **1.019.398.100,00** | | | | | | **-** | **1.809.583.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Penetapan APBA Tepat Waktu* | - | | | 209 Dokumen | 1.019.398.100,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.809.583.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | 5.02.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 1.019.398.100,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.809.583.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN ACEH** | | | | | | **24.234.757.612,00** | | | | | | | **37.575.000.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **24.234.757.612,00** | | | | | | | **37.575.000.000,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **24.234.757.612,00** | | | | | | | **37.575.000.000,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **18.778.072.206,00** | | | | | | **-** | **25.175.000.000,00** | |
| | 5.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 15.493.711.500,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 17.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 110 Orang/ Bulan | 13.712.230.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 15.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 10 Dokumen | 1.781.481.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.521.281.110,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 4.005.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 48.395.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 80.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 240.392.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 419.930.999,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 600.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 60.750.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4320 Dokumen | 18.051.111,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 733.762.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 953.378.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.870.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 17.800.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 70.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 700.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 235.578.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 809.701.596,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 386.448.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 800.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 423.253.596,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **-** | **-** | | | **-** | **5.456.685.406,00** | | | | | | **-** | **12.400.000.000,00** | |
| | 5.03.02.1.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | - | | | - | 3.071.105.601,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 7.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 2 Dokumen | 721.829.607,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.600.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 55 Lembaga | 1.567.683.471,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 144.810.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 350.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 316.105.523,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 800.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 2 Laporan | 320.677.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 750.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.02 | Mutasi dan Promosi ASN | - | - | | | - | 1.463.728.417,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.750.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah* | | | | 2 Dokumen | 145.459.475,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.1.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 12 Laporan | 791.259.678,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 4 Dokumen | 527.009.264,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | - | - | | | - | 162.889.870,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fungsional ASN yang Dibina* | | | | 1500 Orang | 162.889.870,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | - | | | - | 758.961.518,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.1.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 0 Dokumen | 300.738.338,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.04.0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur* | | | | 0 Dokumen | 139.580.340,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 0 Orang | 133.835.720,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | 5.03.02.1.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 0 Laporan | 184.807.120,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 350.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN ACEH |
| | | **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **108.177.976.208,00** | | | | | | | **118.276.737.795,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **108.177.976.208,00** | | | | | | | **118.276.737.795,00** | |
| | **-** | **-** | | | | | | **108.177.976.208,00** | | | | | | | **118.276.737.795,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **-** | **-** | | | **-** | **74.219.702.334,00** | | | | | | **-** | **80.484.448.421,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.04.02.1.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | - | - | | | - | 2.676.149.377,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 2.943.764.314,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.01.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 450.490.269,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 495.539.296,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.01.0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun* | | | | 9 Dokumen | 1.385.255.079,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.523.780.586,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | | | | 60 Orang | 420.404.029,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 462.444.432,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.01.0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi* | | | | 2 Dokumen | 420.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 462.000.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | - | | | - | 71.543.552.957,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 77.540.684.107,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi* | | | | 60 Orang | 332.931.451,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 366.224.596,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar* | | | | 12 Laporan | 67.595.319.343,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 74.354.851.274,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga* | | | | 30 Dokumen | 500.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 550.000.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.04.02.1.02.0006 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 1.550.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.705.000.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 105 Orang | 1.167.802.163,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 127.358.237,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 1 Dokumen | 397.500.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 437.250.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **33.958.273.874,00** | | | | | | **-** | **37.792.289.374,00** | |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 7.387.618.366,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 8.142.199.563,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 80 Laporan | 4.862.862.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.351.960.900,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.052.882.422,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 4.459.791.844,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 53.746.200,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 60.742.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Fasilitasi Keprotokolan | - | - | | | - | 610.898.500,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 671.988.350,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara* | | | | 1 Laporan | 610.898.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 671.988.350,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.423.128.613,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.386.189.047,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 1.873.511.020,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 2.483.924.520,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 69.757.839,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 76.733.623,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 7.387.618.366,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 8.142.199.563,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 1.693.389.366,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.862.464.501,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.052.882.422,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 4.459.791.844,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 22 Unit | 666.093.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 732.702.300,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.423.128.613,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.386.189.047,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 413.855.404,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 455.240.944,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 7.387.618.366,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 8.142.199.563,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 50.673.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 55.748.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 780.694.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 872.026.162,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.423.128.613,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 6.386.189.047,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 162.926.407,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 178.940.850,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 1.254.459.871,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.377.798.831,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 10 Laporan | 998.044.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.097.918.800,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 650.574.072,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 715.631.479,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.052.882.422,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 4.459.791.844,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 016 Unit | 3.333.043.222,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 3.666.347.544,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 15.483.745.973,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 17.032.120.570,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 99 Orang/ Bulan | 15.483.745.973,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 17.032.120.570,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.100.000.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | - | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 1.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 1.100.000.000,00 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH** | | | | | | **29.127.759.033,00** | | | | | | | **55.251.262.500,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **29.127.759.033,00** | | | | | | | **55.251.262.500,00** | |
| | **5.07** | **PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | | | | | | **29.127.759.033,00** | | | | | | | **55.251.262.500,00** | |
| 1. | **5.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **24.949.776.433,00** | | | | | | **-** | **48.331.137.500,00** | |
| | 5.07.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 50.200.000,00 | | | - | - | - | - | 60.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 50.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 60.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.459.865.360,00 | | | - | - | - | - | 15.870.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 108 Orang/ Bulan | 7.200.225.360,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 10.580.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 5 Dokumen | 3.259.640.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.290.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 54.000.000,00 | | | - | - | - | - | 345.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 12 Orang | 54.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 345.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.592.189.553,00 | | | - | - | - | - | 7.045.637.500,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 100.142.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 250.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 90.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 575.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 566.188.262,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 575.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 2.215.561.641,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.645.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 118.911.050,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 79.350.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 26.496.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 46.287.500,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1780 Laporan | 1.474.890.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.875.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 306.290.000,00 | | | - | - | - | - | 4.140.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 209.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.725.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 15.600.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.840.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 81.690.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 575.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.698.275.720,00 | | | - | - | - | - | 5.370.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 160 paket Laporan | 380.031.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 569.250.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 2.050.764.120,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.760.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 100.880.600,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 661.250.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 1.166.600.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.380.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 5.788.955.800,00 | | | - | - | - | - | 15.500.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 40 Unit | 3.545.856.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.000.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 11 Unit | 1.159.740.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.750.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 11 Unit | 1.083.359.800,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 5.750.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| 2. | **5.07.02** | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | **-** | **-** | | | **-** | **4.177.982.600,00** | | | | | | **-** | **6.920.125.000,00** | |
| | 5.07.02.1.01 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | - | - | | | - | 4.177.982.600,00 | | | - | - | - | - | 6.920.125.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.02.1.01.0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan* | | | | 3 Laporan | 408.554.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 793.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.02.1.01.0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 73.923.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 661.250.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.02.1.01.0003 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan* | | | | 12 Laporan | 196.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 793.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.02.1.01.0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya* | | | | 2 Laporan | 374.492.936,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 991.875.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung* | | | | 1800 Laporan | 3.125.012.664,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.680.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | **51.135.107.110,00** | | | | | | | **53.643.239.469,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **51.135.107.110,00** | | | | | | | **53.643.239.469,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **51.135.107.110,00** | | | | | | | **53.643.239.469,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **35.573.253.290,00** | | | | | | **-** | **36.979.680.092,00** | |
| | 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 177.309.968,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 177.305.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 13.832.926,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 47.640.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 135.673.125,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 123.590.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 27.803.917,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 6.075.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 27.773.480.159,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 29.424.531.418,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1526 Orang/ Bulan | 25.781.368.739,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 27.199.775.418,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 1.876.780.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.111.536.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 115.331.420,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 113.220.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.933.450.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.186.580.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 4.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 45 Orang | 900.800.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.400.800.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 51 Orang | 1.028.150.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 785.780.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.350.771.683,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.935.719.594,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 533.933.022,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 731.627.594,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 137.880.661,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 65.880.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 50.940.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 40 Laporan | 1.613.078.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.003.152.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 154.800.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 180.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.400.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 130.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10.400.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 403.956.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 462.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 7.020.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 12.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 396.936.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 450.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.779.485.480,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.613.544.080,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 30 Unit | 1.717.340.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.889.570.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 24.720.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 24.720.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 183.399.280,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 183.399.280,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 854.026.200,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 515.854.800,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | ***Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP*** | **-** | | | **80 %** | **9.890.027.749,00** | | | | | | **-** | **10.512.974.777,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *1. Laporan hasil pengawasan kinerja; 2. Laporan hasil pengawasan keuangan* | - | | | 166 Laporan | 9.393.836.349,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 8.900.006.777,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 10 Laporan | 703.271.036,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.037.121.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 23 Laporan | 3.223.699.026,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.290.911.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 103 Laporan | 181.080.895,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 282.574.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 25 Laporan | 463.170.875,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 472.230.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 3.696.150.420,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.165.783.277,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 3 Kesepakatan | 127.599.175,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 264.288.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 70 Dokumen | 998.864.922,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.387.099.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | - | | | - | 496.191.400,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.612.968.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 2 Laporan | 136.800.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 336.068.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu* | | | | 40 Laporan | 359.391.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.276.900.000,00 | INSPEKTORAT |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **-** | **-** | | | **-** | **5.671.826.071,00** | | | | | | **-** | **6.150.584.600,00** | |
| | 6.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - | - | | | - | 556.291.284,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 762.193.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 3 Rekomendasi | 556.291.284,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 762.193.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | - | | | - | 5.115.534.787,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 5.388.391.600,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 35 Perangkat Daerah | 3.473.942.020,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.273.188.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 10 Perangkat Daerah | 42.540.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 283.584.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 6 Kegiatan | 106.560.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 768.590.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 47 Perangkat Daerah | 1.492.492.767,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.063.029.600,00 | INSPEKTORAT |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **154.075.236.579,00** | | | | | | | **39.697.407.538,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **154.075.236.579,00** | | | | | | | **39.697.407.538,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **154.075.236.579,00** | | | | | | | **39.697.407.538,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **14.923.957.006,00** | | | | | | **-** | **14.125.593.342,00** | |
| | 8.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen SAKIP* | - | | | 14 Dokumen | 974.682.148,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Sipil Negara | - | 945.373.772,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 205.636.373,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Aparatur Sipil Negara | | 208.941.713,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 209.964.184,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 217.919.891,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 46.648.285,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 197.027.899,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 512.433.306,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 321.484.269,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Keuangan* | - | | | 2 Dokumen | 8.611.206.391,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | - | 8.876.906.625,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 55 Orang/ Bulan | 8.257.202.839,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 8.500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 205.512.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 240.660.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 148.491.552,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 136.246.625,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (RKBMD dan Data Aset)* | - | | | 2 Laporan | 43.024.742,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | - | 33.558.779,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 43.024.742,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 33.558.779,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah laporan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan* | - | | | 1 Laporan | 79.020.809,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | - | 109.423.292,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 79.020.809,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 109.423.292,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi perkantoran* | - | | | 1 Dokumen | 1.771.314.473,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | - | 1.911.287.502,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 11.985.070,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 72.618.179,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 496.974.840,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 240.160.021,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 216.481.949,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 52.484.869,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 48.530.974,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 8.520.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 8.946.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 961.189.673,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 1.064.710.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah* | - | | | 3 Laporan | 2.641.210.484,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | - | 1.313.267.829,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 22.800.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 33.957.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 458.386.864,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 608.353.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 2.160.023.620,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 670.957.429,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang terpelihara* | - | | | 85 Unit | 803.497.959,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | - | 935.775.543,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 534.408.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 536.747.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 68 Unit | 136.639.959,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 169.327.415,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 132.450.000,00 | - Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 229.700.728,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | ***Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan*** | **-** | | | **31 %** | **4.164.700.912,00** | | | | | | **-** | **7.697.407.537,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.02.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Karakter Kebangsaan, Bela Negara dan Sejarah Kebangsaan di Kecamatan Se-Aceh* | - | | | 80 Kecamatan | 4.164.700.912,00 | | | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | - | 7.697.407.537,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 387.024.859,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 570.557.280,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 424.045.044,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 719.520.765,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 1000 Orang | 677.458.790,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 1.200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 150 Orang | 139.602.954,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 520.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 2 Laporan | 133.629.949,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 187.329.492,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 120 Orang | 2.402.939.316,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 4.500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **-** | **-** | | | **-** | **129.119.371.518,00** | | | | | | **-** | **8.316.414.567,00** | |
| | 8.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | *Jumlah Dokumen Perumusan Indeks Demokrasi Indonesia di Aceh* | - | | | 1 Dokumen | 129.119.371.518,00 | | | - | Mensukses kan Pemilu Serentak dan PON 2024 | Komponen Masyarakat, Partai Politik, Perangkat Gampong, Mahasiswa dan Pelajar | - | 8.316.414.567,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 8 Dokumen | 274.304.111,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mensukses kan Pemilu Serentak dan PON 2024 | Komponen Masyarakat, Partai Politik, Perangkat Gampong, Mahasiswa dan Pelajar | | 561.966.438,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.1.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 15 Dokumen | 127.079.084.675,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukses kan Pemilu Serentak dan PON 2024 | Komponen Masyarakat, Partai Politik, Perangkat Gampong, Mahasiswa dan Pelajar | | 688.798.218,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 2980 Orang | 695.143.954,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | Komponen Masyarakat, Partai Politik, Perangkat Gampong, Mahasiswa dan Pelajar | | 793.510.773,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 150 Orang | 804.889.336,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | Komponen Masyarakat, Partai Politik, Perangkat Gampong, Mahasiswa dan Pelajar | | 5.709.309.696,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 6 Laporan | 265.949.442,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mensukseskan Pemilu Serentak dan PON 2024 | Komponen Masyarakat, Partai Politik, Perangkat Gampong, Mahasiswa dan Pelajar | | 562.829.442,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | ***Persentase Pembinaan LSM/ORMAS*** | **-** | | | **22,00 %** | **1.055.329.540,00** | | | | | | **-** | **2.310.000.000,00** | |
| | 8.01.04.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Jumlah Dokumen Tatacara Pendaftaran Ormas, LSM dan Pengawasan SIORMAS dan SIOLA, adanya Database Ormas, LSM yang terkoneksi dengan Siormas, terciptanya Peningkatan Penguatan Kapasitas Ormas* | - | | | 1 Dokumen | 1.055.329.540,00 | | | - | - | Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ormas/LSM dan Yayasan | - | 2.310.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja Bibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 139.138.659,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ormas/LSM dan Yayasan | | 405.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.1.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 406.460.412,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ormas/LSM dan Yayasan | | 525.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 1190 Orang | 465.515.447,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ormas/LSM dan Yayasan | | 1.200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 60 Orang | 44.215.022,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ormas/LSM dan Yayasan | | 180.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | ***Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba*** | **-** | | | **44,98 %** | **2.311.699.467,00** | | | | | | **-** | **2.647.992.092,00** | |
| | 8.01.05.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan kegiatan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan umat beragama dan penyalahgunaan narkoba* | - | | | 70 Kecamatan | 2.311.699.467,00 | | | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | - | 2.647.992.092,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 175.459.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 328.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.1.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 566.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 630.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 1150 Orang | 980.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 1.153.892.092,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 150 Orang | 246.504.426,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 253.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 1 Laporan | 343.736.041,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pendidik dan Peserta Didik | | 282.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | ***Persentase penanganan potensi konflik sosial*** | **-** | | | **75 %** | **2.500.178.136,00** | | | | | | **-** | **4.600.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.06.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Jumlah Dokumen Hasil Capaian Potensi Penanganan Konflik Aceh dan berkurangnya potensi konflik di Aceh* | - | | | 6 Dokumen | 2.500.178.136,00 | | | - | - | Instansi Terkait, Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Forum-Forum yang ada di Kab/Kota | - | 4.600.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 539.625.102,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Instansi Terkait, Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Forum-Forum yang ada di Kab/Kota | | 617.888.932,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 499.615.078,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Instansi Terkait, Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Forum-Forum yang ada di Kab/Kota | | 625.337.532,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 800 Orang | 465.427.124,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Instansi Terkait, Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Forum-Forum yang ada di Kab/Kota | | 415.955.932,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 160 Orang | 481.546.615,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Instansi Terkait, Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Forum-Forum yang ada di Kab/Kota | | 623.165.932,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.06.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 5 Laporan | 230.696.300,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Instansi Terkait, Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Forum-Forum yang ada di Kab/Kota | | 504.080.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 283.267.917,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Instansi Terkait, Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Forum-Forum yang ada di Kab/Kota | | 1.813.571.672,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH** | | | | | | **57.081.334.523,00** | | | | | | | **25.073.152.081,00** | |
| | **9** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **57.081.334.523,00** | | | | | | | **25.073.152.081,00** | |
| | **9.01** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **57.081.334.523,00** | | | | | | | **25.073.152.081,00** | |
| 1. | **9.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **10.650.544.822,00** | | | | | | **-** | **12.519.530.469,00** | |
| | 9.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.935.765.149,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.298.825.164,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 877.756.291,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 355.015.420,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 1.058.008.858,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 943.809.744,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.370.328.239,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 8.377.899.569,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 87 Orang/ Bulan | 4.135.119.435,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 7.097.815.485,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 2 Dokumen | 125.015.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.129.395.300,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 4 Dokumen | 110.193.804,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 150.688.784,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 533.522.591,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 198.024.850,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 75 Orang | 533.522.591,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 198.024.850,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 274.425.834,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 550.363.527,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.828.672,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 10.623.078,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 94.655.210,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.241.462,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 31.733.640,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100% Laporan | 15.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 140.329.200,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 100% Dokumen | 144.941.952,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 159.436.147,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 210.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 52.567.599,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 100% Unit | 210.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 52.567.599,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.924.114.420,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.612.697.805,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 100% Laporan | 2.574.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 9.438.000,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 100% Laporan | 263.858.336,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 255.044.170,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 100% Laporan | 2.657.682.084,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.348.215.635,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 402.388.589,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 429.151.955,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 100% Unit | 331.851.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 310.036.100,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 100% Unit | 45.371.221,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 49.908.343,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 100% Unit | 25.166.368,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 69.207.512,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| 2. | **9.01.05** | **PROGRAM REINTEGRASI ACEH** | **-** | **-** | | | **-** | **46.430.789.701,00** | | | | | | **-** | **12.553.621.612,00** | |
| | 9.01.05.7.01 | Konsolidasi Perdamaian Aceh | - | - | | | - | 6.627.533.532,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 7.097.815.485,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.01.0001 | Penguatan Reintegrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Reintegrasi* | | | | 1 Dokumen | 6.627.533.532,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 7.097.815.485,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.02 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik | - | - | | | - | 24.106.763.179,00 | | | - | - | - | - | 407.443.497,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.02.0001 | Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Konflik yang Diberdayakan Ekonominya* | | | | 1200 orang Laporan | 23.828.714.499,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | - | - | | 211.589.949,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.02.0002 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan* | | | | 1 Laporan | 278.048.680,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 195.853.548,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.03 | Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik | - | - | | | - | 14.512.294.821,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.391.568.303,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.03.0001 | Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Konflik yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial* | | | | 242 Orang | 11.279.415.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 100.600.500,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.03.0002 | Perlindungan Sosial Korban Konflik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Konflik yang Mendapatkan Perlindungan* | | | | 444 Orang | 3.232.879.821,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 4.290.967.803,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.04 | Pendidikan Damai | - | - | | | - | 1.043.486.417,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 502.011.400,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.04.0001 | Peringatan Hari Damai Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peringatan Hari Damai Aceh* | | | | 1 Laporan | 1.043.486.417,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 502.011.400,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.05 | Pencegahan dan Mitigasi Konflik | - | - | | | - | 140.711.752,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 154.782.927,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | 9.01.05.7.05.0001 | Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki* | | | | 1 Laporan | 140.711.752,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 154.782.927,00 | SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH |
| | | **DINAS SYARIAT ISLAM ACEH** | | | | | | **53.032.999.662,00** | | | | | | | **66.636.779.927,00** | |
| | **9** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **53.002.999.662,00** | | | | | | | **66.486.779.927,00** | |
| | **9.01** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **53.002.999.662,00** | | | | | | | **66.486.779.927,00** | |
| 1. | **9.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **21.742.869.010,00** | | | | | | **-** | **24.768.779.927,00** | |
| | 9.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 360.160.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 10 Dokumen | 244.960.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 10 Laporan | 115.200.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 13.248.209.622,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 14.100.779.927,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 96 Orang/ Bulan | 12.101.779.927,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 12.800.779.927,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 14 Dokumen | 1.146.429.695,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 90.676.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 88 Orang | 90.676.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.453.886.944,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.140.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 57.164.026,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 100.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 371.056.890,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 126.514.140,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 284.618.286,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 140.586.602,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 35.400.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 40.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 438.547.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 600.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.475.229.960,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 1.475.229.960,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.774.501.068,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.128.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 310 Laporan | 23.210.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 28.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 2.404.345.928,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.600.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.346.945.140,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.340.205.416,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.700.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 468.558.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 727.646.416,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 144.001.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| 2. | **9.01.02** | **PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH** | **-** | **-** | | | **-** | **31.260.130.652,00** | | | | | | **-** | **41.718.000.000,00** | |
| | 9.01.02.7.01 | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | - | - | | | - | 461.554.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 800.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.01.0002 | TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Guru Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman* | | | | 50 Orang | 179.582.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.01.0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam* | | | | 50 Orang | 152.900.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.01.0005 | Seminar Problematika Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam* | | | | 80 Orang | 129.072.000,00 | - Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.02 | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran | - | - | | | - | 5.811.203.919,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 11.300.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.02.0001 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan* | | | | 60 Orang | 150.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 300.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.02.0004 | Pelaksanaan MTQ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ* | | | | 60 Orang | 871.579.141,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.02.0005 | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Dilaksanakan* | | | | 260 Orang | 1.617.532.296,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.02.0006 | Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kafilah Aceh yang Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan* | | | | 100 Orang | 3.172.092.482,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04 | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam | - | - | | | - | 15.103.258.274,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 14.018.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04.0001 | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam* | | | | 3 Dokumen | 2.674.018.912,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04.0002 | Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Dibina* | | | | 183 Orang | 9.653.420.000,00 | - Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Singkil, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Simeulue, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Subulussalam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 10.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04.0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat kualitasnya* | | | | 50 Orang | 1.278.452.001,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04.0005 | Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan* | | | | 80 Orang | 322.255.400,00 | - Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Langsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04.0007 | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina* | | | | 2 Gampong | 465.253.961,00 | - Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pidie Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04.0009 | Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan* | | | | 1 Laporan | 15.500.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 18.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.02.7.04.0011 | Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi* | | | | 1 Unit | 533.780.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.04.0012 | Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir* | | | | 1000 Unit | 160.578.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.05 | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam | - | - | | | - | 2.794.614.040,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 2.600.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.05.0001 | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman* | | | | 8 Laporan | 2.105.020.040,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.05.0004 | Pembinaan Keluarga Islami | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan* | | | | 145 Keluarga | 259.594.000,00 | - Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 350.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.05.0005 | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina* | | | | 50 Pelaku Ekonomi | 430.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.02.7.06 | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam | - | - | | | - | 2.300.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 4.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.06.0001 | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam* | | | | 2 Laporan | 140.000.000,00 | - Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.06.0002 | Bimbingan Teknis Peradilan Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam* | | | | 200 Orang | 850.000.000,00 | - Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.06.0005 | Penyusunan Regulasi Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun* | | | | 5 Dokumen | 1.200.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke - Kab. Gayo Lues, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Subulussalam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.06.0006 | Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam* | | | | 60 Laporan | 110.000.000,00 | - Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.02.7.07 | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh | - | - | | | - | 4.789.500.419,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 9.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.07.0001 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman* | | | | 6 Lembaga | 1.940.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.07.0006 | Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelayanan BLUD* | | | | 1 Laporan | 2.000.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.07.0007 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara rutin/berkala* | | | | 1 Unit | 51.015.862,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | 9.01.02.7.07.0008 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala* | | | | 3 Unit | 798.484.557,00 | - Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **30.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | **-** | **-** | | | | | | **30.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| 1. | **-** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **30.000.000,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | - | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 30.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM ACEH |
| | | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH** | | | | | | **16.662.807.741,00** | | | | | | | **16.411.510.013,00** | |
| | **9** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **16.662.807.741,00** | | | | | | | **16.411.510.013,00** | |
| | **9.01** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **16.662.807.741,00** | | | | | | | **16.411.510.013,00** | |
| 1. | **9.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **9.492.022.164,00** | | | | | | **-** | **8.244.570.013,00** | |
| | 9.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 399.564.950,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 208.080.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 285.864.950,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 113.700.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.080.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.509.981.459,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 3.400.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 37 Orang/ Bulan | 5.509.981.459,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.400.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 42.047.937,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 198.021.413,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 48 Paket | 42.047.937,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 198.021.413,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 599.884.457,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.126.612.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.996.147,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 221.300.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 312.120.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 49.962.310,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 135.252.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 24.996.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 293.630.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 624.240.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 128.874.086,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 291.312.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 128.874.086,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 291.312.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.080.343.385,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.980.144.600,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Bulan Laporan | 10.975.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 11.964.600,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Laporan | 404.990.400,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 468.180.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Laporan | 1.664.377.985,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 731.325.890,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.040.400.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 21 Unit | 609.318.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 572.220.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.024.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 312.120.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 71.983.890,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 156.060.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| 2. | **9.01.03** | **PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH** | **-** | **-** | | | **-** | **7.170.785.577,00** | | | | | | **-** | **8.166.940.000,00** | |
| | 9.01.03.7.01 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | - | - | | | - | 6.222.821.682,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 7.064.116.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0001 | Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama* | | | | 12 Laporan | 471.000.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 520.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0002 | Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama* | | | | 6 Dokumen | 4.310.058.219,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 4.525.740.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0003 | Pendidikan Kader Ulama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan* | | | | 48 Orang | 840.395.684,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 832.320.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0004 | Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama* | | | | 1 Laporan | 50.577.970,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 124.848.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0006 | Pengkajian Aliran Sempalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan* | | | | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.080.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0009 | Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan* | | | | 12 Dokumen | 325.633.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 520.200.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0011 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam* | | | | 30 Orang | 85.155.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.080.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.01.0012 | Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan* | | | | 12 Laporan | 40.001.205,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 124.848.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.02 | Silaturahmi Ulama-Ulama | - | - | | | - | 83.090.160,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 166.464.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.02.0002 | Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah* | | | | 45 Orang | 83.090.160,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 166.464.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.03 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama | - | - | | | - | 864.873.735,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 936.360.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.03.0001 | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal* | | | | 2 Dokumen | 252.253.302,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 208.080.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.03.0002 | Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal* | | | | 250 Dokumen | 416.114.988,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 520.200.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.03.0003 | Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal* | | | | 1 Dokumen | 61.359.252,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 52.020.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.03.0004 | Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Unit | 54.780.284,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkuem | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 52.020.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | 9.01.03.7.03.0005 | Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal* | | | | 40 Orang | 80.365.909,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 104.040.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH |
| | | **KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH** | | | | | | **26.967.098.699,00** | | | | | | | **32.908.826.671,00** | |
| | **9** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **26.967.098.699,00** | | | | | | | **32.908.826.671,00** | |
| | **9.01** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **26.967.098.699,00** | | | | | | | **32.908.826.671,00** | |
| 1. | **9.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **-** | **-** | | | **-** | **17.596.068.777,00** | | | | | | **-** | **24.907.851.988,00** | |
| | 9.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 153.116.455,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 890.460.473,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 37.737.854,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 115.378.601,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 890.460.473,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.656.081.972,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 7.182.582.900,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 34 Orang/ Bulan | 5.567.774.242,00 | - Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 7.182.582.900,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 88.307.730,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 0,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 259.058.684,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.454.735.689,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 179 Orang | 259.058.684,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.454.735.689,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.500.003.134,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 9.181.596.901,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 142.143.660,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 121.129.061,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 75.396.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 1.789.660.579,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 1.652.380.293,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 4.208.812.839,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 41.108.732,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 43.624.915,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.588.974.449,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 3.018.369.507,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.006.346.293,00 | | | - | - | - | - | 1.100.105.930,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 880.446.293,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | - | - | | 942.714.114,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Laporan | 2.125.900.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | - | - | | 157.391.816,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.021.462.239,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 5.098.370.095,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 42 Unit | 1.334.475.000,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 975.666.312,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 686.987.239,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 4.122.703.783,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| 2. | **9.01.06** | **PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH** | **-** | **-** | | | **-** | **9.371.029.922,00** | | | | | | **-** | **8.000.974.683,00** | |
| | 9.01.06.7.01 | Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh | - | - | | | - | 8.144.380.010,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 6.091.998.249,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.06.7.01.0003 | Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe yang Disusun* | | | | 5 Dokumen | 199.999.930,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 388.812.071,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.06.7.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Wali Nanggroe yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas* | | | | 139 Orang | 7.944.380.080,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 5.703.186.178,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.06.7.02 | Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh | - | - | | | - | 278.798.662,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 1.268.247.600,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.06.7.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh* | | | | 5 Laporan | 22.316.882,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 477.543.600,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.06.7.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki* | | | | 1 Laporan | 256.481.780,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 790.704.000,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.06.7.03 | Peradaban dan Tamadhun Aceh | - | - | | | - | 947.851.250,00 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | - | 640.728.834,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | 9.01.06.7.03.0002 | Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Dibina* | | | | 1 Unit | 947.851.250,00 | - Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI ACEH | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | - | | 640.728.834,00 | KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH |
| | | **SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH** | | | | | | **126.296.224.286,00** | | | | | | | **129.570.111.014,59** | |
| | **9** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **126.296.224.286,00** | | | | | | | **129.570.111.014,59** | |
| | **9.01** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **126.296.224.286,00** | | | | | | | **129.570.111.014,59** | |
| 1. | **9.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | ***Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran*** | **-** | | | **95 %** | **13.854.650.474,00** | | | | | | **-** | **14.270.289.988,23** | |
| | 9.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 15 Dokumen | 819.453.135,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 844.036.729,05 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 270.291.050,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 278.399.781,50 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 6 Dokumen | 293.299.050,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 302.098.021,50 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 255.863.035,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 263.538.926,05 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai* | - | | | 95 % | 5.450.767.750,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.614.290.782,51 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/ Bulan | 5.325.610.233,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 5.485.378.540,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 125.157.517,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 128.912.242,51 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur* | - | | | 100 % | 141.992.700,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 146.252.481,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 141.992.700,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 146.252.481,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Apartur* | - | | | 100 % | 1.712.573.819,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 1.763.951.033,57 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 42.393.546,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 43.665.352,38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 359.796.243,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 370.590.130,29 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.072.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 7.284.675,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 520.849.097,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 536.474.569,91 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 85.773.400,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 88.346.602,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 15.428.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 15.891.355,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 681.260.533,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 701.698.348,99 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 3 Laporan | 4.880.930.870,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 5.027.358.796,10 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 20.410.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 21.022.300,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 266.946.870,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 274.955.276,10 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 4.593.574.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 4.731.381.220,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 33 Unit | 848.932.200,00 | | | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 874.400.166,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 23 Unit | 447.158.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 460.572.740,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 324.581.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 334.318.430,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 100 Unit | 77.193.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | | 79.508.996,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| 2. | **9.01.04** | **PROGRAM BAITUL MAL ACEH** | ***Rasio Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya*** | **-** | | | **80 %** | **112.441.573.812,00** | | | | | | **-** | **115.299.821.026,36** | |
| | 9.01.04.7.01 | Pengelolaan ZISWAF | *Tersusunnya dokumen pengelolaan ZIWaH serta pengawasan perwalian secara tepat waktu dan tepat sasaran.* | - | | | 90 % | 1.252.361.504,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 1.289.932.349,12 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.01.0001 | Penyusunan Perencanaan ZISWAF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Ziswaf yang Disusun* | | | | 4 Dokumen | 1.252.361.504,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 1.289.932.349,12 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.02 | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | *Persentase Peningkatan pendapatan Zakat, Infaq, Wakaf, Harta Agama Lainnya dan Perwalian* | - | | | 5 % | 930.414.012,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 958.326.432,36 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.02.0001 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf* | | | | 200 Orang | 466.477.406,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 480.471.728,18 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.02.0002 | Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 146.553.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 150.949.590,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.02.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM* | | | | 1 Dokumen | 143.097.178,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 147.390.093,34 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.02.0004 | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal* | | | | 1 Dokumen | 174.286.428,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 179.515.020,84 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03 | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | *Persentase Peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Wakaf, Harta Agama Lainnya dan Perwalian* | - | | | 5 % | 110.258.798.296,00 | | | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | - | 113.051.562.244,88 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0001 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir* | | | | 760 Orang | 5.472.000.000,00 | - Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 5.636.160.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0002 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin* | | | | 20000 Orang | 39.079.200.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 40.251.576.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0003 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil* | | | | 32 Orang | 784.500.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | - | - | - | | 808.035.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0004 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf* | | | | 181 Orang | 5.768.900.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 5.941.967.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0005 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin* | | | | 850 Orang | 2.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 2.060.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0006 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah* | | | | 481 Orang | 4.250.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 4.377.500.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0007 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir* | | | | 2126 Orang | 9.645.400.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | - | - | - | | 9.934.762.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0008 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq* | | | | 200 Orang | 43.000.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF, DANA OTONOMI KHUSUS | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 43.775.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | 9.01.04.7.03.0009 | Pengelolaan Wakaf | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf* | | | | 1 Laporan | 258.798.296,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif | - | | 266.562.244,88 | SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH |
| | **J U M L A H** | | | | | | | **10.330.239.031.346,00** | | | | | | | **10.747.335.879.324,37** | |

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureu-Eh No 26
Telp (06451) 21440 (hunting). Fax. 33654
email : bappeda@acehprov.go.id

GUBERNUR ACEH

# LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024

BUKU

2